# RENCANA
# STRATEGIS

## KEMENTERIAN AGAMA
## 2025-2029

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

# KATA PENGANTAR



Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A
Menteri Agama RI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini lahir dari refleksi mendalam, evaluasi menyeluruh, serta ikhtiar kolektif untuk menghadirkan tata kelola kehidupan beragama dan pendidikan yang semakin maslahat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pandangan agama, pembangunan bukan sekadar agenda teknokratis, tetapi merupakan amanah spiritual (amanah ilahiyah) yang menuntut keadilan, keberkahan, dan kemanfaatan. Karena itu, setiap rencana dan kebijakan dalam Renstra ini diletakkan di atas prinsip bahwa agama harus memuliakan manusia, memperkuat persaudaraan, menghapus kesenjangan, serta menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Nilai-nilai seperti ta'awun (saling menolong), rahmah (kasih sayang), dan al-'adl (keadilan) menjadi landasan moral dalam setiap langkah yang kita tempuh.

Visi "Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045" bukan hanya rumusan formal, melainkan refleksi dari cita-cita luhur bangsa: membangun masyarakat yang kokoh dalam iman, lapang dalam toleransi, kuat dalam solidaritas, dan unggul dalam ilmu pengetahuan. Kerukunan dan kemaslahatan adalah wujud nyata kehadiran agama dalam kehidupan publik; sedangkan kecerdasan adalah bekal untuk menapaki masa depan yang lebih baik.

Renstra ini juga memuat misi besar: meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan maslahat; memperluas akses dan mutu pendidikan berciri khas agama; serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ketiga misi tersebut saling melengkapi: agama menjadi kompas moral, pendidikan menjadi wahana pemberdayaan, dan tata kelola menjadi instrumen menjaga kepercayaan publik.

Sebagai komitmen implementatif mengacu pada Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, saya menetapkan Asta Protas Menteri Agama yang terdiri atas delapan prioritas strategis:

1. Meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan.
2. Penguatan ekoteologi.
3. Layanan keagamaan yang berdampak.
4. Pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi.
5. Pesantren berdaya.
6. Pemberdayaan ekonomi umat.
7. Pemberdayaan Rumah Ibadah Ramah dan Inklusif
8. Digitalisasi Tata Kelola.

Seluruh prioritas ini dirancang agar agama tidak berhenti sebagai simbol, tetapi menjadi energi perubahan. Dengan demikian, kehadiran Kementerian Agama benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan yang lebih cepat, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Renstra 2025–2029 menjadi pedoman bersama yang menghadirkan perubahan bermakna, menghadirkan agama sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan memperluas kemaslahatan.

Jakarta,  Desember 2025
Menteri Agama RI

**Nasaruddin Umar**

**RANCANGAN**
**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**NOMOR 17 TAHUN 2025**
**TENTANG**
**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029**
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMATENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029.

**Pasal 1**

Rencana Strategis Kementerian Agarna Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

**Pasal 2**

1. Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029.
2. Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 4**

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai pedoman bagi Unit Eselon I dan satuan kerja lainnya dalam melakukan penyusunan:

a. rencana strategis satuan kerja;
b. program prioritas menteri;
c. rencana kerja tahunan;
d. rencana kerja anggaran;
e. perjanjian kinerja;
f. pohon kinerja organisasi;
g. sasaran kinerja pegawai; dan
h. dokumen perencanaan serta kebijakan lainnya.

**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2025
**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**NASARUDDIN UMAR**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2025

**DIREKTUR JENDERAL**
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**DHANAN PUTRA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1030**

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kementerian Agama Republik Indonesia**
**Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri**

**Imam Syaukani, S.Ag.,M.H.**
NIP.197112142000031002

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 8
DAFTAR TABEL 10
DAFTAR GAMBAR 11

01
PENDAHULUAN 12

A. KONDISI UMUM 14
1. Kondisi Umum Bidang Agama 14
2. Kondisi Umum Bidang Pendidikan 24
3. Kondisi Umum Bidang Tata Kelola Pemerintahan 53
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 55
1. Kerukunan Umat Beragama dan Harmonisasi Sosial 55
2. Kualitas Layanan Keagamaan Transformatif 58
3. Akses Pendidikan yang Merata 60
4. Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah 62
5. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 63
6. Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan 65
7. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel 66

02
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA 68

A. VISI KEMENAG 70
B. MISI KEMENTERIAN AGAMA 71
C. TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA 73
D. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA 74
E. IDENTIFIKASI RISIKO PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 76

03
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 88

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 90
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA 96
1. Peningkatan masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial 102
2. Peningkatan Layanan Keagamaan Transformatif 104
3. Peningkatan pemerataan akses pendidikan. 105
4. Peningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 108
5. Peningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas 110
C. KERANGKA REGULASI 113
D. KERANGKA KELEMBAGAAN 125

## 04
## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 138

A. TARGET KINERJA 140
   1. Program Dukungan Manajemen 140
   2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 140
   3. Program Wajib Belajar 13 Tahun 144
   4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 144
   5. Program Pendidikan Tinggi 148

B. KERANGKA PENDANAAN 150

## 05
## PENUTUP 154

## 06
## LAMPIRAN 156

LAMPIRAN I 158
LAMPIRAN II 592
LAMPIRAN III 604
LAMPIRAN IV 614




# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1.1. | Capaian Indeks Kesalehan Umat Beragama, 2020-2024 | 15 |
| Tabel 1.2. | Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama, 2021-2024 | 17 |
| Tabel 1.3. | Capaian Penanganan Konflik Antarumat Beragama, 2020-2024 | 17 |
| Tabel 1.4. | Capaian Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya, Tahun 2021-2024 | 19 |
| Tabel 1.5. | Capaian Indeks Kepuasan Layanan KUA, 2020-2024 | 20 |
| Tabel 1.6. | Capaian Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal, 2021-2024 | 22 |
| Tabel 1.7. | Persentase Pemanfaatan Dana Sosial Keagamaan untuk Mendukung Layanan Pendidikan dan Keagamaan, 2020-2024 | 23 |
| Tabel 1. 8 | Jumlah Siswa dan APK pada Satuan Pendidikan, 2024 | 25 |
| Tabel 1. 9 | Jumlah Siswa dan APM pada Satuan Pendidikan, 2024 | 26 |
| Tabel 1. 10 | Rata-Rata Nilai AN Literasi dan Numerasi Siswa Madrasah, 2021-2024 | 30 |
| Tabel 1. 11 | Persentase Siswa dengan Kompetensi Minimum dalam AN, 2021-2024 | 31 |
| Tabel 1.12. | Guru Bersertifikat Pendidik Pada RA, MI, MTs, dan MA | 34 |
| Tabel 1. 13 | Karakter Peserta Didik dan Iklim Kebhinekaan Satuan Pendidikan di Bawah Kemenag, 2024 | 36 |
| Tabel 1. 14 | Capaian dan Kesenjangan Iklim Inklusivitas Satuan Pendidikan di Bawah Kemenag, 2024 | 38 |
| Tabel 1.15 | Jumlah Lembaga dan Santri Pendidikan Keagamaan Islam | 39 |
| Tabel 1.16 | Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, 2024 | 40 |
| Tabel 1. 17 | Jumlah Satuan Pendidikan Berbasis Pesantren dan Santri, 2024 | 41 |
| Tabel 1. 18 | Rata-Rata Skor Siswa PKPPS Ula, Wustha, dan Ulya pada Asesmen Nasional Tahun 2021-2024 | 42 |
| Tabel 1. 19 | Jabatan Fungsional Dosen PTKN dan PTKS | 44 |
| Tabel 1.20 | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel Tahun 2020-2024 | 53 |
| Tabel 1. 21 | Persentase Penelitian yang Dijadikan Dasar Kebijakan Tahun 2020-2024 | 55 |
| Tabel 1. 22 | Potensi dan Permasalahan Peningkatan Pemahaman dan Praktik Beragama Jalan Tengah | 56 |
| Tabel 1. 23 | Potensi dan Permasalahan SWOT Peningkatan Layanan Keagamaan Transformatif | 58 |
| Tabel 1. 24 | Potensi dan Permasalahan Pemerataan Akses Pendidikan | 60 |
| Tabel 1. 25 | Potensi dan Permasalahan Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah | 62 |
| Tabel 1. 26 | Potensi dan Permasalahan Pengelolaan dan Penempatan Guru | 63 |
| Tabel 1. 27 | Potensi dan Permasalahan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan | 65 |
| Tabel 1. 28 | Potensi dan Permasalahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel | 66 |
| Tabel 2. 1 | Tujuan 1 | 74 |
| Tabel 2. 2 | Tujuan 2 | 74 |
| Tabel 2. 3 | Tujuan 3 | 75 |
| Tabel 2. 4 | Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis | 76 |
| Tabel 3. 1 | Arah Kebijakan Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan Kemenag | 95 |
| Tabel 3. 2 | Jadwal Program Prioritas Kementerian Agama | 106 |
| Tabel 3. 3 | Unit Kerja Baru Kementerian Agama | 127 |
| Tabel 3. 4 | Rencana Kerangka Kelembagaan Strategis Kementerian Agama 2025-2029 | 128 |
| Tabel 4. 1 | Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Agama 2025-2029 | 151 |

# DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Perkembangan Indeks Kesalehan Umat Beragama, 2020-2024 | 16 |
| Gambar 1. 2 | Indeks Kerukunan Umat Beragama, 2020-2024 | 18 |
| Gambar 1. 3 | Status Akreditasi Satuan Pendidikan (%) | 35 |
| Gambar 1. 4 | Perkembangan APK PTK dan Ma'had Aly | 43 |
| Gambar 1. 5 | Persentase PTK/Ma'had Aly dengan Status Akreditasi/Asesmen Unggul | 45 |
| Gambar 1.6 | PTK dengan Prodi Terakreditasi Internasional (%) | 46 |
| Gambar 1. 7 | Persentase Lulusan PTK yang Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan | 50 |
| Gambar 1. 8 | Persentase Sitasi Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional | 52 |
| Gambar 3. 1 | Agenda Transformasi RPJPN | 91 |
| Gambar 3. 2 | Asta Cita sebagai prioritas Pembangunan Nasional | 92 |
| Gambar 3. 3 | Asta Protas Menteri Agama 2025-2029 | 96 |

# 01


A. KONDISI UMUM 14

1. Kondisi Umum Bidang Agama 14
2. Kondisi Umum Bidang Pendidikan 24
3. Kondisi Umum Bidang Tata Kelola Pemerintahan 53

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 55

1. Kerukunan Umat Beragama dan Harmonisasi Sosial 55
2. Kualitas Layanan Keagamaan Transformatif 58
3. Akses Pendidikan yang Merata 60
4. Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah 62
5. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 63
6. Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan 65
7. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel 66






# PENDAHULUAN

# PENDAHULUAN

Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam meningkatkan pembangunan nasional dan menciptakan masyarakat yang rukun, cerdas dan maslahat. Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025-2029 ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi yang akan diterapkan dalam lima tahun ke depan. Renstra ini menaruh perhatian khusus pada upaya pencapaian RPJMN dan mempertegas peran Kementerian Agama dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi besar "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Renstra Kementerian Agama mendukung pencapaian program pemerintah di sektor pembangunan agama dan pendidikan.

Dalam pembangunan bidang agama, Kemenag menaruh perhatian utama pada kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; kerukunan umat beragama; keselarasan relasi agama dan budaya; kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat. Untuk pembangunan bidang pendidikan, Kemenag menaruh perhatian utama pada peningkatan akses pendidikan berkualitas dan mutu pembelajaran pada lembaga pendidikan di bawah Kemenag, yang terdiri sekolah umum dengan kekhasan agama, pendidikan agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren, serta perguruan tinggi keagamaan (PTK). Khusus untuk PTK, Kemenag juga menaruh perhatian pada peningkatan daya saing lulusan.

## A. KONDISI UMUM

### 1. Kondisi Umum Bidang Agama

Terdapat dua sasaran strategis (SS) bidang agama dan keagamaan untuk mendorong pencapaian visi misi Kemenag: Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial (SS1); dan Meningkatkan layanan keagamaan transformatif (SS2). Bagian berikut memaparkan kondisi aktual kehidupan masyarakat terkait kedua sasaran strategis tersebut.

#### a. Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang baik diperlukan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang heterogen. Dalam hal ini, literasi keagamaan yang kuat menjadi fondasi penting untuk mendorong praktik keagamaan yang lebih bijak dalam kehidupan sosial. Dengan literasi yang memadai, masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian sosial, menjunjung tinggi etika dan budi pekerti di ruang publik, serta mematuhi aturan sosial maupun negara.

Tabel 1.1 menunjukkan skor Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKsUB) mencapai 83,83 pada 2024. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai IKsUB tahun 2023 (82,59) namun lebih rendah dari capaian tahun 2022 (84,55). Capaian tahun 2024 juga lebih rendah dari target yang ditetapkan (86,08). Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kesenjangan antara target dan realisasi pada 2024 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2023. Padahal, tahun 2023 merupakan tahun kritis di mana persentase capaian menurun sebesar 2,87 poin persentase dari tahun sebelumnya, menjadi 96,51%. Penurunan Indeks Kesalehan Umat Beragama tahun 2023 dapat diatasi melalui penguatan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, peningkatan toleransi di ruang publik, serta optimalisasi program pembinaan keagamaan yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Selain itu, pengelolaan isu-isu keagamaan secara bijak serta peningkatan literasi digital akan berkontribusi signifikan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas perilaku keagamaan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun realisasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan, penurunan yang sempat terjadi sebelumnya telah berhasil diatasi.

**Tabel 1.1.**
**Capaian Indeks Kesalehan Umat Beragama, 2020-2024**

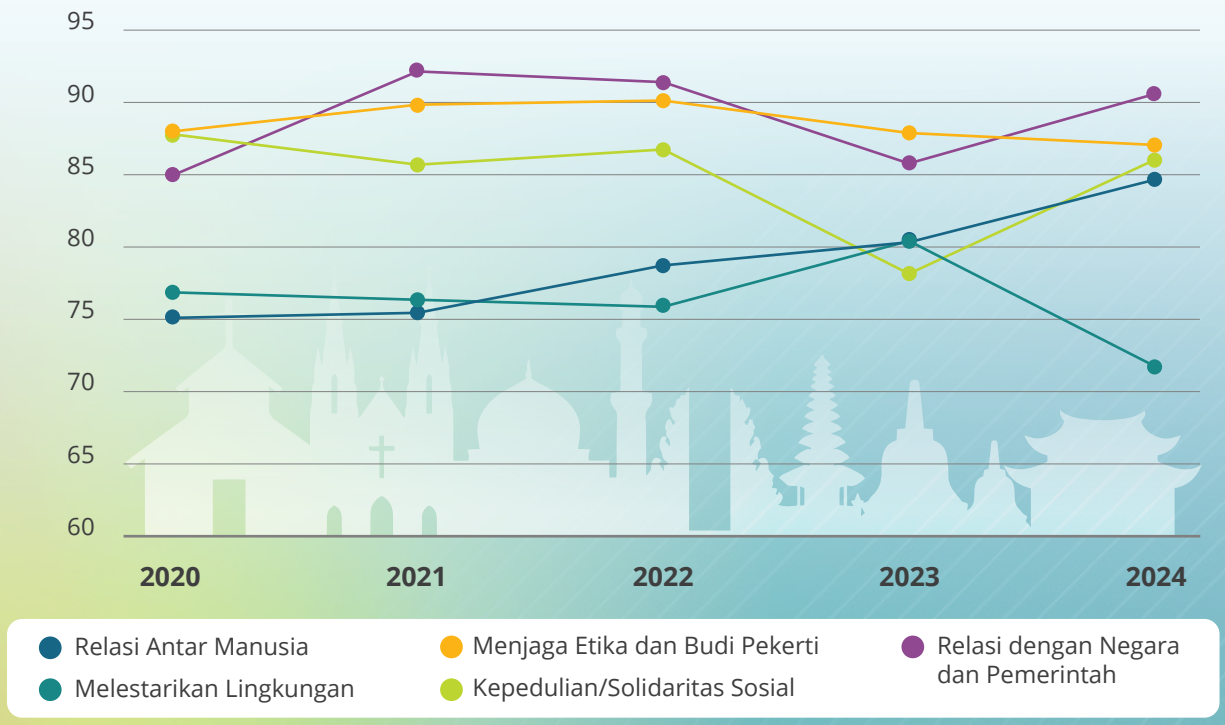
| Capaian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target | 84.08 | 84.58 | 85.08 | 85.58 | 86.08 |
| Realisasi | 82.53 | 83.92 | 84.55 | 82.59 | 83.83 |
| **Laporan PKUB Tahun 2024** | **98.15** | **99.22** | **99.38** | **96.51** | **97.38** |

Sumber: Laporan Kinerja Kemenag Tahun 2024

Pembangunan agama berperan penting dalam memperkokoh kohesi sosial dan harmoni masyarakat. Hal ini tercermin dari peningkatan IKUB secara signifikan sebesar 9,01 poin, dari 67,46 (2020) menjadi 76,47 (2024) dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target tahun 2025 sebesar 76,77. Tren positif ini menunjukkan keberhasilan kolektif umat dalam membangun toleransi di tengah keberagaman masyarakat

Sejalan dengan meningkatnya kerukunan antarumat beragama, penyelesaian konflik antarumat agama semakin meningkat dari 87 persen (2020) menjadi 100 persen (2024).

**Gambar 1.1**
**Perkembangan Indeks Kesalehan Umat Beragama, 2020-2024**




Sumber: Laporan Kinerja Kemenag Tahun 2024

### b. Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Moderasi beragama dan kerukunan umat beragama juga diperlukan untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Kecenderungan radikalisasi agama di beberapa kelompok tertentu berpengaruh negatif terhadap hubungan antarumat beragama dan berpotensi menurunkan tingkat toleransi serta kerukunan sosial. Untuk memotret kondisi hubungan antarumat beragama, Badan Litbang dan Diklat Kemenag melakukan survei hubungan antarumat beragama dari tahun ke tahun. Tabel 1.2 berikut menunjukkan perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dari 2020 hingga 2024.

**Tabel 1.2.**
**Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama, 2021-2024**

| Capaian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target | 73.91 | 74.00 | 74.70 | 75.00 | 75.80 |
| Realisasi | 67.46 | 72.39 | 73.09 | 76.03 | 76.47 |
| **Persentase Capaian** | **91.27** | **97.82** | **97.84** | **101.37** | **100.88** |

Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dapat diakses

IKUB terdiri atas tiga dimensi, yakni Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama. Gambar 1.2 berikut menunjukkan perkembangan masing-masing dimensi dari 2020 sampai 2024. Dimensi Toleransi dan Kerja Sama menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun, namun dimensi Kesetaraan sedikit menurun dari 77.61 pada 2023 menjadi 77.15 pada 2024. Hal ini mencerminkan tantangan Kemenag dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama.

**Tabel 1.3.**
**Capaian Penanganan Konflik Antarumat Beragama, 2020-2024**

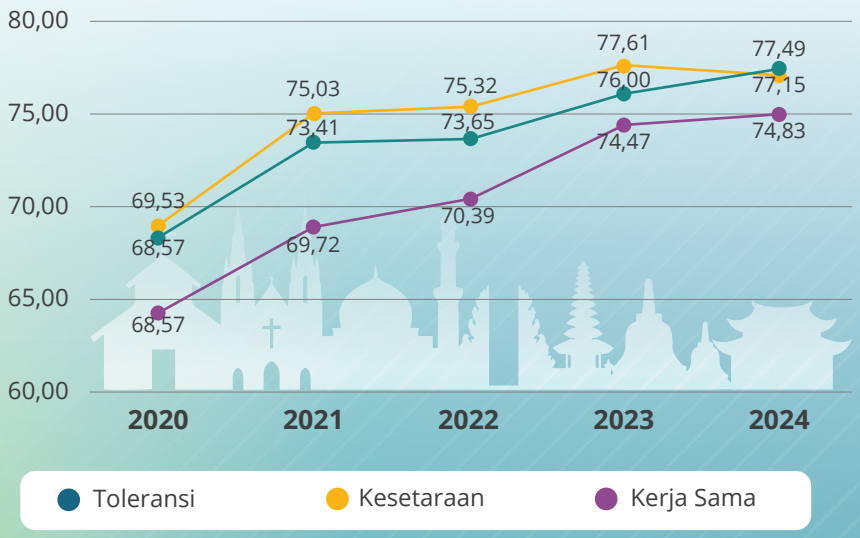
| Capaian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target | 81.00 | 81.00 | 88.00 | 90.00 | 95.00 |
| Realisasi | 87.00 | 68.61 | 88.00 | 100.00 | 100.00 |
| **Persentase Capaian** | **107.41** | **84.71** | **100.00** | **111.11** | **105.26** |

Sumber: Laporan PKUB Tahun 2024

Pencapaian tersebut dapat diraih berkat beberapa kebijakan dan program yang sudah dilaksanakan Kemenag. Kebijakan dan program tersebut mencakup antara lain: (1) Penyusunan Peta Jalan Kerukunan dan Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama; (2) Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Komunitas; (3) Pembentukan Kelompok Kerja Penyuluh Agama (Pokjaluh); (4) Peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama; (5) Penyusunan literasi keagamaan yang moderat; (6) Peningkatan kapasitas, mediasi dan pendampingan penyelesaian konflik keagamaan; (7) Akselerasi Gerakan Moderasi Beragama melalui Tahun Toleransi 2022; dan (8) Pengembangan *Religiosity Index*. Ke depan, penanganan dan pencegahan konflik akan mengandalkan *Early Warning System* (EWS), yang berperan sebagai sistem deteksi dini potensi konflik keagamaan melalui pemantauan isu, dinamika sosial, dan indikator kerawanan dari tingkat lokal hingga nasional.

**Gambar 1. 2**
**Indeks Kerukunan Umat Beragama, 2020-2024**






Sumber: Balitbang Kemenag

Upaya pembangunan bidang agama menunjukkan capaian yang belum merata pada seluruh elemen kerukunan umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja Sama. Data tahun 2020–2024 memperlihatkan bahwa dimensi Toleransi dan Kerja Sama mengalami peningkatan konsisten, sementara dimensi Kesetaraan justru mengalami sedikit penurunan dari 77,61 pada tahun 2023 menjadi 77,15 pada 2024. Sumber: Balitbang Kemenag Tahun 2024

Kerukunan umat beragama dipengaruhi oleh interaksi positif antarumat, aktivitas beribadah, pengalaman diskriminasi, rasa saling percaya, persepsi keterancaman, dan peran tokoh agama; di tengah masyarakat multikultur, keselarasan antara praktik keagamaan dan budaya perlu terus diperkuat untuk mencegah potensi konflik, tercermin dari indeks Penerimaan Umat terhadap Keragaman Budaya yang mencapai 81 pada 2024, menunjukkan penurunan risiko konflik berbasis agama dan etnis sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 1.4.

**Tabel 1.4.**
**Capaian Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya, Tahun 2021-2024**

| Capaian | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target | 65.00 | 70.00 | 72.00 | 76.00 |
| Realisasi | 72.38 | 76.20 | 83.06 | 81.00 |
| Persentase Capaian | 111.35 | 108.86 | 115.36 | 106.57 |

Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2024

Peningkatan penerimaan umat terhadap keragaman budaya dapat diraih, antara lain, berkat beberapa kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Kemenag dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan dan progam ini mencakup, antara lain: (1) Penguatan Dialog Lintas Agama dan Seni Budaya; (2) Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama; (3) Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Bernafas Agama; dan (4) Peningkatan Peran Organisasi Sosial Keagamaan. Ke depan, Kemenag perlu melakukan pendekatan yang lebih inklusif dalam memperkuat pemahaman bahwa budaya dan agama bisa saling mendukung. Diperlukan program edukasi dan dialog antar tokoh agama dan budaya untuk menemukan titik temu antara tradisi lokal dan ajaran agama. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan dan melestarikan budaya yang bernafaskan agama, serta meminimalkan benturan antara praktik budaya dan ajaran agama.

### c. Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Kementerian Agama menyelenggarakan berbagai layanan pokok terkait kehidupan keagamaan, meliputi Kantor Urusan Agama, Ibadah Haji, Jaminan Produk Halal, pemberdayaan rumah ibadah, pengadaan dan distribusi kitab suci, penguatan lembaga keagamaan, peningkatan kompetensi tokoh agama, serta pengembangan Ekonomi Keagamaan Umat.

1) Kementerian Agama berperan aktif dalam pemberdayaan dan pembangunan rumah ibadah serta pemenuhan kebutuhan kitab suci bagi umat sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan. Melalui dukungan infrastruktur, pendampingan pengelolaan, dan fasilitasi sarana ibadah, Kemenag mendorong rumah ibadah menjadi pusat kegiatan keagamaan yang aman, nyaman, dan inklusif. Selain itu, penyediaan dan distribusi kitab suci secara merata, termasuk pusat Khonghucu sebanyak 1.000 eksemplar, Ditjen Bimas Islam 497.853, Ditjen Bimas Kristen 33.855, Ditjen Bimas Katolik 945, Ditjen Bimas Hindu

6.500, dan Ditjen Bimas Buddha 12.000 hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap sumber ajaran yang sahih, sehingga praktik keagamaan dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambunganKepuasan Layanan Kantor Urusan Agama.

2) Kantor Urusan Agama (KUA) menyediakan berbagai layanan keagamaan yang diperlukan umat beragama. Layanan ini mencakup, antara lain, pendaftaran dan pencatatan pernikahan, penyuluhan agama, pengelolaan zakat dan wakaf, dan layanan bimbingan haji. Terkait dengan hal ini, Tabel 1.5 berikut menyajikan capaian Indeks Kepuasan Layanan KUA selama periode 2020-2024.

**Tabel 1.5.**
**Capaian Indeks Kepuasan Layanan KUA, 2020-2024**

| Capaian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target | 80.00 | 81.00 | 82.00 | 83.00 | 84.00 |
| Realisasi | 95.95 | 78.90 | 83.28 | 83.26 | 85.08 |
| Persentase Capaian | 119.94 | 97.41 | 101.56 | 100.31 | 101.29 |

Sumber: Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM

Pada 2024, nilai Indeks Kepuasan Layanan KUA mencapai 85,08. Angka ini lebih tinggi dari tahu-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh KUA di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa hal berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA. Sejak tahun 2022, Kemenag meluncurkan program prioritas Revitalisasi KUA. KUA diarahkan menjadi Pusat Layanan Keagamaan (KUA Pusaka) sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat beragama sebagai pengguna layanan KUA. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Kemenag juga melakukan beberapa kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas layanan KUA, yang mencakup, antara lain: (1) Perbaikan ruang pelayanan KUA; (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM KUA revitalisasi; (3) Penguatan transformasi digital pelayanan KUA; dan (4) Pengembangan layanan KUA untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Namun demikian, ada beberapa hal yang masih menjadi catatan. Hasil survey di atas menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas layanan pada semua aspek layanan. Semua

dimensi layanan mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan aspek lain, **aspek Sarana dan Prasarana memiliki nilai agak rendah di tahun 2024**. Jika kita lihat lebih lanjut, aspek Sarana Prasarana merupakan satu dari dua dimensi layanan yang memiliki peningkatan nilai kepuasan tertinggi, meningkat dari 66,75 pada tahun 2020 menjadi 81,26 pada tahun 2024. Aspek Sarana Prasarana mengalami peningkatan skor sebesar 14,51 poin, hanya sedikit lebih rendah dari aspek Layanan Aduan yang menunjukkan peningkatan skor paling tinggi, yakni sebesar 16,18 poin. Namun demikian, hal ini masih menjadi **prioritas Kemenag dalam meningkatkan layanannya kepada masyarakat pada tahun mendatang**.

Selain itu, kualitas layanan KUA belum merata di semua daerah. Beberapa masalah yang sering dihadapi mencakup kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur yang belum memadai, dan proses layanan yang terkadang tidak efisien, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat. Meski KUA telah berupaya memberikan layanan terbaik, hingga saat ini masih ditemukan kendala dalam hal kecepatan pelayanan, transparansi, dan pemahaman masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Ke depan, Kemenag perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja KUA, khususnya di daerah-daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitas layanannya.

3) Kepuasan terhadap Layanan Sertifikasi Produk Halal

   Layanan Sertifikasi Produk Halal merupakan salah satu layanan utama Kementerian Agama yang bertujuan memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam ajaran agama. Meski layanan sertifikasi halal kini berada di BPJPH, Kementerian Agama tetap memerlukan direktorat atau eselon II untuk mengawal kebijakan halal, memastikan tata kelola yang akuntabel, dan memperkuat literasi halal masyarakat melalui penyuluh agama, pengawas daerah, serta jaringan 5.917 KUA di seluruh Indonesia

   Untuk mengukur kepuasan terhadap layanan sertifikasi produk halal, Kemenag menggunakan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai tabel dibawah ini.

**Tabel 1.6.**
**Capaian Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal, 2021-2024**

| Uraian | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
| Realisasi | 84,50 | 88,10 | 88,56 | 89,12 |
| Persentase Capaian | 120,00 | 125,80 | 110,70 | 110,70 |

Sumber: Laporan Kinerja Kemenag Tahun 2023.

Pada 2024, Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal mencapai 89,12, mencerminkan tingginya kepuasan masyarakat berkat berbagai program dan kegiatan, termasuk sertifikasi halal gratis serta kolaborasi untuk memperkuat ekosistem halal, yang juga berhasil meraih penghargaan nasional dan internasional. Ke depan, layanan ini dapat semakin ditingkatkan melalui perluasan distribusi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), percepatan proses sertifikasi, penguatan literasi halal bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta kolaborasi lintas pihak yang lebih masif.

4) Kepuasan terhadap Layanan Ibadah Haji

Ibadah haji, sebagai salah satu rukun Islam, mendapat perhatian besar dari Kementerian Agama yang terus meningkatkan kualitas layanannya melalui berbagai program, termasuk evaluasi layanan katering, pembinaan bimbingan haji, layanan ramah lansia, transformasi digital, dan perlindungan jamaah. Pada 2024, Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji tercatat 88,20, menunjukkan peningkatan dibanding 2023 meski masih di bawah capaian 2022, dengan tantangan utama terkait kapasitas akomodasi, transportasi, layanan kesehatan, dan proses pendaftaran. Untuk mengatasi hal ini, Kemenag membangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di 253 Kantor Kemenag kabupaten/kota, mempermudah proses pendaftaran, konsultasi, dan pelayanan haji/umrah secara cepat, efisien, dan terintegrasi. Layanan haji pada tahun 2025 masih dilakukan oleh Kementerian Agama, namun mulai tahun 2026 seluruh penyelenggaraan haji akan dialihkan ke Kementerian Haji. Peralihan ini bertujuan untuk meningkatkan fokus, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan haji, memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas bagi seluruh jamaah.

### d. Pemberdayaan Ekonomi Keagamaan Umat

Ekonomi keagamaan umat memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi sosial ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat pendidikan dan layanan keagamaan. Pemberdayaan dana sosial keagamaan menjadi salah satu instrumen penting yang dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu layanan tersebut.

Tabel 1.8 menunjukkan capaian pemanfaatan dana sosial keagamaan dalam mendukung pendidikan dan keagamaan pada periode 2020–2024. Pada tahun 2024, tercatat 63,42% dana sosial keagamaan dialokasikan untuk layanan pendidikan dan keagamaan. Capaian ini memang menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 89,83%, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 55,84%, serta tahun-tahun sebelumnya. Pola capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, pemberdayaan dana sosial keagamaan tetap memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung peningkatan layanan pendidikan dan keagamaan.

**Tabel 1.7.**
**Persentase Pemanfaatan Dana Sosial Keagamaan untuk Mendukung Layanan Pendidikan dan Keagamaan, 2020-2024**

| Capaian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Target | 50.00 | 51,00 | 53,00 | 54,00 | 55,00 |
| Realisasi | 44.30 | 51,25 | 55,84 | 89,83 | 63,42 |
| Persentase Capaian | 88,60 | 100,49 | 105,35 | 166,36 | 115,3 |

Sumber: Laporan Kinerja Kemenag 2024

Pencapaian tersebut dapat diraih berkat, antara lain, beberapa kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag untuk memperkuat pemberdayaan umat dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) Program Kampung Zakat; (2) Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA; (3) Inkubasi Wakaf Produktif, dan (4) Program Kota Wakaf. Selain itu, Kemenag juga berupaya meningkatkan literasi masyarakat tentang dana sosial keagamaan.

Namun demikian, pemanfaatan ekonomi keagamaan umat masih menghadapi beberapa tantangan, seperti belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan, tidak meratanya distribusi dana sosial, dan minimnya transparansi dalam pengelolaan dana sosial tersebut. Meski dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi besar, pengelolaannya masih terpusat pada beberapa lembaga besar. **Banyak lembaga keagamaan lokal belum mampu**

**mengoptimalkan (potensi) dana yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan keagamaan di masyarakat.**

## 2. Kondisi Umum Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan, Kemenag memiliki empat (4) SS sebagai berikut : Meningkatnya pemerataan akses pendidikan (SS3); Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah (SS4); Meningkatnya pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas (SS5); dan Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas (SS6). Bagian ini memaparkan kondisi umum bidang pendidikan terkait dengan ke-empat SS tersebut.

### a. Akses Berkualitas dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah

Sub-Bagian ini memaparkan dua hal: (1) Perkembangan akses pendidikan dan kontribusi Kemenag dalam meningkatkan akses pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dasar dan menengah; dan (2) perkembangan mutu pendidikan dasar dan menengah.

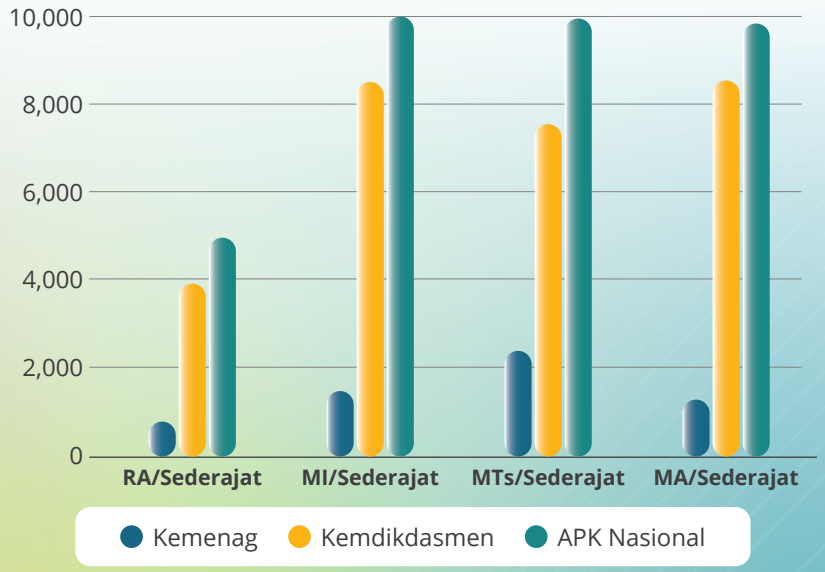
1) Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah

Pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak untuk menempuh pendidikan dasar. Anak-anak yang memiliki persiapan lebih baik akan dapat menempuh pendidikan dasar dengan lebih baik. Indonesia perlu meningkatkan akses PAUD. Secara nasional, angka partisipasi kasar (APK) PAUD hanya mencapai 47,05% pada 2024.

Kemenag turut berperan dalam memperluas layanan PAUD melalui berbagai lembaga seperti RA, PAUDQU, Taman Seminari Katolik, Pratama Widya Pasraman Hindu, dan Nava Dhammasekha Buddha. Pada 2024, jumlah siswa PAUD di bawah Kemenag mencapai 1.393.803 anak atau setara 7,91% dari total anak usia 3–6 tahun (APK). Dengan tingkat APK PAUD secara nasional yang baru mencapai 47,05%, **masih terbuka ruang luas bagi Kemenag untuk meningkatkan kontribusinya dalam meningkatkan APK PAUD**.

**Tabel 1. 8 Jumlah Siswa dan APK pada Satuan Pendidikan, 2024**

| No | Jenjang | Usia Siswa | Jumlah Penduduk dalam Rentang Usia | Kemenag | | Kemdikdasmen | | APK Nasional (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah Siswa | APK (%) | Jumlah Siswa | % APK | |
| 1 | RA/Sederajat | | 17.618.391 | 1.393.803 | 791 | 6.895.192 | 3,914 | 4,953 |
| 2 | MI/Sederajat | | 28.689.290 | 4.250.509 | 1,482 | 24.323.553 | 8,478 | 9,960 |
| 3 | MTs/Sederajat | 13 - 15 | 13.987.265 | 3.345.861 | 2,392 | 10.521.011 | 7,522 | 9,914 |
| 4 | MA/Sederajat | 16 - 18 | 13.404.822 | 1.728.356 | 1,289 | 11.409.569 | 8,512 | 9,801 |

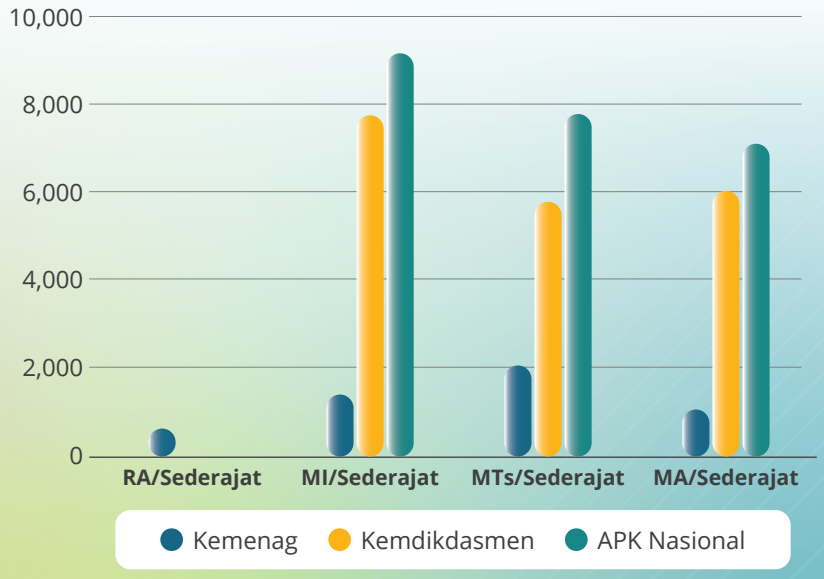



Sumber:
Diolah dari Data EMIS Kemenag dan BPS Tahun 2024



**Tabel 1. 9 Jumlah Siswa dan APM pada Satuan Pendidikan, 2024**

| No | Jenjang | Usia Siswa | Jumlah Penduduk dalam Rentang Usia | Kemenag | | Kemdikdasmen | | APK Nasional (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah Siswa | APK (%) | Jumlah Siswa | % APK | |
| 1 | RA/Sederajat | 3-6 | 17.618.391 | 1.120.570 | 636 | NA | NA | NA |
| 2 | MI/Sederajat | 7-12 | 28.689.290 | 4.040.887 | 1,409 | 22.248.686 | 7,755 | 9,164 |
| 3 | MTs/Sederajat | 13 - 15 | 13.987.265 | 2.898.843 | 2,070 | 7.988.593 | 5,711 | 7,784 |
| 4 | MA/Sederajat | 16 - 18 | 13.404.822 | 1.433.094 | 1,069 | 8.095.255 | 6,039 | 7,108 |




Sumber:
Diolah dari Data EMIS Kemenag dan BPS Tahun 2024



Pada jenjang pendidikan dasar, APK nasional untuk anak usia 7-12 tahun mencapai 99,60% pada 2024. Kemenag berkontribusi signifikan dalam meningkatkan APK pendidikan dasar melalui berbagai layanan pendidikan, seperti MI, PKPPS Tingkat Ula, dan SDTK. Dengan total 4.250.509 siswa pada 2024, satuan pendidikan dasar di bawah Kemenag menyumbang APK sebesar 14,09%. Untuk angka partisipasi murni (APM), satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di bawah Kemenag menyumbang sebesar 91,64% pada 2024.

Pada jenjang pendidikan menengah, Kemenag melalui lembaga seperti MTs, Wustha, SMPTK, Madyama, dan Widya Pasraman juga berkontribusi besar dalam meningkatkan akses pendidikan menengah pertama. Dengan sekitar 3,35 juta siswa dari total 13,99 juta anak usia 13–15 tahun, Kemenag menyumbang APK sebesar 23,92% pada 2024. Secara nasional, APK anak usia 13-15 mencapai 99,14% pada 2024. Akan tetapi, APM jenjang pendidikan menengah pertama baru mencapai 77,84%, dengan kontribusi Kemenag mencapai sebesar 20,72%. **Masih ada sekitar 22.16% anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan menengah pertama**. Ini memberi ruang yang cukup besar bagi Kemenag untuk meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan akses pendidikan menengah pertama.

Untuk anak usia 16–18 tahun Kemenag menyediakan layanan pendidikan menengah atas melalui MA, PKPPS Tingkat Ulya, SMAK, SMTK, dan Utama Widya Pasraman. Pada 2024, APK pendidikan menengah atas nasional yang mencapai 98,01%. Dengan **1,73 juta siswa dari total 13,4 juta anak usia 16-18 tahun menempuh pendidikan menengah atas di bawah Kemenag**, Kemenag menyumbang APK pendidikan menengah atas sebesar 12,89%. Capaian ini menunjukkan peran strategis Kemenag dalam memperluas akses pendidikan jenjang menengah atas di Indonesia. Untuk APM, Kemenag menyumbang 10,69 poin persentase pada jenjang pendidikan menengah atas dari total APM nasional yang mencapai 71,08% pada 2024.

Capaian tersebut dapat diraih berkat, antara lain, berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas kelas satuan pendidikan termasuk di daerah 3T; (2) Melakukan pengembalian anak tidak sekolah ke dalam satuan/sistem pendidikan/pelatihan; (3) Menyediakan bantuan pendidikan; dan (4) Peningkatan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-Sekolah.

Terkait dengan pemerataan akses pendidikan, salah satu isu strategis yang dihadapi Indonesia adalah terbatasnya akses pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta bagi kelompok marginal secara ekonomi. Akses pendidikan yang tidak merata di wilayah ini menghambat pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak di Indonesia. Untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, hal-hal yang sudah dilakukan Kemenag dalam beberapa tahun terakhir mencakup, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas kelas satuan pendidikan termasuk di daerah 3T; (2) Melakukan pengembalian anak tidak sekolah ke dalam satuan/sistem pendidikan/pelatihan; (3) Menyediakan bantuan pendidikan; dan (4) Peningkatan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-Sekolah.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas akses pendidikan dilaksanakan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Madrasah pada Tahun 2025. Program Revitalisasi Madrasah merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan akses, mutu dan daya saing pendidikan keagamaan di Indonesia. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Madrasah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, termasuk madrasah. Program ini bertujuan mempercepat peningkatan kualitas sarana prasarana madrasah di seluruh Indonesia melalui mekanisme pembiayaan konstruksi *Single Year Contract* (SYC) dan *Multi Years Contract* (MYC).

Dari total 2.120 usulan madrasah, hasil verifikasi menunjukkan: 1.416 madrasah memenuhi kriteria untuk direvitalisasi, 702 madrasah tidak memenuhi kriteria, karena faktor seperti kerusakan ringan, lahan bermasalah, duplikasi pendanaan, atau jumlah siswa yang tidak memenuhi syarat dan 2 madrasah tidak dapat disurvei karena kendala keamanan dan akses, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Madrasah yang memenuhi kriteria ditangani melalui dua skema: 1) SYC Tahun 2025 sebanyak 568 madrasah di 27 provinsi termasuk Aceh, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, meliputi 364 madrasah dalam tahap konstruksi, 139 madrasah dalam tahap persiapan kontrak dan 65 madrasah dalam proses lelang. 2) MYC 2025–2026 sebanyak 848 madrasah di 26 provinsi antara lain jawa tengah, jawa timur dan jawa barat, 8 madrasah dalam tahap lelang dan 840 madrasah dalam tahap persiapan lelang.

Dengan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan konstruksi yang terintegrasi, diharapkan revitalisasi madrasah dapat selesai tepat waktu, sesuai target, serta berdampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

2) Mutu Pembelajaran dan Pengajaran

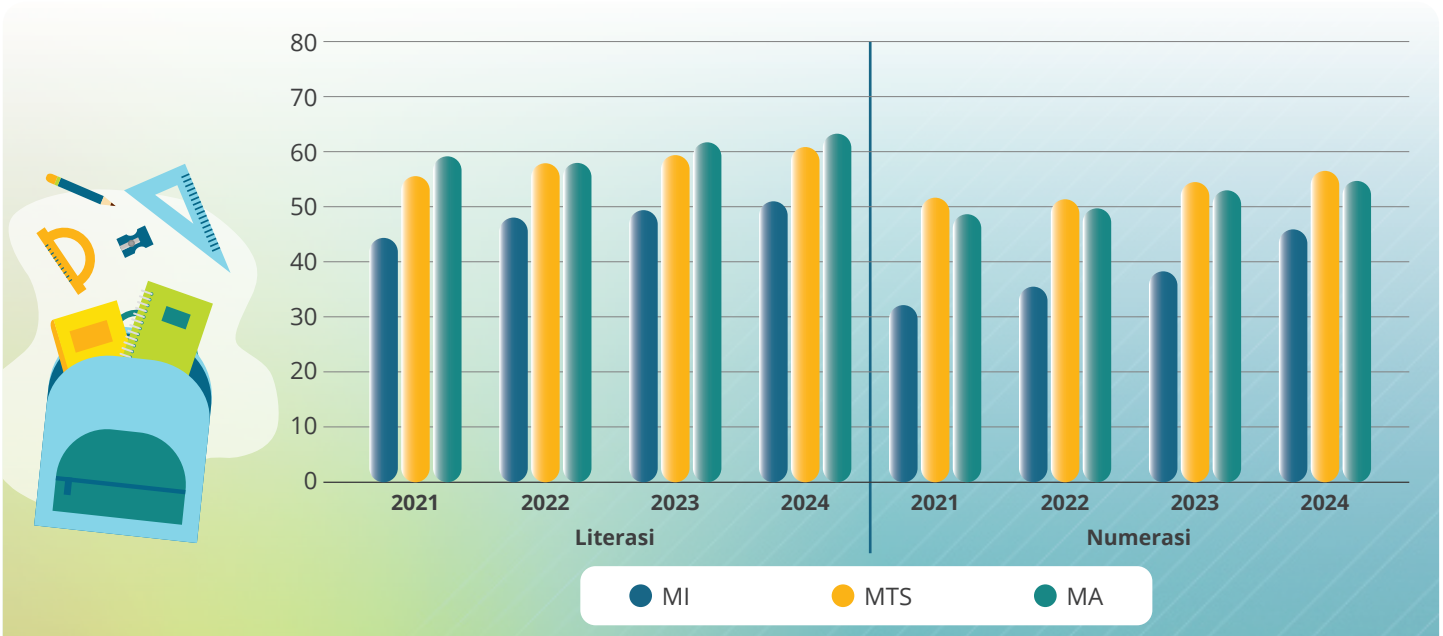
Pembangunan sumber daya manusia memerlukan mutu pendidikan yang unggul. Terkait hal ini, kualitas sistem pendidikan ditentukan bukan hanya oleh akses pendidikan melainkan juga mutu pendidikan. Tanpa mutu pendidikan yang baik, tidak banyak yang akan dipelajari oleh siswa di bangku sekolah sehingga tujuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai secara maksimal.

Mutu pendidikan bisa diukur dengan melihat sejauh mana siswa menguasai beberapa kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dalam literasi, hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam AN menunjukkan siswa MI rata-rata memiliki nilai 51,19 pada 2024. Angka ini lebih tinggi dari nilai AN tahun-tahun sebelumnya. Proporsi siswa MI yang memiliki kompetensi minimum dalam literasi juga meningkat. Pada tahun 2024, proporsi siswa dengan kompetensi literasi di atas kompetensi minimum mencapai 59 %. Angka ini juga lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya (Tabel 1.12).

**Tabel 1. 10 Rata-Rata Nilai AN Literasi dan Numerasi Siswa Madrasah, 2021-2024**

| Jenjang Pendidikan | Literasi | | | | Numerasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| MI | 44,53 | 48,23 | 49,58 | 51,19 | 32,29 | 35,65 | 38,44 | 46,08 |
| MTs | 55,77 | 58,12 | 59,60 | 61,07 | 51,85 | 51,56 | 54,69 | 56,73 |
| MA | 59,38 | 58,18 | 61,93 | 63,50 | 48,84 | 49,91 | 53,19 | 54,90 |

Sumber: Kemdikdasmen (2024)

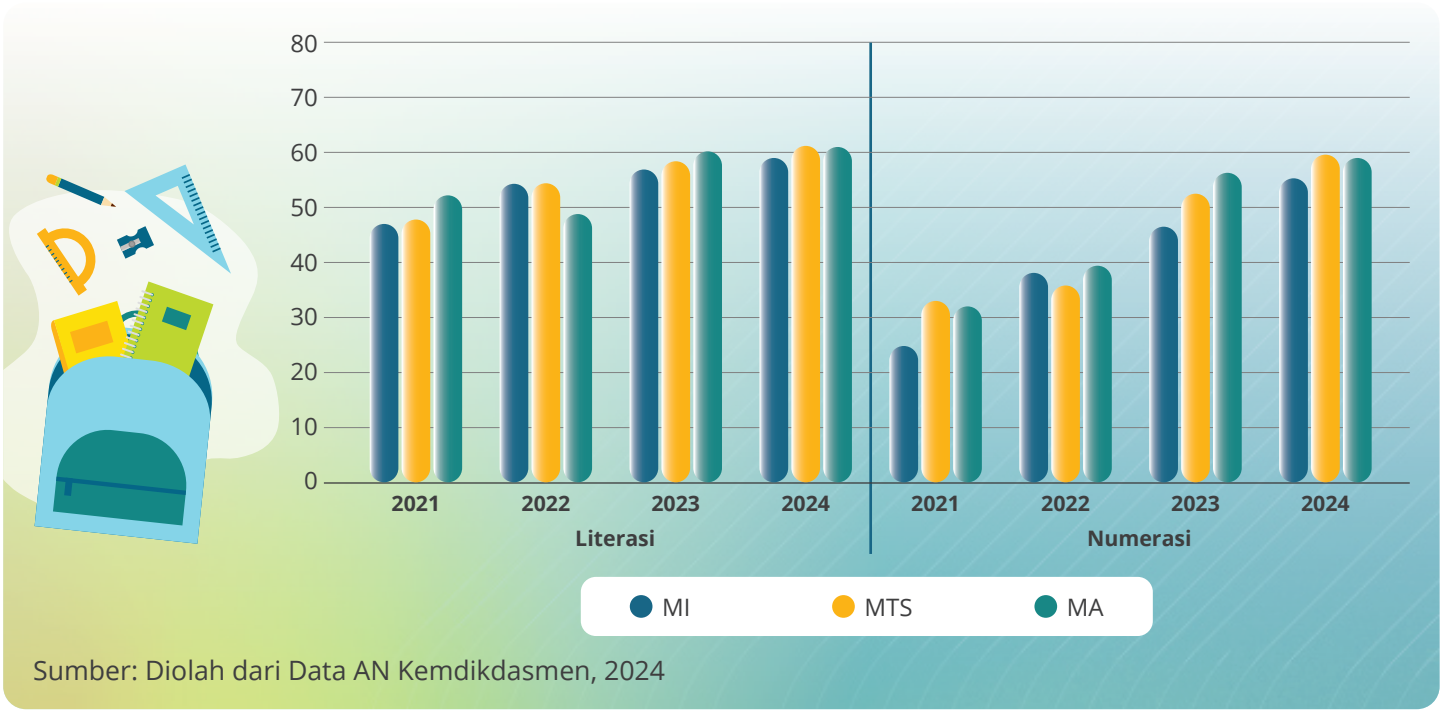



Sumber: Diolah dari Data AN Kemdikdasmen, 2024

**Tabel 1. 11 Persentase Siswa dengan Kompetensi Minimum dalam AN, 2021-2024**

| Jenjang Pendidikan | Literasi | | | | Numerasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| MI | 46,9 | 54,3 | 56,9 | 59,0 | 24,8 | 38,1 | 46,4 | 55,3 |
| SD | 54,3 | 61,4 | 65,2 | | 30,7 | 46,5 | 54,1 | |
| MTs | 47,8 | 54,5 | 58,4 | 61,3 | 33,0 | 35,8 | 52,5 | 59,7 |
| SMP | 51,4 | 59,0 | 64,3 | | 36,8 | 40,6 | 44,1 | |
| MA | 52,4 | 49,1 | 60,4 | 61,2 | 32,1 | 39,6 | 56,4 | 59,3 |
| SMA/SMK | 53,9 | 59,1 | 62,6 | | 35,2 | 41,0 | 56,3 | |

Sumber: Kemdikdasmen (2024)




Sumber: Diolah dari Data AN Kemdikdasmen, 2024

Hasil AN 2021–2024 juga menunjukkan peningkatan kompetensi literasi siswa pada jenjang pendidikan menengah. Pada jenjang MTs, rata-rata nilai kompetensi literasi siswa mencapai 61,07 pada 2024. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2023), yakni 59,60. Pada jenjang MA, rata-rata nilai AN siswa di bidang literasi pada 2024 mencapai 63,5. Angka ini juga lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya (2023), yang mencapai 61,93. Akan tetapi, capaian ini masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa madrasah.

Dalam numerasi, kompetensi siswa madrasah juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada jenjang MI, rata-rata nilai AN siswa dalam kompetensi numerasi naik dari 32,29 pada 2021 menjadi 46,08 pada 2024. Pada jenjang MTs, meski rata-rata nilai AN siswa sedikit turun dari 51,85 pada 2021 menjadi 51,56 pada 2022, nilai tersebut kembali naik menjadi 56,73 pada 2024. Pada jenjang MA, rata-rata nilai AN siswa dalam kompetensi numerasi naik dari 48,84 pada 2021 menjadi 54,90 pada 2024.

Proporsi siswa dengan kompetensi minimum dalam numerasi juga mengalami peningkatan. Pada jenjang MI, misalnya, proporsi siswa dengan kompetensi minimum meningkat dari 24,8% pada 2021 menjadi 55,3% pada 2024. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan Kemenag dalam meningkatkan performa siswa madrasah. Namun demikian, nilai rata-rata dan proporsi tersebut tergolong rendah dan masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Dalam menilai kompetensi siswa, Kemenag menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI), yang mengukur kompetensi literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya siswa madrasah. Menurut hasil AKMI, rata-rata kompetensi literasi sosial budaya siswa MI mencapai 49,8 pada 2024. Pada tingkat MTs, rata-rata nilai literasi sosial budaya mencapai 90,03 pada 2024. Angka ini juga hanya sedikit lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya (89,9). Pada jenjang MA, nilai rata-rata literasi sosial budaya pada 2024 mencapai 130,19. Angka ini juga hanya sedikit lebih tinggi dari angka tahun sebelumnya (129,95). Angka-angka ini menunjukkan bahwa capaian kompetensi literasi sosial budaya terus meningkat seiring dengan semakin tinggunya jenjang pendidikan siswa.

Beberapa pencapaian tersebut dapat diraih antara lain berkat kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) Penerapan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir; (2) Penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah;

(3) Penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk peningkatan mutu; dan (4) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran.

Namun demikian, masih relatif rendahnya skor kompetensi literasi, numerasi dan literasi sains siswa madrasah menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada penguatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum berbasis literasi esensial, optimalisasi teknologi pendidikan, dan peningkatan akses pembelajaran. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dan pendampingan intensif bagi sekolah/ madrasah perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Bagi Kemenag khususnya, ini memerlukan penguatan kebijakan pendidikan yang ada, khususnya untuk meningkatkan pendidikan madrasah.

3) Pengelolaan dan Penempatan Guru

Guru merupakan salah satu faktor utama dalam peningakatan mutu pendidikan. Siswa yang belajar di bawah bimbingan guru yang baik akan memiliki performa yang lebih tinggi dari siswa yang belajar di bawah bimbingan guru yang kurang baik.

Berdasarkan data EMIS 2024 (per Desember 2024), jumlah peserta didik di RA, MI, MTs, dan MA/MAK mencapai 10.571.578 orang dengan total guru 936.697 orang. Rasio guru-siswa secara umum mencapai 1:10 untuk jenjang RA. Angka ini berarti setiap satu orang guru bertanggung jawab mengajar rata-rata 10 orang siswa pada jenjang RA. Pada jenjang di atasnya, rasio guru-siswa mencapai 1:11 untuk jenjang MI, 1:13 untuk jenjang MTs, dan 1:10 untuk jenjang MA (1:10). , dan 1:11 dan 1:13 untuk jenjang MTs dan MI. Angka ini lebih rendah dari angka rujukan yang ditetapkan pemerintah, yakni 20 untuk SD/SMP/SMA dan 15 untuk SMK (BPS 2023).

Secara kuantitas, **angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah guru di lingkungan Kemenag sudah mencukupi. Akan tetapi, kualitas distribusi guru masih perlu ditingkatkan**. Terdapat perbedaan yang cukup besar antar madrasah dan mata pelajaran. Tidak sedikit madrasah memiliki rasio guru-murid lebih dari 20, namun di sisi lain tidak sedikit pula madrasah yang memiliki rasio guru-murid sebesar 9 atau kurang. Pada jenjang MA, lebih dari 50% madrasah memiliki rasio guru-siswa sebesar 9 atau kurang. Kesenjangan juga ditemukan antar mata pelajaran. Rasio guru-siswa untuk mata pelajaran Mamematika mencapai 1:20 di Jawa dan 1:30 di luar Jawa. Untuk mata pelajaran Sains, rasio guru-siswa lebih tinggi, yakni 1:22 di Jawa dan 1:35 di luar Jawa (EMIS, 2024).

Selain itu, jumlah guru bersertifikat pendidik masih tergolong rendah di lingkungan Kemenag. Pada 2024, Tabel 1.13 menunjukkan hanya sekitar 39,16% guru sudah bersertifikat pendidik. Pada jenjang RA dan MA, proporsi guru yang sudah bersertifikat lebih rendah, hanya mencapai, secara berurutan, 28,82 % dan 34,62%.

**Tabel 1.12.**
**Guru Bersertifikat Pendidik Pada RA, MI, MTs, dan MA**

| No | Satuan Pendidikan | Jumlah Guru | Jumlah Guru Bersertifikat | Persentase Guru Bersertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RA | 103.477 | 29.817 | 28,82% |
| 2 | MI | 287.746 | 128.968 | 44,82% |
| 3 | MTs | 263.985 | 104.254 | 39,492% |
| 4 | MA | 141.492 | 48.983 | 34,62% |
| **Rata-Rata** | | | | **39,16%** |

Sumber: EMIS GTK Ditjen Pendis Kemenag, 2024

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari beberapa kebijakan dan program yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru mencakup. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi; (2) Peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan; (3) Peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja; dan (4) Pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam meningkatkan kualitas lulusannya sesuai dengan kebutuhan.

Ke depan, Kemenag perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan terkait kualitas dan ketimpangan distribusi guru dengan memfokuskan perhatian pada peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik, serta memenuhi dan memeratakan tenaga pengajar di seluruh wilayah.

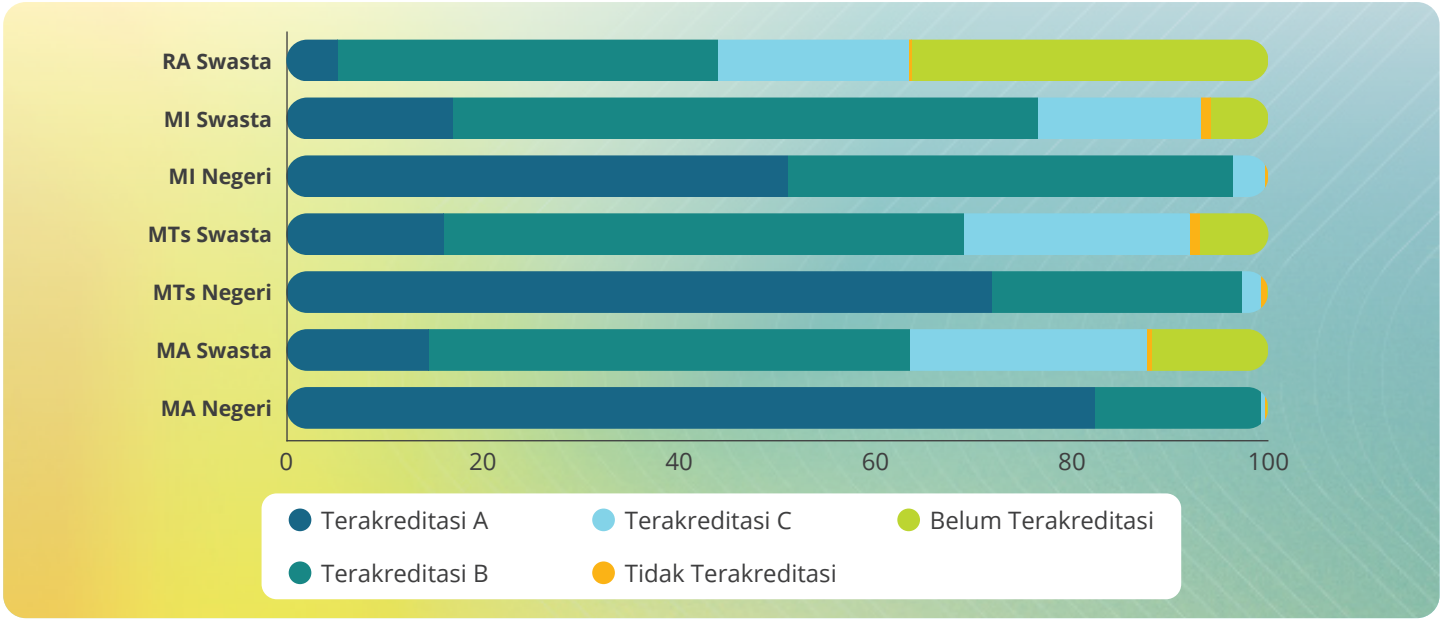
4) Akreditasi Madrasah

Penjaminan mutu diperlukan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pendidikan. Proses ini melibatkan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi yang mencakup capaian standar nasional pendidikan dan kinerja. Gambar 1.4 berikut memaparkan status atau hasil akreditasi terhadap RA dan madrasah di lingkungan Kemenag. Pada 2024, secara keseluruhan (RA, MI, MTs dan MA), **masih belum banyak sekolah di bawah Kemenag yang terakreditasi A. Mayoritas memiliki nilai akreditasi B atau lebih rendah (C)**. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup besar antara madrasah negeri dan swasta.

**Gambar 1. 3 Status Akreditasi Satuan Pendidikan (%)**

| Satuan Pendidikan | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Tidak Terakreditasi | Belum Terakreditasi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA Swasta | 5,20 | 38,80 | 19,40 | 0,30 | 36,30 | 100,00 |
| MI Swasta | 17,00 | 59,50 | 16,65 | 0,95 | 5,90 | 100,00 |
| MI Negeri | 51,10 | 45,30 | 3,20 | 0,40 | 0,00 | 100,00 |
| MTs Swasta | 16,00 | 53,00 | 22,96 | 1,08 | 6,96 | 100,00 |
| MTs Negeri | 71,85 | 25,45 | 1,90 | 0,70 | 0,10 | 100,00 |
| MA Swasta | 14,50 | 49,00 | 24,10 | 0,60 | 11,80 | 100,00 |
| MA Negeri | 82,35 | 16,85 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 100,00 |

Sumber: Diolah dari BAN PDM (2024)



Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan akreditasi madrasah. Beberapa hal yang dilakukan Kemenag pada periode 2019-2024 mencakup, antara lain: (1) Penguatan fasilitasi Kemenag dalam meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan; (2) Peningkatan budaya mutu pendidikan dalam Sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan; (3) Peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas; dan (4) Peningkatan kualitas kelembagaan pengelola/pembina SPMI pada satuan kerja di pusat dan daerah.

5) Kualitas Karakter Siswa

Pencapaian pendidikan terlihat bukan hanya dalam perkembangan kognisi siswa, melainkan juga dalam perkembangan karakter mereka. Baik kognisi maupun karakter siswa sama-sama diperlukan untuk kemajuan masyarakat.

Untuk mengetahui perkembangan karakter siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan asesmen karakter siswa dilakukan melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) yang terintegrasi dengan AN. Tabel 1.15 menunjukkan hasil asesmen karakter siswa dan iklim kebhinekaan satuan pendidikan di bawah Kemenag berdasarkan hasil Sulingjar 2024. Survei karakter mengukur beberapa hal, yakni (1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia; (2) Gotong royong; (3) Kreativitas; (4) Nalar kritis; (5) Kebhinekaan global; dan (6) Kemandirian.

Pada 2024, dalam survei karakter, rata-rata skor capaian MI/Sederajat dan MA/Sederajat tergolong "Baik", yang berarti peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global. Akan tetapi, skor capaian MTs/Sederajat tergolong "Sedang", yang berarti peserta didik telah menyadari pentingnya nilai karakter namun perlu dukungan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

**Tabel 1. 13 Karakter Peserta Didik dan Iklim Kebhinekaan Satuan Pendidikan di Bawah Kemenag, 2024**

| Jenjang | Capaian Karakter | | Capaian Iklim Kebhinekaan | |
|---|---|---|---|---|
| | Nilai | Kategori | Nilai | Kategori |
| MI/Sederajat | 52.67 | Baik | 64.19 | Sedang |
| MTs/Sederajat | 50.65 | Sedang | 64.28 | Sedang |
| MA/Sederajat | 52.81 | Baik | 63.39 | Sedang |

Sumber: Diolah dari Rapor Pendidikan, Kemdikdasmen 2024

Iklim kebhinekaan melihat sejauh mana satuan pendidikan menunjukkan sikap dan perilaku menerapkan toleransi agama dan budaya, dan komitmen kebangsaan. Iklim kebhinekaan diukur dengan indeks komposit yang terdiri dari 3 sub-indikator, yaitu toleransi agama dan budaya, komitmen kebangsaan, dan toleransi dan kesetaraan peserta didik. Untuk iklim kebhinekaan, skor capaian satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan di bawah Kemenag tergolong "Sedang", yang berarti satuan pendidikan sudah mulai mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman.

Pencapain tersebut dapat diraih berkat beberapa kebijakan dan program yang dilakukan Kemenag dalam beberapa tahun terakhir (2019-2024), yang mencakup, antara lain: (1) Peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman; (2) Peningkatan jumlah madrasah/satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter; (3) Pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler; (4) Peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerja sama; dan (5) Penguatan kerja sama dengan orang tua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.

6) Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara, termasuk mereka yang menyandang disabilitas, untuk mendapatkan layanan pendidikan. Sesuai dengan ketentuan konstitusional ini, Kemenag mengembangkan kebijakan pendidikan Islam yang inklusif. Hingga 2024, Kemenag telah merintis pendidikan inklusi di 567 madrasah negeri dan swasta untuk tingkat MI, MTs, dan MA, dengan 3.344 siswa berkebutuhan khusus.

Hasil Sulingjar 2024 menunjukkan bahwa satuan pendidikan di bawah Kemenag, baik MI, MTs maupun MA, tergolong memiliki capaian "Sedang" dalam iklim inklusivitas (Tabel 1.16). Kategori ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. Akan tetapi, capaian indeks kesenjangan iklim insklusivitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan di bawah Kemenag juga tergolong "Sedang", yang berarti terdapat kesenjangan perlakuan inklusivitas terhadap peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan kelompok sosial ekonomi atau wilayah perkotaan-perdesaan.

**Tabel 1. 14 Capaian dan Kesenjangan Iklim Inklusivitas Satuan Pendidikan di Bawah Kemenag, 2024**

| Jenjang | Capaian Iklim Inklusivitas | | Kesenjanan Iklim Inklusivitas | |
|---|---|---|---|---|
| | Nilai | Kategori | Nilai | Kategori |
| MI/Sederajat | 49.37 | Sedang | 0.66 | Sedang |
| MTs/Sederajat | 51.65 | Sedang | 0.94 | Sedang |
| MA/Sederajat | 53.89 | Sedang | 1.38 | Sedang |

Sumber: Diolah dari Rapor Pendidikan, Kemdikdasmen 2024

Kemenag terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada semua satuan pendidikan di bawah Kemenag, baik pada jalur formal maupun non formal, melalui penerbitan PMA Nomor 1 tahun 2024 tentang Akomodasi Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Semua satuan pendidikan diharapkan dapat menyediakan layanan pendidikan inklusif untuk semua anak, sesuai latar belakang dan kebutuhan belajarnya. Untuk mendukung implementasi peraturan dan kebijakan tersebut Kemenag akan terus melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru madrasah, dan advokasi serta peningkatan kompetensi dan keahlian para pendidik di lingkungan pendidikan keagamaan dan pesantren.

### a. Akses Berkualitas dan Mutu Pendidikan Keagamaan dan Pesantren

Selain sekolah dengan kekhasan agama, Kemenag juga membawahi sekolah keagamaan dan pesantren. Bagian ini menunjukkan perkembangan pendidikan keagamaan dan pesantren.

1) Pendidikan Keagamaan

Layanan pendidikan keagamaan disediakan sesuai dengan agama masing-masing siswa. Untuk peserta didik beragama Islam, pendidikan keagamaan diselenggarakan melalui pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah terdiri dari dua jenis, yaitu pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Baik MDT maupun pendidikan Al-Quran merupakan lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan Al-Quran terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), dan Ta'limul Quran Lil Aulad (TQA). Sementara itu, MDT dibagi menjadi MDT Ula, MDT Wustha, dan MDT Ulya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan Ma'had Al-Jami'ah untuk jenjang pendidikan tinggi.

Tabel 1.17 menunjukkan jumlah dan distribusi peserta didik (santri) di setiap lembaga pendidikan keagamaan Islam. Sebagian besar MDT berada pada jenjang MDT Ula (89,5%), menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap MDT Ula sebagai penguatan pendidikan agama Islam tingkat dasar. Untuk

pendidikan Al-Quran, mayoritas masyarakat memilih Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) (92,1%) sebagai tempat pendidikan Al-Quran, menunjukkan pentingnya pengenalan dan pengajaran membaca serta menghafal Al-Quran.

**Tabel 1.15 Jumlah Lembaga dan Santri Pendidikan Keagamaan Islam**

| No | Satuan Pendidikan | Lembaga | | Peserta Didik / Santri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDT | 105.139 | | 2.916.106 | |
| | - MDT Ula | 94.058 | 89,5% | 2.702.385 | 92,7% |
| | - MDT Wustha | 10.171 | 9,7% | 199.635 | 6,8% |
| | - MDT Ulya | 735 | 0,7% | 10.992 | 0,4% |
| | - Ma'had Al-Jami'ah | 175 | 0,2% | 3.094 | 0,1% |
| 2 | LPQ | 201.156 | | 2.581.518 | |
| | - TKQ | 9.690 | 4,8% | 64.639 | 2,5% |
| | - TPQ | 185.349 | 92,1% | 2.418.135 | 93,7% |
| | - TQA | 1.368 | 0,7% | 4.793 | 0,2% |
| | PAUDQU | 3.576 | 1,8% | 72.929 | 2,8% |
| | RTQ | 1.147 | 0,6% | 20.524 | 0,8% |
| | PTQ | 26 | 0,01% | 498 | 0,02% |
| TOTAL | | 306.295 | | 5.497.624 | |

Sumber: EMIS Kemenag 2024.

Selain pendidikan keagamaan Islam, Kemenag juga mengelola pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Tabel 1.18 menunjukkan bahwa dari total 664 sekolah keagamaan, 1% di antaranya adalah negeri, sedangkan sisanya dikelola swasta. Sekolah keagamaan Kristen merupakan yang terbesar dengan 421 sekolah (63,4%), diikuti oleh sekolah keagamaan Hindu (104 sekolah, 15,7%) dan Katolik (102 sekolah, 15,4%).

**Tabel 1.16 Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, 2024**

| Pendidikan Keagamaan | Negeri | | Swasta | | Total Satuan | Total Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Satuan | Siswa | Satuan | Siswa | | |
| **Budha** | | | **37** | **680** | **37** | **680** |
| Nava Dhammasekha-PAUD | | | 35 | 651 | 35 | 651 |
| Mula Dhammasekha-SD | | | 1 | 12 | 1 | 12 |
| Uttama Dhammasekha-SMA | | | 1 | 17 | 1 | 17 |
| **Hindu** | | | **104** | **3.311** | **104** | **3.311** |
| Pratama Widyalaya-PAUD | | | 82 | 1.855 | 82 | 1.855 |
| Adi Widyalaya-SD | | | 12 | 741 | 12 | 741 |
| Madyama Widyalaya-SMP | | | 5 | 245 | 5 | 245 |
| Utama Widyalaya-SMA | | | 5 | 470 | 5 | 470 |
| **Katolik** | **3** | **643** | **99** | **7.041** | **102** | **7.684** |
| Taman Seminari-SMA | | | 56 | 1.475 | 56 | 1.475 |
| SMAK-SMA | 3 | 643 | 43 | 5.566 | 46 | 6.209 |
| **Kristen** | **4** | **271** | **417** | **20.606** | **421** | **20.877** |
| SDTK-SD | | | 72 | 4.630 | 72 | 4.630 |
| SMPTK-SMP | | | 118 | 5.193 | 118 | 5.193 |
| SMTK-SMA | 4 | 271 | 168 | 7.588 | 172 | 7.859 |
| SMAK-SMA | | | 59 | 3.195 | 59 | 3.195 |
| **Total** | **7** | **914** | **657** | **31.638** | **664** | **32.552** |

Sumber: EMIS Kemenag 2024

2) Pendidikan Pesantren

Sistem pendidikan nasional mengakomodasi keberadaan pendidikan pesantren, yang merupakan sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sistem pendidikan ini mendapat pengakuan negara melalui UU No. 18/2019 tentang Pesantren. Pesantren mengembangkan kurikulum berbasis kitab kuning dan kajian keislaman. Pada akhir 2024, terdapat 41.286 pesantren dengan 3.339.536 santri pada akhir 2024. Angka ini belum mencakup santri di Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiah (PKPPS), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Ma'had Aly yang berjumlah 449.048 (Tabel 1.19). Dengan memperhitungkan santri pada MDT dan LPQ di atas, total santri di seluruh lembaga pendidikan keagamaan Islam dan pesantren mencapai 9.286.208 orang.

**Tabel 1. 17 Jumlah Satuan Pendidikan Berbasis Pesantren dan Santri, 2024**

| No | Satuan Pendidikan | Lembaga | Santri |
|---|---|---|---|
| 1 | PKPPS | 1.998 | 261.197 |
| 2 | SPM | 281 | 132.582 |
| 3 | PDF | 175 | 34.225 |
| 4 | Ma'had Aly | 79 | 21.044 |
| **Total** | | **2.533** | **449.048** |

Sumber: EMIS Kemenag 2024

Salah satu indikator formal yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan pesantren adalah capaian AN peserta didik (santri) yang diikuti pada program PKPPS. pendidikan Paket A/Ula (Setara MI), nilai rata-rata peserta didik dalam kompetensi literasi meningkat dari 45,99 pada 2021 menjadi 49,03 pada 2024, sementara nilai rata-rata AN untuk kompetensi numerasi naik dari 33,71 menjadi 44,12. Proporsi siswa yang memiliki kompetensi minimum dalam literasi meningkat dari 58,8% menjadi 62,8% dalam periode tersebut. Dalam numerasi, angka tersebut meningkat dari 36,9% menjadi 55,9% pada periode yang sama.

Peningkatan serupa juga terlihat pada jenjang Paket B/Wustha (Setara MTs). Nilai rata-rata AN dalam kompetensi literasi meningkat dari 57,44 pada 2021 menjadi 58,17 pada 2024, sementara proposi siswa yang memiliki kemampuan di atas kemampuan minimum naik dari 51,6 % menjadi 54,1 % pada periode yang sama. Dalam kompetensi numerasi, nilai rata-rata siswa Paket B/Wustha meningkat dari 52,42 pada 2021 menjadi 54,61 pada 2024, sementara proporsi siswa dengan kompetensi di atas kompetensi minimum meningkat dari 36,9% menjadi 51,8%.

Pada Paket C/Ulya, rata-rata nilai literasi sempat menurun dari 60,25 pada 2021 menjadi 55,79 pada 2022, namun nilai literasi kembali naik menjadi 59,03 pada 2023. Sementara itu, rata-rata nilai numerasi meningkat dari 48,54 pada 2021 menjadi 51,41 pada 2023. Meski proporsi siswa dengan kompetensi minimum dalam literasi menurun, proporsi dengan kompetensi minimum untuk numerasi justru meningkat signifikan. Secara keseluruhan, kompetensi siswa di bidang literasi dan numerasi meningkat cukup signifikan dari 2021 hingga 2023 (Table 1.20). Namun demikian, capaian ini masih di bawah harapan dan perlu ditingkatkan.

**Tabel 1. 18 Rata-Rata Skor Siswa PKPPS Ula, Wustha, dan Ulya pada Asesmen Nasional Tahun 2021-2024**

| Jenjang | Rata-rata Skor | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Guru | | | | Jumlah Guru | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Paket A/Ula | 45,99 | 48,35 | 49,36 | 49,03 | 33,71 | 35,65 | 38,16 | 44,12 |
| Paket B/Wustha | 57,44 | 56,25 | 57,11 | 58,17 | 52,42 | 50,63 | 52,91 | 54,61 |
| Paket C/Ulya | 60,44 | 55,67 | 58,59 | 60,75 | 48,90 | 49,14 | 51,18 | 52,84 |

Sumber: Diolah dari hasil AN Kemdikdasmen 2021-2023

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, Kemenag akan memfokuskan kebijakan peningkatan pendidikan pesantren ke depan pada **penguatan kurikulum berbasis literasi dan numerasi, peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi metode pembelajaran inovatif**, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian siswa untuk memastikan peningkatan yang konsisten dan merata di semua jenjang pendidikan.

### c. Akses Berkualitas, Mutu dan Daya Saing Pendidikan Tinggi

Sub-Bagian ini akan memaparkan dua hal utama: (1) Perkembangan akses pendidikan tinggi; dan (2) Perkembangan mutu dan daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).

1) Akses Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly Indonesia tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam data BPS dan dikonfirmasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) baru mencapai 32% (Sumber Susenas BPS, 2024). Angka ini masih lebih rendah dibanding APK PT beberapa negara tetangga seperti Singapura (91%), Malaysia (43%), atau Thailand (49%).

Terkait dengan akses pendidikan tinggi, Kemenag turut berkontribusi terhadap penyediaan layanan pendidikan tinggi melalui Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly. Data BPS Tahun 2024 menyebutkan terdapat total PTK 967 PTK, yang terdiri dari dari 894 PTK Swasta 73 PTK Negeri. Ma'had Aly sebagai pendidikan tinggi berbasis pesantren mengembangkan kajian keislaman secara berjenjang, mulai dari program sarjana hingga doktor. Pada 2023, jumlah mahasiswa di PTK dan Ma'had Aly berjumlah 1.024.406 orang dengan rincian 1.003.362 mahasiswa PTK dan 21.044 mahasantri Ma'had Aly. Dengan jumlah mahasiswa ini, Kemenag menyumbang APK PT sebesar 4,54 poin persentase terhadap APK PT nasional.

**Gambar 1. 4 Perkembangan APK PTK dan Ma'had Aly**




Capaian tersebut dapat diraih antara lain berkat beberapa kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag dalam meningkatkan layanan pendidikan tinggi agama dan keagamaan. Dalam beberapa tahun terakhir (2020-2024), hal-hal yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan APK pendidikan tinggi mencakup, antara lain: (1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (2) Diversifikasi pengembangan keunggulan PTK berbasis kekuatan kelembagaan lokal; dan (3) Pengendalian dan pembinaan PTK swasta yang kurang bermutu. Ke depan, Kemenag dapat meningkatkan kontribusinya dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dengan terus meningkatkan **kualitas pendidikan PTK, terutama dengan meningkatkan kualitas penelitian dan mengatasi disparitas antara PTK Negeri dan Swasta, sehingga lebih banyak pihak tertarik melanjutkan studi ke PTK**.

2) Pengelolaan dan Penempatan Dosen

Kualitas pendidikan tinggi akan sangat tergantung pada kualitas dosen. Dalam konteks pendidikan tinggi, dosen berfungsi sebagai tanaga pengajar dan peneliti yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan

inovasi. Tanpa pengembangan inovasi dan ilmu pengetahuan, kualitas pendidikan tinggi akan sulit untuk ditingkatkan.

Pada 2024, data EMIS menunjukkan bahwa dari 43.598 dosen di bawah Kemenag, 10.183 dosen (23,36%) berpendidikan doktor. Sementara, 33.205 dosen (76,16%) memiliki latar belakang pendidikan Strata 2, dan 210 dosen (0,48%) berpendidikan S1. Capaian ini dapat diraih antara lain berkat upaya berkelanjutan Kemenag untuk meningkatkan kompetensi dosen dan juga tenaga kependidikan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pengajaran, Kemenag juga berupaya meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun demikian, dengan sebagian besar dosen masih berpendidikan Strata 2 atau bahkan Strata 1, Kemenag masih memiliki tantangan besar untuk meningkatkan kualitas dosen. Kemenag perlu meningkatkan kualifikasi sebagian besar dosennya agar bisa menyelesaikan pendidikan doktor atau paling tidak master bagi mereka yang masih berpendidikan S1. Selain itu, Kemenag juga perlu terus mendorong peningkatan kompetensi dosen di lingkungan Kemenag. Secara jabatan fungsional, Tabel 1.20 **menunjukkan hanya 1.270 dosen (3,18 %) telah meraih jabatan fungsional Guru Besar dan 11.300 dosen (28,33%) masih berstatus Asisten Ahli**.

**Tabel 1. 19 Jabatan Fungsional Dosen PTKN dan PTKS**

| No. | Jabatan Fungsional | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Guru Besar | 1.270 | 3,18 |
| 2 | Lektor Kepala | 4.154 | 10,42 |
| 3 | Lektor | 23.160 | 58,07 |
| 4 | Asisten Ahli | 11.300 | 28,33 |
| **TOTAL** | | **43.598** | **100** |

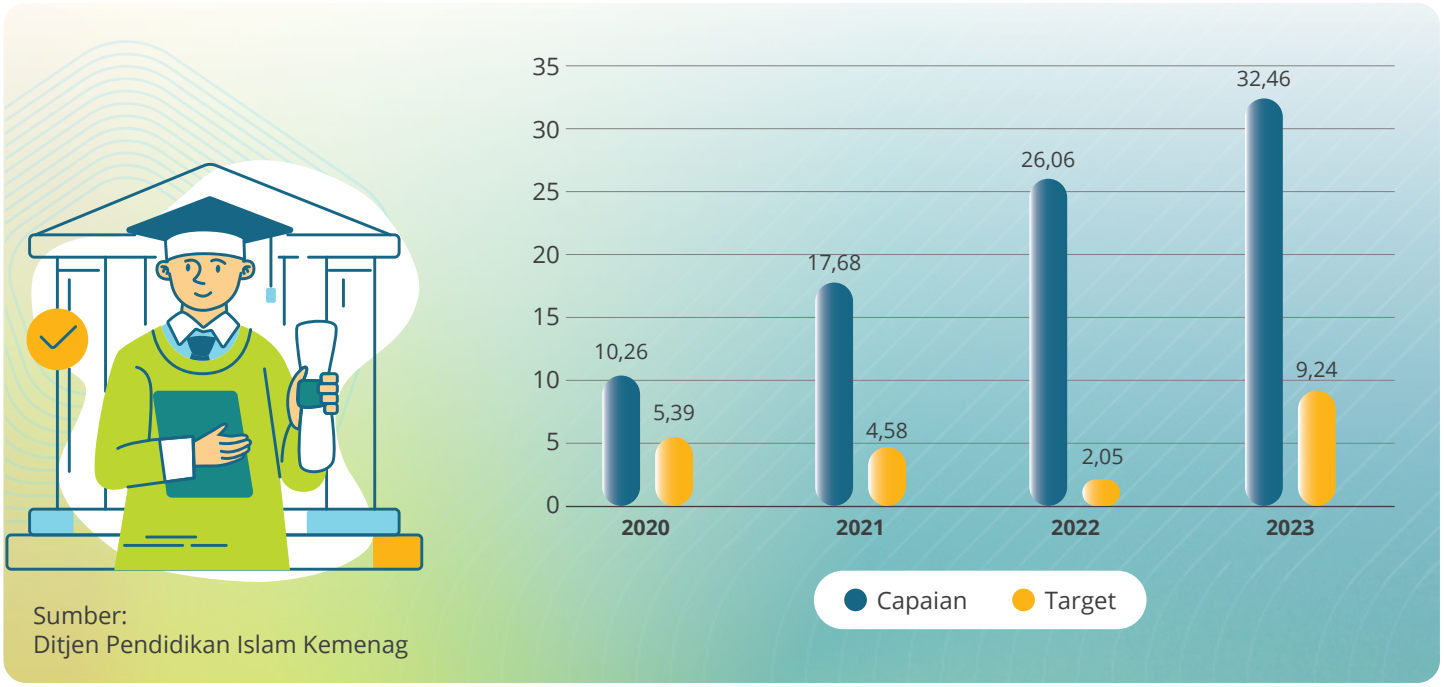
Sumber: EMIS Kemenag 2024

3) Akreditasi PTK dan Asesmen Ma'had Aly

Akreditasi merupakan salah satu instrumen penting untuk melakukan penjaminan mutu. Pendidikan Tinggi Keagamaan, khususnya yang masih memiliki nilai akreditasi yang rendah atau bahkan belum terakreditasi perlu untuk meningkatkan kualitasnya sehingga dapat terakreditasi dan mendapat nilai unggul.

Pada 2024, 25 UIN dan 2 IAIN terakreditasi unggul serta 1 institusi terakreditasi A. Akan tetapi, secara umum Kemenag masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas PTK dan Ma'had Aly. Gambar 1.5 menunjukkan hanya 9,24% PTK/Ma'had Aly mendapatkan nilai akreditasi/asesmen minimal B, jauh di bawah target Kemenag (32,46%).

**Gambar 1. 5 Persentase PTK/Ma'had Aly dengan Status Akreditasi/Asesmen Unggul**



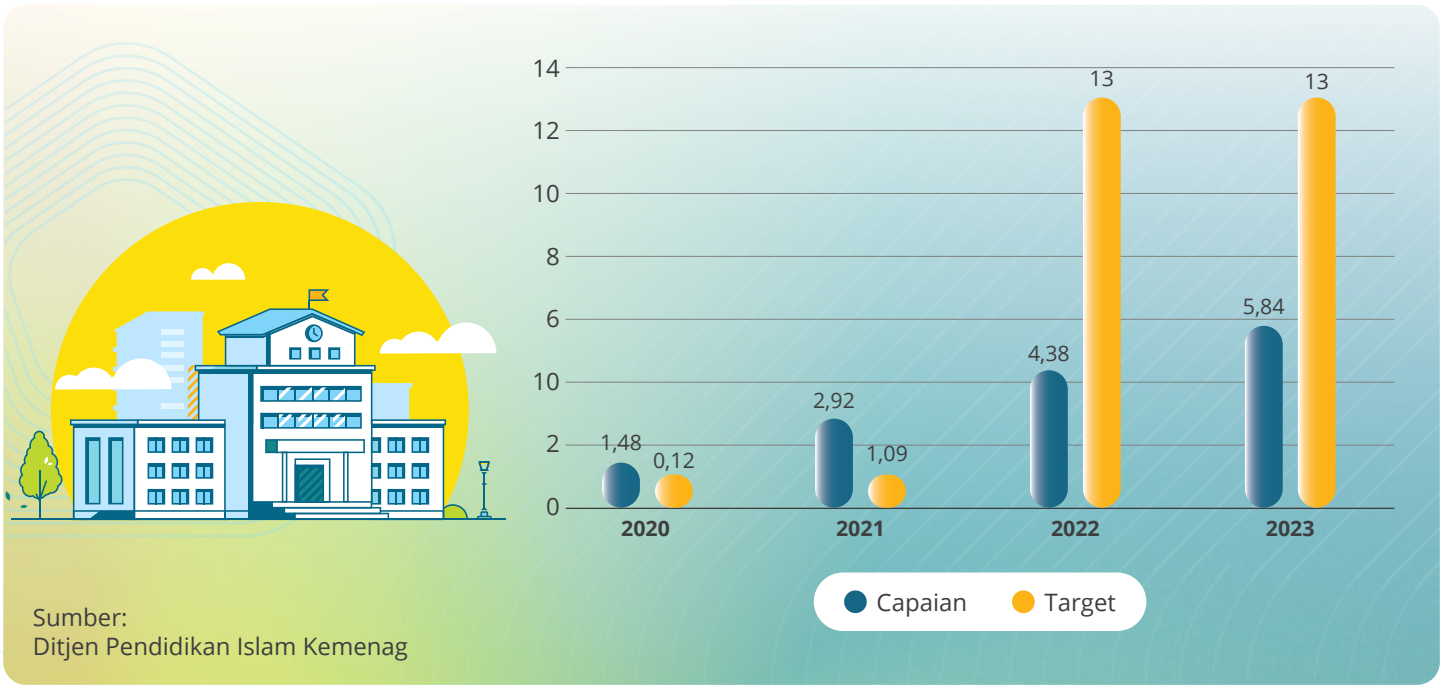

Sumber:
Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenag terus mendorong program studi yang masih terakreditasi B untuk meningkatkan kualitas program studi maupun institusi yang menaunginya agar memperoleh predikat unggul dan menjadi lembaga PTK/Ma'had Aly yang unggul dan kompetitif. Akan tetapi, rendahnya kenaikan pangkat dosen, kurangnya kesadaran pimpinan, dan rendahnya link and match lulusan masih sering menjadi hambatan bagi PTK dan Ma'had Aly untuk meningkatkan akreditasi mereka.

Ke depan, Kemenag perlu terus mendorong PTK/Ma'had Aly untuk meningkatkan nilai akreditasi/asesmen, terutama yang masih mendapat nilai B. Selain itu, perlu diberikan perhatian lebih pada PTK/Ma'had Aly yang belum memiliki status akreditasi/asesmen atau masih berstatus C melalui pemetaan, penguatan kelembagaan, dan kerja sama dengan PTK/Ma'had Aly unggul agar mencapai hasil yang lebih baik

4) Akreditasi dan Peringkat Internasional PTK
Akreditasi internasional dan jumlah mahasiswa asing merupakan dua indikator penting yang menunjukkan pengakuan internasional terhadap PT. Pada 2023, sekitar 13% PTK memiliki prodi internasional. Meski tidak ada perubahan signifikan antara 2022 dan 2023, namun capaian tahun 2023 tersebut jauh lebih tinggi dari capaian tahun 2021 dan 2020 (Gambar 1.5). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah program studi terakreditasi internasional dan memiliki mahasiswa asing meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

**Gambar 1.6 PTK dengan Prodi Terakreditasi Internasional (%)**




Sumber:
Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

Peningkatan ini didorong oleh pemberian beasiswa untuk mahasiswa asing dan penyebaran informasi tentang PTK ke tingkat global. Dalam beberapa tahun terakhir (2019-2024), Kemenag terus mendorong penyelenggaraan kelas/program studi bertaraf internasional. Selain itu, Kemenag juga mendorong pengembangan kelembagaan PTK menuju *World Class University*.

Kementerian Agama memiliki visi menjadikan PTKI sebagai *World Class University*. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya sistematik dan konsisten untuk mentransformasikan PTKI menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan menerapkan standar internasional. Upaya ini mulai terlihat hasilnya dari tingkat pengakuan internasional terhadap beberapa PTKIN oleh lembaga-lembaga pemeringkat internasional seperti *QS World University Ranking* (QS WUR). Tahun 2024 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada dalam peringkat 131 untuk QS WUR Asia Tenggara, dan 751-800 untuk QS WUR Asia. Universitas ini menempati peringkat 101-140 QS WUR Dunia untuk kajian *Theology, Divinity and Religious Studies*.[1] Sementara itu di tahun yang sama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menempati peringkat 169 untuk QS WUR Asia Tenggara[2].

Selain itu, keberadaan Universtias Islam Internasional Indonesia (UIII) juga menjadi perhatian Kemenag dan Pemerintah dalam upaya untuk terus mengembangkan mutu perguruan tinggi sehingga dalam RPJMN 2025 – 2029, UIII ditetapkan menjadi salah satu Proyek Strategi Nasional melanjutkan apa yang sudah ditetapkan di era sebelumnya sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selain untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi, UIII juga dimaksudkan sebagai salah satu wahana *soft diplomacy* Indonesia dalam menyuarakan Islam moderat di dunia Internasional.

UIII mengusung visi "Terwujudnya dunia lebih baik melalui Pendidikan pascasarjana dan riset unggulan", UIII mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan sains, teknologi, ilmu sosial dan humaniora, serta memperkuat peran Indonesia sebagai episentrum Islam *rahmatan lil 'alamin* di kancah internasional.

1. Sumber : https://kemenag.go.id/internasional/masuk-qs-world-university-ranking-2024-uin-jakarta-setara-universitas-kelas-dunia-r3hx6
2. Sumber : https://lpm.uin-malang.ac.id/uin-malang-terus-berupaya-tingkatkan-peringkat-qs-wur/

Untuk mewujudkan visi tersebut, UIII menetapkan misi strategis yang mencakup: 1) menyelenggarakan Pendidikan Tingkat sarjana dan pascasarjana yang unggul; 2) mengembangkan penelitian yang inovatif dan berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan Masyarakat; dan 3) memajukan kebudayaan Islam Indonesia sebagai salah satu bagian dari peradaban dunia. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada awalnya ditetapkan untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat pascasarjana yang unggul. Namun, seiring perkembangan kebutuhan dan dinamika pendidikan tinggi, UIII mengajukan usulan perubahan statuta untuk memperluas mandatnya agar dapat menyelenggarakan pendidikan pada jenjang sarjana. Langkah ini bertujuan memperkuat posisi UIII sebagai pusat keilmuan, penelitian, dan kebudayaan Islam Indonesia yang berkontribusi dalam peradaban dunia. Selain program pascasarjana, UIII juga merencanakan pembukaan program sarjana (S1) pada beberapa fakultas, antara lain Bioteknologi, Informatika, dan Kesehatan Masyarakat.

Dalam 5 tahun ke depan, akselerasi internasionalisasi melalui program *joint degree*, peningkatan jumlah mahasiswa asing hingga 50% dari jumlah mahasiwa dalam negeri. Jumlah mahasiswa yang berafiliasi dengan UIII di tahun 2024 adalah 474 mahasiswa termasuk 203 mahasiswa asing yang berasal dari 40 negara. Hingga saat ini, tak kurang dari 42,8% mahasiswa UIII merupakan mahasiswa internasional yang berasal berbagai negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika. UIII juga mulai menerima mahasiswa internasional dari negara maju seperti Australia.

Selama periode 2021–2025, UIII menunjukkan progres riset yang signifikan melalui pendanaan internal strategis, publikasi, dan keterlibatan akademik internasional. Pada tahun 2024, UIII mengalokasikan dana riset untuk 12 proyek—termasuk kategori *flagship*, kolaboratif, dan berbasis fakultas—serta enam proyek pengabdian masyarakat, yang dievaluasi melalui seminar bersama para dosen eksternal untuk memperkuat kualitas dan efek sosial penelitian sebagaimana dilansir dalam laman https://old.uiii.ac.id/news/57806/stepping-into-2025-confidently-through-improved-research-and-community-service?utm._. Memasuki 2025, Sebanyak 20 dosen memperoleh kontrak

riset formal melalui *Research Grant Program*, yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk studi Islam, ilmu sosial, pendidikan, dan ekonomi, sesuai dengan pendekatan interdisipliner UIII dalam menangani isu-isu kontemporer, yang bertujuan memperkuat ekosistem riset, menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi, dan menjawab tantangan global di berbagai disiplin. Keberhasilan akademik UIII juga terlihat dari sejumlah mahasiswa dan dosen yang berprestasi di forum internasional, antara lain, mahasiswa PhD dan MA yang memenangi kompetisi penulisan artikel dan menjadi pembicara dalam konferensi internasional seperti ISEAES, AGC-SCOPOS Aceh, dan konferensi di Jerman dan Istanbul.

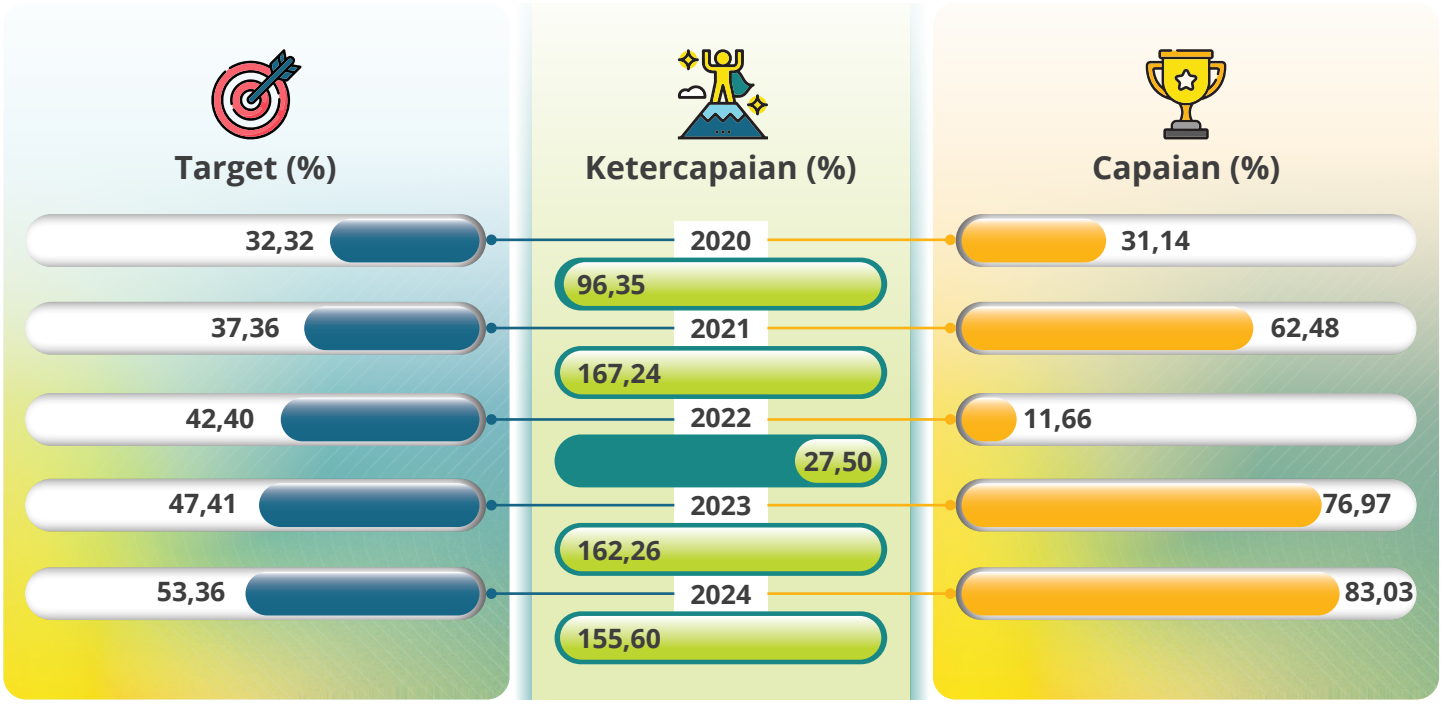
Upaya penguatan terhadap pemeringkatan pada *Times Higher Education* (THE) *Impact SDGs* sebagaimana dirilis laman https://www.timeshighereducation.com/impactrankings pada Rabu, 18 Juni 2025. Dalam pemeringkatan tersebut, UIN Raden Intan Lampung berada di rentang peringkat 1001–1500 dunia, posisi ke-36 secara nasional, dan menempati posisi tertinggi di antara PTKIN se-Indonesia[3] Harapannya, UIII di periode berikutnya dan juga diikuti oleh PTKN lainnya mampu masuk ke dalam pemeringkatan *THE Impact SDGs* sebagaimana ditargetkan dalam matriks kinerja Renstra Kementerian Agama untuk 2025-2029.

5) Serapan Lulusan PTK di Dunia Kerja
Serapan lulusan di dunia kerja menjadi salah satu indikator kualitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi. Hal itu juga menunjukkan relevansi kurikulum yang dikembangkan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja khususnya.

Lulusan perguruan tinggi memiliki tingkat keterserapan yang cukup baik di dunia kerja. Gambar 1.7 menunjukkan bahwa pada 2024, 83,03% lulusan perguruan tinggi dapat memperoleh pekerjaan dalam jangka waktu 1 tahun setelah lulus.

3. https://kemenag.go.id/nasional/uin-raden-intan-lampung-raih-peringkat-pertama-the-impact-rankings-2025-lingkup-ptkin-ptlbE

**Gambar 1. 7 Persentase Lulusan PTK yang Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan**




Sumber: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2024, lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, persentase lulusan yang berhasil bekerja dalam waktu 1 tahun setelah lulus tercatat sebesar 76,97%, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 83,03%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2024, yang mencatat persentase penduduk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86%. Dalam beberapa tahun terakhir (2020–2024), Kemenag terus berupaya meningkatkan daya saing lulusan melalui berbagai langkah, antara lain: (1) Peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif; (2) Pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal); (3) Revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja.

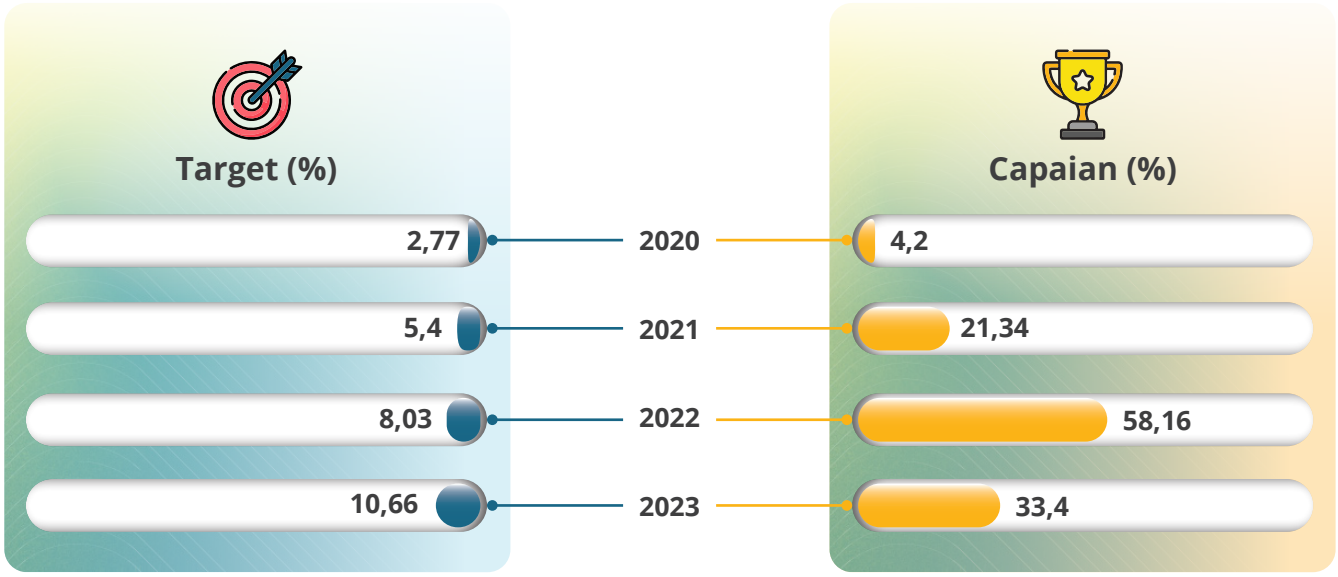
Akan tetapi, tantangan PTK akan semakin berat, terutama dengan adanya perubahan cepat di pasar kerja akibat kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI). Lulusan PTK perlu mengembangkan keterampilan yang lebih fleksibel dan inovatif, seperti keterampilan digital dan pemecahan masalah, agar dapat bersaing. Untuk itu, ke depan Kemenag dan PTK perlu terus meningkatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.

6) Publikasi dan Sitasi Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional

Publikasi di jurnal internasional bereputasi dan sitasi publikasi ilmiah juga menjadi indikator penting mutu perguruan tinggi. Kemampuan untuk melakukan hal-hal ini menunjukkan kapasitas yang tinggi untuk melakukan penelitian yang berkualitas. Tanpa penelitian yang berkualitas, pengajaran dan kegiatan akademik di lingkungan perguruan tinggi akan stagnan. Oleh karena itu, publikasi dan sitasi publikasi ilmiah, khususnya di jurnal internasional bereputasi, perlu terus digalakkan.

Pada 2023, sekitar 2.196 artikel yang ditulis sivitas akademika PTK diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Angka ini lebih tinggi dari capaian 3 tahun sebelumnya (2020), yang hanya mencapai 14,3%. Dalam hal sitasi publikasi ilmiah, Gambar 1.8 menunjukkan bahwa pada 2023, dari 2.196 publikasi ilmiah yang terbit di jurnal internasional, sebanyak 1.293 atau 58,88% memperoleh sitasi. Angka ini lebih tinggi dari capaian dua tahun sebelumnya (2021), yang mencapai 21,34%. Akan tetapi, proporsi artikel yang mendapat sitasi ilmiah pada 2023 masih lebih rendah dari proporsi artikel yang mendapat sitasi ilmiah pada 2022 yaitu sebanyak 58,16%. Hal ini mungkin mengindikasikan perbedaan kualitas pada artikel-artikel tersebut.

**Gambar 1. 8 Persentase Sitasi Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional**




Sumber: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

Beberapa hal berkontribusi terhadap peningkatan publikasi ilmiah sivitas akademika PTK. Dalam beberapa tahun terakhir (2019-2024), Kemenag terus berupaya untuk meningkatkan publikasi dan sitasi jurnal ilmiah di jurnal internasional melalui, antara lain: (1) Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi secara nasional dan internasional; dan (2) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll.).

Namun demikian, capaian tersebut belum merata dan masih didominasi oleh tujuh PTKIN besar. Kemenag perlu mendorong dosen PTK lain untuk meningkatkan publikasi ilmiah dan sitasi publikasi ilmiah. Selain itu, Kemenag juga perlu meningkatkan kualitas jurnal PTKI. Hingga Januari 2024, tercatat 37 jurnal ilmiah di bawah PTKIN telah terindeks Scopus. Kemenag perlu mendorong PTKI mengembangkan kualitas jurnal ilmiah mereka melalui program akselerasi yang dapat mencakup *workshop* tata kelola jurnal, pelatihan pengelola, penghargaan bagi jurnal bereputasi, serta pendampingan bagi dosen dalam menulis artikel berkualitas internasional. Kolaborasi dengan lembaga luar negeri dan riset antar-PTKI juga perlu diperkuat.

## 3. Kondisi Umum Bidang Tata Kelola Pemerintahan

### a. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan setiap kebijakan dan kegiatan yang ditentukan. Sebagus apapun perencanaan suatu kebijakan atau kegiatan, pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik tanpa didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk mengukur kualitas tata kelola, Kemenag menggunakan hasil penilaian laporan keuangan dan reformasi birokrasi. Tabel berikut menunjukkan hasil penilaian tersebut. Pada tahun 2023, Kemenag memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini diperoleh dan dapat dipertahankan Kemenag sejak beberapa tahun sebelumnya. Predikat ini sangat membanggakan mengingat Kementerian Agama adalah instansi vertikal dengan satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dari tingkat Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten, hingga Kecamatan. Capaian ini dapat diraih berkat sinergitas dari seluruh satuan kerja untuk berkomitmen mengelola keuangan negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Demikian pula pada indikator nilai indeks reformasi birokrasi.

Dalam reformasi birokrasi, pada 2023 Kemenag memperoleh 79,16. Meski nilai ini sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan, nilai ini lebih tinggi dari nilai yang diraih Kemenag pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan nilai 79,16, Kemenag mendapat predikat 'Sangat Baik' dalam menjalankan reformasi birokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan terus menerus dalam hal penataan peraturan perundangan, penataan organisasi, penguatan tata kerja, penguatan pengelolaan SDM, penguatan *hybrid* sistem pengawasan internal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

**Tabel 1.20 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel Tahun 2020-2024**

| Indikator | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Opini Laporan Keuangan | Target | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Realisasi | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Persentase Capaian | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nilai Indeks Reformasi Birokrasi | Target | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| | Realisasi | 75,32 | 75,84 | 75,84 | 79,16 | 85,83 |
| | Persentase Capaian | 98,74 | 97,82 | 96 | 98,95 | 104,67 |

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024

Disamping capaian yang baik tentang reformasi birokrasi, pada tahun 2022 Kemenag memperoleh penilaian Sangat Baik dari Ombudsman RI tentang kualitas pelayanan publik. Kemenag mendapat nilai 90.28 dan masuk dalam kategori A (Zona Hijau), dengan opini Kualitas Tertinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Capaian-capaian tersebut diraih berkat berbagai upaya yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Dalam beberapa tahun terakhir (2020-2024), upaya tersebut mencakup, antara lain: (1) Peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan *Core Values* (kompas moral) ASN BerAKHLAK; (2) Pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi; (3) Peningkatan tata laksana transformasi digital Kementerian Agama melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (4) Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui inovasi berdampak; (5) Penguatan keterbukaan informasi publik; (6) Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; (7) Penerapan sistem merit; dan (8) Penguatan pengawasan internal untuk kepatuhan standar pelayanan publik.

Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Kemenag tersebut memberikan hasil positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK, integrasi sistem aplikasi dan data, peningkatan tata laksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, implementasi reformasi birokrasi, dan berbagai langkah lainnya telah diakui berjalan cukup baik. Berbagai penghargaan yang diterima menunjukkan bahwa perbaikan ini diakui oleh para instansi pengampu elemen-elemen reformasi birokrasi secara nasional. Meski demikian, jalan Kemenag masih panjang untuk mewujudkan organisasi birokrasi yang modern, adaptif, dan mencapai standar tertinggi dalam tata kelola pemerintahan. Penguatan sistem pencegahan korupsi, penguatan implementasi sistem merit, penguatan implementasi reformasi birokrasi tematik dan berdampak, serta keterbukaan informasi masih harus terus dilanjutkan untuk mencapai standar tertinggi tata kelola pemerintahan di Kemenag.

### b. Kualitas Kebijakan

Perumusan kebijakan perlu didukung dengan bukti empiris dan penalaran yang jelas berdasarkan bukti tersebut. Tanpa bukti dan penalaran berdasarkan bukti, kualitas kebijakan dapat dengan mudah dipertanyakan publik. Oleh karena, penelitian pengembangan menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang baik. Kualitas penelitian pengembangan dapat dilihat dari jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan *(policy paper)*.

Tabel 1.23 berikut menunjukkan proporsi hasil penelitian yang dijadikan dasar kebijakan di Kemenag. Pada tahun 2023, realisasi capaian sasaran ini sebesar 100.00 atau 114,94% dari target sebesar 87.00 dengan kategori sangat baik. Capaian

tersebut tidak mengalami penurunan dibanding dengan capaian tahun 2022 meskipun ada kenaikan target pada tahun 2023.

**Tabel 1. 21 Persentase Penelitian yang Dijadikan Dasar Kebijakan Tahun 2020-2024**

| Uraian | Tahun | | | | | Nilai Indeks yang Sudah Dicapai Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Target | 80.00 | 82,00 | 86,00 | 87,00 | 90,00 | 10,00 |
| Realisasi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 162 | (telah melampaui target) |
| **Persentase Capaian** | **120,00** | **120,00** | **117,65** | **114,94** | **180,00** | **(telah melampaui target)** |

Sumber: Laporan Subdit Penelitian Kementerian Agama Tahun 2024

Capaian ini dapat diraih berkat beberapa upaya yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan kualitas penelitian pengembangan yang dilakukan di lingkungan Kemenag. Upaya tersebut mencakup, antara lain: (1) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan melalui penyusunan *policy paper*; (2) Peningkatan kompetensi analis kebijakan; (3) Peningkatan audiensi dan advokasi hasil penelitian kebijakan kepada stakeholder pengambil keputusan; dan (4) Peningkatan hasil penelitian yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kualitas penelitian, pengembangan, dan kebijakan semakin mengalami kemajuan. Banyaknya hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi naskah kebijakan menunjukkan bahwa Kementerian Agama semakin mengarah pada implementasi *evidence-based policy*. Peningkatan kompetensi analis kebijakan, dan peningkatan advokasi hasil penelitian kebijakan, menunjukkan bahwa penelitian, pengembangan, dan pengembangan kebijakan sudah berada pada rel yang sesuai. Dengan transformasi Kemenag mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, kualitas penelitian, pengembangan, dan penyusunan kebijakan juga harus semakin ditingkatkan.

## B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1. Kerukunan Umat Beragama dan Harmonisasi Sosial

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bertujuan memperbaiki kehidupan beragama dan kerukunan dan harmoni sosial. Kemenag mengukur perkembangan kehidupan beragama dan kerukunan dan harmoni sosial melalui IKsUB, IKUB dan data capaian lainnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut, terdapat berbagai potensi yang mendukung pencapaian tujuan ini, seperti kompetensi penyuluh agama, jaringan bimbingan keagamaan, kerja

sama lintas lembaga dan pengembangan sistem peringatan dini. Dukungan organisasi internasional seperti PBB dan UNESCO, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain menjadi peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan cara pandang dan praktik keagamaan jalan tengah.

**Tabel 1. 22 Potensi dan Permasalahan Peningkatan Pemahaman dan Praktik Beragama Jalan Tengah**

| Kekuatan | Peluang |
|---|---|
| 1. Kompetensi para penyuluh, penghulu, guru agama, dan tokoh agama yang cukup tinggi untuk memberikan pemahaman yang baik dan contoh pengalaman ajaran agama jalan tengah di masyarakat. | 1. Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi peluang besar untuk penyebaran pesan-pesan keagamaan yang positif secara cepat dan luas. |
| 2. Jaringan penyuluh agama di seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. | 2. Peluang kerjasama dengan instansi lain, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, ormas keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan program peningkatan pemahaman dan praktik agama jalan tengah. |
| 3. Kemampuan Kemenag untuk mendukung lembaga keagamaan dalam melaksanakan program-program yang relevan dengan pengalaman ajaran agama. | 3. Dukungan organisasi internasional seperti PBB, UNESCO, dan berbagai LSM global terhadap program-program yang mempromosikan toleransi, moderasi beragama dan dialog antaragama. |
| 4. Posisi Kemenag sebagai leading sektor dalam promosi moderasi beragama memungkinkan Kemenag melakukan koordinasi lintas Kementerian/ Lembaga maupun perangkat Pemerintah Daerah. | 4. Penerimaan pendekatan multikultural dalam dunia pendidikan memungkinkan integrasi pendidikan moderasi beragama ke dalam kurikulum sekolah secara lebih luas. |
| 5. Pengembangan sistem peringatan dini oleh Kemenag untuk mendeteksi potensi konflik berbasis agama dan mengambil tindakan preventif sebelum situasi berkembang menjadi lebih serius. | 5. Kerja sama para pemuka agama dan budayawan dalam mempromosikan perdamaian dan kerukunan sosial. |

| Kelemahan | Tantangan |
|---|---|
| 1. Regulasi dan program belum disusun berdasarkan kerangka kesalehan sosial. | 1. Penyebaran paham radikal dan ekstremisme atas nama agama berpotensi memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik. |
| 2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program antar satuan kerja. | 2. Penyebaran interpretasi keliru atau menyimpang dari ajaran agama melalui ceramah, buku, dan media digital oleh kelompok atau individu yang memiliki agenda tertentu. |
| 3. Keterbatasan kompetensi rohaniawan dan penyuluh agama dalam memahami konteks sosial-budaya dan isu-isu lingkungan, serta mendorong masyarakat meningkatkan pemahaman agama berorientasi pada kesalehan sosial dan keselarasan dengan alam. | 3. Meningkatnya sekularisasi di sebagian kalangan, terutama di kota-kota besar, dapat menyebabkan gesekan dengan kelompok yang lebih konservatif dalam beragama. |
| 4. Keterbatasan program dan dukungan anggaran terhadap penyuluhan pada daerah terpencil. | 4. Polarisasi politik berdasarkan pada identitas agama atau etnis dapat mengancam kohesi sosial umat beragama. |
| 5. Prosedur pengusulan program yang panjang menghambat inisiatif inovasi program dan penyuluhan. | 5. Komersialisasi penyiaran agama yang menjadikan agama sebagai alat untuk keuntungan materi. |
| 6. Kurangnya pemanfaatan teknologi, terutama teknologi informasi dalam menyebarkan pesan-pesan keagamaan sehingga jangkauan audiens terbatas. | 6. Penggunaan media sosial dan platform digital untuk penyebaran kebencian, intoleransi, atau fitnah berbasis agama. |
| 7. Sinergi kebijakan antara Kemenag dan lembaga lain dapat meningkatkan efektivitas dan harmonisasi program-program keagamaan antarumah beragama. | 7. Budaya pop dan konsumtivisme yang semakin menjauhkan umat beragama dari nilai-nilai kesalehan keagamaan. |
| | 8. Kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial dapat memicu ketidakpuasan yang diekspresikan melalui konflik berbasis agama. |

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin timbul pada pemahaman dan praktik beragama jalan tengah yang perlu diangkat adalah mempercepat penerbitan peraturan perundangan tentang perlindungan umat beragama, peningkatan jaminan beribadah, pengarusutamaan penguatan moderasi beragama, peningkatan layanan cegah konflik sosial keagamaan, penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama, dan peningkatan kesalehan spiritual dan kesalehan sosial.

## 2. Kualitas Layanan Keagamaan Transformatif

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, Kemenag menaruh perhatian khusus pada tiga hal utama: Layanan Dana Sosial Keagamaan (Ziswaf, BAKKAT, Punia, Paramitha, Dana Kebajikan, Dana Amal Kasih), layanan penjaminan hak beragama, beribadah, beraktivitas, layanan KUA, layanan penjaminan dan literasi produk halal, dan layanan ibadah haji dan umrah. Selain itu, Kemenag juga menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi keagamaan umat. Tabel berikut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan kualitas layanan kehidupan beragama.

**Tabel 1. 23 Potensi dan Permasalahan SWOT Peningkatan Layanan Keagamaan Transformatif**

| Kekuatan | Peluang |
|---|---|
| 1. KUA memiliki jaringan yang luas sampai tingkat kecamatan dan prosedur pelayanan standar seiring dengan proses revitalisasi dan transformasi digital layanan KUA. | 1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap KUA memungkinkan KUA memperluas sosialisasi dan jangkauan layanannya. |
| 2. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendaftaran serta akses materi persiapan ibadah haji. | 2. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan transfer pengetahuan antar KUA dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pegawai KUA dan penerapan etos kerja yang lebih baik. |
| 3. Meningkatnya kuota haji dapat mengurangi masa tunggu, khususnya pada jemaah dengan nomor urut porsi yang lebih awal. | 3. Kemenag sebagai penyelenggara resmi ibadah haji dapat menerapkan standarisasi kualitas dan prosedur layanan untuk meminimalkan kesenjangan kualitas layanan di daerah. |
| 4. Proses bisnis pendaftaran sertifikasi halal yang semakin matang dan mapan memungkinkan pelayanan yang lebih terjamin. | 4. Potensi kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk Kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Non-Pemerintah, Universitas, dan lainnya untuk meningkatkan jangkauan sertifikasi halal. |
| 5. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah terhadap pengembangan ekonomi keagamaan umat, termasuk melalui kebijakan fiskal, regulasi, dan insentif. | 5. Industri halal memiliki potensi pertumbuhan besar di tingkat global maupun nasional, dengan nilai ekonomi yang terus meningkat. |
| 6. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah memungkinkan pengembangan program ekonomi syariah, seperti investasi sosial dan kewirausahaan berbasis agama. | 6. Potensi dana wakaf meningkat dalam empat tahun terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat lebih dari dua kali lipat. |
| 7. Meningkatnya jumlah SDM muda di Kemenag baik di pusat maupun daerah meningkatkan kapasitas SDM dalam digitalisasi layanan keagamaan. | 7. Peningkatan kesadaran organisasi keagamaan tentang pentingnya mobilisasi dana dan konsolidasi sosial keagamaan. |

| Kelemahan | Tantangan |
|---|---|
| 1. Anggaran terbatas dan kualitas sarana dan prasarana (seperti fasilitas dan jaringan internet) dan sumber daya manusia tidak merata di berbagai KUA. | 1. Pemahaman masyarakat tentang fungsi dan transformasi layanan KUA, serta sertifikasi jaminan produk halal masih perlu ditingkatkan. |
| 2. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan haji, khususnya pada asrama haji embarkasi maupun transit, belum sesuai standar sarana dan prasarana ibadah haji. | 2. Keragaman kondisi wilayah Indonesia dan kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap model pelayanan ibadah haji. |
| 3. Kualitas layanan ibadah haji di tanah suci, khususnya akomodasi, konsumsi, transportasi, dan manajemen kerumunan jemaah haji di Indonesia dan tanah suci masih perlu ditingkatkan. | 3. Adanya ketidakpercayaan di sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kuota haji yang betul-betul transparan. |
| 4. Keberadaan layanan jaminan produk halal, organisasi pelaksana, dan pendampingan proses sertifikasi produk halal belum merata di seluruh wilayah Indonesia. | 4. Munculnya ketidakpercayaan di sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal. |
| 5. Tumpang tindih kebijakan/program antar pemangku kepentingan di bidang pengelolaan ekonomi keagamaan umat. | 5. Adanya ketidakpercayaan sebagian kalangan terhadap lembaga pengelola zakat, wakaf, dan dana umat lainnya terkait transparansi dan akuntabilitas. |
| 6. Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pengelolaan dana keagamaan umat masih terbatas. | 6. Persaingan dengan sektor keuangan konvensional yang lebih mapan dan infrastruktur yang kuat. |
| 7. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana keagamaan umat belum menjadi prioritas, sehingga menjadi concern masyarakat. | 7. Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil yang menghambat pemerataan layanan ekonomi keagamaan dan fasilitas haji. |

Mempertimbangkan pembahasan diatas, hal-hal yang perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan keagamaan antara lain, yaitu : Transformasi layanan keagamaan berbasis digital, Peningkatan sumber daya manusia yang andal dan profesional, Penguatan layanan KUA, Layanan haji, Layanan halal, dan Layanan penyuluh agama yang berdampak dan berorientasi pada kemaslahatan, Distribusi kitab suci dan buku keagamaan yang merata, sarana dan prasarana peribadatan yang sesuai standar serta penyaluran dana sosial keagamaan yang tepat sasaran untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

## 3. Akses Pendidikan yang Merata

Pemerataan akses pendidikan berkualitas di lingkungan Kemenag dilakukan melalui peningkatan layanan pendidikan dengan kekhasan agama, pendidikan agama dan keagamaan, dan pesantren. Peningkatan akses pendidikan diukur melalui kenaikan tingkat APK dan APM. Tabel berikut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

**Tabel 1. 24 Potensi dan Permasalahan Pemerataan Akses Pendidikan**

| Kekuatan | Peluang |
|---|---|
| 1. Kementerian Agama memiliki jaringan pendidikan dengan kekhasan agama yang luas, tersebar di penjuru negeri dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. | 1. Pemerintah menggalakkan pendidikan anak usia dini dan mendorong peningkatan akses pendidikan. |
| 2. Madrasah memiliki kurikulum integratif yang menggabungkan pendidikan umum dan agama. | 2. Citra pendidikan kekhasan agama semakin meningkat di mata masyarakat karena menggabungkan pengetahuan umum dan agama. |
| 3. Bantuan pendanaan pemerintah dalam bentuk BOS menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai kegiatan operasional dan peningkatan mutu pendidikan. | 3. Pemerintah menjamin akses pendidikan dasar dan menengah (pendidikan dasar 13 tahun) melalui BOS dan KIP. |
| 4. Pesantren berperan menuntaskan Wajib Belajar 13 Tahun melalui PDF/Muadalah dan pendidikan kesetaraan. | 4. Diversifikasi akses pendidikan berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran. |
| 5. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, termasuk Inpres No. 7 Tahun 2025 yang memberi mandat revitalisasi madrasah. | 5. Revitalisasi sarana prasarana dapat dilaksanakan melalui dukungan APBN dan Non-APBN. |

| Kelemahan | Tantangan |
|---|---|
| 1. Kualitas sarana dan prasarana tidak merata. Sebagian besar lembaga pendidikan umum dengan kekhasan agama dan lembaga pendidikan keagamaan adalah lembaga pendidikan swasta dengan kualitas sarana prasarana yang belum memadai. | 1. Persaingan yang cukup tinggi dengan lembaga pendidikan lain. |
| 2. Distribusi guru tidak merata antar lembaga pendidikan dan antar wilayah. | 2. Banyak pesantren berada di daerah terpencil yang terbatas akses transportasinya. |
| 3. Dana BOS hanya mencukupi ±30% dari total kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. | 3. Jumlah PAUD masih terbatas. |
| 4. Akses digital lembaga pendidikan agama dan keagamaan tidak merata; banyak lembaga memiliki akses digital rendah. | 4. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana atau partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan. |
| 5. Banyak madrasah/satuan pendidikan keagamaan dengan kondisi gedung rusak ringan hingga berat, belum memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. | 5. Risiko penyebaran paham keagamaan radikal di lembaga pendidikan agama dan keagamaan. |
| 6. Terbatasnya integrasi pesantren dengan dunia usaha dan industri. | 6. Penyaluran PIP sebagian besar dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu lama. |
| | 7. Keterlambatan revitalisasi berpotensi menurunkan mutu pembelajaran dan daya saing lulusan madrasah serta satuan pendidikan keagamaan. |

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang akan timbul, isu strategis yang diangkat adalah peningkatan sarana dan prasarana pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif, Peningkatan partisipasi siswa/santri/mahasiswa/mahasantri termasuk pada satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T, Peningkatan Anak Kelas 1 MI/Ula/SD/Adi Widyalaya/Nava yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA), Peningkatan satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah, Peningkatan satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi, Peningkatan siswa yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu, dan Peningkatan anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan, Peningkatan penyediaan bantuan pendidikan, Peningkatan mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas dan di Prodi STEM terakreditasi unggul.

## 4. Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah

Satuan pendidikan di bawah Kemenag memiliki kekuatan dalam dukungan Kemenag untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan atau program. Jumlah guru di lingkungan Kemenag juga mencukupi. Peluang peningkatan hasil belajar siswa muncul dari penerapan teknologi dan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Lebih lanjut Tabel berikut memaparkan kekuatan, kelemahan, potensi dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan pembelajaran dan pengajaran.

**Tabel 1. 25 Potensi dan Permasalahan Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah**

| Kekuatan | Peluang |
|---|---|
| 1. Jumlah guru secara umum cukup memadai dengan rasio guru-siswa lebih rendah dari jumlah yang ditetapkan pemerintah pusat. | 1. Keberadaan PPG untuk meningkatkan kompetensi (literasi dan numerasi) guru. |
| 2. Dukungan kebijakan Kemenag terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai program/kebijakan seperti sertifikasi guru, pelatihan guru, dan revitalisasi madrasah. | 2. Perkembangan teknologi informasi (internet) memungkinkan Kemenag melakukan pelatihan ke seluruh daerah. |
| 3. Penerapan kurikulum yang mendorong pemahaman Islam moderat dan moderasi beragama. | 3. Semakin berkembangnya kesadaran dan sikap kritis masyarakat terhadap mutu pendidikan madrasah dan lembaga pendidikan agama. |
| **Kelemahan** | **Tantangan** |
| 1. Banyak lembaga pendidikan agama dan keagamaan memiliki status akreditasi rendah atau belum terakreditasi. | 1. Terbatasnya kapasitas BAN dan jumlah asesor untuk melakukan akreditasi. |
| 2. Kesenjangan kompetensi antar guru; sebagian belum bersertifikat pendidik, kurang pelatihan, atau memiliki latar pendidikan terbatas. | 2. Pengaturan pendidikan agama dalam PP 55/2007 masih terbatas implementasinya. |
| 3. Sistem penilaian mutu pengajaran madrasah belum terstandarisasi secara nasional. | 3. Cukup tingginya beban administratif guru. |
| 4. Ketergantungan banyak lembaga pendidikan agama dan keagamaan terhadap dana masyarakat. | 4. Distribusi guru tidak merata di semua wilayah. |
| 5. Terbatasnya penggunaan teknologi informasi dan komputer dalam pengajaran. | 5. Resistensi terhadap perubahan atau inovasi kurikulum karena dianggap menyimpang dari tradisi. |
| 6. Muatan pendidikan agama terfokus pada pembelajaran agama namun kurang memperhatikan pendidikan karakter. | 6. Perubahan sosial budaya yang cepat seiring perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. |
| | 7. Kesenjangan akses internet di berbagai wilayah. |

Untuk menerjemahkan dari potensi di atas tentang Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah. Adapun strategi untuk menanggulangi isu strategis di atas antara lain, yaitu: Peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir siswa, Pemanfaatan hasil asesmen kompetensi tingkat nasional sebagai landasan evaluasi dan penyempurnaan kualitas pendidikan, Peningkatan peserta didik dalam memahami dan praktik beragama yang moderat, Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pendidikan berbasis partisipasi komunitas masyarakat, Integrasi keilmuan agama dan umum dalam penerapan pembelajaran, Peningkatan siswa yang memiliki nilai karakter baik, Peningkatan siswa yang memiliki prestasi akademik dan ekstrakurikuler, Peningkatan kualitas pendidikan agama dan penyelenggaraan project penguatan profil pelajar pancasila.

## 5. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Satuan pendidikan Kemenag memiliki kekuatan dalam pengelolaan pendidik ASN secara terpusat, tingginya dedikasi guru, serta kewenangan satuan pendidikan masyarakat dalam mengelola tenaga pendidik. Jumlah pendidik juga cukup memadai dengan cukup rendahnya angka rasio guru-siswa. Keunggulan juga terlihat dari kehadiran LPTK dan jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.

**Tabel 1. 26 Potensi dan Permasalahan Pengelolaan dan Penempatan Guru**

| Kekuatan | Peluang |
|---|---|
| 1. Berbagai dukungan Kemenag untuk meningkatkan kompetensi guru, seperti pelatihan guru dan beasiswa untuk guru. | 1. Peningkatan kompetensi guru melalui program sertifikasi guru. |
| 2. Keberadaan program peningkatan kapasitas guru di PTK, seperti PPG dan sertifikasi guru. | 2. Potensi kerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. |
| 3. Adanya asosiasi profesi yang menunjang peningkatan profesionalisme guru. | 3. Dana BOS dapat digunakan untuk pengembangan program keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. |
| 4. Komitmen tinggi para guru di lembaga pendidikan agama dan keagamaan untuk melakukan pengabdian melalui pengajaran. | 4. Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung penyediaan pelatihan berkelanjutan untuk guru dan tenaga kependidikan. |

| Kelemahan | Tantangan |
|---|---|
| 1. Terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan berkelanjutan. | 1. Program sertifikasi masih belum efektif meningkatkan kompetensi guru. |
| 2. Rendahnya insentif dan kesejahteraan guru, terlebih untuk guru non-ASN (honorer). Banyak dari mereka yang mendapatkan gaji yang tidak layak. | 2. Cepatnya perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan menuntut guru untuk mampu mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan metode pembelajaran. |
| 3. Belum meratanya kompetensi guru antar madrasah dan wilayah. | 3. Persaingan dengan lembaga pendidikan lain untuk mendapatkan guru dan tenaga kependidikan terbaik. |
| 4. Kurangnya jumlah guru yang berkualitas dan terampil dalam menggunakan metode pengajaran yang inovatif. | 4. Terbatasnya jumlah LPTK yang memenuhi syarat menyelenggarakan PPG. |
| 5. Terbatasnya kemampuan guru dalam bidang teknologi dan informasi. | 5. Kualitas dan distribusi guru masih terbatas. Kurang dari 50% memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan. |
| 6. Terbatasnya kemampuan anggaran Kemenag untuk menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk guru dan tenaga kependidikan. | 6. Kesenjangan motivasi intrinsik di sebagian guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensi dan prestasi. |

Berdasarkan kondisi, tantangan, peluang yang dimiliki dan ancaman yang berpotensi menjadi isu strategis ke depan untuk meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah peningkatan guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan, Peningkatan nilai indeks pemerataan guru dengan kategori baik, Peningkatan guru yang memiliki sertifikat pendidik, Pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama dengan murid seagama, Peningkatan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal, Peningkatan kualitas guru yang memperoleh penguatan kompetensi melalui Asesmen Kompetensi Guru (AKG), Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Peningkatan guru yang memperoleh penguatan moderasi beragama, Peningkatan guru yang memperoleh layanan peningkatan jenjang karir, Peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta Peningkatan pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan.

## 6. Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan

Potensi utama Kemenag untuk meningkatkan penyelenggaraan PTK yang berkualitas terletak perkembangan kualitas PTK sehingga beberapa PTK dapat memperoleh pengakuan global. Komitmen para pengajar dan tenaga kependidikan, peningkatan publikasi ilmiah, dan penggunaan teknologi informasi di lingkungan PTK turut menjadi kekuatan PTK. Selain itu, PTK memiliki peluang kerja sama dengan berbagai lembaga dan dunia industri. Namun demikian, beberapa tantangan dapat menjadi penghambat bagi PTK untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan. Tantangan ini kualitas dosen yang masih perlu ditingkatkan, perkembangan teknologi, termasuk AI, yang sangat cepat dan sangat berpengaruh terhadap pendidikan tinggi dan pasar kerja di dunia industri, kesenjangan akses teknologi informasi yang tidak merata, semakin tingginya biaya pendidikan tinggi, dan terbatasnya kemampuan BAN dan LAM untuk melakukan akreditasi.

Tabel berikut lebih lanjut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

**Tabel 1. 27 Potensi dan Permasalahan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan**

| Kekuatan | Peluang |
|---|---|
| 1. Dukungan regulasi dari Kementerian Agama (misalnya: moratorium akreditasi, revitalisasi kurikulum). | 1. Perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring dan hybrid. |
| 2. Program beasiswa dan bantuan finansial untuk mahasiswa. | 2. Dukungan hibah penelitian dan kerja sama internasional dari pemerintah dan donor luar. |
| 3. Ketersediaan SDM yang berkualitas di beberapa PTK. | 3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan keagamaan yang bermutu tinggi. |
| 4. Jejaring nasional dan internasional dengan lembaga pendidikan dan keagamaan. | 4. Potensi integrasi keilmuan antara keagamaan dan sains. |
| **Kelemahan** | **Tantangan** |
| 1. Kualitas SDM dosen belum merata (banyak yang belum S3 atau belum bersertifikasi). | 1. Persaingan dengan perguruan tinggi umum yang memiliki daya saing lebih tinggi dalam infrastruktur dan SDM. |
| 2. Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di PTK swasta. | 2. Radikalisme atau ekstremisme yang dapat menyusup dalam narasi keagamaan. |
| 3. Kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan zaman (misalnya: digitalisasi, kewirausahaan, interdisipliner). | 3. Ketimpangan dana antara PTK negeri dan swasta. |
| 4. Rendahnya publikasi ilmiah dan penelitian bereputasi. | 4. Isu intoleransi yang dapat mencoreng citra PTK. |

Merujuk pada hasil analisis potensi, peluang, kelemahan, dan tantangan pada Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan, strategi yang akan dilakukan meliputi, Peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi keagamaan dan Prodi melalui penilaian akreditasi, Peningkatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Peningkatan dosen yang berkualifikasi di atas Strata 2, Peningkatan dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus dan menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional, Peningkatan lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus, Peningkatan lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan: a. Karyawan b. Wirausaha, Peningkatan lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi, Peningkatan mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi, Peningkatan karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional serta berorientasi SDGs dan yang dimanfaatkan DUDI/ Masyarakat, serta Peningkatan perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs.

## 7. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

Keberhasilan awal dalam melakukan reformasi birokrasi, opini WTP atas LKKA, penerapan teknologi 4.0, dan perkembangan zona integritas dan audit berbasis risiko menjadi beberapa kekuatan Kemenag untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenag. Peluang untuk terus meningkatkan tata kelola terbuka melalui optimalisasi PNBP, integrasi data digital, penguatan manajemen kinerja, dan regenerasi ASN BerAKHLAK. Tabel berikut lebih lanjut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kemenag.

**Tabel 1. 28 Potensi dan Permasalahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel**

| Kekuatan | Peluang |
|---|---|
| 1. Dalam pengelolaan keuangan negara, Kemenag mendapat opini WTP terhadap LKK dari tahun 2016–2018. | 1. Potensi PNBP yang sangat besar, termasuk pengelolaan asrama haji, pendidikan, dan jaminan produk halal. |
| 2. Teknologi dan informasi 4.0 sudah mulai digunakan pada setiap satuan kerja di Pusat maupun Daerah. | 2. Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kemutakhiran data yang dikumpulkan, serta mengintegrasikan data yang ada. |
| 3. Penerapan zona integritas dan budaya kinerja yang semakin baik di setiap satuan kerja. | 3. Manajemen kinerja dan merit system yang selaras antara Pusat dan Daerah. |
| 4. Audit berbasis risiko dilaksanakan sesuai dengan best practices, yaitu pengawasan diarahkan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, dan didukung dengan program advokasi. | 4. Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk audit kinerja berbasis tugas fungsi, audit kinerja program, audit tematik, dan lainnya mampu menghasilkan perbaikan tata kelola yang efektif dan akuntabel. |

| Kelemahan | Tantangan |
|---|---|
| 1. Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat belum diformulasikan. | 1. Tekanan efisiensi fiskal dan jumlah satuan kerja yang sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah memerlukan keterlibatan sistematik dari pimpinan. |
| 2. Pengelolaan aset BMN belum tertib dalam menginventarisir barang. | 2. Budaya kerja yang beragam di daerah menyulitkan proses perbaikan yang menyeluruh. |
| 3. Koordinasi, sinkronisasi, dan kemutakhiran data masih lemah. | 3. Sebagian aset hak milik masih diakui oleh pihak lain, dan proses alih status kepemilikan berjalan lamban. |
| 4. Belum memiliki strategi komprehensif dalam penerapan nilai-nilai budaya kinerja. | 4. Banyaknya jumlah aplikasi yang dipakai berbagai satuan kerja menyebabkan duplikasi data dan susah diintegrasikan. |
| 5. Pemahaman ASN Kemenag tentang manajemen risiko dan pengendalian intern masih perlu ditingkatkan. | 5. Kesenjangan akses teknologi informasi (internet) antar daerah. |

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang akan timbul, isu strategis yang diangkat adalah Peningkatan perolehan nilai reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas instansi pemerintah, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan realisasi anggaran berbasis *output*, Penyelesaian kerugian negara berbasis laporan tindak lanjut hasil pengawasan, Peningkatan data statistik yang dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan, Peningkatan pengawasan tata kelola kelembagaan, Peningkatan laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel, Peningkatan perolehan nilai pengendalian korupsi.

# 02


A. VISI KEMENAG 70
B. MISI KEMENTERIAN AGAMA 71
C. TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA 73
D. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA 74
E. IDENTIFIKASI RISIKO PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 76






# VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA

# VISI, MISI, DAN TUJUANKEMENTERIAN AGAMA

## A. VISI KEMENAG

Kementerian Agama merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola urusan keagamaan dan pendidikan, dalam menjalankan tugasnya kementerian agama memiliki visi dan misi yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan mempertimbangkan kinerja selama lima tahun terakhir potensi yang dimiliki, dan berbagai tantangan yang dihadapi ke depan, serta mengacu Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", Kemenag merumuskan Visi untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

### "Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Terdapat tiga kata kunci dalam Visi Kemenag, yaitu **Rukun, Maslahat, dan Cerdas**. Kandungan makna dalam masing-masing kata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, **rukun** merupakan dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Rukun atau kerukunan berarti hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antar suku, dan antara masyarakat dan pemerintah. Kerukunan tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai negara dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, rukun menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, dan kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Kerukunan juga mengisyaratkan cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi. Makna kesetaraan dalam kerukunan beragama merujuk pada pengakuan dan perlakuan yang adil terhadap setiap pemeluk agama tanpa membedakan latar belakang keyakinan. Kesetaraan ini menempatkan setiap individu dalam posisi yang sama di hadapan hukum, negara, dan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan agamanya. Dalam konteks

kerukunan, kesetaraan mendorong terciptanya ruang dialog yang sehat, saling menghargai perbedaan, serta kerja sama yang harmonis antarumat beragama demi menciptakan kehidupan sosial yang damai, toleran, dan inklusif. Kerukunan juga mengandung kerjasama sebagai kesediaan untuk melakukan aktivitas bersama dalam lingkup sosial atau ekonomi, dalam ikatan komunitas, pemukiman ataupun lingkar profesi, kesukaan terhadap hal tertentu. Keberagamaan yang mengedepankan kerukunan adalah kunci dalam membangun kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan.

Kedua, **maslahat**. Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya serta memberi manfaat bagi kebaikan sosial lingkungan alam semesta. Beragama yang maslahat adalah praktek keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Ajaran agama diharapkan mampu menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Beragama maslahat mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.

Ketiga, **cerdas** adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas adalah capaian kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pencapaian visi cerdas dilakukan Kemenag melalui program pendidikan yang dikembangkan melalui sejumlah institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

Visi tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini mengandung semangat transformasi dan kolaborasi yang mendalam, dan mencerminkan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Visi ini juga menggambarkan arahan strategis yang menuntun seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi, inovasi, dan kerja keras, visi ini menjadi panduan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa di tahun 2045, dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang.

## B. MISI KEMENTERIAN AGAMA

Sebagai kementerian yang memiliki tanggung jawab di bidang agama dan pendidikan, Kemenag wajib memastikan bahwa misinya tidak hanya mencerminkan prioritas internal, tetapi juga mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden. Sinergi ini menjadi esensial untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi bangsa. Dalam Rencana Strategis Kemenag, Asta Cita atau delapan Misi Presiden dan Wakil Presiden diadopsi sebagai acuan strategis guna menjamin keselarasan arah kebijakan nasional dan sektoral. Asta Cita atau 8 Misi tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
3. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
4. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
5. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
6. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, inklusivitas, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
7. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil makmur

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Kemenag merumuskan misi untuk mendukung pencapaian delapan Asta Cita. Misi Kemenag 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

*Misi pertama* bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memperkuat harmoni dalam kehidupan beragama, yang sejalan dengan kata kunci rukun dan maslahat dalam visi Kemenag. Kehidupan beragama yang rukun adalah pondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, sementara orientasi pada kemaslahatan memastikan agama menjadi kekuatan positif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui misi ini, masyarakat Indonesia diharapkan tidak hanya hidup rukun, tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai agama untuk membangun kesejahteraan bersama. Dengan harmoni yang terjaga, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya, *misi kedua* bertujuan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan mendukung kata kunci masyarakat cerdas dalam visi Kemenag. Cerdas diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas sebagai elemen penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai agama tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kemampuan intelektual dan memiliki kesadaran moral yang tinggi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang berlandaskan nilai-nilai agama menjadi kunci dalam membentuk generasi yang unggul secara akademik sekaligus berkarakter mulia. Generasi terdidik dan berdaya mendorong terciptanya ekosistem inovatif, harmoni dan bermaslahat, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Terakhir, *misi ketiga* mencerminkan pentingnya tata kelola yang baik untuk mendukung pencapaian visi Kemenag. Tata kelola yang baik adalah prasyarat untuk memastikan keberhasilan implementasi program di bidang agama dan pendidikan—program yang mendukung toleransi, kemaslahatan, dan kerukunan. Untuk itu, seluruh pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga setiap prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan tata kelola yang demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, sehingga memudahkan terciptanya kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Hal ini juga akan mempercepat langkah menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing pada tahun 2045.

## C. TUJUAN KEMENTERIAN AGAMA

Untuk mewujudkan tiga misi utama tersebut, Kemenag menetapkan lima tujuan strategis dengan memperhatikan tantangan di bidang agama dan pendidikan. Berikut adalah tujuan tersebut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dengan indikator tujuan, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi dengan indikator tujuan yaitu, Indeks Layanan Keagamaan
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau dengan indikator tujuan Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing dengan indikator tujuan yaitu, Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) Literasi (b) Numerasi, Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan, Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs;

5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi.

Dengan lima tujuan strategis ini, Kemenag berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2045.

## D. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA

Untuk mencapai 5 tujuan strategis yang telah ditetapkan, Kemenag merumuskan tujuh (7) Sasaran Strategis (SS), yang mencerminkan kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2029. Setiap sasaran strategis ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan dapat dijadikan acuan dalam menilai ketercapaian target yang diharapkan.

1. Tujuan 1: Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa,, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

**Tabel 2. 1 Tujuan 1**

| SS1 | |
|---|---|
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** |
| Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial | • Indeks Kerukunan Umat Beragama<br>• Indeks Kesalehan Umat Beragama |

2. Tujuan 2: Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil dan inklusif berbasis eko-teologi, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

**Tabel 2. 2 Tujuan 2**

| SS2 | |
|---|---|
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** |
| Meningkatkan layanan keagamaan transformatif | Indeks Layanan Keagamaan |

3. Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

**Tabel 2. 3 Tujuan 3**

**SS3**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|---|---|
| Meningkatnya pemerataan akses pendidikan | • Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha<br>• Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi |

**SS4**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|---|---|
| Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah | Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:<br>a. Literasi<br>b. Numerasi |

**SS5**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|---|---|
| Meningkatnya pengelolaan dan Tenaga Kependidikan Berkualitas | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan |

4. Tujuan 4: Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

**SS6**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|---|---|
| Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas | • Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun<br>• Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |

5. Tujuan 5: Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dapat tercapai dengan sasaran sebagai berikut :

**SS7**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|---|---|
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel | Nilai Reformasi Birokrasi |

## E. IDENTIFIKASI RISIKO PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Adapun Indikasi risiko dari seluruh sasaran strategis pada Kemenag adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 4 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis**

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial<br>a. Indeks Kerukunan Umat Beragama<br>b. Indeks Kesalehan Umat Beragama | 1. Kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan<br>2. Penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama belum optimal<br>3. Pembinaan tokoh agama dan forum kerukunan umat beragama belum merata | 1.1. Penyusunan peraturan tentang perlindungan umat beragama<br>1.2. Memperluas program literasi moderasi beragama<br>1.3. Pembentukan dan pembinaan desa kerukunan<br>2.1. Penyusunan instrumen pengendalian data dan penyelesaian kasus konflik antar dan intra umat beragama melalui aplikasi EWS<br>2.2. Meningkatkan monitoring media sosial untuk mendeteksi dini ujaran kebencian dan isu SARA<br>2.3. Peningkatan dialog kerukunan agama difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS<br>2.4. Peningkatan kegiatan penguatan moderasi beragama dengan melibatkan lintas sektoral antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat<br>3.1. Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mediasi dan dialog<br>3.2. Menyelenggarakan kegiatan lintas iman (dialog, kerja sosial bersama)<br>3.3. Meningkatkan monitoring media sosial untuk mendeteksi dini ujaran kebencian dan isu SARA<br>3.4. Memberikan pelatihan manajemen konflik bagi tokoh agama, penyuluh, dan penggerak masyarakat | Sekretariat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha dan BMBPSDM |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3.5. Mendorong kolaborasi antar organisasi keagamaan di tingkat lokal dan nasional<br>3.6. Pelatihan agen kerukunan umat beragama | |
| | | 1. Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama<br>2. Literasi umat beragama terhadap kitab suci rendah<br>3. Partisipasi umat beragama dalam mengikuti perayaan keagamaan dan event keagamaan rendah<br>4. Kualitas tata kelola lembaga agama dan lembaga keagamaan belum akuntabel | 1.1. Integrasi nilai-nilai kesalehan dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal<br>2.1. Peningkatan bimbingan keagamaan yang berkelanjutan, seperti kegiatan keagamaan dan konsultasi agama<br>2.2. Peningkatan penerbitan naskah/buku keagamaan pendukung peribadatan yang layak edar<br>2.3. Membangun konten positif keagamaan yang inklusif, mudah diakses, dan menarik bagi lintas generasi<br>3.1. Peningkatan penyelenggaraan event keagamaan dan budaya<br>3.2. Peningkatan penyiaran agama melalui ruang publik dan media elektronik<br>3.3. Peningkatan penyelenggaraan perayaan keagamaan dan hari besar keagamaan<br>4.1. Pemberdayaaan lembaga agama dan lembaga keagamaan untuk layanan keagamaan dan pendidikan<br>4.2. Penguatan tata kelola lembaga agama dan lembaga keagamaan yang akuntabel dan profesional | Sekretariat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha dan BMBPSDM |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif dengan indikator Indeks Layanan Keagamaan | 1. Kurangnya kompetensi dan keterampilan petugas KUA<br>2. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan<br>3. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan KUA yang panjang dan tidak efisien<br>4. Minimnya inovasi layanan berbasis teknologi<br>5. Tingginya biaya layanan nikah diakibatkan pencatatan pernikahan dilakukan di luar KUA<br>6. Rendahnya angka peristiwa nikah yang tercatat di KUA | 1.1. Peningkatan lulusan pelatihan dan Pendidikan administrasi bagi penyuluh agama dan penghulu/ fasilitator<br>1.2. Peningkatan SDM front office KUA yang profesional<br>2.1. Revitalisasi sarana dan prasarana KUA<br>2.2. Pembentukan dan pembinaan KUA berdaya<br>3.1. Peningkatan layanan KUA sesuai standar<br>4.1. Pendataan peristiwa nikah berbasis digital yang mudah diakses<br>5.1. Penyempurnaan tarif biaya pencatatan nikah di luar kantor<br>5.2. Sosialisasi tentang pencatatan nikah di KUA<br>6.1. Peningkatan inovasi layanan pernikahan seperti penyelenggaraan nikah massal bekerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat | Ditjen Bimas Islam dan BMBPSDM |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|---|---|---|---|---|
| | | 1. Keterbatasan kuota haji<br>2. Kurangnya kompetensi petugas<br>3. Fasilitas layanan yang tidak memadai<br>4. Proses administrasi yang lambat dan kurang transparan<br>5. Minimnya inovasi berbasis teknologi<br>6. Lemahnya pengawasan terhadap biro perjalanan haji dan umrah | 1.1. Peningkatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan MoU Kerjasama layanan haji dan umrah<br>1.2. Peningkatan calon jamaah haji yang diberangkatkan<br>2.1. Peningkatan sertifikasi petugas haji<br>3.1. Peningkatan sarana dan prasarana layanan haji<br>3.2. Peningkatan layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi sesuai standar<br>3.3. Pembentukan kantor urusan haji Indonesia dan Kampung Haji di Arab Saudi dan Pembangunan Hotel Haji di Arab Saudi<br>4.1. Peningkatan layanan pendaftaran melalui Pusat layanan haji dan umrah terpadu<br>4.2. Layanan pendaftaran melalui strategi mobile service<br>5.1. Penguatan sistem informasi haji<br>6.1. Perumusan kebijakan berbasis hasil evaluasi penyelenggaraan haji<br>6.2. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan haji yang akuntabel | Ditjen PHU dan BMBPSDM |
| | | 1. Kurangnya Kompetensi penyuluh agama terkait Ilmu Agama dan Sosial Keagamaan, Komunikasi, Sosiokultural, dan Kolaboratif<br>2. Rendahnya rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran | 1.1. Peningkatan frekuensi layanan penyuluhan agama<br>1.2. Peningkatan konten keagamaan yang dipublikasi<br>1.3. Standardisasi pengelolaan kualitas layanan bimbingan keagamaan<br>1.4. Peningkatan penyuluh agama yang berkualifikasi pendidikan dan kompetensi<br>2.1. Peningkatan bimbingan kelompok sasaran/binaan (Lembaga agama dan rumah ibadah)<br>2.2. Rekrutmen penyuluh agama sesuai rasio jumlah umat | Sekretariat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha dan BMBPSDM |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|---|---|---|---|---|
| | | 1. Sertifikasi halal terhadap jasa dan barang belum optimal<br>2. Proses sertifikasi halal yang lambat<br>3. Kurangnya kompetensi pendamping dan auditor halal<br>4. Keterbatasan fasilitas laboratorium uji<br>5. Minimnya inovasi layanan berbasis teknologi dan mekanisme dan prosedur yang rumit | 1.1. Peningkatan layanan sertifikasi halal secara self declare<br>1.2. Peningkatan sarana dan prasarana layanan sertifikasi halal<br>2.1. Pemangkasan waktu penerbitan sertifikasi halal melalui optimalisasi layanan terpadu<br>2.2. Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal<br>3.1. Peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi pendamping dan auditor halal<br>3.2. Rekrutmen pendamping dan pengawas halal sesuai formasi<br>4.1. Peningkatan kerjasama Kementerian Agama dengan BPJPH dalam layanan jaminan produk halal<br>4.2. Penguatan kemitraan dengan lembaga LPH<br>1. Penguatan sistem informasi halal untuk memudahkan akses layanan sertifikasi halal<br>2. Peningkatan layanan konsultasi dan literasi halal | Ditjen Bimas Islam |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya pemerataan akses pendidikan dengan indikator :<br>a. Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/ Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha<br>a. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi | 1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan<br>2. Belum optimalnya penyaluran bantuan pendidikan dan beasiswa tepat sasaran bagi siswa kurang mampu<br>3. Tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) | 1.1. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran memadai seperti laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, dan akses internet<br>2.1. Menyediakan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, BOS, PIP) untuk siswa kurang mampu, khususnya di daerah 3T<br>3.1. Mengoptimalkan pendampingan belajar berbasis asrama/pesantren bagi siswa yang tinggal di boarding school.<br>3.2. Menerapkan early warning system untuk mendeteksi siswa berisiko tidak lulus (indikator: nilai rendah, ketidakhadiran, masalah perilaku)<br>3.3. Peningkatan layanan Pendidikan non formal<br>3.4. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui pendidikan kesetaraan<br>3.5. Pengembangan sistem pendataan anak tidak sekolah | 1. Sekjen (Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu),<br>2. Ditjen Pendidikan Islam<br>3. Ditjen Bimas Kristen,<br>4. Ditjen Bimas Katolik,<br>5. Ditjen Bimas Hindu,<br>6. Ditjen Bimas Buddha |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|---|---|---|---|---|
| | | 1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan tinggi keagamaan<br>2. Belum optimalnya penyaluran bantuan pendidikan dan beasiswa tepat sasaran bagi calon mahasiswa kurang mampu | 1.1. Pembangunan dan revitalisasi pendidikan tinggi keagamaan<br>1.2. Pengembangan lembaga pendidikan berbasis gender dan inklusi<br>1.3. Penyelenggaraan layanan Pendidikan berbasis hybrid<br>1.4. Pendirian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan unggul terintegrasi<br>2.1. Penyediaan bantuan Pendidikan (Beasiswa dan KIPK) | 1. Sekjen (Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu),<br>2. Ditjen Pendidikan Islam<br>3. Ditjen Bimas Kristen,<br>4. Ditjen Bimas Katolik,<br>5. Ditjen Bimas Hindu,<br>6. Ditjen Bimas Buddha |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dengan indikator Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional Literasi dan Numerasi | 1. Keterbatasan kompetensi pendidik dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa<br>2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung<br>3. Kurangnya budaya membaca dan belajar<br>4. Kurikulum yang belum sepenuhnya kontekstual<br>5. Hanya sebagian kecil murid yang menyadari pentingnya nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila<br>6. Minimnya teladan positif dari pendidik<br>7. Kegiatan ekstrakurikuler yang kurang variatif<br>8. Fokus pembelajaran yang lebih menitikberatkan pada aspek kognitif dibandingkan afektif dan psikomotorik | 1.1. Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan tentang penerapan metode pembelajaran yang inovatif<br>1.2. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran<br>1.3. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kualitas pembelajaran<br>2.1. Peningkatan sarana pendukung pembelajaran (alat peraga pembelajaran, digitalisasi pembelajaran, sarana praktek pembelajaran<br>3.1. Mengajak anak menggunakan berbagai prinsip matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari<br>3.2. Mengintegrasikan kegiatan literasi dan numerasi dalam semua mata pelajaran<br>4.1. Mengembangkan bahan ajar dan modul pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan tingkat peserta didik<br>4.2. Penguatan skema pemilihan muatan pembelajaran pilihan untuk memfasilitasi minat, bakat dan kemampuan peserta didik<br>5.1. Mengajarkan dan membiasakan anak untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat<br>6.1. Pelatihan guru tentang metode pembelajaran berbasis keteladanan dalam menanamkan karakter<br>7.1. Memperluas kegiatan pramuka, OSIS, kegiatan keagamaan, dan program bakti sosial sebagai media pembentukan karakter | 1. Ditjen Pendidikan Islam<br>2. Ditjen Bimas Kristen,<br>3. Ditjen Bimas Katolik,<br>4. Ditjen Bimas Hindu,<br>5. Ditjen Bimas Buddha<br>6. BMBPSDM |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|---|---|---|---|---|
| | | 9. Ketidakkonsistenan penerapan aturan dan disiplin di sekolah maupun rumah | 8.1. Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan karakter siswa berbasis pembelajaran agama, praktik beragama siswa, sikap toleransi, dan kewarganegaraan<br>9.1. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk menguatkan karakter dan wellbeing peserta didik dan pendidik | |
| | | 1. Sekolah belum cukup mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah<br>2. Sekolah belum menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman<br>3. Sekolah belum memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas maupun cerdas istimewa berbakat istimewa | 1.1. Mendorong keterlibatan siswa dan komite sekolah dalam kegiatan pembelajaran<br>1.2. Meningkatkan frekuensi supervisi kelas untuk memastikan interaksi guru-siswa mendukung iklim belajar kondusif<br>1.3. Penangan dan cegah dini kekerasan antar siswa (perundungan dan kekerasan fisik)<br>2.1. Memberikan lebih banyak kesempatan untuk siswa saling berinteraksi secara positif dengan siswa lainya dari beragam latar belakang suku, ras dan agama<br>2.2. Penegakan tata tertib dan budaya sekolah yang menghargai keberagaman<br>3.1. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas belajar agar aman, nyaman, dan ramah anak | 1. Ditjen Pendidikan Islam<br>2. Ditjen Bimas Islam,<br>3. Ditjen Bimas Kristen,<br>4. Ditjen Bimas Katolik,<br>5. Ditjen Bimas Hindu,<br>6. Ditjen Bimas Buddha |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas dengan indikator Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan | 1. Keterbatasan akses pendidikan lanjutan<br>2. Minimnya kesempatan mengikuti pendidikan profesi guru (PPG)<br>3. Terbatasnya pelatihan berkelanjutan<br>4. Kebijakan rekrutmen yang kurang mempertimbangkan kualifikasi | 1.1. Fasilitasi beasiswa atau bantuan biaya studi bagi guru/tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi minimal<br>1.2. Penjaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial dan nonfinansial<br>2.1. Mendorong partisipasi guru dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memfasilitasi proses administrasinya<br>3.1. Penguatan dan Penilaian kinerja rutin melalui AKG dan MGMP<br>3.2. Pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis untuk memperkuat kompetensi<br>3.3. Pemenuhan rasio guru agama dengan peserta didik seagama.<br>4.1. Menyusun standar kompetensi dan kualifikasi jabatan secara jelas. | 1. Setjen (Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan keagamaan dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu)<br>2. Ditjen Pendidikan Islam<br>3. Ditjen Bimas Islam,<br>4. Ditjen Bimas Kristen,<br>5. Ditjen Bimas Katolik,<br>6. Ditjen Bimas Hindu,<br>7. Ditjen Bimas Buddha |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas dengan indikator<br>a. Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/ Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun<br>b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs | 1. Keterbatasan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja<br>2. Minimnya kesempatan mengikuti program magang untuk mendukung pengalaman non akademis<br>3. Terbatasnya kerjasama PTK dengan dunia usaha dan industri<br>4. Minimnya layanan bimbingan karier<br>5. Data lulusan yang tidak valid dan reliable | 1.1. Peningkatan mahasiswa dengan pengalaman magang 1 (satu) semester di luar kampus<br>2.1. Peningkatan PTK yang memiliki Pusat Pengembangan Karir<br>2.2. Peningkatan mahasiswa yang difasilitasi untuk mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi<br>2.3. Peningkatan prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi<br>3.1. Peningkatan lulusan pendidikan tinggi keagamaan bidang STEM<br>3.2. Menjalin MoU dengan dunia usaha/ industri.<br>3.3. Meningkatkan program magang dan praktik kerja<br>4.1. Pengembangan Soft Skills dan Sertifikasi Kompetensi<br>5.1. Monitoring dan Tracer Study Rutin | 1. Ditjen Pendidikan Islam<br>2. Ditjen Bimas Islam,<br>3. Ditjen Bimas Kristen,<br>4. Ditjen Bimas Katolik,<br>5. Ditjen Bimas Hindu,<br>6. Ditjen Bimas Buddha |
| | | 1. Rendahnya jumlah dan kualitas publikasi ilmiah yang relevan dengan SDGs<br>2. Minimnya kolaborasi riset internasional<br>3. Kurangnya program pengabdian masyarakat yang terukur<br>4. Keterbatasan kebijakan pendanaan dalam mengintegrasikan SDGs | 1.1. Meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional terkait SDGs<br>1.2. Penguatan Riset dan Pengabdian Masyarakat Berorientasi SDGs<br>1.3. Membentuk pusat riset unggulan yang fokus pada isu-isu SDGs prioritas<br>1.4. Penyelenggaraan PTK berbasis gender dan inklusi<br>2.1. Peningkatan kerjasama PTK Nasional dan Internasional<br>2.2. Peningkatan PTK yang berpartisipasi dalam penilaian THE Impact SDGs<br>3.1. Mendorong kolaborasi dengan pemerintah/komunitas lokal.<br>3.2. Menyediakan beasiswa dan program kewirausahaan untuk mahasiswa<br>4.1. Mengalokasikan dana untuk kegiatan akademik dan non-akademik yang mendukung literasi SDGs bagi mahasiswa. | 1. Ditjen Pendidikan Islam<br>2. Ditjen Bimas Islam,<br>3. Ditjen Bimas Kristen,<br>4. Ditjen Bimas Katolik,<br>5. Ditjen Bimas Hindu,<br>6. Ditjen Bimas Buddha |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Indikasi Perlakuan Risiko | Indikasi Pj Perlakuan Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dengan indikator Nilai reformasi birokrasi | 1. Lemahnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi<br>2. Rendahnya kualitas pelayanan publik<br>3. Minimnya inovasi<br>4. Lemahnya monitoring dan evaluasi | 1.1. Memberikan penghargaan (insentif, promosi, apresiasi) bagi unit/pegawai berprestasi dalam reformasi.<br>1.2. Menerapkan sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan komitmen (teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat).<br>2.1. Menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang jelas dan terukur.<br>2.2. Mengadakan pelatihan frontliner tentang pelayanan prima.<br>2.3. Membuka mekanisme pengaduan dan survei kepuasan masyarakat secara rutin.<br>3.1. Membentuk unit atau tim inovasi di setiap bagian.<br>3.2. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/industri untuk adopsi inovasi.<br>4.1. Menindaklanjuti hasil Monev dengan rekomendasi perbaikan yang wajib diimplementasikan.<br>4.2. Peningkatan kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal atas Akuntabilitas Keuangan, Kinerja dan Integritas SDM aparatur Kementerian Agama | 1. Sekretaris jenderal<br>2. Inspektorat Jenderal<br>3. Ditjen Pendidikan Islam<br>4. Ditjen Bimas Islam,<br>5. Ditjen Bimas Kristen,<br>6. Ditjen Bimas Katolik,<br>7. Ditjen Bimas Hindu,<br>8. Ditjen Bimas Buddha<br>9. Ditjen PHU<br>10. BMBPSDM |

# 03


A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 90

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA 96

1. Peningkatan masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial 102
2. Peningkatan Layanan Keagamaan Transformatif 104
3. Peningkatan pemerataan akses pendidikan. 105
4. Peningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 108
5. Peningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas 110

C. KERANGKA REGULASI 113

D. KERANGKA KELEMBAGAAN 125






# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi pada bab ini menjelaskan langkah Kemenag 2025–2029 untuk mendukung sasaran RPJMN 2025–2029, dimulai dari uraian kebijakan nasional, dilanjutkan kebijakan Kemenag, serta kerangka regulasi dan kelembagaan sebagai landasan implementasi program lima tahun ke depan

## A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi nasional menjadi landasan arah kebijakan Kemenag, khususnya dalam pencapaian sasaran pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan lembaga keagamaan yang lebih efektif. Secara kolektif, kebijakan dan strategi pemerintah saat ini bertujuan untuk mendukung tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045, dengan SDM yang unggul, berkarakter, berdaya saing, dan berbudaya.

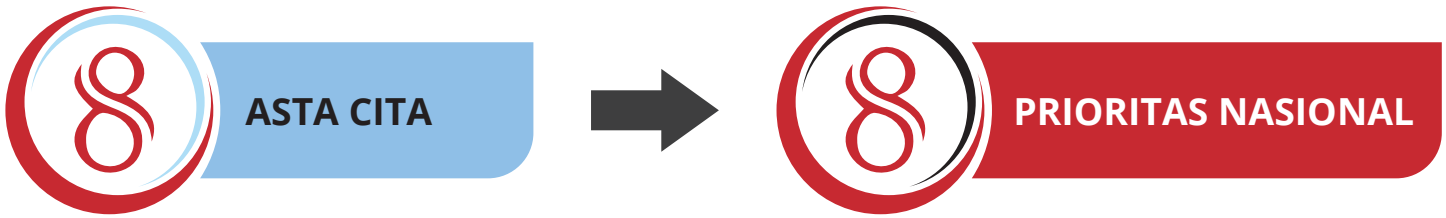
Strategi Pencapaian Indonesia Emas telah diamanatkan dalam RPJPN 2025 - 2045, melalui 5 agenda transformasi dan 17 arah pembangunan nasional.

**Gambar 3. 1 Agenda Transformasi RPJPN**



Pencapaian tujuan jangka panjang ini kemudian diuraikan dalam 8 misi Asta Cita dan 17 program prioritas dan 8 program PHTC yang ditetapkan Presiden, yang juga menjadi strategi jangka menengah pemerintah saat ini.

**Gambar 3. 2 Asta Cita sebagai prioritas Pembangunan Nasional**




Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

**PRIORITAS NASIONAL 1**

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

**PRIORITAS NASIONAL 2**

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

**PRIORITAS NASIONAL 3**

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

**PRIORITAS NASIONAL 4**

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

**PRIORITAS NASIONAL 5**

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

**PRIORITAS NASIONAL 6**

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

**PRIORITAS NASIONAL 7**

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

**PRIORITAS NASIONAL 8**

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Agama, sesuai tugas dan fungsinya, secara spesifik dapat berkontribusi dalam proses operasionalisasi misi Asta Cita, khususnya dalam penguatan SDM, penguatan reformasi birokrasi, dan penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dan toleran antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam operasionalisasi misi Asta Cita ini, Kemenag dapat berperan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan internal Kemenag, khususnya dalam pencapaian program prioritas; penguatan pendidikan, sains, dan teknologi digital (digitalisasi) di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama; memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadat; serta pelestarian seni budaya warisan keagamaan dan peningkatan ekonomi kreatif yang berbasis keagamaan.

Kementerian Agama juga turut mendukung pencapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis di madrasah, pesantren, dan pendidikan keagamaan lainnya, pendirian lembaga pendidikan umum dengan kekhasan agama yang unggul dan terintegrasi di setiap kabupaten, revitalisasi satuan pendidikan madrasah dan keagamaan lainnya, dan jaminan kesejahteraan ASN Guru dan Dosen.

## 8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)

Dalam mencapai misi Asta Cita dan Prioritas Nasional, Presiden menetapkan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), sebagaimana berikut :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; Intervensi Kementerian Agama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Agama (Kemenag) berperan penting dalam pelaksanaan di lingkungan pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren. Kemenag memastikan program ini berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta memberikan manfaat bagi siswa. Intervensi itu dimulai dari penerbitan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan program makan bergizi gratis di pesantren.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun, dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara;

7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan; Dasar pelaksanaan PHTC pada kegiatan ini adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran. Total revitasilasi madrasah melalui PHTC adalah Total Madrasah PHTC sebanyak 2.120 Madrasah, terbagi ke dalam 2 Tahap: Tahap 1: 179 madrasah di 5 Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.396.581.901.000 dan Tahap 2: 1.941 madrasah di 37 Provinsi dengan alokasi Rp. 4.309.422.134.000. Pelaksanaan tahap 2 dilakukan melalui mekanisme *Multi Years Contractual (MYC).*
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

PHTC sebagai program implementasi kebijakan Presiden terpilih disusun berdasarkan misi Asta Cita dan Program Prioritas dimandatkan kepada Kementerian/ Lembaga untuk pedoman penyusunan program dan penganggaran. Kemenag melaksanakan 4 (empat) dari 8 (delapan) yaitu nomor (1) Pemberian Makan Siang dan Susu Gratis di Pesantren serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil, nomor (4) Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi, (5) Melanjutkan dan menambahkan Program Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.dan nomor (6) Menaikkan Gaji ASN (Terutama Guru dan Dosen).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditetapkan bahwa Kemenag dalam menjalankan fungsi agama dan fungsi pendidikan ditetapkan 14 (empat belas) arah kebijakan (PP) sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Arah Kebijakan Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan Kemenag**

| Fungsi Agama | Fungsi Pendidikan |
|---|---|
| 1 Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan | 1 Percepatan Wajib Belajar 13 tahun |
| 2 Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis | 2 Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran |
| 3 Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan | 3 Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Berkualitas |
| 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan | 4 Penguatan Sistem Tata Kelola Kependidikan |
| 5 Transformasi Layanan KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif | 5 Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan Pengembangan STEM |
| 6 Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman | 6 Pendidikan untuk Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja |
| 7 Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal & Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif | |
| 8 Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif | |

## B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA

Untuk menyelaraskan Asta Cita, Prioritas Nasional, dan arah kebijakan dalam RPJMN, maka disusun Asta Protas Menteri Agama 2025-2029 sebagai berikut:

**Gambar 3. 3 Asta Protas Menteri Agama 2025-2029**




Asta Protas Menteri Agama yang menjadi pedoman arah kebijakan Kementerian Agama sebagai berikut:

1) **Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan**
   Untuk memperkuat kerukunan dan menumbuhkan cinta kemanusiaan, Kementerian Agama merumuskan strategi yang berorientasi pada kemaslahatan, penghormatan terhadap keberagaman, serta pembangunan budaya saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

Strategi tersebut meliputi:

- Penyelenggaraan forum dialog tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemuda lintas iman
- Fasilitasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas FKUB dalam menjalankan fungsi mediasi, fasilitasi pendirian rumah ibadah, dan penyelesaian perselisihan

- Pelatihan dan sosialisasi moderasi beragama bagi ASN Kementerian Agama, guru pendidikan agama, penyuluh agama, Tokoh Agama, Siswa,serta mahasiswa PTK
- Pengembangan *early warning system* berbasis data dan laporan masyarakat untuk mendeteksi potensi konflik keagamaan dan penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama
- Penyusunan regulasi, pedoman, dan standar tata kelola lembaga agama dan keagamaan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberpihakan pada kerukunan
- Penguatan KUA sebagai *Early Warning System* potensi konflik.
- Penguatan kerukunan berbasis isu lingkungan, HAM, kesetaraan gender, budaya dan digital
- Peningkatan kerja sama antar lembaga agama, lembaga sosial keagamaan, dan pemerintah daerah dalam layanan keagamaan dan layanan pendidikan
- Pembentukan Agen Kerukunan Tingkat Kab/ Kota
- Insersi kurikulum berbasis cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam program kediklatan dan pengembangan SDM
- Intensifikasi kampanye nilai, kearifan lokal, dan budaya penopang
- kerukunan umat di Indonesia”
- Penyebarluasan informasi positif melalui media cetak, elektronik, dan digital terkait toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama

**2) Ekoteologi**

Ekoteologi merupakan cara pandang iman yang melihat seluruh ciptaan sebagai suci dan saling terhubung dalam jaringan kehidupan. Konsep ini strategis bagi pembangunan nasional bidang agama karena mendorong lahirnya peradaban ekologis yang menumbuhkan kepedulian, rasa hormat, dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan serta kelompok rentan.

Penyelarasan program prioritas ini dilaksanakan menggunakan strategi, yaitu :

- Pelatihan bagi ASN Kemenag, guru agama, penyuluh, mahasiswa, serta tokoh agama tentang nilai ekoteologi dalam ajaran agama
- Penerbitan dan diseminasi bahan literasi keagamaan maslahat
- Penyebaran pesan dakwah dan kampanye nilai maslahat melalui media massa, media sosial, dan komunitas
- Survei dan kajian lapangan terkait pemahaman dan praktik keagamaan maslahat di kalangan masyarakat
- Penyediaan fasilitas hijau (bank sampah, sumur resapan, panel surya, taman hijau, sanitasi sehat, transportasi ramah lingkungan) di Kantor Kemenag pusat dan daerah, rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan
- Peningkatan Kerja Sama Kementerian Agama dengan KLHK, Pemerintah Daerah, LSM Lingkungan, dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penerapan Green Campus, Green Pesantren, dan Green Madrasah/Satuan Pendidikan Keagamaan

- Integrasi kurikulum pelestarian lingkungan dalam pendidikan agama dan keagamaan
- Penyelenggaraan Event keagamaan, event seni budaya bernapas agama dan perayanaan keagamaan berbasis ekotiologi dan penghormatan atas keragaman budaya sebagai wujud pengamalan nilai agama

**3) Layanan Keagamaan Berdampak (Maslahat)**

Program atau aktivitas yang dijalankan berdasarkan nilai keagamaan dan berhasil memberikan nilai kontribusi positif yang nyata, konkret, dan bermanfaat luas bagi hidup masyarakat (baik material, spiritual, dan mental) serta menjaga kemaslahatan umum.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program prioritas tersebut, dibutuhkan strategi sebagai berikut :

- Peningkatan sarana-prasarana KUA (KUA Berdaya)
- Penguatan kapasitas fasilitator bimbingan perkawinan, penyuluh agama dan kurikulum bimbingan perkawinan yang kontekstual
- Fasilitasi pernikahan sah, mudah, bermartabat, serta layanan inklusif di KUA
- Pengarusutamaan program keluarga maslahah, bimbingan remaja usia sekolah, dan edukasi berbasis nilai keagamaan
- Penguatan regulasi, sistem pengawasan, dan penjaminan mutu produk halal yang akuntabel
- Peningkatan frekuensi bimbingan penyuluh agama terhadap kelompok sasaran
- Peningkatan naskah & buku keagamaan Islam yg layak edar/ sesuai kaidah
- Penyediaan modul, buku saku, media digital, dan konten dakwah berbasis kerukunan dan beragama maslahat
- Peningkatan Kerja Sama Penyuluh Agama dengan Lembaga Lintas Sektoral (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, LSM, ormas, komunitas) dalam memberikan layanan bimbingan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat
- Fasilitasi Penentuan Arah Kiblat dan Kalender Hijriah
- Pemanfaatan aplikasi berbasis digital (misalnya Jadwal Salat, Kalender Hijriah, Aplikasi Halal, dan Arah Kiblat Online) yang dapat diakses lembaga agama dan umat beragama
- Fasilitasi penerimaan naskah dan buku keagamaan dari penulis atau penerbit untuk dilakukan proses penilaian dan Pemberian tanda layak edar bagi naskah/buku yang memenuhi kriteria sesuai regulasi
- Peningkatan mushaf Al-Qur'an, terjemah, serta produk turunan Al-Qur'an (terjemahan, tafsir, aplikasi digital) yang memperoleh tanda tashih
- Peningkatan Percetakan dan distribusi mushaf Al-Qur'an, Alkitab, Tripitaka, Weda, dan kitab suci lainnya dalam edisi resmi
- Pengembangan aplikasi atau e-book kitab suci agar dapat diakses melalui perangkat digital
- Survei ketersediaan kitab suci di rumah tangga, rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan

- Gerakan nasional membaca kitab suci di sekolah, madrasah, widyalaya, satuan pendidikan keagamaan, pesantren, rumah ibadah, dan komunitas keagamaan.

**4) Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi, adapun strategi yang dilakukan yaitu :**

- Penyediaan sarana-prasarana pendidikan di daerah 3T, termasuk: madrasah satu atap, inklusi, kelas filial, pembelajaran hybrid, jarak jauh, kampus jauh, merdeka belajar dan berbasis teknologi
- Peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa, bantuan BOS/BOP, dan program afirmatif bagi keluarga pra-sejahtera, rentan, dan difabel.
- Penjaringan Anak Tidak Sekolah dan layanan pencegahan melalui pendidikan kesetaraan.
- Fasilitasi perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan formal dan non-formal.
- Peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya pendidikan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra-sekolah terutama untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar
- Penyelenggaraan Makan bergizi gratis pada lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah
- Pengembangan skema pembiayaan pendidikan tinggi keagamaan bagi mahasiswa yang berkeadilan untuk mendukung tingkat keberlanjutan masyarakat ke pendidikan tinggi
- Penguatan mutu lembaga pendidikan dasar menengah dan tinggi melalui akreditasi unggul
- Penyelenggaraan program pembelajaran bilingual pada satuan pendidikan
- Peningkatan legalitas dan perlindungan hukum aset tanah wakaf untuk satuan pendidikan madrasah guna mendukung keberlangsungan dan kepastian layanan pendidikan
- Peningkatan legalitas dan perlindungan hukum aset tanah wakaf untuk satuan pendidikan madrasah guna mendukung keberlangsungan dan kepastian layanan pendidikan
- Pengembangan kurikulum integratif yang menggabungkan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan
- Penguatan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan kewargaan untuk memperkokoh jati diri bangsa
- Penguatan asesmen tingkat nasional berbasis pendidikan agama yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk memantau perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik serta kualitas lingkungan belajar
- Penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan perkembangan kebutuhan DUDIKA secara berkelanjutan
- Pengembangan mekanisme rekrutmen guru agama ASN secara terpusat sesuai kebutuhan berbasis analisis beban kerja
- Penguatan peran Kementerian Agama dalam memastikan penempatan guru agama sesuai kebutuhan
- Pengembangan mekanisme jenjang karir guru berbasis sistem merit

- Penjaminan kesejahteran pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial dan non-finansial
- Pembentukan Madrasah Aliyah Keagamaan dan Kejuruan (Vokasi)
- Penguatan regulasi tentang restrukturisasi guru agama di lingkungan Kementerian Agama
- Pengembangan profesi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan
- Penguatan peran pengawas sebagai pendamping kepala satuan pendidikan
- Perluasan layanan pendidikan tinggi keagamaan untuk mengakomodasi pendidikan sepanjang hayat
- Pendirian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan unggul dan berkelas dunia terintegrasi
- Peningkatan pendidikan profesi guru untuk mendukung pemberian Sertifikasi guru dan Dosen
- Peningkatan lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi keagamaan yang terserap di dunia kerja dan didunia industri

**5) Pesantren Berdaya, dilaksanakan melalui strategi :**

- Pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren
- Penguatan Pesantren dan Ma'had Aly sebagai sentra Keunggulan Kajian Islam
- Pengembangan pesantren di wilayah 3T dan Afirmasi
- Pemberian beasiswa santri dokter dan tenaga Kesehatan
- Pendirian Pesantren bertaraf Internasional
- Penguatan regulasi dan standar mutu akademik, kurikulum, tata kelola, bahasa pengantar (Arab/Inggris), serta manajemen kelembagaan pesantren internasional
- Penyusunan dan penerapan kurikulum integrasi berbasis ilmu agama, sains, teknologi, dan kompetensi bahasa asing
- Peningkatan kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan Islam internasional untuk pertukaran santri, beasiswa, dan pengakuan kurikulum
- Proses akreditasi pesantren dengan standar mutu internasional dan penerbitan sertifikat kelulusan
- Pelatihan dan sertifikasi bagi ustad/pengajar/dosen pesantren dan ma'had aly
- Penyelenggaraan Asesmen internal dan eksternal untuk mengukur capaian mutu satuan pendidikan formal di pesantren
- Bantuan pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama, serta sarana pembelajaran berbasis IT
- Penguatan regulasi terkait pengakuan ijazah, kesetaraan, serta kompetensi lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan
- Penguatan kemandirian pesantren melalui santri entrepreneur, kewirausahaan dan Unit Usaha Produktif
- Fasilitasi layanan rekognisi akademik dan profesional lulusan pesantren dengan satuan pendidikan umum,PTN/PTS dalam dan luar negeri, serta dunia usaha/industri

6) **Pemberdayaan Ekonomi Umat, dengan strategi :**
   - Optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infaq, shadaqah, punia, kebajikan, amal kasih) untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat
   - Pembentukan lembaga inkubasi wakaf produktif, pengembangan kota zakat/wakaf, dan rumah ibadah pusat ekonomi umat
   - Peningkatan kapasitas lembaga filantropi, kolaborasi pemanfaatan aset wakaf, dan penyusunan data terintegrasi berbasis nasional dan wilayah
   - Pengembangan aplikasi dan kanal pembayaran zakat/dana sosial keagamaan secara online untuk mempermudah umat dalam menunaikan zakat/dana sosial keagamaan
   - Peningkatan partisipasi umat beragama dalam berzakat/berdharma
   - Gerakan bersama pemanfaatan dana sosial keagamaan/filantropi
   - keagamaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting, dan peningkatan kesejahteraan umat"
   - Penjaminan mutu lembaga dana sosial keagamaan/filantropi keagamaan
   - Penguatan kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan

7) **Pemberdayaan Rumah Ibadah, melalui strategi :**
   - Perbaikan bangunan, penyediaan fasilitas dasar (air bersih, listrik, sanitasi), serta peningkatan keamanan rumah ibadah
   - Penerapan energi terbarukan (instalasi panel surya), penghijauan lingkungan rumah ibadah, pengelolaan sampah ramah lingkungan
   - Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Rumah Ibadah Inklusif
   - Penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, CSR perusahaan, dan organisasi sosial keagamaan untuk mendukung revitalisasi rumah ibadah
   - Penyediaan Fasilitas ramah anak, difabel, lanjut usia, perpustakaan dan layanan berbasis gender serta digital
   - Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Rumah Ibadah Inklusif
   - Pemilihan rumah ibadah percontohan
   - Peningkatan kegiatan dan perayaan keagamaan di rumah ibadah

8) **Digitalisasi Tata Kelola, melalui strategi :**
   - Implementasi budaya kerja yang bersih, jujur, dan profesional melalui kode etik ASN, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), dan pengawasan internal yang akuntabel.
   - Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi layanan digital dan digitalisasi dokumen layanan.
   - Penerapan SPBE secara menyeluruh dalam proses administrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan terukur.
   - Peningkatan kompetensi ASN Kementerian Agama yang smart dan moderat

- Penyederhanaan struktur organisasi dan prosedur kerja melalui redesign proses bisnis yang lebih lincah, terfokus pada hasil (result-oriented), dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara real-time.
- Penguatan sistem evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas dan dapat diukur, serta mengaitkan hasil kinerja dengan pemberian reward dan sanksi secara proporsional.
- Pengembangan ekosistem data terbuka (open government) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan publik.
- Peningkatkan satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM
- Pengembangan Satu Data Kemenag dan Satu Akses Layanan (Architecture Enterprise SPBE dan Integrasi Sistem Informasi) termasuk digitalisasi layanan dan pengawasan/ pengendalian
- Implemetasi Manajemen Talenta, Sistim merit dan Reformasi Birokrasi
- Pemanfaatan Data Terpadu dalam pengambilan kebijakan layanan bidang agama dan pendidikan agama/keagamaan

Penjabaran *Asta Protas* Menteri Agama merupakan landasan utama dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama (Kemenag) guna mencapai visi dan tujuan pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan. Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, serta diselaraskan dengan Program Prioritas Menteri Agama. Dalam perumusannya, Kementerian Agama juga mempertimbangkan potensi serta isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang.

Kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2025-2029 diarahkan sebagai berikut:

### 1. Peningkatan masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial

Arah Kebijakan dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni dengan menitikberatkan peningkatan pemahaman dan praktek keagaman maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun, mitigasi dan penyelesaian konflik intra dan antar umat beragama dan pengarustamaan penguatan moderasi beragama. Adapun strateginya adalah:

1) Penguatan Literasi & Pendidikan Moderasi Beragama
   - Penguatan literasi keagamaan yang moderat di pendidikan, rumah ibadah, dan ruang publik.
   - Peningkatan kurikulum dan pelatihan keagamaan yang menanamkan toleransi, inklusivitas, dan nilai kemanusiaan.
   - Pengembangan modul, kurikulum, dan materi dakwah tentang moderasi beragama.

- Penguatan kurikulum kebhinekaan, pelatihan guru, dan pembentukan lingkungan sekolah yang menghargai keberagaman.

- Penguatan karakter dan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan kontekstual.
- Pengembangan literasi khazanah budaya bernapas agama.

2) Penguatan Ekosistem Kehidupan Beragama & Kerukunan
   - Pengembangan ekosistem kehidupan beragama yang harmonis berbasis komunitas.
   - Forum dialog antarumat dan antarbudaya untuk membangun saling pengertian.
   - Optimalisasi peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas dalam dakwah perdamaian.
   - Peningkatan kapasitas kelembagaan FKUB untuk mediasi, advokasi, dan resolusi konflik.
   - Penguatan KUA sebagai Early Warning System potensi konflik.
   - Pembentukan Agen Kerukunan di tingkat Kabupaten/Kota.
   - Peningkatan kerukunan intern, antarumat, dan umat dengan pemerintah.
   - Penguatan kerukunan berbasis isu lingkungan, HAM, kesetaraan gender, budaya digital, dan pelibatan pemuda.

3) Kampanye, Diseminasi & Digitalisasi
   - Penyebarluasan materi dakwah, khutbah, dan ceramah berperspektif cinta kemanusiaan.
   - Kampanye nasional nilai kemanusiaan melalui media sosial, TV, film, dan platform digital.
   - Pengembangan repositori digital dan platform materi literasi keagamaan.
   - Peningkatan kampanye publik, seminar, dan workshop untuk diseminasi karya tulis ilmiah tentang kerukunan.
   - Intensifikasi kampanye nilai, kearifan lokal, dan budaya penopang kerukunan.
   - Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kampanye dan program diseminasi yang luas.

4) Tata Kelola Kelembagaan & Kebijakan
   - Integrasi nilai moderasi beragama dalam tata kelola kelembagaan keagamaan dan pendidikan.
   - Penguatan regulasi dan kebijakan afirmatif perlindungan hak beragama warga negara.
   - Integrasi prinsip keadilan sosial, HAM, dan solidaritas kemanusiaan dalam kebijakan lintas sektor.
   - Implementasi moderasi beragama lintas Kementerian/Lembaga/Pemda.
   - Peningkatan pelatihan etika, moral, dan pendidikan karakter bagi pegawai Kemenag.

5) Budaya, Lingkungan & Event Keagamaan
   - Panduan green religion yang ramah manusia dan lingkungan.
   - Kegiatan keagamaan yang berorientasi kebaikan terhadap alam, lingkungan, dan sesama.
   - Event keagamaan dan seni budaya bernapas agama dengan promosi dan kualitas tinggi.
   - Penghormatan atas keragaman budaya sebagai wujud pengamalan nilai agama.

## 2. Peningkatan Layanan Keagamaan Transformatif

Arah kebijakan dalam meningkatkan Layanan Keagamaan Transformatif melalui pelayanan keagamaan yang transformatif, inklusif, dan adaptif berbasis ekoteologi difokuskan pada peningkatan kepuasan layanan KUA kecamatan, layanan ibadah haji, layanan sertifikasi halal, dan layanan penyuluh agama yang memenuhi standar, inovatif, dan berbasis digitalisasi layanan. Strategi yang akan dilakukan adalah:

1) Peningkatan Layanan Keagamaan
   - Revitalisasi rumah ibadah dan pemenuhan sarpras di wilayah 3T.
   - Digitalisasi layanan administrasi keagamaan.
   - Pelatihan SDM pengelola rumah ibadah & penyiar agama.
   - Penyediaan kitab suci, sumber bacaan ramah difabel, dan sistem penilaian buku keagamaan yang transparan.
   - Penguatan harmoni sosial melalui penyuluhan agama profesional dan mitigasi konflik.
   - Penyediaan layanan keagamaan terpadu pada tingkat kota dan kabupaten untuk mempermudah akses dan meningkatkan umat beragama untuk memperoleh layanan keagamaaan

2) Tata Kelola Haji & Umrah
   - Perbaikan tata kelola end-to-end: kuota, biaya, fasilitas, dan edukasi manasik berbasis teknologi.
   - Regulasi haji yang akuntabel, sanksi tegas, serta transparansi daftar jemaah.
   - Peningkatan layanan di Armuzna, penyediaan konsumsi full covered, serta efisiensi visa dan paspor.
   - Pengembangan PLHUT, revitalisasi asrama haji, dan penyusunan buku pedoman perhajian.
   - Penguatan investasi dan tata kelola distribusi Dam sesuai prinsip syariah.

3) Penguatan Keluarga & Bimbingan Perkawinan
   - Peningkatan sarana-prasarana KUA (KUA Berdaya) dan kurikulum bimbingan perkawinan yang kontekstual.
   - Penguatan kapasitas fasilitator, penyuluh agama, serta pemberian insentif yang adil.
   - Fasilitasi pernikahan sah, mudah, bermartabat, serta layanan inklusif di KUA.
   - Pengarusutamaan program keluarga maslahah, bimbingan remaja usia sekolah, dan edukasi berbasis nilai keagamaan.

4) Penguatan Sistem Jaminan Produk Halal
   - Penguatan regulasi, sistem pengawasan, dan penjaminan mutu produk halal yang kredibel.
   - Platform digital terpadu untuk layanan halal, edukasi, dan literasi ekonomi umat.

5) Pemberdayaan Ekonomi Umat & Filantropi
   - Optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infaq, shadaqah, dana amal kasih, pramita, punia dan kebajikan) untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat.
   - Pembentukan lembaga inkubasi wakaf produktif, pengembangan kota zakat/wakaf, dan rumah ibadah pusat ekonomi umat.
   - Peningkatan kapasitas lembaga filantropi keagamaan, kolaborasi pemanfaatan dana sosial keagamaan dan aset wakaf, dan penyusunan data terintegrasi berbasis wilayah.

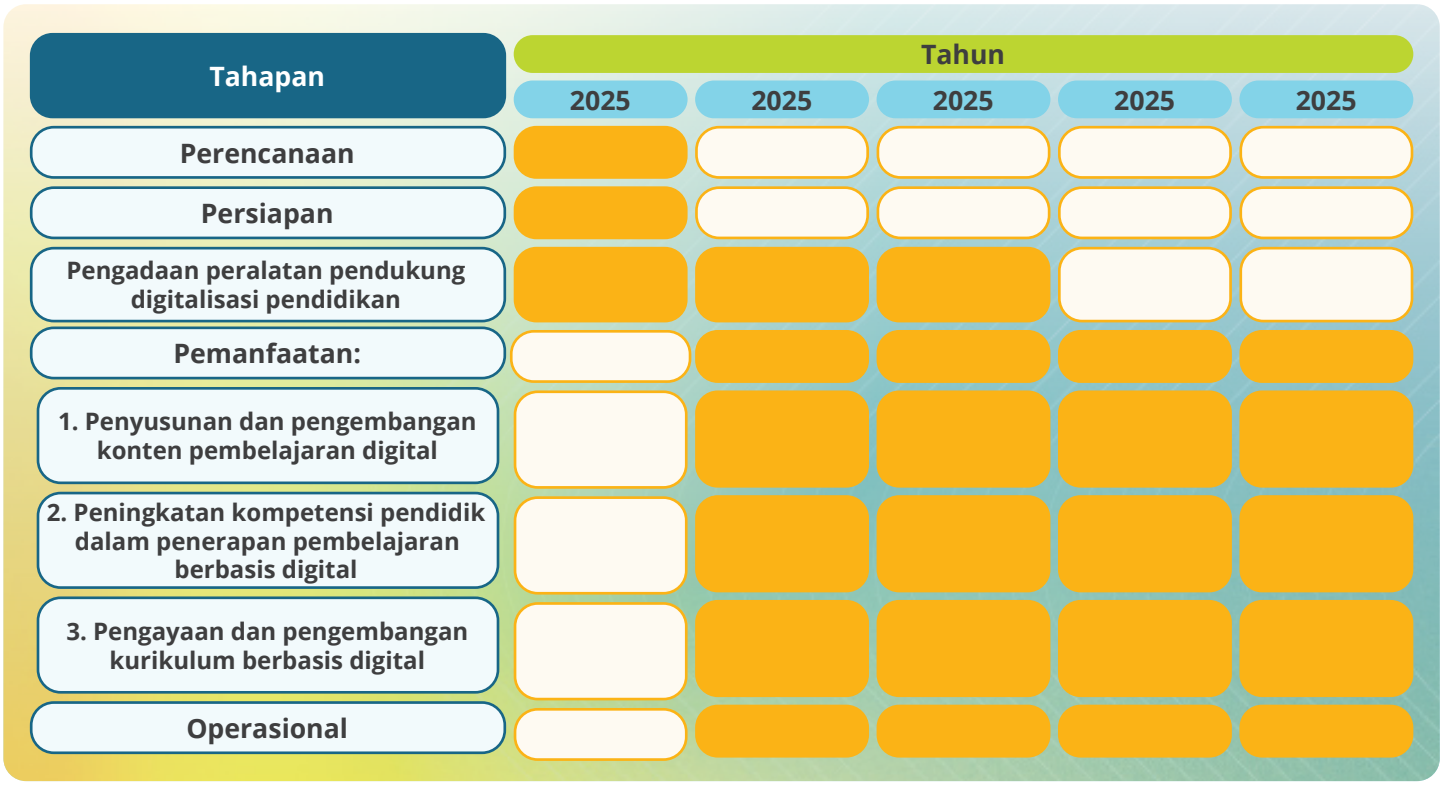
6) Layanan Keagamaan Berbasis Ekologi
   - Internalisasi ajaran agama peduli lingkungan, pelatihan berbasis kesadaran lingkungan, dan pemanfaatan energi terbarukan.
   - Program penghijauan (penanaman pohon/ wakaf pohon) serta standardisasi layanan berbasis pelestarian lingkungan di rumah ibadah.

## 3. Peningkatan pemerataan akses pendidikan.

Upaya penguatan peningkatan dan pemerataan akses pendidikan diimplementasikan pada Digitalisasi pendidikan menjadi salah satu upaya dalam mendukung pembangunan pendidikan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sejalan dengan 17 program prioritas Presiden dan 8 program hasil terbaik cepat. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat transformasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, guna meningkatkan akses, mutu, efisiensi, dan daya saing pendidikan di semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan program pada Kementerian Agama dilaksanakan dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan sasaran penerima manfaat yang mencakup satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta peserta didik pada seluruh varian layanan pendidikan untuk seluruh agama yang ada di Kementerian Agama, yang dalam pembinaannya tersebar di berbagai unit eselon 1.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama (Pusdatin Kemenag) bertindak sebagai koordinator program dikarenakan posisinya sebagai penanggungjawab program prioritas Kementerian Agama di bidang Digitalisasi Tata Kelola, dengan jadwal sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Jadwal Program Prioritas Kementerian Agama**




Upaya meningkatkan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangka, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai (termasuk daerah 3T), melakukan pengembalian Anak Tidak Sekolah ke dalam satuan / sistem pendidikan / pelatihan, memberikan bantuan pendidikan, dan meningkatkan kualitas pendidikan PAUD. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan di daerah 3T, termasuk madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya, seperti: (1) madrasah satu atap; (2) madrasah inklusi; (3) kelas fillial; (4) pembelajaran *hybrid*; (5) pembelajaran jarak jauh; (6) kampus jauh; dan (7) merdeka belajar.
b. Pembangunan satuan pendidikan baru di wilayah yang butuh di afirmasi
c. Penyediaan sarana dan prasarana SATAP pada satuan pendidikan
d. Optimasi dukungan anggaran Non APBN
e. Penjaminan kualitas setiap satuan pendidikan memenuhi standar sekolah inklusi

f. Memperluas jangkauan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga pra-sejahtera, kelompok rentan, dan difabel melalui skema subsidi, BOS, BOP, dan program afirmatif lainnya.
g. Pemberian bantuan operasional kepada satuan pendidikan
h. Penjaringan Anak Tidak Sekolah ke dalam program pendidikan kesetaraan
i. Penguatan layanan pendidikan dan satuan pendidikan untuk pencegahan anak tidak sekolah
j. Peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya pendidikan
k. Perluasan akses kemudahan perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan formal dan non-formal sebagai implementasi rekognisi pendidikan
l. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra-sekolah terutama untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar.
m. Pengembangan layanan Satu Atap (SATAP) PAUD-MI/SD bagi desa/kelurahan yang belum memiliki PAUD
n. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD di daerah yang tidak memungkinkan pembangunan SATAP PAUD-MI/SD
o. Pengembangan sistem pendataan serta penjangkauan dan pendampingan yang efektif bagi anak usia 5-6 tahun untuk mendapatkan layanan PAUD
p. Peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya PAUD
q. Makan bergizi gratis pada lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah
r. Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendukung wajib belajar 13 tahun
s. Penguatan ekosistem kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan unit usaha produktif yang berkelanjutan, berbasis potensi lokal, dan prinsip syariah
t. Rintisan pengembangan Pesantren
u. Peningkatan daya saing dan internasionalisasi pendidikan pesantren melalui pendirian Pesantren Internasional yang unggul dalam ilmu keislaman, sains, dan wawasan global
v. Penguatan sistem layanan kesehatan, termasuk kesehatan mental untuk peserta didik dan pendidik dengan melibatkan ekosistem.
w. Pemberian beasiswa santri dokter dan tenaga Kesehatan
x. Pendirian dan pengembangan pesantren di wilayah 3T
y. Peningkatan pesantren, majelis taklim, dan organisasi keagamaan sebagai mitra strategis dalam mendidik umat dan menggerakkan ekonomi lokal melalui pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha berbasis nilai keagamaan.
z. Pendirian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan unggul terintegrasi
aa. Pengembangan kebijakan afirmasi serta bantuan dan subsidi pembiayaan pendidikan tinggi keagamaan yang berkeadilan
ab. Pengembangan skema pembiayaan pendidikan tinggi keagamaan bagi mahasiswa yang berkeadilan untuk mendukung tingkat keberlanjutan masyarakat ke pendidikan tinggi.

ac. Peningkatan legalitas dan perlindungan hukum aset tanah wakaf untuk satuan pendidikan madrasah guna mendukung keberlangsungan dan kepastian layanan pendidikan
ad. Peningkatan Kapasitas Pesantren dalam Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
ae. Pengembangan prasarana pendidikan tinggi keagamaan berbasis teknologi untuk mendukung daya saing dan produktivitas lulusan.
af. Pengembangan skema pendanaan serta pembiayaan inovatif bagi pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.
ag. Pemerataan kualitas dan akses perguruan tinggi keagamaan di daerah afirmasi.
ah. Penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan menengah vokasiyang sesuai dengan standar DUDIKA.

### 4. Peningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.

Kebijakan dalam peningkatan hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dititikberatkan pada peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia, peningkatan mutu satuan pendidikan dasar menengah, peningkatan kualitas Layanan Perbukuan Pendidikan Agama dan Keagamaan, peningkatan kualitas penilaian dan pemanfaatan hasil pembelajaran, peningkatan kualitas perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, dan peningkatan layanan rekognisi pendidikan . Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan kurikulum integratif yang menggabungkan nilai-nilai keislaman, ilmu pengetahuan, keterampilan abad 21, dan karakter kewirausahaan sesuai kebutuhan zaman.
b. Penerapan Kurikulum yang Berfokus pada Kompetensi Esensial, Adaptif, dan Kontekstual
c. Penguatan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan kewargaan untuk memperkokoh jati diri bangsa dalam pergaulan dunia
d. Penguatan skema pemilihan muatan pembelajaran pilihan pada Pendidikan Menengah untuk memfasilitasi minat, bakat dan kemampuan peserta didik.
e. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pembelajaran di setiap satuan pendidikan melalui dukungan asimetris dan kolaborasi dengan K/L terkait.
f. Penguatan rancangan asesmen tingkat nasional berbasis pendidikan agama yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk memantau perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik serta kualitas lingkungan belajar.
g. Penguatan pemanfaatan hasil asesmen tingkat nasional sebagai umpan balik kepada satuan pendidikan dan Kementerian Agama untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan yang adil dan merata.
h. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk menguatkan karakter dan wellbeing peserta didik dan pendidik

i. Penguatan koordinasi dan pembagian peran antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasi skema PAUD-HI yang berkonvergensi dengan berbagai program yang menyasar anak usia dini
j. Peningkatan pesantren untuk mengembangkan unit-unit usaha produktif berbasis potensi lokal dan wakaf produktif guna meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren dan daya saing lulusan.
k. Memfasilitasi kolaborasi antara pesantren, lembaga pendidikan, dan sektor industri untuk pemagangan, pelatihan kewirausahaan, dan kelanjutan studi alumni.
l. Menyediakan layanan sertifikasi kompetensi dan pengembangan karier bagi lulusan lembaga pendidikan dan pesantren melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja dan kewirausahaan.
m. Mengintegrasikan teknologi digital dalam manajemen sekolah/pesantren dan proses pembelajaran untuk menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan modern.
n. Penguatan sistem dan budaya pendidikan yang ramah anak guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, bebas kekerasan, serta mendukung perkembangan karakter dan potensi peserta didik secara holistik
o. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, dan kerukunan.
p. Penguatan mekanisme dalam pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh Pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkualitas, sesuai dengan agama dan kepercayaan peserta didik.
q. Pemenuhan standar untuk merekognisi lulusan pendidikan non-formal
r. Penjaminan satuan pendidikan nonformal berkualitas
s. Penyempurnaan sistem asesmen nasional, Rapor Pendidikan dan akreditasi sebagai sumber data evaluasi sistem pendidikan (ESP)
t. Penguatan kualitas pangkalan data pendidikan serta kemudahan akses dan penggunaan
u. Penguatan mekanisme integrasi data untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan
v. Peningkatan jaminan mutu layanan pesantren
w. Penguatan Pesantren dan Ma'had Aly Sebagai Sentra Keunggulan Kajian Islam
x. Intensifikasi kampanye praktik baik pesantren ramah anak
y. Pengembangan teaching factory sebagai media praktik siswa/peserta didik yang disesuaikan dengan perkembangan DUDIKA.
z. Perluasan kerja sama satuan pendidikan menengah vokasi dengan DUDIKA dan asosiasi profesi dalam penguatan proses pembelajaran berbasis industri.
aa. Penyelarasan konsentrasi keahlian pada satuan pendidikan menengah vokasi dengan perkembangan kebutuhan DUDIKA secara berkelanjutan.
ab. Penguatan skema pemagangan bagi peserta didik dan pendidik pendidikan menengah vokasi.
ac. Perluasan dan penguatan kerja sama satuan pendidikan menengah vokasi dengan lembaga sertifikasi profesi dan asosiasi profesi.
ad. Perluasan cakupan sertifikasi kompetensi bagi lulusan pendidikan menengah vokasi.
ae. Pengembangan dan penguatan skema insentif bagi DUDIKA yang berkontribusi dalam pengembangan kompetensi lulusan pendidikan menengah vokasi.

af. Peningkatan kolaborasi dengan DUDIKA sebagai wahana pembelajaran satuan pendidikan menengah vokasi.

## 5. Peningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas

Kebijakan dalam Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas difokuskan pada restrukturisasi dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan guru dan tenaga kependidikan yang profesional, peningkatan kesejahteraan guru berbasis penilaian kinerja dan pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan data guru secara terpadu termasuk proyeksi kebutuhan guru dan penyusunan sistem informasi tentang kebutuhan guru untuk calon guru dan pemangku kepentingan lainnya
b. Pengembangan mekanisme rekrutmen guru agama ASN secara terpusat sesuai kebutuhan berbasis analisis beban kerja
c. Penguatan peran Kementerian Agama dalam memastikan penempatan guru agama sesuai kebutuhan
d. Pengangkatan guru dari calon yang memiliki sertifikat profesi, kualifikasi dan atau pelatihan terstandar dan berjenjang
e. Penguatan mekanisme pemenuhan kebutuhan guru melalui penyesuaian linearitas guru, termasuk penerapan multi-grade dan multi-subject, untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan SDM
f. Pengembangan mekanisme rekrutmen dan remunerasi pendidik vokasi dari praktisi dunia kerja
g. Peningkatan kompetensi guru berbasis pemanfaatan data asesmen di tingkat nasional
h. Pemenuhan dan penguatan kompetensi tenaga kependidikan melalui jalur kualifikasi dan atau pelatihan terstandar
i. Penguatan mekanisme rekrutmen kepala satuan pendidikan melalui jalur kualifikasi dan/ atau pelatihan terstandar untuk kepemimpinan pembelajaran
j. Pengembangan mekanisme jenjang karir guru berbasis sistem merit
k. Penjaminan kesejahteran pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial dan non-finansial
l. Program mentoring terstandar bagi calon kepala satuan pendidikan (bersifat wajib bagi setiap kepala satuan pendidikan)
m. Pengembangan profesi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan
n. Penguatan peran pengawas sebagai pendamping kepala satuan pendidikan
o. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
p. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui KKG dan MGMP;
q. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
r. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T

s. Peningkatan kapabilitas pendidik dan tenaga pendidik dalam pemanfaatan infrastruktur esensial pembelajaran pendidikan menengah vokasi

6. Peningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas

Kebijakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan, kompetensi lulusan yang memenuhi kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan kualitas, dan penjaminan mutu bagi perguruan tinggi keagamaan dan program studi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi.
b. Perluasan layanan pendidikan tinggi keagamaan untuk mengakomodasi pendidikan sepanjang hayat.
c. Penguatan sinkronisasi data dan informasi pendidikan tinggi keagamaan yang berkelanjutan
d. Penguatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pembelajaran serta manajemen pendidikan tinggi keagamaan.
e. Pengembangan skema pendanaan serta pembiayaan inovatif bagi pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.
f. Pendirian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan unggul terintegrasi
g. Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan berkelas dunia
h. Peningkatan kualitas Literasi Keagamaan berbasis budaya digital dan media sosial
i. Pemerataan layanan pendidikan tinggi keagamaan berkualitas yang inklusif, aman, dan nyaman
j. Pengembangan dan penguatan inovasi pembelajaran berkualitas
k. Pengembangan dan penguatan kurikulum pendidikan tinggi keagamaan yang adaptif
l. Peningkatan Aksesibilitas dan Keterjangkauan Teknologi Pembelajaran
m. Peningkatan layanan pembelajaran sepanjang hayat
n. Penguatan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi keagamaan
o. Penerapan dan pengembangan kebijakan diferensiasi misi perguruan tinggi keagamaan
p. Pengembangan Diversifikasi dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi keagamaan
q. Penguatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Tinggi keagamaan
r. Penguatan Kapasitas dan Kepemimpinan di Perguruan Tinggi keagamaan
s. Reformasi Tata Kelola dan Pengembangan Karir Dosen
t. Pengembangan program upskilling dan reskilling bagi dosen dan tenaga kependidikan
u. Pengembangan kurikulum LPTK yang adaptif untuk membangun kompetensi guru termasuk memfasilitasi pendidikan inklusif
v. Penyelenggaraan prodi pendidikan keguruan yang diselaraskan dengan proyeksi kebutuhan
w. Pengintegrasian LPTK dan program profesi guru termasuk untuk mengakomodasi sertifikasi double-major
x. Penguatan LPTK dalam penyelenggaraan program induksi untuk guru pemula
y. Peningkatan Relevansi kurikulum dan kualitas pembelajaran pendidikan tinggi keagamaan vokasi terhadap perkembangan DUDIKA.

z. Perluasan layanan pendidikan tinggi vokasi untuk mengakomodasi pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat.
aa. Penguatan penjaminan mutu dan standard pelaksanaan diversifikasi layanan pendidikan tinggi.
ab. Peningkatan kompetensi dan mobilitas dosen dan instruktur perguruan tinggi keagamaan.
ac. Perluasan cakupan serta bidang sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa dan dosen/ instruktur perguruan tinggi keagamaan.
ad. Peningkatan kolaborasi dan mobilitas pembelajaran dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen lingkup nasional dan internasional

7. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital.

a. Mendorong implementasi budaya kerja yang bersih, jujur, dan profesional melalui kode etik ASN, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), dan pengawasan internal yang akuntabel.
b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi layanan digital dan digitalisasi dokumen layanan.
c. Mendorong penerapan SPBE secara menyeluruh dalam proses administrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan terukur.
d. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan digitalisasi birokrasi bagi ASN agar mampu menjalankan tugas-tugas berbasis teknologi dengan optimal.
e. Menyederhanakan struktur organisasi dan prosedur kerja melalui redesign proses bisnis yang lebih lincah, terfokus pada hasil *(result-oriented)*, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara real-time.
f. Memperkuat sistem evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas dan dapat diukur, serta mengaitkan hasil kinerja dengan pemberian reward dan sanksi secara proporsional.
g. Mengembangkan ekosistem data terbuka (open government) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan publik.
h. Meningkatkan satker WBK/WBBM
i. Satu Data Kemenag dan Satu Akses Layanan (Architecture Enterprise SPBE dan Integrasi Sistem Informasi) termasuk digitalisasi layanan dan pengawasan/pengendalian
j. Pemanfaatan Data Terpadu dalam pengambilan kebijakan layanan bidang agama dan pendidikan agama/keagamaan
k. Implemetasi Manajemen Talenta, Sistim merit dan Reformasi Birokrasi
l. Peningkatan kompetensi ASN Kementerian Agama yang smart dan moderat
m. Penerapan konsep Green pesantren, green campus, dan green building (Efisiensi Energi, Penggunaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Pengelolaan Air dan Limbah) di Kantor Kementerian Agama pusat dan daerah, rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan

## C. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan panduan umum yang dibutuhkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2025–2029. Penyusunan kerangka ini mengacu pada UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 59/2024 tentang RPJPN 2025–2045, Perpres No. 12/2025 tentang RPJMN 2025–2029, serta Permen PPN No. 10/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L. Pada periode ini, akan disusun 17 regulasi yang mencakup 2 UU, 2 PP, 1 Perpres, dan 12 PMA untuk mendukung perubahan kelembagaan, kebijakan strategis, serta melengkapi regulasi yang belum tercapai pada periode sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan bidang agama.

Penjabaran lengkap terhadap dokumen kerangka regulasi, berikut :

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan | Perubahan ini perlu dilakukan dalam hal RUU Sisdiknas dilakukan perubahan, maka Peraturan Pelaksananya dimungkinkan untuk berubah. | - Sekretaris Jenderal (Biro Hukum)<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;<br>- Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan<br>- Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu. | - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah<br>- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Penyusunan RPP Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama | 1. Penajaman Fungsi Kementerian Agama;<br>2. Penataan Fungsi Direktorat Jendral Pendidikan Islam;<br>3. Pembentukan Direktorat Jendral Pesantren, dan<br>4. Penghapusan materi mengenai Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah | - Sekretaris Jenderal (Biro Hukum, Biro Ortala dan Biro Perencanaan)<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; | - Kementerian Haji dan Umrah | 2025 |
| 3 | *RPP perubahan atas PP No 39/2021 ttng Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal* | Amanat Perpres BPJPH | - Sekretaris Jenderal (Biro Hukum) | - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; | 2025 |
| 4 | RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (KUB) | Penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, melalui regulasi yang mampu mendorong keterlibatan semua pihak—baik negara, tokoh agama, maupun masyarakat—dalam menyelesaikan potensi konflik keagamaan dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman. | - Pusat Kerukunan Umat Beragama;<br>- Sekretaris Jenderal (Biro Hukum) | - Kementerian Dalam Negeri<br>- Komnas HAM | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama | Penyelerasan terhadap revisi Pearturan Presiden Nomor 152 terkait Direktoat Haji dan Umrah dengan penajaman revisi pada :<br>• Penajaman Fungsi Kementerian Agama;<br>• Penataan Fungsi Direktorat Jendral Pendidikan Islam;<br>• Pembentukan Direktorat Jendral Pesantren, dan<br>• Penghapusan materi mengenai Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah | - Sekretaris Jenderal (Biro Hukum, Biro Ortala dan Biro Perencanaan)<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; | - Sekretariat Jendral<br>- Direktorat Jendral Pendidikan Islam<br>- Biro Hukum<br>- Biro Organisasi dan Tata Laksana<br>- Biro Perencanaan dan Penganggaran | 2025 |
| 6 | RPMA tentang Perubahan atas PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama | Perlunya upaya perlindungan anak secara holistik dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, tidak terbatas pada kekerasan seksual saja. | - Sekjen | - Sekjen | 2025 |
| 7 | RPMA tentang Perubahan atas PMA 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah | Penguatan pengelolaan pembelajaran dan standarisasi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum | - Sekjen dan Pendis | - Sekjen; dan Pendis | 2027 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | RPMA tentang Perubahan PMA 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam | Penyesuaian ketentuan mengenai pengaturan pendidikan Keagamaan Islam berdasarkan PP 55 Tahun 2007 dan UU Pesantren. Penguatan penyelenggaraan Pendidikan Quran dan Pendidikan Diniyah Takmiliyah | - Sekjen dan Pendis | - Sekjen dan Pendis | 2028 |
| 9 | RPMA tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau | Pengakuan kompetensi dan peningkatan efektifitas pembelajaran | - Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha | - Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha | 2025 |
| 10 | Revisi PMA 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah | Harmonisasi kebijakan mengenai standar kompetensi kepala madrasah dan penambahan ketentuan seleksi kepala Madrasah Unggulan | - Sekjen dan Pendis | - Sekjen dan Pendis | 2025 |
| 11 | RPMA tentang Perubahan atas PMA 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah | Penguatan pengelolaan dan peningkatan layanan madrasah | - Sekjen dan Pendis | - Sekjen dan Pendis | 2026 |
| 12 | RPMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah | Penguatan organisasi dan kelembagaan madrasah | - Sekjen dan Pendis | - Sekjen dan Pendis | 2026 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | RPMA tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | Standarisasi pembentukan organ Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam rangka Peningkatan Layanan dan Penguatan organisasi dan kelembagaan PTKN | - Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha | - Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha | 2027 |
| 14 | RPMA tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan | Standarisasi penyusunan statuta bagi PTK dalam rangka penguatan pengelolaan PTK | - Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha | - Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha | 2026 |
| 15 | RPMA tentang Kemasjidan | *Masjid/Musala di Indonesia sangat banyak, beragam tipologinya, dan umumnya dikelola oleh masyarakat. Karena berkaitan dgn pelayanannya untuk umat/masyarakat, maka pengaturan tata kelolanya diperlukan. Pemerintah hadir membersamai transformasi masjid menjadi lebih profesional, moderat, berdaya, dan berdampak. Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih memadai dan dapat memayungi pembinaan tsb. Secara teknis, regulasi ini menjadi omnibus terhadap intisari regulasi Dirjen Bimas yg ada, dan berupaya menjawab kondisi dan kebutuhan aktual dan faktual di masyarakat.* | | | |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama | Adanya pengurangan jumlah pusat pada Badan, yang semula 5 pusat menjadi hanya 4 pusat, sedangkan dalam naskah akademik yang diusulkan oleh BMBPSDM adalah sebanyak 5 Pusat Resetrukturisasi Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan dari Sekretariat Jenderal ke BMBPSDM | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pusbangkom | 2025 |
| 17 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keagamaan | Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fiungsi unit pelaksana teknis dibawahnya Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja UPT pengembangan kompetensi SDM Keagamaan | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pusbangkom | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Strategi Kebijakan Bidang Agama | Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fiungsi unit pelaksana teknis dibawahnya Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja Balai Litbang Agama pasca fungsi penelitian dan pengembangan sudah tidak boleh ada selain di BRIN | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pustrajak | 2025 |
| 19 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an | Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fiungsi unit pelaksana teknis dibawahnya Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Perubahan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama | Adanya perubahan Nomenklatur Kementerian yang menjadi anggota Sekretariat Bersama Pembaharuan nomenklatur Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang berlaku dalam Kabinet Merah Putih | - BMBPSDM | - Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Kemenko PMK | 2025 |
| 21 | Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Moderasi Beragama | Adanya ketentuan dalam KMA 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA, dan MAk bahwa Madrasah wajib memberikan kegiatan kokurikuler yang mengandung unsur moderasi beragama bagi peserta didik.<br>Serta perlu penambahan bentuk pengembangan dalam kegiatan penguatan moderasi beragama yang berupa Film, Musik dan Kegiatan Kebudayaan<br>Terciptanya regulasi yang harmonis dalam norma penguatan moderasi beragama | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang panduan pemantauan dan evaluasi penguatan moderasi beragama pada Kementerian/ Lembaga | Sebagai tindak lanjut dari PMA Nomor 3 Tahun 2024 dan juga belum adanya pengaturan secara teknis tata cara pemantauan, dan evaluasi terhadap penguatan moderasi beragama pada K/L Terwujudnya keseragaman dalam proses pemantauan dan evaluasi implementasi moderasi beragama pada K/L | - BMBPSDM | - Sekretariat Jenderal Kemenag, Kemenko PMK | 2025 |
| 23 | Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan KMA 455 Tahun 2024 tentang Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Pelaksana Harian Sekretariat Bersama | Adanya perubahan Nomenklatur Kementerian yang menjadi anggota Sekretariat Bersama Pembaharuan nomenklatur sesuai dengan yang berlaku dalam Kabinet Merah Putih | - BMBPSDM | - Sekretariat Jenderal Kemenag, Kemenko PMK | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama | Adanya beberapa perubahan substansi maupun nomenklatur pelatihan dari Instansi Pembina Pelatihan (LAN) Terbitnya PMA 15 Tahun 2021 yang mensyahkan adanya loka diklat keagamaan sebagai lembaga pelatihan pada Kementerian Agama Penyempurnaan dan substansi pelatihan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Instansi Pembina Pelatihan, yaitu Lembaga Administrasi Negara, serta penambahan loka diklat keagamaan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pusbangkom | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an | 1. Perlu ada penambahan secara rinci terkait pencetakan mushaf Al-Quran<br>2. Belum adanya ketentuan pengelolaan limbah bahan cetak mushaf Al-Quran<br>3. Sanksi administratif belum memberikan efek jera, sehingga perlu adanya sanksi pidana.<br>Memberikan kepastian terhadap ketentuan pencetakan mushaf Al-Quran, tata Kelola pemusnahan limbah bahan cetak, akreditasi penerbit dan pencetak, dan ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ | 2025 |
| 26 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Formasi JF Pentashih Mushaf Al-Qur'an | Amanat dari PerMenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an<br>Memberikan kepastian penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Perubahan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Akun Angka Standar Buku Internasional dan Layanan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Memberikan kejelasan terhadap kedudukan dan tata kerja perpustakaan dibawah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | - BMBPSDM | - Perpusnas, Sekretariat Jenderal Kemenag, Sekretariat BMBPSDM | 2025 |
| 28 | Rancangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan tentang Relasi Agama dan Budaya | | - BMBPSDM | - Kemenkum, Kemenbud, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak | 2025 |
| 29 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Penguatan Konsep Ekoteologi bagi Pengelola Rumah Ibadah | | - BMBPSDM | - Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak, Ditjen Bimas semua Agama | 2025 |
| 30 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pembinaan Lembaga Moderasi Beragama di Masyarakat | | - BMBPSDM | - Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyele-saian |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang tentang Standar Keluaran Kebijakan Pendidikan dan Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama | | - BMBPSDM | - Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak, LAN | 2025 |
| 32 | Rancangan Surat Edaran Menteri Agama tentang Koordinasi Penyusunan Dokumen Kebijakan pada Kementerian Agama | | - BMBPSDM | - Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak | 2025 |

## D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 61/2024, seluruh kementerian dan lembaga negara harus bersinergi sebagai satu sistem pemerintahan untuk mencapai visi-misi Presiden, termasuk BPJPH dan BPKH di lingkungan Kementerian Agama. Transformasi kelembagaan diarahkan pada efektivitas, efisiensi, dan peningkatan indeks reformasi birokrasi melalui penguatan sistem kerja, regulasi yang harmonis, serta manajemen SDM berbasis meritokrasi dan teknologi digital. Kementerian Agama juga berperan dalam program prioritas nasional, seperti reformasi birokrasi, peningkatan pendidikan agama, digitalisasi layanan, pemberantasan kemiskinan, penguatan ekonomi keummatan, toleransi antarumat, serta pelestarian lingkungan. Investasi pada pendidikan agama dan keagamaan dipandang strategis karena memberikan manfaat sosial, budaya, dan moral yang mendukung terciptanya masyarakat yang rukun, adil, dan sejahtera.

Melalui kerangka kelembagaan di atas, hal yang diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Transformasi kelembagaan Kementerian Agama dan instansi vertikal menjadi organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran pada masa transisi yang didukung sumberdaya manusia yang unggul ditargetkan tahun 2025.
2. Transformasi sumber daya manusia melalui sistem merit dan manajemen talenta secara transparan dan akuntabel mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa ditargetkan tahun 2026.
3. Transformasi digital Kementerian Agama dalam mewujudkan peningkatan pelayanan prima ditargetkan tahun 2027.
4. Penguatan transformasi kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM berbasis analisis/evaluasi jabatan, beban kerja, dan peta jabatan yang terstandar ditargetkan tahun 2028
5. Transformasi kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan unit pelaksana teknis lainnya harus dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan berkontribusi pada penaikan indeks reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditargetkan tahun 2029.
6. Penguatan transformasi jabatan, khususnya jabatan fungsional bidang agama menjadi kekuatan Kementerian Agama dalam mengemban amanah umat ditargetkan tahun 2029.

Struktur kelembagaan Kementerian Agama dirancang untuk memastikan tercapainya misi tersebut melalui koordinasi yang efektif antara tingkat pusat dan daerah. Pada tingkat pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktorat Jenderal Urusan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjadi pilar utama dalam implementasi program-program prioritas. Sementara itu, pada tingkat daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai ujung tombak layanan langsung kepada masyarakat.

Sejak diundangkannya PMA No. 25 Tahun 2024, dan diperkuat melalui PMA No. 33 Tahun 2024 tahun 2026, beberapa unit kerja baru yang memiliki peran penting untuk menunjang kinerja Kemenag adalah:

**Tabel 3. 3 Unit Kerja Baru Kementerian Agama**

| Unit | Nomenklatur | Tugas | Fungsi |
|---|---|---|---|
| Puspenma | Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan | Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan pendidikan agama dan keagamaan | • Merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembiayaan dari mulai Pendidikan Dasar Menengah pada lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan agama dan Pendidikan Pesantren sampai ke Perguruan Tinggi Keagamaan baik negeri maupun swasta<br>• Memberikan layanan beasiswa (dalam negeri & luar negeri), investasi pendidikan, PIP, KIP Kuliah, riset kolaboratif, dan kerjasama pendidikan lainnya<br>• Melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pelaskanaan bantuan biaya pendidikan |
| Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan *(sering disebut Pusat Literasi atau Pusat Buku/ Literasi)* | Unit Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan | Bertanggung jawab atas penilaian buku-buku agama dan literasi keagamaan | Menyusun dan menjalankan penilaian atas kualitas buku agama serta materi literasi keagamaan untuk mendukung penyebaran pengetahuan agama yang akurat dan sehat (Balitbang Diklat Kemenag, |
| Pusdatin | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Unit untuk penguatan data dan informasi | Bertindak sebagai unit pusat untuk penguatan data dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) |

Pada periode 2025–2029, arah kelembagaan Kementerian Agama berfokus pada digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas pendidik, standardisasi pendidikan keagamaan, dan penguatan kolaborasi lintas elemen masyarakat. Digitalisasi diterapkan untuk mempercepat akses, meningkatkan efisiensi, dan menghadirkan layanan yang transparan, termasuk renovasi rumah ibadah dan penyelesaian konflik secara adil. Standardisasi pendidikan diterapkan melalui kurikulum yang terukur, metode pengajaran efektif, dan evaluasi objektif yang menanamkan nilai moderasi beragama. Kolaborasi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat diperkuat melalui forum komunikasi dan program berbasis komunitas, sedangkan assessment pendidikan nasional pada 2028 menjadi dasar penyusunan peta jalan peningkatan kompetensi pendidik dan peserta didik.

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2023, beberapa usulan kelembagaan alternatif meliputi:

a. Pembentukan Unit Baru
   Penambahan unit kerja baru yang bersifat strategis untuk menangani isu prioritas seperti Harmonisasi Standar Halal Nasional dan International serta program pendidikan yang inklusi berbasis Vokasi.

b. Perubahan Nama dan Fungsi Unit
   Selanjutnya terdapat reformasi nomenklatur terhadap unit tertentu untuk mencerminkan peran yang lebih strategis seperti pada unit Edukasi Keagamaan dan Dakwah Digital.

c. Penguatan Unit Eksisting
   Optimalisasi fungsi unit yang sudah ada turut diperhatikan pula melalui peningkatan kapasitas SDM dan integrasi teknologi seperti unit bagian Strategi dan Komunikasi Kelembagaan.

Untuk itu, di bawah ini ditampilkan usulan kelembagaan alternatif untuk Rencana Kelembagaan Strategis Kementerian Agama 2025-2029:

**Tabel 3. 4 Rencana Kerangka Kelembagaan Strategis Kementerian Agama 2025-2029**

| No. | Unit | Deskripsi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pusat Layanan keagamaan | Menyediakan layanan keagamaan yang terpadu dan mudah diakses dengan mengintegrasikan berbagai layanan seperti haji, umrah, pernikahan, zakat, wakaf, sertifikasi halal, pendidikan keagamaan, dan lainnya dalam satu pusat layanan (*one stop service*) | 2025 s/d 2026 |
| 2 | Bidang Fasilitasi Sertifikasi Halal | Memberikan fasilitasi dalam proses sertifikasi halal untuk pelaku usaha. | 2025 s/d 2027 |
| 3 | Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Inklusi | Meningkatkan akses pendidikan vokasi berbasis inklusi untuk kelompok rentan. | 2025 s/d 2027 |
| 4 | Subdirektorat Fasilitasi Profesi Guru | Mengelola pengembangan dan fasilitasi profesi guru melalui pelatihan dan sertifikasi. | 2025 s/d 2027 |
| 5 | Bagian Pengadaan dan Mutasi ASN | Mengelola proses pengadaan, penempatan, dan mutasi Aparatur Sipil Negara. | 2025 s/d 2027 |
| 6 | Bagian Pemetaan dan Pengelolaan Kompetensi ASN | Melakukan analisis kebutuhan kompetensi ASN serta penyusunan program pengembangan. | 2025 s/d 2027 |
| 7 | Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Mutu Layanan Haji | Melakukan evaluasi dan pengendalian mutu layanan untuk meningkatkan pengalaman jemaah haji. | 2025 s/d 2027 |

| No. | Unit | Deskripsi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 8 | Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf | Meningkatkan koordinasi kelembagaan zakat dan wakaf serta menjalin kerja sama strategis. | 2025 s/d 2027 |
| 9 | Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf | Melakukan edukasi publik tentang zakat dan wakaf serta inovasi pengelolaannya. | 2025 s/d 2027 |
| 10 | Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat | Melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas lembaga pengelola zakat. | 2025 s/d 2027 |
| 11 | Subdirektorat Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf | Mengawasi pengelolaan dan menjaga keutuhan aset wakaf. | 2025 s/d 2027 |
| 12 | Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan | Meningkatkan strategi komunikasi publik dan membangun hubungan kelembagaan dengan pemangku kepentingan. | 2025 s/d 2027 |
| 13 | Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam | Mengembangkan seni, budaya, dan penyiaran berbasis nilai-nilai Islam untuk masyarakat. | 2025 s/d 2027 |
| 14 | Subdirektorat Pendidikan *Salafiyah* dan Kajian Kitab Kuning | Mendukung pengembangan pendidikan tradisional Islam berbasis kajian kitab klasik. | 2025 s/d 2027 |
| 15 | Direktorat Jenderal Pesantren | Memastikan kualitas pendidikan pesantren, santri, serta para tenaga pendidik pesantren yang lebih fokus pada penataan pesantren yang maslahat. | 2025 s/d 2027 |
| | | Transformasi kelembagaan Kementerian Agama dan instansi vertikal menjadi organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran pada masa transisi yang didukung sumberdaya manusia yang unggul ditargetkan tahun 2025. | |
| | | Transformasi sumber daya manusia melalui sistem merit dan manajemen talenta secara transparan dan akuntabel mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa ditargetkan tahun 2026. | |
| | | Transformasi digital Kementerian Agama dalam mewujudkan peningkatan pelayanan prima ditargetkan tahun 2027 | |
| | | Penguatan transformasi kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM berbasis analisis/evaluasi jabatan, beban kerja, dan peta jabatan yang terstandar ditargetkan tahun 2028 | |

| No. | Unit | Deskripsi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| | | Transformasi kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan unit pelaksana teknis lainnya harus dilaksanakan secara | |
| | | selektif, akuntabel, dan berkontribusi pada penaikan indeks reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan ditargetkan tahun 2029 | |
| | | Penguatan transformasi jabatan, khususnya jabatan fungsional bidang agama menjadi kekuatan Kementerian Agama dalam mengemban amanah umat ditargetkan tahun 2029. | |
| 16 | Pengembangan Struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha | Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan dua fungsi layanan yaitu layanan agama dan layanan pendidikan perlu melakukan pengembangan struktur organisasi khususnya pada Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha sehingga layanan pendidikan dan layanan agama berjalan optimal, yaitu dengan mengembangkan Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha menjadi 2 Direktorat yaitu:<br>a. Direktorat Urusan Agama Buddha<br>b. Direktorat Pendidikan Buddha | 2026 |
| 17 | Perubahan bentuk Perguruan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten menjadi Institut | Perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Buddha negeri dari Sekolah Tinggi menjadi Institut Agama Buddha Negeri didasarkan pada kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan | 2026 |
| | | Teknologi dan/atau seni, kebutuhan pembangunan nasional dan pertumbuhan potensi mahasiswa serta untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Buddha dan | |
| 18 | Perubahan bentuk Perguruan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah menjadi Institut | Perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Buddha negeri dari Sekolah Tinggi menjadi Institut Agama Buddha Negeri didasarkan padakebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan Teknologi dan/atau seni, kebutuhan pembangunan nasional dan pertumbuhan potensi mahasiswa serta untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Buddha | 2026 |

| No. | Unit | Deskripsi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 19 | Perubahan PMA Nomor 15 Tahun 2022 tentang pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan swasta | Urgensi dari perubahan PMA ini:<br>1. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi Keagamaan<br>Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pendirian, perubahan, serta pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan swasta.<br>2. Penyesuaian dengan Perkembangan Hukum dan Kebijakan<br>Peraturan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebijakan terbaru, sehingga diperlukan penyesuaian untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan regulasi dalam konteks pendidikan tinggi keagamaan.<br>3. Perlindungan terhadap Masyarakat<br>Pencabutan izin terhadap perguruan tinggi keagamaan swasta yang tidak memenuhi ketentuan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat layanan pendidikan yang tidak sesuai standar.<br>4. Peningkatan Kualitas Pendidikan<br>Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia | 2026 |
| 20 | Pengusulan STP Santo Petrus Kefamenanu dan STP Santo Bonaventura Medan sebagai LPTK dan Penyelenggaran PPG | Perubahan pada isi Lampiran: Saat ini baru ada 2 LPTK Penyelenggaran PPG yaitu STPKat Santo Fransiskus Asisi Semarang dan STK Santo Yakobus Memenuhi syarat untuk jadi LPTK dan untuk melayani akses guru-guru wilayah Timur | 2026 |
| 21 | Rancangan Revisi PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Kegamaan | Dalam PP 55 Tahun 2007 pada Ditjen Bimas Katolik belum mengakomodir satuan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Dasar (TK,SD, dan SMP) | 2026 |
| 22 | Pengusulan RPMA Penegerian SMAK Solor dan SMAK Tambolaka | Meningkatkan askes masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan dan 2 SMAK ini memenuhi syarat untuk perubahan bentuk dari swasta ke negeri | 2026 |

| No. | Unit | Deskripsi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 23 | Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik tentang Penetapan Sekolah Unggul Keagamaan Katolik | Tindak lanjut apa yg menjadi program prioritas ASTA CITA Presiden dan salah satu Lembaga Pendidikan keagamaan Katolik tingkat Menengah adalah yang menjadi pilot project menjadi sekolah unggul adalah SMAK Negeri Ende | 2026 |
| 24 | Usulan RPMA tentang Ortaker SMAK Negeri | Peraturan sebagai dasar hukum yang ada di dalam PMA Nomor 8 Tahun 2019 yang lama perlu penyesuaian karena tidak berlaku lagi | 2026 |
| 25 | Perubahan Nomenklatur pada Direktorat GTK | Penyelarasan beberapa nomenklatur yang di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen Pendis sesuai dengan Tugas dan Fungsi | 2026 |
| 26 | STAKPN Sentani | Peningkatan status STAKPN Sentani menjadi Institut untuk memperluas program studi, meningkatkan kapasitas akademik, dan memperkuat daya saing di tingkat nasional. | 2025 - 2026 |
| 27 | STAK Teruna Bhakti Yogyakarta | Alih status STAK Teruna Bhakti menjadi Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri (STKN) guna memperkuat legitimasi, kualitas akademik, serta memperluas kesempatan pendidikan keagamaan Kristen di Yogyakarta. | 2025 - 2027 |
| 28 | Institut Agama Kristen Ambon, Tarutung, Manado Menjadi Universitas | Transformasi tiga Institut Agama Kristen menjadi Universitas untuk memperluas fakultas, meningkatkan kapasitas riset, dan menjawab kebutuhan SDM Kristen di berbagai bidang ilmu. | 2025 - 2027 |
| 29 | Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, Toraja dan Kupang untuk menambahkan Program Studi dan Fakultas | Penambahan program studi dan fakultas baru untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas akademik, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. | 2025 - 2029 |
| 30 | 1. Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke Prov. Papua Selatan<br>2. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena Prov. Papua Pegunungan<br>3. Sekolah Tinggi Agama Kristen Waropen Papua Utara<br>4. STAK Nabire Papua Tengah STT IKAT Sambab Manokwari Provinsi Papua Barat | Penegerian PTKKS diharapkan menjadi langkah tepat untuk memperluas akses pendidikandan meningkatkan kapasitas akademik, diwilayah Papua | 2025 - 2029 |

| No. | Unit | Deskripsi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 31 | Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK)<br>1. Provinsi Maluku<br>a. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kritsen (SMPTK) Patti Maluku Barat Daya;<br>b. SMPTK Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH) Eppata Duono Maluku Utara<br>c. Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) Rambatu Provinsi Maluku<br>2. Provinsi Papua<br>a. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kadesi Arso VI Keerom, Papua;<br>b. SMTK YPK Ebenhaezer Senggi, Kabupaten Keerom Provinsi Papua;<br>c. SMAK Sion Meukisi, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.<br>d. SMTK Petrus Kafiar Kabupaten Biak<br>3. Nusa Tentanggara Timur<br>a. SMTK Benfomeni Kab. Timor Tengah Selatan;<br>b. SMTK Waikabubak Kab. Sumba Barat.<br>c. SMAK Sabu Timur, Kab Sabu Raijua<br>d. SMAK Arastamar Mantap Alor Kab Alor<br>e. SMTK Oelbubuk Kab Timor Tengah Selatan | Mengusulkan Transformasi kelembagaan SPKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>Penataan dan penguatan SPKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kurikulum, akreditasi, dan tata kelola. | 2026 - 2029 |

| No. | Unit | Deskripsi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| | 4. Sulawesi Utara<br>a. SMTK Wisong kalamatta Sereh Kab. Kep. Talaud Sulawesi Utara<br>5. Sulawesi Tengah<br>a. SMPTK Swastiastu Tolai Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah<br>6. Kalimantan Barat<br>a. SMTK Kalimantan Barat<br>7. Sumatera Barat<br>a. Sekolah Dasar, Lentera Kasih, Siberut Selatan kab Kep Mentawai;<br>b. Sekolah Menengah Pertama, Lentera Kasih, Siberut Selatan kab Kep Mentawai;<br>c. Sekolah Menengah Atas, Lentera Kasih, Siberut Selatan kab Kep Mentawai | | |
| 32 | Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2027 Tentang Pendidikan Keagamaan | Penyusunan revisi regulasi agar lebih relevan dengan dinamika pendidikan keagamaan Kristen, reformasi birokrasi, dan kebutuhan layanan publik modern. | 2025 - 2027 |
| 34 | Transformasi digital untuk mendukung pelayanan prima kepada umat. | Digitalisasi sistem layanan, pengelolaan data, dan informasi Ditjen Bimas Kristen guna mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. | 2026-2029 |

| No. | Unit | Deskripsi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 35 | Pengembangan Struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan penambahan unit eselon II:<br>1. Direktorat Pendidikan Tinggi Kristen<br>2. Direktorat Penerangan Agama Kristen | Pengembangan struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks di bidang pendidikan dan urusan Agama Kristen sebagai berikut:<br><br>Semula Direktorat Pendidikan dibagi menjadi dua unit kerja, yaitu:<br>1. Direktorat Pendidikan Tinggi dan<br>2. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kristen.<br><br>Sementara itu, Direktorat Urusan Agama diubah menjadi:<br>1. Direktorat Urusan Agama Kristen dan<br>2. Direktorat Penerangan Agama Kristen.<br><br>Perubahan struktur ini dimaksudkan untuk memperjelas fungsi, tugas, serta kewenangan masing-masing Direktorat agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat Kristen lebih efektif dan terarah. | 2026-2029 |
| 36 | Pengembangan Struktur Kasie/ penyelenggara | Pengembangan struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks | 2026 - 2029 |
| 37 | Pengembangan Struktur, Perubahan Pembimbing Masyarakat Kristen (Pembimas) menjadi Kepala Bidang (kabid) | Pengembangan struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks | 2026 - 2029 |
| 38 | Ditjen Bimas Kristen | Penguatan tata kelola dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis analisis jabatan, evaluasi jabatan, beban kerja, dan peta jabatan | |
| 39 | Seluruh Unit Ditjen Bimas Kristen | Penguatan sistem merit dan manajemen talenta untuk ASN serta peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. | 2025–2029 |

| No. | Unit | Deskripsi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 40 | Perubahan bentuk IAHN Tampung Penyang Palangkaraya, IAHN Gde Pudja Mataram, dan IAHN Mpu Kuturan menjadi Universitas | Perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Hindu negeri dari Institut menjadi Universitas didasarkan pada kebutuhan masyarakat :<br>1. Pengembangan ilmu pengetahuan Teknologi dan/ atau seni<br>2. Kebutuhan pembangunan nasional<br>3. Pertumbuhan potensi mahasiswa<br><br>Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Hindu | 2026 - 2029 |
| 41 | Penegerian Widyalaya | Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Hindu. Satuan Pendidikan Widyalaya yang akan di Negerikan:<br>1. Adi Widyalaya Sutasoma Nabire<br>2. Adi Widyalaya Gunadarma Luwuk Banggai<br>3. Adi Widyalaya Dwitawana Saraswati Kolaka Timur<br>4. Adi Widyalaya Gurukula Bangli<br>5. Madyama Widyalaya Rsi Markandeya Taro<br>6. Madyama Widyalaya Gurukula Bangli<br>7. Madyama Widyalaya Jnana Dharma Sastra Singaraja<br>8. Utama Widyalaya Ganesha Parwati Banyuwangi | 2026 -2029 |
| 42 | Pendirian Widyalaya Negeri oleh Pemerintah | Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Hindu. Pendirian Widyalaya Negeri akan dilaksanakan di wilayah Bali. | 2026 -2029 |
| 43 | Penambahan Fakultas dan Program Studi pada PTKHN | Memperluas akses, meningkatkan kualitas akademik, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.<br>1. Penambahan Fakultas Saintek pada Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Denpasar.<br>2. Penambahan program studi baru pada IAHN Gde Pudja Mataram | 2026 - 2027 |
| 44 | Transformasi digital tata kelola dan layanan Ditjen Bimas Hindu | Digitalisasi sistem layanan, pengelolaan data, dan informasi Ditjen Bimas Hindu guna mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, mudah dan bermutu (PANCADATU) | 2026 - 2029 |
| 45 | Penyempurnaan Struktur Penyelenggara Hindu menjadi Seksi Bimas Hindu | Penyempurnaan struktur Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk kesetaraan, keadilan dan proposional layanan keagamaan Hindu. | 2026 - 2029 |

| No. | Unit | Deskripsi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 46 | Penyempurnaan Struktur Pembimbing Masyarakat Hindu (Pembimas) menjadi Bidang Bimas Hindu | Penyempurnaan struktur Pembimas Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk kesetaraan, keadilan dan proporsional layanan keagamaan Hindu. | 2026 - 2029 |
| 47 | Penyempurnaan / Pembentukan struktur Bidang Bimas Hindu. | Penyempurnaan struktur Bidang Bimas Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan Kalimantan Utara. Hal tersebut dimaksudkan untuk kesetaraan, keadilan dan proporsional layanan keagamaan Hindu. | 2026 - 2029 |
| 48 | Penyempurnaan / Pembentukan struktur Seksi Bimas Hindu. | Penyempurnaan struktur Seksi Bimas Hindu pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Bekasi, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Jepara, Gunung Kidul, Kediri, Lumajang, Mesuji, Pringsewu, Kota Manado, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwuk, Pasangkayu. Hal tersebut dimaksudkan untuk kesetaraan, keadilan dan proporsional layanan keagamaan Hindu. | 2026 - 2029 |
| 49 | Pembentukan struktur Bidang Bimas Hindu pada Provinsi baru. | Pembentukan struktur Bidang Bimas Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang akan dibentuk di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan. Hal tersebut dimaksudkan untuk kesetaraan, keadilan dan proporsional layanan keagamaan Hindu. | 2026 - 2029 |
| 50 | Pembentukan Struktur Subdirektorat Seni dan Budaya Keagamaan Hindu Pada Direktorat Urusan Agama Hindu | Mengembangkan seni dan budaya berbasis nilai-nilai Hindu untuk masyarakat. | 2026 - 2029 |
| 51 | Subdirektorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Direktorat Pendidikan Hindu | Meningkatkan kualitas layanan pada Guru dan Tenaga Kependidikan. | 2026 - 2029 |

Usulan kelembagaan alternatif ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan kapabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Implementasi usulan ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

# 04


A. TARGET KINERJA 140

1. Program Dukungan Manajemen 140
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 140
3. Program Wajib Belajar 13 Tahun 144
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 144
5. Program Pendidikan Tinggi 148

B. KERANGKA PENDANAAN 150






# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## A. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemenag menetapkan 5 tujuan yang dilengkapi dengan 7 sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang hendak dicapai oleh Kemenag dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti tertera pada BAB II. Adapun tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis diukur menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, maka ditetapkan berb agai Sasaran Program untuk 5 Program di Kemenag, sebagai berikut:

### 1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program *(Outcome)*:

a. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif, dengan indikator kinerja program Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
b. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
    1. Indeks Kapabiliitas APIP (IACM)
    2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

### 2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

Sasaran Program *(Outcome)*:

a. Meningkatnya pemahaman dan praktek keagaman maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun, dengan indikator kinerja program:
    1. Persentase rekomendasi *Early Warning System* yang ditindaklanjuti
    2. Indeks kesalehan Umat Beragama
    3. Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan

Sasaran Kegiatan (SK):

1. Terlaksananya KUA sebagai pusat cegah konflik Agama, dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS.
2. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama, dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
    a. Persentase peningkatan dialog kerukunan agama difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

b. Persentase peningkatan audiens MTQ / Pesparawi/ Pesparani/ Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha
c. Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama
d. Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar keagamaan yang diselenggarakan Negara
e. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

3. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Islam dan Kualitas Pengawasan dalam Pemanfaatan Produk Halal, dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
   a. Persentase rekomendasi hasil konsultasi halal yang diterbitkan
   b. Nilai literasi halal
   c. Tingkat kepatuhan lembaga/ masyarakat/Pelaku Usaha Islam terhadap pelaksanaan peraturan

b. Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif, dengan indikator program:
   1. Nilai Layanan penyuluhan Agama
   2. Persentase Calon Pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan
   3. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga
   4. Indeks Kepuasan Layanan KUA
   5. Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan yang memenuhi standar
   6. Indeks Literasi kitab suci agama
   7. Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan
   8. Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional
   9. Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan al-Qur'an dan Edukasi al-Qur'an
   10. Indeks Kepuasan Jamaah Haji Dalam Negeri dan Luar Negeri

Sasaran Kegiatan (SK):

1. Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
   a. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
   b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
   c. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan yang tersertifikasi
   d. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
   e. Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan

f. Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan
g. Persentase peningkatan naskah & buku keagamaan Khonghucu yang layak edar/ sesuai kaidah.
h. Persentase jumlah calon penerima dana kebajikan terintegrasi basis data terpadu nasional
i. Persentase Lembaga dana kebajikan yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan
j. Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam
k. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah
l. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah
m. Persentase KUA Berdaya (Excellent)
n. Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
o. Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
p. Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
q. Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam
r. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
s. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam
t. Persentase sarana prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar
u. Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan
v. Persentase peningkatan naskah & buku keagamaan Islam yang layak edar/ sesuai kaidah
w. Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai standar
x. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
y. Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat
z. Persentase jumlah mustahik Zakat/ calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
aa. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
ab. Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif
ac. Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti

ad. Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional
ae. Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional
af. Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf
ag. Persentase Akta Ikrar Wakaf Yang Diterbitkan

2. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi al Qur'an, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
   a. Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an
   b. Persentase peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al Qur'an
   c. Persentase peningkatan masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital
   d. Nilai kualitas pengembangan dan pengkajian al- Qur'an
   e. Nilai layanan Museum Bayt Al Qur'an
   f. Persentase peningkatan pengunjung Bayt Al- Qur'an dan Museum Istiqlal
3. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
   a. Tingkat Kepuasan layanan Asrama Haji
   b. Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
   c. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
   d. Persentase jumlah daging /Dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
   a. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
   b. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
   a. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
   b. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
6. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah, dengan Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);
   a. Lembaga penyelenggara haji khusus;
   b. Lembaga penyelenggara umrah
7. Meningkatnya pemanfaatan dana operasional haji yang efektif, dengan Indikator Sasaran Kegiatan Opini laporan pengelolaan dana operasional teraudit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu, dengan Indikator Sasaran Kegiatan Tingkat Kepuasan pengakses layanan *website* haji.

### 3. Program Wajib Belajar 13 Tahun

Sasaran Program *(Outcome)*:

a. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, dengan indikator kinerja program:
   1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif

Sasaran Kegiatan (SK):

1. Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan Keagamaan yang berkualitas, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
   a. Persentase madrasah dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras
   b. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
   c. Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan
   d. Persentase peningkatan jumlah siswa
   e. Persentase madrasah pada satuan pendidikan daerah 3 T
   f. Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)
   g. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
   h. Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu

### 4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Sasaran Program *(Outcome)*:

a. Meningkatnya kualitas pengajaran dan Pembelajaran, dengan indikator kinerja program:
   1. Nilai Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan
   2. Persentase peserta didik madrasah satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:
      a. Literasi membaca
      b. Numerasi
   3. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik literasi membaca
   4. Persentase satuan pendidikan Islam yang memiliki indeks karakter pada kategori baik
   5. Persentase satuan pendidikan Islam yang memiliki: a. Iklim keamanan sekolah; b. Iklim inklusivitas; c. Iklim Kebhinekaan pada kategori baik
   6. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak

7. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial
8. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran
9. Persentase madrasah, satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, dan satuan Pendidikan keagamaan Islam yang diakreditasi sesuai SNP
10. Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi.

Sasaran Kegiatan (SK):

1. Meningkatnya kualitas Layanan Perbukuan Pendidikan Agama dan Keagamaan, dengan Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Peningkatan Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan yang mendapat tanda layak terbit
2. Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan madrasah, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
   a. Rata-rata asesmen tingkat nasional untuk:
      - literasi membaca
      - numerasi
   b. Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan
   c. Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa
   d. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
   e. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
   f. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
   g. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3. Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
   a. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanuasiaan dan pelestarian lingkungan
   b. Persentase materi ajar digital (modul, video, *e-book*) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
   c. Persentase peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan

d. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
e. Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan

4. Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
   a. Persentase PAUD/RA/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
   b. Persentase Satuan Pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal *jayyid*.
   c. Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal
   d. Persentase MI/SD/Adhi Widyalaya/ Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
   e. Persentase MTs/SMP/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
   f. Persentase MA/SMA/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
   g. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
   h. Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual
   i. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi Nasional maupun Internasional
   j. Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
   k. Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri
   l. Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang
   m. Persentase lulusan MA Kejuruan/ MA Program Keterampilan yang mendapatkan pekerjaan /bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun
5. Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan, dengan Indikator Sasaran Kegiatan Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum atau lembaga profesi

b. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata, dengan Indikator Kinerja Program:
   1. Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru pendidikan keagamaan dengan kategori baik
   2. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
   3. Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan

   Sasaran Kegiatan (SK):
   1. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
      a. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
      b. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
      c. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
      d. Persentase Kepala Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
      e. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
      f. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
      g. Persentase guru yang meningkat jenjang karir
      h. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
      i. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama
      j. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan.

## 5. Program Pendidikan Tinggi

Sasaran Program *(Outcome)*:

a. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly, dengan indikator kinerja program:
   1. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK

   Sasaran Kegiatan (SK):
   1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana PTK, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
      a. Persentase PTK yang Memenuhi Standar Sarana Prasarana
      b. Persentase Prodi yang Memenuhi Sarana Prasarananya

2. Meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan yang terjangkau, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
   a. Persentase mahasiswa penerima beasiswa
   b. Proporsi mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas

b. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu, dengan indikator kinerja program:
   1. Persentase PTK/Mahad Aly' yang terakreditasi;

   Sasaran Kegiatan (SK):
   1. Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
      a. Persentase perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya
      b. Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi unggul
      c. Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi
      d. Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) yang terakreditasi unggul
      e. Persentase PTK yang mendapatkan pembinaan standar mutu

c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas, dengan indikator kinerja progam:
   1. Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTKI/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi.

   Sasaran Kegiatan (SK):
   1. Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
      a. Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 (a) total (b) STEM (c) non STEM
      b. Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus
      c. Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar
      d. Persentase dosen yang mengikuti program peningkatan kompetensi
      e. Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional
      f. Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri
      g. Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
      h. Persentase tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi

d. Meningkatnya daya saing lulusan PTKI/Ma'had Aly, dengan indikator kinerja program:
   1. Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan

   Sasaran Kegiatan (SK):
   1. Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
      a. Persentase lulusan perguruan tinggi berkualifikasi S1 dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus
      b. Persentase PTK yang memiliki Pusat Pengembangan Karir
      c. Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan : a. Karyawan b. Wirausaha
      d. Persentase tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi keagamaan bidang STEM
      e. Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi
      f. Persentase prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi
      g. Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi
      h. Rasio Outbound per Inbound mahasiswa
      i. Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi

e. Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis, dengan indikator kinerja program:
   1. Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK
   2. Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan Kristen untuk mendapatkan pekerjaan
      Sasaran Kegiatan (SK) : Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerja sama,

f. Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan, dengan indikator kinerja program:
   1. Persentase PTK/Ma'had Aly yang mengembangkan literasi keagamaan
   2. Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan Kristen untuk mendapatkan pekerjaan

   Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya budaya akademik yang *religious* dan toleran, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
   a. Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional
   b. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran
   c. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi

d. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat
g. Meningkatnya produktivitas dan daya saing pendidikan tinggi, dengan Indikator Sasaran Program Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs.

Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:

a. Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional
b. Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi
c. Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi
d. Rasio produktivitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen
e. Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan
f. Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat
g. Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya

## B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama serta sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai sumber daya, khususnya pendanaan yang memadai. Pendanaan ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari masyarakat. Saat ini, sumber pendanaan yang digunakan mencakup Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, Pinjaman Hibah Luar Negeri dan sumber pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerangka pendanaan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Agama 2025-2029 menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan Kementerian Agama, dengan mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama sampai dengan tahun 2029 tercantum dalam tabel berikut.

## Tabel 4. 1 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program Kementerian Agama 2025-2029

| PROGRAM | IndikasiKebutuhanPendanaanBerdasarkan5Program(Rp.000) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL |
| Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama | 3.582.174.151 | 4.927.673.711 | 5.174.057.397 | 5.432.760.266 | 5.704.398.280 | 24.821.063.805 |
| Wajib Belajar 13 Tahun | 15.885.528.176 | 23.541.498.896 | 24.718.573.841 | 25.954.502.533 | 27.252.227.659 | 117.352.331.105 |
| Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran | 8.399.623.656 | 15.710.927.950 | 16.496.474.348 | 17.321.298.065 | 18.187.362.968 | 76.115.686.986 |
| Pendidikan Tinggi | 9.116.850.790 | 10.409.415.719 | 10.929.886.505 | 11.476.380.830 | 12.050.199.872 | 53.982.733.716 |
| Dukungan Manajemen | 42.291.737.898 | 56.945.257.051 | 59.792.519.904 | 62.782.145.899 | 65.921.253.194 | 287.732.913.945 |
| **Total** | **79.275.914.671** | **111.534.773.327** | **117.111.511.993** | **122.967.087.593** | **129.115.441.973** | **560.004.729.557** |

| UNIT ESELON I | Indikasi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Unit Eelon I (Rp.000) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekretaris Jenderal | 35.358.862.423 | 49.448.746.262 | 51.921.183.575 | 54.517.242.754 | 57.243.104.892 | 248.489.139.906 |
| Inspektorat Jenderal | 173.614.005 | 198.303.196 | 208.218.356 | 218.629.274 | 229.560.737 | 1.028.325.568 |
| Ditjen Bimas Islam | 2.352.743.475 | 3.762.560.456 | 3.950.688.479 | 4.148.222.903 | 4.355.634.048 | 18.569.849.360 |

| UNIT ESELON I | Indikasi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Unit Eelon I (Rp.000) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditjen Penidikan Islam | 36.888.521.022 | 51.221.485.394 | 53.782.559.664 | 56.471.687.647 | 59.295.272.029 | 257.659.525.756 |
| Ditjen Bimas Kristen | 1.013.161.081 | 1.729.641.423 | 1.816.123.494 | 1.906.929.669 | 2.002.276.152 | 8.468.131.819 |
| Ditjen Bimas Katolik | 468.753.002 | 1.457.411.051 | 1.530.281.604 | 1.606.795.684 | 1.687.135.468 | 6.750.376.808 |
| Ditjen Bimas Hindu | 617.355.847 | 716.078.754 | 751.882.692 | 789.476.826 | 828.950.668 | 3.703.744.787 |
| Ditjen Bimas Buddha | 326.093.495 | 438.817.076 | 460.757.930 | 483.795.826 | 507.985.618 | 2.217.449.945 |
| Ditjen PHU | 1.435.762.893 | 1.558.633.578 | 1.636.565.257 | 1.718.393.520 | 1.804.313.196 | 8.153.668.443 |
| BMBPSDM | 641.047.428 | 1.003.096.137 | 1.053.250.944 | 1.105.913.491 | 1.161.209.166 | 4.964.517.165 |
| **Total** | **79.275.914.671** | **111.534.773.327** | **117.111.511.993** | **122.967.087.593** | **129.115.441.973** | **560.004.729.557** |

# 05





# PENUTUP

# PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia 2025-2029 dirancang sebagai arah implementatif yang komprehensif dalam mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Kementerian Agama. Muatan yang tercantum dalam dokumen tersebut merujuk pada arah kebijakan Prioritas Nasional (Asta Cita) dan kebijakan internal Kementerian Agama (Asta Protas Menteri Agama).

Sistematika penulisan Rencana Strategis disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Adapun substansi pembahasan dokumen Rencana Strategis meliputi: Kondisi Umum (Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Periode sebelumnya), Potensi dan permasalahan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Pendanaan, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Matrik Kinerja.

Muatan Renstra telah mengakomodasi kebijakan bidang agama dan bidang pendidikan yaitu pemahaman dan kerukunan kehidupan umat beragama, layanan agama yang transformatif, akses pendidikan yang berkualitas, mutu pendidikan, tata kelola, guru dan tenaga kependidikan, layanan pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren, serta relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi/Ma'had Aly.

Renstra diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan anggaran, sasaran kinerja pegawai, proses bisnis layanan Kementerian Agama, peraturan yang akan diterbitkan dan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, dokumen ini sebagai *evidence* bahwa Kementerian Agama ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berkontribusi dalam peningkatan capaian Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Agama merancang sejumlah langkah strategis sebagai penguatan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Implementasi dari setiap program dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini tidak hanya menjadi sebuah perencanaan, melainkan sebuah wujud nyata dari upaya bersama dalam mencapai masa depan bangsa yang lebih harmonis, maju, dan berkeadilan.

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**NASARUDDIN UMAR**

# 06


| | |
|---|---|
| LAMPIRAN I | 158 |
| LAMPIRAN II | 592 |
| LAMPIRAN III | 604 |
| LAMPIRAN IV | 614 |







# LAMPIRAN

# LAMPIRAN I

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**NOMOR 17 TAHUN 2025**
**TENTANG**
**RENCANA STRATEGIS**

**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN**
**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029**

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **KEMENTERIAN AGAMA** | | | | | | |
| **SS.1** | **Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang danpraktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial** | | | | | |
| IKSS.1.1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Nilai | 76,47 | 76,77 | 77,14 | 77,51 |
| IKSS.1.2 | Indeks Kesalehan Umat Beragama | Nilai | 83,83 | 84,20 | 84,50 | 84,80 |
| **SS.2** | **Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif** | | | | | |
| IKSS.2.1 | Indeks Layanan Keagamaan | Nilai | 86,51 | 87,11 | 87,51 | 87,89 |
| **SS.3** | **Meningkatnya pemerataan akses pendidikan** | | | | | |
| IKSS.3.1 | Tingkat Penyelesaian PendidikanMA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha | Nilai | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 |
| IKSS.3.2 | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan | Nilai | 4,36 | 4,76 | 5,00 | 5,24 |
| **SS.4** | **Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah** | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **49.129.022** | **68.116.490** | **74.970.036** | **76.556.593** | **82.940.573** | |
| | | | | | | | |
| 77,88 | 78,25 | | | | | | |
| 85,10 | 85,40 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 88,26 | 88,62 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 94,00 | 95,00 | | | | | | |
| 5,38 | 5,60 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSS.4.1 | Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional | | | | | |
| | a. Literasi membaca | Persen | 58,07 | 59,30 | 59,71 | 60,04 |
| | b. Numerasi | Persen | 50,91 | 52,55 | 52,97 | 53,80 |
| **SS.5** | **Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas** | | | | | |
| IKSS.5.1 | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasanagama, dan satuan pendidikan keagamaan | Persen | 61,00 | 51,17 | 60,43 | 75,69 |
| **SS.6** | **Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas** | | | | | |
| IKSS.6.1 | Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun | Persen | 5,16 | 5,36 | 5, 47 | 5,86 |
| **SS.7** | **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel** | | | | | |
| IKSS.7.1 | Nilai reformasi birokrasi | Nilai | 79,16 | 80,93 | 82,70 | 84,47 |
| 025.DC - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama | | | | | | |
| **SP.1** | **Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun** | | | | | |
| IKSP.1.1 | Persentase rekomendasi *Early Warning System* (keagamaan) yang ditindaklanjuti | Persen | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 55,00 |
| IKSP.1.2 | Persentase rekomendasi *Early Warning System* Agama Islam yang ditindaklanjuti | Persen | 76,92 | 79,49 | 82,05 | 84,62 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 60,10 | 60,15 | | | | | | |
| 53,80 | 54,21 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 87,95 | 98,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6,00 | 6,12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 86,24 | 88,01 | | | | | | |
| | | 3.308.610 | 3.936.523 | 4.200.817 | 4.468.209 | 3.758.120 | SETJEN, DITJEN PHU, DITJEN BIMAS ISLAM, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU, DITJEN BIMAS BUDDHA, BPJPH |
| | | | | | | | |
| 70,00 | 85,00 | | | | | | |
| 87,18 | 89,74 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.1.3 | Persentase rekomendasi *Early Warning System* Agama Kristenyang ditindaklanjuti | Persen | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| IKSP.1.4 | Persentase rekomendasi *Early Warning System* Agama Katolikyang ditindaklanjuti | Persen | 74,51 | 20,00 | 40,00 | 60,00 |
| IKSP.1.5 | Persentase rekomendasi *Early Warning System* Agama Hinduyang ditindaklanjuti | Persen | 100,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 |
| IKSP.1.6 | Persentase rekomendasi *Early Warning System* Agama Buddhayang ditindaklanjuti | Persen | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| IKSP.1.7 | Persentase rekomendasi *Early Warning System* AgamaKhonghucu yang ditindaklanjuti | Persen | N/A | 99,10 | 99,20 | 99,30 |
| IKSP.1.8 | Indeks kesalehan Umat Beragama Islam | Nilai | 82,44 | 82,60 | 82,70 | 82,80 |
| IKSP.1.9 | Indeks kesalehan Umat Beragama Kristen | Nilai | 87.48 | 88.60 | 89.70 | 90.80 |
| IKSP.1.10 | Indeks kesalehan Umat Beragama Katolik | Nilai | N/A | 79,50 | 80,90 | 82,30 |
| IKSP.1.11 | Indeks kesalehan Umat Beragama Hindu | Nilai | 83,83 | 83,80 | 83,80 | 83,80 |
| IKSP.1.12 | Indeks kesalehan Umat Beragama Buddha | Nilai | 82,95 | 82,98 | 83,02 | 83,05 |
| IKSP.1.13 | Indeks kesalehan Umat Beragama Khonghucu | Nilai | 83,16 | 83,42 | 83,70 | 83,97 |
| IKSP.1.14 | Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaanyang memenuhi standar pengelolaan | Persen | 14,84 | 15,08 | 19,84 | 24,60 |
| IKSP.1.15 | Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosialkeagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan | Persen | 0,40 | 45,00 | 50,00 | 55,00 |
| IKSP.1.16 | Persentase lembaga agama Katolik dan lembaga sosialkeagamaan Katolik yang memenuhi standar pengelolaan | Persen | N/A | 52,69 | 52,92 | 53,15 |
| IKSP.1.17 | Persentase lembaga agama Hindu dan lembaga sosialkeagamaan Hindu yang memenuhi standar pengelolaan | Persen | N/A | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| IKSP.1.18 | Persentase lembaga agama Buddha dan lembaga sosialkeagamaan Buddha yang memenuhi standar pengelolaan | Persen | 78.57 | 70.00 | 72.71 | 76.01 |
| IKSP.1.19 | Persentase lembaga agama Khonghucu dan Lembaga sosial Keagamaan Khonghucu yang memenuhi standar pengelolaan | Persen | 14,84 | 15.08 | 19.84 | 24.60 |
| IKSP.1.20 | Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agamayang dimanfaatkan | Persen | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 65,00 | 70,00 | | | | | | |
| 80,00 | 96,00 | | | | | | |
| 98,00 | 99,00 | | | | | | |
| 95,00 | 95,00 | | | | | | |
| 99,40 | 99,50 | | | | | | |
| 82,90 | 83,00 | | | | | | |
| 91.90 | 93.00 | | | | | | |
| 83,70 | 85,10 | | | | | | |
| 83,80 | 83,80 | | | | | | |
| 83,08 | 83,11 | | | | | | |
| 84,14 | 84,23 | | | | | | |
| 29,76 | 34,92 | | | | | | |
| 60,00 | 65,00 | | | | | | |
| 53,38 | 53,61 | | | | | | |
| 4,00 | 5,00 | | | | | | |
| 79.01 | 81.92 | | | | | | |
| 29.76 | 34.92 | | | | | | |
| 94,00 | 95,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.1.21 | Indeks Moderasi Beragama | Nilai | 75,24 | 76,00 | 76,50 | 77,00 |
| IKSP.1.22 | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Agama danKeagamaan. | Persen | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 |
| **SP.2** | **Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yangberkualitas, merata, dan inklusif** | | | | | |
| IKSP.2.1 | Nilai Layanan Penyuluhan Agama | Nilai | 84,52 | 84,63 | 84,74 | 84,85 |
| IKSP.2.2 | Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen | Nilai | 85,73 | 86,18 | 86,63 | 87,08 |
| IKSP.2.3 | Nilai Layanan Penyuluhan Agama Katolik | Nilai | 83,74 | 84,19 | 84,64 | 85,09 |
| IKSP.2.4 | Nilai Layanan Penyuluhan Agama Hindu | Nilai | 87,63 | 88,08 | 88,53 | 88,98 |
| IKSP.2.5 | Nilai Layanan Penyuluhan Agama Buddha | Nilai | 83,21 | 83,66 | 84,11 | 84,56 |
| IKSP.2.6 | Nilai Layanan Penyuluhan Agama Khonghucu | Nilai | 83,23 | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
| IKSP.2.7 | Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan BimbinganPerkawinan | Persen | 27,00 | 35,00 | 50,00 | 65,00 |
| IKSP.2.8 | Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan BimbinganPerkawinan Agama Kristen | Persen | 70,00 | 70,05 | 71,20 | 72,33 |
| IKSP.2.9 | Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan BimbinganPerkawinan Agama Katolik | Persen | N/A | 21,59 | 42,70 | 62,61 |
| IKSP.2.10 | Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan BimbinganPerkawinan Agama Hindu | Persen | 79,70 | 90,91 | 90,91 | 91,67 |
| IKSP.2.11 | Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan BimbinganPerkawinan Agama Buddha | Persen | 100,00 | 70,00 | 72,00 | 74,00 |
| IKSP.2.12 | Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan BimbinganPerkawinan Agama Khonghucu | Persen | 19,86 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| IKSP.2.13 | Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan BimbinganKeagamaan Keluarga | Persen | 0,01 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| IKSP.2.14 | Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan BimbinganKeagamaan Keluarga Kristiani | Persen | 70,71 | 71,37 | 72,03 | 73,69 |
| IKSP.2.15 | Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan BimbinganKeagamaan Keluarga Bahagia | Persen | N/A | 16,81 | 35,30 | 55,46 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 77,50 | 78,00 | | | | | | |
| 80,00 | 81,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 84,96 | 85,07 | | | | | | |
| 87,53 | 87,98 | | | | | | |
| 85,54 | 85,99 | | | | | | |
| 89,43 | 89,88 | | | | | | |
| 85,01 | 85,46 | | | | | | |
| 73,00 | 75,00 | | | | | | |
| 75,00 | 85,00 | | | | | | |
| 73,52 | 74,00 | | | | | | |
| 81,91 | 90,00 | | | | | | |
| 91,31 | 91,31 | | | | | | |
| 76,00 | 78,00 | | | | | | |
| 35,00 | 40,00 | | | | | | |
| 1,00 | 1,10 | | | | | | |
| 75,35 | 76,01 | | | | | | |
| 76,47 | 90,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.2.16 | Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan BimbinganKeagamaan Keluarga Sukinah | Persen | 3,02 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
| IKSP.2.17 | Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan BimbinganKeagamaan Keluarga Hitta Sukhaya | Persen | 0,28 | 0,32 | 0,33 | 0,37 |
| IKSP.2.18 | Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan BimbinganKeagamaan Keluarga Anhe Jiating | Persen | 11,62 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
| IKSP.2.19 | Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan yangmemenuhi standar | Persen | 66,69 | 67,35 | 68,02 | 68,68 |
| IKSP.2.20 | Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan AgamaKristen yang memenuhi standar | Persen | 20.00 | 31.80 | 36.17 | 40.53 |
| IKSP.2.21 | Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan AgamaKatolik yang memenuhi standar | Persen | N/A | 4,21 | 6,50 | 8,87 |
| IKSP.2.22 | Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan AgamaHindu yang memenuhi standar | Persen | 56,96 | 57,00 | 58,00 | 59,00 |
| IKSP.2.23 | Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan AgamaBuddha yang memenuhi standar | Persen | 28,19 | 31,8 | 36,17 | 40,53 |
| IKSP.2.24 | Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan AgamaKhonghucu yang memenuhi standar | Persen | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| IKSP.2.25 | Indeks Literasi kitab suci Agama Islam | Nilai | 66,69 | 67,35 | 68,02 | 68,68 |
| IKSP.2.26 | Indeks Literasi kitab suci Agama Kristen | Nilai | 68.98 | 69.70 | 70.39 | 71.06 |
| IKSP.2.27 | Indeks literasi kitab suci Agama Katolik | Nilai | N/A | 68,08 | 68,75 | 69,42 |
| IKSP.2.28 | Indeks Literasi kitab suci Agama Hindu | Nilai | N/A | 71,24 | 71,50 | 71,75 |
| IKSP.2.29 | Indeks Literasi Kitab Suci Agama Buddha | Nilai | 83,21 | 83,66 | 84,11 | 84,56 |
| IKSP.2.30 | Indeks Literasi Kitab Suci Agama Khonghucu | Nilai | N/A | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| IKSP.2.31 | Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat danasosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan | Persen | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10,21 | 10,21 | | | | | | |
| 0,40 | 0,45 | | | | | | |
| 18,00 | 20,00 | | | | | | |
| 69,34 | 70,00 | | | | | | |
| 44.89 | 49.26 | | | | | | |
| 11,32 | 13,83 | | | | | | |
| 60,00 | 61,00 | | | | | | |
| 44,89 | 49,26 | | | | | | |
| 8,00 | 9,00 | | | | | | |
| 69,34 | 70,00 | | | | | | |
| 71.90 | 72.57 | | | | | | |
| 70,08 | 70,75 | | | | | | |
| 71,90 | 72,00 | | | | | | |
| 85,01 | 85,46 | | | | | | |
| 80,00 | 80,00 | | | | | | |
| 5,00 | 6,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.2.32 | Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaanKristen untuk peningkatan kesejahteraan | Persen | N/A | 0,00 | 0,004 | 0,005 |
| IKSP.2.34 | Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial/Dana Puniakeagamaan Hindu untuk peningkatan kesejahteraan | Persen | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,23 |
| IKSP.2.35 | Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial Paramitakeagamaan Buddha untuk peningkatan kesejahteraan | Persen | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
| IKSP.2.36 | Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial Kebajikankeagamaan Khonghucu untuk peningkatan kesejahteraan | Persen | 0,9 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| IKSP.2.37 | Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional | Persen | 78,00 | 81,00 | 85,00 | 88,00 |
| IKSP.2.38 | Persentase lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang akuntabel danprofesional | Persen | 33.00 | 33.00 | 66.67 | 66.67 |
| IKSP.2.39 | Persentase lembaga dana sosial keagamaan Katolik yang akuntabel danprofesional | Persen | N/A | 50,00 | 50,00 | 66,67 |
| IKSP.2.40 | Persentase lembaga dana punia yang akuntabel dan professional | Persen | N/A | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| IKSP.2.41 | Persentase lembaga dana paramita keagamaan Buddha yang akuntabel danprofesional | Persen | 0,00 | 44,44 | 55,56 | 66,67 |
| IKSP.2.42 | Persentase Lembaga dana kebajikan yang akuntabel dan profesional | Persen | 40,78 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| IKSP.2.43 | Indeks Kepuasan Layanan KUA | Nilai | 85,53 | 85,64 | 85,75 | 85,85 |
| IKSP.2.44 | Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan al-Qur'an dan Edukasi al-Qur'an | Nilai | N/A | 77,00 | 77,50 | 78,00 |
| IKSP.2.45 | Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Agama | Nilai | N/A | 0,00 | 80,00 | 86,20 |
| IKSP.2.46 | Indeks Kepuasan Layanan :Jamaah haji Indonesia (IKJHI) dalam negeri Jamaah haji Indonesia (IKJHI) luar negeri | Nilai | 90,45;88,20 | 91,00; 88,25 | 0.00;0.00 | 0.00;0.00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0,006 | 0,007 | | | | | | |
| 0,28 | 0,34 | | | | | | |
| 2,50 | 3,00 | | | | | | |
| 0,40 | 0,50 | | | | | | |
| 91,00 | 95,00 | | | | | | |
| 75.00 | 90,00 | | | | | | |
| 75,00 | 80,00 | | | | | | |
| 99,00 | 99,00 | | | | | | |
| 77,78 | 95,00 | | | | | | |
| 80,00 | 90,00 | | | | | | |
| 85,96 | 86,07 | | | | | | |
| 78,50 | 79,00 | | | | | | |
| 86,50 | 87,25 | | | | | | |
| 0.00;0.00 | 0.00;0.00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah** | | | | | | |
| **SK.2104.1** | **Terlaksananya KUA sebagai Pusat Kerukunan Umat Beragama TingkatKecamatan / Tingkat Akar Rumput** | | | | | |
| IKSK.2104.1.1 | Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS | Persen | 0,00 | 16,90 | 33,80 | 50,70 |
| RO.2104. UAI.005 | KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System ) | Lembaga | 0,00 | 1000 | 2000 | 3000 |
| IKRO.2104. UAI.005.1 | Jumlah KUA yang mengembangkan EWS (*Early Warning System* ) dalammenjaga toleransi dan cinta kemanusiaan umat Islam | Lembaga | 0,00 | 1000 | 2000 | 3000 |
| **SK.2104.2** | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA dan Pembinaan KeluargaSakinah** | | | | | |
| IKSK.2104.2.1 | Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan AgamaIslam | Persen | 100,00 | 86,78 | 94,44 | 94,74 |
| IKSK.2104.2.2 | Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah | Persen | 0,00 | 1,40 | 2,85 | 4,34 |
| IKSK.2104.2.3 | Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan KeagamaanKeluarga Sakinah | Persen | 0,28 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
| IKSK.2104.2.4 | Persentase KUA Berdaya | Persen | 0,00 | 11,83 | 27,04 | 47,34 |
| IKSK.2104.2.5 | Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana | Persen | 8,45 | 32,42 | 57,77 | 66,58 |
| IKSK.2104.2.6 | Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah | Persen | -6,5 | 1,0 | 2,2 | 2,3 |
| IKSK.2104.2.7 | Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi | Persen | 0,00 | 9,57 | 30,43 | 50,00 |
| **RO.2104. QDE.002** | **Calon Pengantin Islam Mendapatkan Bimbingan Perkawinan** | **Orang** | **N/A** | **1.704.000** | **1.977.889** | **2.294.885** |
| IKRO.2104. QDE.002.1 | Jumlah Calon Pasangan Pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinanagama Islam | Pasangan | N/A | 1.394.000 | 1.347.889 | 1.334.885 |
| IKRO.2104. QDE.002.2 | Jumlah Remaja Usia Sekolah yang mendapatkan Bimbingan Pra Nikah | Orang | 211.265 | 310.000 | 630.000 | 960.000 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **761.700** | **1.022.524** | **1.034.017** | **1.046.406** | **1.059.816** | **[BIMAS ISLAM] Direktorat KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah** |
| | | | | | | | |
| 67,60 | 90,42 | | | | | | |
| 4000 | 5917 | 10.000 | 18.754 | 18.754 | 18.754 | 18.754 | |
| 4000 | 5917 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 95,00 | 95,24 | | | | | | |
| 5,88 | 7,46 | | | | | | |
| 0,23 | 0,34 | | | | | | |
| 64,41 | 79,62 | | | | | | |
| 71,79 | 82,00 | | | | | | |
| 3,9 | 2,5 | | | | | | |
| 69,57 | 82,00 | | | | | | |
| **2.674.202** | **3.098.221** | **160.726** | **160.726** | **160.726** | **160.726** | **160.726** | |
| 1.374.202 | 1.448.221 | | | | | | |
| 1.300.000 | 1.650.000 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2104. QDE.001 | Bimbingan Keluarga Sakinah – Maslahat | Keluarga | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| IKRO.2104. QDE.001.3 | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keluarga Sakinah danMaslahat | Keluarga | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **RO.2104. UAI.001** | **KUA Berdaya** | **Lembaga** | **1.000** | **1.000** | **1.100** | **1.200** |
| IKRO.2104. UAI.001.1 | Jumlah KUA yang Ditingkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Keagamaan | Lembaga | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| **RO.2104. UAI.002** | **KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana** | **Lembaga** | **500** | **1.918** | **1.500** | **1.200** |
| IKRO2104. UAI.002.5 | Jumlah KUA yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana sesuai standar | Lembaga | 500 | 1.918 | 1.500 | 1.200 |
| **RO.2104. UAI.003** | **KUA yang Dibangun (SBSN)** | **Lembaga** | **135** | **154** | **271** | **160** |
| IKRO.2104. UAI.003.5 | Jumlah KUA yang Dibangun | Lembaga | 135 | 154 | 271 | 160 |
| **RO.2104. UAI.004** | **KUA Rusak Sedang dan Berat Direhabilitasi** | **Lembaga** | **N/A** | **143** | **150** | **150** |
| IKRO.2104. UAI.004.5 | Jumlah KUA yang Rusak Sedang dan Berat yang Direhabilitasi | Lembaga | N/A | 143 | 150 | 150 |
| **RO.2104. QAA.002** | **Layanan Nikah dan Rujuk** | **Orang** | **2.956.604** | **2.789.212** | **2.695.778** | **2.669.770** |
| IKRO.2104. QAA.002.06 | Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk yang Dilayani | Pasangan | 1.478.302 | 1.394.606 | 1.347.889 | 1.334.885 |
| **RO.2104. QDC.001** | **Penghulu yang Ditingkatkan Kompetensinya** | **Orang** | **1.100** | **1.100** | **2.400** | **2.250** |
| IKRO.2104. QDC.001.7 | Jumlah Penghulu yang ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 1.100 | 1.100 | 3.500 | 5.750 |
| **2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf** | | | | | | |
| **SK.2122.1** | **Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf** | | | | | |
| IKSK.2122.1.1 | Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaanIslam terintegrasi basis data terpadu nasional | Persen | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2.500 | 2.500 | 27.951 | 40.641 | 44.705 | 49.176 | 54.093 | |
| 2.500 | 2.500 | | | | | | |
| **1.300** | **1.400** | **12.500** | **38.283** | **42.111** | **46.322** | **50.995** | |
| 1.300 | 1.400 | | | | | | |
| **900** | **486** | **35.000** | **120.000** | **123.600** | **127.308** | **131.127** | |
| 900 | 486 | | | | | | |
| **160** | **170** | **196.922** | **291.120** | **291.120** | **291.120** | **291.120** | |
| 160 | 170 | | | | | | |
| **150** | **150** | **21.601** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | |
| 150 | 150 | | | | | | |
| **2.748.404** | **2.896.442** | **277.000** | **302.000** | **302.000** | **302.000** | **302.000** | |
| 1.374.202 | 1.448.221 | | | | | | |
| **2.250** | **3.500** | **20.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | **21.000** | |
| 8.000 | 11.500 | | | | | | |
| | | **128.497** | **175.600** | **175.600** | **175.600** | **175.600** | **[BIMAS ISLAM] Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf** |
| | | | | | | | |
| 1,25 | 1,50 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2122.1.2 | Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembanganwakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan | Persen | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| IKSK.2122.1.3 | Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif | Persen | 4,00 | 6 | 8 | 10 |
| IKSK.2122.1.4 | Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yangditindaklanjuti | Persen | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| RO.2122. QEA.001 | Mustahiq yang diselaraskan dengan Data Kemiskinan (Regsosek/DT-SEN) | Orang | N/A | 25.900.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| IKRO.2122. QEA.001.1 | Jumlah Data Mustahiq yang Diselaraskan dengan Data Kemiskinan Regsosek | Orang | N/A | 25.900.000 | - | - |
| IKRO.2122. QEA.001.2 | Jumlah Data Zakat dan Wakaf yang Selaras dengan Data Kemiskinan (DT-SEN) | Orang | N/A | - | 25.000.000 | 25.000.000 |
| **RO.2122. QEA.002** | **Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF** | **Kelompok Masya-rakat** | **N/A** | **2.298** | **2.298** | **2.298** |
| IKRO.2122. QEA.002.1 | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pengentasan AngkaKemiskinan | Kelompok Masyarakat | N/A | 2.298 | 2.298 | 2.298 |
| **RO.2122. QDB.001** | **Pembinaan Lembaga Amil Zakat dan Nadzir Wakaf yang DiperkuatProgram Pengentasan Kemiskinan** | **Lembaga** | **N/A** | **9.193** | **9.193** | **9.193** |
| IKRO.2122. QDB.001.1 | Jumlah Lembaga Amil Zakat & Nadzir Wakaf yang dibina dan DiperkuatLiterasinya | Lembaga | N/A | 7.690 | 7.189 | 6.687 |
| IKRO.2122. QDB.001.2 | Jumlah Lembaga Akta Ikrar Wakaf yang Diterbitkan | Lembaga | N/A | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
| IKRO.2122. QDB.001.3 | Jumlah Layanan Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat dan Wakaf dalamProgram Pengentasan Kemiskinan | Lembaga | 0 | 3 | 4 | 6 |
| **SK.2122.2** | **Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga ZakatInfaq Sedekah dan Wakaf** | | | | | |
| IKSK.2122.2.1 | Persentase Lembaga Amil Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat,akuntabel, dan professional | Persen | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 15,00 | 16,00 | | | | | | |
| 12 | 14 | | | | | | |
| 7,00 | 8,00 | | | | | | |
| 25.000.000 | 25.000.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| - | - | | | | | | |
| 25.000.000 | 25.000.000 | | | | | | |
| **2.298** | **2.298** | **24.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | |
| 2.298 | 2.298 | | | | | | |
| **9.193** | **9.193** | **40.926** | **67.000** | **67.000** | **67.000** | **67.000** | |
| 6.183 | 5.681 | | | | | | |
| 3.000 | 3.500 | | | | | | |
| 10 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 23,00 | 25,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2122.2.2 | Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel,dan profesional | Persen | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 |
| IKSK.2122.2.3 | Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf | Persen | 1,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
| IKSK.2122.2.4 | Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan | Persen | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| IKSK.2122.2.5 | Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina | Persen | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
| **RO.2122. QIC.001** | **Lembaga Amil Zakat yang Diaudit Syariah dan Keuangannya** | **Lembaga** | **N/A** | **811** | **1.087** | **1.486** |
| IKRO.2122. QIC.001.1 | Jumlah Lembaga Zakat yang Diawasi Pengelolaannya | Lembaga | N/A | 739 | 800 | 839 |
| IKRO.2122. QIC.001.2 | Jumlah Lembaga Wakaf yang Diawasi Pengelolaannya | Lembaga | 18 | 72 | 287 | 647 |
| **RO.2122. QIC.002** | **Layanan Advokasi Aset Wakaf** | **Layanan** | **N/A** | **20** | **23** | **28** |
| IKRO.2122. QIC.002.1 | Jumlah Aset Wakaf yang Diberikan Pendampingan Advokasi dalamPenanganan Permasalahan Hukum | Lokasi | N/A | 115 | 138 | 166 |
| **RO.2122. QEI.001** | **Bantuan Operasional BWI** | **Lembaga** | **1** | **180** | **180** | **180** |
| IKRO.2122. QEI.001.1 | Terbinanya Lembaga Pengelola Wakaf (BWI) | Lembaga | N/A | 180 | 180 | 180 |
| IKRO.2122. QEI.001.2 | Jumlah Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif | Aset Wakaf | N/A | 8.982 | 8.981 | 8.982 |
| **RO.2122. QEI.002** | **Bantuan Operasional BAZNAS** | **Lembaga** | **1** | **110** | **110** | **110** |
| IKRO.2122. QEI.002.1 | Terbinanya Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS) | Lembaga | 1 | 110 | 110 | 110 |
| 2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam | | | | | | |
| **SK.2123.1** | **Meningkatnya Kualitas Syiar dan Pembinaan Lembaga Agama danLembaga Sosial Keagamaan Islam** | | | | | |
| IKSK.2123.1.1 | Persentase peningkatan audiens MTQ | Persen | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 88,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 8,00 | 10,00 | | | | | | |
| 12,00 | 15,00 | | | | | | |
| 8,00 | 9,00 | | | | | | |
| 10,00 | 12,00 | | | | | | |
| **2.050** | **2.796** | **15.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | |
| 900 | 1.000 | | | | | | |
| 1.150 | 1.796 | | | | | | |
| **34** | **20** | **4.671** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | |
| 200 | 220 | | | | | | |
| **180** | **180** | **16.400** | **21.400** | **21.400** | **21.400** | **21.400** | |
| 180 | 180 | | | | | | |
| 8.982 | 8.981 | | | | | | |
| **110** | **110** | **3.500** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | **4.700** | |
| 110 | 110 | | | | | | |
| | | 204.379 | 394.930 | 430.223 | 468.915 | 510.439 | [BIMAS ISLAM] Direktorat Penerangan Agama Islam |
| | | | | | | | |
| 89,00 | 90,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2123.1.2 | Persentase peningkatan peserta *event* seni budaya agama Islam | Persen | 2,40 | 4,00 | 7,14 | 6,67 |
| IKSK.2123.1.3 | Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar besar Islam yangdiselenggarakan Negara | Persen | 90,00 | 99,34 | 99,35 | 99,35 |
| IKSK.2123.1.4 | Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Agama Islam yang telahmenerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | Persen | 74,58 | 74,71 | 74,85 | 74,99 |
| **RO.2123. PEG.001** | **Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)** | **Kegiatan** | **N/A** | **1.826** | **1.826** | **1.826** |
| IKRO.2123. PEG.001.1 | Jumlah Audiens pada *Event* Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ) dalamMeningkatkan Kesalehan Umat Islam | Orang | N/A | 120.000 | 140.000 | 160.000 |
| **RO.2123. AEG.001** | **Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Islam** | **Kegiatan** | **N/A** | **34** | **34** | **34** |
| IKRO.2123. AEG.001.2 | Jumlah Partisipan dalam Penyelenggaraan *Event* Seni Budaya Islam | Orang | N/A | 3.500 | 3.750 | 4.000 |
| IKRO.2123. AEG.001.3 | Jumlah Partisipan pada Perayaan Hari Besar Islam yang DiselenggarakanNegara | Orang | N/A | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **RO.2123. QDB.001** | **Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Agama Islam (MUI)** | **Lembaga** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2123. QDB.001.1 | Jumlah Lembaga Agama Islam (Majelis Ulama Indonesia) yang MendapatkanFasilitasi dan Pembinaan | Lembaga | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2123. QDB.002** | **Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Islam** | **Lembaga** | **N/A** | **104** | **104** | **104** |
| IKRO.2123. QDB.002.1 | Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan Islam yang Mendapatkan Fasilitasi danPembinaan Tata Kelola Kelembagaan | Lembaga | N/A | 104 | 104 | 104 |
| **RO.2123. QDD.002** | **Majelis Taklim yang Dibina** | **Kelompok Masyarakat** | **1.028** | **1.207** | **1.328** | **1.460** |
| IKRO.2123. QDD.002.4 | Jumlah Lembaga Majelis Taklim yang Dibina dalam meningkatkan kesalehanumat Islam | Lembaga | N/A | 1.028 | 1.207 | 1.328 |
| **RO.2123. QDD.001** | **Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi BeragamaIslam** | **Kelompok Masya-rakat** | **N/A** | **4.400** | **4.400** | **4.400** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 6,25 | 5,88 | | | | | | |
| 99,36 | 99,36 | | | | | | |
| 75,13 | 75,27 | | | | | | |
| **1.826** | **1.826** | **31.064** | **98.510** | **108.361** | **119.197** | **131.117** | |
| 180.000 | 200.000 | | | | | | |
| **34** | **34** | **7.000** | **13.680** | **15.048** | **16.523** | **18.208** | |
| 4.250 | 4.500 | | | | | | |
| 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| **1** | **1** | **3.000** | **7.000** | **8.000** | **9.000** | **10.000** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **104** | **104** | **78.422** | **176.000** | **193.600** | **212.960** | **234.256** | |
| 104 | 104 | | | | | | |
| **1.607** | **1.028** | **14.712** | **27.540** | **30.294** | **33.323** | **35.655** | |
| 1.460 | 1.607 | | | | | | |
| **4.400** | **4.400** | **6.498** | **27.200** | **29.920** | **32.912** | **36.203** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2123. QDD.001.4 | Jumlah Dialog Internal Umat Islam dalam menciptakan kerukunan umat Islam | Kelompok Masyarakat | N/A | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| **SK.2123.2.1** | **Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam** | | | | | |
| IKSK.2123.3.1 | Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam | Nilai | 82,88 | 83,33 | 83,78 | 84,23 |
| IKSK.2123.3.2 | Persentase penyuluh agama Islam yang memperoleh Nilai Kinerja berkategoribaik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | Persen | 100 | 90 | 91 | 92 |
| IKSK.2123.3.3 | Rasio penyuluh agama Islam dengan kelompok sasaran yang mendapatkanbimbingan agama | Rasio | 1:5 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| **RO.2123. QDC.002** | **Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya** | **Orang** | **N/A** | **25.289** | **25.289** | **25.289** |
| IKRO.2123. QDC.002.1 | Jumlah Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan kemampuan danprofesionalitas dalam memberikan penyuluhan pada masyarakat | Orang | | 25.289 | 25.289 | 25.289 |
| IKRO.2123. QDC.002.3 | Jumlah Kelompok Sasaran Binaan Penyuluh Agama Islam yang mendapatkanbimbingan | Kelompok Masyarakat | | 101.156 | 101.156 | 101.156 |
| IKRO.2123. QDC.002.3 | Jumlah Penyuluh Agama Islam yang memberikan penyuluhan agama Islampada Masyarakat | Orang | | 25.289 | 25.289 | 25.289 |
| **RO.2123. QDC.003** | **Penyuluh Agama Islam yang dibina Menjadi Influencer Sosial Media** | **Orang** | **N/A** | **11.923** | **11.923** | **11.923** |
| IKRO.2123. QDC.003.1 | Jumlah Konten Digital Penyuluhan Agama Islam Inklusif Tranformatif yangdibuat dan dipublikasikan | Orang | N/A | 11.923 | 11.923 | 11.923 |
| IKRO.2123. QDC.003.2 | Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Dibina menjadi Influencer Sosial Media | Orang | N/A | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **RO.2123. QDC.001** | **Honorarium Penyuluh Agama Islam Non PNS** | **Orang** | **N/A** | **2.616** | **0** | **0** |
| IKRO.2123. QDC.001.3 | Jumlah Penyuluh Agama Islam Non ASN yang Memberikan LayananBimbingan Penyuluhan Agama Islam | Orang | N/A | 2.616 | 0 | 0 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4.400 | 4.400 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 84,68 | 85,13 | | | | | | |
| 93 | 94 | | | | | | |
| 1:4 | 1:4 | | | | | | |
| **25.289** | **25.289** | **20.076** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | |
| 25.289 | 25.289 | | | | | | |
| 101.156 | 101.156 | | | | | | |
| 25.289 | 25.289 | | | | | | |
| **11.923** | **11.923** | **12.215** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | |
| 11.923 | 11.923 | | | | | | |
| 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| **0** | **0** | **31.392** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah** | | | | | | |
| **SK.2124.1** | **Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaanumat beragama Islam** | | | | | |
| IKSK.2124.1.1 | Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam yang difasilitasi untukmerumuskan rekomendasi EWS | Persen | 76,92 | 79,49 | 82,05 | 84,62 |
| **RO.2124. QDD.001** | **2124.QDD.001 Respon dan Cegah Dini Konflik Keagamaan Islam** | **Kelompok Masya-rakat** | **N/A** | **83.800** | **83.800** | **83.800** |
| IKRO.2124. QDD.001.1 | Jumlah Rekomendasi Sistem Peringatan Dini dalam Pencegahan KonflikKeagamaan | Kelompok Masyarakat | N/A | 83.800 | 83.800 | 83.800 |
| **SK.2124.2** | **Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan KeagamaanIslam** | | | | | |
| IKSK.2124.2.1 | Persentase sarana prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar | Persen | 16,00 | 68,00 | 69,00 | 70,00 |
| IKSK.2124.2.2 | Persentase peningkatan kitab suci agama Islam yang disediakan | Persen | 38,34 | 40,00 | 42,00 | 44,00 |
| IKSK.2124.2.3 | Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layakedar/sesuai kaidah | Persen | 0,00 | 13,00 | 67,00 | 75,00 |
| IKSK.2124.2.4 | Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai standar | Persen | 79,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 |
| IKSK.2124.2.5 | Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat | Persen | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 60,00 |
| IKSK.2124.2.6 | Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanansyariah dan hisab rukyat | Persen | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 60,00 |
| **RO.2124. QAA.001** | **Layanan Syariah Hisab Rukyat** | **Laporan** | **N/A** | **4.979** | **4.990** | **5.001** |
| IKRO.2124. QAA.001.5 | Jumlah Pengukuran Arah Kiblat | Layanan | 2.367 | 2.010 | 2.020 | 2.030 |
| IKRO.2124. QAA.001.6 | Jumlah Layanan Syariah Hisab Rukyat | Layanan | N/A | 2.979 | 2.980 | 2.981 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **287.821** | **220.226** | **224.728** | **229.681** | **235.129** | **[BIMAS ISLAM] Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah** |
| | | | | | | | |
| 87,18 | 89,74 | | | | | | |
| **83.800** | **83.800** | 141.344 | 27.026 | 29.728 | 32.701 | 35.971 | |
| 83.800 | 83.800 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 71,00 | 73,00 | | | | | | |
| 46,00 | 48,00 | | | | | | |
| 80,00 | 83,00 | | | | | | |
| 92,00 | 92,00 | | | | | | |
| 80,00 | 90,00 | | | | | | |
| 80,00 | 90,00 | | | | | | |
| **5.012** | **5.023** | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| 2.040 | 2.050 | | | | | | |
| 2.982 | 2.983 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2124. QAA.002** | **Literasi Keagamaan Islam Digital** | **Laporan** | **N/A** | **1.194** | **1.194** | **1.194** |
| IKRO.2124. QAA.002.1 | Jumlah naskah & buku keagamaan Islam yg layak edar/ sesuai kaidah | Laporan | 200 | 100 | 150 | 200 |
| **RO.2124. QEI.001** | **Rumah ibadah agama Islam yang difasilitasi untuk meningkatkanlayanan** | **Lembaga** | **1.220** | **5.293** | **7.000** | **8.600** |
| IKRO.2124. QEI.001.1 | Jumlah Rumah Ibadah yang Difasilitasi dan memenuhi standar | Lembaga | 1.220 | 5.293 | 7.000 | 8.600 |
| **RO.2124.QEO. U01** | **Kitab Suci Agama Islam dan Sarana Peribadatan Agama Islam yangDisediakan** | **Unit** | **N/A** | **110.899** | **110.899** | **110.899** |
| IKRO.2124. QEO.U01.1 | Jumlah Kitab Suci Agama Islam yang Disediakan | Unit | N/A | 110.899 | 110.899 | 110.899 |
| **RO.2124. QEI.002** | **Perpustakaan Masjid yang dibina** | **Lembaga** | **1.020** | **3.684** | **3.684** | **3.684** |
| IKRO.2124. QEI.002.1 | Jumlah Pustaka Keagamaan Islam yang Terfasilitasi | Lembaga | 1.020 | 3.684 | 3.684 | 3.684 |
| **RO.2124 UAI 002** | **Pusat Literasi Keagamaan Islam Yang Dikembangkan** | **Lembaga** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2124 UAI 002.1 | Jumlah PLKI yang difasilitasi operasionalnya | Lembaga | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2124 UAI 002.2 | Jumlah masyarakat yang melakukan kunjungan ke PLKI | Orang | N/A | 7.000 | 8.200 | 9.400 |
| **RO.2124. UAI.001** | **Pusat Observasi Bulan yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya** | **Lembaga** | **4** | **4** | **6** | **7** |
| IKRO.2124. UAI.001.1 | Jumlah Pusat Observasi Bulan yang Disediakan Operasionalnya | Lembaga | 4 | 4 | 6 | 7 |
| **2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus** | | | | | | |
| **SK.2126.1** | **Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraibadah Haji Khusus dan Umrah** | | | | | |
| IKSK.2126.1.1 | Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);<br>a) Lembaga penyelenggara haji khusus;<br>b) Lembaga penyelenggara umrah | Persen | 82,00;96,00 | 82,05;96,01 | 0,00 | 0,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1.194 | 1.194 | 6.000 | 6.000 | 6.600 | 7.260 | 7.986 | |
| 250 | 300 | | | | | | |
| 10.000 | 11.622 | 97.837 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| 10.000 | 11.622 | | | | | | |
| 110.899 | 110.899 | 5.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 110.899 | 110.899 | | | | | | |
| 3.684 | 3.684 | 6.440 | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | |
| 3.684 | 3.684 | | | | | | |
| 1 | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 10.800 | 12.000 | | | | | | |
| 8 | 9 | 1.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 8 | 9 | | | | | | |
| | | 11.876 | 11.105 | 11.105 | 11.105 | 0 | [DITJEN PHU] Direktorat Umrah dan Haji Khusus |
| | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2126. QDB.001** | **Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina** | **Lembaga** | **N/A** | **1881** | **0** | **0** |
| IKRO.2126. QDB.001.1 | Jumlah Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi(A) Lembaga penyelenggara umrah | Lembaga | N/A | 100 | 0 | 0 |
| **RO.2126. QDB.002** | **Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang Terbina** | **Lembaga** | **N/A** | **717** | **0** | **0** |
| IKRO.2126. QDB.002.1 | Jumlah Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi(A) Lembaga penyelenggara haji khusus | Lembaga | N/A | 65 | 0 | 0 |
| **2130 Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu** | | | | | | |
| **SK.2130.1** | **Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaanumat Khonghucu** | | | | | |
| IKSK.2130.1.1 | Persentase peningkatan dialog kerukunan agama khonghucu yang difasilitasiuntuk merumuskan rekomendasi EWS | Persen | 50,00 | 52,63 | 55,26 | 57,89 |
| IKSK.2130.1.2 | Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Khonghucu yang telahmenerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | Persen | N/A | 15,08 | 19,84 | 24,60 |
| IKSK.2130.1.3 | Persentase peningkatan audiens perayaan hari besar keagamaan Khonghucu | Persen | N/A | 10 | 11 | 12 |
| **RO.2130. QDD.001** | **Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Khonghucu** | **Kelompok Masya-rakat** | **160** | **160** | **160** | **160** |
| IKRO.2130. QDD.001.1 | Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi*EWS* agama khonghucu | Jumlah | 160 | 160 | 160 | 160 |
| **RO.2130. QDB.001** | **Lembaga Agama dan Keagamaan Khonghucu yang dibina** | **Lembaga** | **38** | **38** | **50** | **62** |
| IKRO.2130. QDB.001.1 | Jumlah lembaga agama dan keagamaan Khonghucu yang dibina | Jumlah | 38 | 38 | 50 | 62 |
| IKRO.2130. QDB.001.2 | Jumlah *audiens* Perayaan Hari Besar Keagamaan Khonghucu | Jumlah | N/A | 1000 | 1100 | 1300 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **0** | **0** | 8.643 | 7.872 | 7.872 | 7.872 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | 3.233 | 3.233 | 3.233 | 3.233 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| | | **15.304** | **17.649** | **20.173** | **23.359** | **27.457** | **[SETJEN] Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu** |
| | | | | | | | |
| 60,53 | 63,16 | | | | | | |
| 29,76 | 34,92 | | | | | | |
| 13 | 14 | | | | | | |
| **160** | **160** | 1.989 | 5.532 | 5.532 | 5.532 | 5.532 | |
| 160 | 160 | | | | | | |
| **75** | **88** | 3.714 | 4.643 | 5.571 | 6.686 | 8.023 | |
| 75 | 88 | | | | | | |
| 1400 | 1500 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **SK.2130.2** | **Meningkatanya kualitas layanan keagamaan khonghucu yg profesional,inklusif, dan berdampak** | | | | | |
| IKSK.2130.2.1 | Persentase penyuluh agama Khonghucu yang memperoleh Nilai Kinerjaberkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | Persen | N/A | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
| IKSK.2130.2.2 | Rasio penyuluh agama Khonghucu dengan kelompok sasaran yangmendapatkan bimbingan agama | Rasio | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| IKSK.2130.2.3 | Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga *Anhe Jiating*yang disediakan | Persen | N/A | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
| IKSK.2130.2.4 | Persentase rumah ibadah Khonghucu yang memperoleh bantuan saranaprasarana peribadatan | Persen | N/A | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| IKSK.2130.2.5 | Persentase peningkatan kitab suci agama Khonghucu yang disediakan | Persen | N/A | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| IKSK.2130.2.6 | Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Khonghucu yang layakedar/ sesuai kaidah | Persen | N/A | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| IKSK.2130.2.7 | Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama Khonghucu yangtersertifikasi | Persen | N/A | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| IKSK.2130.2.8 | Persentase calon penerima dana sosial kebajikan terintegrasi basis dataterpadu nasional | Persen | N/A | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| IKSK.2130.2.9 | Persentase lembaga dana kebajikan yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan | Persen | N/A | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| **RO.2130. QDC.007** | **Penyuluh Agama Khonghucu Non ASN Penerima Tunjangan** | **Orang** | **N/A** | **102** | **0** | **0** |
| IKRO.2130. QDC.008.1 | Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik(Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | Jumlah | N/A | 102 | 0 | 0 |
| **RO.2130. QDC.002** | **Penyuluh Agama Khonghucu yang ditingkatkan Kompetensinya dandibina menjadi Influencer Sosial Media** | **Orang** | **N/A** | **174** | **174** | **174** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 75,00 | 80,00 | | | | | | |
| 1:2 | 1:2 | | | | | | |
| 18,00 | 20,00 | | | | | | |
| 13,00 | 14,00 | | | | | | |
| 80,00 | 80,00 | | | | | | |
| 70,00 | 80,00 | | | | | | |
| 25,00 | 30,00 | | | | | | |
| 0,40 | 0,50 | | | | | | |
| 65,00 | 70,00 | | | | | | |
| **0** | **0** | **2.088** | **2.088** | **2.088** | **2.088** | **2.088** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **174** | **174** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2130. QDC.002.1 | Jumlah Penyuluh Agama Khonghucu yang ditingkatkan Kompetensinya | Jumlah | N/A | 174 | 174 | 174 |
| **RO.2130 QEG 001.1** | **Kitab Suci Agama Konghucu dan Sarana Peribadatan AgamaKhonghucu yang Disediakan** | **Paket** | **N/A** | **2381** | **2771** | **3011** |
| IKRO.2130. QEG.001.1 | Jumlah buku keagamaan Khonghucu pendukung peribadatan sesuai kaidah. | Jumlah | 550 | 550 | 600 | 650 |
| IKRO.2130. QEG.001.2 | Jumlah kitab suci khonghucu yang disediakan | Jumlah | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
| **RO.2130. QEI.001** | **Rumah Ibadah Agama Khonghucu yang difasilitasi untuk meningkatkanlayanan** | **Lembaga** | **N/A** | **55** | **60** | **65** |
| IKRO.2130. QEI.001.1 | Jumlah rumah ibadah agama Khonghucu yang memperoleh bantuan saranadan prasarana peribadatan | Jumlah | 50 | 55 | 60 | 65 |
| IKRO.2130. QEI.001.2 | Jumlah Lembaga dana kebajikan yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraandisediakan | Jumlah | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2130. QEI.001.3 | Jumlah calon penerima dana kebajikan terintegrasi basis data terpadunasional | Jumlah | N/A | 250 | 350 | 450 |
| **2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen** | | | | | | |
| **SK.2137.1** | **Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaanumat Kristen** | | | | | |
| IKSK.2137.1.1 | Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Kristen yang difasilitasiuntuk merumuskan rekomendasi EWS | Persen | 3,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| IKSK.2137.1.2 | Persentase peningkatan audiens PESPARAWI | Persen | N/A | 0,00 | 13,20 | 0,00 |
| IKSK.2137.1.3 | Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Kristen | Persen | N/A | 0,00 | 13,20 | 0,00 |
| IKSK.2137.1.4 | Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Kristen yangdiselenggarakan Negara | Persen | N/A | 0,00 | 5,56 | 6,32 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 174 | 174 | | | | | | |
| **3251** | **3491** | **5.897** | **3.566** | **4.958** | **6.784** | **9.251** | |
| 700 | 750 | | | | | | |
| 1300 | 1400 | | | | | | |
| **70** | **75** | **816** | **1.020** | **1.224** | **1.469** | **1.763** | |
| 70 | 75 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 550 | 650 | | | | | | |
| | | **243.432** | **198.837** | **190.846** | **227.960** | **314.175** | **[BIMAS KRISTEN] Direktorat Urusan Agama Kristen** |
| | | | | | | | |
| 65,00 | 70,00 | | | | | | |
| 0,00 | 16,70 | | | | | | |
| 0,00 | 16,70 | | | | | | |
| 6,93 | 7,78 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2137.1.5 | Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Kristen yang telahmenerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | Persen | 0,40 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| **RO 2137. QDD.001** | **Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Kristen** | | **2,00** | **37,00** | **37,00** | **37,00** |
| IKRO.2137. QDD.001.1 | Jumlah dialog kerukunan agama Kristen difasilitasi untuk merumuskanrekomendasi EWS | Dialog | 2,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| **RO 2137. AEG.001** | **Event Perayaan Hari Besar Agama Kristen** | **Kegiatan** | **N/A** | **0** | **3** | **3** |
| IKRO.2137. AEG.001.1 | Jumlah Event Perayaan Hari Besar Agama Kristen yang diselenggarakan | Kegiatan | N/A | 0 | 3 | 3 |
| IKRO.2137. AEG.001.2 | Jumlah partisipan perayaan Hari Besar Kristen yang diselenggarakan negara | Orang | 4.300 | 4.500 | 4.750 | 5.050 |
| **RO.2137. PEG.001** | **Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (PESPARAWI)** | **Kegiatan** | **N/A** | **77** | **77** | **1** |
| IKRO.2137. PEG.001.1 | Jumlah Event PESPARAWI yang diselenggarakan | Kegiatan | 34 | 77 | 77 | 1 |
| IKRO.2137. PEG.001.2 | Jumlah audiens penyelenggaraan PESPARAWI | Orang | 14.271 | 0 | 16.155 | 0 |
| IKRO.2137. PEG.001.3 | Jumlah peserta event Seni Budaya Agama Kristen | Orang | 8.396 | 0 | 9.504 | 0 |
| **RO.2137. QDB.001** | **Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen** | **Lembaga** | **119** | **151** | **166** | **189** |
| IKRO.2137. QDB.001.1 | Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan Kristen yang telah menerimapendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | Lembaga | 119 | 151 | 166 | 189 |
| **RO.2137. QDB.003** | **Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Agama Kristen (Aras Nasional danSinode)** | | **N/A** | **185** | **210** | **240** |
| IKRO.2137. QDB.003.1 | Jumlah Lembaga Agama Kristen (Aras Nasional dan Sinode) yangmendapatkan fasilitasi dan pembinaan | Lembaga | N/A | 185 | 210 | 240 |
| **SK.2137.2** | **Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Kristen Yang profesional,inklusif, dan berdampak** | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 55,00 | 60,00 | | | | | | |
| **37,00** | **37,00** | **7.721** | **11.250** | **14.063** | **16.875** | **19.406** | |
| 37,00 | 37,00 | | | | | | |
| **3** | **3** | **-** | **-** | **1.500** | **3.000** | **4.500** | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 5.400 | 5.820 | | | | | | |
| **1** | **77** | **55.719** | **60.000** | **15.000** | **20.000** | **75.500** | |
| 1 | 77 | | | | | | |
| 0 | 18.852 | | | | | | |
| 0 | 11.091 | | | | | | |
| **205** | **225** | **7.436** | **10.200** | **12.750** | **15.300** | **17.595** | |
| 205 | 225 | | | | | | |
| **280** | **300** | **22.075** | **25.000** | **32.000** | **35.000** | **38.000** | |
| 280 | 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2137.2.1 | Persentase penyuluh agama Kristen yang memperoleh Nilai Kinerjaberkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | Persen | 88,00 | 90,00 | 92,00 | 93,00 |
| IKSK.2137.2.2 | Rasio penyuluh agama Kristen dengan kelompok sasaran yang mendapatkanbimbingan agama | Rasio | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:4 |
| IKSK.2137.2.3 | Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama Kristen yang dibina | Persen | 70,00 | 70,05 | 71,20 | 72,33 |
| IKSK.2137.2.4 | Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pranikah Kristen | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.2137.2.5 | Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga Kristiani yangdisediakan | Persen | 0,00 | 6,67 | 7,50 | 7,56 |
| IKSK.2137.2.6 | Persentase rumah ibadah agama Kristen yang memperoleh bantuan saranaprasarana peribadatan | Persen | 5,41 | 7,08 | 9,20 | 10,73 |
| IKSK.2137.2.7 | Persentase peningkatan kitab suci agama Kristen yang disediakan | Persen | 16,73 | 18,83 | 25,56 | 29,17 |
| IKSK.2137.2.8 | Persentase buku keagamaan Kristen pendukung peribadatan yang sesuaikaidah | Persen | 31,77 | 35,00 | 37,45 | 40,12 |
| IKSK.2137.2.9 | Persentase jumlah calon penerima dana Amal Sosial Kristiani terintegrasibasis data terpadu nasional | Persen | N/A | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| IKSK.2137.2.10 | Persentase Lembaga dana Amal Sosial Kristiani yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukankesejahteraan | Persen | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 66,67 |
| **RO.2137. QDC.001** | **Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non ASN** | **Orang** | **6.953** | **3.420** | **0** | **0** |
| IKRO.2137. QDC.001.1 | Jumlah Penyuluh Non PNS Penerima Tunjangan | Orang | 6.953 | 3.420 | 0 | 0 |
| **RO.2137. QDC.002** | **Penyuluh Agama Kristen yang ditingkatkan kompetensinya** | **Orang** | **6.859** | **6.950** | **7.105** | **7.182** |
| IKRO.2137. QDC.002.1 | Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik(Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | Orang | 6.859 | 6.950 | 3.967 | 4.020 |
| IKRO.2137. QDC.002.2 | Jumlah Penyuluh Agama Kristen dengan kelompok sasaran yang mendapatkanbimbingan agama Kristen | Orang | 6.859 | 6.950 | 3.967 | 4.020 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 95,00 | 98,00 | | | | | | |
| 1:4 | 1:5 | | | | | | |
| 73,52 | 74,00 | | | | | | |
| 0,98 | 1,00 | | | | | | |
| 8,11 | 10,00 | | | | | | |
| 12,06 | 12,57 | | | | | | |
| 35,48 | 38,10 | | | | | | |
| 42,74 | 43,71 | | | | | | |
| 66,67 | 66,67 | | | | | | |
| 66,67 | 66,67 | | | | | | |
| **0** | **0** | **80.088** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **7.336** | **7.569** | **14.353** | **17.000** | **19.500** | **22.000** | **25.250** | |
| 4.116 | 4.257 | | | | | | |
| 4.116 | 4.257 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2137. QDC.003** | **Penyuluh Agama Kristen yang dibina menjadi influencer sosial media** | | **N/A** | **0** | **278** | **294** |
| IKRO.2137. QDC.003.1 | Jumlah penyuluh agama Kristen yang dibina menjadi influenser sosial media | Orang | N/A | 0 | 278 | 294 |
| IKRO.2137. QDC.003.2 | Jumlah konten digital penyuluhan agama Kristen inklusif transformatif yangdibuat dan dipublikasikan | Konten | N/A | 0 | 150 | 200 |
| **RO.2137. QDE.001** | **Bimbingan Keluarga Kristiani** | **Keluarga** | **7.630** | **11.157** | **11.400** | **11.600** |
| IKRO.2137. QDE.001.1 | Jumlah Keluarga Kristiani yang memperoleh Bimbingan Keluarga Kristiani | Keluarga | 7.630 | 11.157 | 11.400 | 11.600 |
| IKRO.2137. QDE.001.2 | Jumlah layanan bimbingan keluarga Kristiani yang disediakan | Layanan | 150 | 160 | 172 | 185 |
| **RO.2137. QDE.002** | **Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Kristiani** | | | **1.390** | **2.500** | **3.500** |
| IKRO.2137. QDE.002.1 | Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan yang dibina | Orang | N/A | 1.390 | 2.500 | 3.500 |
| IKRO.2137. QDE.002.2 | Jumlah remaja Kristen usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah | Orang | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.2137. QDE.002.3 | Jumlah calon pengantin Kristiani | Pasangan | N/A | 154.900 | 155.200 | 155.500 |
| **RO.2137. QEI.001** | **Bantuan Rumah Ibadah Agama Kristen yang Difasilitasi untuk meningkatkan Layanan** | **Lembaga** | **529** | **782** | **950** | **1.280** |
| IKRO.2137. QEI.001.1 | Jumlah Rumah Ibadah Agama Kristen yang mendapat bantuan dalampemenuhan standar sarana prasarana | Lembaga | 529 | 782 | 950 | 1.280 |
| **RO.2137. QEO.001** | **Kitab Suci dan Sarana Peribadatan agama Kristen yang disediakan** | | **25.113** | **25.959** | **30.000** | **34.000** |
| IKRO.2137. QEO.001.1 | Jumlah Kitab Suci Agama Kristen yang disediakan | Unit | 25.113 | 25.959 | 30.000 | 34.000 |
| IKRO.2137. QEO.001.2 | Jumlah Buku Keagamaan Kristen pendukung peribadatan yang sesuai kaidah | Unit | NA | 0 | 5 | 10 |
| **RO.2137. QDB.002** | **Pembinaan Lembaga Amal Kristiani yang Diperkuat Program Pengentasan Kemiskinan** | | **1** | **1** | **1** | **2** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **320** | **335** | **0** | **2.317** | **2.821** | **3.330** | **3.640** | |
| 320 | 335 | | | | | | |
| 250 | 300 | | | | | | |
| **11.800** | **12.000** | **5.996** | **12.000** | **15.000** | **18.000** | **20.700** | |
| 11.800 | 12.000 | | | | | | |
| 200 | 220 | | | | | | |
| **5.200** | **8.300** | **1.041** | **3.570** | **5.588** | **6.705** | **8.571** | |
| 5.000 | 8.000 | | | | | | |
| 200 | 300 | | | | | | |
| 155.800 | 156.000 | | | | | | |
| **1.980** | **2.035** | **40.732** | **44.000** | **55.000** | **66.000** | **75.900** | |
| 1.980 | 2.035 | | | | | | |
| **38.000** | **42.000** | **7.171** | **9.000** | **11.250** | **13.500** | **15.525** | |
| 38.000 | 42.000 | | | | | | |
| 15 | 20 | | | | | | |
| **2** | **3** | **600** | **1.500** | **1.875** | **2.250** | **2.588** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2137. QDB.002.1 | Jumlah Lembaga Amal Sosial Kristiani yang dibina/diperkuat dalampelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan | Lembaga | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **RO.2137. QEI.002** | **Bantuan Operasional Pembinaan Lembaga Pengelola Amal Sosial Kristiani** | | | **3** | **3** | **3** |
| IKRO.2137. QEI.002.1 | Jumlah Lembaga dana Amal Sosial Kristianiyang memperoleh bantuan operasional | Lembaga | N/A | 3 | 3 | 3 |
| **2140 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik** | | | | | | |
| **SK.2140.1** | **Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaanumat beragama Katolik** | | | | | |
| IKSK.2140.1.1 | Persentase Peningkatan Dialog Kerukunan Agama Katolik yang difasilitasiuntuk merumuskan Rekomendasi EWS | Persen | N/A | 0,00 | 50,00 | 33,33 |
| IKSK.2140.1.2 | Persentase Peningkatan Audiens Pesparani | Persen | N/A | 7,14 | 5,88 | 6,25 |
| IKSK.2140.1.3 | Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Katolik | Persen | N/A | 10,00 | 5,56 | 7,14 |
| IKSK.2140.1.4 | Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Katolik yangdiselenggarakan Negara | Persen | N/A | 4,17 | 4,20 | 4,61 |
| IKSK.2140.1.5 | Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Katolik yang telahmenerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | Persen | N/A | 17,50 | 36,25 | 56,25 |
| **RO.2140. AEG.001** | **Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Keagamaan Katolik** | **Kegiatan** | **N/A** | **0** | **1** | **1** |
| IKRO.2140. AEG.001.1 | Jumlah partisipan perayaan hari besar besar agama Katolik yangdiselenggarakan Negara | Orang | N/A | 0,00 | 13.025 | 13.625 |
| **RO.2140. PEG.001** | **Penyelenggaraan Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesparani)** | **Kegiatan** | **N/A** | **39** | **39** | **38** |
| IKRO.2140. PEG.001.1 | Jumlah audiens penyelenggaraan Pesparani | Orang | N/A | 0 | 19.500 | 0 |
| IKRO.2140. PEG.001.2 | Jumlah peserta event seni budaya agama Katolik | Orang | N/A | 0 | 8.000 | 0 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 3 | | | | | | |
| **3** | **3** | **500** | **3.000** | **4.500** | **6.000** | **7.000** | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| | | **136.804** | **124.261** | **138.691** | **162.154** | **199.836** | **[BIMAS KATOLIK] Direktorat Urusan Agama Katolik** |
| | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 25,00 | 20,00 | | | | | | |
| 5,56 | 5,66 | | | | | | |
| 6,67 | 5,26 | | | | | | |
| 4,95 | 5,24 | | | | | | |
| 77,50 | 85,00 | | | | | | |
| **1** | **1** | **0** | **1.000** | **1.150** | **1.323** | **1.521** | |
| 14.300 | 15.050 | | | | | | |
| **38** | **39** | **1.900** | **10.000** | **2.186** | **2.513** | **11.500** | |
| 0 | 20.300 | | | | | | |
| 0 | 8.300 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2140. PEG.001.3 | Jumlah Penyelenggaraan Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik(Pesparani) | Kegiatan | N/A | 39 | 39 | 39 |
| **RO.2140. QDB.002** | **Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **179** | **179** | **179** |
| IKRO.2140. QDB.002.1 | Jumlah lembaga agama Katolik dan sosial keagamaan Katolik yang telahmenerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | Lembaga | N/A | 179 | 179 | 179 |
| **RO.2140. QDD.002** | **Dialog Kerukunan Umat Beragama Katolik** | **Kelompok Masya-rakat** | **N/A** | **4.977** | **4.977** | **4.977** |
| IKRO.2140. QDD.002.1 | Jumlah dialog kerukunan agama Katolik difasilitasi untuk merumuskanrekomendasi EWS | Kegiatan | N/A | 39 | 39 | 39 |
| **SK.2140.2** | **Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Katolik yang profesional, inklusif, dan berdampak** | | | | | |
| IKSK.2140.2.1 | Persentase Penyuluh Agama Katolik yang memperoleh nilai kinerjaberkategori Baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | Persen | 100,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| IKSK.2140.2.2 | Rasio Penyuluh Agama Katolik dengan Kelompok Sasaran yang mendapatkanBimbingan Agama Katolik | Nilai | 1:2 | 1:6 | 1:6 | 1:6 |
| IKSK.2140.2.3 | Persentase peningkatan frekuensi bimbingan perkawinan Katolik | Persen | N/A | 23,33 | 28,59 | 36,09 |
| IKSK.2140.2.4 | Persentase remaja Katolik usia sekolah yang memperoleh bimbinganperkawinan pra nikah | Persen | N/A | 0,00 | 12,00 | 25,00 |
| IKSK.2140.2.5 | Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga bahagia Katolikyang disediakan | Persen | N/A | 16,81 | 35,30 | 55,46 |
| IKSK.2140.2.6 | Persentase rumah ibadah Katolik yang memperoleh bantuan sarana prasaranaperibadatan | Persen | N/A | 4,21 | 6,50 | 8,87 |
| IKSK.2140.2.7 | Persentase peningkatan Kitab Suci Agama Katolik yang disediakan | Persen | N/A | 19,77 | 39,69 | 59,68 |
| IKSK.2140.2.8 | Persentase Buku Keagamaan Katolik pendukung peribadatan yang sesuaikaidah | Persen | N/A | 0,00 | 15,00 | 20,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 39 | 39 | | | | | | |
| **179** | **179** | **7.458** | **8.577** | **9.863** | **11.343** | **13.044** | |
| 179 | 179 | | | | | | |
| **4.977** | **4.977** | **5.004** | **5.755** | **6.618** | **7.611** | **8.753** | |
| 39 | 39 | | | | | | |
| | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 95,00 | 96,00 | | | | | | |
| 1:6 | 1:6 | | | | | | |
| 45,39 | 56,03 | | | | | | |
| 30,00 | 32,00 | | | | | | |
| 76,47 | 90,00 | | | | | | |
| 11,32 | 13,83 | | | | | | |
| 79,73 | 99,78 | | | | | | |
| 23,33 | 25,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2140.2.9 | Persentase jumlah calon penerima Dana Amal Kasih Katolik terintegrasi basisdata terpadu nasional | Persen | N/A | 18,97 | 38,45 | 58,45 |
| IKSK.2140.2.10 | Persentase Lembaga Dana Amal Kasih Katolik yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukankesejahteraan | Persen | N/A | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| **RO.2140. QDB.001** | **Pembinaan Lembaga Pengelola Dana Amal Kasih Katolik yang Diperkuat Program Pengentasan Kemiskinan** | **Lembaga** | **N/A** | **38** | **38** | **38** |
| IKRO.2140. QDB.001.1 | Jumlah Calon Penerima dana Amal Kasih Katolik terintegrasi basis dataterpadu nasional | Orang | N/A | 18.390 | 18.890 | 19.390 |
| IKRO.2140. QDB.001.2 | Jumlah Lembaga BAKKAT yang dibina | Lembaga | N/A | 1 | 2 | 3 |
| **RO.2140. QDB.003** | **Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Agama Katolik (KWI)** | **Lembaga** | **N/A** | **51,00** | **51,00** | **51,00** |
| IKRO.2140. QDB.003.1 | Jumlah lembaga agama Katolik yang profesional yang dibantu | Lembaga | N/A | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| **RO.2140. QDC.001** | **Penyuluh Agama Katolik Non ASN Penerima Tunjangan** | **Orang** | **N/A** | **2,777,00** | **0,00** | **0,00** |
| IKRO.2140. QDC.001.1 | Jumlah Penyuluh Agama Katolik Non ASN Penerima Tunjangan | Orang | N/A | 2,777,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RO.2140. QDC.002** | **Penyuluh Agama Katolik yang ditingkatkan kompetensinya** | **Orang** | **N/A** | **3,488,00** | **3,662,00** | **3,847,00** |
| IKRO.2140. QDC.002.1 | Jumlah kelompok sasaran penyuluhan Katolik yang mendapatkan bimbinganatau penyuluhan agama Katolik | Kelompok | N/A | 2,712,00 | 2,712,00 | 2,712,00 |
| IKRO.2140. QDC.002.2 | Jumlah penyuluh agama Katolik yang memperoleh Nilai Kinerja berkategoribaik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | Orang | N/A | 3,332,00 | 3,332,00 | 3,332,00 |
| **RO.2140. QDC.003** | **Penyuluh Agama Katolik yang dibina menjadi influencer sosial media** | **Orang** | **N/A** | **1,030,00** | **1,030,00** | **1,030,00** |
| IKRO.2140. QDC.003.1 | Jumlah Konten Digital Keagamaan Katolik Inklusif Transformatif yangdihasilkan | Konten | N/A | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| **RO.2140. QDD.001** | **Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Kategorial Katolik** | **Kelompok Masya-rakat** | **N/A** | **848,00** | **848,00** | **848,00** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 78,97 | 99,49 | | | | | | |
| 95,00 | 96,00 | | | | | | |
| **38** | **38** | **500** | **1.900** | **2.185** | **2.513** | **2.890** | |
| 19.890 | 20.390 | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| **51,00** | **51,00** | **1.950** | **2.550** | **2.933** | **3.372** | **3.878** | |
| 51,00 | 51,00 | | | | | | |
| **0,00** | **0,00** | **33.324** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| **4,038,00** | **4,118,00** | **9.235** | **10.621** | **12.214** | **14.046** | **16.153** | |
| 2,712,00 | 2,712,00 | | | | | | |
| 3,332,00 | 3,332,00 | | | | | | |
| **1,030,00** | **1,030,00** | **920** | **1.320** | **1.748** | **2.314** | **3.057** | |
| 12,00 | 12,00 | | | | | | |
| **848,00** | **848,00** | **3.267** | **4.240** | **4.876** | **5.608** | **6.448** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2140. QDD.001.1 | Jumlah Kelompok Kategorial Katolik yang Diberikan Fasilitas dan Pembinaan | Kelompok | N/A | 848,00 | 848,00 | 848,00 |
| **RO.2140. QDE.001** | **Bimbingan Keluarga Bahagia Katolik** | **Keluarga** | **N/A** | **9,792,00** | **9,792,00** | **9,792,00** |
| IKRO.2140. QDE.001.1 | Jumlah keluarga Katolik yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia | Keluarga | N/A | 5,316,00 | 5,484,00 | 6,379,00 |
| **RO.2140. QDE.002** | **Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Katolik** | **Keluarga** | **N/A** | **3,580,00** | **3,580,00** | **3,580,00** |
| IKRO.2140. QDE.002.1 | Jumlah peningkatan frekuensi bimbingan perkawinan Katolik | Kegiatan | N/A | 38,00 | 40,00 | 43,00 |
| IKRO.2140. QDE.002.2 | Jumlah remaja Katolik usia sekolah yang memperoleh bimbingan pemahamanperkawinan | Orang | N/A | 0,00 | 1,200,00 | 2,500,00 |
| IKRO.2140. QDE.002.3 | Jumlah calon pengantin Katolik yang mendapatkan bimbingan perkawinan | Catin | N/A | 3,580,00 | 3,500,00 | 3,300,00 |
| **RO.2140. QEI.009** | **Rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan** | **Lembaga** | **N/A** | **112,00** | **123,00** | **136,00** |
| IKRO.2140. QEI.009.1 | Jumlah Rumah Ibadah Katolik yang Memperoleh Bantuan Sarana danPrasarana Peribadatan | Lembaga | N/A | 112,00 | 123,00 | 136,00 |
| **RO.2140. QEI.011** | **Bantuan Operasional Pembinaan Bakkat Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **11,00** | **14,00** | **19,00** |
| IKRO.2140. QEI.011.1 | Jumlah Lembaga dana Amal Sosial Katolik yang meningkatkan kompetensi, tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukankesejahteraan | Lembaga | N/A | 11,00 | 14,00 | 19,00 |
| **RO.2140. QEO.001** | **Bantuan Kitab Suci dan Sarana Peribadatan Agama Katolik yang disediakan** | **Unit** | **N/A** | **10,410,00** | **12,087,00** | **13,899,00** |
| IKRO.2140. QEO.001.1 | Jumlah peningkatan Kitab Suci Katolik yang disediakan | Unit | N/A | 7,065,00 | 8,125,00 | 9,343,00 |
| IKRO.2140. QEO.001.2 | Jumlah buku keagamaan Katolik pendukung peribadatan sesuai kaidah | Unit | N/A | 9,00 | 9,00 | 12,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 848,00 | 848,00 | | | | | | |
| **9,792,00** | **9,792,00** | **5.229** | **6.014** | **6.916** | **7.953** | **9.146** | |
| 6,645,00 | 7,442,00 | | | | | | |
| **3,580,00** | **3,580,00** | **3.320** | **3.818** | **4.391** | **5.049** | **5.807** | |
| 47,00 | 52,00 | | | | | | |
| 3,000,00 | 3,200,00 | | | | | | |
| 3,200,00 | 3,000,00 | | | | | | |
| **149,00** | **164,00** | **59.600** | **60.000** | **72.000** | **82.805** | **96.422** | |
| 149,00 | 164,00 | | | | | | |
| **24,00** | **30,00** | **1.200** | **1.755** | **2.739** | **3.979** | **5.719** | |
| 24,00 | 30,00 | | | | | | |
| **15,984,00** | **18,382,00** | **3.896** | **6.712** | **8.873** | **11.726** | **15.499** | |
| 10,745,00 | 12,357,00 | | | | | | |
| 14,00 | 15,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu** | | | | | | |
| **SK.2143.1** | **Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat Hindu** | | | | | |
| IKSK.2143.1.1 | Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Hindu yang difasilitasi untukmerumuskan rekomendasi EWS | Persen | N/A | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
| IKSK.2143.1.2 | Persentase peningkatan audiens Utsawa Dharma Gita | Persen | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 16,70 |
| IKSK.2143.1.3 | Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Hindu | Persen | 47,80 | 0,00 | 1,49 | 3,33 |
| IKSK.2143.1.4 | Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar besar Hindu yangdiselenggarakan Negara | Persen | 1,23 | 1,23 | 3,03 | 3,53 |
| IKSK.2143.1.5 | Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Hindu yang telah menerimapendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | Persen | 28,30 | 31,30 | 34,80 | 38,30 |
| **RO.2143 PEG 001** | **Event dan Seni Budaya Keagamaan Hindu (Utsawa Dharma Gita)** | **Kegiatan** | **34** | **22** | **22** | **22** |
| IKRO.2143 PEG 001.1 | Jumlah audiens penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita | Orang | 12.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| IKRO.2143 AEG 001 | Event seni budaya dan Hari Besar Keagaamaan Hindu | Kegiatan | 22 | 22 | 22 | 22 |
| IKRO.2143 AEG 001.1 | Jumlah peserta event seni budaya agama | Orang | 1.478 | 0 | 1.500 | 1.550 |
| IKRO.2143 AEG 001.2 | Jumlah partisipan perayaan hari besar besar Hindu yang diselenggarakanNegara | Orang | 16.300 | 16.500 | 17.000 | 17.600 |
| **RO.2143. QDB.001** | **Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Hindu** | **Lembaga** | **65** | **622** | **622** | **622** |
| IKRO.2143. QDB.001.1 | Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerimapendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | Lembaga | 203 | 225 | 250 | 275 |

| 2028 | 2029 | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **97.176** | **124.058** | **150.375** | **146.394** | **156.269** | **[BIMAS HINDU] Direktorat Urusan Agama Hindu** |
| | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 17,00 | 20,00 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3,87 | 4.35 | | | | | | |
| 3,60 | 3.84 | | | | | | |
| 41,80 | 45,30 | | | | | | |
| **22** | **22** | **2.322** | **2.775** | **20.000** | **5.500** | **5.500** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | 22 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 1.610 | 1.680 | | | | | | |
| 18.250 | 18.950 | | | | | | |
| **622** | **622** | **12.285** | **18.092** | **19.094** | **20.099** | **21.099** | |
| 300 | 325 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2143. QDD.001** | **Kelompok Binaan Penyuluh Agama Hindu** | **Kelompok Masya-rakat** | **N/A** | **183** | **0** | **0** |
| IKRO.2143. QDD.001.1 | Kelompok Binaan Penyuluh Agama Hindu | Kelompok | N/A | 183 | 0 | 0 |
| **RO.2143. QDD.002** | **Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu** | **Kelompok Masya-rakat** | **1395** | **2116** | **2116** | **2116** |
| IKRO.2143. QDD.002.1 | Jumlah dialog kerukunan agama Hindu difasilitasi untuk merumuskanrekomendasi EWS | Kegiatan | 10 | 10 | 12 | 15 |
| **SK.2143.2** | **Meningkatanya kualitas layanan keagamaan Hindu yg profesional, inklusif, dan berdampak** | | | | | |
| IKSK.2143.2.1 | Persentase penyuluh agama Hindu yang memperoleh Nilai Kinerjaberkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | Persen | 58,00 | 65,20 | 72,50 | 72,50 |
| IKSK.2143.2.2 | Rasio penyuluh agama Hindu dengan kelompok sasaran yang mendapatkanbimbingan agama Hindu | Rasio | 1 : 8 | 1 : 8 | 1 : 8 | 1 : 8 |
| IKSK.2143.2.3 | Persentase fasilitator bimbingan perkawinan Agama Hindu yang tersertifikasi | Persen | N/A | 51,00 | 54,00 | 58,00 |
| IKSK.2143.2.4 | Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah | Persen | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
| IKSK.2143.2.5 | Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan | Persen | 4,55 | 8,30 | 9,00 | 9,20 |
| IKSK.2143.2.6 | Persentase rumah ibadah Hindu yang memperoleh bantuan sarana prasaranaperibadatan | Persen | 56,96 | 59,30 | 63,30 | 56,96 |
| IKSK.2143.2.7 | Persentase peningkatan kitab suci agama Hindu yang disediakan | Persen | N/A | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| IKSK.2143.2.8 | Persentase buku keagamaan agama Hindu pendukung peribadatan yang sesuaikaidah | Persen | N/A | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| IKSK.2143.2.9 | Persentase jumlah calon penerima Dana Punia terintegrasi basis data terpadunasional | Persen | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,33 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 0 | 1.553 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 2116 | 2116 | 7.253 | 8.602 | 8.602 | 8.602 | 8.602 | |
| 17 | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 79,70 | 79,70 | | | | | | |
| 1 : 8 | 1 : 8 | | | | | | |
| 62,00 | 65,00 | | | | | | |
| 0.80 | 0.90 | | | | | | |
| 10,10 | 10,70 | | | | | | |
| 56,96 | 56,96 | | | | | | |
| 1,50 | 1,60 | | | | | | |
| 1,50 | 1,60 | | | | | | |
| 0,41 | 0,50 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2143.2.10 | Persentase Lembaga Dana Punia yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan | Persen | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| **RO.2143. QDC.001** | **Penyuluh Agama Hindu Non ASN Penerima Tunjangan** | **Orang** | **1.407** | **1.259** | **0** | **0** |
| IKRO.2143. QDC.001.1 | Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik(Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | Orang | 80 | 90 | 0 | 0 |
| **RO.2143. QDC.002** | **Penyuluh Agama Hindu yang ditingkatkan kompetensinya** | **Orang** | **1.358** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| IKRO.2143. QDC.002.1 | Jumlah penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkanbimbingan agama | Orang | 1450 & 11600 | 1450 & 11600 | 1450 & 11600 | 1450 & 11600 |
| **RO.2143. QDC.003** | **Penyuluh Agama Hindu yang yang dibina menjadi influencer sosial media** | **Orang** | **0** | **100** | **150** | **150** |
| IKRO.2143. QDC.003.1 | Jumlah Konten Digital Keagamaan Inklusif Transformatif yang dihasilkan | Konten | 0 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| **RO.2143. QDE.001** | **Bimbingan Keluarga Sukinah** | **Keluarga** | **1.684** | **2.573** | **3.870** | **4.140** |
| IKRO.2143. QDE.001.1 | Jumlah keluarga mendapatkan bimbingan keluarga Sukinah | Keluarga | 1.500 | 2.500 | 2.725 | 2.975 |
| **RO.2143. QDE.002** | **Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Hindu** | **Keluarga** | **0** | **1.054** | **1.094** | **1.094** |
| IKRO.2143. QDE.002.1 | Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan yang tersertifikasi | Orang | 0 | 70 | 75 | 80 |
| IKRO.2143. QDE.002.2 | Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah | Orang | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 |
| IKRO.2143. QDE.002.3 | Jumlah catin yang memperoleh bimbingan perkawinan | Orang | 0 | 800 | 880 | 980 |
| **RO.2143. QEO.001** | **Kitab suci dan sarana peribadatan agama Hindu yang disediakan** | **Unit** | **13.453** | **22.961** | **22.961** | **22.961** |
| IKRO.2143. QEO.001.1 | Jumlah peningkatan kitab suci yang disediakan | Unit | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| IKRO.2143. QEO.001.2 | Jumlah buku keagamaan agama Hindu pendukung peribadatan yang sesuaikaidah | Unit | 6.953 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 99,00 | 99,00 | | | | | | |
| **0** | **0** | **15.228** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **1.000** | **1.000** | **3.465** | **6.756** | **4.956** | **4.956** | **4.956** | |
| 1450 & 11600 | 1450 & 11600 | | | | | | |
| **150** | **150** | **937** | **937** | **937** | **937** | **937** | |
| 33.000 | 34.000 | | | | | | |
| **4.140** | **3.210** | **4.284** | **10.198** | **11.198** | **12.698** | **13.198** | |
| 3.275 | 3.625 | | | | | | |
| **1.094** | **1.094** | **3.142** | **7.066** | **8.066** | **9.066** | **10.066** | |
| 85 | 90 | | | | | | |
| 2.575 | 2.600 | | | | | | |
| 1.100 | 1.240 | | | | | | |
| **22.961** | **22.961** | **10.481** | **23.049** | **24.549** | **24.563** | **25.563** | |
| 6.800 | 6.900 | | | | | | |
| 6.800 | 6.900 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2143. QEI.003** | **Rumah ibadah Agama Hindu yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan** | **Lembaga** | **389** | **407** | **410** | **416** |
| IKRO.2143. QEI.003.1 | Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasaranaperibadatan | Lembaga | 389 | 407 | 410 | 416 |
| **RO.2143. QDB.003** | **Lembaga Agama yang dibantu** | **Lembaga** | **196** | **123** | **130** | **130** |
| IKRO.2143. QDB.003.1 | Jumlah Lembaga Agama Hindu yang Profesional | Lembaga | 300 | 225 | 250 | 275 |
| **RO.2143. QEI.002** | **Prasarana lembaga agama dan keagamaan Hindu yang dibantu** | **Lembaga** | **15** | **8** | **0** | **0** |
| IKRO.2143. QEI.002.1 | Jumlah Lembaga Agama Hindu yang Profesional | Lembaga | 15 | 225 | 0 | 0 |
| **RO.2143. QDB.002** | **Pembinaan Lembaga Dana Punia yang diperkuat literasi dengan Program Pengentasan Kemiskinan** | **Lembaga** | **8** | **2** | **10** | **10** |
| IKRO.2143. QDB.002.1 | Jumlah calon penerima dana Dana punia terintegrasi basis data terpadunasional | Orang | 200 | 200 | 300 | 420 |
| IKRO.2143. QDB.002.2 | Jumlah Lembaga Dana Punia yang dibina | Lembaga | N/A | 2 | 10 | 10 |
| **RO.2143. QEI.004** | **Bantuan Operasional Badan Dharma Dana Nasional (BDDN)** | **Lembaga** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2143. QEI.004.1 | Jumlah Lembaga Dharma Dana yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan | Lembaga | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha** | | | | | | |
| **SK.2145.1** | **Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan Umat Buddha** | | | | | |
| IKSK.2145.1.1 | Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Buddha yang difasilitasiuntuk merumuskan rekomendasi EWS | Persen | 100,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| IKSK.2145.1.2 | Persentase peningkatan audiens Swayamvara Tripitaka Gatha | Persen | 40,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **416** | **421** | **21.728** | **26.934** | **32.384** | **38.384** | **44.759** | |
| 416 | 421 | | | | | | |
| **130** | **130** | **6.172** | **9.065** | **9.065** | **9.065** | **9.065** | |
| 300 | 325 | | | | | | |
| **0** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **10** | **10** | **625** | **4.025** | **4.025** | **4.025** | **4.025** | |
| 520 | 630 | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | |
| **1** | **1** | **200** | **500** | **500** | **500** | **500** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| | | **82.226** | **113.123** | **119.060** | **125.244** | **131.688** | **[BIMAS BUDDHA] Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha** |
| | | | | | | | |
| 25,00 | 30,00 | | | | | | |
| 0,00 | 60,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2145.1.3 | Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Buddha | Persen | 15,38 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| IKSK.2145.1.4 | Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Buddha yangdiselenggarakan Negara | Persen | N/A | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| IKSK.2145.1.5 | Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Buddha yang telahmenerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan | Persen | 16,23 | 17,22 | 17,22 | 17,22 |
| **RO.2145. PEG.001** | **Event Seni Budaya Keagamaan Buddha (Swayamvara Tripitaka Gatha)** | **Kegiatan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2145. PEG.001.1 | Jumlah audiens penyelenggaraan Swayamvara Tripitaka Gatha | Orang | 700 | 850 | 1000 | 1150 |
| IKRO.2145. PEG.001.2 | Jumlah peserta event seni budaya agama | Orang | 500 | 500 | 1725 | 1810 |
| **RO.2145. AEG.001** | **Event Hari Besar Keagamaan Buddha** | **Kegiatan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2145. AEG.001.1 | Jumlah partisipan perayaan hari besar Buddha yang diselenggarakan Negara | Orang | N/A | 4.500 | 5.000 | 5.500 |
| **RO.2145. QDD.001** | **Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha dan Moderasi Beragama Buddha** | **Kelompok Masya-rakat** | **N/A** | **272** | **272** | **272** |
| IKRO.2145. QDD.001.1 | Jumlah dialog kerukunan agama Buddha difasilitasi untuk merumuskanrekomendasi EWS | Kelompok Masyarakat | N/A | 272 | 272 | 272 |
| **RO.2145. QDB.002** | **Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Buddha** | **Lembaga** | **N/A** | **364** | **364** | **364** |
| IKRO.2145. QDB.002.1 | Jumlah lembaga sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan ataupembinaan tata kelola kelembagaan | Lembaga | N/A | 364 | 364 | 364 |
| **SK.2145.2** | **Meningkatanya kualitas layanan keagamaan Buddha yang profesional, inklusif, dan berdampak** | | | | | |
| IKSK.2145.2.1 | Persentase penyuluh agama Buddha yang memperoleh Nilai Kinerjaberkategori baik (Laporan Harian, Konten Digital, Kediklatan) | Persen | 7,21 | 14,66 | 19,55 | 24,44 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0,00 | 15,07 | | | | | | |
| 12,50 | 12,50 | | | | | | |
| 17,22 | 17,22 | | | | | | |
| **1** | **1** | **9.010** | **30.000** | **31.500** | **33.075** | **34.729** | |
| 1300 | 1500 | | | | | | |
| 1895 | 1985 | | | | | | |
| **1** | **1** | **2.000** | **3.000** | **4.000** | **5.000** | **6.000** | |
| 6.000 | 6.500 | | | | | | |
| **272** | **272** | **7.894** | **9.737** | **10.224** | **10.735** | **11.272** | |
| 272 | 272 | | | | | | |
| **364** | **364** | **1.132** | **1.185** | **1.244** | **1.306** | **1.372** | |
| 364 | 364 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 29,33 | 34,21 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2145.2.2 | Rasio penyuluh agama Buddha dengan kelompok sasaran yang mendapatkanbimbingan agama | Rasio | 1:4 | 1:6 | 1:6 | 1:6 |
| IKSK.2145.2.3 | Persentase fasilitator bimbingan perkawinan Agama Buddha yangtersertifikasi | Persen | N/A | 0,00 | 12,56 | 25,13 |
| IKSK.2145.2.4 | Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah AgamaBuddha | Persen | N/A | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| IKSK.2145.2.5 | Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga Agama Buddhayang disediakan | Persen | N/A | 18,64 | 14,29 | 12,50 |
| IKSK.2145.2.6 | Persentase rumah ibadah Agama Buddha yang memperoleh bantuan saranadan prasarana peribadatan | Persen | 3,28 | 4,24 | 4,36 | 4,57 |
| IKSK.2145.2.7 | Persentase peningkatan kitab suci Agama Buddha yang disediakan | Persen | N/A | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| IKSK.2145.2.8 | Persentase buku keagamaan Buddha pendukung peribadatan yang sesuaikaidah | Persen | N/A | 3,88 | 4,63 | 5,51 |
| IKSK.2145.2.9 | Persentase jumlah calon penerima Dana Paramita terintegrasi basis dataterpadu nasional | Persen | N/A | 5,00 | 7,00 | 10,00 |
| IKSK.2145.2.10 | Persentase Lembaga Dana Paramita yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan | Persen | 100,00 | 92,00 | 94,00 | 96,00 |
| **RO.2145. QDC.001** | **Penyuluh Agama Buddha Non ASN Penerima Tunjangan** | **Orang** | **1091** | **1081** | **0** | **0** |
| IKRO.2145. QDC.001.1 | Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik(Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | Orang | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| **RO.2145. QDC.002** | **Penyuluh Agama Buddha yang Ditingkatkan Kompetensinya** | **Orang** | **1261** | **1208** | **215** | **215** |
| IKRO.2145. QDC.002.1 | Jumlah penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkanbimbingan agama | Orang | 1261 | 1208 | 215 | 215 |
| IKRO.2145. QDC.002.2 | Jumlah penyuluh agama Buddha yang memperoleh Nilai Kinerja berkategoribaik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) | Orang | 0 | 215 | 215 | 215 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1:6 | 1:6 | | | | | | |
| 37,69 | 50,25 | | | | | | |
| 1,00 | 1,00 | | | | | | |
| 11,11 | 10,00 | | | | | | |
| 4,75 | 5,10 | | | | | | |
| 10,00 | 10,00 | | | | | | |
| 6,51 | 7,63 | | | | | | |
| 12,00 | 15,00 | | | | | | |
| 98,00 | 99,00 | | | | | | |
| **0** | **0** | **12.972** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **215** | **215** | **1.596** | **15.600** | **15.811** | **16.033** | **16.266** | |
| 215 | 215 | | | | | | |
| 215 | 215 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2145. QDC.003** | **Penyuluh Agama Buddha yang Aktif dalam Konten Digital Keagamaaan Inklusif Transformatif** | **Orang** | **N/A** | **305** | **305** | **305** |
| IKRO.2145. QDC.003.1 | Jumlah penyuluh agama Buddha yang dibina menjadi influenser sosial media | Orang | N/A | 50 | 65 | 80 |
| IKRO.2145. QDC.003.2 | Jumlah Konten Digital Penyuluh Agama Buddha Inklusif Transformatif yangdibuat dan dipublikasikan | Konten Digital | N/A | 279 | 300 | 315 |
| **RO.2145. QDE.001** | **Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya** | **Keluarga** | **2000** | **1765** | **1765** | **1765** |
| IKRO.2145. QDE.001.1 | Jumlah layanan bimbingan keluarga Hitta Sukkhaya yang disediakan | Keluarga | 2000 | 1765 | 1765 | 1765 |
| RO.2145. QDE.002 | Calon Pengantin Buddha yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan | Pasangan | N/A | 765 | 765 | 765 |
| IKRO.2145. QDE.002.1 | Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama Buddha yang tersertifikasi | Orang | N/A | 0 | 50 | 100 |
| IKRO.2145. QDE.002.2 | Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikahagama Buddha | Remaja | N/A | 1500 | 1500 | 1500 |
| IKRO.2145. QDE.002.3 | Jumlah catin agama Buddha yang memperoleh bimbingan perkawinan | Pasangan | N/A | 105,00 | 110,00 | 115,00 |
| **RO.2145. QEO.001** | **Bantuan Kitab Suci dan Sarana Peribadatan Agama Buddha** | **Unit** | **N/A** | **13952** | **13952** | **13952** |
| IKRO.2145. QEO.001.1 | Jumlah peningkatan kitab suci yang disediakan | Unit | N/A | 10000 | 10000 | 10000 |
| IKRO.2145. QEO.001.2 | Jumlah buku keagamaan Buddha pendukung peribadatan yang sesuai kaidah | Unit | N/A | 1452 | 5000 | 5750 |
| IKRO.2145. QEO.001.3 | Jumlah sarana peribadatan yang disediakan | Unit | N/A | 1000 | 2000 | 3000 |
| **RO.2145. QEI.002** | **Rumah Ibadah Agama Buddha yang Difasilitasi untuk Meningkatkan Layanan** | **Lembaga** | **186** | **241** | **248** | **260** |
| IKRO.2145. QEI.002.1 | Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasaranaperibadatan | Lembaga | 186 | 241 | 248 | 260 |
| **RO.2145. QEI.001** | **Bantuan Lembaga Agama Buddha** | **Lembaga** | **100** | **8** | **9** | **10** |
| IKRO.2145. QEI.001.1 | Jumlah Lembaga Agama Buddha yang Profesional | Lembaga | 100 | 8 | 9 | 10 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **305** | **305** | **1.724** | **1.835** | **1.927** | **2.023** | **2.124** | |
| 95 | 110 | | | | | | |
| 331 | 347 | | | | | | |
| **1765** | **1765** | **902** | **1.650** | **1.733** | **1.819** | **1.910** | |
| 1765 | 1765 | | | | | | |
| 765 | 765 | 765 | 500 | 525 | 551 | 579 | |
| 150 | 200 | | | | | | |
| 1500 | 1500 | | | | | | |
| 120,00 | 125,00 | | | | | | |
| **13952** | **13952** | **1.433** | **4.400** | **4.620** | **4.851** | **5.094** | |
| 10000 | 10000 | | | | | | |
| 6538 | 7364 | | | | | | |
| 4000 | 5000 | | | | | | |
| **273** | **287** | **34.915** | **36.025** | **37.827** | **39.718** | **41.704** | |
| 273 | 287 | | | | | | |
| **11** | **12** | **6.582** | **6.291** | **6.605** | **6.935** | **7.282** | |
| 11 | 12 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2145. QDD.002** | **Kelompok Masyarakat Buddha yang Memperoleh Penguatan Pemberdayaan Ekonomi** | **Kelompok Masyarakat** | **35** | **0** | **30** | **32** |
| IKRO.2145. QDD.002.1 | Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dan dikuatkan dalampemberdayaan ekonomi | Kelompok Masyarakat | 35 | 0 | 30 | 32 |
| **RO.2145. QDB.001** | **Pembinaan Lembaga Dana Paramita yang Diperkuat Program Pengentasan Kemiskinan** | **Lembaga** | **N/A** | **9** | **9** | **9** |
| IKRO.2145. QDB.001.1 | Jumlah calon penerima dana Dana Paramita terintegrasi basis data terpadunasional | Orang | N/A | 270 | 315 | 360 |
| IKRO.2145. QDB.001.2 | Jumlah Lembaga Dana Paramita yang dibina | Lembaga | N/A | 9 | 9 | 9 |
| **RO.2145. QEI.001** | **Bantuan Operasional Pembinaan Lembaga Pengelola Dana Paramita** | **Lembaga** | **N/A** | **241** | **248** | **260** |
| IKRO.2145. QEI.002.1 | Jumlah Lembaga dana Paramita yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan | Lembaga | N/A | 241 | 248 | 260 |
| **2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri** | | | | | | |
| **SK.2147.1** | **Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji** | | | | | |
| IKSK.2147.1.1 | Tingkat Kepuasan layanan Asrama Haji | Nilai | N/A | 82 | 84 | 86 |
| IKSK.2147.1.2 | Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota | Persen | N/A | 5 | 5 | 5 |
| **RO.2147. QAA.001** | **Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri** | **Orang** | **N/A** | **476.615** | **0** | **0** |
| IKRO.2147. QAA.001.1 | Jumlah calon jamaah haji yang diberangkatkan | Jumlah | N/A | 203.320 | 0 | 0 |
| IKRO.2147. QAA.001.2 | Jumlah calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota | Layanan | N/A | 11.050 | 0 | 0 |
| **RO.2147. QAH.001** | **Asrama Haji yang Profesional Melayan** | **Layanan** | **N/A** | **33** | **0** | **0** |
| IKRO.2147. QAH.001.1 | Jumlah layanan asrama haji | Layanan | N/A | 10 | 0 | 0 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 33 | 35 | 0 | 1.500 | 1.575 | 1.654 | 1.736 | |
| 33 | 35 | | | | | | |
| 9 | 9 | 900 | 1.000 | 1.050 | 1.103 | 1.158 | |
| 405 | 450 | | | | | | |
| 9 | 9 | | | | | | |
| 273 | 287 | 400 | 400 | 420 | 441 | 463 | |
| 273 | 287 | | | | | | |
| | | 603.211 | 603.211 | 603.211 | 603.211 | - | [DITJEN PHU] Direktorat Haji Dalam Negeri |
| | | | | | | | |
| 88 | 90 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 0 | 0 | 20.224 | 20.224 | 20.224 | 20.224 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 4.704 | 4.704 | 4.704 | 4.704 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2147. QAH.003** | **Revitalisasi Asrama Haji - SBSN** | **Layanan** | **N/A** | **5** | **0** | **0** |
| IKRO.2147. QAH.003.1 | Jumlah Revitalisasi Asrama Haji - SBSN | Layanan | N/A | 10 | 0 | 0 |
| **SK.2147.2** | **Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji** | | | | | |
| IKSK.2147.2.1 | Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standarsarana dan prasarana dan standar pelayanan | Persen | N/A | 80 | 81 | 81 |
| IKSK.2147.2.2 | Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu | Nilai | N/A | 86 | 87 | 87 |
| **RO.2147. QAH.002** | **Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang Profesional Melayani - SBSN** | **Layanan** | **N/A** | **54** | **0** | **0** |
| IKRO.2147. QAH.002.1 | Jumlah pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar saranadan prasarana dan standar pelayanan | Layanan | 253 | 307 | 0 | 0 |
| IKRO.2147. QAH.002.2 | Jumlah layanan pusat layanan haji dan umrah terpadu | Layanan | 253 | 307 | 0 | 0 |
| **2148 Pembinaan Haji** | | | | | | |
| **SK.2148.1** | **Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji** | | | | | |
| IKSK.2148.1.1 | Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75 | Persen | N/A | 80,00 | 0 | 0 |
| IKSK.2148.1.2 | Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji | Persen | N/A | 70,00 | 0 | 0 |
| **RO.2148. QAH.001** | **Nilai Kerjasama dan Konsultasi haji** | **Layanan** | **N/A** | **3** | **0** | **0** |
| IKRO.2148. QAH.001.1 | Jumlah NSPK yang disusun | Layanan | N/A | 7 | 0 | 0 |
| **RO.2148. QDC.001** | **Petugas Haji yang Profesional** | **Orang** | **N/A** | **18.015** | **0** | **0** |
| IKRO.2148. QDC.001.1 | Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75 | Orang | N/A | 4.420 | 0 | 0 |
| **RO.2148. QDC.002** | **Jemaah Haji Reguler yang Terbina** | **Orang** | **N/A** | **117.670** | **0** | **0** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **0** | **0** | 399.007 | 399.007 | 399.007 | 399.007 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 82 | 82 | | | | | | |
| 88 | 88 | | | | | | |
| **0** | **0** | 179.276 | 179.276 | 179.276 | 179.276 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| | | **440.162** | **441.880** | **441.880** | **441.880** | - | **[DITJEN PHU] Direktorat Bina Haji** |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | 1.631 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | 423.396 | 423.396 | 423.396 | 423.396 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | 15.134 | 15.134 | 15.134 | 15.134 | 0 | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2148. QDC.002.1 | Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji | Orang | N/A | 221.000 | 0 | 0 |
| **2149 Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji** | | | | | | |
| **SK.2149.1** | **Meningkatnya pemanfaatan dana operasional haji yang efektif** | | | | | |
| IKSK.2149.1.1 | Opini laporan pengelolaan dana operasional teraudit Wajar TanpaPengecualian (WTP) | Nilai | 95 | 96 | 0 | 0 |
| **RO.2149. UAH.001** | **Laporan Keuangan Haji yang akuntabel** | **Laporan** | **N/A** | **4** | **0** | **0** |
| IKRO.2149. UAH.001.1 | Jumlah laporan pengelolaan dana operasional teraudit Wajar TanpaPengecualian (WTP) | Laporan | N/A | 1 | 0 | 0 |
| **SK.2149.2** | **Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu** | | | | | |
| IKSK.2149.2.1 | Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji | Nilai | 80 | 81 | 0 | 0 |
| **RO.2149. QMA.001** | **Sistem Informasi Haji yang Handal** | **Layanan** | **N/A** | **15** | **0** | **0** |
| IKRO.2149. QMA.001.1 | Jumlah pengakses layanan website haji | Layanan | N/A | 8 | 0 | 0 |
| **5310 Pelayanan Haji Luar Negeri** | | | | | | |
| **SK.5310.1** | **Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji** | | | | | |
| IKSK.5310.1.1 | Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuaistandar | Persen | N/A | 88 | 0 | 0 |
| IKSK.5310.1.2 | Persentase jumlah daging/dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia | Persen | N/A | 70 | 0 | 0 |
| **RO.5310. QDC.001** | **Layanan Administrasi Haji Luar Negeri** | **Orang** | **N/A** | **221.000** | **0** | **0** |
| IKRO.5310. QDC.001.1 | Jumlah pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuaistandar | Layanan | N/A | 221.000 | 0 | 0 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| | | **26.173,383** | **26.173,383** | **26.173,383** | **26.173,383** | **-** | **[DITJEN PHU] Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji** |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | 4.626 | 4.626 | 4.626 | 4.626 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | 21.547 | 21.547 | 21.547 | 21.547 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| | | **7.714** | **7.714** | **7.714** | **7.714** | **7.714** | **[DITJEN PHU] Direktorat Haji Luar Negeri** |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | 7.099 | 7.099 | 7.099 | 7.099 | 7.099 | |
| 0 | 0 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.5310. QDC.002** | **Jemaah Haji yang terlayani penyaluran Daging Qurban** | **Orang** | **N/A** | **221.000** | **0** | **0** |
| IKRO.5310. QDC.002.1 | Jumlah daging /Dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia | Orang | N/A | 221.000 | 0 | 0 |
| **5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama** | | | | | | |
| **SK.5620.1** | **Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama** | | | | | |
| IKSK.5620.1.1 | Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskanrekomendasi EWS | Persen | 10,00 | 19,00 | 28,00 | 37,00 |
| IKSK.5620.1.2 | Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengankategori sangat tinggi | Persen | 18,79 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
| IKSK.5620.1.3 | Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis) | Nilai | 61,78 | 64,39 | 66,99 | 69,60 |
| **RO.5620. QDB.001** | **FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik** | **N/A** | **550** | **552** | **552** | **552** |
| IKRO.5620. QDB.001.1 | Jumlah Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengankategori sangat tinggi | Provinsi | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
| IKRO.5620. QDB.001.2 | Jumlah FKUB Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi dialog kerukunanumat beragama | Jumlah | 512 | 512 | 514 | 514 |
| **RO.5620. QDC.002** | **Tokoh Masyarakat terlibat dalam Kerjasama Kerukunan Umat Agama Nasional dan Internasional** | | | | | |
| IKRO.5620. QDC.002.1 | Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasiEWS | Dialog | 18 | 30 | 49 | 58 |
| IKRO.5620. QDC.002.2 | Jumlah tokoh masyarakat yang terlibat dalam kerjasama kerukunan umatberagama | Orang | N/A | 60 | 98 | 116 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **0** | **0** | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| | | **79.593** | **147.437** | **210.426** | **205.806** | **205.806** | **[SETJEN] Pusat Kerukunan Umat Beragama** |
| | | | | | | | |
| 46,00 | 55,00 | | | | | | |
| 45,00 | 50,00 | | | | | | |
| 72,20 | 74,81 | | | | | | |
| **552** | **552** | **30.700** | **93.924** | **93.924** | **93.924** | **93.924** | |
| 12,00 | 13,00 | | | | | | |
| 514 | 514 | | | | | | |
| | | **48.893** | **53.513** | **116.502** | **111.882** | **111.882** | |
| 77 | 96 | | | | | | |
| 154 | 192 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **7891 Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal** | | | | | | |
| **SK.7891.1** | **Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Islam dan Kualitas Pengawasan dalam Pemanfaatan Produk Halal** | | | | | |
| IKSK.7891.1.1 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kotayang diterbitkan | Persen | N/A | 0,84 | 1,67 | 3,34 |
| IKSK.7891.1.2 | Nilai literasi halal | Nilai | N/A | 50 | 55 | 60 |
| **RO.7891. PBN.001** | **Kebijakan Penjaminan Produk Halal** | **Rekomen -dasi Kebijakan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.7891. PBN.001.1 | Jumlah hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan | Dokumen | N/A | 50 | 100 | 200 |
| **RO.7891. QDC.001** | **Literasi Halal** | **Layanan** | **N/A** | **0** | **55** | **60** |
| IKRO.7891. QDC.001.1 | Jumlah Literasi Halal | Layanan | N/A | 0 | 55 | 60 |
| **7892 Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an** | | | | | | |
| **SK.7892.1** | **Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi al-Qur'an** | | | | | |
| IKSK.7892.1.1 | Nilai layanan Pentashihan Al-Qur'an | Nilai | 86 | 86 | 86 | 86 |
| IKSK.7892.1.2 | Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an | Nilai | 82 | 82 | 82 | 83 |
| IKSK.7892.1.3 | Presentase Peningkatan Surat Tanda Tashih/ Izin Edar Mushaf Al-Qur'an | Persen | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| IKSK.7892.1.4 | Persentase Peningkatan Masyarakat yang mamanfaatkan literasi Al-Qur'andigital | Persen | 84,57 | 87,43 | 90,29 | 93,14 |
| IKSK.7892.1.5 | Nilai Kualitas Pengembangan dan Pengkajian al-Qur'an | Nilai | N/A | 77 | 78 | 78 |
| IKSK.7892.1.6 | Nilai layanan Museum Bayt Al-Qur'an | Nilai | 86 | 86 | 86 | 86 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **1.000** | **4.500** | **5.000** | **5.500** | **6.000** | **[BIMAS ISLAM] Direktorat Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal** |
| | | | | | | | |
| 4,30 | 6,69 | | | | | | |
| 65 | 70 | | | | | | |
| 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 300 | 400 | | | | | | |
| **65** | **70** | 0 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | |
| 65 | 70 | | | | | | |
| | | **11.836** | **32.892** | **46.121** | **67.602** | **88.580** | **[BMBPSDM] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an** |
| | | | | | | | |
| 87 | 87 | | | | | | |
| 83 | 83 | | | | | | |
| 95,00 | 100,00 | | | | | | |
| 96,00 | 100,00 | | | | | | |
| 79 | 79 | | | | | | |
| 87 | 87 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.7892.1.7 | Persentase Peningkatan Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal | Persen | 87,50 | 90,00 | 92,50 | 95,00 |
| **RO.7892. BAA.001** | **Layanan Bayt Al-Quran Museum Istiqlal dan Dokumentasi** | **Orang** | **75.000** | **47.582** | **115.000** | **135.000** |
| IKRO.7892. BAA.001.1 | Jumlah layanan Museum Bayt Al-Qur'an | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.7892. BAA.001.2 | Jumlah Pengunjung Bayt Al- Qur'an dan Museum Istiqlal | Orang | 75.000 | 47.582 | 115.000 | 135.000 |
| **RO.7892. BAA.002** | **Layanan Al-Quran dan Hasil Kajian Al Quran** | **Orang** | **367.000** | **333.075** | **1.000.000** | **1.500.000** |
| IKRO.7892. BAA.002.1 | Jumlah Masyarakat yang mamanfaatkan literasi Al-Qur'an digital | Orang | 367.000 | 333.075 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| **RO.7892. QAB.001** | **Lembaga Penerbit Al-Quran yang Mendapat Tanda Tashih** | **Lembaga** | **19** | **14** | **40** | **55** |
| IKRO.7892. QAB.001.1 | Jumlah layanan Pentashihan Al-Qur'an | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.7892. QAB.001.2 | Jumlah Penerbit yang mematuhi regulasi penerbitan Al-Qur'an | Lembaga | 19 | 14 | 40 | 55 |
| IKRO.7892. QAB.001.3 | Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an | Dokumen | 19 | 14 | 40 | 55 |
| **RO.7892. BDB.001** | **Layanan Bahan Bacaan Tafsir dan Literasi Al-Quran** | **Lembaga** | **16** | **13** | **32** | **42** |
| IKRO.7892. BDB.001.1 | Jumlah lembaga penyedia Layanan Bahan Bacaan Tafsir dan Literasi Al-Quran | Lembaga | 16 | 13 | 32 | 42 |
| IKRO.7892. BDB.001.2 | Jumlah Bahan Bacaan Tafsir dan Literasi Al-Quran bermuatan ekoteologi | Bahan Bacaan | N/A | 1 | 2 | 2 |
| **7893 Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama** | | | | | | |
| **SK.7893.1** | **Meningkatnya Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Bagi Sumber Daya Manusia Agama dan Keagamaan** | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 97,50 | 100,00 | | | | | | |
| **165.000** | **190.000** | 2.867 | 4.747 | 5.881 | 7.556 | 9.327 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 165.000 | 190.000 | | | | | | |
| **2.000.000** | **2.500.000** | 961 | 9.247 | 14.333 | 24.604 | 32.478 | |
| 2.000.000 | 2.500.000 | | | | | | |
| **75** | **90** | 3.242 | 4.961 | 6.917 | 9.625 | 12.110 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 75 | 90 | | | | | | |
| 75 | 90 | | | | | | |
| **55** | **70** | 4.766 | 13.937 | 18.990 | 25.817 | 34.665 | |
| 55 | 70 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| | | **69.916** | **125.647** | **167.028** | **223.765** | **299.573** | **[BMBPSDM] Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama** |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.7893.1.1 | Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu PengembanganKompetensi SDM Agama dan Keagamaan | Nilai | 90,70 | 90,90 | 91,10 | 91,30 |
| IKSK.7893.1.2 | Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi | Nilai | 88,00 | 88,20 | 88,40 | 88,60 |
| IKSK.7893.1.3 | Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi | Nilai | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 |
| IKSK.7893.1.4 | Persentase Peningkatan Kompetensi manajemen dan kepemimpinan padaSDM Agama dan Keagamaan | Persen | 76,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 |
| IKSK.7893.1.5 | Persentase pengembangan kompetensi yang memanfaatkan platform digital | Persen | 55,00 | 57,00 | 57,00 | 61,00 |
| IKSK.7893.1.6 | Persentase Peningkatan Kompetensi moderasi beragama pada SDM Agamadan Keagamaan. | Persen | 76,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 |
| IKSK.7893.1.7 | Persentase lembaga pengembangan kompetensi yang memperoleh akreditasi Buntuk pelatihan kepemimpinan dan Latsar | Persen | 9,00 | 43,75 | 56,25 | 62,50 |
| **RO.7893. AFA.001** | **Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi** | **NSPK** | **88** | **96** | **144** | **183** |
| IKRO.7893. AFA.001.1 | Jumlah Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensiyang dihasilkan | NSPK | 88 | 96 | 144 | 183 |
| IKRO.7893. AFA.001.2 | Jumlah lembaga pengembangan kompetensi yang memperoleh akreditasi Buntuk pelatihan kepemimpinan dan Latsar | Lembaga | 5 | 7 | 10 | 11 |
| IKRO.7893. AFA.001.3 | Jumlah muatan ekoteologi dalam materi pengembangan kompetensi | Konten | N/A | 1 | 2 | 2 |
| **RO.7893. SCJ.001** | **Peserta Pelatihan SDM Masyarakat yang Moderat dan Kompeten** | **Orang** | **1.670** | **4.260** | **3.100** | **4.600** |
| IKRO.7893. SCJ.001.1 | Jumlah Peserta Pelatihan moderasi beragama pada SDM Agama danKeagamaan | Orang | 1.670 | 4.260 | 3.100 | 4.600 |
| IKRO.7893. SCJ.001.2 | Jumlah Peserta Pelatihan moderasi beragama yang menjadi sasaran evaluasipasca pengembangan kompetensi | Orang | N/A | 4.260 | 3.100 | 4.600 |
| **RO.7893. EBC.001** | **Fasilitasi Penunjang Pengembangan Kompetensi** | **Layanan** | **12** | **17** | **20** | **30** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 91,50 | 91,70 | | | | | | |
| 88,80 | 89,00 | | | | | | |
| 94,00 | 95,00 | | | | | | |
| 84,00 | 85,00 | | | | | | |
| 63,00 | 65,00 | | | | | | |
| 84,00 | 85,00 | | | | | | |
| 75,00 | 87,50 | | | | | | |
| **213** | **248** | **6.779** | **17.131** | **23.274** | **31.409** | **38.757** | |
| 213 | 248 | | | | | | |
| 13 | 15 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| **6.600** | **8.600** | **15.310** | **12.702** | **19.483** | **28.928** | **39.719** | |
| 6.600 | 8.600 | | | | | | |
| 6.600 | 8.600 | | | | | | |
| **40** | **50** | **8.392** | **6.890** | **6.914** | **6.962** | **8.473** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.7893. EBC.001.1 | Jumlah sarana dan prasarana layanan penyelenggaraan pengembangankompetensi | Unit | N/A | 17 | 20 | 30 |
| **RO.7893. EBC.996** | **Layanan Pendidikan dan Pelatihan** | **Orang** | **19.675** | **11.950** | **26.291** | **32.211** |
| IKRO.7893. EBC.996.1 | Jumlah peserta peningkatan kompetensi manajemen dan kepemimpinan padaSDM Agama dan Keagamaan | Orang | 19.675 | 11.950 | 26.291 | 32.211 |
| IKRO.7893. EBC.996.2 | Jumlah peserta pengembangan kompetensi yang memanfaatkan platformdigital | Orang | N/A | 6.812 | 14.986 | 19.649 |
| **7894 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keagamaan** | | | | | | |
| **SK.7894.1** | **Meningkatnya Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Keagamaan** | | | | | |
| IKSK.7894.1.1 | Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu PengembanganKompetensi SDM Keagamaan | Nilai | 84,00 | 84,20 | 84,40 | 84,60 |
| IKSK.7894.1.2 | Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDMkeagamaan | Nilai | 88,00 | 88,20 | 88,40 | 88,60 |
| IKSK.7894.1.3 | Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi SDMkeagamaan | Nilai | 84,00 | 91 | 92 | 93 |
| IKSK.7894.1.4 | Persentase lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yangmemperoleh akreditasi A | Persen | 70,59 | 70,59 | 76,47 | 76,47 |
| IKSK.7894.1.5 | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM keagamaan | Persen | 66,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 |
| IKSK.7894.1.6 | Persentase pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memanfaatkanplatform digital | Nilai | 76,00 | 77 | 78 | 79 |
| **RO.7894. AFA.001** | **Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan** | **NSPK** | **84,00** | **93** | **142** | **183** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 40 | 50 | | | | | | |
| **45.300** | **58.389** | **39.435** | **88.924** | **117.356** | **156.466** | **212.624** | |
| 45.300 | 58.389 | | | | | | |
| 28.539 | 37.953 | | | | | | |
| | | **40.957** | **71.952** | **93.919** | **122.736** | **150.388** | **[BMBPSDM] Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Keagamaan** |
| | | | | | | | |
| 84,80 | 85,00 | | | | | | |
| 88,80 | 89,00 | | | | | | |
| 94 | 95,00 | | | | | | |
| 82,35 | 88,24 | | | | | | |
| 80,00 | 81,00 | | | | | | |
| 80 | 81,00 | | | | | | |
| **212** | **241** | **5.975** | **28.464** | **36.317** | **46.882** | **56.577** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.7894. AFA.001.1 | Jumlah Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan KompetensiSDM Keagamaan yang dihasilkan | NSPK | 84,00 | 93 | 142 | 183 |
| IKRO.7894. AFA.001.2 | Jumlah sarana prasarana layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensiSDM keagamaan | Layanan | 1,00 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.7894. AFA.001.3 | Jumlah lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yangmemperoleh akreditasi A | Lembaga | N/A | 12 | 13 | 14 |
| IKRO.7894. AFA.001.4 | Jumlah muatan ekoteologi dalam materi pengembangan kompetensi SDMKeagamaan | Konten | N/A | 1 | 2 | 2 |
| **RO.7894. SCJ.001** | **SDM Keagamaan yang Ditingkatkan Kompetensinya** | **Orang** | **14.310** | **321.220** | **342.310** | **424.810** |
| IKRO.7894. SCJ.001.1 | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan yang menjadisasaran evaluasi pasca pengembangan kompetensi | Orang | 14.310 | 321.220 | 342.310 | 424.810 |
| IKRO.7894. SCJ.001.2 | Jumlah SDM Keagamaan yang Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 14.310 | 321.220 | 342.310 | 424.810 |
| IKRO.7894. SCJ.001.3 | Jumlah peserta pengembangan kompetensi SDM keagamaan yangmemanfaatkan platform digital | Orang | N/A | 247.339 | 267.002 | 335.600 |
| **7895 Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama** | | | | | | |
| **SK.7895.1** | **Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pembangunan bidang agama** | | | | | |
| IKSK.7895.1.1 | Persentase Naskah kebijakan pembangunan bidang Agama yang dihasilkan | Persen | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 |
| IKSK.7895.1.2 | Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yangterfasilitasi penguatan moderasi beragama | Nilai | N/A | 76,00 | 78,00 | 80,00 |
| IKSK.7895.1.3 | Nilai pemanfaatan naskah kebijakan ekoteologi yang dihasilkan | Nilai | N/A | 80,00 | 81,00 | 82,00 |
| IKSK.7895.1.4 | Indeks Kualitas Kebijakan | Nilai | 80,67 | 80,67 | 80,67 | 81,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 212 | 241 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 15 | 16 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| **509.810** | **594.810** | **34.982** | **43.487** | **57.602** | **75.854** | **93.811** | |
| 509.810 | 594.810 | | | | | | |
| 509.810 | 594.810 | | | | | | |
| 407.848 | 481.796 | | | | | | |
| | | **58.833** | **72.790** | **104.513** | **146.983** | **189.630** | **[BMBPSDM] Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Agama** |
| | | | | | | | |
| 94,00 | 95,00 | | | | | | |
| 82,00 | 84,00 | | | | | | |
| 83,00 | 84,00 | | | | | | |
| 81,00 | 81,50 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.7895. PBN.001** | **Indeks Kerukunan Umat Beragama** | **Rekomen-dasi Kebijakan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.7895. PBN.001.1 | Jumlah kegiatan survey indeks kerukunan umat beragama | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.7895. PBN.002** | **Naskah Kebijakan Moderasi Beragama dan Pembangunan Agama** | **Rekomen-dasi Kebijakan** | **31** | **14** | **30** | **45** |
| IKRO.7895. PBN.001.1 | Jumlah Rekomendasi kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan | Rekomen-dasi Kebijakan | 31 | 11 | 26 | 40 |
| IKRO.7895. PBN.001.2 | Jumlah Rekomendasi kebijakan ekoteologi yang dihasilkan | Rekomen-dasi Kebijakan | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.7895. PBN.001.3 | Jumlah Rekomendasi kebijakan Moderasi Beragama yang dihasilkan | Rekomen-dasi Kebijakan | N/A | 2 | 3 | 4 |
| **RO.7895. QDC.001** | **Sarasehan Tokoh Agama dan Tokoh Budaya** | **Orang** | **N/A** | **10.000** | **20.000** | **30.000** |
| IKRO.7895. QDC.001.1 | Jumlah peserta Sarasehan Tokoh Agama dan Tokoh Budaya | Orang | N/A | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| **RO.7895. QDC.002** | **Forum Internasional Tokoh Lintas Agama** | **Orang** | **N/A** | **500** | **2.000** | **3.000** |
| IKRO.7895. QDC.002.1 | Jumlah peserta Forum Internasional Tokoh Lintas Agama | Orang | N/A | 500 | 2.000 | 3.000 |
| **RO.7895. QDD.001** | **Kelompok masyarakat yang memperoleh wawasan penguatan moderasi beragama** | **Kelompok Masyara-kat** | **N/A** | **12** | **15** | **18** |
| IKRO.7895. QDD.001.1 | Jumlah Kelompok masyarakat yang memperoleh wawasan penguatanmoderasi beragama | Kelompok Masyarakat | N/A | 12 | 15 | 18 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **1** | **1** | **5.399** | **5.495** | **5.769** | **6.066** | **6.490** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **60** | **75** | **29.054** | **29.795** | **37.244** | **48.417** | **61.490** | |
| 54 | 68 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | |
| **40.000** | **50.000** | **7.952** | **17.000** | **30.000** | **50.000** | **66.000** | |
| 40.000 | 50.000 | | | | | | |
| **4.000** | **5.000** | **12.108** | **18.000** | **28.000** | **38.000** | **50.160** | |
| 4.000 | 5.000 | | | | | | |
| **20** | **23** | **4.321** | **2.500** | **3.500** | **4.500** | **5.490** | |
| 20 | 23 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **7920 Peningkatan Layanan Penilaian Buku Agama, Lektur dan Literasi Keagamaan** | | | | | | |
| **SK.7920.1** | **Meningkatnya kualitas Layanan Perbukuan Agama, Lektur dan Literasi Keagamaan** | | | | | |
| IKSK.7920.1.1 | Persentase Peningkatan Buku Agama yang mendapat tanda layak terbit | Persen | N/A | 0,00 | 30,00 | 35,00 |
| IKSK.7920.1.2 | Persentase Peningkatan inovasi program literasi keagamaan dalammendukung terwujudnya kerukunan umat beragama | Persen | N/A | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| **RO.7920. QAB.001** | **Layanan Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **10** | **10** |
| IKRO.7920. QAB.001.1 | Jumlah Buku Agama yang mendapat tanda layak terbit | Jumlah | N/A | 0 | 10 | 10 |
| **RO.7920. BDD.001** | **Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Lektur dan Literasi Keagamaan** | **Kelompok Masyara-kat** | **N/A** | **0** | **4** | **6** |
| IKRO.7920. BDD.001.1 | Jumlah Kelompok Masyarakat yamg mendapatkan pembinaan melaluiprogram inovasi literasi keagamaan | Kelompok Masyarakat | N/A | 0 | 4 | 6 |
| **025.DF - Program Wajib Belajar 13 Tahun** | | | | | | |
| **SP.3** | **Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah** | | | | | |
| IKSP.3.1 | Persentase siswa satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama danpendidikan keagamaan penerima PIP dalam satu kohort yang lulus tepat waktu | Orang | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 88,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **0,000** | **14,136** | **14,136** | **19,203** | **19,203** | **[SETJEN] Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan** |
| | | | | | | | |
| 35,00 | 40,00 | | | | | | |
| 25,00 | 25,00 | | | | | | |
| **15** | **15** | **0** | **8** | **8** | **10** | **10** | |
| 15 | 15 | | | | | | |
| **6** | **6** | **0** | **6** | **6** | **9** | **9** | |
| 6 | 6 | | | | | | |
| | | **17.563.982** | **19.243.958** | **20.910.886** | **22.669.369** | **24.511.825** | **DITJEN PENDIS, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU, DITJEN BIMAS BUDDHA** |
| | | | | | | | |
| 90,00 | 94,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.3.2 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikaninklusif | Persen | 59,76 | 62,62 | 65,41 | 68,14 |
| IKSP.3.3 | Persentase satuan pendidikan keagamaan katolik yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikaninklusif | Persen | 41,90 | 19,66 | 39,32 | 58,97 |
| IKSP.3.4 | Persentase satuan pendidikan widyalaya dan pendidikan keagamaan hindu yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukungsatuan pendidikan inklusif | Persen | N/A | 3,00 | 5,00 | 8,00 |
| IKSP.3.5 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikaninklusif | Persen | N/A | 13,33 | 15,56 | 17,78 |
| IKSP.3.6 | Persentase siswa madrasah dan pesantren dalam satu kohort yang lulus tepatwaktu | Persen | 79,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 |
| IKSP.3.7 | Persentase siswa pendidikan keagamaan Kristen dalam satu kohort yang lulustepat waktu | Persen | 92,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 |
| IKSP.3.8 | Persentase siswa widyalaya dan pendidikan keagamaan Hindu dalam satukohort yang lulus tepat waktu | Persen | 100,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 |
| IKSP.3.9 | Persentase siswa satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama dan pendidikan keagamaan penerima PIP dalam satu kohort yang lulus tepatwaktu | Persen | N/A | 80,00 | 85,00 | 88,00 |
| KSP.3.10 | Persentase siswa pendidikan keagamaan Buddha dalam satu kohort yang lulustepat waktu | Persen | N/A | 80,00 | 82,00 | 84,00 |
| IKSP.3.11 | Persentase siswa pendidikan keagamaan Katolik dalam Satu Kohort yanglulus tepat waktu | Persen | N/A | 97,47 | 97,99 | 98,18 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70,80 | 73,41 | | | | | | |
| 79.49 | 96,00 | | | | | | |
| 18,00 | 28,00 | | | | | | |
| 20,00 | 22,22 | | | | | | |
| 86,00 | 88,00 | | | | | | |
| 95,00 | 96,00 | | | | | | |
| 86,00 | 88,00 | | | | | | |
| 90,00 | 94,00 | | | | | | |
| 86,00 | 88,00 | | | | | | |
| 98,33 | 98,57 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **8067 Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kekhasan Agama, dan Pendidikan Keagamaan** | | | | | | |
| **SK.8067.1** | **Tersedianya Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kekhasan Agama, dan Pendidikan Keagamaan** | | | | | |
| IKSK.8067.1. | Persentase Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah denganKekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang tepat Sasaran | Persen | 24,30 | 0,00 | 24,70 | 24,90 |
| **RO.8067. QEN.001** | **Bantuan PIP Bagi MI/SD/Sederajat** | | | | **748.107** | **785.032** |
| IKRO.8067. QEN.001.1 | Jumlah Santri PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah yang MenerimaPIP | Orang | 0 | 0 | 24.133 | 24.779 |
| IKRO.8067. QEN.001.2 | Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah yang Menerima PIP | Orang | N/A | 0 | 719.746 | 755.734 |
| IKRO.8067. QEN.001.3 | Jumlah Siswa SDTK yang Menerima PIP | Orang | 2652 | 0 | 3.303 | 3.574 |
| IKRO.8067. QEN.001.4 | Jumlah Siswa Tingkat Adi yang Menerima PIP | Orang | 710 | 0 | 925 | 945 |
| **RO.8067. QEN.002** | **Bantuan PIP Bagi MTs/SMP/Sederajat** | | | | **1.068.963** | **1.135.243** |
| IKRO.8067. QEN.002.1 | Jumlah Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah yang MenerimaPIP | Orang | 92.533 | 0 | 95.078 | 97.622 |
| IKRO.8067. QEN.002.2 | Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah yang Menerima PIP | Orang | N/A | 0 | 967.360 | 1.030.646 |
| IKRO.8067. QEN.002.3 | Jumlah Siswa SMPTK yang Menerima PIP | Orang | 4895,00 | 0 | 6.173 | 6.563 |
| IKRO.8067. QEN.002.4 | Jumlah Siswa Tingkat Madya yang Menerima PIP | Orang | 260,00 | 0 | 352 | 412 |
| **RO.8067. QEN.003** | **Bantuan PIP Bagi MA/SMA/Sederajat** | | | | **478.292** | **499.644** |
| IKRO.8067. QEN.003.1 | Jumlah Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah yang MenerimaPIP | Orang | 45.571 | 0 | 46.824 | 48.077 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **0** | **2.160.663** | **2.272.634** | **2.392.575** | **2.518.615** | **[SETJEN] Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan** |
| | | | | | | | |
| 25,10 | 25,30 | | | | | | |
| **823.745** | **824.550** | **0** | **497.491** | **520.993** | **545.592** | **571.287** | |
| 25.425 | 26.071 | | | | | | |
| 793.520 | 793.520 | | | | | | |
| 3.825 | 3.984 | | | | | | |
| 975 | 975 | | | | | | |
| **1.205.684** | **1.280.558** | **0** | **801.722** | **851.432** | **904.263** | **960.418** | |
| 100.167 | 102.712 | | | | | | |
| 1.098.071 | 1.169.907 | | | | | | |
| 6.954 | 7.447 | | | | | | |
| 492 | 492 | | | | | | |
| **523.039** | **547.450** | **0** | **860.925** | **899.359** | **941.470** | **985.410** | |
| 49.331 | 50.584 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.8067. QEN.003.2 | Jumlah Siswa Madrasah Aliyah yang Menerima PIP | Orang | N/A | 0 | 413.168 | 431.861 |
| IKRO.8067. QEN.003.3 | Jumlah Siswa SMTK/SMAK yang Menerima PIP | Orang | 11337,00 | 0 | 13.018 | 14.127 |
| IKRO.8067. QEN.003.4 | Jumlah Siswa SMAKAT yang Menerima PIP | Orang | N/A | 0 | 4.650 | 4.927 |
| IKRO.8067. QEN.003.5 | Jumlah Siswa Tingkat Utama yang Menerima PIP | Orang | 502,00 | 0 | 632 | 652 |
| **RO.8067. BAA.001** | **Layanan Penyaluran PIP Pendidikan Dasar dan Menengah** | | | | | |
| RO.8067. BAA.001.1 | Jumlah PIP yang tersalurkan | Laporan | N/A | 0 | 4 | 4 |
| **2128 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam** | | | | | | |
| **SK.2128.1** | **Meningkatnya sarana dan prasarana Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang berkualitas** | | | | | |
| IKSK.2128.1.1 | Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaanyang memenuhi SNP sarpras | Persen | N/A | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| IKSK.2128.1.2 | Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdayaberbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan | Persen | N/A | 15,00 | 15,30 | 15,60 |
| IKSK.2128.1.3 | Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaanyang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Persen | 3,04 | 5,04 | 7,04 | 9,04 |
| IKSK.2128.1.4 | Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan pesantren dansatuan pendidikan keagamaan | Persen | 70,10 | 75,10 | 80,20 | 85,30 |
| IKSK.2128.1.5 | Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan daerah 3 T | Persen | N/A | 6,55 | 8,75 | 10,95 |
| IKSK.2128.1.6 | Persentase Anak Kelas ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA) | Persen | N/A | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
| IKSK.2128.1.7 | Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatansekolah pada Madrasah | Persen | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 452.426 | 473.970 | | | | | | |
| 15.330 | 16.633 | | | | | | |
| 5.220 | 5.531 | | | | | | |
| 732 | 732 | | | | | | |
| | | 0 | 525 | 850 | 1.250 | 1.500 | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| | | **1.101.542** | **1.028.585** | **1.117.703** | **1.206.910** | **1.296.200** | **[DITJEN PENDIS] Direktorat Pesantren** |
| | | | | | | | |
| 25,00 | 30,00 | | | | | | |
| 15,90 | 16,20 | | | | | | |
| 11,04 | 13,04 | | | | | | |
| 90,40 | 95,60 | | | | | | |
| 13,15 | 15,35 | | | | | | |
| 13,00 | 15,00 | | | | | | |
| 0,20 | 0,35 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2128.1.8 | Persentase satuan pendidikan nonformal Islam yang direvitalisasi | Persen | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 |
| IKSK.2128.1.9 | Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan padapendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal | Persen | 56,00 | 65,00 | 75,00 | 84,00 |
| IKSK.2128.1.10 | Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan padaPesantren | Anak | 261.197 | 261.297 | 261.397 | 261.497 |
| **SK.2128.2** | **Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan** | | | | | |
| IKSK.2128.2.1 | Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulusdengan predikat jayyid jiddan | Persen | N/A | 10 | 15 | 20 |
| **RO 2128 QEN 001** | **Santri PPS Ula/ Paket A/Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP** | **Orang** | **23.487** | **23.487** | **0** | **0** |
| IKRO 2128 QEN 001.1 | Jumlah Santri PPS Ula/ Paket A/Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP | Orang | 22.841 | 23.487 | 0 | 0 |
| **RO 2128 QEI 002** | **Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana** | **Lembaga** | **1.545** | **1.547** | **1.624** | **1.706** |
| IKRO 2128 QEI 002.1 | Jumlah pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang memperolehbantuan sarana dan Prasarana pembelajaran (peralatan belajar, pembangunan atau rehabilitasi rkb, laboratorium, perpustakaan, asrama, tempat ibadah, sanitasi dan penunjang digitalisasi) | Lembaga | 1.545 | 1.547 | 1.624 | 1.706 |
| IKRO 2128 QEI 002.2 | Jumlah satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yangmenyelenggarakan pendidikan inklusif | Lembaga | 1.308 | 2.169 | 3.030 | 3.891 |
| **RO 2128 QEI 003** | **Pendidikan Lifeskill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren** | **Lembaga** | **1.500** | **4.500** | **4.514** | **4.527** |
| IKRO 2128 QEI 003.1 | Jumlah Pendidikan Lifeskill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren | Lembaga | 3.585 | 5.085 | 6.585 | 8.085 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 20,00 | 21,00 | | | | | | |
| 93,00 | 100,00 | | | | | | |
| 261.597 | 261.697 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25 | 30 | | | | | | |
| **0** | **0** | **10.569** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **1.791** | **1.880** | **19.500** | **20.429** | **21.401** | **22.420** | **23.488** | |
| 1.791 | 1.880 | | | | | | |
| 4.752 | 5.613 | | | | | | |
| **4.541** | **4.554** | **280.000** | **285.600** | **291.200** | **296.800** | **302.400** | |
| 9.585 | 11.085 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO 2128 QEI 003.2 | Jumlah pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdayaberbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan | Lembaga | N/A | N/A | 1.000 | 2.000 |
| IKRO 2128 QEI 003.3 | Jumlah Lembaga Yang Mendapatkan Bantuan Pendidikan Lifeskill danPengembangan Ekonomi Pesantren (Kemandirian Pesantren) | Lembaga | N/A | 5.085 | 6.585 | 8.085 |
| **RO 2128 QEN 002** | **Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP** | **Orang** | **92.533** | **92.533** | **0** | **0** |
| IKRO 2128 QEN 002.1 | Jumlah Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP | Orang | 92.533 | 92.533 | 0 | 0 |
| **RO 2128 QEN 003** | **Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP** | **Orang** | **45.571** | **45.571** | **0** | **0** |
| IKRO 2128 QEN 003.1 | Jumlah Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP | Orang | 45.571 | 45.571 | 0 | 0 |
| **RO 2128 QEN 005** | **Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/Muadalah/ PPS Penerima BOS** | **Orang** | **31.130** | **36.621** | **42.112** | **47.603** |
| IKRO 2128 QEN 005.1 | Jumlah Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/ Muadalah/PPS Penerima BOS | Orang | 31.130 | 36.621 | 42.112 | 47.603 |
| IKRO 2128 QEN 005.2 | Jumlah Anak Kelas 1 Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA) | Orang | 2.028 | 2.528 | 3.028 | 3.528 |
| **RO 2128 QEN 006** | **Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/ Muadalah/PPS Penerima BOS** | **Orang** | **162.700** | **205.024** | **247.348** | **289.672** |
| IKRO 2128 QEN 006.1 | Jumlah Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/ Muadalah/PPS Penerima BOS | Orang | 162.700 | 205.024 | 247.348 | 289.672 |
| **RO 2128 QEN 007** | **Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/ PPS Penerima BOS** | **Orang** | **89.007** | **127.545** | **166.083** | **204.621** |
| IKRO 2128 QEN 007.1.1 | Jumlah Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/ Muadalah/PPS Penerima BOS | Orang | 89.007 | 127.545 | 166.083 | 204.621 |
| **RO 2128 QEI 001** | **Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)** | **Lembaga** | **10.643** | **15.174** | **15.580** | **15.986** |
| IKRO 2128 QEI 001.1 | Jumlah Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) | Lembaga | 9.554 | 9.824 | 10.094 | 10.364 |
| IKRO 2128 QEI 001.2 | Jumlah pesantren yang mendapat pendampingan teknis dalam pemanfaatandan pelaporan dana BOP | Lembaga | 9.283 | 9.824 | 10.365 | 10.906 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3.000 | 4.000 | | | | | | |
| 9.585 | 11.085 | | | | | | |
| **0** | **0** | **69.399** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **82.027** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **53.094** | **58.585** | **34.905** | **40.322** | **45.739** | **51.157** | **56.573** | |
| 53.094 | 58.585 | | | | | | |
| 4.028 | 4.528 | | | | | | |
| **331.996** | **374.320** | **222.834** | **257.058** | **291.282** | **325.507** | **359.730** | |
| 331.996 | 374.320 | | | | | | |
| **243.159** | **281.697** | **186.388** | **215.306** | **244.223** | **273.141** | **302.056** | |
| 243.159 | 281.697 | | | | | | |
| **16.392** | **16.798** | **180.920** | **194.120** | **207.320** | **220.520** | **233.720** | |
| 10.634 | 10.905 | | | | | | |
| 11.447 | 11.988 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO 2128 QEI 001.3 | Jumlah satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi | Lembaga | 6.887 | 7.317 | 7.747 | 8.178 |
| IKRO 2128 QEI 001.4 | Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikanpesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal | Orang | N/A | 67 | 101 | 134 |
| IKRO 2128 QEI 001.5 | Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan padapendidikan pesantren dan keagamaan Islam | Orang | 161.591 | 161.591 | 177.624 | 179.578 |
| **RO 2128 BAA 001** | **Layanan Legalitas Ijazah dan Pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam** | **Akta** | **2** | **2** | **4** | **4** |
| IKRO 2128 BAA 001.1 | Jumlah Layanan Legalitas Ijazah dan Pendirian Lembaga PendidikanKeagamaan Islam | Layanan | 2 | 2 | 4 | 4 |
| **2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah** | | | | | | |
| **SK.2129.1** | **Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa madrasah** | | | | | |
| IKSK.2129.1.1 | Persentase siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik | Persen | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 76,00 |
| **RO.2129 QEN 005** | **Siswa MI Penerima BOS** | **Orang** | **4.512.595** | **4.265.178** | **4.652.921** | **5.075.914** |
| IKRO.2129 QEN 005.1 | Jumlah Siswa Madrasah MI Penerima BOS | Orang | N/A | 4.254.742 | 4.652.921 | 5.075.914 |
| IKRO.2129 QEN 005.2 | Jumlah Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA) | Orang | N/A | 342.736 | 359.873 | 377.867 |
| **RO.2129 QEN 006** | **Siswa MTs Penerima BOS** | **Orang** | **3.245.429** | **3.270.479** | **3.540.519** | **3.832.855** |
| IKRO.2129 QEN 006.1 | Jumlah Siswa Madrasah MTs Penerima BOS | Orang | N/A | 3.270.479 | 3.540.519 | 3.832.855 |
| **RO.2129 QEN 007** | **Siswa MA Penerima BOS** | **Orang** | **1.478.485** | **1.627.097** | **1.689.678** | **1.754.665** |
| IKRO.2129 QEN 007.1 | Jumlah Siswa Madrasah MA Penerima BOS | Orang | N/A | 1.627.097 | 1.689.678 | 1.754.665 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 8.608 | 9.039 | | | | | | |
| 168 | 202 | | | | | | |
| 181.553 | 183.550 | | | | | | |
| **4** | **4** | **15.000** | **15.750** | **16.538** | **17.364** | **18.233** | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| | | **16.144.733** | **15.735.331** | **17.157.147** | **18.659.251** | **20.242.245** | **[DITJEN PENDIS] Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan** |
| | | | | | | | |
| 77,00 | 78,00 | | | | | | |
| **5.537.361** | **6.040.758** | **4.507.578** | **4.917.358** | **5.364.390** | **5.852.062** | **6.384.068** | |
| 5.537.361 | 6.040.758 | | | | | | |
| 396.760 | 416.598 | | | | | | |
| **4.149.329** | **4.491.934** | **4.233.819** | **4.583.400** | **4.961.846** | **5.371.540** | **5.815.061** | |
| 4.149.329 | 4.491.934 | | | | | | |
| **1.822.152** | **1.892.235** | **3.155.334** | **3.276.693** | **3.402.720** | **3.533.594** | **3.669.501** | |
| 1.822.152 | 1.892.235 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2129 QEN 007.2 | Jumlah siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik | Orang | N/A | 1.363.920 | 1.379.966 | 1.396.012 |
| **RO.2129 QEN 008** | **Siswa RA Penerima BOP** | **Orang** | **1.353.594** | **1.362.526** | **1.439.650** | **1.521.140** |
| IKRO.2129 QEN 008.1 | Jumlah Siswa RA Penerima BOP | Orang | N/A | 1.362.526 | 1.439.650 | 1.521.140 |
| **SK.2129.2** | **Meningkatnya sarana dan prasarana Madrasah yang berkualitas** | | | | | |
| IKSK.2129.2.1 | Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana | Persen | 42,08 | 46,23 | 50,23 | 54,21 |
| IKSK.2129.2.2 | Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Persen | 1,15 | 1,61 | 2,06 | 2,52 |
| IKSK.2129.2.3 | Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan | Persen | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
| IKSK.2129.2.4 | Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikandaerah 3T | Persen | N/A | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| IKSK.2129.2.5 | Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA) | Persen | N/A | 10,00 | 12,00 | 14,00 |
| IKSK.2129.5.6 | Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatansekolah pada Madrasah | Persen | 26,92 | 28,64 | 30,35 | 32,06 |
| **RO.2129. BAA.001** | **Layanan Legalitas Ijazah dan Pendirian Madrasah** | **Orang** | **1** | **0** | **1** | **1** |
| IKRO.2129. BAA.001.1 | Jumlah Layanan Legalitas Ijazah | Layanan | 2 | 0 | 2 | 2 |
| IKRO.2129. BAA.001.2 | Jumlah Layanan Pendirian Madrasah Negeri | Layanan | N/A | 0 | 5 | 5 |
| IKRO.2129. BAA.001.3 | Jumlah Layanan Pendirian Madrasah Swasta | Layanan | N/A | 0 | 2 | 2 |
| IKRO.2129. BAA.001.4 | Jumlah Layanan Penegrian Madrasah | Layanan | N/A | 0 | 2 | 2 |
| **RO.2129 RBI 001** | **Prasarana Madrasah Pemenuhan SPM** | **Lembaga** | **32** | **37** | **42** | **47** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1.412.059 | 1.428.105 | | | | | | |
| **1.607.242** | **1.698.218** | **1.024.346** | **1.082.328** | **1.143.592** | **1.208.323** | **1.276.719** | |
| 1.607.242 | 1.698.218 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 58,21 | 62,19 | | | | | | |
| 2,98 | 3,43 | | | | | | |
| 0,95 | 1,00 | | | | | | |
| 0,20 | 0,25 | | | | | | |
| 16,00 | 18,00 | | | | | | |
| 33,77 | 35,49 | | | | | | |
| **2** | **2** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.575** | **1.575** | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| **52** | **57** | **5.051** | **5.253** | **5.463** | **5.682** | **6** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2129 RBI 001.1 | Jumlah madrasah yang memperoleh bantuan Prasarana pembelajaran (pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, asrama siswa, tempat ibadah, sanitasi dan fasilitas penunjang digitalisasi) | Lembaga | 32 | 37 | 42 | 47 |
| **RO.2129 RBI 002** | **Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)** | **Lembaga** | **313** | **179** | **187** | **197** |
| IKRO.2129 RBI 002.1 | Jumlah madrasah yang ditingkatkan prasarananya melalui sumber pembiayaanSBSN | Lembaga | N/A | 177 | 184 | 191 |
| IKRO.2129 RBI 002.2 | Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Lembaga | N/A | 177 | 184 | 191 |
| **RO.2129. RAA.001** | **Sarana Madrasah Menunjang Pembelajaran** | **Unit** | **101** | **5.255** | **5.457** | **5.667** |
| IKRO.2129. RAA.001.1 | Jumlah madrasah yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran(peralatan belajar, laboratorium, ekstrakurikuler dan multimedia) | Unit | N/A | 200 | 208 | 216 |
| **RO.2129 QEI 003** | **Bantuan Pengembangan Madrasah Inklusif** | **Lembaga** | **12** | **5** | **10** | **10** |
| IKRO.2129 QEI 003.1 | Jumlah madrasah yang memperoleh pengadaan sarana untuk siswaberkebutuhan khusus sesuai standar pendidikan inklusif | Lembaga | N/A | 5 | 800 | 816 |
| **RO.2129 QEI 002** | **Bantuan Madrasah Daerah 3T** | **Lembaga** | **40** | **40** | **73** | **74** |
| IKRO.2129 QEI 002.1 | Jumlah Siswa Daerah 3T yang Memperoleh Bantuan Pendidikan | Lembaga | N/A | 22 | 120 | 122 |
| **RO.2129. QEN.001** | **Siswa Madrasah MI Penerima PIP** | **Orang** | **939.607** | **1.028.209** | **0** | **0** |
| IKRO.2129. QEN.001.1 | Jumlah Siswa Madrasah MI Penerima PIP | Orang | N/A | 1.028.209 | 0 | 0 |
| **RO.2129. QEN.002** | **Siswa Madrasah MTs Penerima PIP** | **Orang** | **745.086** | **907.961** | **0** | **0** |
| IKRO.2129. QEN.002.1 | Jumlah Siswa Madrasah MTs Penerima PIP | Orang | N/A | 907.961 | 0 | 0 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 52 | 57 | | | | | | |
| **207** | **227** | **871.927** | **1.238.584** | **1.605.242** | **1.971.899** | **2.338.557** | |
| 199 | 207 | | | | | | |
| 199 | 207 | | | | | | |
| **5.885** | **6.111** | **516.448** | **526.449** | **536.449** | **546.449** | **556.449** | |
| 225 | 234 | | | | | | |
| **10** | **11** | **2.500** | **2.550** | **2.601** | **2.653** | **2.706** | |
| 832 | 849 | | | | | | |
| **76** | **77** | **1.500** | **1.530** | **1.561** | **1.592** | **1.624** | |
| 125 | 127 | | | | | | |
| **0** | **0** | **462.694** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **680.971** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2129. QEN.003** | **Siswa Madrasah MA Penerima PIP** | **Orang** | **320.372** | **393.493** | **0** | **0** |
| IKRO.2129. QEN.003.1 | Jumlah Siswa Madrasah MA Penerima PIP | Orang | N/A | 393.493 | 0 | 0 |
| **RO.2129. QEI.004** | **Bantuan Pengembangan Peningkatan Mutu UKS/M** | **Lembaga** | **N/A** | **200** | **211** | **223** |
| IKRO.2129. QEI.004.1 | Jumlah madrasah yang menerima bantuan sarana prasarana UKS sesuaistandar layanan kesehatan dasar | Lembaga | N/A | 100 | 106 | 112 |
| IKRO.2129. QEI.004.2 | Jumlah madrasah yang melakukan penguatan koordinasi lintas sektor dalampelaksanaan UKS/M (puskesmas, komite sekolah, dinas kesehatan) | Lembaga | N/A | 100 | 106 | 111 |
| **RO.2129. SBB.001** | **Penyelenggaraan Madrasah Unggulan** | **Lembaga** | **7924** | **12.188** | **13.651** | **15.289** |
| IKRO.2129. SBB.001.1 | Jumlah Penyelenggaraan Madrasah Unggulan | Lembaga | N/A | 12.188 | 13.651 | 15.289 |
| **2136 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen** | | | | | | |
| **SK.2136.1** | **Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen** | | | | | |
| IKSK.2136.1.1 | Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen yang lulus denganpredikat sangat baik | Persen | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| **RO.2136. QEN.004** | **Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMTK/ SMAK** | **Orang** | **13.258** | **13.333** | **14.096** | **14.483** |
| IKRO.2136. QEN.004 | Jumlah Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS | Orang | 13.258 | 13.333 | 14.096 | 14.483 |
| **RO.2136. QEN.005** | **Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMPTK** | **Orang** | **6.270** | **6.627** | **7.251** | **7.754** |
| IKRO.2136. QEN.005.1 | Jumlah Siswa SMPTK Penerima BOS | Orang | 6.270 | 6.627 | 7.251 | 7.754 |
| IKRO.2136. QEN.005.2 | Jumlah siswa satuan pendidikan keagamaaan Kristen yang lulus denganpredikat sangat baik | Orang | 1.216 | 1.527 | 1.925 | 2.302 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **0** | **0** | **614.976** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **236** | **249** | **1.500** | **1.531** | **1.561** | **1.592** | **1.622** | |
| 118 | 125 | | | | | | |
| 118 | 124 | | | | | | |
| **17.123** | **19.178** | **66.088** | **98.155** | **130.222** | **162.290** | **194.357** | |
| 17.123 | 19.178 | | | | | | |
| | | **105.552** | **145.092** | **166.534** | **193.931** | **221.459** | **[BIMAS KRISTEN] Direktorat Pendidikan Agama Kristen** |
| | | | | | | | |
| 9,00 | 10,00 | | | | | | |
| **14.839** | **15.268** | **23.758** | **30.559** | **27.256** | **28.256** | **29.256** | |
| 14.839 | 15.268 | | | | | | |
| **8.302** | **8.883** | **8.946** | **9.257** | **10.220** | **10.942** | **11.140** | |
| 8.302 | 8.883 | | | | | | |
| 2.675 | 3.120 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2136. QEN.006** | **Bantuan Operasional Siswa (BOS) SDTK** | **Orang** | **4.807** | **5.490** | **6.154** | **6.547** |
| IKRO.2136. QEN.006 | Jumlah Siswa SDTK Penerima BOS | Orang | 4.807 | 5.490 | 6.154 | 6.547 |
| **SK.2136.2** | **Meningkatnya sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang berkualitas** | | | | | |
| IKSK.2136.2.1 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memperolehpeningkatan sarana prasarana | Persen | 59,76 | 62,62 | 65,41 | 68,14 |
| IKSK.2136.2.2 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menyelenggarakanpendidikan inklusif | Persen | 59,76 | 62,62 | 65,41 | 68,14 |
| IKSK.2136.2.3 | Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaanKristen | Persen | 5,16 | 5,17 | 5,18 | 5,19 |
| IKSK.2136.2.4 | Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaanKristen daerah 3 T | Persen | N/A | 4,88 | 4,91 | 5,29 |
| IKSK.2136.2.5 | Persentase Anak Kelas 1 SDTK yang Pernah Mengikuti PAUD/TK | Persen | N/A | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| IKSK.2136.2.6 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menyelenggarakanlayanan kesehatan sekolah | Persen | N/A | 20,46 | 22,09 | 25,58 |
| **RO.2136. QEI.001** | **Bantuan Peralatan Sarana Penunjang Pembelajaran Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah Swasta** | **Lembaga** | **1** | **1** | **50** | **100** |
| IKRO.2136. QEI.001.1 | Jumlah lembaga pendidikan Keagamaan Kristen yang menerima BantuanSarana Penunjang Pembelajaran | Lembaga | 1 | 1 | 50 | 100 |
| IKRO.2136. QEI.001.2 | Jumlah peningkatan siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen | Orang | 1.165 | 1.228 | 1.293 | 1.363 |
| IKRO.2136. QEI.001.3 | Jumlah peningkatan siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristendaerah 3T | Orang | N/A | 468 | 530 | 600 |
| IKRO.2136. QEI.001.4 | Jumlah Anak Kelas 1 SDTK yang Pernah Mengikuti PAUD | Orang | N/A | 372 | 425 | 492 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **6.584** | **7.056** | **5.641** | **6.276** | **6.808** | **7.233** | **8.938** | |
| 6.584 | 7.056 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 70,80 | 73,41 | | | | | | |
| 70,80 | 73,41 | | | | | | |
| 5,20 | 5,21 | | | | | | |
| 5,45 | 5,56 | | | | | | |
| 65,00 | 70,00 | | | | | | |
| 34,88 | 41,86 | | | | | | |
| **150** | **200** | **7.571** | **9.000** | **13.000** | **15.000** | **20.000** | |
| 150 | 200 | | | | | | |
| 1.436 | 1.514 | | | | | | |
| 650 | 700 | | | | | | |
| 575 | 683 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2136. QEI.002** | **Bantuan Pengembangan Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah Swasta** | **Lembaga** | **1** | **10** | **20** | **25** |
| IKRO.2136. QEI.002.1 | Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Kristen yang mendapatkan bantuanpengembangan prasarana | Lembaga | 1 | 10 | 20 | 25 |
| IKRO.2136. QEI.002.2 | Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah | Lembaga | N/A | 88 | 95 | 110 |
| **RO.2136. RAA.001** | **Sarana Pendukung Pembelajaran Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah Negeri** | **Unit** | **N/A** | **N/A** | **30** | **50** |
| IKRO.2136. RAA.001 | Jumlah Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Dasar dan Menengah | Unit | N/A | N/A | 30 | 50 |
| **RO.2136. RBI.001** | **Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Negeri** | **Unit** | **13** | **13** | **26** | **39** |
| IKRO.2136. RBI.001 | Jumlah Prasarana Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah KeagamaanKristen Negeri | Unit | NA | 13 | 26 | 39 |
| **RO.2136. QEN.001** | **Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Siswa SMTK/SMAK** | | **11.337** | **12.166** | **0** | **0** |
| IKRO.2136. QEN.001 | Jumlah Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP | Orang | 11.337 | 12.166 | 0 | 0 |
| **RO.2136. QEN.002** | **Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Siswa SMPTK** | | **4.895** | **5.729** | **0** | **0** |
| IKRO.2136. QEN.002 | Jumlah Siswa SMPTK Penerima PIP | Orang | 4.895 | 5.729 | 0 | 0 |
| **RO.2136. QEN.003** | **Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Siswa SDTK** | | **2.652** | **3.053** | **0** | **0** |
| IKRO.2136. QEN.003 | Jumlah Siswa SDTK Penerima PIP | Orang | 2.652 | 3.053 | 0 | 0 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **30** | **40** | **19.850** | **25.000** | **28.000** | **35.000** | **40.000** | |
| 30 | 40 | | | | | | |
| 150 | 180 | | | | | | |
| **75** | **100** | **-** | **13.000** | **16.250** | **19.500** | **22.425** | |
| 75 | 100 | | | | | | |
| **39** | **52** | **12.831** | **52.000** | **65.000** | **78.000** | **89.700** | |
| 39 | 52 | | | | | | |
| **0** | **0** | **21.285** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **4.297** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **1.374** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 0 | 0 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **2139 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik** | | | | | | |
| **SK.2139.1** | **Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan Katolik** | | | | | |
| IKSK.2139.1.1 | Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Katolik yang lulus denganpredikat sangat baik | Persen | N/A | 25,00 | 30,00 | 35,00 |
| **RO.2139. QEN.006** | **Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMAK Katolik** | **Orang** | **N/A** | **6.396** | **7.441** | **8.222** |
| IKRO.2139. QEN.006,1 | Jumlah Siswa SMAK Katolik Penerima BOS | Orang | N/A | 6.396 | 7.441 | 8.222 |
| IKRO.2139. QEN.006,2 | Jumlah siswa satuan pendidikan keagamaan Katolik yang lulus denganpredikat sangat baik | Orang | N/A | 470 | 650 | 805 |
| **SK.2139.2** | **Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan Katolik yang berkualitas** | | | | | |
| IKSK.2139.2.1 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Katolik yang memperolehpeningkatan sarana prasarana | Persen | 41,90 | 19,66 | 39,32 | 58,97 |
| IKSK.2139.2.2 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Katolik yang menyelenggarakanpendidikan inklusif | Persen | 41,90 | 18,60 | 37,21 | 58,00 |
| IKSK.2139.2.3 | Persentase Peningkatan Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan KeagamaanKatolik | Persen | 13,80 | 5,32 | 12,34 | 9,26 |
| IKSK.2139.2.4 | Persentase Peningkatan Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan KeagamaanKatolik Daerah 3 T | Persen | N/A | 96,30 | 5,01 | 4,99 |
| IKSK.2139.2.5 | Persentase Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik yang MenyelenggarakanLayanan Kesehatan Sekolah | Persen | N/A | 10,87 | 23,91 | 45,65 |
| IKSK.2139.2.6 | Persentase Anak Kelas 1 SD Keagamaan Katolik yang Pernah MengikutiPAUD/TK | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RO.2139. QEI.007** | **Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang diberikan bantuan** | **Lembaga** | **N/A** | **282** | **282** | **282** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **75.449** | **83.578** | **102.963** | **119.187** | **132.229** | **[BIMAS KATOLIK] Direktorat Pendidikan Agama Katolik** |
| | | | | | | | |
| 40,00 | 45,00 | | | | | | |
| **9.085** | **10.680** | **11.480** | **14.712** | **19.456** | **25.728** | **34.028** | |
| 9.085 | 10.680 | | | | | | |
| 1.000 | 1.170 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 79,49 | 80,00 | | | | | | |
| 79,07 | 80,00 | | | | | | |
| 9,32 | 9,43 | | | | | | |
| 5,00 | 5,00 | | | | | | |
| 76,09 | 80,00 | | | | | | |
| 0,00 | 50,00 | | | | | | |
| **282** | **282** | **2.211** | **2.352** | **2.493** | **2.634** | **2.775** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2139. QEI.007.1 | Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Katolik yang menerima bantuanpenguatan kelembagaan | Lembaga | N/A | 68 | 68 | 90 |
| IKRO.2139. QEI.007.2 | Jumlah lembaga Katolik yang memperoleh pendampingan teknis atausupervisi dalam pengelolaan bantuan | Lembaga | N/A | 68 | 68 | 90 |
| IKRO.2139. QEI.007.3 | Jumlah anak Kelas 1 SD Keagamaan Katolik yang pernah mengikutiPAUD/TK/Taman Seminari | Orang | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.2139. QEI.007.4 | Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Katolik yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran (peralatan belajar, laboratorium, ekstrakurikuler danmultimedia) | Lembaga | N/A | 23 | 23 | 23 |
| IKRO.2139. QEI.007.5 | Jumlah satuan pendidikan Katolik yang menyelenggarakan layanan kesehatansekolah | Lembaga | N/A | 5 | 14 | 18 |
| IKRO.2139. QEI.007.6 | Jumlah satuan pendidikan keagamaan Katolik swasta yang menyelenggarakanpendidikan inklusif | Lembaga | N/A | 8 | 8 | 9 |
| IKRO.2139. QEI.007.7 | Jumlah peningkatan siswa pada satuan pendidikan keagamaan Katolik | Orang | N/A | 409 | 470 | 540 |
| IKRO.2139. QEI.007.8 | Jumlah peningkatan siswa pada satuan pendidikan keagamaan Katolik daerah3 T | Orang | N/A | 95 | 109 | 125 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 95 | 117 | | | | | | |
| 95 | 117 | | | | | | |
| 0 | 14 | | | | | | |
| 24 | 24 | | | | | | |
| 22 | 20 | | | | | | |
| 9 | 9 | | | | | | |
| 622 | 715 | | | | | | |
| 144 | 166 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2139. QEI.008** | **Prasarana SMAK Swasta Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **26** | **30** | **30** |
| IKRO.2139. QEI.008.1 | Jumlah layanan pendirian satuan pendidikan keagamaan Katolik swasta | Lembaga | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.2139. QEI.008.2 | Jumlah ruang kelas satuan pendidikan Katolik swasta yang direhabilitasi ataudibangun baru sesuai standar ruang belajar | Lembaga | N/A | 26 | 30 | 30 |
| **RO.2139. QEN.005** | **Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Taman Seminari** | **Orang** | **N/A** | **0** | **0** | **0** |
| IKRO.2139. QEN.005.1 | Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan Katolik Penerima BOP | Orang | N/A | 0 | 0 | 0 |
| RO.2139. QEN.007 | Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMAK Katolik | Orang | N/A | 4.054 | 0 | 0 |
| IKRO.2139. QEN.007.1 | Jumlah Siswa SMAK Katolik Penerima PIP | Orang | N/A | 4.054 | 0 | 0 |
| **RO.2139. RAA.001** | **Peralatan/Sarana pada SMAK Katolik Negeri** | **Unit** | **N/A** | **0** | **5** | **5** |
| IKRO.2139. RAA.001.1 | Jumlah satuan pendidikan keagamaan Katolik negeri yang memperoleh saranapenunjang pembelajaran (peralatan belajar, laboratorium, ekstrakurikuler dan multimedia) | Lembaga | N/A | 0 | 5 | 5 |
| **RO.2139. RBI.001** | **Prasarana SMAK Katolik Negeri** | **Unit** | **N/A** | **18** | **5** | **5** |
| IKRO.2139. RBI.001.1 | Jumlah Layanan Pendirian Satuan Pendidikan Katolik Negeri | Lembaga | N/A | 0 | 1 | 1 |
| IKRO.2139. RBI.001.2 | Jumlah Layanan Penegerian Satuan Pendidikan Katolik | Lembaga | N/A | 0 | 2 | 2 |
| IKRO.2139. RBI.001.3 | Jumlah ruang kelas satuan pendidikan Katolik yang direhabilitasi ataudibangun baru sesuai standar ruang belajar | Lembaga | N/A | 3 | 5 | 5 |
| **2142 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu** | | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30 | 30 | 21.461 | 22.500 | 25.875 | 29.756 | 34.220 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 30 | 30 | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **5** | **5** | **0** | **5.000** | **5.750** | **5.900** | **6.000** | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| **5** | **18** | **33.000** | **39.014** | **49.390** | **55.169** | **55.207** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| | | **97.717** | **38.376** | **38.955** | **39.819** | **40.496** | **[BIMAS HINDU] Direktorat PendidikanAgama Hindu** |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **SK.2142.1** | **Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu** | | | | | |
| IKSK.2142.1.1 | Persentase siswa widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yanglulus dengan predikat sangat baik | Persen | 50,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 |
| IKSK.2142.1.2 | Persentase Anak Kelas 1/Adi Widyalaya yang Pernah Mengikuti PratamaWidyalaya | Persen | 86,62 | 89,06 | 90,09 | 91,69 |
| **RO.2142. QEN.001** | **Siswa penerima BOS Tk Adi** | **Orang** | **877** | **1.025** | **1.081** | **1.086** |
| IKRO.2142. QEN.001.1 | Jumlah Siswa penerima BOS Tk Adi | Orang | 877,00 | 907 | 1,081,00 | 1,186,00 |
| **RO.2142. QEN.002** | **Siswa penerima BOS Tk Madyama** | **Orang** | **283,00** | **322** | **380** | **440** |
| IKRO.2142. QEN.001.1 | Jumlah Siswa penerima BOS Tk Madyama | Orang | 283,00 | 359 | 380 | 440 |
| **RO.2142. QEN.003** | **Siswa penerima BOS Tk Utama** | **Orang** | **483,00** | **605** | **493** | **540** |
| IKRO.2142. QEN.003.1 | Jumlah Siswa penerima BOS Tk Utama | Orang | 483,00 | 454 | 493 | 540 |
| **RO.2142. QEN.007** | **Siswa penerima BOS Tk Pratama** | **Orang** | **1,654,00** | **4.236** | **2.645** | **2.846** |
| IKRO.2142. QEN.007.1 | Jumlah Siswa penerima BOS Tk Pratama | Orang | 1,654,00 | 2,390,00 | 2.200 | 2.400 |
| IKRO.2142. QEN.007.2 | Jumlah siswa widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang lulusdengan predikat sangat baik | Orang | N/A | 2.032 | 2.248 | 2.419 |
| **SK.2142.2** | **Meningkatnya sarana dan prasarana widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang berkualitas** | | | | | |
| IKSK.2142.2.1 | Persentase widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yangmemperoleh peningkatan sarana prasarana | Persen | 3,00 | 5 | 8 | 11 |
| IKSK.2142.2.2 | Persentase widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yangmenyelenggarakan pendidikan inklusif | Persen | 2,60 | 3 | 8 | 11 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 88,00 | 90,00 | | | | | | |
| 94,37 | 96,39 | | | | | | |
| **1.326** | **1.326** | **5.889** | **1.043** | **1.048** | **1.279** | **1.279** | |
| 1,326,00 | 1,326,00 | | | | | | |
| **520** | **580** | **2.161** | **382** | **448** | **537** | **603** | |
| 520 | 580 | | | | | | |
| **600** | **660** | **4.752** | **801** | **878** | **979** | **1.080** | |
| 600 | 660 | | | | | | |
| **3.085** | **3.435** | **9.816** | **1.588** | **1.709** | **1.852** | **2.062** | |
| 2.600 | 2.600 | | | | | | |
| 2.622 | 2.920 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18 | 28 | | | | | | |
| 18 | 28 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2142.2.3 | Persentase peningkatan jumlah siswa pada widyalaya dan satuan pendidikankeagamaan Hindu | Persen | 3,45 | 4 | 4 | 4 |
| IKSK.2142.2.4 | Persentase peningkatan jumlah siswa pada widyalaya dan satuan pendidikankeagaman Hindu daerah 3 T | Persen | 7,00 | 7 | 7 | 7 |
| IKSK.2142.2.5 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Hindu nonformal yang direvitalisasi | Persen | N/A | 0 | 3 | 5 |
| IKSK.2142.2.6 | Persentase widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yangmenyelenggarakan layanan kesehatan sekolah | Persen | N/A | 40 | 44 | 48 |
| **RO.2142. QEO.001** | **Sarana Lembaga pendidikan Widyalaya dan Penyelenggara Pendidikan Agama dan keagamaan Hindu** | **Unit** | **3.420** | **4.230** | **6.346** | **7.346** |
| IKRO.2142. QEO.001.1 | Jumlah Lembaga Pendidikan Widyalaya dan satuan pendidikan keagamaanHindu yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran | Lembaga | 4 | 6 | 10 | 15 |
| IKRO.2142. QEO.001.2 | Jumlah widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yangmenyelenggarakan layanan kesehatan sekolah | Lembaga | 30 | 50 | 52 | 54 |
| IKRO.2142. QEO.001.3 | Jumlah satuan pendidikan keagamaan Hindu nonformal yang direvitalisasi | Lembaga | N/A | 0 | 1 | 2 |
| IKRO.2142. QEO.001.4 | Jumlah siswa pada widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindudaerah 3 T | Orang | N/A | 907 | 1.081 | 1.186 |
| IKRO.2142. QEO.001.5 | Jumlah peningkatan siswa pada satuan widyalaya dan satuan pendidikankeagamaan Hindu | Orang | N/A | 150 | 155 | 160 |
| **RO.2142. QEI.001** | **Lembaga Pendidikan Widyalaya yang diberikan bantuan** | **Lembaga** | **110** | **458** | **118** | **131** |
| IKRO.2142. QEI.001.1 | Jumlah lembaga pendidikan widyalaya yang menerima bantuan penguatankelembagaan | Lembaga | 10 | 10 | 30 | 40 |
| IKRO.2142. QEI.001.2 | Jumlah lembaga pendidikan widyalaya yang memperoleh pendampinganteknis atau supervisi dalam pengelolaan bantuan | Lembaga | 40 | 40 | 42 | 45 |
| IKRO.2142. QEI.001.3 | Jumlah Layanan Legalitas Ijazah widyalaya | Layanan | N/A | 1 | 1 | 1 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 7 | 7 | | | | | | |
| 8 | 10 | | | | | | |
| 52 | 56 | | | | | | |
| **9.346** | **9,346,00** | **4.199** | **7.588** | **7.588** | **7.588** | **7.588** | |
| 25 | 40 | | | | | | |
| 56 | 58 | | | | | | |
| 3 | 4 | | | | | | |
| 1.326 | 1.326 | | | | | | |
| 165 | 170 | | | | | | |
| **155** | **191** | **36.427** | **11.741** | **12.041** | **12.341** | **12.641** | |
| 50 | 60 | | | | | | |
| 50 | 55 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2142. QEI.001.4 | Jumlah widyalaya yang memperoleh pembinaan kelembagaan secara berkala | Lembaga | N/A | 125 | 125 | 125 |
| RO.2142. QEI.002 | Pasraman Keagamaaan dan sekolah minggu yang diberikan bantuan | Lembaga | 365 | 859,1 | 365 | 365 |
| IKRO.2142. QEI.002.1 | Jumlah Layanan Pendirian Satuan Pendidikan Hindu | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2142. QEI.002.2 | Jumlah ruang kelas satuan pendidikan Hindu yang direhabilitasi ataudibangun baru sesuai standar ruang belajar | Unit | 30 | 0 | 20 | 40 |
| **RO.2142 QEN 004** | **Siswa penerima PIP Tk Adi** | **Orang** | **651** | **745** | **0** | **0** |
| IKRO.2142. QEN.004.1 | Jumlah Siswa penerima PIP Tk Adi | Orang | 651 | 799 | 0 | 0 |
| **RO.2142 QEN 005** | **Siswa penerima PIP Tk Madyama** | **Orang** | **261** | **302** | **0** | **0** |
| IKRO.2142. QEN.005.01 | Jumlah Siswa penerima PIP Tk Madyama | Orang | 261 | 304 | 0 | 0 |
| **RO.2142 QEN 006** | **Siswa penerima PIP Tk Utama** | **Orang** | **276** | **540** | **0** | **0** |
| IKRO.2142. QEN.006.01 | Jumlah Siswa penerima PIP Tk Utama | Orang | 276 | 398 | 0 | 0 |
| **4012 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha** | | | | | | |
| **SK.4012.1** | **Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan Buddha** | | | | | |
| IKSK.4012.1.1 | Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Buddha yang lulus denganpredikat sangat baik | Persen | 0 | 10 | 10 | 10 |
| IKSK.4012.1.2 | Persentase anak kelas 1 Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti NavaDhammasekha | Persen | 0 | 60 | 75 | 80 |
| **RO.4012. QEN.001** | **BOP Nava Dhammasekha** | **Orang** | **1.004** | **1.157** | **1.190** | **1.250** |
| IKRO.4012. QEN.001.1 | Jumlah Siswa Nava Dhammasekha penerima BOP | Orang | 1.004 | 1.157 | 1.190 | 1.250 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 125 | 125 | | | | | | |
| 365 | 365 | 27.830 | 15.233 | 15.243 | 15.243 | 15.243 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 60 | 80 | | | | | | |
| **0** | **0** | **1.656** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **1.179** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **3.807** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| | | **38.989** | **52.333** | **54.950** | **57.697** | **60.581** | **[BIMAS BUDDHA] Direktorat Urusan danPendidikan Agama Buddha** |
| | | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | |
| 85 | 90 | | | | | | |
| **1.312** | **1.932** | **695** | **714** | **750** | **787** | **827** | |
| 1.312 | 1.932 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4012. QEN.001.2 | Jumlah Anak Kelas 1 Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti NavaDhammasekha | Orang | 502 | 579 | 595 | 625 |
| **RO.4012. QEN.002** | **BOS Mula Dhammasekha** | **Orang** | **53** | **85** | **90** | **95** |
| IKRO.4012. QEN.002.1 | Jumlah Siswa Mula Dhammasekha penerima BOS | Orang | 53 | 85 | 90 | 95 |
| **RO.4012. QEN.003** | **BOS Uttama Dhammasekha** | **Orang** | **N/A** | **60** | **70** | **74** |
| IKRO.4012. QEN.003.1 | Jumlah Siswa Uttama Dhammasekha penerima BOS | Orang | N/A | 60 | 70 | 74 |
| IKRO.4012. QEN.003.2 | Jumlah siswa satuan pendidikan keagamaan Buddha yang lulus denganpredikat sangat baik | Orang | N/A | 107 | 110 | 112 |
| **SK.4012.2** | **Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan Buddha yang berkualitas** | | | | | |
| IKSK.4012.2.1 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang memperolehpeningkatan sarana prasarana | Persen | 64,44 | 88,89 | 92,00 | 94,00 |
| IKSK.4012.2.2 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menyelenggarakanpendidikan inklusif | Persen | 0,00 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
| IKSK.4012.2.3 | Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaanBuddha | Persen | 23,27 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| IKSK.4012.2.4 | Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaanBuddha daerah 3T | Persen | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| IKSK.4012.2.5 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha nonformal yangdirevitalisasi | Persen | 2,33 | 2,48 | 3,00 | 4,00 |
| IKSK.4012.2.6 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menyelenggarakanlayanan kesehatan sekolah | Persen | 4,44 | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
| **RO.4012. QEI.001** | **Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang diberikan Bantuan Operasional** | **Lembaga** | **893** | **817** | **817** | **817** |
| IKRO.4012. QEI.001.1 | Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Buddha yang menerima bantuanpenguatan kelembagaan | Lembaga | 893 | 817 | 817 | 817 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 656 | 966 | | | | | | |
| **99** | **142** | **76** | **81** | **85** | **89** | **94** | |
| 99 | 142 | | | | | | |
| **77** | **81** | **51** | **105** | **110** | **116** | **122** | |
| 77 | 81 | | | | | | |
| 113 | 115 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 96,00 | 98,00 | | | | | | |
| 11,11 | 11,11 | | | | | | |
| 25,00 | 25,00 | | | | | | |
| 10,00 | 10,00 | | | | | | |
| 5,00 | 6,00 | | | | | | |
| 20,00 | 25,00 | | | | | | |
| **817** | **817** | **8.573** | **17.120** | **17.976** | **18.875** | **19.819** | |
| 817 | 817 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4012. QEI.001.2 | Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Buddha yang memperolehpendampingan teknis atau supervisi dalam pengelolaan bantuan | Lembaga | N/A | 24 | 25 | 26 |
| IKRO.4012. QEI.001.3 | Jumlah satuan pendidikan keagamaan Buddha nonformal yang direvitalisasi | Lembaga | 30 | 32 | 39 | 52 |
| IKRO.4012. QEI.001.4 | Jumlah peningkatan siswa pada satuan pendidikan keagamaan daerah 3 T | Orang | N/A | 22 | 24 | 27 |
| IKRO.4012. QEI.001.5 | Jumlah peningkatan siswa pada satuan pendidikan keagamaan | Orang | 246 | 325 | 407 | 508 |
| **RO.4012. QEI.002** | **Lembaga Pendidikan Keagamaaan Buddha yang diberikan Bantuan Prasarana** | **Lembaga** | **0** | **40** | **117** | **123** |
| IKRO.4012. QEI.002.1 | Jumlah Layanan Pendirian Satuan Pendidikan Buddha | Layanan | 0 | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.4012. QEI.002.2 | Jumlah ruang kelas satuan pendidikan Buddha swasta yang direhabilitasi ataudibangun baru sesuai standar ruang belajar | Lembaga | 0 | 3 | 4 | 5 |
| IKRO.4012. QEI.002.3 | Jumlah Layanan Penegrian Satuan Pendidikan Buddha | Layanan | 0 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.4012. QEI.002.4 | Jumlah Layanan Legalitas Ijazah | Layanan | 0 | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.4012. QEI.002.5 | Jumlah satuan pendidikan agama Buddha yang memperoleh pembinaankelembagaan secara berkala | Lembaga | 0 | 53 | 53 | 53 |
| **RO.4012. RAA.001** | **Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha** | **Lembaga** | **220** | **506** | **506** | **506** |
| IKRO.4012. RAA.001.1 | Jumlah satuan Pendidikan Keagamaan buddha yang memperoleh saranapenunjang pembelajaran (peralatan belajar, laboratorium, ekstrakurikuler dan multimedia) | Lembaga | 220 | 506 | 506 | 506 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 27 | 28 | | | | | | |
| 64 | 77 | | | | | | |
| 29 | 32 | | | | | | |
| 635 | 794 | | | | | | |
| **129** | **135** | **14.969** | **17.784** | **18.674** | **19.607** | **20.588** | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 6 | 7 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 53 | 53 | | | | | | |
| **506** | **506** | **14.626** | **16.528** | **17.355** | **18.222** | **19.133** | |
| 506 | 506 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **025.DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran** | | | | | | |
| **SP.4** | **Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran** | | | | | |
| IKSP.4.1 | Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standarkompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional : | | | | | |
| | a. literasi membaca | Persen | 58,07 | 59,30 | 59,71 | 60,04 |
| | b. numerasi | Persen | 50,91 | 52,55 | 52,97 | 53,80 |
| IKSP.4.2 | Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhistandar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: | | | | | |
| | a. literasi membaca | Persen | 44,24 | 44,46 | 44,68 | 44,91 |
| | b. numerasi | Persen | 43,75 | 43,97 | 44,19 | 44,41 |
| IKSP.4.3 | Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Katolik yang memenuhistandar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: | | | | | |
| | a. literasi membaca | Persen | 41,60 | 51,57 | 52,58 | 53,59 |
| | b. numerasi | Persen | 39,68 | 49,29 | 50,30 | 51,31 |
| IKSP.4.4 | Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Hindu yang memenuhistandar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: | | | | | |
| | a. literasi membaca | Persen | 56,75 | 57,00 | 57,30 | 57,50 |
| | b. numerasi | Persen | 62,08 | 62,20 | 62,40 | 62,60 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | 9.331.151 | 14.362.768 | 19.110.261 | 24.147.403 | 28.517.660 | SETJEN, DITJEN PENDIS, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU,DITJEN BIMAS BUDDHA |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 60,10 | 60,15 | | | | | | |
| 53,80 | 54,21 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 45,13 | 45,36 | | | | | | |
| 44,63 | 44,85 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 54,60 | 55,61 | | | | | | |
| 52,32 | 55,33 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 57,70 | 58,00 | | | | | | |
| 62,80 | 63,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.4.5 | Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Buddha yang memenuhistandar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: | | | | | |
| | a. literasi membaca | Persen | 70,00 | 70,00 | 71,50 | 73,00 |
| | b. numerasi | Persen | 70,00 | 70,00 | 71,50 | 73,00 |
| IKSP.4.6 | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yangpartisipatif pada kategori baik | Persen | 41,79 | 42,50 | 43,40 | 45,90 |
| IKSP.4.7 | Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dansatuan pendidikan keagamaan Kristen formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | Persen | 34,30 | 36,26 | 38,45 | 41,79 |
| IKSP.4.8 | Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Katolik, dan satuan pendidikan keagamaan Katolik formal dengan nilai pengelolaan yangpartisipatif pada kategori baik | Persen | N/A | 90,74 | 90,74 | 92,59 |
| IKSP.4.9 | Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu, dansatuan pendidikan keagamaan Hindu formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | Persen | N/A | 0,00 | 43,40 | 45,90 |
| IKSP.4.10 | Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Buddha, dansatuan pendidikan keagamaan Buddha formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | Persen | 63,64 | 70,45 | 77,27 | 84,09 |
| IKSP.4.11 | Persentase satuan pendidikan Islam yang memiliki indeks karakter padakategori baik | Persen | 84,91 | 85,49 | 86,07 | 86,05 |
| IKSP.4.12 | Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter padakategori baik | Persen | 52,83 | 54,41 | 56,05 | 57,73 |
| IKSP.4.13 | Persentase satuan pendidikan Katolik yang memiliki indeks karakter padakategori baik | Persen | N/A | 4,08 | 4,08 | 8,00 |
| IKSP.4.14 | Persentase satuan pendidikan Hindu yang memiliki indeks karakter padakategori baik | Persen | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 74,00 | 75,00 | | | | | | |
| 74,00 | 75,00 | | | | | | |
| 50,90 | 55,90 | | | | | | |
| 43,25 | 45,00 | | | | | | |
| 96,30 | 97,30 | | | | | | |
| 50,90 | 55,90 | | | | | | |
| 90,91 | 95,00 | | | | | | |
| 87,23 | 87,81 | | | | | | |
| 59,46 | 61,24 | | | | | | |
| 1,92 | 11,11 | | | | | | |
| 92,00 | 93,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.4.15 | Persentase satuan pendidikan Buddha yang memiliki indeks karakter padakategori baik | Persen | 63,64 | 70,45 | 77,27 | 84,09 |
| IKSP.4.16 | Persentase satuan pendidikan Islam yang memiliki: | | | | | |
| | a.iklim keamanan sekolah; | Persen | 43,15 | 45,32 | 47,50 | 49,68 |
| | b.iklim inklusivitas; | Persen | 34,67 | 38,29 | 40,27 | 41,58 |
| | c.iklim kebhinekaan pada kategori baik | Persen | 42,94 | 50,18 | 52,50 | 54,81 |
| IKSP.4.17 | Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki: | | | | | |
| | a.iklim keamanan sekolah; | Persen | 66,50 | 67,17 | 67,84 | 68,52 |
| | b.iklim inklusivitas; | Persen | 54,90 | 55,45 | 56,00 | 56,56 |
| | c.iklim kebhinekaan pada kategori baik | Persen | 63,98 | 64,62 | 65,27 | 65,92 |
| IKSP.4.18 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Katolik yang memiliki: | | | | | |
| | a.iklim keamanan sekolah; | Persen | N/A | 13,04 | 23,91 | 45,65 |
| | b.iklim inklusivitas; | Persen | N/A | 13,04 | 23,91 | 45,65 |
| | c.iklim kebhinekaan pada kategori baik | Persen | N/A | 13,04 | 23,91 | 45,65 |
| IKSP.4.19 | Persentase satuan pendidikan Hindu yang memiliki: | | | | | |
| | a.iklim keamanan sekolah; | Persen | 70,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 |
| | b.iklim inklusivitas; | Persen | 57,24 | 58,00 | 58,25 | 58,50 |
| | c.iklim kebhinekaan pada kategori baik | Persen | 66,76 | 67,00 | 67,25 | 67,50 |
| IKSP.4.20 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang memiliki: | | | | | |
| | a.iklim keamanan sekolah; | Persen | N/A | 18,37 | 36,73 | 55,10 |
| | b.iklim inklusivitas; | Persen | N/A | 18,37 | 36,73 | 55,10 |
| | c.iklim kebhinekaan pada kategori baik | Persen | N/A | 18,37 | 36,73 | 55,10 |
| IKSP.4.21 | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dansatuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak | Persen | 10,08 | 20,05 | 30,02 | 40,00 |
| IKSP.4.22 | Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dansatuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak | Persen | N/A | 43,00 | 45,00 | 47,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90,91 | 95,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 51,86 | 54,04 | | | | | | |
| 44,23 | 46,20 | | | | | | |
| 57,13 | 59,44 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 69,20 | 70,00 | | | | | | |
| 57,13 | 57,70 | | | | | | |
| 66,58 | 67,24 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 78,26 | 96,00 | | | | | | |
| 78,26 | 96,00 | | | | | | |
| 78,26 | 96,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 75,00 | 76,00 | | | | | | |
| 58,75 | 59,00 | | | | | | |
| 67,75 | 68,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 73,47 | 89,80 | | | | | | |
| 73,47 | 89,80 | | | | | | |
| 73,47 | 89,80 | | | | | | |
| 49,97 | 59,93 | | | | | | |
| 49,00 | 50,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.4.23 | Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Katolik, dansatuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| IKSP.4.24 | Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu, dansatuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak | Persen | N/A | 16,00 | 46,13 | 53,33 |
| IKSP.4.25 | Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Buddha, dansatuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak | Persen | 88,68 | 88,68 | 88,89 | 89,09 |
| IKSP.4.26 | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial | Persen | N/A | 53,52 | 55,21 | 56,92 |
| IKSP.4.27 | Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dankompetensi esensial | Persen | 17,59 | 36,14 | 48,19 | 60,24 |
| IKSP.4.28 | Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Katolik, dan satuan pendidikan keagamaan Katolik yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dankompetensi esensial | Persen | N/A | 25,53 | 47,06 | 70,59 |
| IKSP.4.29 | Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu, dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dankompetensi esensial | Persen | 100,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 66,67 | 96,00 | | | | | | |
| 55,56 | 65,00 | | | | | | |
| 89,29 | 89,47 | | | | | | |
| 58,63 | 60,33 | | | | | | |
| 72,29 | 84,34 | | | | | | |
| 94,12 | 96,00 | | | | | | |
| 99,00 | 99,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.4.30 | Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Buddha, dan satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dankompetensi esensial | Persen | N/A | 70,00 | 75,00 | 80,00 |
| | Persentase satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum kontekstual sesuai bahan ajar Agama Khonghucu, berpusat pada peserta didik sertaberfokus pada penguatan karakter dan kompetensi esensial | Persen | N/A | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
| IKSP.4.31 | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dansatuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran | Persen | 39,76 | 43,37 | 46,99 | 50,60 |
| IKSP.4.32 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memanfaatkankomputer dan internet untuk tujuan pembelajaran | Persen | N/A | 32,24 | 46,99 | 50,60 |
| IKSP.4.33 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Katolik yang memanfaatkankomputer dan internet untuk tujuan pembelajaran | Persen | N/A | 12,96 | 22,22 | 40,74 |
| IKSP.4.34 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Hindu yang memanfaatkankomputer dan internet untuk tujuan pembelajaran | Persen | 30,70 | 32,00 | 38,50 | 40,00 |
| IKSP.4.35 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang memanfaatkankomputer dan internet untuk tujuan pembelajaran | Persen | 2,22 | 2,22 | 4,44 | 6,67 |
| IKSP.4.36 | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dansatuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP | Persen | 30,48 | 33,81 | 37,71 | 44,07 |
| IKSP.4.37 | Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yangmendapatkan rekognisi | Persen | 32,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 |
| IKSP.4.38 | Nilai Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan | Nilai | N/A | 86,20 | 86,50 | 87,15 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 85,00 | 90,00 | | | | | | |
| 35,00 | 50,00 | | | | | | |
| 54,22 | 57,83 | | | | | | |
| 54,22 | 57,83 | | | | | | |
| 68,52 | 80,00 | | | | | | |
| 41,18 | 42,50 | | | | | | |
| 8,89 | 11,11 | | | | | | |
| 47,90 | 51,71 | | | | | | |
| 70,00 | 75,00 | | | | | | |
| 87,65 | 88,35 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.4.39 | Persentase naskah kebijakan bidang pendidikan yang dimanfaatkan | Persen | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 |
| IKSP.4.40 | Nilai Moderasi Beragama SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Nilai | 75,24 | 76,00 | 76,50 | 77,00 |
| IKSP.4.41 | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Pendidik dan TenagaKependidikan | Persen | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 |
| **SP.5** | **Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional, Kompeten, dan Merata** | | | | | |
| IKSP.5.1 | Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengankategori baik | Persen | N/A | 80,85 | 81,70 | 82,55 |
| IKSP.5.2 | Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Kristen dengankategori baik | Persen | N/A | 28,60 | 57,10 | 78,57 |
| IKSP.5.3 | Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Katolik dengankategori baik | Persen | N/A | 80,85 | 81,70 | 82,55 |
| IKSP.5.4 | Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Hindu dengankategori baik | Persen | N/A | 26,00 | 28,00 | 34,00 |
| IKSP.5.5 | Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Buddha dengankategori baik | Persen | N/A | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
| IKSP.5.6 | Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Khonghucudengan kategori baik | Persen | N/A | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
| IKSP.5.7 | Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | 41,96 | 54,93 | 63,94 | 75,91 |
| IKSP.5.8 | Persentase guru agama Kristen yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | 30,48 | 35,28 | 40,07 | 44,87 |
| IKSP.5.9 | Persentase guru agama Katolik yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | N/A | 71,46 | 91,63 | 93,37 |
| IKSP.5.10 | Persentase guru agama Hindu yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | 41,50 | 83,50 | 84,80 | 85,20 |
| IKSP.5.11 | Persentase guru agama Buddha yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | 55,96 | 73,12 | 80,36 | 86,29 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 94,00 | 95,00 | | | | | | |
| 77,50 | 78,00 | | | | | | |
| 80,00 | 81,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 83,40 | 84,22 | | | | | | |
| 81,43 | 84,29 | | | | | | |
| 83,40 | 84,22 | | | | | | |
| 36,00 | 39,00 | | | | | | |
| 40,00 | 50,00 | | | | | | |
| 20,00 | 25,00 | | | | | | |
| 87,87 | 98,84 | | | | | | |
| 52,06 | 59,25 | | | | | | |
| 95,10 | 96,66 | | | | | | |
| 85,60 | 86,00 | | | | | | |
| 92,23 | 98,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.5.12 | Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuanpendidikan | Persen | 54,67 | 62,08 | 70,35 | 77,83 |
| IKSP.5.13 | Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada satuanpendidikan | Persen | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 |
| IKSP.5.14 | Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Katolik pada satuanpendidikan | Persen | N/A | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| IKSP.5.15 | Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Hindu pada satuanpendidikan | Persen | N/A | 59,17 | 62,16 | 65,25 |
| IKSP.5.16 | Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Buddha padasatuan pendidikan | Persen | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| **2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam** | | | | | | |
| **SK.2127.1** | **Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan islam** | | | | | |
| IKSK.2127.1.1 | Nilai keberagamaan siswa keagamaan islam pada satuan pendidikan umum | Nilai | 69,00 | 70,50 | 71,80 | 73,00 |
| IKSK.2127.1.2 | Nilai keberagamaan mahasiswa keagamaan islam pada satuan pendidikantinggi umum | Nilai | 69,00 | 70,50 | 71,80 | 73,00 |
| IKSK.2127.1.3 | Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa keagamaan islam | Nilai | N/A | 71,00 | 72,30 | 73,50 |
| **RO.2127. SCI.003** | **Siswa Sekolah Umum yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama** | **Orang** | **1.000** | **1.000** | **1.013** | **1.025** |
| IKRO.2127. SCI.003.1 | Nilai survey indeks keberagamaan siswa keagamaan islam pada satuanpendidikan umum | Nilai | 69 | 70,5 | 71,8 | 73 |
| IKRO.2127. SCI.003.2 | Nilai rata-rata penguatan moderasi beragama siswa keagamaan islam | Nilai | N/A | 71 | 72,30 | 73,50 |
| **RO.2127. SBA.002** | **Mahasiswa PTU yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama** | **Orang** | **1.125** | **250** | **253** | **256** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 85,30 | 90,40 | | | | | | |
| 40,00 | 45,00 | | | | | | |
| 20,00 | 20,00 | | | | | | |
| 68,35 | 72,00 | | | | | | |
| 0,60 | 0,60 | | | | | | |
| | | **1.322.883** | **1.859.270** | **2.381.814** | **2.903.277** | **2.876.330** | **[DITJEN PENDIS] Direktorat PendidikanAgama Islam** |
| | | | | | | | |
| 74,00 | 75,00 | | | | | | |
| 74,00 | 75,00 | | | | | | |
| 74,50 | 75,50 | | | | | | |
| **1.035** | **1.046** | **2.000** | **2.026** | **2.050** | **2.071** | **2.092** | |
| 74 | 75 | | | | | | |
| 74,50 | 75,50 | | | | | | |
| **259** | **261** | **2.500** | **2.574** | **2.605** | **2.631** | **2.698** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2127. SBA.002.1 | Nilai survey indeks keberagamaan mahasiswa pada PT Umum | Nilai | 69,00 | 70,50 | 71,80 | 73 |
| **SK.2127.2** | **Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum pada pendidikan keagamaan islam** | | | | | |
| IKSK.2127.2.1 | Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untukmendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan keagamaan islam | Persen | N/A | 30,00 | 60,00 | 80,00 |
| IKSK.2127.2.2 | Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitaspendidikan keagamaan pada pendidikan keagamaan islam | Persen | N/A | 30,00 | 60,00 | 80,00 |
| **RO.2127. PBH.001** | **Model Kurikulum dan Pembelajaran PAI yang Dikembangkan** | **Rekomen -dasi Kebijakan** | **5** | **2** | **3** | **3** |
| IKRO.2127. PBH.001.1 | Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untukmendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan keagamaan islam | Kurikulum | N/A | 10 | 12 | 14 |
| IKRO.2127. PBH.001.2 | Jumlah materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakandalam proses pembelajaran pada pendidikan keagamaan islam | Dokumen | N/A | 3 | 5 | 7 |
| IKRO.2127. PBH.001.3 | Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitaspendidikan keagamaan islam | Lembaga | N/A | 160 | 208 | 250 |
| **RO.2127. QEI.001** | **Sekolah yang Menerima Bantuan Sarana Penguatan Pendidikan Agama Islam** | **Unit** | **10.643** | **160** | **208** | **250** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 74 | 75 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 90,00 | 100,00 | | | | | | |
| 90,00 | 100,00 | | | | | | |
| **3** | **4** | **1.000** | **1.024** | **1.040** | **1.060** | **1.080** | |
| 16 | 18 | | | | | | |
| 9 | 11 | | | | | | |
| 275 | 302 | | | | | | |
| **275** | **302** | **3.000** | **3.060** | **3.120** | **3.180** | **3.252** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2127. QEI.001.1 | Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitaspembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan | Lembaga | 10.643 | 15.174 | 19.726 | 23.671 |
| **SK.2127.3** | **Meningkatnya kualitas guru agama pada satuan pendidikan umum** | | | | | |
| IKSK.2127.3.1 | Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agamaIslam | Persen | 47,00 | 89,00 | 95,00 | 100,00 |
| **RO.2127. PDG.001** | **Guru PAI yang Tersertifikasi** | **Orang** | **5.000** | **5.000** | **5.300** | **5.565** |
| IKRO.2127. PDG.001.1 | Jumlah Guru PAI yang Tersertifikasi | Orang | N/A | 5.000 | 5.300 | 5.565 |
| **RO.2127. QEA.001** | **Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS** | **Orang** | **23.487** | **27.619** | **52.305** | **76.991** |
| IKRO.2127. QEA.001.1 | Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Islam | Orang | 27.619 | 27.619 | 30.619 | 33.619 |
| **SK.2127.4** | **Meningkatnya kualitas guru agama dan dosen agama** | | | | | |
| IKSK.2127.4.1 | Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru dan tenagakependidikan PAI berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Persen | 32,30 | 37,30 | 42,30 | 47,30 |
| IKSK.2127.4.2 | Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan dosen agama berbasisrencana kebutuhan yang diterbitkan | Persen | 10,08 | 13,08 | 16,08 | 19,08 |
| IKSK.2127.4.3 | Persentase guru agama, dosen agama, dan tenaga kependidikan yangmemperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Persen | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 60,00 |
| **RO.2127. SCI.004** | **Guru dan Pengawas PAI yang Mendapat Penguatan PemahamanModerasi Beragama** | **Orang** | **200** | **200** | **220** | **264** |
| IKRO.2127. SCI.004.1 | Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasiberagama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Orang | 200 | 250 | 300 | 350 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 26.039 | 28.642 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| **5.565** | **5.565** | **33.575** | **34.260** | **34.945** | **35.630** | **36.315** | |
| 5.565 | 5.565 | | | | | | |
| **101.676** | **126.362** | **1.119.826** | **1.633.165** | **2.135.564** | **2.637.963** | **2.601.547** | |
| 36.619 | 39.619 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 52,30 | 57,30 | | | | | | |
| 22,08 | 25,08 | | | | | | |
| 80,00 | 100,00 | | | | | | |
| **317** | **380** | **200** | **204** | **208** | **212** | **216** | |
| 400 | 450 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| RO.2127. SBA.003 | Dosen PAI yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama | Orang | 1.000 | 400 | 412 | 424 |
| IKRO.2127. SBA.003.2 | Jumlah dosen agama yang memperoleh nilai moderasi beragama pada raporhasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Orang | 400 | 250 | 300 | 350 |
| **RO.2127. QEA.002** | **Insentif Guru PAI Non PNS** | **Orang** | **22.120** | **32.765** | **34.403** | **36.123** |
| IKRO.2127. QEA.002.1 | Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan tenaga kependidikan PAIberbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Orang | 44.000 | 44.000 | 50.000 | 56.000 |
| IKRO.2127. QEA.002.2 | Jumlah Guru PAI Non PNS yang memperoleh insentif | Orang | 1.425 | 1.849 | 2.274 | 2.698 |
| **SK.2127.5** | **Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada sekolah umum** | | | | | |
| IKSK.2127.5.1 | Persentase guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil AsesmenKompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil pada pendidikan keagamaan islam | Persen | N/A | 60,00 | 62,50 | 65,00 |
| IKSK.2127.5.2 | Persentase pengawas agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil pada pendidikankeagamaan islam | Persen | N/A | 45,00 | 47,50 | 50,00 |
| IKSK.2127.5.3 | Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikankeagamaan islam | Persen | N/A | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| IKSK.2127.5.4 | Persentase pengawas agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikankeagamaan islam | Persen | N/A | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
| **RO.2127. QDC.002** | **Guru yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Ujian PAI** | **Orang** | **2.457** | **1.000** | **1.025** | **1.051** |
| IKRO.2127. QDC.002.1 | Jumlah guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen KompetensiGuru (AKG) minimal predikat terampil | Orang | N/A | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
| **RO.2127. QEI.002** | **Lembaga Profesi/Mitra yang Mendapatkan Bantuan Pemberdayaan Kualitas Guru PAI** | **Unit** | **880** | **300** | **308** | **315** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 437 | 450 | 1.000 | 1.020 | 1.041 | 1.061 | 1.082 | |
| 400 | 450 | | | | | | |
| **37.930** | **39.826** | **132.000** | **134.326** | **136.653** | **138.979** | **141.306** | |
| 62.000 | 68.000 | | | | | | |
| 3.122 | 3.546 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 67,50 | 70,00 | | | | | | |
| 52,50 | 55,00 | | | | | | |
| 0,11 | 0,12 | | | | | | |
| 0,26 | 0,27 | | | | | | |
| **1.077** | **1.104** | **2.000** | **5.450** | **5.501** | **5.554** | **2.208** | |
| 9.000 | 10.000 | | | | | | |
| **323** | **331** | **5.000** | **5.125** | **5.253** | **5.384** | **5.519** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2127. QEI.002.1 | Jumlah guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen KompetensiGuru (AKG) minimal predikat terampil | Orang | N/A | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| IKRO.2127. QEI.002.2 | Jumlah pengawas agama yang memperoleh nilai rapor hasil AsesmenKompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil | Orang | N/A | 675 | 713 | 750 |
| **RO.2127. SCI.001** | **Guru PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi** | **Orang** | **1.012** | **68** | **69** | **70** |
| IKRO.2127. SCI.001.1 | Jumlah Guru PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi | Orang | N/A | 41.041 | 42.041 | 43.041 |
| **RO.2127. QAA.001** | **Pendidik dan Tenaga kependidikan PAI yang mendapat Pembinaan Karir** | **Orang** | **400** | **400** | **500** | **600** |
| IKRO.2127. QAA.001.1 | Jumlah guru agama yang meningkat jenjang karir | Orang | N/A | 400 | 500 | 600 |
| **RO.2127. QDC.003** | **Guru yang mendapatkan Pemberdayaan Kualitas Guru PAI** | **Orang** | **200** | **1.000** | **1.025** | **1.051** |
| IKRO.2127. QDC.003.1 | Jumlah Guru yang mendapatkan Pemberdayaan Kualitas Guru PAI | Orang | N/A | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
| **RO.2127. SCI.002** | **Pengawas PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi** | **Orang** | **491** | **200** | **205** | **210** |
| IKRO.2127. SCI.002.1 | Jumlah Pengawas PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi | Orang | N/A | 490 | 590 | 690 |
| **2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah** | | | | | | |
| **SK.1.2133** | **Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah** | | | | | |
| IKSK.1.2133.1 | Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP | Rasio | 1 : 13 | 1 : 13 | 1 : 13 | 1 : 14 |
| IKSK.1.2133.2 | Persentase tenaga kependidikan madrasah lainnya yang memenuhi kualifikasidan kompetensi minimal | Persen | 30,58 | 31,45 | 32,45 | 33,95 |
| IKSK.1.2133.3 | Persentase guru madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AsesmenKompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | Persen | 40,63 | 41,63 | 46,00 | 51,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12.000 | 14.000 | | | | | | |
| 788 | 825 | | | | | | |
| **71** | **72** | **14.600** | **28.289** | **42.519** | **55.668** | **62.558** | |
| 44.041 | 45.041 | | | | | | |
| **700** | **800** | **1.182** | **1.892** | **2.602** | **3.312** | **4.021** | |
| 700 | 800 | | | | | | |
| **1.077** | **1.104** | **4.000** | **4.100** | **4.203** | **4.308** | **4.415** | |
| 9.000 | 10.000 | | | | | | |
| **215** | **221** | **1.000** | **2.755** | **4.510** | **6.265** | **8.021** | |
| 790 | 890 | | | | | | |
| | | **7.157.079** | **11.262.669** | **15.368.320** | **19.474.004** | **23.579.703** | **[DITJEN PENDIS] Direktorat Guru danTenaga Kependidikan** |
| | | | | | | | |
| 1 : 14 | 1 : 15 | | | | | | |
| 35,95 | 38, 45 | | | | | | |
| 56,00 | 61,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.1.2133.4 | Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AsesmenKompetensi Kepala Madrasah/ Sekolah (AKK) minimal predikat terampil | Persen | 79,68 | 82,00 | 83,00 | 86,00 |
| IKSK.1.2133.5 | Persentase guru dan tenaga kependidikan Madrasah yang memperoleh nilaimoderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Persen | 49,17 | 51,17 | 53,17 | 55,17 |
| IKSK.1.2133.6 | Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen KompetensiPengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil | Persen | 86,00 | 87,00 | 89,00 | 92,00 |
| IKSK.1.2133.7 | Persentase guru madrasah yang meningkat jenjang karir | Persen | 0,07 | 0,15 | 0,17 | 0,19 |
| IKSK.1.2133.8 | Persentase Pengawas Madrasah yang meningkat jenjang karir | Persen | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 |
| **RO.2133. QEA.004** | **Guru Non-PNS Penerima Insentif** | **Orang** | **217.780** | **607.780** | **216.500** | **216.500** |
| IKRO.2133. QEA.004.1 | Jumlah Guru Non-PNS Penerima Insentif | Orang | 217.780 | 607.780 | 216.500 | 216.500 |
| **RO.2133. QEA.005** | **Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi** | **Orang** | **422.781** | **195.551** | **211.005** | **211.005** |
| IKRO.2133. QEA.005.1 | Jumlah Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi | Orang | 422.781 | 195.551 | 211.005 | 211.005 |
| **RO.2133. QEA.006** | **Guru Non-PNS dan Tendik penerima Tunjangan Khusus** | **Orang** | **9.043** | **9.043** | **9.043** | **9.689** |
| IKRO.2133. QEA.006.1 | Jumlah Guru Non-PNS dan Tendik penerima Tunjangan Khusus | Orang | 9.043 | 9.043 | 9.043 | 9.689 |
| **RO.2133. PDG.001** | **Guru Madrasah yang Tersertifikasi** | **Orang** | **9.000** | **9.101** | **9.801** | **10.501** |
| IKRO.2133. PDG.001.1 | Jumlah Guru Madrasah yang Tersertifikasi | Orang | 9.000 | 9.101 | 9.801 | 10.501 |
| **RO.2133. QEI.001** | **Lembaga Profesi/Mitra yang mendapatkan bantuan pemberdayaan kualitas Guru** | **Lembaga** | **703** | **550** | **592** | **635** |
| IKRO.2133. QEI.001.1 | Jumlah Lembaga Profesi/Mitra yang mendapatkan bantuan pemberdayaankualitas Guru | Lembaga | 703 | 550 | 592 | 635 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 89,00 | 92,00 | | | | | | |
| 57,17 | 59,17 | | | | | | |
| 95,00 | 98,00 | | | | | | |
| 0,21 | 0,23 | | | | | | |
| 0,71 | 0,72 | | | | | | |
| **216.500** | **216.500** | **731.007** | **745.922** | **760.838** | **775.753** | **790.670** | |
| 216.500 | 216.500 | | | | | | |
| **211.005** | **211.005** | **6.222.467** | **10.293.762** | **14.365.058** | **18.436.353** | **22.507.648** | |
| 211.005 | 211.005 | | | | | | |
| **10.380** | **11.073** | **126.442** | **129.022** | **131.602** | **134.182** | **136.763** | |
| 10.380 | 11.073 | | | | | | |
| **11.250** | **12.001** | **57.362** | **73.434** | **89.505** | **105.577** | **121.650** | |
| 11.250 | 12.001 | | | | | | |
| **680** | **725** | **7.900** | **8.061** | **8.222** | **8.383** | **8.545** | |
| 680 | 725 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2133. SCI.001** | **Guru Madrasah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi** | **Orang** | **3.271** | **3.700** | **3.848** | **4.040** |
| IKRO.2133. SCI.001.1 | Jumlah Guru Madrasah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi | Orang | N/A | 2.725 | 2.752 | 2.807 |
| **RO.2133. QDC.001** | **Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan RA Berprestasi** | **Orang** | **2.220** | **100** | **108** | **115** |
| IKRO.2133. QDC.001.1 | Jumlah guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP | Orang | N/A | 75,00 | 76,00 | 77,00 |
| IKRO.2133. QDC.001.2 | Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dankompetensi | Orang | N/A | 25,00 | 26,00 | 27,00 |
| **RO.2133. QAA.001** | **Pendidik dan Tenaga kependidikan Madrasah yg mendapat Pembinaan Karir** | **Orang** | **2.000** | **1.300** | **1.303** | **1.305** |
| IKRO.2133. QAA.001.1 | Jumlah guru madrasah yang meningkat jenjang karir | Orang | 104 | 1.300 | 1.303 | 1.305 |
| IKRO.2133. QAA.001.2 | Jumlah pengawas madrasah yang meningkat jenjang karir | Orang | 21 | 260 | 261 | 261 |
| **RO.2133. SCI.003** | **Guru dan Pengawas Madrasah yang Mendapat Penguatan PemahamanModerasi Beragama** | **Orang** | **500** | **500** | **510** | **520** |
| IKRO.2133. SCI.003.1 | Jumlah Guru dan Pengawas Madrasah yang Mendapat Penguatan PemahamanModerasi Beragama | Orang | N/A | 500 | 505 | 515 |
| **4422 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah** | | | | | | |
| **SK.4422.1** | **Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan** | | | | | |
| IKSK.4422.1.1 | Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk: | | | | | |
| | a literasi membaca | Persen | 90,23 | 90,25 | 90,38 | 90,50 |
| | b numerasi | Persen | 93,69 | 93,82 | 93,94 | 94,07 |
| IKSK.4422.1.2 | Nilai keberagamaan siswa pada madrasah | Nilai | 50,40 | 50,94 | 51,48 | 52,02 |
| IKSK.4422.1.3 | Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada madrasah | Nilai | N/A | 5,00 | 10,00 | 15,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **4.242** | **4.455** | **4.958** | **5.156** | **5.414** | **5.685** | **5.969** | |
| 2.892 | 3.007 | | | | | | |
| **124** | **132** | **3.500** | **3.769** | **4.038** | **4.327** | **4.615** | |
| 78,00 | 79,00 | | | | | | |
| 28,00 | 29,00 | | | | | | |
| **1.308** | **1.310** | **2.442** | **2.522** | **2.602** | **2.683** | **2.761** | |
| 1.308 | 1.310 | | | | | | |
| 262 | 262 | | | | | | |
| **531** | **541** | **1.000** | **1.020** | **1.040** | **1.061** | **1.082** | |
| 531 | 552 | | | | | | |
| | | **32.896** | **34.029** | **34.611** | **35.191** | **35.915** | **[DITJEN PENDIS] Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 90,63 | 90,75 | | | | | | |
| 94,19 | 94,32 | | | | | | |
| 52,56 | 53,10 | | | | | | |
| 20,00 | 25,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4422.1.4 | Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasispartisipasi komunitas pada madrasah | Persen | 90,00 | 92,00 | 94,00 | 96,00 |
| IKSK.4422.1.5 | Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakterdalam pembelajaran pada madrasah | Persen | 80,68 | 82,68 | 84,68 | 86,68 |
| IKSK.4422.1.6 | Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuanmadrasah | Jumlah | N/A | 52.456 | 52.849 | 53.378 |
| IKSK.4422.1.7 | Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan(disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | Persen | N/A | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| **RO.4422 QDB 001** | **Madrasah yang dibina dalam Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran** | **Lembaga** | **1** | **5.600** | **5.656** | **5.712** |
| IKRO.4422. QDB.001.1 | Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk:a literasi membacab numerasi | Nilai | 90,2393,69 | 90,2593,82 | 90,3893,94 | 90,594,07 |
| IKRO.4422. QDB.001.2 | Jumlah satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasispartisipasi komunitas pada madrasah | Lembaga | 78.818 | 80.570 | 82.321 | 84.073 |
| IKRO.4422. QDB.001.3 | Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalampembelajaran pada madrasah | Lembaga | 70.656 | 72.408 | 74.159 | 75.911 |
| IKRO.4422. QDB.001.4 | Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada madrasah | Orang | N/A | 52.456 | 52.849 | 53.378 |
| IKRO.4422. QDB.001.5 | Jumlah nilai rata-rata karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin,gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) pada madrasah | Nilai | N/A | 80,00 | 80,50 | 81,00 |
| **RO.4422 SCI 001** | **Siswa Madrasah mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama** | **Orang** | **500** | **1500** | **1560** | **1622** |
| IKRO.4422. SCI.001.1 | Jumlah rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada madrasah | Nilai | N/A | 5,00 | 10,00 | 15,00 |
| IKRO.4422. SCI.001.2 | Jumlah rata-rata Nilai keberagamaan siswa pada madrasah | Nilai | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 |
| SK.4422.2 | Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 98,00 | 99,00 | | | | | | |
| 88,68 | 90,68 | | | | | | |
| 54.045 | 54.856 | | | | | | |
| 1,25 | 1,50 | | | | | | |
| **5.766** | **5.822** | **7.576** | **7.652** | **7.728** | **7.801** | **7.877** | |
| 90,6394,19 | 90,7594,32 | | | | | | |
| 85.824 | 86.700 | | | | | | |
| 77.662 | 70.849 | | | | | | |
| 54.045 | 54.856 | | | | | | |
| 81,50 | 82,00 | | | | | | |
| **1687** | **1755** | **4.000** | **4.082** | **4.163** | **4.245** | **4.326** | |
| 20,00 | 25,00 | | | | | | |
| 50,40 | 50,40 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4422.2.1 | Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untukmendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada madrasah | Persen | N/A | 92,00 | 94,00 | 96,00 |
| IKSK.4422.2.2 | Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dandigunakan dalam proses pembelajaran pada madrasah | Persen | N/A | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| **RO.4422. PBH.001** | **Model Pembelajaran Madrasah yang Dikembangkan** | **Rekomen -dasi Kebijakan** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| IKRO.4422. PBH.001.1 | Jumlah Model Pembelajaran Madrasah yang Dikembangkan | Model | 8 | 8 | 9 | 10 |
| IKRO.4422. PBH.001.2 | Jumlah Materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dandigunakan dalam proses pembelajaran) | Dokumen | 6 | 94 | 100 | 105 |
| **SK.4422.3** | **Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu** | | | | | |
| IKSK.4422.3.1 | Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B | Persen | 44,00 | 47,20 | 50,40 | 53,60 |
| IKSK.4422.3.2 | Persentase MI yang terakreditasi minimal B | Persen | 77,70 | 80,30 | 82,90 | 85,50 |
| IKSK.4422.3.3 | Persentase MTs yang terakreditasi minimal B | Persen | 70,90 | 74,00 | 77,10 | 80,20 |
| IKSK.4422.3.4 | Persentase MA yang terakreditasi minimal B | Persen | 66,00 | 68,90 | 71,90 | 74,80 |
| IKSK.4422.3.5 | Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah | Persen | 0,91 | 0,98 | 1,04 | 1,06 |
| IKSK.4422.3.6 | Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual | Persen | 0,57 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| IKSK.4422.3.7 | Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasionalpada madrasah | Persen | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| IKSK.4422.3.8 | Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategoribaik | Persen | 62,80 | 65,80 | 66,90 | 68,00 |
| IKSK.4422.3.9 | Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasamadengan dunia kerja/industri | Persen | 14,07 | 15,07 | 16,07 | 17,07 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 98,00 | 99,00 | | | | | | |
| 1,25 | 1,50 | | | | | | |
| **8** | **9** | **6.555** | **6.689** | **6.823** | **6.956** | **7.090** | |
| 11 | 12 | | | | | | |
| 110 | 115 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 56,80 | 60,10 | | | | | | |
| 88,10 | 90,70 | | | | | | |
| 83,30 | 86,40 | | | | | | |
| 77,80 | 80,80 | | | | | | |
| 1,08 | 1,11 | | | | | | |
| 2,00 | 2,00 | | | | | | |
| 0,60 | 0,70 | | | | | | |
| 69,20 | 70,30 | | | | | | |
| 18,07 | 19,07 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4422.3.10 | Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkanlife skill melalui program magang | Persen | N/A | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
| IKSK.4422.3.11 | Persentase lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yangmendapatkan pekerjaan / bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun | Persen | N/A | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| **RO.4422 QIC 001** | **Madrasah yang mendapat Supervisi Pembelajaran** | **Lembaga** | **181** | **190** | **191** | **192** |
| IKRO.4422. QIC.001.1 | Jumlah PAUD/RA yang terakreditasi minimal B | Lembaga | 13.720 | 14.720 | 15.720 | 16.720 |
| IKRO.4422. QIC.001.2 | Jumlah MI yang terakreditasi minimal B | Lembaga | 20.811 | 21.511 | 22.211 | 22.911 |
| IKRO.4422. QIC.001.3 | Jumlah MTs yang terakreditasi minimal B | Lembaga | 13.787 | 14.387 | 14.987 | 15.587 |
| IKRO.4422. QIC.001.4 | Jumlah MA yang terakreditasi minimal B | Lembaga | 6.695 | 6.995 | 7.295 | 7.595 |
| IKRO.4422. QIC.001.5 | Jumlah satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah | Lembaga | 797 | 858 | 911 | 928 |
| IKRO.4422. QIC.001.6 | Jumlah RA yang menerapkan program Holistik-Integratif | Lembaga | 426 | 6.426 | 12.426 | 18.426 |
| IKRO.4422. QIC.001.7 | Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategoribaik | Lembaga | 447 | 876 | 1.752 | 2.627 |
| IKRO.4422. QIC.001.8 | Jumlah MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengandunia kerja/industri | Lembaga | 76 | 80 | 90 | 100 |
| IKRO.4422. QIC.001.9 | Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan lifeskill melalui program magang | Lembaga | N/A | 186 | 199 | 212 |
| IKRO.4422. QIC.001.10 | Jumlah lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mendapatkanpekerjaan /bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun | Orang | N/A | 16 | 17 | 18 |
| **RO.4422 QDC 001** | **Siswa Madrasah Berprestasi** | **Orang** | **1.900** | **2.000** | **2.115** | **2.155** |
| IKRO.4422. QDC.001.1 | Jumlah Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual | Lembaga | 499 | 876 | 876 | 1.752 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10,00 | 11,00 | | | | | | |
| 25,00 | 25,00 | | | | | | |
| **193** | **194** | **201** | **202** | **203** | **204** | **205** | |
| 17.720 | 18.720 | | | | | | |
| 23.611 | 24.311 | | | | | | |
| 16.187 | 16.787 | | | | | | |
| 7.895 | 8.195 | | | | | | |
| 946 | 972 | | | | | | |
| 24.426 | 30.426 | | | | | | |
| 3.503 | 4.379 | | | | | | |
| 110 | 120 | | | | | | |
| 224 | 237 | | | | | | |
| 19 | 20 | | | | | | |
| **2.195** | **2.255** | **14.564** | **15.404** | **15.694** | **15.985** | **16.417** | |
| 1.752 | 1.752 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4422. QDC.001.2 | Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional padamadrasah | Orang | 20.982 | 31.474 | 41.965 | 52.456 |
| **4433 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam** | | | | | | |
| **SK.4433.1** | **Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren** | | | | | |
| IKSK.4433.1.1 | Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikanpesantren dan pendidikan keagamaan islam untuk: | | | | | |
| | a literasi membaca | Nilai | N/A | 62,80 | 65,70 | 68,60 |
| | b numerasi | NIlai | N/A | 66,80 | 69,70 | 72,60 |
| IKSK.4433.1.2 | Persentase santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW) | Persen | 32,00 | 46,82 | 61,82 | 76,82 |
| IKSK.4433.1.3 | Nilai keberagamaan santri pada satuan pendidikan pesantren | Nilai | N/A | 77,00 | 80,85 | 84,89 |
| IKSK.4433.1.4 | Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama santri | Nilai | N/A | 78,00 | 81,90 | 86,00 |
| **RO.4433. QDB.001** | **Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama** | **Lembaga** | **1,00** | **1.000** | **1.042** | **1.083** |
| IKRO.4433. QDB.001.1 | Jumlah santri satuan pendidikan keagamaan Islam dan pesantren yangmemperoleh nilai literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi tingkat nasional dengan kategori baik | Orang | N/A | 273.068 | 300.596 | 330.656 |
| IKRO.4433. QDB.001.2 | Jumlah santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW) | Orang | N/A | 15.500 | 17.500 | 19.500 |
| IKRO.4433. QDB.001.3 | Jumlah santri satuan pendidikan keagamaan Islam dan pesantren yangdifasilitasi dalam survei indeks keberagamaan | Orang | N/A | 2.224.414 | 2.281.369 | 2.338.324 |
| IKRO.4433. QDB.001.4 | Jumlah santri satuan pendidikan keagamaan Islam dan pesantren yangmemperoleh penguatan moderasi beragama | Orang | N/A | 506.268 | 537.909 | 569.551 |
| **SK.4433.2** | **Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum** | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 62.947 | 73.439 | | | | | | |
| | | **182.600** | **308.727** | **334.856** | **560.983** | **687.114** | **[DITJEN PENDIS] Direktorat Pesantren** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 71,50 | 74,40 | | | | | | |
| 75,50 | 78,40 | | | | | | |
| 81,00 | 92,00 | | | | | | |
| 89,14 | 93,59 | | | | | | |
| 90,29 | 94,81 | | | | | | |
| **1.125** | **1.166** | **2.000** | **2.041** | **2.082** | **2.122** | **2.163** | |
| 363.563 | 399.951 | | | | | | |
| 22.500 | 24.500 | | | | | | |
| 2.395.279 | 2.452.234 | | | | | | |
| 601.193 | 632.835 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4433.2.1 | Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikankeagamaan islam | Persen | N/A | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| IKSK.4433.2.2 | Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan pesantren danpendidikan keagamaan islam | Persen | N/A | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| IKSK.4433.2.3 | Persentase peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan | Persen | 1,29 | 1,39 | 1,49 | 1,59 |
| **RO.4433. PBH.001** | **Model Pembelajaran Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dikembangkan** | **Kajian** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| IKRO.4433. PBH.001.1 | Jumlah materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakandalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam | Dokumen | N/A | 276 | 290 | 304 |
| IKRO.4433. PBH.001.2 | Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanuasiaan dan pelestarian lingkungan pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikankeagamaan islam | Dokumen | N/A | 28 | 42 | 56 |
| IKRO.4433. PBH.001.3 | Jumlah peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan | Kajian | 56 | 60 | 64 | 68 |
| **SK.4433.3** | **Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu** | | | | | |
| IKSK.4433.3.1 | Persentase PAUDQU yang terakreditasi minimal B | Persen | N/A | 4,91 | 5,20 | 5,45 |
| IKSK.4433.3.2 | Persentase Satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasilasesmen minimal jayyid | Persen | N/A | 10,00 | 15,00 | 20,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1,25 | 1,50 | | | | | | |
| 1,25 | 1,50 | | | | | | |
| 1,69 | 1,79 | | | | | | |
| **6** | **6** | **1.000** | **1.020** | **1.041** | **1.061** | **1.082** | |
| 320 | 335 | | | | | | |
| 70 | 84 | | | | | | |
| 72 | 76 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5,75 | 6,00 | | | | | | |
| 25,00 | 30,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4433.3.3 | Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada satuanpendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam | Persen | N/A | 0,23 | 0,26 | 0,27 |
| IKSK.4433.3.4 | Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Persen | 20,00 | 21,00 | 23,00 | 24,00 |
| IKSK.4433.3.5 | Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yangdinilai dan dievaluasi mutunya | Persen | N/A | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| IKSK.4433.3.6 | Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yangmendapatkan pendampingan | Persen | N/A | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| IKSK.4433.3.7 | Persentase satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan programpendidikan bilingual | Persen | 8,00 | 12,00 | 17,00 | 23,00 |
| IKSK.4433.3.8 | Persentase peningkatan jumlah lulusan pesantren Internasional | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RO.4433. QEI.002** | **Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren** | **Lembaga** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.4433. QEI.002.1 | Jumlah PAUDQU yang memperoleh hasil asesmen minimal B | Lembaga | N/A | 170 | 180 | 189 |
| IKRO.4433. QEI.002.2 | Jumlah satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada satuan pendidikanpesantren dan pendidikan keagamaan islam | Lembaga | N/A | 791 | 895 | 929 |
| IKRO.4433. QEI.002.3 | Jumlah santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Orang | N/A | 624.604 | 684.091 | 713.834 |
| IKRO.4433. QEI.002.4 | Jumlah satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilaidan dievaluasi mutunya | Lembaga | N/A | 12.683 | 16.911 | 21.139 |
| IKRO.4433. QEI.002.5 | Jumlah satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yangmendapatkan pendampingan | Lembaga | N/A | 4.228 | 6.342 | 8.456 |
| IKRO.4433. QEI.002.6 | Jumlah satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikanbilingual | Lembaga | N/A | 5.073 | 7.187 | 9.724 |
| IKRO.4433. QEI.002.7 | Jumlah peningkatan lulusan pesantren Internasional | Lembaga | N/A | 0 | 0 | 0 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0,28 | 0,29 | | | | | | |
| 26,00 | 28,00 | | | | | | |
| 60,00 | 70,00 | | | | | | |
| 25,00 | 30,00 | | | | | | |
| 30,00 | 38,00 | | | | | | |
| 0,25 | 0,30 | | | | | | |
| **2** | **2** | **20.000** | **25.500** | **31.000** | **36.500** | **42.000** | |
| 199 | 208 | | | | | | |
| 963 | 998 | | | | | | |
| 773.320 | 832.806 | | | | | | |
| 25.367 | 29.595 | | | | | | |
| 10.570 | 12.683 | | | | | | |
| 12.683 | 16.066 | | | | | | |
| 864 | 864 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.4433. PDG.003** | **Ustadz yang Tersertifikasi** | **Orang** | **1.100** | **1.100** | **1.424** | **1.795** |
| IKRO.4433. PDG.003.1 | Jumlah Ustadz yang Tersertifikasi | Orang | 1.100 | 1.100 | 1.424 | 1.795 |
| **RO.4433. QEA.001** | **Ustadz pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Insentif** | **Orang** | **20.000** | **35.700** | **43.814** | **52.879** |
| IKRO.4433. QEA.001.1 | Jumlah Ustadz pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan IslamPenerima Insentif | Orang | 20.000 | 35.700 | 43.814 | 52.879 |
| **RO.4433. QEA.002** | **Guru pada Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah Penerima TPG** | **Orang** | **500** | **500** | **614** | **741** |
| IKRO.4433. QEA.002.1 | Jumlah Guru pada Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah Penerima TPG | Orang | 500 | 35.700 | 43.814 | 52.879 |
| **RO.4433. SCI.001** | **Ustadz yang ditingkatkan Kompetensinya** | **Orang** | **200** | **200** | **245** | **296** |
| IKRO.4433. SCI.001.1 | Jumlah Ustadz yang ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 200 | 200 | 245 | 296 |
| **SK.4433.4** | **Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan** | | | | | |
| IKSK.4433.4.1 | Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi pada satuanpendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam | Persen | 75 | 77 | 79 | 80 |
| **RO.4433. QEI.001** | **Jumlah Lembaga Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas** | **Lembaga** | **35** | **35** | **36** | **36** |
| IKRO.4433. QEI.001.1 | Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yangmendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi | Lembaga | 35 | 35 | 36 | 37 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2.214 | 2.680 | 2.000 | 10.000 | 18.000 | 26.000 | 34.000 | |
| 2.214 | 2.680 | | | | | | |
| 62.883 | 73.819 | 143.100 | 145.285 | 47.470 | 149.656 | 151.842 | |
| 62.883 | 73.819 | | | | | | |
| 881 | 1.034 | 9.000 | 115.800 | 222.600 | 329.400 | 436.200 | |
| 62.883 | 73.819 | | | | | | |
| 352 | 414 | 2.000 | 5.510 | 9.020 | 12.530 | 16.041 | |
| 352 | 414 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 85 | 90 | | | | | | |
| 38 | 41 | 3.500 | 3.571 | 3.643 | 3.714 | 3.786 | |
| 38 | 39 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **4434 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Kristen** | | | | | | |
| **SK.4434.1** | **Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan** | | | | | |
| IKSK.4434.1.1 | Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: | | | | | |
| | a literasi membaca | Nilai | 44,24 | 44,46 | 44,68 | 44,91 |
| | b numerasi | Nilai | 43,75 | 43,97 | 44,19 | 44,41 |
| IKSK.4434.1.2 | Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan Kristen | Nilai | 82,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 |
| IKSK.4434.1.3 | Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikanKristen | Nilai | 82,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 |
| IKSK.4434.1.4 | Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasispartisipasi komunitas | Persen | 83,93 | 84,93 | 85,93 | 86,93 |
| IKSK.4434.1.5 | Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakterdalam pembelajaran | Persen | 100,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 |
| IKSK.4434.1.6 | Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler | Prestasi | 49 | 67 | 70 | 75 |
| IKSK.4434.1.7 | Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan(disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | Persen | 82,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 |
| IKSK.4434.1.8 | Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untukmendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan | Persen | 82,79 | 83,49 | 84,42 | 85,12 |
| IKSK.4434.1.9 | Persentase SDTK Kristen yang terakreditasi minimal B | Persen | 43,42 | 43,42 | 59,21 | 76,32 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | 78.808 | 267.490 | 292.743 | 334.260 | 376.691 | [BIMAS KRISTEN] Direktorat PendidikanAgama Kristen |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 45,13 | 45,36 | | | | | | |
| 44,63 | 44,85 | | | | | | |
| 88,00 | 89,00 | | | | | | |
| 88,00 | 89,00 | | | | | | |
| 87,93 | 88,93 | | | | | | |
| 98,00 | 99,00 | | | | | | |
| 80 | 85 | | | | | | |
| 88,00 | 89,00 | | | | | | |
| 86,05 | 86,98 | | | | | | |
| 82,89 | 92,11 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4434.1.10 | Persentase SMPTK Kristen yang terakreditasi minimal B | Persen | 30,60 | 30,60 | 41,79 | 58,96 |
| IKSK.4434.1.11 | Persentase SMTK/SMAK Kristen yang terakreditasi minimal B | Persen | 27,27 | 27,27 | 37,27 | 42,73 |
| IKSK.4434.1.12 | Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara | Persen | 1,86 | 1,86 | 2,09 | 2,33 |
| IKSK.4434.1.13 | Persentase satuan pendidikan Kristen yang menerapkan program pendidikanbilingual | Persen | 0,47 | 0,70 | 1,63 | 2,79 |
| IKSK.4434.1.14 | Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Persen | 0,25 | 1,81 | 1,86 | 1,91 |
| IKSK.4434.1.15 | Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif padakategori baik | Persen | 41,63 | 41,63 | 43,26 | 44,88 |
| IKSK.4434.1.16 | Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dandigunakan dalam proses pembelajaran | Persen | 49,68 | 52,90 | 58,20 | 62,85 |
| **RO.4434. PEF.001** | **Sosialisasi/Pendampingan Pemahaman Moderasi Beragama dan Pendidikan Karakter pada Siswa Sekolah Keagamaan Kristen** | **Orang** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| IKRO.4434. PEF.001.1 | Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang mengintegrasikanpendidikan karakter dalam pembelajaran | Lembaga | 430 | 430 | 430 | 430 |
| **RO.4434. QDB.001** | **Pembinaan Kualitas Manajemen Tata Kelola Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen** | **Lembaga** | **100** | **130** | **135** | **140** |
| IKRO.4434. QDB.001.1 | Jumlah SDTK yang Terakreditasi Minimal B | Lembaga | 33 | 33 | 45 | 58 |
| IKRO.4434. QDB.001.2 | Jumlah SMPTKyang Terakreditasi Minimal B | Lembaga | 41 | 41 | 56 | 79 |
| IKRO.4434. QDB.001.3 | Jumlah SMTK/SMAK yang Terakreditasi Minimal B | Lembaga | 60 | 60 | 82 | 94 |
| IKRO.4434. QDB.001.4 | Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Unggul yang terselenggara | Lembaga | 8 | 8 | 9 | 10 |
| IKRO.4434. QDB.001.5 | Jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan programpendidikan bilingual | Lembaga | 2 | 3 | 7 | 10 |
| IKRO.4434. QDB.001.6 | Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Orang | 8 | 8 | 12 | 14 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 69,40 | 79,10 | | | | | | |
| 50,91 | 59,09 | | | | | | |
| 2,79 | 3,09 | | | | | | |
| 3,49 | 4,65 | | | | | | |
| 1,96 | 2,07 | | | | | | |
| 46,98 | 50,00 | | | | | | |
| 66,54 | 71,96 | | | | | | |
| **3.500** | **3.500** | **1.987** | **2.618** | **3.952** | **5.426** | **6.240** | |
| 430 | 430 | | | | | | |
| **145** | **150** | **4.522** | **5.040** | **6.300** | **7.560** | **8.694** | |
| 63 | 70 | | | | | | |
| 93 | 106 | | | | | | |
| 112 | 130 | | | | | | |
| 11 | 12 | | | | | | |
| 12 | 15 | | | | | | |
| 16 | 20 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4434. QDB.001.7 | Jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen dengan nilai pengeloalan yangpartisipatif pada kategori baik | Lembaga | 180 | 180 | 186 | 193 |
| IKRO.4434. QDB.001.8 | Jumlah Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen YangDitingkatkan Mutunya | Lembaga | 100 | 130 | 135 | 140 |
| **RO.4434. PBH.001** | **Rekomendasi Kebijakan Terhadap Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen** | **Kajian** | **N/A** | **80,00** | **80,00** | **80,00** |
| IKRO.4434. PBH.001.1 | Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: | | | | | |
| | a literasi membaca | Nilai | 44,24 | 44,46 | 44,68 | 44,91 |
| | b numerasi | Nilai | 43,75 | 43,97 | 44,19 | 44,41 |
| IKRO.4434. PBH.001.2 | Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan keagamaan Kristen | Nilai | 82,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 |
| IKRO.4434. PBH.001.3 | Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikanKristen | Nilai | 82,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 |
| IKRO.4434. PBH.001.4 | Jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menyusun rencana kerjatahunan berbasis partisipasi komunitas | Lembaga | 360 | 365 | 370 | 373 |
| IKRO.4434. PBH.001.5 | Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler | Prestasi | N/A | 67,00 | 70,00 | 75,00 |
| IKRO.4434. PBH.001.6 | Jumlah nilai rata-rata karakter siswa satuan pendidikan kegamaan Kristenmelalui kegiatan kepramukaan | Nilai | N/A | 85,00 | 86,00 | 87,00 |
| IKRO.4434. PBH.001.7 | Jumlah perangkat kurikulum satuan pendidikan keagamaan Kristen yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutupendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan | Modul | N/A | 80 | 80 | 80 |
| IKRO.4434. PBH.001.8 | Jumlah Materi/Bahan Ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dandigunakan dalam proses pembelajaran | Modul | N/A | 10 | 20 | 30 |
| **SK.4434.2** | **Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Kristen** | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 202 | 215 | | | | | | |
| 145 | 150 | | | | | | |
| **80,00** | **80,00** | **2.873** | **7.500** | **9.375** | **11.250** | **12.938** | |
| | | | | | | | |
| 45,13 | 45,36 | | | | | | |
| 44,63 | 44,85 | | | | | | |
| 88,00 | 89,00 | | | | | | |
| 88,00 | 89,00 | | | | | | |
| 378 | 382 | | | | | | |
| 80,00 | 85,00 | | | | | | |
| 88,00 | 89,00 | | | | | | |
| 80 | 80 | | | | | | |
| 40 | 50 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4434.2.1 | Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP | Rasio | N/A | 01:20 | 01:20 | 01:20 |
| IKSK.4434.2.2 | Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dankompetensi minimal | Persen | N/A | 35,00 | 40,00 | 55,00 |
| IKSK.4434.2.3 | Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen KompetensiGuru (AKG) minimal predikat terampil | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| IKSK.4434.2.4 | Persentase Kepala satuan pendidikan Kristen yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| IKSK.4434.2.5 | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasiberagama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Persen | N/A | 10,00 | 10,50 | 11,03 |
| IKSK.4434.2.6 | Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| IKSK.4434.2.7 | Persentase guru yang meningkat jenjang karir | Persen | N/A | 1,31 | 1,32 | 1,34 |
| IKSK.4434.2.8 | Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir | Persen | N/A | 1,31 | 1,31 | 1,35 |
| IKSK.4434.2.9 | Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agamaKristen | Persen | N/A | 98,00 | 98,70 | 99,10 |
| IKSK.4434.2.10 | Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasisrencana kebutuhan yang diterbitkan | Persen | N/A | 0,00 | 98,00 | 98,50 |
| **RO.4434. PDI.001** | **Sertifikasi Guru pada Sekolah Keagamaan Kristen dan Guru Pendidikan Agama Kristen pada Sekolah Umum** | **Orang** | **2.500** | **10.841** | **11.000** | **1.000** |
| IKRO.4434. PDI.001.1 | Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen dan Guru Mapel Umum SekolahKeagamaan Kristen yang Tersertifikasi | Orang | 2.500 | 10.841 | 11.000 | 1.000 |
| IKRO.4434. PDI.001.2 | Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Kristen | Orang | 2.500 | 10.841 | 11.000 | 1.000 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 01:20 | 01:20 | | | | | | |
| 60,00 | 70,00 | | | | | | |
| 0,10 | 0,10 | | | | | | |
| 0,20 | 0,80 | | | | | | |
| 11,58 | 12,16 | | | | | | |
| 0,40 | 0,60 | | | | | | |
| 1,35 | 1,36 | | | | | | |
| 1,35 | 1,36 | | | | | | |
| 99,40 | 99,70 | | | | | | |
| 98,70 | 99,00 | | | | | | |
| **0** | **0** | **8.760** | **13.849** | **1.000** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.4434. QEH.001** | **Bantuan POKJAWAS/KKG/MGMP Kristen** | **Kelompok Masya-rakat** | **138** | **202** | **280** | **320** |
| IKRO.4434. QEH.001.1 | Jumlah lembaga yang menerima bantuan Pokjawas/KKG/MGMP | Lembaga | 138 | 202 | 280 | 320 |
| **RO.4434. QEA.001** | **Bantuan Insentif Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN** | **Orang** | **3.867** | **3.825** | **19.380** | **19.380** |
| IKRO.4434. QEA.001.1 | Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen dan Keagamaan Kristen Non ASNPenerima Insentif | Orang | 3.867 | 3.825 | 19.380 | 19.380 |
| **RO.4434. QEA.002** | **Bantuan Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN** | **Orang** | **1.345** | **1.338** | **5.883** | **7.985** |
| IKRO.4434. QEA.002.1 | Jumlah Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN PenerimaTunjangan Profesi | Orang | 1.345 | 1.338 | 5.883 | 7.985 |
| IKRO.4434. QEA.002.2 | Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencanakebutuhan yang diterbitkan | Rekomen-dasi | N/A | 0 | 1 | 1 |
| **RO.4434. QEA.003** | **Bantuan Tunjangan Khusus 3T Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN** | **Orang** | **516** | **738** | **860** | **1.350** |
| IKRO.4434. QEA.003.1 | Jumlah Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN PenerimaTunjangan Khusus (3T) | Orang | 516 | 738 | 860 | 1.350 |
| **RO.4434. SCI.001** | **Pelatihan Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen serta Tenaga Kependidikan dalam rangka peningkatan kompetensi** | **Orang** | **3.797** | **14.976** | **16.200** | **18.675** |
| IKRO.4434. SCI.001.1 | Jumlah Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen yang ditingkatkankompetensinya | Orang | 3.797 | 14.801 | 16.000 | 18.400 |
| IKRO.4434. SCI.001.2 | Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dankompetensi minimal | Orang | N/A | 175 | 200 | 275 |
| IKRO.4434. SCI.001.3 | Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasiberagama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Orang | N/A | 473 | 459 | 482 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **375** | **400** | **2.975** | **4.250** | **6.563** | **8.875** | **9.056** | |
| 375 | 400 | | | | | | |
| **19.380** | **19.380** | **11.540** | **58.140** | **64.309** | **69.215** | **75.030** | |
| 19.380 | 19.380 | | | | | | |
| **7.985** | **7.985** | **24.802** | **141.223** | **162.402** | **186.748** | **214.735** | |
| 7.985 | 7.985 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **1.444** | **1.545** | **13.630** | **17.871** | **20.592** | **23.686** | **27.272** | |
| 1.444 | 1.545 | | | | | | |
| **21.460** | **24.684** | **7.719** | **17.000** | **18.250** | **21.500** | **22.725** | |
| 21.160 | 24.334 | | | | | | |
| 300 | 350 | | | | | | |
| 506 | 531 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **4435 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik** | | | | | | |
| **SK.4435.1** | **Meningkatnya layanan pendidikan keagamaan Katolik berkualitas, inklusif berorierntasi pada pencapaian kompetensi siswa melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif, akuntabel dan pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan** | | | | | |
| IKSK.4435.1.1 | Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional Siswa Katolik untuk: | | | | | |
| | a literasi membaca | Nilai | 59,72 | 60,00 | 62,00 | 65,00 |
| | b numerasi | Nilai | 50,60 | 51,00 | 53,00 | 55,00 |
| IKSK.4435.1.2 | Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan Katolik | Nilai | N/A | 65,00 | 70,00 | 80,00 |
| IKSK.4435.1.3 | Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa Katolik | Nilai | N/A | 80,00 | 80,00 | 82,00 |
| IKSK.4435.1.4 | Persentase satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas | Persen | N/A | 30,00 | 50,00 | 70,00 |
| IKSK.4435.1.5 | Persentase satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Persen | N/A | 90,74 | 90,74 | 92,59 |
| IKSK.4435.1.6 | Jumlah prestasi Siswa Katolik yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler | Penghar-gaan | N/A | 0 | 5 | 7 |
| IKSK.4435.1.7 | Persentase peningkatan nilai karakter siswa Katolik melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | Persen | N/A | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| IKSK.4435.1.8 | Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Keagamaan Katolik berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan | Persen | N/A | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| IKSK.4435.1.9 | Persentase Taman Seminari yang terakreditasi minimal B | Persen | 16,18 | 41,18 | 50,00 | 58,82 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **92.395** | **112.637** | **123.551** | **137.890** | **154.770** | **[BIMAS KATOLIK] Direktorat Pendidikan Agama Katolik** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 68,00 | 70,00 | | | | | | |
| 58,00 | 60,00 | | | | | | |
| 90,00 | 95,00 | | | | | | |
| 85,00 | 87,00 | | | | | | |
| 90,00 | 91,00 | | | | | | |
| 96,30 | 97,30 | | | | | | |
| 8 | 10 | | | | | | |
| 15,00 | 20,00 | | | | | | |
| 50,00 | 50,00 | | | | | | |
| 72,06 | 80,88 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4435.1.10 | Persentase SD Katolik yang terakreditasi minimal B | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.4435.1.11 | Persentase SMP Katolik yang terakreditasi minimal B | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.4435.1.12 | Persentase SMA Katolik yang terakreditasi minimal B | Persen | N/A | 73,47 | 77,55 | 83,67 |
| IKSK.4435.1.13 | Persentase satuan pendidikan Keagamaan Katolik unggul yang terselenggara | Persen | N/A | 2,04 | 6,12 | 10,00 |
| IKSK.4435.1.14 | Persentase satuan pendidikan Katolik yang menerapkan program pendidikan bilingual | Persen | N/A | 0,00 | 2,04 | 2,04 |
| IKSK.4435.1.15 | Persentase siswa Katolik yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Persen | N/A | 0,15 | 0,46 | 0,77 |
| IKSK.4435.1.16 | Persentase satuan pendidikan Katolik dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | Persen | N/A | 18,37 | 36,73 | 55,10 |
| IKSK.4435.1.17 | Persentase materi ajar digital Keagamaan Katolik (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran | Persen | N/A | 11,76 | 23,53 | 47,06 |
| **RO.4435. PBH.001** | **Kebijakan Kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Dasar dan Menengah** | **Rekomen-dasi Kebijakan** | **N/A** | **0** | **2** | **2** |
| IKRO.4435. PBH.001 | Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Keagamaan Katolik berbasis cinta kemanuasiaan dan pelestarian lingkungan | Kurikulum | N/A | 0 | 2 | 2 |
| **RO.4435. PDE.001** | **Akreditasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **3** | **3** | **3** |
| IKRO.4435. PDE.001.1 | Jumlah SMAK Katolik yang terakreditasi minimal B | Lembaga | N/A | 0 | 2 | 6 |
| IKRO.4435. PDE.001.2 | Jumlah SMP Katolik yang terakreditasi minimal B | Lembaga | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.4435. PDE.001.3 | Jumlah SD Katolik yang terakreditasi minimal B | Lembaga | N/A | 0 | 0 | 0 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0,00 | 14,29 | | | | | | |
| 0,00 | 14,29 | | | | | | |
| 85,71 | 88,00 | | | | | | |
| 13,46 | 16,67 | | | | | | |
| 2,04 | 2,04 | | | | | | |
| 1,23 | 1,54 | | | | | | |
| 73,47 | 91,84 | | | | | | |
| 70,59 | 88,24 | | | | | | |
| **2** | **2** | **0** | **1.000** | **1.150** | **1.323** | **1.521** | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| **3** | **3** | **150** | **300** | **324** | **500** | **700** | |
| 6 | 14 | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4435. PDE.001.4 | Jumlah Taman Seminari Katolik yang terakreditasi minimal B | Lembaga | N/A | 3 | 6 | 6 |
| IKRO.4435. PDE.001.5 | Jumlah satuan pendidikan Katolik unggul yang terselenggara | Lembaga | N/A | 4 | 5 | 6 |
| IKRO.4435. PDE.001.6 | Jumlah satuan pendidikan Katolik yang menerapkan program pendidikan bilingual | Lembaga | N/A | 0 | 1 | 1 |
| IKRO.4435. PDE.001.7 | Jumlah satuan pendidikan Katolik dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | Lembaga | N/A | 1 | 2 | 3 |
| IKRO.4435. PDE.001.8 | Jumlah siswa Katolik yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Orang | N/A | 10 | 30 | 50 |
| RO.4435. PEF.001 | Sosialisasi dan Diseminasi Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan pada Siswa Katolik | Orang | N/A | 0 | 5.000 | 5.750 |
| IKRO.4435. PEF.001.1 | Jumlah satuan pendidikan katolik yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Lembaga | N/A | 0 | 49 | 50 |
| **RO.4435. PEF.002** | **Siswa SMAKN Katolik yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan** | **Orang** | **N/A** | **892** | **892** | **892** |
| IKRO.4435. PEF.002.1 | Jumlah Siswa SMAKN Katolik yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan | Orang | N/A | 892 | 892 | 892 |
| **RO.4435. PEF.003** | **Pembinaan Siswa melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Katolik** | **Orang** | **N/A** | **0** | **6.250** | **7.000** |
| IKRO.4435. PEF.003.1 | Jumlah nilai rata-rata karakter siswa Katolik melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | Nilai | N/A | 0 | 80 | 80,5 |
| IKRO.4435. PEF.003.2 | Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada satuan pendidikan katolik yang bermuatan moderasi beragama | Kegiatan | N/A | 49 | 49 | 50 |
| IKRO.4435. PEF.003.3 | Jumlah gugus depan pramuka pada satuan pendidikan katolik yang dibina | Lembaga | N/A | 49 | 49 | 50 |
| **RO.4435. PEF.004** | **Pembinaan Kompetensi Siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik** | **Orang** | **N/A** | **0** | **3** | **5** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 6 | 6 | | | | | | |
| 8 | 10 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 80 | 100 | | | | | | |
| 6.613 | 7.604 | 0 | 5.000 | 5.750 | 6.613 | 7.604 | |
| 52 | 54 | | | | | | |
| **892** | **892** | **2.556** | **560** | **643** | **740** | **853** | |
| 892 | 892 | | | | | | |
| **7.250** | **7.500** | **0** | **5.000** | **5.600** | **5.800** | **6.000** | |
| 81 | 81,5 | | | | | | |
| 52 | 54 | | | | | | |
| 52 | 54 | | | | | | |
| **7** | **10** | **0** | **1.000** | **1.150** | **1.323** | **1.521** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4435. PEF.004.1 | Jumlah lulusan satuan pendidikan Katolik yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh Lembaga Pemerintah, Pendidikan Umum, atau Lembaga Profesi | Orang | N/A | 0 | 3 | 5 |
| **RO.4435. QEI.006** | **SMAK Katolik yang mendapat Bantuan pendidikan karakter dan kewarganegaraan** | **Lembaga** | **N/A** | **37** | **0** | **0** |
| IKRO.4435. QEI.006.1 | Jumlah satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Lembaga | N/A | 37 | 0 | 0 |
| **RO.4435. QEI.007** | **Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang Ditingkatkan Mutunya** | **Lembaga** | **N/A** | **12** | **12** | **12** |
| IKRO.4435. QEI.007.1 | Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional Siswa Katolik untuk: a literasi membaca b numerasi | Nilai | N/A | 55,5 | 57,5 | 60 |
| IKRO.4435. QEI.007.2 | Nilai keberagamaan siswa Katolik | Nilai | N/A | 65 | 70 | 80 |
| IKRO.4435. QEI.007.3 | Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa Katolik | Nilai | N/A | 80 | 80 | 82 |
| IKRO.4435. QEI.007.4 | Jumlah satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas | Lembaga | N/A | 0 | 44 | 70 |
| IKRO.4435. QEI.007.5 | Jumlah prestasi Siswa Katolik yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler | Prestasi | N/A | 0 | 5 | 7 |
| IKRO.4435. QEI.007.6 | Jumlah materi ajar digital Keagamaan Katolik (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran | Materi | N/A | 2 | 4 | 8 |
| **RO.4435. QGC.001** | **Fasilitasi dan Pembinaan Kualitas Tata Kelola pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **2** | **3** |
| IKRO.4435. QGC.001.1 | Jumlah Satuan Pendidikan Katolik dengan Nilai Pengelolaan yang Partisipatif pada Kategori Baik | Lembaga | N/A | 0 | 2 | 3 |
| **SK.4435.2** | **Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Katolik** | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 7 | 10 | | | | | | |
| **0** | **0** | **4.511** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **12** | **12** | **145** | **177** | **213** | **255** | **303** | |
| 63 | 62 | | | | | | |
| 90 | 95 | | | | | | |
| 85 | 87 | | | | | | |
| 71 | 72 | | | | | | |
| 8 | 10 | | | | | | |
| 12 | 15 | | | | | | |
| **4** | **5** | **0** | **1.000** | **1.150** | **1.323** | **1.521** | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4435.2.1 | Rasio guru satuan pendidikan Keagamaan Katolik terhadap siswa yang memenuhi SNP | Rasio | N/A | 1:8 | 1:8 | 1:8 |
| IKSK.4435.2.2 | Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.4435.2.3 | Persentase guru agama Katolik yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | N/A | 39,82 | 71,52 | 92,00 |
| IKSK.4435.2.4 | Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru satuan pendidikan Katolik (AKG) minimal predikat terampil | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 31,65 |
| IKSK.4435.2.5 | Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Katolik (AKP) minimal predikat terampil | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 33,18 |
| IKSK.4435.2.6 | Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Katolik | Persen | N/A | 80,21 | 28,55 | 1,89 |
| IKSK.4435.2.7 | Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Katolik berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Persen | N/A | 0,00 | 80,00 | 85,00 |
| **RO.4435. PDI.001** | **Sertifikasi Kompetensi Guru Katolik** | **Orang** | **N/A** | **0** | **1.212** | **1.388** |
| IKRO.4435. PDI.001.1 | Jumlah Guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Katolik | Orang | N/A | 0 | 1.212 | 1.388 |
| **RO.4435. QEA.001** | **Guru Agama Katolik Non ASN Penerima Insentif** | **Orang** | **N/A** | **2.373** | **2.960** | **3.405** |
| IKRO.4435. QEA.001.1 | Jumlah guru pada satuan pendidikan Keagamaan Katolik sesuai SNP | Orang | N/A | 17.546 | 17.546 | 17.546 |
| IKRO.4435. QEA.001.2 | Jumlah Guru Agama Katolik Non ASN Penerima Insentif | Orang | N/A | 2.373 | 2.960 | 3.405 |
| **RO.4435. QEA.002** | **Guru SMAK Katolik Non ASN Penerima Insentif** | **Orang** | **N/A** | **512** | **153** | **153** |
| IKRO.4435. QEA.002.1 | Jumlah guru pada satuan pendidikan Keagamaan Katolik sesuai SNP | Orang | N/A | 17.546 | 17.546 | 17.546 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1:8 | 1:8 | | | | | | |
| 14,89 | 29,79 | | | | | | |
| 93,00 | 96,00 | | | | | | |
| 64,98 | 75,00 | | | | | | |
| 66,36 | 75,00 | | | | | | |
| 1,90 | 1,90 | | | | | | |
| 90,00 | 95,00 | | | | | | |
| **1.589** | **1.827** | **0** | **970** | **1.110** | **1.271** | **1.462** | |
| 1.589 | 1.827 | | | | | | |
| **3.922** | **4.511** | **7.122** | **8.880** | **10.215** | **11.767** | **13.533** | |
| 17.546 | 17.546 | | | | | | |
| 3.922 | 4.511 | | | | | | |
| **200** | **230** | **1.536** | **459** | **459** | **600** | **690** | |
| 17.546 | 17.546 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4435. QEA.002.2 | Jumlah Guru SMAK Katolik Non ASN Penerima Insentif | Orang | N/A | 512 | 153 | 153 |
| **RO.4435. QEA.003** | **Guru Agama Katolik Non ASN penerima Tunjangan Profesi** | **Orang** | **N/A** | **1.094** | **1.945** | **2.115** |
| IKRO.4435. QEA.003.1 | Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Katolik berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Rekomen-dasi | N/A | 0 | 1 | 1 |
| **RO.4435. QEA.004** | **Guru SMAK Katolik Non ASN penerima Tunjangan Profesi** | **Orang** | **N/A** | **4** | **500** | **500** |
| IKRO.4435. QEA.004.1 | Jumlah guru SMAK Katolik non ASN yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | Orang | N/A | 0 | 0 | 300 |
| **RO.4435. QEA.006** | **Guru Agama Katolik Non ASN penerima Tunjangan Khusus (3T)** | **Orang** | **N/A** | **884** | **187** | **210** |
| IKRO.4435. QEA.006.1 | Jumlah guru satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang memenuhi SNP | Rasio | N/A | 17.546 | 17.546 | 17.546 |
| IKRO.4435. QEA.006.2 | Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Katolik berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Rekomen-dasi | N/A | 0 | 1 | 1 |
| **RO.4435. QEA.007** | **Guru SMAK Katolik Non ASN Penerima Tunjangan Khusus (3T)** | **Orang** | **N/A** | **245** | **234** | **234** |
| IKRO.4435. QEA.007.1 | Jumlah guru satuan pendidikan Keagamaan Katolik terhadap siswa yang memenuhi SNP | Rasio | N/A | 17.546 | 17.546 | 17.546 |
| IKRO.4435. QEA.007.2 | Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Katolik berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Rekomen-dasi | N/A | 0 | 1 | 1 |
| **RO.4435. QEA.008** | **Guru Taman Seminari Katolik Non ASN penerima Tunjangan Profesi** | **Orang** | **N/A** | **1** | **21** | **21** |
| IKRO.4435. QEA.008.1 | Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Katolik | Orang | N/A | 5.970 | 5.830 | 0 |
| **RO.4435. QEA.009** | **Bantuan Tunjangan Khusus (3T) bagi Guru Taman Seminari Katolik Non ASN** | **Orang** | **N/A** | **0** | **0** | **0** |
| IKRO.4435. QEA.009.1 | Jumlah pemenuhan kebutuhan guru Taman Seminari di daerah 3T | Orang | N/A | 0 | 34 | 34 |
| **RO.4435. QEA.010** | **Bantuan Tunjangan Khusus (3T) bagi Guru Agama Katolik Non ASN Tingkat Dasar** | **Orang** | **N/A** | **0** | **0** | **0** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 200 | 230 | | | | | | |
| **2.375** | **2.736** | **29.247** | **46.680** | **50.760** | **57.000** | **65.664** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **500** | **500** | **87** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | |
| 316 | 332 | | | | | | |
| **235** | **257** | **14.321** | **3.096** | **3.461** | **3.880** | **4.230** | |
| 17.546 | 17.546 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **234** | **234** | **3.969** | **4.212** | **4.212** | **4.212** | **4.212** | |
| 17.546 | 17.546 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **21** | **21** | **18** | **504** | **504** | **504** | **504** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 34 | 34 | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4435. QEA.010.1 | Jumlah pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Katolik pada satuan pendidikan tingkat dasar di daerah 3T | Orang | N/A | 0 | 0 | 0 |
| **RO.4435. QEA.011** | **Bantuan Tunjangan Khusus (3T) bagi Guru Agama Katolik Non ASN Tingkat Menengah** | **Orang** | **N/A** | **0** | **0** | **0** |
| IKRO.4435. QEA.011.1 | Jumlah pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Katolik pada satuan pendidikan tingkat menengah di daerah 3T | Orang | N/A | 0 | 0 | 0 |
| **RO.4435. QEA.012** | **Bantuan Tunjangan Khusus (3T) bagi Guru SMAK Katolik Non ASN** | **Orang** | **N/A** | **0** | **0** | **0** |
| IKRO.4435. QEA.012.1 | Jumlah pemenuhan kebutuhan guru SMAK Katolik di daerah 3T | Orang | N/A | 0 | 0 | 0 |
| **RO.4435. QEI.005** | **POKJAWAS/KKM/KKG/MGMP Katolik penerima bantuan** | **Lembaga** | **N/A** | **575** | **575** | **575** |
| IKRO.4435. QEI.005.1 | Jumlah tenaga kependidikan Keagamaan Katolik lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | Orang | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.4435. QEI.005.2 | Jumlah guru Agama Katolik yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | Orang | N/A | 0 | 0 | 300 |
| IKRO.4435. QEI.005.3 | Jumlah Kepala Sekolah Keagamaan Katolik yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil | Orang | N/A | 10 | 20 | 30 |
| IKRO.4435. QEI.005.4 | Jumlah guru dan tenaga kependidikan Keagamaan Katolik yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Orang | N/A | 0 | 0 | 300 |
| IKRO.4435. QEI.005.5 | Jumlah pengawas Keagamaan Katolik yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil | Orang | N/A | 0 | 0 | 73 |
| IKRO.4435. QEI.005.6 | Jumlah guru Agama Katolik yang meningkat jenjang karir | Orang | N/A | 50 | 100 | 300 |
| IKRO.4435. QEI.005.7 | Jumlah Pengawas Keagamaan Katolik yang meningkat jenjang karir | Orang | N/A | 5 | 10 | 15 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **575** | **575** | **9.660** | **10.054** | **10.054** | **10.054** | **10.054** | |
| 14 | 28 | | | | | | |
| 616 | 948 | | | | | | |
| 40 | 50 | | | | | | |
| 616 | 948 | | | | | | |
| 73 | 74 | | | | | | |
| 450 | 650 | | | | | | |
| 20 | 25 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4435. QEI.005.8 | Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Katolik | Orang | N/A | 5.970 | 5.830 | 0 |
| **RO.4435. SCI.001** | **Pendidik dan Tenaga kependidikan Katolik yang ditingkatkan kompetensinya** | **Orang** | **N/A** | **16.960** | **16.960** | **16.960** |
| IKRO.4435. SCI.001.1 | Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan Katolik yang ditingkatkan kompetensinya | Orang | N/A | 4.714 | 4.220 | 4.852 |
| IKRO.4435. SCI.001.2 | Jumlah guru Agama Katolik yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | Orang | N/A | 0 | 0 | 300 |
| IKRO.4435. SCI.001.3 | Jumlah pengawas Agama Katolik yang memperoleh nilai rapor AKP minimal predikat terampil | Orang | N/A | 0 | 0 | 73 |
| **4436 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu** | | | | | | |
| **SK.4436.1** | **Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan** | | | | | |
| IKSK.4436.1.1 | Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional Pendidikan Hindu untuk: | | | | | |
| | a literasi membaca | Nilai | 66,32 | 67,00 | 67,50 | 68,00 |
| | b numerasi | Nilai | 58,87 | 59,00 | 59,50 | 59,60 |
| IKSK.4436.1.2 | Nilai keberagamaan siswa pada pada satuan pendidikan Hindu | Nilai | N/A | 67,00 | 67,25 | 67,50 |
| IKSK.4436.1.3 | Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa Pendidikan Hindu | Nilai | N/A | 70,00 | 72,00 | 74,00 |
| IKSK.4436.1.4 | Persentase satuan pendidikan Hindu yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas | Persen | N/A | 1,60 | 4,80 | 8,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 16.960 | 16.960 | 19.073 | 11.746 | 14.795 | 18.727 | 22.399 | |
| 5.580 | 6.417 | | | | | | |
| 316 | 332 | | | | | | |
| 73 | 74 | | | | | | |
| | | **231.800** | **101.016** | **89.254** | **144.622** | **161.822** | **[BIMAS HINDU] Direktorat Pendidikan Hindu** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 68,50 | 69,00 | | | | | | |
| 59,70 | 59,80 | | | | | | |
| 67,75 | 68,00 | | | | | | |
| 76,00 | 78,00 | | | | | | |
| 10,40 | 12,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4436.1.5 | Persentase satuan pendidikan Hindu yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Persen | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| IKSK.4436.1.6 | Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Hindu | Jumlah | N/A | 1 | 2 | 3 |
| IKSK.4436.1.7 | Persentase peningkatan nilai karakter siswa Pendidikan Hindu melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | Persen | N/A | 0,30 | 0,50 | 0,75 |
| IKSK.4436.1.8 | Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Hindu berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan | Persen | N/A | 40,00 | 55,00 | 65,00 |
| IKSK.4436.1.9 | Persentase Pratama Widyalaya yang terakreditasi minimal B | Persen | 62,50 | 64,58 | 66,00 | 67,62 |
| IKSK.4436.1.10 | Persentase Adhi Widyalaya yang terakreditasi minimal B | Persen | 53,85 | 56,25 | 58,82 | 61,11 |
| IKSK.4436.1.11 | Persentase Madyama Widyalaya yang terakreditasi minimal B | Persen | 50,00 | 50,00 | 55,56 | 60,00 |
| IKSK.4436.1.12 | Persentase Utama Widyalaya yang terakreditasi minimal B | Persen | 80,00 | 80,00 | 83,00 | 83,00 |
| IKSK.4436.1.13 | Persentase satuan pendidikan Hindu unggul yang terselenggara | Persen | 8,77 | 9,60 | 10,77 | 11,33 |
| IKSK.4436.1.14 | Persentase satuan pendidikan Hindu yang menerapkan program pendidikan bilingual | Persen | N/A | 1,60 | 2,31 | 2,67 |
| IKSK.4436.1.15 | Persentase siswa Pendidikan Hindu yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Persen | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,21 |
| IKSK.4436.1.16 | Persentase satuan pendidikan Hindu dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | Persen | N/A | 0,00 | 43,40 | 45,90 |
| IKSK.4436.1.17 | Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Hindu | Persen | N/A | 25,00 | 50,00 | 75,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 99,00 | 99,00 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 0,85 | 0,95 | | | | | | |
| 70,00 | 85,00 | | | | | | |
| 68,18 | 70,43 | | | | | | |
| 63,16 | 65,00 | | | | | | |
| 63,64 | 66,67 | | | | | | |
| 86,00 | 88,00 | | | | | | |
| 11,76 | 12,50 | | | | | | |
| 2,94 | 3,00 | | | | | | |
| 0,25 | 0,30 | | | | | | |
| 50,90 | 55,90 | | | | | | |
| 80,00 | 100,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.4436. PBH.001** | **Kurikulum dan Bahan ajar yang dikembangkan Pendidikan Hindu** | **Rekomen-dasi Kebijakan** | **12** | **12** | **12** | **12** |
| IKRO.4436. PBH.001.1 | Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional Pendidikan Hindu untuk: literasi membaca numerasi | Nilai | 65,5; 56,5 | 67; 59 | 67,5; 59,5 | 68; 59,6 |
| IKRO.4436. PBH.001.2 | Jumlah siswa yang memperoleh penguatan moderasi beragama siswa Pendidikan Hindu | Orang | 2.500 | 3.421 | 3.591 | 3.772 |
| IKRO.4436. PBH.001.3 | Jumlah satuan pendidikan Hindu yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas | Lembaga | 2 | 2 | 6 | 10 |
| IKRO.4436. PBH.001.4 | Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Hindu | Prestasi | N/A | 1 | 2 | 3 |
| IKRO.4436. PBH.001.5 | Jumlah nilai rata-rata karakter siswa Pendidikan Hindu melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | Nilai | N/A | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
| IKRO.4436. PBH.001.6 | Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Hindu berbasis cinta kemanuasiaan dan pelestarian lingkungan | Kurikulum | N/A | 3 | 6 | 7 |
| IKRO.4436. PBH.001.7 | Jumlah materi ajar digital Pendidikan Hindu (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran | Materi | N/A | 45 | 50 | 75 |
| **RO.4436. PEF.001** | **Siswa yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan** | **Orang** | **3.972** | **3.427** | **4.098** | **4.098** |
| IKRO.4436. PEF.001.1 | Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Lembaga | 110 | 125 | 125 | 125 |
| **RO.4436. QDB.001** | **Lembaga Pendidikan Widyalaya, Pasraman dan Sekolah Minggu yang ditingkatkan mutunya** | **Lembaga** | **574** | **1.768** | **1.174** | **1.174** |
| IKRO.4436. QDB.001.1 | Jumlah Pratama Widyalaya yang terakreditasi minimal B | Lembaga | 45 | 62 | 63 | 65 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | 12 | 6.012 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | |
| 68,5; 59,7 | 69; 59,8 | | | | | | |
| 3.967 | 4.177 | | | | | | |
| 13 | 15 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 80,00 | 85,00 | | | | | | |
| 8 | 9 | | | | | | |
| 80 | 100 | | | | | | |
| **4.098** | **4.098** | **22.684** | **6.860** | **6.871** | **6.859** | **6.859** | |
| 125 | 125 | | | | | | |
| **1.174** | **1.174** | **6.510** | **11.667** | **12.302** | **65.397** | **65.397** | |
| 66 | 68 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4436. QDB.001.2 | Jumlah Adhi Widyalaya yang terakreditasi minimal B | Lembaga | 5 | 9 | 10 | 10 |
| IKRO.4436. QDB.001.3 | Jumlah Madyama Widyalaya yang terakreditasi minimal B | Lembaga | 3 | 4 | 5 | 5 |
| IKRO.4436. QDB.001.4 | Jumlah Utama Widyalaya yang terakreditasi minimal B | Lembaga | 3 | 4 | 4 | 4 |
| IKRO.4436. QDB.001.5 | Jumlah satuan pendidikan unggul yang terselenggara | Lembaga | 0 | 12 | 13 | 14 |
| IKRO.4436. QDB.001.6 | Jumlah saruan pendidikan Hindu yang menerapkan program pendidikan bilingual | Lembaga | 0 | 2 | 3 | 3 |
| IKRO.4436. QDB.001.7 | Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Orang | 2 | 2 | 3 | 3 |
| IKRO.4436. QDB.001.8 | Jumlah satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | Lembaga | 0 | 0 | 54 | 57 |
| **RO 4436. QDB.002** | **Fasilitasi Penjaminan mutu Pendidikan Widyalaya dan pasraman** | **Lembaga** | **0** | **0** | **20** | **20** |
| IKRO 4436. QDB.002.1 | Jumlah Fasilitasi Penjaminan mutu Pendidikan Widyalaya dan pasraman | Lembaga | 0 | 20 | 20 | 20 |
| **RO 4436. QDB.003** | **Satuan Pendidikan Hindu yang melaksanakan ekstrakurikuler Moderasi beragama dan Pembinaan gugus depan Pramuka** | **Lembaga** | **0** | **0** | **20** | **20** |
| IKRO 4436. QDB.003.1 | Jumlah Satuan Pendidikan Hindu yang melaksanakan Pembinaan gugus depan Pramuka | Lembaga | 0 | 10 | 10 | 10 |
| IKRO 4436. QDB.003.2 | Jumlah Satuan Pendidikan Hindu yang melaksanakan ekstrakurikuler Moderasi beragama | Lembaga | 0 | 10 | 10 | 10 |
| **RO 4436. QDB.004** | **Even Nasional Kompetensi Seni, Sains Dan Teknologi Bagi Pasraman Dan Widyalaya** | **Lembaga** | **0** | **0** | **1** | **1** |
| IKRO 4436. QDB.004.1 | Jumlah Even Nasional Kompetensi Seni, Sains Dan Teknologi Bagi Pasraman Dan Widyalaya | Lembaga | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **RO 4436. QDB.005** | **Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD Holistik dan terintegrasi pada Pratama Widyalaya** | **Lembaga** | **0** | **0** | **10** | **10** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 11 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 15 | 16 | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 64 | 70 | | | | | | |
| **20** | **20** | **0** | **1.000** | **2.000** | **3.000** | **4.000** | |
| 20 | 20 | | | | | | |
| **20** | **20** | **0** | **1.000** | **2.000** | **3.000** | **4.000** | |
| 10 | 10 | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | |
| **1** | **1** | **0** | **20.000** | **5.000** | **5.000** | **20.000** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **10** | **10** | **0** | **500** | **600** | **700** | **800** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO 4436. QDB.005.1 | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD Holistik dan terintegrasi pada Pratama Widyalaya | Lembaga | 0 | 10 | 10 | 10 |
| **RO.4436. QDB.006** | **Penyelenggaraan sekolah Hindu Unggulan** | **Lembaga** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| IKRO 4436. QDB.006.1 | Jumlah Satuan Pendidikan Widyalaya Ungulan | Lembaga | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **SK.4436.2** | **Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Hindu** | | | | | |
| IKSK.4436.2.1 | Persentase guru satuan pendidikan Hindu yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | N/A | 48,83 | 63,48 | 68,36 |
| IKSK.4436.2.2 | Rasio guru satuan pendidikan Hindu terhadap siswa yang memenuhi SNP | Rasio | N/A | 01:08 | 01:08 | 01:09 |
| IKSK.4436.2.3 | Persentase tenaga kependidikan Hindu lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | Persen | N/A | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| IKSK.4436.2.4 | Persentase guru agama Hindu yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | 41,49 | 45,54 | 73,58 | 82,01 |
| IKSK.4436.2.5 | Persentase guru Agama Hindu yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.4436.2.6 | Persentase Kepala satuan pendidikan Hindu yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.4436.2.7 | Persentase guru dan tenaga kependidikan Hindu yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.4436.2.8 | Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Hindu (AKP) minimal predikat terampil | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.4436.2.9 | Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan | Persen | N/A | 95,00 | 96,00 | 97,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 10 | | | | | | |
| **1** | **2** | **0** | **100** | **200** | **200** | **300** | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 73,24 | 78,13 | | | | | | |
| 01:10 | 01:10 | | | | | | |
| 95,00 | 99,00 | | | | | | |
| 88,64 | 95,46 | | | | | | |
| 0,00 | 5,00 | | | | | | |
| 0,00 | 5,00 | | | | | | |
| 0,00 | 5,00 | | | | | | |
| 0,00 | 5,00 | | | | | | |
| 98,00 | 99,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4436.2.10 | Persentase guru Agama Hindu yang meningkat jenjang karir | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.4436.2.11 | Persentase Pengawas Agama Hindu yang meningkat jenjang karir | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.4436.2.12 | Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Hindu | Persen | N/A | 55,00 | 60,00 | 62,00 |
| IKSK.4436.2.13 | Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Hindu berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| **RO.4436. QEA.001** | **Guru Non ASN penerima Tunjangan Profesi** | **Orang** | **176** | **175** | **1.670** | **1.670** |
| IKRO.4436. QEA.001.1 | Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP | Rasio | 1:8 | 1:8 | 1:9 | 01:10 |
| IKRO.4436. QEA.001.2 | Jumlah guru yang meningkat jenjang karir | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.4436. QEA.001.3 | Jumlah Pengawas yang meningkat jenjang karir | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.4436. QEA.001.4 | Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Hindu | Orang | 357 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| IKRO.4436. QEA.001.5 | Jumlah Guru Non ASN Penerima Tunjangan Profesi | Orang | 176 | 239 | 1.350 | 1.400 |
| **RO.4436. QEA.002** | **Guru Non ASN Penerima Insentif** | **Orang** | **1.673** | **2.040** | **1.028** | **1.028** |
| IKRO.4436. QEA.002.1 | Jumlah Guru Non ASN Penerima Insentif | Orang | 1.673 | 1.784 | 1.800 | 1.900 |
| **RO.4436. SCI.001** | **Guru Agama Hindu dan Guru pada Satuan Pendidikan Widyalaya yang ditingkatkan kompetensinya** | **Orang** | **3.748** | **3.736** | **5.520** | **5.520** |
| IKRO.4436. SCI.001.1 | Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | Orang | 70 | 90 | 96 | 101 |
| IKRO.4436. SCI.001.2 | Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| **RO.4436. QEI.001** | **POKJAWAS/KKM/KKG/MGMP penerima bantuan** | **Lembaga** | **209** | **231** | **231** | **231** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0,00 | 5,00 | | | | | | |
| 0,00 | 3,00 | | | | | | |
| 63,00 | 64,00 | | | | | | |
| 0,50 | 1,00 | | | | | | |
| **1.670** | **1.670** | **28.450** | **33.033** | **33.395** | **33.433** | **33.433** | |
| 01:10 | 1670,00 | | | | | | |
| 0 | 26 | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | |
| 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 1.450 | 1.500 | | | | | | |
| **1.028** | **1.028** | **6.160** | **6.858** | **6.888** | **7.026** | **7.026** | |
| 2.000 | 2.100 | | | | | | |
| **5.520** | **5.520** | **129.661** | **11.158** | **11.158** | **11.167** | **11.167** | |
| 107 | 113 | | | | | | |
| 0,50 | 1,00 | | | | | | |
| **231** | **231** | **32.323** | **7.190** | **7.190** | **7.190** | **7.190** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4436. QEI.001.1 | Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.4436. QEI.001.2 | Jumlah Kepala Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.4436. QEI.001.3 | Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.4436. QEI.001.4 | Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil | Orang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4437 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha** | | | | | | |
| **SK.4437.1** | **Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan** | | | | | |
| IKSK.4437.1.1 | Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional sekolah kegamaan Buddha untuk: | | | | | |
| | a literasi membaca | Persen | 30,54 | 32,00 | 35,00 | 35,00 |
| | b numerasi | Persen | 30,54 | 32,00 | 35,00 | 35,00 |
| IKSK.4437.1.2 | Nilai Keberagamaan siswa pada satuan pendidikan keagamaan Buddha | Nilai | N/A | 70,00 | 72,00 | 75,00 |
| IKSK.4437.1.3 | Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan keagamaan Buddha | Rerata | N/A | 75 | 78 | 80 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 26 | | | | | | |
| 0 | 6 | | | | | | |
| 0 | 31 | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | |
| | | **33.536** | **53.154** | **55.814** | **58.542** | **61.534** | **[BIMAS BUDDHA] Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 35,00 | 35,00 | | | | | | |
| 35,00 | 35,00 | | | | | | |
| 77,00 | 80,00 | | | | | | |
| 81 | 82 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4437.1.4 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas | Persen | N/A | 11,11 | 22,22 | 22,22 |
| IKSK.4437.1.5 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Persen | N/A | 70,00 | 75,00 | 80,00 |
| IKSK.4437.1.6 | Jumlah prestasi yang diraih siswa agama Buddha dari kegiatan ekstrakurikuler | Jumlah | N/A | 0 | 1 | 2 |
| IKSK.4437.1.7 | Persentase peningkatan nilai karakter siswa agama Buddha melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | Persen | N/A | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| IKSK.4437.1.8 | Persentase perangkat kurikulum Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan | Persen | N/A | 0,00 | 92,00 | 94,00 |
| IKSK.4437.1.9 | Persentase Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B | Persen | 52,50 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
| IKSK.4437.1.10 | Persentase Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B | Persen | N/A | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| IKSK.4437.1.11 | Persentase Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.4437.1.12 | Persentase Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B | Persen | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 |
| IKSK.4437.1.13 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha unggul yang terselenggara | Persen | N/A | 0,00 | 4,44 | 6,67 |
| IKSK.4437.1.14 | Persentase satuan pendidikan Keagamaan Buddha yang menerapkan program pendidikan bilingual | Persen | N/A | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| IKSK.4437.1.15 | Persentase siswa Pendidikan Keagamaan Buddha yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Persen | N/A | 0,09 | 0,00 | 0,50 |
| IKSK.4437.1.16 | Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | Persen | 66,67 | 70,00 | 75,00 | 80,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 22,22 | 22,22 | | | | | | |
| 85,00 | 90,00 | | | | | | |
| 3 | 4 | | | | | | |
| 10,00 | 10,00 | | | | | | |
| 96,00 | 98,00 | | | | | | |
| 80,00 | 90,00 | | | | | | |
| 80,00 | 90,00 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 98,00 | 99,00 | | | | | | |
| 8,89 | 11,11 | | | | | | |
| 25,00 | 30,00 | | | | | | |
| 0,00 | 0,52 | | | | | | |
| 85,00 | 90,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4437.1.17 | Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha | Persen | 90,00 | 90,00 | 92,00 | 94,00 |
| **RO.4437. PBH.001** | **Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha yang Dikembangkan** | **Kajian** | **100** | **7** | **7** | **7** |
| IKRO.4437. PBH.001.1 | Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional sekolah keagamaan Buddha untuk: a literasi membaca b numerasi | Nilai | 100100 | 7070 | 71,571,5 | 7373 |
| IKRO.4437. PBH.001.2 | Jumlah siswa pendidikan keagamaan Buddha yang memperoleh penguatan moderasi beragama | Orang | 0 | 0 | 3400 | 3570 |
| IKRO.4437. PBH.001.3 | Jumlah satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas | Lembaga | 0 | 5 | 10 | 10 |
| IKRO.4437. PBH.001.4 | Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan Buddha berbasis cinta kemanuasiaan dan pelestarian lingkungan | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **RO.4437. PEF.001** | **Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan Siswa Agama Buddha** | **Orang** | **N/A** | **11.012** | **11.012** | **11.012** |
| IKRO.4437. PEF.001.1 | Jumlah siswa agama Buddha yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan | Orang | N/A | 1.069 | 1.100 | 1.150 |
| IKRO.4437. PEF.001.2 | Jumlah satuan pendidikan keagamaan Buddha yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Lembaga | N/A | 32 | 34 | 36 |
| **RO.4437. PEF.002** | **Pembinaan Pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Hasil Belajar Siswa Pendidikan Agama Buddha** | **Orang** | **N/A** | **0** | **1.700** | **1.785** |
| IKRO.4437. PEF.002.1 | Jumlah siswa pendidikan keagamaan Buddha yang dibina dalam pelaksanaan penilaian pelaksanaan hasil belajar siswa | Orang | N/A | 0 | 1.700 | 1.785 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 96,00 | 98,00 | | | | | | |
| **7** | **7** | **604** | **634** | **666** | **699** | **734** | |
| 7474 | 7575 | | | | | | |
| 3749 | 3936 | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| **11.012** | **11.012** | **10.898** | **20.000** | **21.000** | **22.050** | **23.153** | |
| 1.200 | 1.220 | | | | | | |
| 38 | 41 | | | | | | |
| **1.874** | **1.968** | **-** | **3.400** | **3.570** | **3.749** | **3.936** | |
| 1.874 | 1.968 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.4437. QDB.001** | **Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha yang Ditingkatkan Mutunya** | **Lembaga** | **45** | **2.293** | **2.293** | **2.293** |
| IKRO.4437. QDB.001.1 | Jumlah prestasi yang diraih siswa Agama Buddha dari kegiatan ekstrakurikuler | Prestasi | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.4437. QDB.001.2 | Jumlah nilai rata-rata karakter siswa Agama Buddha melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) | Nilai | N/A | 80 | 82 | 83 |
| IKRO.4437. QDB.001.3 | Jumlah Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B | Lembaga | 21 | 28 | 32 | 32 |
| IKRO.4437. QDB.001.4 | Jumlah Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B | Lembaga | N/A | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.4437. QDB.001.5 | Jumlah Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B | Lembaga | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.4437. QDB.001.6 | Jumlah Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B | Lembaga | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.4437. QDB.001.7 | Jumlah satuan pendidikan keagamaan Buddha unggul yang terselenggara | Lembaga | N/A | 0 | 2 | 3 |
| IKRO.4437. QDB.001.8 | Jumlah satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menerapkan program pendidikan bilingual | Lembaga | N/A | 10 | 15 | 20 |
| IKRO.4437. QDB.001.9 | Jumlah siswa sekolah keagamaan Buddha yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Orang | N/A | 96 | 0 | 100 |
| IKRO.4437. QDB.001.10 | Jumlah satuan pendidikan keagamaan Buddha dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik | Lembaga | 30 | 37 | 41 | 45 |
| **SK.4437.3** | **Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum** | | | | | |
| IKSK.4437.3.1 | Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan | Persen | N/A | 70 | 75 | 80 |
| IKSK.4437.3.2 | Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu Pendidikan | Persen | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2.293 | 2.293 | 1.441 | 1.513 | 1.589 | 1.668 | 1.752 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 84 | 85 | | | | | | |
| 32 | 40 | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 25 | 30 | | | | | | |
| 0 | 150 | | | | | | |
| 45 | 45 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 85 | 90 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **SK.4437.4** | **Meningkatnya kualitas pembelajaran berbasis elektronik** | | | | | |
| IKSK.4437.4.1 | Persentase guru yang memiliki kompetensi Teknologi, Informasi, dan Komunikas (TIK) | Persen | | | | |
| IKSK.4437.4.2 | Persentase guru yang menerapkan metode pembelajaran berbasis digital | Persen | N/A | 2 | 6 | 8 |
| **SK.4437.6** | **Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan** | | | | | |
| IKSK.4437.6.1 | Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi | Persen | | | | |
| **SK.4437.7** | **Menguatnya pendidikan karakter siswa** | | | | | |
| IKSK.4437.7.1 | Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Persen | N/A | 70 | 75 | 80 |
| **SK.4437.8** | **Meningkatnya kualitas lingkungan belajar** | | | | | |
| IKSK.4437.8.1 | Persentase satuan pendidikan Buddha yang memiliki kultur mutu kelembagaan | Persen | N/A | 50 | 55 | 60 |
| **SK.4437.9** | **Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan** | | | | | |
| IKSK.4437.9.1 | Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada satuan pendidikan Buddha yang bermuatan moderasi beragama | Jumlah | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IKSK.4437.9.2 | Jumlah gugus depan pramuka pada satuan pendidikan Buddha yang dibina | Jumlah | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **SK.4437.10** | **Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (PAUD-HI)** | | | | | |
| IKSK.4437.10.1 | Persentase Nava Dhamaseka yang menerapkan program Holistik-Integratif | Persen | N/A | 30 | 38 | 43 |
| **SK.4437.2** | **Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Buddha** | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 85 | 90 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 65 | 70 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 50 | 55 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4437.11.1 | Persentase guru satuan pendidikan Buddha yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | | | | |
| IKSK.4437.11.3 | Persentase guru agama Hindu yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | N/A | 54,93 | 63,94 | 75,91 |
| IKSK.4437.2.1 | Rasio guru satuan pendidikan agama Buddha terhadap siswa yang memenuhi SNP | Rasio | 1:90 | 1:80 | 1:80 | 1:70 |
| IKSK.4437.2.2 | Persentase tenaga kependidikan Buddha lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | Persen | N/A | 95,59 | 90,91 | 92,00 |
| IKSK.4437.2.3 | Persentase guru Agama Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | Persen | N/A | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| IKSK.4437.2.4 | Persentase Kepala satuan pendidikan Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil | Persen | N/A | 0,00 | 2,80 | 4,17 |
| IKSK.4437.2.5 | Persentase guru dan tenaga kependidikan Buddha yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Persen | N/A | 5,93 | 11,87 | 17,80 |
| IKSK.4437.2.6 | Persentase Pengawas satuan pendidikan Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil | Persen | N/A | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| IKSK.4437.2.7 | Persentase Guru Agama Buddha yang meningkat jenjang karir | Persen | N/A | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| IKSK.4437.2.8 | Persentase Pengawas Pendidikan Agama Buddha yang meningkat jenjang karir | Persen | N/A | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| IKSK.4437.2.9 | Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Buddha | Persen | N/A | 75,46 | 80,00 | 0,00 |
| IKSK.4437.2.10 | Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Buddha berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Persen | N/A | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 87,87 | 98,80 | | | | | | |
| 1:70 | 1:70 | | | | | | |
| 94,55 | 96,67 | | | | | | |
| 55,00 | 60,00 | | | | | | |
| 6,25 | 8,33 | | | | | | |
| 23,74 | 29,67 | | | | | | |
| 90,00 | 100,00 | | | | | | |
| 60,00 | 70,00 | | | | | | |
| 60,00 | 70,00 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 100,00 | 100,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.4437. QEA.001** | **Bantuan Insentif Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN** | **Orang** | **2.900** | **2.932** | **2.850** | **2.993** |
| IKRO.4437. QEA.001.1 | Jumlah guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP | Nilai | 1:90 | 1:80 | 1:80 | 1:70 |
| IKRO.4437. QEA.001.2 | Jumlah Guru Pendidikan Buddha Non ASN Penerima Insentif | Orang | 2.900 | 2.932 | 2.850 | 2.993 |
| IKRO.4437. QEA.001.3 | Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama dan keagamaan Buddha berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Rekomen-dasi | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.4437. QEA.002** | **Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN** | **Orang** | **310** | **236** | **236** | **236** |
| IKRO.4437. QEA.002.1 | Jumlah Guru Pendidikan Buddha Non ASN Penerima Tunjangan Profesi | Orang | 231 | 231 | 515 | 515 |
| IKRO.4437. QEA.002.2 | Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Buddha | Orang | 0 | 372 | 200 | 0 |
| **RO.4437. QEA.003** | **Tunjangan Khusus (3T) Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN** | **Orang** | **45** | **45** | **45** | **45** |
| IKRO.4437. QEA.003.1 | Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN Penerima Tunjangan Khusus (3T) | Orang | 45 | 45 | 43 | 44 |
| IKRO.4437. QEA.003.2 | Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Buddha berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan | Rekomen-dasi | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.4437. SCI.001** | **Pelatihan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Buddha** | **Orang** | **1.773** | **100** | **100** | **100** |
| IKRO.4437. SCI.001.1 | Jumlah guru pendidikan agama Buddha yang meningkat jenjang karir | Orang | 1.773 | 100 | 100 | 100 |
| **RO.4437. SCI.002** | **Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Buddha** | **Orang** | **162** | **197** | **197** | **197** |
| IKRO.4437. SCI.002.1 | Jumlah tenaga kependidikan agama Buddha lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | Orang | 162 | 145 | 152 | 160 |
| IKRO.4437. SCI.002.2 | Jumlah Pengawas pendidikan agama Buddha yang meningkat jenjang karir | Orang | N/A | 0 | 21 | 21 |
| **RO.4437. QEI.001** | **Bantuan POKJAWAS/ KKM/ KKG/ MGMP Agama Buddha** | **Lembaga** | **149** | **141** | **141** | **141** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **3.142** | **3.299** | **8.796** | **8.550** | **8.978** | **9.426** | **9.898** | |
| 1:70 | 1:70 | | | | | | |
| 3.142 | 3.299 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **236** | **236** | **6.756** | **12.859** | **13.502** | **14.117** | **14.886** | |
| 515 | 515 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **45** | **45** | **810** | **756** | **794** | **833** | **875** | |
| 46 | 49 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **100** | **100** | **879** | **1.923** | **2.019** | **2.120** | **2.226** | |
| 100 | 100 | | | | | | |
| **197** | **197** | **986** | **1.035** | **1.087** | **1.141** | **1.198** | |
| 168 | 176 | | | | | | |
| 21 | 21 | | | | | | |
| **141** | **141** | **2.366** | **2.484** | **2.609** | **2.738** | **2.876** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4437. QEI.001.1 | Jumlah guru pendidikan agama Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil | Orang | N/A | 674 | 758 | 843 |
| IKRO.4437. QEI.001.2 | Jumlah Kepala Sekolah Keagamaan Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil | Orang | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.4437. QEI.001.3 | Jumlah guru dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan Buddha yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik | Orang | N/A | 100 | 200 | 300 |
| IKRO.4437. QEI.001.4 | Jumlah pengawas pendidikan agama Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil | Orang | N/A | 13 | 15 | 17 |
| **5621 Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu** | | | | | | |
| **SK.5621.1** | **Meningkatnya layanan pendidikan Khonghucu yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum** | | | | | |
| IKSK.5621.1.1 | Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembang untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan | Persen | N/A | 35,00 | 45,00 | 55,00 |
| **RO.5621. QDC.001** | **Lembaga Pendidikan Khonghucu yang Berkualitas** | **Tim** | **N/A** | **8** | **12** | **16** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 927 | 1.011 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 400 | 500 | | | | | | |
| 19 | 21 | | | | | | |
| | | **33.160** | **37.085** | **43.075** | **49.763** | **58.302** | **[SETJEN] Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu** |
| | | | | | | | |
| 65,00 | 75,00 | | | | | | |
| **20** | **24** | 24.650 | 26.650 | 28.650 | 30.650 | 32.662 | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5621. QDC.001.1 | Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu berbasis cinta kemanuasiaan dan pelestarian lingkungan | Jumlah | N/A | 8 | 12 | 16 |
| **SK.5621.2** | **Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khonghucu** | | | | | |
| IKSK.5621.1.1 | Persentase guru agama khonghucu yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| IKSK.5621.1.2 | Persentase guru agama khonghucu yang meningkat jenjang karir | Persen | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| IKSK.5621.1.3 | Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Khonghucu | Persen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| **RO.5621. QEI.001** | **Guru Agama Khonghucu Non PNS Penerima Insentif** | **Lembaga** | **N/A** | **187** | **199** | **208** |
| IKRO.5621. QEI.001.1 | Jumlah Guru Agama Khonghucu NON PNS Penerima Insentif | Jumlah | 178 | 170 | 170 | 170 |
| IKRO.5621. QEI.001.2 | Jumlah guru agama khonghucu yang mendapatkan sertifikat pendidik | Jumlah | 0 | 0 | 2 | 4 |
| IKRO.5621. QEI.001.3 | Jumlah guru agama khonghucu yang meningkat jenjang karir | Jumlah | 0 | 17 | 25 | 30 |
| IKRO.5621. QEI.001.4 | Jumlah peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Khonghucu | Jumlah | 0 | 0 | 2 | 4 |
| **7896 Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan** | | | | | | |
| **SK.7896.1** | **Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan** | | | | | |
| IKSK.7896.1.1 | Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan | Persen | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 20 | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4,00 | 7,00 | | | | | | |
| 25,00 | 30,00 | | | | | | |
| 4,00 | 7,00 | | | | | | |
| **217** | **226** | **8.510** | **10.435** | **14.425** | **19.113** | **25.640** | |
| 170 | 170 | | | | | | |
| 6 | 8 | | | | | | |
| 35 | 40 | | | | | | |
| 6 | 8 | | | | | | |
| | | **25.012** | **44.583** | **55.593** | **70.964** | **84.753** | **[BMBPSDM] Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan** |
| | | | | | | | |
| 94,00 | 95,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.7896.1.2 | Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama | Nilai | N/A | 76 | 78 | 80 |
| **RO.7896. PBH.001** | **Naskah Kebijakan Strategis Pembangunan Pendidikan** | **Rekomen-dasi Kebijakan** | **40** | **29** | **60** | **70** |
| IKRO.7896. PBH.001.1 | Jumlah rekomendasi kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan | Rekomen-dasi Kebijakan | 40 | 28 | 58 | 68 |
| IKRO.7896. PBH.001.2 | Jumlah Rekomendasi kebijakan ekoteologi di lembaga pendidikan yang dihasilkan | Rekomen-dasi Kebijakan | N/A | 1 | 2 | 2 |
| **RO.7896. QDD.001** | **Kelompok Masyarakat pada Lembaga Pendidikan yang Memperoleh Wawasan Penguatan Moderasi Beragama** | **Kelompok Masyara-kat** | **N/A** | **13** | **18** | **22** |
| IKRO.7896. QDD.001.2 | Jumlah Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama | Kelompok Masyarakat | N/A | 13 | 18 | 22 |
| **7897 Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan** | | | | | | |
| **SK.7897.1** | **Meningkatnya Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan** | | | | | |
| IKSK.7897.1.1 | Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi | Nilai | 88,00 | 88,20 | 88,40 | 88,60 |
| IKSK.7897.1.2 | Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi | Nilai | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 |
| IKSK.7897.1.3 | Persentase Peningkatan Kompetensi moderasi beragama pada SDM di lembaga pendidikan. | Persen | 76,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 |
| IKSK.7897.1.4 | Persentase Peningkatan Kompetensi manajemen dan kepemimpinan pada SDM di lembaga pendidikan | Persen | 76,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 82 | 84 | | | | | | |
| **85** | **95** | 21.858 | 41.583 | 50.593 | 63.964 | 75.966 | |
| 82 | 92 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| **27** | **32** | 3.154 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 8.787 | |
| 27 | 32 | | | | | | |
| | | **188** | **1.759** | **3.021** | **4.782** | **6.795** | **[BMBPSDM] Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama** |
| | | | | | | | |
| 88,80 | 89,00 | | | | | | |
| 94,00 | 95,00 | | | | | | |
| 84,00 | 85,00 | | | | | | |
| 84,00 | 85,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.7897. DCI.001** | **Pengembangan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan yang Kompeten di Lembaga Pendidikan** | **Orang** | **60** | **30** | **2.200** | **3.700** |
| IKRO.7897. DCI.001.1 | Jumlah peserta pengembangan Kompetensi manajemen dan kepemimpinan pada SDM di lembaga pendidikan | Orang | 60 | 30 | 1.100 | 1.850 |
| IKRO.7897. DCI.001.2 | Jumlah peserta pengembangan kompetensi moderasi beragama pada SDM di lembaga pendidikan | Orang | 60 | 30 | 1.100 | 1.850 |
| IKRO.7897. DCI.001.3 | Jumlah layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.7897. DCI.001.4 | Jumlah alumni pengembangan kompetensi yang menjadi sasaran evaluasi pasca pengembangan kompetensi | Orang | 60 | 30 | 2.200 | 3.700 |
| **7898 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan** | | | | | | |
| **SK.7898.1** | **Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan** | | | | | |
| IKSK.7898.1.1 | Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan | Nilai | 84,00 | 84,20 | 84,40 | 84,60 |
| IKSK.7898.1.2 | Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM pendidikan | Nilai | 88,00 | 88,20 | 88,40 | 88,60 |
| IKSK.7898.1.3 | Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi SDM pendidikan | Nilai | 81,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 |
| IKSK.7898.1.4 | Persentase lembaga pengembangan kompetensi SDM pendidikan yang memperoleh akreditasi A | Persen | 70,59 | 70,59 | 76,47 | 76,47 |
| IKSK.7898.1.5 | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Pendidikan. | Persen | 85,00 | 85,50 | 86,00 | 86,50 |
| IKSK.7898.1.6 | Persentase pengembangan kompetensi SDM pendidikan yang memanfaatkan platform digital | Persen | 76,00 | 77,00 | 78,00 | 79,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5.700 | 7.700 | 188 | 1.759 | 3.021 | 4.782 | 6.795 | |
| 2.850 | 3.850 | | | | | | |
| 2.850 | 3.850 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 5.700 | 7.700 | | | | | | |
| | | **137.400** | **276.310** | **323.570** | **368.278** | **429.084** | **[BMBPSDM] Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya ManusiaPendidikan dan Keagamaan** |
| | | | | | | | |
| 84,80 | 85,00 | | | | | | |
| 88,80 | 89,00 | | | | | | |
| 94,00 | 95,00 | | | | | | |
| 82,35 | 88,24 | | | | | | |
| 87,00 | 87,50 | | | | | | |
| 80,00 | 81,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.7898. PFA.001** | **Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan** | **NSPK** | **141** | **256** | **576** | **616** |
| IKRO.7898. PFA.001.1 | Jumlah Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang dihasilkan | NSPK | 141 | 256 | 576 | 616 |
| IKRO.7898. PFA.001.2 | Jumlah lembaga pengembangan kompetensi SDM pendidikan yang memperoleh akreditasi A | Lembaga | N/A | 12 | 13 | 14 |
| IKRO.7898. PFA.001.3 | Jumlah muatan ekoteologi dalam materi pengembangan kompetensi SDM Pendidikan | Konten | N/A | 1 | 2 | 2 |
| **RO.7898. SCI.001** | **SDM Pendidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya** | **Orang** | **48.745** | **938.577** | **1.251.925** | **1.470.388** |
| IKRO.7898. SCI.001.1 | Jumlah SDM Pendidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 48.745 | 938.577 | 1.251.925 | 1.470.388 |
| IKRO.7898. SCI.001.2 | Jumlah SDM Pendidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya melalui platform pembelajaran digital | Orang | N/A | 722.704 | 976.502 | 1.161.607 |
| IKRO.7898. SCI.001.3 | Jumlah SDM Pendidikan alumni pengembangan kompetensi yang menjadi sasaran evaluasi pasca pengembangan kompetensi | Orang | 48.745 | 938.577 | 1.251.925 | 1.470.388 |
| IKRO.7898. SCI.001.4 | Jumlah sarana dan prasarana penunjang pengembangan kompetensi | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **7921 Peningkatan Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan** | | | | | | |
| **SK.7921.1** | **Meningkatnya kualitas Layanan Perbukuan Pendidikan Agama dan Keagamaan** | | | | | |
| IKSK.7921.1.1 | Persentase Peningkatan Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan yang mendapat tanda layak terbit | Persen | N/A | 4,00 | 3,85 | 3,70 |
| **RO.7921. BAB.001** | **Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan** | **Lembaga** | **21** | **25** | **25** | **30** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 676 | 736 | 2.955 | 21.716 | 31.197 | 28.353 | 32.855 | |
| 676 | 736 | | | | | | |
| 15 | 16 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| **1.723.338** | **1.976.288** | **134.444** | **254.593** | **292.372** | **339.924** | **396.228** | |
| 1.723.338 | 1.976.288 | | | | | | |
| 1.378.670 | 1.600.793 | | | | | | |
| 1.723.338 | 1.976.288 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| | | **3.394** | **4.040** | **4.040** | **4.848** | **4.848** | **[SETJEN] Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan** |
| | | | | | | | |
| 3,57 | 3,45 | | | | | | |
| **30** | **35** | **3.394** | **4.040** | **4.040** | **4.848** | **4.848** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.7921. BAB.001.1 | Jumlah Lembaga penerbit yang mendapatkan tanda layak terbit | Lembaga | 21 | 25 | 25 | 30 |
| **025.DK - Program Pendidikan Tinggi** | | | | | | |
| **SP.6** | **Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly** | | | | | |
| IKSP.6.1 | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan | Persen | N/A | 0,25 | 0,34 | 0,43 |
| IKSP.6.2 | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Islam/Ma'had Aly | Persen | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,37 |
| IKSP.6.3 | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Kristen | Persen | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| IKSP.6.4 | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Katolik | Persen | 3,00 | 2,81 | 3,99 | 5,01 |
| IKSP.6.5 | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Hindu | Persen | 3,65 | 4,04 | 4,47 | 4,84 |
| IKSP.6.6 | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Buddha | Persen | 35,78 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| IKSP.6.7 | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Khonghucu | Persen | 25,00 | 25,00 | 35,00 | 45,00 |
| **SP.7** | **Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu** | | | | | |
| IKSP.7.1 | Persentase PTK Khonghucu yang terakreditasi | Persen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| IKSP.7.2 | Persentase PTK Islam/Ma'had Aly yang terakreditasi | Persen | 57,62 | 58,12 | 58,62 | 59,12 |
| IKSP.7.3 | Persentase PTK Kristen yang terakreditasi | Persen | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| IKSP.7.4 | Persentase PTK Katolik yang Terakreditasi | Persen | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| IKSP.7.5 | Persentase PTK Hindu yang terakreditasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| IKSP.7.6 | Persentase PTK Buddha yang terakreditasi | Persen | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SP.8** | **Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas** | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30 | 35 | | | | | | |
| | | **9.185.587** | **12.786.598** | **13.427.578** | **13.799.409** | **14.205.034** | **SETJEN, DITJEN PENDIS, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU,DITJEN BIMAS BUDDHA** |
| | | | | | | | |
| 0,52 | 0,61 | | | | | | |
| 0,44 | 0,51 | | | | | | |
| 6,00 | 7,00 | | | | | | |
| 6,00 | 7,01 | | | | | | |
| 5,15 | 5,40 | | | | | | |
| 20,00 | 20,00 | | | | | | |
| 55,00 | 65,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 98,00 | 99,00 | | | | | | |
| 59,62 | 60,12 | | | | | | |
| 5,00 | 6,00 | | | | | | |
| 95,00 | 95,00 | | | | | | |
| 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.8.1 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Khonghucu yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | Persen | N/A | 0,00 | 20,00 | 40,00 |
| IKSP.8.2 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Islam/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | Persen | 43,61 | 53,43 | 63,91 | 74,40 |
| IKSP.8.3 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | Persen | 24,52 | 26,21 | 27,95 | 29.45 |
| IKSP.8.4 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Katolik yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | Persen | 79,00 | 85,00 | 87,04 | 90,14 |
| IKSP.8.5 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Hindu yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | Persen | 31,35 | 51,00 | 54,00 | 57,00 |
| IKSP.8.6 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Buddha yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi | Persen | 24,31 | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| **SP.9** | **Meningkatnya daya saing lulusan PTK/ Ma'had Aly** | | | | | |
| IKSP.9.1 | Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Islam untuk mendapatkan pekerjaan | Bulan | N/A | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| IKSP.9.2 | Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Kristen untuk mendapatkan pekerjaan | Bulan | N/A | 12,00 | 12,00 | 11,00 |
| IKSP.9.3 | Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Katolik untuk mendapatkan pekerjaan | Bulan | N/A | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| IKSP.9.4 | Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Hindu untuk mendapatkan pekerjaan | Bulan | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 |
| IKSP.9.5 | Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Buddha untuk mendapatkan pekerjaan | Bulan | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| **SP.10** | **Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis** | | | | | |
| IKSP.10.1 | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Islam | Persen | N/A | 70,00 | 75,00 | 80,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 60,00 | 80,00 | | | | | | |
| 84,88 | 95,37 | | | | | | |
| 32,52 | 36,18 | | | | | | |
| 95,00 | 99,86 | | | | | | |
| 60,00 | 63,00 | | | | | | |
| 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10,00 | 10,00 | | | | | | |
| 11,00 | 10,00 | | | | | | |
| 3,00 | 3,00 | | | | | | |
| 10,00 | 10,00 | | | | | | |
| 2,00 | 2,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 82,00 | 85,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.10.2 | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen | Persen | 5,00 | 35,00 | 50,00 | 60,00 |
| IKSP.10.3 | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Katolik | Persen | N/A | 65.56 | 68.06 | 68.89 |
| IKSP.10.4 | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Hindu | Persen | 42.86 | 42.86 | 50,00 | 57.14 |
| IKSP.10.5 | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Buddha | Persen | N/A | 30,00 | 50,00 | 60,00 |
| **SP.11** | **Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan** | | | | | |
| IKSP.11.1 | Indeks Keberagamaan Mahasiswa Islam | Nilai | N/A | 80,00 | 80,50 | 81,00 |
| IKSP 11.2 | Indeks Keberagamaan Mahasiswa Kristen | Nilai | N/A | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
| IKSP.11.3 | Indeks Keberagamaan Mahasiswa Katolik | Nilai | N/A | 52,00 | 53,00 | 54,00 |
| IKSP.11.4 | Indeks Keberagamaan Mahasiswa Hindu | Nilai | N/A | 70,00 | 72,00 | 75,00 |
| IKSP.11.5 | Indeks Keberagamaan Mahasiswa Buddha | Nilai | N/A | 80,00 | 85,00 | 85,00 |
| **SP.12** | **Meningkatnya produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan** | | | | | |
| IKSP.12.1 | Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs | Jumlah | N/A | 1 | 2 | 2 |
| IKSP.12.2 | Jumlah perguruan tinggi keagamaan Kristen yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs | Jumlah | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKSP.12.3 | Jumlah perguruan tinggi keagamaan Katolik yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs | PT | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKSP.12.4 | Jumlah perguruan tinggi keagamaan Hindu yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs | PT | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKSP.12.5 | Jumlah perguruan tinggi keagamaan Buddha yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs | PT | N/A | 0 | 0 | 0 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70,00 | 85,00 | | | | | | |
| 69.44 | 70,00 | | | | | | |
| 64.29 | 71.43 | | | | | | |
| 70,00 | 75,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 81,50 | 82,00 | | | | | | |
| 45,00 | 50,00 | | | | | | |
| 55,00 | 56,00 | | | | | | |
| 77,00 | 80,00 | | | | | | |
| 85,00 | 88,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **2132 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam** | | | | | | |
| **SK.2132.1** | **Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PTK Islam** | | | | | |
| IKSK.2132.1.1 | Persentase PTK Islam yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi | Persen | N/A | 65,14 | 66,23 | 67,32 |
| IKSK.2132.1.2 | Persentase PTK Islam yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif | Persen | N/A | 6,00 | 6,25 | 6,50 |
| **RO.2132. CAA.001** | **Sarana PTKI** | **Unit** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| IKRO.2132. CAA.001.1 | Jumlah PTK Islam yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi | Lembaga | N/A | 3.682 | 3.703 | 3.900 |
| IKRO.2132. CAA.001.2 | Jumlah Layanan Disabilitas (ULD) yang disediakan | Lembaga | N/A | 60 | 65 | 70 |
| **RO.2132. CAA.002** | **Sarana PTKIN PNBP/BLU** | **Unit** | **4.935** | **3.365** | **3.422** | **3.479** |
| IKRO.2132. CAA.002.1 | Jumlah PTKIN PNBP/BLU yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran | Lembaga | N/A | 58 | 59 | 60 |
| **RO.2132. CAN.001** | **Pengadaan Sarana Bidang TIK** | **Unit** | **2.382** | **2.227** | **2.382** | **2.537** |
| IKRO.2132. CAN.001.1 | Jumlah pengadaan sarana bidang TIK | Unit | 2.382 | 2.227 | 2.382 | 2.537 |
| **RO.2132. CBJ.005** | **Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)** | **Unit** | **140** | **184** | **228** | **272** |
| IKRO.2132. CBJ.005.1 | Jumlah aset prasarana PTKIN ( PNBP/BLU) | Unit | N/A | 58 | 58 | 58 |
| **RO.2132. CBT.001** | **Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | **Unit** | **9** | **4** | **5** | **5** |
| IKRO.2132. CBT.001.1 | Jumlah PTKI yang memperoleh bantuan pengadaan fasilitas penunjang digitalisasi kampus | Lembaga | 25 | 40 | 59 | 60 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **8.286.534** | **10.150.765** | **10.642.375** | **10.886.519** | **11.063.755** | **[DITJEN PENDIS] Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam** |
| | | | | | | | |
| 68,42 | 69,51 | | | | | | |
| 6,75 | 7,00 | | | | | | |
| **3** | **3** | **32.606** | **32.606** | **32.606** | **32.606** | **32.606** | |
| 3.921 | 3.943 | | | | | | |
| 75 | 80 | | | | | | |
| **3.536** | **3.593** | **287.784** | **292.580** | **297.377** | **302.173** | **306.970** | |
| 61 | 62 | | | | | | |
| **2.692** | **2.847** | **76** | **81** | **86** | **91** | **96** | |
| 2.692 | 2.847 | | | | | | |
| **316** | **360** | **481.534** | **574.462** | **667.389** | **760.317** | **853.244** | |
| 58 | 58 | | | | | | |
| **5** | **6** | **1.310** | **1.629** | **1.656** | **1.683** | **1.709** | |
| 61 | 62 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2132. RBJ.001** | **Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Melalui PHLN** | **Unit** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2132. RBJ.001.1 | Jumlah Gedung Pendidikan Tinggi Yang Dibangun Melalui PHLN | Unit | N/A | 1 | 1 | 7 |
| **RO.2132. RBJ.002** | **Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Melalui SBSN** | **Lembaga** | **29** | **17** | **23** | **24** |
| IKRO.2132. RBJ.002.1 | Jumlah PTKI yang dibangun Melalui SBSN | Lembaga | 29 | 17 | 23 | 24 |
| **RO.2132. BEI.005** | **PTKIS Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran** | **Lembaga** | **30** | **30** | **31** | **32** |
| IKRO.2132. BEI.005.1 | Jumlah PTKIS yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran | Lembaga | N/A | 200 | 206 | 213 |
| **RO.2132. BEI.006** | **PTKIS Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran** | **Lembaga** | **50** | **50** | **59** | **70** |
| IKRO.2132. BEI.006.1 | Jumlah PTKIS penerima bantuan prasarana pembelajaran | Lembaga | 50 | 50 | 59 | 70 |
| **RO.2132. ACD.001** | **Pendirian Ijin Lembaga** | **Institusi** | **10** | **10** | **10** | **11** |
| IKRO.2132. ACD.001.1 | Jumlah layanan ijin pendirian lembaga | Institusi | N/A | 10 | 10 | 11 |
| **RO.2132. PDD.007** | **Unit Layanan Disabilitas Perguruan Tinggi Islam** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **1** | **2** |
| IKRO.2132. PDD.007.1 | Jumlah PTKI yang mempunyai Layanan Unit Disabilitas | Unit | N/A | 0 | 1 | 2 |
| **RO.2132. PDD.008** | **Pengembangan Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan TInggi Islam** | **Unit** | **N/A** | **0** | **1** | **2** |
| IKRO.2132. PDD.008.1 | Jumlah Lembaga Pengembangan Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan TInggi Islam | Lembaga | N/A | 0 | 14 | 16 |
| **RO.2132. QEI.004** | **Revitalisasi LPTK di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam** | **Lembaga** | **3** | **26** | **30** | **35** |
| IKRO.2132. QEI.004.1 | Jumlah LPTK yang direvitalisasi | Lembaga | 3 | 26 | 30 | 35 |
| **SK.2132.2** | **Meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang terjangkau** | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 380.376 | 380.376 | 380.376 | 380.376 | 380.376 | |
| 7 | 7 | | | | | | |
| 25 | 26 | 801.002 | 1.167.700 | 695.951 | 734.951 | 731.951 | |
| 25 | 26 | | | | | | |
| 33 | 34 | 1.000 | 1.032 | 1.065 | 1.097 | 1.129 | |
| 219 | 226 | | | | | | |
| 81 | 91 | 1.000 | 1.153 | 1.334 | 1.515 | 1.681 | |
| 81 | 91 | | | | | | |
| 11 | 11 | 1.700 | 1.700 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | |
| 11 | 11 | | | | | | |
| 3 | 4 | - | 1.600 | 3.200 | 4.800 | 6.400 | |
| 3 | 4 | | | | | | |
| 3 | 4 | - | 1.600 | 3.200 | 4.800 | 6.400 | |
| 20 | 24 | | | | | | |
| 40 | 45 | - | - | - | - | - | |
| 40 | 45 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2132.2.1 | Persentase mahasiswa PTK Islam penerima beasiswa | Persen | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,70 |
| IKSK.2132.2.2 | Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam berkualitas | Persen | N/A | 16,78 | 17,12 | 17,48 |
| IKSK.2132.2.3 | Persentase mahasiswa baru PTK Islam berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul | Persen | N/A | 14,29 | 14,64 | 14,79 |
| **RO.2132. PBH.001** | **Pemetaan Keunggulan dan Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi Keagamaan** | **Rekomen-dasi Kebijakan** | **N/A** | **0** | **0** | **0** |
| IKRO.2132. PBH.001.1 | Jumlah keunggulan dan diferensiasi misi PTKI yang dipetakan | Rekomen-dasi Kebijakan | N/A | 0 | 0 | 0 |
| **RO.2132. SBA.001** | **Pengembangan Kapasitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam** | **Orang** | **N/A** | **0** | **2200** | **2300** |
| IKRO.2132. SBA.001.1 | Jumlah Mahasiswa Penerima Pengembangan Kapasitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam | Orang | N/A | 0 | 2200 | 2300 |
| **RO.2132. SBA.002** | **Program mobilitas internasional mahasiswa Perguruan TInggi Keagamaan Islam** | **Orang** | **N/A** | **0** | **4649** | **4865** |
| IKRO.2132. SBA.002.1 | Jumlah Mahasiswa Penerima Program mobilitas internasional mahasiswa Perguruan TInggi Keagamaan Islam | Orang | N/A | 0 | 43 | 45 |
| **RO.2132. QEN.004** | **Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi** | **Orang** | **200** | **200** | **205** | **207** |
| IKRO.2132. QEN.004.1 | Jumlah Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afirmasi | Orang | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **RO.2132. QEN.007** | **Mahasiswa PTKI Penerima KIP** | **Orang** | **85.595** | **112.393** | **118.013** | **123.913** |
| IKRO.2132. QEN.007.1 | Jumlah Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah | Orang | N/A | 112.393 | 118.013 | 123.913 |
| **RO.2132. BEI.003** | **BOPTN Non Penelitian** | **Lembaga** | **1** | **58** | **58** | **58** |
| IKRO.2132. BEI.003.1 | Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa | Orang | 7.843 | 8.074 | 8.305 | 8.535 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 3,80 | 3,90 | | | | | | |
| 17,86 | 18,25 | | | | | | |
| 15,08 | 15,38 | | | | | | |
| **0** | **1** | - | - | - | - | 4.000 | |
| 0 | 1 | | | | | | |
| **2400** | **2500** | - | 9.362 | 9.787 | 10.213 | 10.638 | |
| 2400 | 2500 | | | | | | |
| **5081** | **5405** | - | 4.649 | 4.865 | 5.081 | 5.405 | |
| 47 | 50 | | | | | | |
| **211** | **215** | 2.312 | 2.367 | 2.391 | 2.437 | 2.485 | |
| 200 | 200 | | | | | | |
| **130.109** | **133.700** | 1.236.921 | 1.298.767 | 1.363.705 | 1.431.891 | 1.471.411 | |
| 130.109 | 133.700 | | | | | | |
| **58** | **58** | 523.520 | 785.280 | 1.543.481 | 1.543.481 | 1.543.481 | |
| 8.766 | 8.997 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2132. BEI.004** | **Lembaga Penyelenggaraan Seleksi Nasional Mahasiswa Baru** | **Lembaga** | **2** | **3** | **3** | **4** |
| IKRO.2132. BEI.004.1 | Jumlah Mahasiswa Baru PTKI | Orang | 131800 | 131800 | 135754 | 139827 |
| IKRO.2132. BEI.004.2 | Jumlah peserta yang mendaftar dan mengikuti seleksi nasional | Orang | 77.224 | 77.340 | 77.456 | 77.572 |
| **RO.2132. BEN.001** | **Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa di PTKI** | **Orang** | **50** | **50** | **52** | **55** |
| IKRO.2132. BEN.001.1 | Jumlah mahasiswa asing penerima beasiswa | Orang | 50 | 50 | 52 | 55 |
| **RO.2132. BEN.002** | **Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)** | **Orang** | **100** | **100** | **100** | **105** |
| IKRO.2132. BEN.002.1 | Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA | Orang | 100 | 100 | 100 | 105 |
| **SK.2132.3** | **Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi PTK Islam** | | | | | |
| IKSK.2132.3.1 | Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang terpetakan berdasarkan keunggulannya | Jumlah | | 289 | 299 | 309 |
| IKSK.2132.3.2 | Persentase Prodi PTK Islam yang mendapatkan akreditasi unggul | Persen | 10,50 | 13,00 | 15,50 | 18,00 |
| IKSK.2132.3.3 | Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK Islam yang terakreditasi | Persen | 59,00 | 72,34 | 76,47 | 77,36 |
| IKSK.2132.3.4 | Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK Islam yang terakreditasi unggul | Persen | 26,09 | 46,81 | 62,75 | 69,81 |
| **RO.2132. BEI.001** | **Bantuan Operasional Kopertais** | **Lembaga** | **36** | **36** | **37** | **38** |
| IKRO.2132. BEI.001.1 | Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang terpetakan berdasarkan keunggulannya | Lembaga | N/A | 205 | 212 | 218 |
| IKRO.2132. BEI.001.2 | Jumlah PTK Islam yang mendapatkan pembinaan standar mutu | Lembaga | 58 | 58 | 59 | 59 |
| IKRO.2132. BEI.001.3 | Jumlah Kopertais yang memperoleh Bantuan Operasional Pada PTK Islam | Lembaga | N/A | 15 | 15 | 15 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 5 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 144021 | 148342 | | | | | | |
| 77.688 | 77.805 | | | | | | |
| 59 | 63 | 3.534 | 3.670 | 3.870 | 4.132 | 4.395 | |
| 59 | 63 | | | | | | |
| 107 | 110 | 200 | 200 | 210 | 213 | 219 | |
| 107 | 110 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 318 | 328 | | | | | | |
| 20,50 | 23,00 | | | | | | |
| 86,79 | 96,23 | | | | | | |
| 79,25 | 89,00 | | | | | | |
| 40 | 41 | 6.395 | 6.603 | 6.792 | 7.000 | 7.207 | |
| 224 | 231 | | | | | | |
| 59 | 59 | | | | | | |
| 15 | 15 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2132. PDE.001** | **Akreditasi Prodi/Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri** | **Lembaga** | **3.195** | **523** | **550** | **600** |
| IKRO.2132. PDE.001.1 | Jumlah Prodi PTK Islam yang mendapatkan akreditasi unggul | Lembaga | 444 | 548 | 654 | 760 |
| IKRO.2132. PDE.001.2 | Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi pada PTK Islam | Lembaga | 27 | 34 | 35 | 36 |
| IKRO.2132. PDE.001.3 | Jumlah program studi Program Profesi Guru (PPG) yang terakreditasi unggul pada PTK Islam | Lembaga | 12 | 22 | 29 | 33 |
| IKRO.2132. PDE.001.4 | Jumlah PTK Islam yang mendapatkan Akreditasi | Lembaga | 58 | 58 | 59 | 59 |
| **RO.2132. PDD.001** | **Penguatan RPL di PTK Islam** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **2** | **2** |
| IKRO.2132. PDD.001.1 | Jumlah PTKI yang menyelenggarakan layanan RPL | Lembaga | N/A | 0 | 92 | 97 |
| **RO.2132. PDD.002** | **Pcnguatan Kurikulum dan Pembelajaran di PTK Islam** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **8** | **8** |
| IKRO.2132. PDD.002.1 | Jumlah PTKI yang melaksanakan evaluasi dan pengembangan Kurikulum | Lembaga | N/A | 0 | 275 | 330 |
| **RO.2132. PDD.003** | **Penyelenggaraan Pembelajaran digital/ daring di PTK Islam** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **14** | **16** |
| IKRO.2132. PDD.003.1 | Jumlah PTKI yang menyelenggarakan Pembelajaran digital/daring | Lembaga | N/A | 0 | 480 | 492 |
| **RO.2132. PDD.004** | **Matakuliah Kolaborasi Interdisiplin** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **1** | **3** |
| IKRO.2132. PDD.004.1 | Jumlah PTKI yang menyelenggarakan integrasi Matakuliah berbasis Interdisiplin | Lembaga | N/A | 0 | 82 | 86 |
| **RO.2132. PDD.005** | **Pembentukan prodi Interdisipliner kolaboratif di PTK Islam** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **1** | **1** |
| IKRO.2132. PDD.005.1 | Jumlah PTKI yang memiliki prodi Interdisipliner kolaboratif | Lembaga | N/A | 0 | 40 | 42 |
| **RO.2132. PDD.006** | **Pembinaan Standar Mutu Prodi PTK Islam** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **140** | **160** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 700 | 723 | 7.387 | 7.768 | 8.474 | 9.886 | 10.211 | |
| 865 | 971 | | | | | | |
| 40 | 45 | | | | | | |
| 37 | 42 | | | | | | |
| 59 | 59 | | | | | | |
| 2 | 2 | - | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | |
| 101 | 107 | | | | | | |
| 9 | 10 | - | 1.818 | 3.636 | 5.455 | 9.091 | |
| 396 | 475 | | | | | | |
| 18 | 20 | - | 8.235 | 9.412 | 10.588 | 11.765 | |
| 504 | 517 | | | | | | |
| 4 | 5 | - | 1.538 | 4.615 | 6.154 | 7.692 | |
| 90 | 94 | | | | | | |
| 1 | 1 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 43 | 45 | | | | | | |
| 180 | 200 | - | 12.353 | 14.118 | 15.882 | 17.647 | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2132. PDD.006.1 | Jumlah PTKI yang memperoleh pendampingan dan Pembinaan Standar Mutu | Lembaga | N/A | 0 | 300 | 320 |
| **SK.2132.4** | **Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan PTK Islam sesuai dengan standar minimal** | | | | | |
| IKSK.2132.4.1 | Persentase dosen PTK Islam berkualifikasi akademik S3 | | | | | |
| | a. Total | Persen | 16,39 | 16,89 | 17,40 | 17,90 |
| | b. STEM | Persen | 1,10 | 1,13 | 1,17 | 1,20 |
| | c. Non STEM | Persen | 15,29 | 15,76 | 16,23 | 16,70 |
| IKSK.2132.4.2 | Persentase dosen PTK Islam yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Persen | N/A | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| IKSK.2132.4.3 | Persentase dosen PTK Islam yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar | Persen | 40,13 | 42,76 | 45,39 | 49,02 |
| IKSK.2132.4.4 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Islam yang mendapatkan program peningkatan kompetensi | Persen | N/A | 10,00 | 10,20 | 10,40 |
| IKSK.2132.4.5 | Persentase dosen PTK Islam yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional | Persen | N/A | 0,76 | 0,78 | 0,80 |
| IKSK.2132.4.6 | Rasio dosen asing PTK Islam dengan dosen dalam negeri | Rasio | N/A | 1:572 | 1:556 | 1:540 |
| IKSK.2132.4.7 | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK Islam pada jenjang jabatan fungsional | Persen | N/A | 75 | 76 | 77 |
| **RO.2132. BEA.001** | **Tunjangan Profesi Dosen Non ASN** | **Orang** | **91.656** | **8.170** | **8.313** | **8.313** |
| IKRO.2132. BEA.001.1 | Jumlah Dosen Non ASN PTK Islam Penerima Tunjangan Profesi | Orang | N/A | 8.170 | 8.313 | 8.313 |
| **RO.2132. BEA.008** | **Tunjangan Fungsional Dosen Non ASN** | **Orang** | **1.809** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| IKRO.2132. BEA.008.1 | Jumlah Dosen Non ASN PTK Islam penerima Tunjangan Fungsional | orang | 1.809 | 1.507 | 8.913 | 8.913 |
| **RO.2132. PDI.001** | **Dosen yang Tersertifikasi** | **Orang** | **1.000** | **1.020** | **1.040** | **1.061** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 340 | 360 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18,41 | 18,91 | | | | | | |
| 1,24 | 1,27 | | | | | | |
| 17,17 | 17,65 | | | | | | |
| 1,30 | 1,40 | | | | | | |
| 50,64 | 53,27 | | | | | | |
| 10,60 | 10,80 | | | | | | |
| 0,82 | 0,84 | | | | | | |
| 1:534 | 1:508 | | | | | | |
| 78 | 79 | | | | | | |
| **8.313** | **8.457** | **6.359** | **6.505** | **6.505** | **6.505** | **6.616** | |
| 8.313 | 8.457 | | | | | | |
| **1.700** | **1.700** | **11.261** | **11.261** | **11.261** | **11.261** | **11.261** | |
| 8.913 | 8.913 | | | | | | |
| **1.082** | **1.104** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2132. PDI.001.1 | Jumlah dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar Pada PTK Islam | Orang | 20.484 | 18.565 | 19.707 | 21.283 |
| IKRO.2132. PDI.001.2 | Jumlah Dosen yang Tersertifikasi Pada PTK Islam | Orang | 24.864 | 27.364 | 29.864 | 32.364 |
| **RO.2132. PDG.001** | **Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi** | **Orang** | **N/A** | **50** | **57** | **69** |
| IKRO.2132. PDG.001.1 | Jumlah dosen berkualifikasi akademik S3<br>total<br>STEM<br>non STEM | Orang | 06b) 543c)<br>7.563 | 8.356<br>560<br>7.796 | 8.606<br>577<br>8.029 | 8.856<br>594<br>8.262 |
| IKRO.2132. PDG.001.2 | Jumlah dosen PTK Islam yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Orang | N/A | 495 | 544 | 594 |
| IKRO.2132. PDG.001.3 | Jumlah dosen PTK Islam yang mengikuti program peningkatan kompetensi | Orang | N/A | 4.946 | 5.045 | 5.144 |
| IKRO.2132. PDG.001.4 | Jumlah Dosen PTK Islam yang mendapatkan fasilitasi menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun intern | Orang | N/A | 376 | 386 | 396 |
| IKRO.2132. PDG.001.5 | Jumlah dosen asing PTK Islam yang difasilitasi dalam pembelajaran pendidikan tinggi | Orang | N/A | 89 | 92 | 95 |
| IKRO.2132. PDG.001.6 | Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri | Orang | N/A | 1:508 | 1:524 | 1:540 |
| IKRO.2132. PDG.001.7 | Jumlah pemenuhan tenaga kependidikan PTK Islam pada jenjang jabatan fungsional | Orang | 1.000 | 833 | 4.927 | 4.927 |
| | Jumlah dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar | Orang | 19.850 | 21.151 | 22.452 | 24.247 |
| **RO.2132. DBA.001** | **Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi** | **Orang** | **120** | **1** | **1** | **2** |
| IKRO.2132. DBA.001.1 | Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Islam yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi | Orang | 136 | 137 | 138 | 139 |
| **SK.2132.5** | **Meningkatnya kualitas lulusan PTK Islam yang diterima di dunia kerja** | | | | | |
| IKSK.2132.5.1 | Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus | Persen | N/A | 5,00 | 6,00 | 7,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 21.986 | 23.128 | | | | | | |
| 34.864 | 37.364 | | | | | | |
| **80** | **91** | **807** | **925** | **1.108** | **1.292** | **1.475** | |
| 9.106<br>611<br>8.495 | 9.356<br>628<br>8.728 | | | | | | |
| 643 | 692 | | | | | | |
| 5.243 | 5.342 | | | | | | |
| 406 | 415 | | | | | | |
| 97 | 100 | | | | | | |
| 1:556 | 1:572 | | | | | | |
| 4.927 | 4.927 | | | | | | |
| 25.049 | 26.349 | | | | | | |
| **2** | **2** | **1.000** | **1.000** | **1.001** | **1.001** | **1.002** | |
| 140 | 141 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8,00 | 9,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2132.5.2 | Persentase PTK Islam yang memiliki Pusat Pengembangan Karir | Persen | N/A | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| IKSK.2132.5.3 | Persentase lulusan PTK Islam yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan | | | | | |
| | a. Total | Persen | N/A | 83,59 | 84,15 | 84,71 |
| | b. Karyawan / Wirausaha | Persen | N/A | 83,59 | 84,15 | 84,71 |
| IKSK.2132.5.4 | Persentase tenaga kerja lulusan PTK Islam bidang STEM | Persen | N/A | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
| IKSK.2132.5.5 | Persentase peningkatan mahasiswa PTK Islam yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi | Persen | N/A | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| IKSK.2132.5.6 | Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK Islam | Rasio | 1:0,95 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| IKSK.2132.5.7 | Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi | Persen | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| IKSK.2132.5.8 | Persentase mahasiswa PTK Islam yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Persen | N/A | 0,27 | 0,41 | 0,55 |
| IKSK.2132.5.9 | Persentase PTK yang mendapatkan pembinaan standar mutu | Persen | N/A | 3,17 | 3,28 | 3,38 |
| **RO.2132. BEI.002** | **Bantuan Pendanaan PTN-BH** | **Lembaga** | **N/A** | **64** | **149** | **154** |
| IKRO.2132. BEI.002.1 | Jumlah peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi | Orang | N/A | 205 | 212 | 218 |
| IKRO.2132. BEI.002.2 | Jumlah mahasiswa yang memperoleh layanan program Outbound per Inbound | Orang | N/A | 58 | 59 | 59 |
| IKRO.2132. BEI.002.3 | Jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi | Orang | N/A | 15 | 15 | 15 |
| **RO.2132. BGC.002** | **PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui PNBP** | **Lembaga** | **37** | **30** | **29** | **29** |
| IKRO.2132. BGC.002.1 | Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus | Orang | N/A | 2.884 | 3.460 | 4.037 |
| IKRO.2132. BGC.002.2 | Jumlah PTK Islam yang memiliki Pusat Pengembangan Karir | Lembaga | 58 | 58 | 58 | 58 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 13,00 | 14,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 85,27 | 85,83 | | | | | | |
| 85,27 | 85,83 | | | | | | |
| 0,65 | 0,70 | | | | | | |
| 7,50 | 8,00 | | | | | | |
| 1:1 | 1:1 | | | | | | |
| 0,05 | 0,06 | | | | | | |
| 69,00 | 0,83 | | | | | | |
| 3,49 | 3,60 | | | | | | |
| **158** | **162** | **524.853** | **824.839** | **852.452** | **876.511** | **900.572** | |
| 224 | 231 | | | | | | |
| 59 | 59 | | | | | | |
| 15 | 15 | | | | | | |
| **29** | **28** | **544.318** | **670.954** | **670.954** | **670.954** | **670.954** | |
| 4.614 | 5.190 | | | | | | |
| 58 | 58 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| RO.2132. UAB.001 | Tracer study terpadu lintas Perguruan Tinggi Keagamaan | Sistem Informasi | N/A | 0 | 1 | 1 |
| IKRO.2132. UAB.001.1 | Jumlah lulusan PTK Islam yang berhasil memiliki pekerjaan: | | | | | |
| | a. Karyawan | Orang | N/A | 16.979 | 17.105 | 17.232 |
| | b. Wirausaha | Orang | N/A | 31.229 | 31.425 | 31.621 |
| **RO.2132. BGC.001** | **PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU** | **Lembaga** | **21** | **28** | **29** | **30** |
| IKRO.2132. BGC.001.1 | Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi keagamaan bidang STEM | Orang | N/A | 1.153 | 1.269 | 1.384 |
| IKRO.2132. BGC.001.2 | Jumlah lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi | Orang | N/A | 13.841 | 14.995 | 16.148 |
| IKRO.2132. BGC.001.3 | Jumlah prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi | Lembaga | N/A | 21 | 23 | 25 |
| **RO.2132. QEI.002** | **Bantuan Pendanaan PTN-BH** | **Jumlah** | **1** | **1** | **2** | **3** |
| IKRO.2132. QEI.002.1 | Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa | Rasio | 2.192 | 2.307 | 2.330 | 2.353 |
| IKRO.2132. QEI.002.2 | Jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi | Orang | 23 | 46 | 69 | 92 |
| **SK.2132.6** | **Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama PTK Islam** | | | | | |
| IKSK.2132.6.1 | Persentase PTK Islam yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional | Persen | 5,02 | 5,07 | 5,12 | 5,17 |
| IKSK.2132.6.1 | Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang:<br>Pendidikan dan pengajaran<br>Penelitian dan publikasi<br>Pengabdian kepada masyarakat | Persen | ,93;b. 8,35;c. 1,5 | 12,33;<br>8,36;<br>2,00 | 12,72;<br>8,37;<br>2,01 | 13,12;<br>8,38;<br>2,02 |
| **RO.2132. PEC.001** | **Kerjasama Pengembangan PT** | **Kesepakatan** | **N/A** | **4** | **4** | **4** |
| IKRO.2132. PEC.001.1 | Jumlah PTK Islam yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional | Lembaga | 46 | 46 | 47 | 47 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | | | | | |
| 17.365 | 17.492 | | | | | | |
| 31.812 | 32.008 | | | | | | |
| **31** | **32** | **3.413.535** | **3.842.301** | **3.842.301** | **3.842.301** | **3.842.301** | |
| 1.499 | 1.615 | | | | | | |
| 17.302 | 18.455 | | | | | | |
| 27 | 29 | | | | | | |
| **4** | **5** | **1.333** | **2.667** | **4.000** | **5.333** | **6.667** | |
| 2.376 | 2.399 | | | | | | |
| 115 | 138 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5,22 | 5,27 | | | | | | |
| 13,52; 8,39; 2,03 | 13,92; 8,40; 2,04 | | | | | | |
| **5** | **5** | **727** | **727** | **727** | **909** | **909** | |
| 48 | 48 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2132. PEC.001.2 | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran | Kesepakatan | 60 | 62 | 63 | 65 |
| IKRO.2132. PEC.001.3 | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi | Kesepakatan | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IKRO.2132. PEC.001.4 | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat | Kesepakatan | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **SK.2132.7** | **Meningkatnya budaya akademik yang religious dan toleran Pada PTK Islam** | | | | | |
| IKSK.2132.7.1 | Persentase mahasiswa PTKI yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci | Persen | N/A | 3,00 | 3,05 | 3,10 |
| IKSK.2132.7.2 | Persentase Prodi PTKI yang mengimplementasikan integrasi keilmuan | Persen | N/A | 3,28 | 3,78 | 4,28 |
| IKSK.2132.7.3 | Persentase PTKI yang mendapatkan bantuan pengembangan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal | Persen | N/A | 2,90 | 3,40 | 3,90 |
| IKSK.2132.7.4 | Persentase PTK Islam yang mengembangkan literasi keagamaan | Persen | N/A | 3,55 | 4,16 | 4,73 |
| **RO.2132. SBA.003** | **Mahasiswa yg Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama** | **Orang** | **N/A** | **1.000** | **1.016** | **1.033** |
| IKRO.2132. SBA.003.1 | Jumlah mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci | Orang | N/A | 17.128 | 17.413 | 17.699 |
| IKRO.2132. SBA.003.2 | Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan | Lembaga | N/A | 139 | 160 | 181 |
| IKRO.2132. SBA.003.3 | Jumlah PTKI yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal | Lembaga | N/A | 27 | 31 | 36 |
| | Nilai keagamaan mahasisawa (pemahaman, pengamalan dan sikap) | Nilai | N/A | 80,0 | 80,5 | 81,0 |
| **SK.2132.8** | **Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penelitian PTK Islam** | | | | | |
| IKSK.2132.8.1 | Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Islam yang disitasi | Persen | 72,81 | 75,61 | 78,59 | 81,75 |
| IKSK.2132.8.2 | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi | Jumlah | N/A | 5 | 6 | 7 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 68 | 70 | | | | | | |
| 50 | 52 | | | | | | |
| 12 | 13 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3,15 | 3,20 | | | | | | |
| 4,78 | 5,28 | | | | | | |
| 4,40 | 4,90 | | | | | | |
| 5,22 | 5,85 | | | | | | |
| **1.049** | **1.066** | **9.682** | **9.841** | **10.000** | **10.159** | **10.317** | |
| 17.984 | 18.270 | | | | | | |
| 202 | 223 | | | | | | |
| 40 | 45 | | | | | | |
| 81,5 | 82,0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 85,08 | 88,42 | | | | | | |
| 8 | 9 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2132.8.3 | Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen | Rasio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| IKSK.2132.8.3 | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah PTK Islam | Jumlah | 11 | 12 | 13 | 14 |
| IKSK.2132.8.4 | Jumlah hasil riset dan inovasi PTK Islam yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat | Jumlah | 4 | 3 | 4 | 4 |
| IKSK.2132.8.5 | Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya | Persen | 9,00 | 88,00 | 92,00 | 95,00 |
| **RO.2132. QEI.001** | **BOPTN Penelitian PTKI** | **Lembaga** | **N/A** | **58** | **58** | **58** |
| IKRO.2132. QEI.001.1 | Jumlah karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional | Judul | N/A | 203 | 206 | 213 |
| IKRO.2132. QEI.001.2 | Jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Islam yang disitasi | Judul | 415 | 431 | 448 | 466 |
| IKRO.2132. QEI.001.3 | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi | Judul | N/A | 5 | 6 | 7 |
| IKRO.2132. QEI.001.4 | Jumlah dosen yang menerbitkan karya tulis ilmiah | Orang | | | | |
| IKRO.2132. QEI.001.5 | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam | Hak Paten | 11 | 12 | 13 | 14 |
| IKRO.2132. QEI.001.6 | Jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat | Layanan | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IKRO.2132. QEI.001.7 | Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya | Lembaga | 82 | 805 | 842 | 869 |
| **4438 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Aly** | | | | | | |
| **SK.4438.1** | **Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Ma'had Aly** | | | | | |
| IKSK.4438.1.1 | Persentase Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi | Persen | N/A | 0,00 | 1,10 | 1,10 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1:1 | 1:1 | | | | | | |
| 15 | 16 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 99,00 | 103,00 | | | | | | |
| **58** | **58** | - | 158.797 | 158.797 | 158.797 | 158.797 | |
| 214 | 216 | | | | | | |
| 485 | 504 | | | | | | |
| 8 | 9 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 15 | 16 | | | | | | |
| 8 | 9 | | | | | | |
| 906 | 942 | | | | | | |
| | | **36.216** | **40.851** | **52.179** | **55.322** | **58.840** | **[DITJEN PENDIS] Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren** |
| | | | | | | | |
| 1,10 | 2,20 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4438.1.2 | Persentase Ma'had Aly yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi inklusif | Persen | N/A | 0,00 | 1,10 | 1,10 |
| IKSK.4438.1.3 | Persentase Ma'had Aly yang memiliki Unit Layanan Disabilitas ( ULD) | Persen | N/A | 6,00 | 6,30 | 6,60 |
| **RO.4438. BEI.001** | **Ma'had Aly Penerima Bantuan Sarana** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **12** | **15** |
| IKRO.4438. BEI.001.1 | Jumlah Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran | Lembaga | N/A | 100 | 100 | 101 |
| **RO.4438. BEI.002** | **\Ma'had Aly Penerima Bantuan Prasarana** | **Lembaga** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| IKRO.4438. BEI.002.1 | Jumlah Ma'had Aly yang memperoleh bantuan Prasarana pembelajaran (pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, asrama mahasantri, tempat ibadah, sanitasi dan fasilitas penunjang digitalisasi) | Lembaga | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **RO.4438. CBJ.001** | **Prasarana Pendidikan Tinggi Ma'had Aly** | **Unit** | **N/A** | **4** | **4** | **4** |
| IKRO.4438. CBJ.001.1 | Jumlah Prasarana Pendidikan Mah'ad Aly | Unit | N/A | 4 | 4 | 4 |
| **SK.4438.2** | **Meningkatnya layanan Ma'had Aly yang terjangkau** | | | | | |
| IKSK.4438.2.1 | Persentase mahasantri penerima beasiswa | Persen | 1,04 | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
| IKSK.4438.2.2 | Persentase mahasantri kategori UKT kelompok I | Persen | N/A | 0.00 | 0,00 | 1,00 |
| **RO.4438. BEN.001** | **Mahasantri Penerima Beasiswa PPA** | **Orang** | **2.200** | **2.500** | **2.513** | **2.525** |
| IKRO.4438. BEN.001.1 | Jumlah Mahasantri Penerima Beasiswa PPA | Orang | N/A | 2.500 | 2.513 | 2.525 |
| IKRO.4438. BEN.001.2 | Jumlah Mahasantri kategori UKT kelompok I | Orang | N/A | 0 | 244 | 383 |
| **RO.4438. CAA.001** | **Peningkatan Sarana Pendidikan M a'had Aly** | **Paket** | **N/A** | **74** | **76** | **78** |
| IKRO.4438. CAA.001.1 | Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi Ma'had Aly | Paket | N/A | 74 | 76 | 78 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1,10 | 2,20 | | | | | | |
| 6,90 | 7,10 | | | | | | |
| **18** | **22** | **-** | **4.150** | **4.980** | **5.810** | **6.866** | |
| 101 | 101 | | | | | | |
| **4** | **4** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| **4** | **4** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1,25 | 1,30 | | | | | | |
| 1.27 | 1,50 | | | | | | |
| **2.538** | **2.550** | **25.044** | **25.169** | **25.295** | **25.422** | **25.549** | |
| 2.538 | 2.550 | | | | | | |
| 407 | 427 | | | | | | |
| **80** | **82** | **1.399** | **1.403** | **1.407** | **1.412** | **1.416** | |
| 80 | 82 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **SK.4438.3** | **Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan Ma'had Aly sesuai dengan standar minimal** | **Jumlah** | | | | |
| IKSK.4438.3.1 | Persentase dosen Ma'had Aly berkualifikasi akademik S3 | Persen | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| IKSK.4438.3.2 | Persentase dosen Ma'had Aly yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Persen | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| IKSK.4438.3.3 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan Ma'had Aly yang mengikuti program peningkatan kompetensi | Persen | N/A | 0,00 | 2,68 | 5,20 |
| **RO.4438. BEN.002** | **Dosen Non PNS Ma'had Aly Penerima Insentif dan Tunjangan Profesi** | **Orang** | **1.041** | **1.000** | **1.050** | **1.103** |
| IKRO.4438. BEN.002.1 | Jumlah dosen Ma'had Aly berkualifikasi akademik S3 | Orang | 130 | 140 | 150 | 160 |
| IKRO.4438. BEN.002.2 | Jumlah dosen Ma'had Aly yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Orang | 25 | 40 | 55 | 70 |
| IKRO.4438. BEN.002.3 | Jumlah dosen Ma'had Aly yang mengikuti program peningkatan kompetensi | Orang | 25 | 40 | 55 | 70 |
| IKRO.4438. BEN.002.4 | Jumlah tenaga kependidikan Ma'had Aly yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Orang | 100 | 125 | 150 | 180 |
| **SK.4438.4** | **Meningkatnya kualitas lulusan Ma'had Aly yang diterima di dunia kerja** | | | | | |
| IKSK.4438.4.1 | Persentase peningkatan mahasantri yang mengikuti program sertifikasi profesi | Persen | N/A | 0 | 1,00 | 1,50 |
| IKSK.4438.4.2 | Persentase mahasantri yang berkegiatan di luar program studi | Persen | 20 | 25 | 30 | 35 |
| **RO.4438. BGC.001** | **Ma'had Aly yang meningkat kualitas layanan pendidikannya** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **0** | **18** |
| IKRO.4438. BGC.001.1 | Jumlah peningkatan mahasantri yang mengikuti program sertifikasi profesi | Orang | N/A | 0 | 0 | 232 |
| IKRO.4438. BGC.001.2 | Jumlah mahasantri yang berkegiatan di luar program studi | Orang | N/A | 0 | 0 | 5.801 |
| IKRO.4438. BGC.001.3 | Persentase lulusan Ma'had Aly (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus | Persen | N/A | N/A | N/A | 0,01 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 30,00 | 35,00 | | | | | | |
| 25,00 | 30,00 | | | | | | |
| 7,73 | 10,25 | | | | | | |
| **1.158** | **1.216** | **3.000** | **3.150** | **3.308** | **3.473** | **3.647** | |
| 170 | 180 | | | | | | |
| 85 | 100 | | | | | | |
| 85 | 100 | | | | | | |
| 200 | 250 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2,00 | 2,50 | | | | | | |
| 40 | 50 | | | | | | |
| **21** | **24** | **0** | **0** | **2.000** | **2.333** | **2.800** | |
| 348 | 464 | | | | | | |
| 6.962 | 8.122 | | | | | | |
| 0,02 | 0,03 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.4438. BGC.001.4 | Persentase Ma'had Alyyang memiliki Pusat Pengembangan Karir | Persen | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| IKRO.4438. BGC.001.5 | Persentase lulusan Ma'had Aly yang berhasil memiliki pekerjaan : | Persen | | | | |
| | a. Karyawan | Persen | N/A | 33,44 | 33,66 | 33,88 |
| | b. Wirausaha | Persen | N/A | 50,15 | 50,49 | 50,83 |
| IKRO.4438. BGC.001.6 | Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi | Persen | N/A | N/A | N/A | 0,01 |
| **RO.4438. DBA.001** | **Jumlah Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompentensi** | **Orang** | **N/A** | **100** | **110** | **120** |
| IKRO.4438. DBA.001.1 | Jumlah Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompentensi | Orang | N/A | 100 | 110 | 120 |
| SK.4438.5 | Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama di Ma'had Aly | | | | | |
| IKSK.4438.5.1 | Persentase Ma'had Aly yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional | Persen | N/A | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
| IKSK.4438.5.1 | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran | Persen | N/A | 4,4 | 4,40 | 4,40 |
| IKSK.4438.5.2 | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi | Persen | N/A | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| IKSK.4438.5.3 | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat | Persen | N/A | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| **RO.4438. PEC.001** | **Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti di Bidang Pendidikan dan Pengajaran** | **Kesepaka-tan** | **N/A** | **0** | **0** | **11** |
| IKRO.4438. PEC.001 .1 | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran | Kesepaka-tan | N/A | 0 | 0 | 3 |
| IKRO.4438. PEC.001 .2 | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi | Kesepaka-tan | N/A | 0 | 0 | 5 |
| IKRO.4438. PEC.001 .3 | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang kepada masyarakat | Kesepaka-tan | N/A | 0 | 0 | 3 |
| **SK.4438.6** | **Meningkatnya budaya akademik yang religius dan toleran di Ma'had Aly** | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30,00 | 35,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 34,11 | 34,33 | | | | | | |
| 51,16 | 51,50 | | | | | | |
| 0,02 | 0,03 | | | | | | |
| **135** | **150** | **1.000** | **1.100** | **1.200** | **1.350** | **1.500** | |
| 135 | 150 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2,00 | 2,50 | | | | | | |
| 5,50 | 6,60 | | | | | | |
| 5,5 | 6,60 | | | | | | |
| 2,20 | 2,20 | | | | | | |
| **14** | **17** | **0** | **0** | **3.847** | **4.431** | **5.014** | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 6 | 7 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.4438.6.1 | Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci | Persen | N/A | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| **RO.4438. SBA.002** | **Mahasantri yang mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama** | **Orang** | **1.000** | **1.000** | **1.060** | **1.124** |
| IKRO.4438. SBA.002.1 | Jumlah mahasantri yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci | Orang | N/A | 232 | 237 | 239 |
| IKRO.4438. SBA.002.2 | Jumlah prodi Ma'had Aly yang difasilitasi integrasi keilmuan | Lembaga | N/A | 5 | 6 | 7 |
| IKRO.4438. SBA.002.3 | Jumlah Ma'had Aly yang difasilitasi dalam mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal | Lembaga | N/A | 10 | 13 | 15 |
| **SK.4438.7** | **Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian di Ma'had Aly** | | | | | |
| IKSK.4438.7.1 | Persentase karya tulis ilmiah Ma'had Aly yang bereputasi nasional | Persen | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| IKSK.4438.7.2 | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Ma'had Aly | Jumlah | N/A | 0 | 0 | 3 |
| IKSK.4438.7.3 | Jumlah hasil riset dan inovasi Ma'had Aly yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat | Produk | N/A | 10 | 12 | 14 |
| IKSK.4438.7.4 | Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) Ma'had Aly yang ditingkatkan kapasitasnya | Lembaga | N/A | 9 | 18 | 27 |
| **RO.4438. DDD.001** | **Penelitian Ma'had Aly yang berkualitas** | **Kekayaan Intelektual** | **N/A** | **0** | **0** | **12** |
| IKRO.4438. DDD.001.1 | Jumlah artikel yang bereputasi nasional | Judul | N/A | 0 | 0 | 3 |
| IKRO.4438. DDD.001.2 | Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen | Rasio | N/A | 0 | 0 | 1/70 |
| IKRO.4438. DDD.001.3 | Jumlah Paten Granted Perguruan Tinggi Keagamaan | Jumlah | N/A | 0 | 0 | 3 |
| IKRO.4438. DDD.001.4 | Jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan Masyarakat | Judul | N/A | 0 | 0 | 4 |
| IKSK.4438.6.4 | Indeks keagamaan mahasisawa (pemahaman, pengamalan dan sikap) | Persen | N/A | 80,00 | 82,00 | 84,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1,05 | 1,07 | | | | | | |
| **1.191** | **1.262** | **1.773** | **1.879** | **1.992** | **2.111** | **2.238** | |
| 244 | 248 | | | | | | |
| 8 | 9 | | | | | | |
| 20 | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8,00 | 10,00 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 16 | 18 | | | | | | |
| 36 | 45 | | | | | | |
| **15** | **18** | **-** | **-** | **4.150** | **4.980** | **5.810** | |
| 6 | 7 | | | | | | |
| 1/60 | 1/50 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 6 | 8 | | | | | | |
| 86,00 | 88,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **5101 - Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen** | | | | | | |
| **SK.5101.1** | **Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PTK Kristen** | | | | | |
| IKSK.5101.1.1 | Persentase PTK Kristen yang memenuhi standar sarana prasarana | Persen | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 |
| IKSK.5101.1.2 | Persentase PTK Kristen yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif | Persen | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 |
| **RO.5101. BEI.003** | **Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta** | **Lembaga** | **N/A** | **10** | **150** | **180** |
| IKRO.5101. BEI.003.1 | Jumlah PTK Kristen yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi | Lembaga | N/A | 10 | 150 | 180 |
| **RO.5101. CAA.001** | **Sarana Bidang Pendidikan** | **Paket** | **45** | **8** | **8** | **8** |
| IKRO.5101. CAA.001.1 | Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang memproleh peningkatan sarana pembelajaran | Paket | 45 | 54 | 60 | 65 |
| **RO.5101. CBJ.001** | **Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri** | **Unit** | **7** | **8** | **8** | **8** |
| IKRO.5101. CBJ.001.1 | Jumlah PTKKN yang mengembangkan prasarana pembelajaran | Unit | 7 | 7 | 8 | 16 |
| **RO.5101. PDD.003** | **Pengembangan Pusat Pengarusutamaan Gender dan Unit Layanan Disabilitas Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **50** | **76** |
| IKRO.5101. PDD.003.1 | Jumlah PTK Kristen yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif | Lembaga | N/A | 0 | 25 | 38 |
| IKRO.5101. PDD.003.2 | Jumlah PTK yang memiliki Unit Layanan Disabilitas | Lembaga | N/A | 0 | 25 | 38 |
| **SK.5101.2** | **Meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang terjangkau** | | | | | |
| IKSK.5101.2.1 | Persentase mahasiswa PTK Kristen penerima beasiswa | Persen | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **347.307** | **471.191** | **568.806** | **647.808** | **828.627** | **[BIMAS KRISTEN] Direktorat Pendidikan Kristen** |
| | | | | | | | |
| 20,00 | 20,00 | | | | | | |
| 15,00 | 20,00 | | | | | | |
| **225** | **270** | **85.820** | **90.200** | **102.500** | **118.000** | **222.500** | |
| 225 | 270 | | | | | | |
| **8** | **8** | **8.124** | **9.000** | **9.500** | **10.000** | **11.000** | |
| 70 | 80 | | | | | | |
| **8** | **8** | **73.262** | **140.494** | **180.988** | **200.482** | **221.976** | |
| 21 | 32 | | | | | | |
| **110** | **158** | **-** | **2.000** | **3.000** | **4.000** | **5.000** | |
| 55 | 79 | | | | | | |
| 55 | 79 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 35,00 | 40,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.5101.2.2 | Persentase mahasiswa baru PTK Kristen yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas | Persen | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 |
| **RO.5101. QEN.001** | **Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah** | **Orang** | **8.358** | **9.819** | **0** | **0** |
| IKRO.5101. QEN.001.1 | Jumlah mahasiswa penerima beasiswa kuliah (KIP) | Orang | 8.358 | 9.819 | puspenma | puspenma |
| **RO.5101. BEN.001** | **Bantuan Beasiswa PPA Mahasiswa PTK Kristen** | **Orang** | **2.151** | **562** | **1.800** | **2.340** |
| IKRO.5101. QEN.001.1 | Jumlah mahasiswa PTK Kristen Penerima beasiswa PPA | Orang | 2.151 | 562 | 1.800 | 2.340 |
| **RO.5101. BEN.002** | **Bantuan Beasiswa Afirmasi Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP)** | **Orang** | **150** | **150** | **187** | **275** |
| IKRO.5101. BEN.002.1 | Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi OAP pada PTKKN | Orang | 100 | 100 | 150 | 250 |
| IKRO.5101. BEN.002.2 | Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi OAP pada PTU | Orang | 50 | 50 | 37 | 25 |
| **RO.5101. DBA.001** | **Layanan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru** | **Orang** | **3.165** | **0** | **3.724** | **4.170** |
| IKRO.5101. DBA.001.1 | Jumlah mahasiswa baru yang diterima lewat jalur Seleksi Nasional | Orang | 3.165 | 3.386 | 3.724 | 4.170 |
| **SK.5101.3** | **Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi PTK Kristen** | | | | | |
| IKSK.5101.3.1 | Jumlah PTK Kristen yang terpetakan berdasarkan keunggulannya | Lembaga | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 210,00 |
| IKSK.5101.3.2 | Persentase prodi pada PTK Kristen yang mendapatkan akreditasi unggul | Persen | 0,05 | 0,05 | 2,90 | 4,15 |
| IKSK.5101.3.3 | Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada PTK Kristen yang terakreditasi | Persen | 42,86 | 42,86 | 50,00 | 50,00 |
| IKSK.5101.3.4 | Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) yang pada PTK Kristen yang terakreditasi unggul | Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RO.5101. PDE.001** | **Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Terakreditasi** | **Lembaga** | **213** | **217** | **240** | **258** |
| IKRO.5101. PDE.001.1 | Jumlah pemetaan keunggulan PTK Kristen | Lembaga | 205 | 205 | 205 | 210 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 15,00 | 20,00 | | | | | | |
| **0** | **0** | **5.709** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| puspenma | puspenma | | | | | | |
| **3.042** | **3.955** | **3.360** | **8.640** | **11.232** | **14.601** | **18.984** | |
| 3.042 | 3.955 | | | | | | |
| **365** | **450** | **5.142** | **5.500** | **6.875** | **8.250** | **13.182** | |
| 350 | 450 | | | | | | |
| 15 | 0 | | | | | | |
| **4.795** | **5.754** | **-** | **500** | **600** | **700** | **800** | |
| 4.795 | 5.754 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 210,00 | 215,00 | | | | | | |
| 5,19 | 6,74 | | | | | | |
| 62,50 | 62,50 | | | | | | |
| 16,66 | 33,33 | | | | | | |
| **269** | **289** | **3.808** | **7.564** | **10.000** | **12.500** | **14.000** | |
| 210 | 215 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5101. PDE.001.2 | Jumlah Program Studi yang Terakreditasi Unggul | Prodi | 5 | 5 | 28 | 40 |
| IKRO.5101. PDE.001.3 | Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada PTK Kristen yang terakreditasi | Lembaga | 3 | 3 | 4 | 4 |
| IKRO.5101. PDE.001.4 | Jumlah program studi Program Profesi Guru (PPG) pada PTK Kristen yang terakreditasi unggul | Prodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **RO.5101. PDD.001** | **Penguatan Standar Mutu Kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen** | **Lembaga** | **N/A** | **90** | **119** | **145** |
| IKRO.5101. PDD.001.1 | Jumlah PTK Kristen yang mendapatkan Penguatan Standar Mutu Kelembagaan | Lembaga | N/A | 90 | 119 | 145 |
| **SK.5101.4** | **Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen sesuai dengan standar minimal** | | | | | |
| IKSK.5101.4.1 | Persentase dosen PTK Kristen berkualifikasi akademik S3 | | | | | |
| | a. Total | Persen | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 |
| | b. STEM | Persen | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| | c. Non STEM | Persen | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 |
| IKSK.5101.4.2 | Persentase dosen PTK Kristen yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Persen | N/A | 0,00 | 1,02 | 3,21 |
| IKSK.5101.4.3 | Persentase dosen PTK Kristen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar | Persen | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
| IKSK.5101.4.4 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang mendapatkan program peningkatan kompetensi | Persen | 1,00 | 41,20 | 51,08 | 52,10 |
| IKSK.5101.4.5 | Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK Kristen | - | 1:6000 | 1:6000 | 1:6000 | 2:6000 |
| IKSK.5101.4.6 | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK Kristen pada jenjang jabatan fungsional | Persen | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| **RO.5101. QEN.002** | **Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3** | | | **48** | **100** | **102** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 50 | 65 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| **150** | **198** | **7.500** | **8.000** | **9.000** | **11.000** | **13.000** | |
| 150 | 198 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 70,00 | 75,00 | | | | | | |
| 5,00 | 6,00 | | | | | | |
| 70,00 | 75,00 | | | | | | |
| 3,92 | 5,01 | | | | | | |
| 45,00 | 50,00 | | | | | | |
| 57,19 | 62,68 | | | | | | |
| 2:6000 | 3:6000 | | | | | | |
| 4,00 | 5,00 | | | | | | |
| **104** | **106** | **24.879** | **21.400** | **26.800** | **27.000** | **28.000** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5101. QEN.002.1 | Jumlah Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3 | Orang | | 48 | 100 | 102 |
| | a. Total | Orang | 30 | 48 | 100 | 102 |
| | b. STEM | Orang | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | c. Non STEM | Orang | 30 | 46 | 97 | 98 |
| IKRO.5101. QEN.002.2 | Jumlah dosen yang memperoleh kenaikan jabatan akademik | Orang | N/A | 1.914 | 2.233 | 2.552 |
| **RO.5101. SCI.001** | **Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen yang mengikuti peningkatan kompetensi** | **Orang** | **N/A** | **2.680** | **3.260** | **3.325** |
| IKRO.5101. SCI.001.1 | Jumlah dosen yang difasilitasi berkegiatan di luar kampus | Orang | N/A | 0 | 65 | 205 |
| IKRO.5101. SCI.001.2 | Jumlah dosen PTK Kristen yang mengikuti program peningkatan Kompetensi | Orang | N/A | 2.680 | 3.260 | 3.325 |
| IKRO.5101. SCI.001.3 | Jumlah dosen yang mendapatkan fasilitasi menjadi Narasumber Konferensi Nasional maupun Internasional | Orang | N/A | 0 | 5 | 10 |
| IKRO.5101. SCI.001.4 | Jumlah dosen asing yang difasilitasi dalam penguatan layanan Pendidikan Tinggi | Orang | 1 | 1 | 1 | 2 |
| IKRO.5101. SCI.001.5 | Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Orang | N/A | 0 | 100 | 125 |
| IKRO.5101. SCI.001.6 | Jumlah pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional | Orang | N/A | 0 | 100 | 125 |
| **RO.5101. DCI.001** | **Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen** | **Orang** | **N/A** | **2.680** | **3.360** | **3.450** |
| IKRO.5101. DCI.001.1 | Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti peningkatan Kompetensi | Orang | N/A | 2.680 | 3.360 | 3.450 |
| **RO.5101. PDI.001** | **Sertifikasi Kompetensi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen** | **Orang** | **100** | **300** | **500** | **600** |
| IKRO.5101. PDI.001.1 | Jumlah Dosen PTK Kristen yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi | Orang | 100 | 300 | 500 | 600 |
| **RO.5101. BEA.001** | **Tunjangan Profesi Dosen Non ASN Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen** | **Orang** | **1.040** | **1.063** | **1.125** | **1.463** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 104 | 106 | | | | | | |
| 104 | 106 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | |
| 99 | 100 | | | | | | |
| 2.871 | 3.191 | | | | | | |
| **3.650** | **4.000** | **9.704** | **11.899** | **11.638** | **12.775** | **14.000** | |
| 250 | 320 | | | | | | |
| 3.650 | 4.000 | | | | | | |
| 15 | 20 | | | | | | |
| 2 | 3 | | | | | | |
| 150 | 200 | | | | | | |
| 150 | 200 | | | | | | |
| **3.800** | **4.200** | **123** | **2.000** | **2.200** | **2.400** | **2.600** | |
| 3.800 | 4.200 | | | | | | |
| **700** | **800** | **900** | **1.500** | **1.800** | **2.100** | **2.400** | |
| 700 | 800 | | | | | | |
| **1.901** | **2.472** | **25.992** | **27.000** | **35.100** | **45.630** | **59.328** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5101. BEA.001.1 | Jumlah Dosen Non ASN PTK Kristen Penerima Tunjangan Profesi | Orang | 1.040 | 1.063 | 1.125 | 1.463 |
| **SK.5101.5** | **Meningkatnya kualitas lulusan PTK Kristen yang diterima di dunia kerja** | | | | | |
| IKSK.5101.5.1 | Persentase lulusan PTK Kristen (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus | Persen | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 |
| IKSK.5101.5.2 | Persentase PTK Kristen yang memiliki Pusat Pengembangan Karir | Persen | N/A | 0,00 | 0,26 | 0,51 |
| IKSK.5101.5.3 | Persentase lulusan PTK Kristen yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan | Persen | | | | |
| | a. Total | Persen | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| | b. Karyawan atau Wirausaha | Persen | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| IKSK.5101.5.4 | Persentase peningkatan mahasiswa PTK Kristen yang mengikuti program sertifikasi kompetensi/profesi | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| IKSK.5101.5.5 | Rasio Outbound per Inbound mahasiswa pada PTK Kristen | - | N/A | 0,00 | 0,00 | 1:1 |
| IKSK.5101.5.6 | Persentase mahasiswa PTK Kristen yang berkegiatan di luar program studi | Persen | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| **RO.5101. BGC.001** | **Tata Kelola PTKKN melalui PNBP** | **Lembaga** | **N/A** | **7** | **8** | **8** |
| IKRO.5101. BGC.001.1 | Jumlah PTK yang memiliki Pusat Pengembangan Karir | Lembaga | N/A | 0 | 1 | 2 |
| IKRO.5101. BGC.001.2 | Jumlah prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi | Prodi | 1 | 3 | 3 | 3 |
| **RO.5101. SBA.001** | **Pengembangan Kegiatan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Mahasiswa** | **Orang** | **0** | **0** | **900** | **1.111** |
| IKRO.5101. SBA.001.1 | Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus | Orang | 100 | 140 | 180 | 200 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1.901 | 2.472 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11,00 | 12,00 | | | | | | |
| 0,77 | 1,02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 30,00 | 35,00 | | | | | | |
| 30,00 | 35,00 | | | | | | |
| 20,00 | 25,00 | | | | | | |
| 1:1 | 1:1 | | | | | | |
| 5,00 | 6,00 | | | | | | |
| **8** | **8** | **48.280** | **53.208** | **59.592** | **65.552** | **70.796** | |
| 3 | 4 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| **1.304** | **1.908** | **-** | **6.480** | **7.500** | **10.000** | **12.500** | |
| 220 | 240 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5101. SBA.001.2 | Jumlah lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan | | | | | |
| | a. Total | Orang | N/A | 300 | 400 | 500 |
| | b. Karyawan atau Wirausaha | Orang | N/A | 300 | 400 | 500 |
| IKRO.5101. SBA.001.4 | Jumlah Mahasiswa PTK Kristen yang mengikuti sertifikat profesi atau kompetensi | Orang | N/A | 0 | 100 | 110 |
| IKRO.5101. SBA.001.5 | Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa | Orang | N/A | 0 | 0 | 1 |
| IKRO.5101. SBA.001.6 | Jumlah mahasiswa PTK Kristen yang berkegiatan di luar program studi | Orang | N/A | 0 | 220 | 300 |
| **RO.5101. BEI.001** | **BOPTN Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen** | **Lembaga** | **7** | **8** | **8** | **8** |
| IKRO.5101. BEI.001.1 | Jumlah PTK yang mendapatkan BOPTN | Lembaga | 7 | 8 | 8 | 8 |
| RO.5101. BEI.002 | Bantuan Operasional PTK Kristen Swasta/ Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen | Lembaga | N/A | 0 | 100 | 120 |
| IKRO.5101. BEI.002.1 | Jumlah PTK Swasta/Lembaga PTK Kristen yang mendapat Bantuan Operasional | Lembaga | N/A | 0 | 100 | 120 |
| **SK.5101.6** | **Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama PTK Kristen** | | | | | |
| IKSK.5101.6.1 | Persentase kerjasama PTK Kristen yang ditindaklanjuti di bidang | | | | | |
| | (a) Pendidikan dan pengajaran | Persen | 5,00 | 10,00 | 30,00 | 50,00 |
| | (b) Penelitian dan publikasi | Persen | 5,00 | 10,00 | 30,00 | 50,00 |
| | (c) Pengabdian kepada masyarakat | Persen | 5,00 | 10,00 | 30,00 | 50,00 |
| **RO.5101. AEC.051** | **Kerjasama Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen** | **Dokumen** | **5** | **30** | **30** | **30** |
| IKRO.5101. AEC.051.1 | Jumlah PTK Kristen yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/lembaga masyarakat/internasional | Lembaga | 5 | 5 | 15 | 26 |
| IKRO.5101. AEC.051.2 | Jumlah kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran | Kerjasama | 5 | 20 | 20 | 20 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 600 | 1.100 | | | | | | |
| 600 | 1.100 | | | | | | |
| 132 | 165 | | | | | | |
| 2 | 3 | | | | | | |
| 350 | 400 | | | | | | |
| **8** | **8** | **40.190** | **48.431** | **54.531** | **60.693** | **67.031** | |
| 8 | 8 | | | | | | |
| 150 | 180 | - | 5.000 | 6.000 | 7.500 | 9.000 | |
| 150 | 180 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 70,00 | 85,00 | | | | | | |
| 70,00 | 85,00 | | | | | | |
| 70,00 | 85,00 | | | | | | |
| **30** | **30** | **1.301** | **2.000** | **3.000** | **4.000** | **5.000** | |
| 35 | 42 | | | | | | |
| 20 | 20 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5101. AEC.051.3 | Jumlah kerjasama di bidang penelitian dan publikasi | Kerjasama | 5 | 10 | 10 | 10 |
| **RO.5101. DCI.003** | **Pengabdian Masyarakat** | **Kegiatan** | **N/A** | **20** | **20** | **20** |
| IKRO.5101. DCI.003.1 | Jumlah kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat | Kerjasama | N/A | 20 | 20 | 20 |
| **SK.5101.7** | **Meningkatnya budaya akademik PTK Kristen yang religious dan toleran** | | | | | |
| IKSK.5101.7.1 | Persentase mahasiswa PTK Kristen yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci | Orang | 0,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 |
| **RO.5101. SBA.002** | **Mahasiswa PTK Kristen yang mendapatkan Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan dalam Program Peningkatan Literasi Kitab Suci** | **Orang** | **N/A** | **0** | **880** | **1.056** |
| IKRO.5101. SBA.002.1 | Jumlah mahasiswa PTK Kristen yang mengikuti kegiatan literasi Kitab Suci | Orang | N/A | 0 | 880 | 1.056 |
| **RO.5101. PDD.002** | **Pengembangkan Kurikulum Pembelajaran dan Pusat Kajian Keagamaan Kristen pada Satuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **8** | **10** |
| IKRO.5101. PDD.002.1 | Jumlah prodi pada PTK Kristen yang mengimplementasikan integrasi keilmuan | Prodi | 96 | 115 | 144 | 173 |
| IKRO.5101. PDD.002.2 | Jumlah PTK Kristen yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal | Lembaga | N/A | 0 | 8 | 10 |
| **SK.5101.8** | **Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian PTK Kristen** | | | | | |
| IKSK.5101.8.1 | Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Kristen yang disitasi | Persen | N/A | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| IKSK.5101.8.2 | Jumlah karya tulis ilmiah PTK Kristen berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi | Karya Tulis | N/A | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| IKSK.5101.8.3 | Jumlah Paten Granted PTK Kristen | Paten | 5,00 | 8,00 | | 12,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 10 | | | | | | |
| **20** | **20** | 2.712 | 3.375 | 4.050 | 4.725 | 5.030 | |
| 20 | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20,00 | 25,00 | | | | | | |
| **1.173** | **1.467** | - | 5.500 | 8.800 | 9.200 | 10.500 | |
| 1.173 | 1.467 | | | | | | |
| **12** | **14** | - | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 6.000 | |
| 192 | 241 | | | | | | |
| 12 | 14 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 15,00 | 20,00 | | | | | | |
| 6,00 | 8,00 | | | | | | |
| 15,00 | 20,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.5101.8.4 | Jumlah hasil riset dan inovasi PTK Kristen yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat | Produk | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 |
| IKSK.5101.8.5 | Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) PTK Kristen yang ditingikatkan kapasitasnya | Lembaga | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| **RO.5101. DCI.002** | **Penelitian** | **Orang** | **N/A** | **128** | **137** | **147** |
| IKRO.5101. DCI.002.1 | Jumlah karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional | Karya Tulis | N/A | 5 | 10 | 15 |
| IKRO.5101. DCI.002.2 | Jumlah publikasi ilmiah PTK Kristen bereputasi internasional | Publikasi | N/A | 10 | 10 | 20 |
| IKRO.5101. DCI.002.3 | Jumlah karya tulis ilmiah PTK Kristen beriorientasi SDGs untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi | Karya Tulis | N/A | 0 | 2 | 4 |
| IKRO.5101. DCI.002.4 | Jumlah Kekayaan Intelektual PTK Kristen yang didaftarkan | Dokumen | N/A | 0 | 2 | 4 |
| IKRO.5101. DCI.002.5 | Jumlah hasil riset dan inovasi PTK Kristen | Dokumen | N/A | 0 | 2 | 4 |
| **RO.5101. QEI.001** | **BOPTN Penelitian PTK Kristen** | **Lembaga** | **N/A** | **7** | **7** | **8** |
| IKRO.5101. QEI.001.1 | Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya | Lembaga | 7,00 | 7 | 7 | 8 |
| **2131 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik** | | | | | | |
| **SK.2131.1** | **Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PTK Katolik** | | | | | |
| IKSK.2131.1.1 | Persentase PTK Katolik yang memenuhi standar sarana prasarana | Persen | 29,18 | 41,67 | 45,83 | 50,00 |
| IKSK.2131.1.2 | Persentase PTK Katolik yang menyediakan fasilitas Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif | Persen | N/A | 8,33 | 29,17 | 54,17 |
| IKSK.2131.1.3 | Persentase PTK Katolik yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) | Persen | 100,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10,00 | 12,00 | | | | | | |
| 8,00 | 8,00 | | | | | | |
| **157** | **172** | **500** | **500** | **600** | **700** | **1.000** | |
| 20 | 25 | | | | | | |
| 40 | 50 | | | | | | |
| 6 | 8 | | | | | | |
| 6 | 8 | | | | | | |
| 6 | 8 | | | | | | |
| **8** | **8** | **-** | **8.000** | **10.000** | **12.000** | **15.000** | |
| 8 | 8 | | | | | | |
| | | **91.514** | **114.855** | **132.354** | **152.426** | **176.105** | **[BIMAS KATOLIK] Direktorat Pendidikan Agama Katolik** |
| | | | | | | | |
| 54,17 | 58,33 | | | | | | |
| 79,17 | 95,00 | | | | | | |
| 95,00 | 95,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2131. BEI.002** | **Prasarana PTK Swasta Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **5** | **51** | **51** |
| IKRO.2131. BEI.002.1 | Jumlah PTK swasta Katolik yang memperoleh bantuan prasarana | Lembaga | N/A | 5 | 23 | 23 |
| IKRO.2131. BEI.002.2 | Jumlah PTK swasta Katolik yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi inklusif | Lembaga | N/A | 2 | 7 | 13 |
| **RO.2131. BEI.003** | **2131.BEI.003 - Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Swasta Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **23** | **23** | **23** |
| IKRO.2131. BEI.003.1 | Jumlah PTK swasta Katolik yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran | Lembaga | N/A | 23 | 23 | 23 |
| IKRO.2131. BEI.003.2 | Jumlah PTK swasta Katolik yang mendapatkan bantuan pengembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD) | Lembaga | N/A | 19 | 19 | 19 |
| IKRO.2131. BEI.003.3 | Jumlah PTK swasta Katolik yang mendapatkan pembinaan standar mutu berupa Bantuan Operasional Pendidikan | Lembaga | N/A | 23 | 23 | 23 |
| **RO.2131. CAA.001** | **Peralatan/Sarana pada PTK Katolik Negeri** | **Paket** | **N/A** | **0** | **1** | **1** |
| IKRO.2131. CAA.001.1 | Jumlah PTK Katolik negeri yang mendapatan bantuan pemenuhan sarana | Lembaga | N/A | 0 | 5 | 5 |
| **RO.2131. CBJ.001** | **Prasarana PTK Katolik Negeri** | **Unit** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2131. CBJ.001.1 | Jumlah PTK Katolik Negeri yang mendapatan bantuan pemenuhan prasarana | Lembaga | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2131. PDD.003** | **Unit Layanan Disablitas PTK Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **2** | **2** |
| IKRO.2131. PDD.003.1 | Jumlah PTK swasta Katolik yang mendapatkan bantuan pengembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD) | Lembaga | N/A | 0 | 19 | 19 |
| RO.2131. PDD.004 | Pengembangan Unit Pecegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PTK Katolik | Lembaga | N/A | 0 | 2 | 2 |
| IKRO.2131. PDD.004.1 | Jumlah PTK swasta Katolik yang mendapatkan bantuan pengembangan Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual | Lembaga | N/A | 0 | 23 | 23 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 51 | 51 | 2.000 | 11.900 | 14.950 | 18.113 | 21.404 | |
| 23 | 23 | | | | | | |
| 19 | 23 | | | | | | |
| 23 | 23 | 2.300 | 4.600 | 5.750 | 6.210 | 7.038 | |
| 23 | 23 | | | | | | |
| 19 | 19 | | | | | | |
| 23 | 23 | | | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.645 | 3.042 | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 1 | 1 | 26.000 | 29.900 | 32.427 | 36.615 | 44.126 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.150 | 1.323 | 1.521 | |
| 19 | 19 | | | | | | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.150 | 1.323 | 1.521 | |
| 23 | 23 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **SK.2131.2** | **Meningkatnya layanan PTK Katolik yang terjangkau** | | | | | |
| IKSK.2131.2.1 | Persentase mahasiswa PTK Katolik penerima beasiswa | Persen | 9,39 | 29,68 | 29,68 | 31,03 |
| IKSK.2131.2.2 | Persentase mahasiswa PTK Katolik kategori UKT kelompok I | Persen | N/A | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| IKSK.2131.2.3 | Persentase mahasiswa baru PTK Katolik yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitass | Persen | 44,00 | 45,00 | 46,02 | 47,02 |
| **RO.2131. BEN.001** | **Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Mahasiswa PTK Katolik** | **Orang** | **N/A** | **2.150** | **2.473** | **2.843** |
| IKRO.2131. BEN.001.1 | Jumlah mahasiswa pada PTK Katolik penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) | Orang | N/A | 2.150 | 2.473 | 2.843 |
| IKRO.2131. BEN.001.2 | Jumlah mahasiswa baru yang berkuliah di PTK Katolik berkualitas | Orang | N/A | 550 | 577 | 606 |
| **RO.2131. BEN.002** | **Beasiswa Prestasi Mahasiswa PTK Negeri Katolik** | **Orang** | **N/A** | **9** | **10** | **12** |
| IKRO.2131. BEN.002.1 | Jumlah mahasiswa PTK negeri Katolik penerima Beasiswa Prestasi | Orang | N/A | 9 | 12 | 15 |
| IKRO.2131. BEN.002.2 | Jumlah mahasiswa PTK negeri Katolik kategori UKT Kelompok I | Orang | N/A | 604 | 705 | 805 |
| **RO.2131. QEN.004** | **Mahasiswa penerima KIP Kuliah PTK Katolik** | **Orang** | **N/A** | **2.769** | **0** | **0** |
| IKRO.2131. QEN.004.1 | Jumlah Mahasiswa PTK Katolik penerima KIP Kuliah | Orang | N/A | 2.769 | 0 | 0 |
| **SK.2131.3** | **Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi PTK Katolik** | | | | | |
| IKSK.2131.3.1 | Jumlah PTK Katolik yang terpetakan berdasarkan keunggulannya | Lembaga | N/A | 0 | 2 | 2 |
| IKSK.2131.3.2 | Persentase Prodi PTK Katolik yang mendapatkan akreditasi unggul | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.2131.3.3 | Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Katolik yang terakreditasi | Persen | 100,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 32,38 | 33,72 | | | | | | |
| 50,00 | 50,00 | | | | | | |
| 47,99 | 48,98 | | | | | | |
| **3.270** | **3.760** | **5.160** | **5.935** | **6.823** | **7.848** | **9.024** | |
| 3.270 | 3.760 | | | | | | |
| 697 | 732 | | | | | | |
| **14** | **16** | **405** | **450** | **540** | **630** | **720** | |
| 18 | 21 | | | | | | |
| 902 | 1.005 | | | | | | |
| **0** | **0** | **18.968** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 2,78 | 5,56 | | | | | | |
| 95,00 | 95,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2131.3.4 | Persentase Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Katolik yang terakreditasi unggul | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RO.2131. BEI.001** | **Lembaga PTK Katolik yang ditingkatkan mutunya** | **Lembaga** | **N/A** | **49** | **23** | **23** |
| IKRO.2131. BEI.001.1 | Jumlah pemetaan keunggulan PTK Katolik | Dokumen | N/A | 0 | 1 | 1 |
| **RO.2131. BEI.005** | **Fasilitasi Perubahan Status PTK Swasta Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **3** | **3** |
| IKRO.2131. BEI.005.1 | Jumlah PTK Katolik yang mendapatkan pembinaan standar mutu untuk perubahan status | Lembaga | N/A | 0 | 1 | 0 |
| **RO.2131. PDD.002** | **Pembinaan Standar Mutu Prodi PTK Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **23** | **23** |
| IKRO.2131. PDD.002.1 | Jumlah PTK Katolik yang mendapat pembinaan standar mutu | Lembaga | N/A | 0 | 23 | 23 |
| **RO.2131. PDE.001** | **Akreditasi Prodi/lembaga PTK Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **11** | **11** | **11** |
| IKRO.2131. PDE.001.1 | Jumlah Prodi pada PTK Katolik yang mendapatkan akreditasi | Prodi | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.2131. PDE.001.2 | Jumlah PTK Katolik yang mendapatkan akreditasi | Lembaga | N/A | 24 | 24 | 24 |
| IKRO.2131. PDE.001.3 | Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK Katolik yang terakreditas | Lembaga | N/A | 2 | 4 | 5 |
| IKRO.2131. PDE.001.4 | Jumlah program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK Katolik yang terakreditasi | Prodi | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.2131. PDE.001.5 | Jumlah PTK Katolik yang mendapatkan pembinaan standar mutu | Lembaga | N/A | 24 | 24 | 24 |
| **SK.2131.4** | **Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan PTK Katolik sesuai dengan standar minimal** | | | | | |
| IKSK.2131.4.1 | Persentase dosen PTK Katolik berkualifikasi akademik S3 | Persen | N/A | 28,53 | 28,73 | 29,32 |
| IKSK.2131.4.2 | Persentase dosen PTK Katolik yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Persen | N/A | 4,41 | 8,45 | 12,33 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25,00 | 50,00 | | | | | | |
| **23** | **23** | **10.311** | **6.450** | **8.050** | **9.718** | **11.463** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **3** | **3** | **0** | **1.000** | **1.150** | **1.323** | **1.521** | |
| 2 | 3 | | | | | | |
| **23** | **25** | **0** | **2.645** | **3.042** | **3.498** | **4.373** | |
| 23 | 25 | | | | | | |
| **11** | **11** | **1.550** | **2.885** | **3.450** | **3.968** | **4.563** | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 24 | 24 | | | | | | |
| 6 | 7 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 24 | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 30,40 | 32,21 | | | | | | |
| 16,00 | 19,48 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2131.4.3 | Persentase dosen PTK Katolik yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar | Persen | 61,00 | 63,82 | 66,76 | 70,41 |
| IKSK.2131.4.4 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Katolik yang mengikuti program peningkatan kompetensi | Persen | 40,00 | 18,45 | 47,18 | 56,89 |
| IKSK.2131.4.5 | Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK Katolik | - | N/A | 01:26 | 01:23 | 01:21 |
| IKSK.2131.4.6 | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada PTK Katolik jenjang jabatan fungsional | Persen | 22,40 | 20,00 | 25,00 | 33,33 |
| **RO.2131. ADG.001** | **Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen PTK Negeri Katolik** | **Orang** | **N/A** | **0** | **0** | **0** |
| IKRO.2131. ADG.001.1 | Jumlah dosen PTK Negeri Katolik yang mengikuti program peningkatan kompetensi | Orang | N/A | 0 | 0 | 0 |
| **RO.2131. ADG.002** | **Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Katolik yang mengikuti peningkatan Kompetensi** | **Orang** | **N/A** | **76** | **76** | **101** |
| IKRO.2131. ADG.002.1 | Jumlah dosen PTK Katolik Negeri yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Orang | N/A | 2 | 5 | 7 |
| IKRO.2131. ADG.002.2 | Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK Katolik Negeri yang mengikuti program peningkatan kompetensi | Orang | N/A | 40 | 45 | 45 |
| IKRO.2131. ADG.002.3 | Jumlah dosen PTK Katolik Negeri yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional | Orang | N/A | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.2131. ADG.002.4 | Jumlah dosen asing yang difasilitasi dalam penguatan lembaga PTK Katolik Negeri | Orang | N/A | 2 | 2 | 2 |
| **RO.2131. BEA.001** | **Tunjangan Profesi Dosen Non ASN pada PTK Katolik** | **Orang** | **N/A** | **206** | **237** | **272** |
| IKRO.2131. BEA.001.1 | Jumlah dosen Non ASN penerima Tunjangan Profesi pada PTK Katolik | Orang | N/A | 206 | 237 | 272 |
| **RO.2131. PDG.001** | **Dosen PTK Katolik yang tersertifikasi** | **Orang** | **N/A** | **20** | **22** | **22** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 73,87 | 79,74 | | | | | | |
| 66,60 | 76,31 | | | | | | |
| 01:19 | 01:18 | | | | | | |
| 50,00 | 66,67 | | | | | | |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **116** | **133** | **1.545** | **1.700** | **1.955** | **2.248** | **2.585** | |
| 9 | 11 | | | | | | |
| 45 | 45 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| **313** | **360** | **8.137** | **9.362** | **10.744** | **12.364** | **14.220** | |
| 313 | 360 | | | | | | |
| **22** | **22** | **80** | **88** | **88** | **88** | **88** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2131. PDG.001.1 | Jumlah dosen PTK Katolik yang tersertifikasi | Orang | N/A | 20 | 23 | 26 |
| RO.2131. PDG.002 | Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Katolik yang mengikuti peningkatan Kompetensi | Orang | N/A | 200 | 200 | 200 |
| IKRO.2131. PDG.002.1 | Jumlah dosen asing dalam rangka penguatan lembaga PTK Katolik | Orang | N/A | 11 | 11 | 11 |
| IKRO.2131. PDG.002.2 | Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK Katolik Swasta yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Orang | N/A | 55 | 198 | 248 |
| IKRO.2131. PDG.002.3 | Jumlah dosen PTK Katolik Swasta yang difasilitasi kegiatan di luar kampus | Orang | N/A | 15 | 30 | 45 |
| **RO.2131. QEN.002** | **Dosen PTK Katolik penerima Beasiswa gelar S3** | **Orang** | **N/A** | **65** | **68** | **72** |
| IKRO.2131. QEN.002.1 | Jumlah dosen PTK Katolik penerima beasiswa gelar S3 | Orang | N/A | 65 | 68 | 72 |
| **RO.2131. SCI.001** | **Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen PTK Katolik** | **Orang** | **N/A** | **0** | **115** | **132** |
| IKRO.2131. SCI.001.1 | Jumlah dosen PTK Katolik mengikuti program peningkatan kompetensi | Orang | N/A | 0 | 130 | 180 |
| IKRO.2131. SCI.001.2 | Jumlah dosen PTK Katolik negeri yang difasilitasi berkegiatan di luar kampus | Orang | N/A | 0 | 30 | 35 |
| IKRO.2131. SCI.001.3 | Jumlah dosen PTK Katolik yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional | Orang | N/A | 0 | 48 | 72 |
| IKRO.2131. SCI.001.4 | Jumlah dosen PTK Katolik yang memperoleh kenaikan jabatan akademik | Orang | N/A | 0 | 35 | 40 |
| IKRO.2131. SCI.001.5 | Jumlah dosen asing PTK Katolik yang difasilitasi dalam layanan peningkatan pendidikan tinggi | Orang | N/A | 0 | 15 | 17 |
| **RO.2131. SCI.002** | **Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan PTK Katolik** | **Orang** | **N/A** | **0** | **115** | **132** |
| IKRO.2131. SCI.002.1 | Jumlah tenaga kependidikan PTK Katolik yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Orang | N/A | 0 | 48 | 48 |
| IKRO.2131. SCI.002.2 | Jumlah tenaga kependidikan PTK Katolik pada jenjang jabatan fungsional | Orang | N/A | 0 | 18 | 27 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 30 | 35 | | | | | | |
| 200 | 120 | 4.065 | 3.450 | 3.960 | 4.560 | 5.250 | |
| 11 | 11 | | | | | | |
| 298 | 348 | | | | | | |
| 60 | 75 | | | | | | |
| **75** | **77** | **2.810** | **3.128** | **3.600** | **4.125** | **4.620** | |
| 75 | 77 | | | | | | |
| **152** | **175** | **0** | **1.725** | **1.980** | **2.280** | **2.625** | |
| 230 | 280 | | | | | | |
| 40 | 45 | | | | | | |
| 96 | 120 | | | | | | |
| 45 | 50 | | | | | | |
| 19 | 21 | | | | | | |
| **152** | **175** | **0** | **1.725** | **1.980** | **2.280** | **2.625** | |
| 48 | 48 | | | | | | |
| 36 | 45 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **SK.2131.5** | **Meningkatnya kualitas lulusan PTK Katolik yang diterima di dunia kerja** | | | | | |
| IKSK.2131.5.1 | Persentase PTK Katolik yang memiliki Pusat Pengembangan Karir | Persen | N/A | 5,00 | 20,00 | 35,00 |
| IKSK.2131.5.2 | Persentase lulusan PTK Katolik yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: | Persen | | | | |
| | a. Total | Persen | N/A | 90,72 | 92,59 | 93,95 |
| | b. Karyawan atau Wirausaha | Persen | N/A | 80,00 | 82,00 | 83,00 |
| IKSK.2131.5.3 | Persentase mahasiswa PTK Katolik yang mendapat sertifikat profesi atau kompetensi | Persen | 97,81 | 95,00 | 96,00 | 96,00 |
| IKSK.2131.5.4 | Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK Katolik | - | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IKSK.2131.5.5 | Persentase mahasiswa PTK Katolik yang berkegiatan di luar program studi/Kampus | Persen | N/A | 0,00 | 9,31 | 10,86 |
| **RO.2131. PEF.002** | **Pembinaan Kompetensi Mahasiswa pada lembaga PTK Katolik** | **Orang** | **N/A** | **0** | **240** | **240** |
| IKRO.2131. PEF.002.1 | Jumlah PTK Katolik yang memiliki Pusat Pengembangan Karir | Lembaga | N/A | 0 | 4 | 7 |
| IKRO.2131. PEF.002.2 | Jumlah lulusan PTK Katolik yang berhasil memiliki pekerjaan | Orang | N/A | 0 | 900 | 916 |
| IKRO.2131. PEF.002.3 | Jumlah mahasiswa PTK Katolik yang mengikuti sertifikasi kompetensi/profesi | Orang | N/A | 5.500 | 4.992 | 420 |
| IKRO.2131. PEF.002.4 | Jumlah mahasiswa PTK Katolik yang mengikuti program pertukaran mahasiswa | Orang | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.2131. PEF.002.5 | Jumlah mahasiswa PTK Katolik yang berkegiatan di luar program studi | Orang | N/A | 0 | 20 | 20 |
| **RO.2131. SBA.001** | **Pengembangan Kapasitas Mahasiswa PTK Katolik** | **Orang** | **N/A** | **0** | **170** | **196** |
| IKRO.2131. SBA.001.1 | Jumlah mahasiswa PTK Katolik yang mendapat pembinaan untuk pengembangan kapasitas | Orang | N/A | 0 | 170 | 196 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 50,00 | 65,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 95,00 | 95,03 | | | | | | |
| 84,00 | 85,00 | | | | | | |
| 96,50 | 97,00 | | | | | | |
| 1:1 | 2:1 | | | | | | |
| 12,41 | 13,96 | | | | | | |
| **240** | **240** | **0** | **1.000** | **1.150** | **1.323** | **1.521** | |
| 10 | 13 | | | | | | |
| 931 | 936 | | | | | | |
| 455 | 490 | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | | |
| 20 | 20 | | | | | | |
| **225** | **250** | **0** | **1.000** | **1.150** | **1.323** | **1.521** | |
| 225 | 250 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **SK.2131.6** | **Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama PTK Katolik** | | | | | |
| IKSK.2131.6.1 | Persentase PTK Katolik yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional | Persen | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 |
| IKSK.2131.6.2 | Persentase kerjasama PTK Katolik yang ditindaklanjuti di bidang: | | | | | |
| | a. pendidikan dan pengajaran | Persen | N/A | 43,47 | 53,33 | 64,10 |
| | b. penelitian dan publikasi | Persen | N/A | 24,31 | 45,33 | 65,38 |
| | c. Pengabdian kepada masyarakat | Persen | N/A | 33,19 | 44,00 | 55,13 |
| **RO.2131. DDC.002** | **Pengabdian Kepada Masyarakat pada PTK Katolik** | **Desain** | **N/A** | **30** | **53** | **53** |
| IKRO.2131. DDC.002.1 | Jumlah PTK Katolik yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional | Lembaga | N/A | 3 | 6 | 9 |
| IKRO.2131. DDC.002.2 | Jumlah PTK Katolik melakukan kerjasama di bidang: a) pendidikan dan pengajaran, b) penelitian dan publikasi, c) pengabdian kepada masyarakat | Lembaga | N/A | 24 | 24 | 24 |
| **SK.2131.7** | **Meningkatnya budaya akademik yang religious dan toleran pada PTK Katolik** | | | | | |
| IKSK.2131.7.1 | Persentase mahasiswa PTK Katolik yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci | Persen | N/A | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| IKSK.2131.7.2 | Persentase PTK Katolik yang mengembangkan literasi keagamaan | Persen | N/A | 20,83 | 29,17 | 37,50 |
| **RO.2131. PDD.001** | **Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran PTK Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **1** | **2** |
| IKRO.2131. PDD.001.1 | Jumlah PTK Katolik yang melakukan Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran | Lembaga | N/A | 0 | 23 | 23 |
| **RO.2131. PEF.001** | **Mahasiswa PTK Katolik yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan** | **Orang** | **N/A** | **500** | **625** | **781** |
| IKRO.2131. PEF.001.1 | Jumlah mahasiswa PTK Katolik yang mengkaji dan mempraktikkan nilai-nilai Kitab Suci | Orang | N/A | 7.413 | 8.916 | 10.540 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 90,00 | 95,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 74,07 | 83,33 | | | | | | |
| 80,25 | 86,90 | | | | | | |
| 71,60 | 80,95 | | | | | | |
| **53** | **53** | **900** | **3.335** | **3.490** | **3.669** | **3.874** | |
| 12 | 14 | | | | | | |
| 24 | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 95,00 | 95,00 | | | | | | |
| 45,83 | 54,17 | | | | | | |
| **3** | **5** | **0** | **1.500** | **1.725** | **1.984** | **2.281** | |
| 23 | 23 | | | | | | |
| **977** | **1.200** | **2.200** | **4.513** | **5.345** | **6.332** | **5.793** | |
| 12.315 | 14.278 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2131. PEF.001.2 | Jumlah Prodi PTK Katolik yang difasilitasi integrasi keilmuan | Prodi | N/A | 6 | 12 | 18 |
| IKRO.2131. PEF.001.3 | Jumlah PTK Katolik yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal | Lembaga | N/A | 3 | 6 | 10 |
| **SK.2131.8** | **Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian pada PTK Katolik** | | | | | |
| IKSK.2131.8.1 | Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Katolik yang disitasi | Persen | 18 | 18 | 18 | 25 |
| IKSK.2131.8.2 | Jumlah karya tulis ilmiah PTK Katolik berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi | Karya Tulis | N/A | 1 | 3 | 4 |
| IKSK.2131.8.3 | Jumlah Paten Granted PTK Katolik | Paten | 98 | 100 | 102 | 104 |
| IKSK.2131.8.4 | Jumlah hasil riset dan inovasi PTK Katolik yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat | Produk | N/A | 1 | 2 | 3 |
| IKSK.2131.8.5 | Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) PTK Katolik yang ditingkatkan kapasitasnya | Lembaga | N/A | 24 | 24 | 24 |
| **RO.2131. BEI.004** | **BOPTN Non Penelitian PTK Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **50** | **1** | **1** |
| IKRO.2131. BEI.004.1 | Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) PTK Katolik Negeri yang ditingkatkan kapasitasnya | Lembaga | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2131. DDC.001** | **Model Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik** | **Model** | **N/A** | **50** | **50** | **50** |
| IKRO.2131. DDC.001.1 | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs PTK Katolik yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi yang disitasi | Karya Tulis | N/A | 1 | 1 | 2 |
| IKRO.2131. DDC.001.2 | Jumlah Kekayaan Intelektual PTK Katolik yang didaftarkan | HAKI | N/A | 88 | 89 | 90 |
| IKRO.2131. DDC.001.3 | Jumlah hasil riset dan inovasi PTK Katolik | Riset | N/A | 1 | 2 | 3 |
| **RO.2131. DDC.003** | **Model Penelitian PTK Katolik Berorientasi SDGS** | **Desain** | **N/A** | **0** | **23** | **23** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 24 | 30 | | | | | | |
| 14 | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25 | 31 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | |
| 106 | 108 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 24 | 24 | | | | | | |
| **1** | **1** | **3.083** | **6.000** | **7.000** | **8.000** | **9.200** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **50** | **50** | **2.000** | **2.300** | **2.645** | **3.042** | **3.498** | |
| 2 | 3 | | | | | | |
| 91 | 92 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| **23** | **23** | **0** | **2.300** | **2.500** | **3.000** | **3.100** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2131. DDC.003.1 | Jumlah Penelitian PTK Katolik Berorientasi SDGS | Karya Ilmiah | N/A | 0 | 2 | 3 |
| **RO.2131. QEI.001** | **BOPTN Penelitian PTK Katolik** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **1** | **1** |
| IKRO.2131. QEI.001.1 | Jumlah publikasi ilmiah dosen PTK Katolik Negeri | Karya Ilmiah | N/A | 0 | 2 | 2 |
| IKRO.2131. QEI.001.2 | Jumlah kekayaan intelektual PTK Katolik Negeri yang didaftarkan | HAKI | N/A | 0 | 1 | 1 |
| IKRO.2131. QEI.001.3 | Jumlah hasil riset dan inovasi PTK Katolik Negeri | Riset | N/A | 0 | 1 | 1 |
| **5104 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu** | | | | | | |
| **SK.5104.1** | **Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PTK Hindu** | | | | | |
| IKSK.5104.1.1 | Persentase PTK Hindu yang memenuhi standar sarana prasarana | Persen | N/A | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| IKSK.5104.1.3 | Persentase PTK Hindu yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi inklusif | Persen | N/A | 29 | 36 | 43 |
| **RO.5104. BEO.001** | **Sarana PTKH Swasta** | **Lembaga** | **4** | **8** | **8** | **8** |
| IKRO.5104. BEO.001.01 | Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu swasta yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran | Lembaga | N/A | 3 | 4 | 5 |
| IKRO.5104. BEO.001.02 | Jumlah Layanan Disabilitas (ULD) yang disediakan | Layanan | N/A | 3 | 4 | 5 |
| **RO.5104. CAA.001** | **Pengadaan Sarana Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu** | **Unit** | **400** | **860** | **810** | **810** |
| IKRO.5104. CAA.001.01 | Jumlah pengadaan Sarana Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu | Unit | 400 | 860 | 810 | 810 |
| **RO.5104. CAN.001** | **Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi** | **Unit** | **10** | **14** | **55** | **55** |
| IKRO.5104. CAN.001.01 | Jumlah pengadaan Sarana Teknologi Informasi yang di sediakan PTK Hindu | Unit | 10 | 14 | 55 | 55 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| **1** | **1** | **0** | **1.965** | **2.260** | **2.599** | **2.989** | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| | | **206.332** | **289.647** | **302.693** | **316.939** | **322.999** | **[BIMAS HINDU] Direktorat Pendidikan Hindu** |
| | | | | | | | |
| 80,00 | 90,00 | | | | | | |
| 50 | 57 | | | | | | |
| **8** | **8** | **900** | **4.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |
| 6 | 7 | | | | | | |
| 6 | 7 | | | | | | |
| **810** | **810** | **5.100** | **7.100** | **8.100** | **8.100** | **8.100** | |
| 810 | 810 | | | | | | |
| **55** | **55** | **505** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | |
| 55 | 55 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.5104. CBJ.001** | **Prasarana Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu** | **Unit** | **2** | **11** | **11** | **11** |
| IKRO.5104. CBJ.001.01 | Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu yang memperoleh bantuan Prasarana pembelajaran (pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, asrama mahasiswa, tempat ibadah, sanitasi dan fasilitas penunjang digitalisasi) | Lembaga | 2 | 4 | 6 | 6 |
| **SK.5104.2** | **Meningkatnya layanan PTK Hindu yang terjangkau** | | | | | |
| IKSK.5104.2.1 | Persentase mahasiswa penerima beasiswa | Persen | 47,51 | 48,56 | 48,60 | 48,65 |
| IKSK.5104.2.2 | Persentase mahasiswa baru PTK Hindu yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas | Persen | N/A | 33,43 | 34,00 | 35,00 |
| **RO.5104. BEN.002** | **Mahasiswa penerima beasiswa PPA** | **Orang** | **1.800** | **2.050** | **2.170** | **2.260** |
| IKRO.5104. BEN.002.01 | Jumlah Mahasiswa PTK Hindu penerima beasiswa PPA | Orang | 1.800 | 2.070 | 2.200 | 2.300 |
| IKRO.5104. BEN.002.02 | Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas | Persen | N/A | 33,43 | 34,00 | 35,00 |
| **RO.5104. QEN.001** | **Mahasiswa penerima KIP Kuliah** | **Orang** | **3.955** | **3.981** | **0** | **0** |
| IKRO.5104. QEN.001.01 | Jumlah Mahasiswa penerima KIP Kuliah | Orang | 3.955 | 4.021 | 0 | 0 |
| **SK.5104.3** | **Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi PTK Hindu** | | | | | |
| IKSK.5104.3.1 | Jumlah perguruan tinggi Hindu yang terpetakan berdasarkan keunggulannya | Lembaga | N/A | 1 | 1 | 2 |
| IKSK.5104.3.2 | Persentase Prodi pada PTK Hindu yang mendapatkan akreditasi unggul | Persen | 12,96 | 13,89 | 14,81 | 15,74 |
| IKSK.5104.3.3 | Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada PTK Hindu yang terakreditasi | Persen | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| IKSK.5104.3.4 | Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) pada PTK Hindu yang terakreditasi unggul | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 25,00 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 11 | 11 | 80.429 | 180.000 | 180.000 | 185.000 | 190.000 | |
| 6 | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48,69 | 48,73 | | | | | | |
| 36,00 | 37,00 | | | | | | |
| **2.350** | **2.440** | **4.125** | **5.425** | **5.650** | **5.875** | **6.100** | |
| 2.400 | 2.500 | | | | | | |
| 36,00 | 37,00 | | | | | | |
| **0** | **0** | **41.356** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 16,67 | 17,59 | | | | | | |
| 99,00 | 99,00 | | | | | | |
| 25,00 | 50,00 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.5104. ADE.001** | **Akreditasi Prodi/lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri** | **Lembaga** | **24** | **29** | **23** | **23** |
| IKRO.5104. ADE.001.01 | Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya | Lembaga | 1 | 1 | 1 | 2 |
| IKRO.5104. ADE.001.02 | Jumlah Prodi yang mendapatkan akreditasi unggul | Prodi | 14 | 14 | 14 | 14 |
| IKRO.5104. ADE.001.03 | Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi | Lembaga | 2 | 4 | 4 | 4 |
| IKRO.5104. ADE.001.04 | Jumlah program studi Program Profesi Guru (PPG) yang terakreditasi unggul | Prodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.5104. ADE.001.05 | Jumlah PTK yang mendapatkan pembinaan standar mutu | Lembaga | 14 | 14 | 14 | 14 |
| **SK.5104.4** | **Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan PTK Hindu sesuai dengan standar minimal** | | | | | |
| IKSK.5104.4.1 | Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 | | | | | |
| | a. Total | Persen | N/A | 20,00 | 20,65 | 21,94 |
| | b. STEM | Persen | N/A | 4,80 | 5,00 | 7,00 |
| | c. Non STEM | Persen | N/A | 15,19 | 16,00 | 18,00 |
| IKSK.5104.4.2 | Persentase dosen PTK Hindu yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Persen | N/A | 3,23 | 4,52 | 5,81 |
| IKSK.5104.4.3 | Persentase dosen PTK Hindu yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar | Persen | N/A | 71,70 | 71,96 | 72,23 |
| IKSK.5104.4.4 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Hindu yang mendapatkan program peningkatan kompetensi | Persen | N/A | 22,20 | 23,29 | 24,38 |
| IKSK.5104.4.5 | Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK Hindu | - | N/A | 1:774 | 1:387 | 1:387 |
| IKSK.5104.4.6 | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK Hindu pada jenjang jabatan fungsional | Persen | N/A | 66,15 | 66,73 | 67,70 |
| **RO.5104. BEA.003** | **Tunjangan Profesi Dosen Non PNS** | **Orang** | **100** | **74** | **58** | **65** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 23 | 23 | 3.413 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.850 | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 14 | 14 | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 14 | 14 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22,58 | 23,23 | | | | | | |
| 9,00 | 11,00 | | | | | | |
| 20,00 | 22,00 | | | | | | |
| 7,10 | 8,39 | | | | | | |
| 72,50 | 72,76 | | | | | | |
| 25,47 | 26,56 | | | | | | |
| 1:387 | 1:258 | | | | | | |
| 68,67 | 69,63 | | | | | | |
| 70 | 80 | 2.490 | 2.500 | 2.650 | 2.800 | 3.475 | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5104. BEA.003.01 | Jumlah dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar | Orang | 430 | 536 | 545 | 555 |
| **RO.5104. SCI.001** | **Dosen dan Tenaga Kependidikan PTKH yang di tingkatkan kompetensi** | **Orang** | **99** | **99** | **145** | **190** |
| IKRO.5104. SCI.001.01 | Jumlah dosen PTK Hindu yang tersertifikasi | Orang | 480 | 589 | 600 | 610 |
| IKRO.5104. SCI.001.02 | Jumlah dosen PTK Hindu yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Orang | 312 | 324 | 334 | 345 |
| IKRO.5104. SCI.001.03 | Jumlah dosen PTK Hindu yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar | Orang | 524 | 536 | 545 | 555 |
| IKRO.5104. SCI.001.04 | Jumlah dosen PTK Hindu yang mengikuti program peningkatan kompetensi | Orang | 275 | 283 | 295 | 305 |
| IKRO.5104. SCI.001.05 | Jumlah Dosen PTK Hindu yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional | Orang | 50 | 53 | 55 | 60 |
| IKRO.5104. SCI.001.06 | Jumlah Dosen asing yang difasilitasi dalam penguatan layanan pendidikan tinggi Hindu | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.5104. SCI.003** | **Tenaga Kependidikan PTKH yang ditingkatkan Kompetensinya** | **Orang** | **N/A** | **0** | **5** | **5** |
| IKRO.5104. SCI.003.01 | Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Hindu yang ditingkatkan Kompetensinya | Orang | N/A | 0 | 5 | 5 |
| **RO.5104. DCI.001** | **Dosen dan Tenaga Kependidikan PTKH yang di tingkatkan kompetensi- PNBP** | **Orang** | **275** | **315** | **359** | **394** |
| IKRO.5104. DCI.001.01 | Jumlah pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional | Orang | 300 | 355 | 355 | 355 |
| IKRO.5104. DCI.001.02 | Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Orang | 300 | 22 | 25 | 30 |
| **RO.5104. DCI.003** | **Tenaga Kependidikan PTKH yang ditingkatkan Kompetensinya** | **Orang** | **N/A** | **15** | **26** | **27** |
| IKRO.5104. DCI.003.01 | Jumlah Tenaga Kependidikan PTKH yang ditingkatkan Kompetensinya | Orang | N/A | 20 | 20 | 20 |
| **RO.5104. QEN.006** | **Dosen PTKH penerima Beasiswa gelar S3** | **Orang** | **46** | **30** | **19** | **15** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 565 | 575 | | | | | | |
| **270** | **360** | **1.324** | **1.650** | **1.950** | **2.250** | **2.700** | |
| 620 | 630 | | | | | | |
| 355 | 365 | | | | | | |
| 565 | 575 | | | | | | |
| 315 | 325 | | | | | | |
| 65 | 70 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **5** | **5** | **0** | **50** | **50** | **50** | **50** | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| **424** | **444** | **1** | **201** | **301** | **352** | **402** | |
| 355 | 355 | | | | | | |
| 35 | 40 | | | | | | |
| **27** | **27** | **150** | **265** | **270** | **270** | **270** | |
| 20 | 20 | | | | | | |
| **15** | **15** | **1.615** | **950** | **772** | **772** | **772** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5104. QEN.006.01 | Jumlah dosen berkualifikasi akademik S3<br>total<br>STEM<br>non STEM | | 2313228 | 2313228 | 2333230 | 2354231 |
| **SK.5104.5** | **Meningkatnya kualitas lulusan PTK Hindu yang diterima di dunia kerja** | | | | | |
| IKSK.5104.5.1 | Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus | Persen | 8,00 | 11,67 | 17,50 | 23,33 |
| IKSK.5104.5.2 | Persentase PTK yang memiliki Pusat Pengembangan Karir | Persen | N/A | 0,00 | 7,14 | 21,43 |
| IKSK.5104.5.3 | Persentase lulusan Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 Tahun setelah kelulusan | Persen | | | | |
| | a. Total | Persen | N/A | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | b. Karyawan/Wirausaha | Persen | N/A | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| IKSK.5104.5.4 | Persentase peningkatan mahasiswa PTK Hindu yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi | Persen | 10,00 | 10,77 | 11,54 | 12,31 |
| IKSK.5104.5.5 | Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK Hindu | Rasio | N/A | 5:1 | 4:1 | 4:1 |
| IKSK.5104.5.6 | Persentase mahasiswa PTK Hindu yang berkegiatan di luar program studi | Persen | N/A | 11,49 | 13,92 | 17,96 |
| **RO.5104. BEI.002** | **Lembaga Pendidikan tinggi keagamaan yang ditingkatkan mutunya** | **Lembaga** | **14** | **17** | **17** | **17** |
| IKRO.5104. BEI.002.01 | Jumlah lulusan PTK Hindu (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus | Orang | 80 | 93 | 100 | 110 |
| IKRO.5104. BEI.002.02 | Jumlah PTK Hindu yang memiliki Pusat Pengembangan Karir | Lembaga | 6 | 6 | 7 | 8 |
| IKRO.5104. BEI.002.03 | Jumlah lulusan PTK Hindu yang berhasil memiliki pekerjaan :<br>Karyawan<br>Wirausaha | Orang | 542 108 | 553 113 | 555 115 | 555 115 |
| IKRO.5104. BEI.002.04 | Jumlah lulusan PTK Hindu yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi | Orang | 150 | 183 | 185 | 187 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2374233 | 2405235 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 29,17 | 35,00 | | | | | | |
| 28,57 | 35,71 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 90,00 | 90,00 | | | | | | |
| 80,00 | 80,00 | | | | | | |
| 13,08 | 13,85 | | | | | | |
| 3:1 | 3:1 | | | | | | |
| 22,01 | 26,05 | | | | | | |
| **17** | **17** | **10.659** | **17.100** | **20.100** | **21.500** | **21.500** | |
| 120 | 130 | | | | | | |
| 8 | 9 | | | | | | |
| 555 115 | 555 115 | | | | | | |
| 190 | 195 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5104. BEI.002.05 | Jumlah prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi | Lembaga | 2 | 4 | 4 | 4 |
| IKRO.5104. BEI.002.06 | Jumlah peningkatan mahasiswa PTK Hindu yang mengikuti program sertifikasi profesi | Orang | 10 | 10 | 10 | 10 |
| IKRO.5104. BEI.002.07 | Jumlah mahasiswa PTK Hindu yang mengikuti program outbond per inbound | Orang | 10 | 23 | 24 | 25 |
| IKRO.5104. BEI.002.08 | Jumlah mahasiswa PTK Hindu yang berkegiatan di luar program studi | Orang | 1.300 | 1.346 | 1.350 | 1.360 |
| **RO.5104. DBA.002** | **Mahasiswa yang mengikuti Kompetisi Olimpiade Sains dan Teknologi** | **Orang** | **N/A** | **360** | **360** | **360** |
| IKRO.5104. DBA.002.01 | Jumlah Mahasiswa PTK Hindu yang mengikuti Kompetisi Olimpiade Sains dan Teknologi | Orang | N/A | 300 | 300 | 300 |
| **SK.5104.6** | **Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama PTK Hindu** | | | | | |
| IKSK.5104.6.1 | Persentase PTK Hindu yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional yang ditindaklanjuti dibidang : | Persen | | | | |
| | pendidikan dan pengajaran | | N/A | 45,69 | 46,90 | 48,41 |
| | b. penelitian dan publikasi | | N/A | 21,63 | 22,69 | 23,45 |
| | c. pengabdian kepada masyarakat | | N/A | 40,09 | 40,85 | 41,60 |
| **RO.5104. DCI.002** | **Pengabdian Masyarakat-PNBP** | **Orang** | **550** | **1.520** | **1.700** | **1.860** |
| IKRO.5104. DCI.002.01 | Jumlah PTK Hindu yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional | Lembaga | 8 | 11 | 11 | 12 |
| IKRO.5104. DCI.002.02 | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran pada PTK Hindu | Orang | 220 | 250 | 255 | 260 |
| IKRO.5104. DCI.002.03 | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjutidi bidang penelitian dan publikasi pada PTK Hindu | Orang | 120 | 150 | 155 | 160 |
| IKRO.5104. DCI.002.04 | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat pada PTK Hindu | Orang | 110 | 140 | 145 | 150 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | |
| 27 | 30 | | | | | | |
| 1.370 | 1.380 | | | | | | |
| **360** | **360** | **8.800** | **8.850** | **8.900** | **8.900** | **8.900** | |
| 300 | 300 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 49,92 | 51,44 | | | | | | |
| 24,21 | 24,96 | | | | | | |
| 42,36 | 43,12 | | | | | | |
| **2.020** | **2.180** | **3.347** | **3.650** | **3.960** | **4.270** | **4.580** | |
| 12 | 13 | | | | | | |
| 265 | 270 | | | | | | |
| 165 | 170 | | | | | | |
| 155 | 160 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **SK.5104.7** | **Meningkatnya budaya akademik yang religious dan toleran pada PTK Hindu** | | | | | |
| IKSK.5104.7.1 | Persentase mahasiswa PTK Hindu yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci | Persen | N/A | 64,29 | 64,29 | 71,43 |
| **RO.5104. DBA.001** | **mahasiswa penerima layanan pendidikan** | **Orang** | **7.006** | **13.200** | **14.250** | **14.700** |
| IKRO.5104. DBA.001.01 | Jumlah mahasiswa PTK Hindu yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci | Orang | 1.205 | 1.427 | 1.450 | 1.465 |
| IKRO.5104. DBA.001.02 | Jumlah prodi PTK Hindu yang mengimplementasikan integrasi keilmuan | Lembaga | 52 | 60 | 62 | 65 |
| IKRO.5104. DBA.001.03 | Jumlah PTK Hindu yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal | Lembaga | 13 | 13 | 14 | 14 |
| **RO.5104. SCI.002** | **Pengabdian Masyarakat** | **Orang** | **N/A** | **0** | **416** | **441** |
| IKRO.5104. SCI.002.01 | Jumlah Pengabdian Masyarakat yang dilakukan PTK Hindu | Orang | | 860 | 900 | 900 |
| **SK.5104.8** | **Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian PTK Hindu** | | | | | |
| IKSK.5104.8.1 | Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Hindu yang disitasi | Persen | 75,00 | 77,60 | 80,60 | 83,60 |
| IKSK.5104.8.2 | Jumlah karya tulis ilmiah PTK Hindu berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi | Jumlah Karya Tulis | N/A | 29 | 36 | 43 |
| IKSK.5104.8.3 | Jumlah Paten Granted Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu | Paten | N/A | 2 | 3 | 4 |
| IKSK.5104.8.4 | Persentase riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat PTK Hindu | Produk | N/A | 23 | 27 | 31 |
| IKSK.5104.8.5 | Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) pada PTK Hindu yang ditingkatkan kapasitasnya | Lembaga | N/A | 8 | 9 | 10 |
| **RO.5104. BEI.001** | **BOPTN** | **Lembaga** | **4** | **5** | **5** | **5** |
| IKRO.5104. BEI.001.1 | Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) PTK Hindu yang ditingkatkan kapasitasnya | Lembaga | 10 | 10 | 10 | 11 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 78,57 | 85,71 | | | | | | |
| **15.150** | **15.700** | **18.799** | **21.000** | **25.000** | **29.000** | **27.600** | |
| 1.475 | 1.500 | | | | | | |
| 67 | 70 | | | | | | |
| 14 | 14 | | | | | | |
| **466** | **466** | **0** | **3.020** | **2.780** | **2.890** | **2.890** | |
| 900 | 900 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 86,60 | 89,60 | | | | | | |
| 50 | 57 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | |
| 35 | 39 | | | | | | |
| 11 | 12 | | | | | | |
| **5** | **5** | **15.422** | **16.475** | **17.150** | **17.600** | **17.900** | |
| 11 | 12 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.5104. QEI.001** | **BOPTN Penelitian PTK Hindu Negeri** | **Lembaga** | **N/A** | **0** | **5** | **5** |
| IKRO.5104. QEI.001.1 | Jumlah PTK HIndu yang mendapatkan BOPTN Penelitian | Lembaga | N/A | 0 | 5 | 5 |
| **RO.5104. DDD.001** | **Penelitian yang berkualitas** | **Kekayaan Intektual** | **140** | **191** | **227** | **296** |
| IKRO.5104. DDD.001.01 | Jumlah karya tulis ilmiah PTK Hindu yang bereputasi nasional | Karya Tulis Ilmiah | 75 | 100 | 110 | 120 |
| IKRO.5104. DDD.001.02 | Jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Hindu yang disitas | Publikasi Ilmiah | 15 | 20 | 22 | 25 |
| IKRO.5104. DDD.001.03 | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi | Karya Tulis Ilmiah | 2 | 5 | 5 | 5 |
| IKRO.5104. DDD.001.04 | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu | Paten Granted | 5 | 10 | 12 | 14 |
| IKRO.5104. DDD.001.05 | Jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat | Riset dan Inovasi | 20 | 39 | 42 | 45 |
| **5106 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha** | | | | | | |
| **SK.5106.1** | **Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PTK Buddha** | | | | | |
| IKSK.5106.1.1 | Persentase PTK Buddha yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi | Persen | N/A | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| IKSK.5106.1.3 | Persentase PTK Buddha yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif | Persen | N/A | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **RO.5106. CBJ.001** | **Bangunan/ Gedung PTK Buddha Negeri** | **Unit** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| IKRO.5106. CBJ.001.1 | Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan Prasarana pembelajaran | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.5106. CBJ.001.2 | Jumlah PTK Buddha yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) | Lembaga | N/A | 3 | 5 | 7 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **5** | **5** | **0** | **810** | **1.010** | **1.210** | **1.460** | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| **301** | **301** | **7.899** | **11.100** | **13.550** | **15.400** | **15.450** | |
| 130 | 150 | | | | | | |
| 27 | 30 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 16 | 18 | | | | | | |
| 47 | 50 | | | | | | |
| | | **110.389** | **98.631** | **103.559** | **108.661** | **114.162** | **[BIMAS BUDDHA] Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha** |
| | | | | | | | |
| 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| **2** | **2** | **74.000** | **72.000** | **75.600** | **79.380** | **83.349** | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 9 | 12 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **SK.5106.2** | **Meningkatnya layanan PTK Buddha yang terjangkau** | | | | | |
| IKSK.5106.2.1 | Persentase mahasiswa PTK Buddha penerima beasiswa | Persen | 43,98 | 45,00 | 50,00 | 55,00 |
| IKSK.5106.2.2 | Persentase mahasiswa baru pada PTK Buddha yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas | Persen | N/A | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
| **RO.5106. QEN.001** | **Beasiswa KIPK PTK Buddha** | **Orang** | **1.117** | **1.273** | **0** | **0** |
| IKRO.5106. QEN.001.1 | Jumlah Mahasiswa PTKB Penerima KIP Kuliah | Orang | 1.117 | 1.273 | 0 | 0 |
| **RO.5106. BEN.001** | **Mahasiswa PTKB Penerima Beasiswa PPA** | **Orang** | **121** | **167** | **133** | **140** |
| IKRO.5106. BEN.001.1 | Jumlah Mahasiswa PTKB Penerima Beasiswa PPA | Orang | 121 | 167 | 133 | 140 |
| **RO.5106. DBA.001** | **Layanan Pengelolaan Fasilitasi Beasiswa Pendidikan Tinggi** | **Layanan** | **N/A** | **0** | **1** | **1** |
| IKRO.5106. DBA.001.1 | Jumlah layanan pengelolaan fasilitasi beasiswa pendidikan tinggi | Layanan | N/A | 0 | 1 | 1 |
| **SK.5106.3** | **Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi PTK Buddha** | | | | | |
| IKSK.5106.3.1 | Jumlah PTK Buddha yang terpetakan berdasarkan keunggulannya | Lembaga | N/A | 2 | 2 | 2 |
| IKSK.5106.3.2 | Persentase Prodi PTK Buddha yang mendapatkan Akreditasi Unggul | Persen | 13,51 | 16,22 | 18,92 | 21,62 |
| IKSK.5106.3.3 | Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada PTK Buddha yang terakreditasi | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| IKSK.5106.3.4 | Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) pada PTK Buddha yang terakreditasi Unggul | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| **RO.5106. PDE.001** | **Akreditasi Prodi/ Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha** | **Lembaga** | **17** | **128** | **31** | **33** |
| IKRO.5106. PDE.001.1 | Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya | Lembaga | 12 | 12 | 12 | 12 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 60,00 | 65,00 | | | | | | |
| 11,00 | 13,00 | | | | | | |
| **0** | **0** | **13.286** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **147** | **154** | **802** | **638** | **670** | **704** | **739** | |
| 147 | 154 | | | | | | |
| **1** | **1** | **-** | **100** | **100** | **100** | **100** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 24,32 | 27,03 | | | | | | |
| 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| **34** | **50** | **3.178** | **3.223** | **3.384** | **3.553** | **3.731** | |
| 12 | 12 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5106. PDE.001.2 | Jumlah Prodi yang mendapatkan akreditasi unggul | Prodi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IKRO.5106. PDE.001.3 | Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi | Lembaga | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.5106. PDE.001.4 | Jumlah program studi Program Profesi Guru (PPG) yang terakreditasi unggul | Prodi | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.5106. PDE.001.5 | Jumlah PTK yang mendapatkan akreditasi unggul | Lembaga | N/A | 0 | 0 | 1 |
| IKRO.5106. PDE.001.6 | Jumlah PTK yang mendapatkan pembinaan standar mutu | Lembaga | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **SK.5106.4** | **Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan PTK Buddha sesuai dengan standar minimal** | | | | | |
| IKSK.5106.4.1 | Persentase dosen PTK Buddha berkualifikasi akademik S3: | | | | | |
| | a. Total | Persen | 19,61 | 19,61 | 20,00 | 20,00 |
| | b. STEM | Persen | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c. Non STEM | Persen | 19,61 | 19,61 | 20,00 | 20,00 |
| IKSK.5106.4.2 | Persentase dosen PTK Buddha yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Persen | N/A | 90,00 | 92,00 | 94,00 |
| IKSK.5106.4.3 | Persentase dosen PTK Buddha yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar | Persen | 36,08 | 38,00 | 40,00 | 43,00 |
| IKSK.5106.4.4 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Buddha yang mengikuti program peningkatan kompetensi | Persen | 57,25 | N/A | 78,43 | 78,43 |
| IKSK.5106.4.5 | Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK Buddha | - | N/A | 1 : 257 | 1 : 257 | 1 : 257 |
| IKSK.5106.4.6 | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK Buddha pada jenjang jabatan fungsional | Persen | 12,79 | 12,79 | 34,00 | 34,00 |
| **RO.5106. QEA.001** | **Beasiswa Gelar S3 Dosen PTK Buddha** | **Orang** | **N/A** | **19** | **20** | **21** |
| IKRO.5106. QEA.001.1 | Jumlah dosen berkualifikasi akademik S3<br>total<br>STEM<br>non STEM | Orang | 50n/a50 | 50<br>n/a 50 | 51<br>n/a 51 | 51<br>n/a 51 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 3 | | | | | | |
| 12 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20,00 | 20,00 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 20,00 | 20,00 | | | | | | |
| 96,00 | 98,00 | | | | | | |
| 45,00 | 50,00 | | | | | | |
| 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 1 : 257 | 1 : 257 | | | | | | |
| 34,00 | 34,00 | | | | | | |
| **22** | **57** | **1.049** | **1.152** | **1.210** | **1.270** | **1.334** | |
| 51<br>n/a 51 | 51<br>n/a 51 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5106. QEA.001.2 | Jumlah pemenuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional | Orang | 26 | 70 | 70 | 70 |
| IKRO.5106. QEA.001.3 | Jumlah dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar | Orang | 36 | 37 | 40 | 43 |
| **RO.5106. SCI.001** | **Pelatihan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Buddha** | **Orang** | **372** | **381** | **585** | **614** |
| IKRO.5106. SCI.001.1 | Jumlah dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Orang | N/A | 251 | 251 | 251 |
| IKRO.5106. SCI.001.2 | Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kompetensi | Orang | 146 | 150 | 200 | 200 |
| IKRO.5106. SCI.001.3 | Jumlah Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional | Orang | N/A | 5 | 6 | 7 |
| IKRO.5106. SCI.001.4 | Jumlah dosen asing yang difasilitasi dalam penguatan layanan pendidikan tinggi | Orang | N/A | n/a | 0 | 0 |
| IKRO.5106. SCI.001.5 | Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi | Orang | N/A | 40 | 49 | 49 |
| **RO.5106. BEA.001** | **Tunjangan Profesi Dosen Non ASN PTK Buddha** | **Orang** | **N/A** | **49** | **46** | **48** |
| IKRO.5106. BEA.001.1 | Jumlah Dosen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi pada PTK Buddha | Orang | 127 | 127 | 127 | 127 |
| **SK.5106.5** | **Meningkatnya kualitas lulusan PTK Buddha yang diterima di dunia kerja** | | | | | |
| IKSK.5106.5.1 | Persentase PTK Buddha yang memiliki Pusat Pengembangan Karir | Persen | N/A | 16,67 | 25,00 | 33,33 |
| IKSK.5106.5.2 | Persentase lulusan PTK Buddha yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: | Persen | | | | |
| | a. Total | Persen | N/A | 30,00 | 35,00 | 37,00 |
| | b. Karyawan atau Wirausaha | Persen | N/A | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| IKSK.5106.5.3 | Persentase mahasiswa PTK Buddha yang mendapat sertifikat profesi dan kompetensi | Persen | N/A | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
| IKSK.5106.5.4 | Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK Buddha | - | N/A | 1 : 153 | 1 : 153 | 1 : 153 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 70 | | | | | | |
| 45 | 50 | | | | | | |
| **645** | **811** | **2.593** | **2.800** | **2.940** | **3.087** | **3.241** | |
| 251 | 251 | | | | | | |
| 255 | 255 | | | | | | |
| 8 | 8 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 59 | 69 | | | | | | |
| **51** | **53** | **2.240** | **2.266** | **2.379** | **2.428** | **2.623** | |
| 127 | 127 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 41,67 | 50,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 40,00 | 45,00 | | | | | | |
| 15,00 | 15,00 | | | | | | |
| 15,00 | 20,00 | | | | | | |
| 1 : 153 | 1 : 153 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.5106.5.5 | Persentase mahasiswa PTK Buddha yang berkegiatan di luar program studi | Persen | N/A | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| IKSK.5106.5.6 | Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) keagamaan Buddha dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus | Persen | N/A | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| **RO.5106. BGC.001** | **Tatakelola PTKBN yang meningkat kulitas layanan pendidikannya melalui PNBP** | **Lembaga** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| IKRO.5106. BGC.001.1 | Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus | Orang | N/A | 154 | 189 | 245 |
| IKRO.5106. BGC.001.2 | Jumlah PTK Buddha yang memiliki Pusat Pengembangan Karir | Lembaga | N/A | 2 | 3 | 4 |
| IKRO.5106. BGC.001.3 | Jumlah lulusan PTK Buddha yang berhasil memiliki pekerjaan :<br>Karyawan<br>Wirausaha | Orang | N/A | 903<br>16 | 111<br>31 | 130<br>35 |
| IKRO.5106. BGC.001.4 | Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi keagamaan Buddha bidang STEM | Orang | N/A | n/a | n/a | n/a |
| IKRO.5106. BGC.001.5 | Jumlah lulusan PTK Buddha yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi | Orang | N/A | 16 | 48 | 35 |
| IKRO.5106. BGC.001.6 | Jumlah prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi | Prodi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.5106. BGC.001.7 | Jumlah peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi | Orang | N/A | 372 | 421 | 171 |
| IKRO.5106. BGC.001.8 | Jumlah mahasiswa yang memperoleh layanan program Outbound per Inbound | Orang | N/A | 0 | 0 | 0 |
| IKRO.5106. BGC.001.9 | Jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi | Orang | N/A | 331 | 596 | 954 |
| **SK.5106.6** | **Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama PTK Buddha** | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25,00 | 30,00 | | | | | | |
| 70,00 | 70,00 | | | | | | |
| **2** | **2** | **3.757** | **4.481** | **4.705** | **4.941** | **5.188** | |
| 280 | 294 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | |
| 160<br>60 | 189<br>63 | | | | | | |
| n/a | n/a | | | | | | |
| 60 | 84 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 1.431 | 2.061 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.5106.6.1 | Persentase kerja sama PTK Buddha yang ditindaklanjuti di bidang: | | | | | |
| | Pendidikan dan Pengajaran | Persen | N/A | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| | b. Penelitian dan Publikasi | Persen | N/A | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| | c. Pengabdian kepada Masyarakat | Persen | N/A | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
| **RO.5106. DDD.002** | **Kekayaan Intelektual Pengabdian Masyarakat PTK Buddha** | **Kekayaan Intelektual** | **6** | **3** | **4** | **4** |
| IKRO.5106. DDD.002.1 | Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional | Lembaga | 11 | 5 | 5 | 6 |
| IKRO.5106. DDD.002.2 | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran | Kerjasama | N/A | 111 | 148 | 185 |
| IKRO.5106. DDD.002.3 | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjutidi bidang penelitian dan publikasi | Kerjasama | N/A | 111 | 148 | 185 |
| IKRO.5106. DDD.002.4 | Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat | Kerjasama | N/A | 111 | 129 | 148 |
| **SK.5106.7** | **Meningkatnya budaya akademik yang religious dan toleran PTK Buddha** | | | | | |
| IKSK.5106.7.1 | Persentase mahasiswa PTK Buddha yang mengikuti program peningkatan literasi kitab suci | Persen | N/A | 12,44 | 22,00 | 32,00 |
| IKSK.5106.7.2 | Persentase PTK Buddha yang mengembangkan literasi keagamaan | Persen | N/A | 41,67 | 58,33 | 66,67 |
| **RO.5106. PEF.001** | **Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan Mahasiswa PTK Buddha** | **Orang** | **1.688** | **1.140** | **1.525** | **1.601** |
| IKRO.5106. PEF.001.1 | Jumlah mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci | Orang | N/A | 500 | 600 | 700 |
| IKRO.5106. PEF.001.2 | Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan | Prodi | N/A | 36 | 36 | 36 |
| IKRO.5106. PEF.001.3 | Jumlah PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal | Lembaga | N/A | 2 | 3 | 3 |
| IKRO.5106. PEF.001.4 | Jumlah PTK Buddha yang mengembangkan literasi keagamaan | Lembaga | N/A | 5 | 7 | 8 |
| **SK.5106.8** | **Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian PTK Buddha** | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | |
| 80,00 | 85,00 | | | | | | |
| 85,00 | 85,00 | | | | | | |
| 75,00 | 80,00 | | | | | | |
| **4** | **5** | **302** | **318** | **333** | **350** | **368** | |
| 6 | 6 | | | | | | |
| 185 | 185 | | | | | | |
| 185 | 185 | | | | | | |
| 166 | 166 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 37,00 | 42,00 | | | | | | |
| 83,33 | 100,00 | | | | | | |
| **1.681** | **515** | **4.090** | **4.307** | **4.523** | **4.749** | **4.986** | |
| 800 | 900 | | | | | | |
| 36 | 36 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 10 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.5106.8.1 | Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Buddha yang disitasi | Persen | N/A | 5,00 | 7,00 | 10,00 |
| IKSK.5106.8.2 | Jumlah karya tulis ilmiah PTK Buddha berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi | Karya Tulis | N/A | 5 | 6 | 7 |
| IKSK.5106.8.3 | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah PTK Buddha | Paten | N/A | 1 | 2 | 3 |
| IKSK.5106.8.4 | Persentase hasil riset dan inovasi PTK Buddha yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat | Produk | 0 | 8 | 8 | 25 |
| IKSK.5106.8.5 | Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) PTK Buddha yang ditingkatkan kapasitasnya | Jumlah | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **RO.5106. BEI.001** | **BOPTN Non Penelitian PTK Buddha** | **Lembaga** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| IKRO.5106. BEI.001.1 | Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya | Lembaga | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **RO.5106. DDD.001** | **Kekayaan Intelektual Penelitian PTK Buddha** | **Kekayaan Intelektual** | **86** | **13** | **17** | **18** |
| IKRO.5106. DDD.001.1 | Jumlah karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional | Karya Tulis Ilmiah | 6 | 10 | 12 | 15 |
| IKRO.5106. DDD.001.2 | Jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitas | Jumlah | 0 | 257 | 270 | 290 |
| **RO.5106. QEI.001** | **BOPTN Penelitian PTK Buddha** | **Lembaga** | **2** | **0** | **0** | **2** |
| IKRO.5106. QEI.001.1 | Jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi | Karya Tulis Ilmiah | 0 | 1 | 1 | 2 |
| IKRO.5106. QEI.001.2 | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi | Karya Tulis Ilmiah | 0 | 1 | 1 | 2 |
| IKRO.5106. QEI.001.3 | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan | Paten | 0 | 1 | 2 | 3 |
| IKRO.5106. QEI.001.4 | Jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat | Riset | 0 | 5 | 6 | 7 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 13,00 | 15,00 | | | | | | |
| 8 | 9 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 33 | 42 | | | | | | |
| 12 | 12 | | | | | | |
| **2** | **2** | **4.521** | **4.747** | **4.984** | **5.234** | **5.495** | |
| 12 | 12 | | | | | | |
| **19** | **20** | **570** | **599** | **630** | **660** | **693** | |
| 15 | 20 | | | | | | |
| 310 | 330 | | | | | | |
| **2** | **2** | **-** | **2.000** | **2.100** | **2.205** | **2.315** | |
| 2 | 3 | | | | | | |
| 2 | 3 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 7 | 10 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **7884 Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi Keagamaan** | | | | | | |
| **SK.7884.1** | **Meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan yang terjangkau** | | | | | |
| IKSK.7884.1.1 | Persentase mahasiswa penerima beasiswa | Persen | 5,25 | 5,83 | 6,42 | 7 |
| IKSK.7884.1.2 | Persentase mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas | Persen | 16,12 | 16,78 | 17,12 | 17,48 |
| **RO.7884. BAA.001.1** | **Mahasiswa yang mendapatkan fasilitasi layanan Beasiswa** | **Laporan** | **7** | **7** | **12** | **17** |
| IKRO.7884. BAA.001.1 | Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan fasilitasi layanan Beasiswa penyelesaian pendidikan | Orang | 8,674 | 8,674 | 12,441 | 13,402 |
| **RO.7884. QEN.001.1** | **Mahasiswa PTK Swasta Islam penerima KIP Kuliah** | **Orang** | **4.890** | **4.890** | **0** | **0** |
| IKRO.7884. QEN.001.1.1 | Jumlah Mahasiswa PTK Swasta Islam penerima KIP Kuliah | Orang | 4.890 | 4.890 | 0 | 0 |
| **RO.7884. QEN.002.2** | **Mahasiswa PTK Swasta Kristen Penerima KIP Kuliah** | **Orang** | **140** | **187** | **0** | **0** |
| IKRO.7884. QEN.003.2.1 | Jumlah Mahasiswa PTK Swasta Kristen Penerima KIP Kuliah | Orang | 140 | 187 | 0 | 0 |
| **RO.7884. QEN.003.3** | **Mahasiswa PTK Swasta Katolik Penerima KIP Kuliah** | **Orang** | **549** | **620** | **0** | **0** |
| IKRO.7884. QEN.003.3.1 | Jumlah Mahasiswa PTK Swasta Katolik Penerima KIP Kuliah | Orang | 550 | 620 | 0 | 0 |
| **RO.7884. QEN.004.4** | **Mahasiswa PTK Swasta Hindu penerima KIP Kuliah** | **Orang** | **784** | **250** | **0** | **0** |
| IKRO.7884. QEN.004.4.1 | Jumlah Mahasiswa PTK Swasta Hindu penerima KIP Kuliah | Orang | 785 | 250 | 0 | 0 |
| **RO.7884. QEN.005.5** | **Mahasiswa PTK Swasta Buddha penerima KIP Kuliah** | **Orang** | **235** | **65** | **0** | **0** |
| IKRO.7884. QEN.005.5.1 | Jumlah Mahasiswa PTK Swasta Buddha penerima KIP Kuliah | Orang | 235 | 65 | 0 | 0 |
| **RO.7884. QEN.006.6** | **Mahasiswa PTK Islam/Ma'had Aly Penerima KIP Kuliah** | **Orang** | **4.890** | **0** | **129.762** | **129.762** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **103.758** | **1.592.840** | **1.593.962** | **1.595.083** | **1.596.878** | **[SETJEN] Pusat Pembiayaan Pendidikan Keagamaan** |
| | | | | | | | |
| 7,58 | 8,17 | | | | | | |
| 17,86 | 18,25 | | | | | | |
| **22** | **30** | **1.570** | **2.691** | **3.813** | **4.934** | **6.729** | |
| 15,581 | 18,511 | | | | | | |
| **0** | **0** | **64.548** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **6.917** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **0** | **0** | **16.592** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **0** | **0** | **11.405** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **0** | **0** | **2.726** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **129.762** | **129.762** | **0** | **1.398.599** | **1.398.599** | **1.398.599** | **1.398.599** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.7884. QEN.006.6.1 | Jumlah Mahasiswa PTK Islam/Ma'had Aly Penerima KIP Kuliah | Orang | 0 | 0 | 129.762 | 129.762 |
| **RO.7884. QEN.007.7** | **Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah** | **Orang** | **0** | **0** | **9.658** | **9.658** |
| IKRO.7884. QEN.007.7.1 | Jumlah Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah | Orang | 0 | 0 | 9.658 | 9.658 |
| **RO.7884. QEN.008.8** | **Mahasiswa PTK Katolik Penerima KIP Kuliah** | **Orang** | **0** | **0** | **1.872** | **1.872** |
| IKRO.7884. QEN.008.8.1 | Jumlah Mahasiswa PTK Katolik Penerima KIP Kuliah | Orang | 0 | 0 | 1.872 | 1.872 |
| **RO.7884. QEN.009.9** | **Mahasiswa PTK Hindu Penerima KIP Kuliah** | **Orang** | **0** | **0** | **3.981** | **3.981** |
| IKRO.7884. QEN.009.9.1 | Jumlah Mahasiswa PTK Hindu Penerima KIP Kuliah | Orang | 0 | 0 | 3.981 | 3.981 |
| **RO.7884. QEN.010.10** | **Mahasiswa PTK Buddha Penerima KIP Kuliah** | **Orang** | **0** | **0** | **4.164** | **4.164** |
| KRO.7884. QEN.010.10.1 | Jumlah Mahasiswa PTK Buddha Penerima KIP Kuliah | Orang | 0 | 0 | 4.164 | 4.164 |
| **7885 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Khonghucu** | | | | | | |
| **SK.7885.1** | **Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PTK Khonghucu** | | | | | |
| IKSK.7885.1.1 | Persentase PTK Khonghucu yang memenuhi standar sarana prasarana | Persen | N/A | 50 | 55 | 60 |
| IKSK.7885.1.2 | Persentase prodi Khonghucu yang memenuhi sarana prasarananya | Persen | N/A | 25 | 50 | 60 |
| **RO.7885. CAA.001** | **Sarana Bidang Pendidikan Pendidikan Khonghucu** | **Paket** | **N/A** | **2** | **5** | **6** |
| IKRO.7885. CAA.001.1 | Jumlah PTK Khonghucu yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran | Jumlah | N/A | 1 | 2 | 2 |
| IKRO.7885. CAA.001.2 | Jumlah prodi Khonghucu yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran | Jumlah | N/A | 1 | 2 | 3 |
| IKRO.7885. CAA.001.3 | Jumlah Layanan Disabilitas (ULD) Khonghucu yang disediakan | Jumlah | N/A | 0 | 1 | 1 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 129.762 | 129.762 | | | | | | |
| **9.658** | **9.658** | **0** | **107.870** | **107.870** | **107.870** | **107.870** | |
| 9.658 | 9.658 | | | | | | |
| **1.872** | **1.872** | **0** | **25.878** | **25.878** | **25.878** | **25.878** | |
| 1.872 | 1.872 | | | | | | |
| **3.981** | **3.981** | **0** | **43.018** | **43.018** | **43.018** | **43.018** | |
| 3.981 | 3.981 | | | | | | |
| **4.164** | **4.164** | **0** | **14.784** | **14.784** | **14.784** | **14.784** | |
| 4.164 | 4.164 | | | | | | |
| | | **3.537** | **27.818** | **31.650** | **36.650** | **43.667** | **[SETJEN] Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu** |
| | | | | | | | |
| 65 | 70 | | | | | | |
| 70 | 80 | | | | | | |
| **7** | **9** | **1.732** | **16.589** | **18.248** | **20.073** | **22.081** | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.7885. CBJ.001** | **Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Khonghucu** | **Unit** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.7885. CBJ.001.1 | Jumlah Pendidikan Tinggi Keagamaan Khonghucu yang memperoleh bantuan | Jumlah | N/A | 1 | 1 | 1 |
| | pembangunan atau rehabilitasi Prasarana pembelajaran | | | | | |
| **SK.7885.2** | **Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi PTK Khonghucu** | | | | | |
| IKSK.7885.1 | Persentase Prodi Khonghucu yang mendapatkan akreditasi unggul | Persen | 0 | 0 | 20 | 20 |
| **RO. 7885. PDE.001** | **Akreditasi Prodi/Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Khonghucu** | **Lembaga** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| IKRO.7885. PDE.001.1 | Jumlah Prodi Khonghucu yang mendapatkan akreditasi unggul | Lembaga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SK.7885.3** | **Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan Khonghucu sesuai** dengan standar minimal | | | | | |
| IKSK.7885.3.1 | Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 Khonghucu | Persen | 0 | 0 | 7 | 9 |
| IKSK.7885.3.2 | Persentase dosen Khonghucu yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Persen | 0 | 0 | 20 | 30 |
| IKSK.7885.3.3 | Persentase dosen dan tenaga kependidikan Khonghucu yang mengikuti | Persen | 0 | 0 | 20 | 40 |
| | program peningkatan kompetensi | | | | | |
| **RO. 7885. SCI.001** | **Dosen dan tenaga kependidiikan PTK Khonghucu yang berkualitas** | **Persen** | **0** | **0** | **23** | **33** |
| IKRO.7885. SCI.001.1 | Jumlah dosen Khonghucu penerima beasiswa akademik S3 | Orang | 0 | 0 | 5 | 5 |
| IKRO.7885. SCI.001.2 | Jumlah dosen Khonghucu yang mempunyai pengalaman di luar kampus | Orang | 0 | 0 | 6 | 6 |
| IKRO.7885. SCI.001.3 | Jumlah dosen Khonghucu yang mengikuti program peningkatan kompetensi | Orang | 0 | 0 | 8 | 16 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **1** | **2** | **1.805** | **7.110** | **7.821** | **8.603** | **9.463** | |
| 1 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 40 | 60 | | | | | | |
| **0** | **1** | **0** | **798** | **1.596** | **3.192** | **6.385** | |
| 0 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10 | 12 | | | | | | |
| 40 | 50 | | | | | | |
| 60 | 80 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **47** | **62** | **0** | **3.321** | **3.985** | **4.782** | **5.738** | |
| 5 | 6 | | | | | | |
| 10 | 14 | | | | | | |
| 24 | 32 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **025.WA - Program Dukungan Manajemen** | | | | | | |
| **SP.13** | **Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel** | | | | | |
| IKSP.13.1 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat | Nilai | 74,28 | 76 | 78 | 80 |
| | Jenderal | | | | | |
| IKSP.13.2 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen | Nilai | 89,25 | 89,5 | 89,75 | 90 |
| | Pendidikan Islam | | | | | |
| IKSP.13.3 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen | Nilai | 82 | 82,2 | 82,4 | 82,6 |
| | Bimbingan Masyarakat Islam | | | | | |
| IKSP.13.4 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen | Nilai | 78,69 | 83 | 83,83 | 84,67 |
| | Bimbingan Masyarakat Kristen | | | | | |
| IKSP.13.5 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimas | Nilai | 90 | 81,21 | 81,21 | 81,22 |
| | Katolik | | | | | |
| IKSP.13.6 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen | Nilai | 83,6 | 83,7 | 83,8 | 83,9 |
| | Bimbingan Masyarakat Hindu | | | | | |
| IKSP.13.7 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen | Nilai | 82,6 | 82,8 | 83 | 83,1 |
| | Bimbingan Masyarakat Buddha | | | | | |
| IKSP.13.8 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen | Nilai | 76,5 | 81 | 81,3 | 81,5 |
| | Penyelenggara Haji dan Umrah | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | 9.739.692 | 17.786.645 | 17.320.494 | 11.472.204 | 11.947.935 | SETJEN, ITJEN, BALITBANG DAN DIKLAT, DITJEN PHU, DITJEN PENDIS, DITJEN BIMAS ISLAM, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU, DITJEN BIMAS BUDDHA, BPJPH |
| | | | | | | | |
| 82 | 85 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 90,25 | 90,5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 82,8 | 83 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 85,51 | 86,37 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 81,23 | 81,24 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 84 | 84,1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 83,2 | 83,3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 81,8 | 82 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSP.13.9 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal | Nilai | 92,75 | 92,8 | 92,85 | 92,9 |
| IKSP.13.10 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan | Nilai | 74,28 | 82 | 82,1 | 82,2 |
| | Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | |
| **SP.14** | **Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal atas Akuntabilitas Keuangan, Kinerja dan Integritas SDM aparatur Kementerian Agama** | | | | | |
| IKSP.14.1 | Nilai Kapabilitas APIP (IACM) | Nilai | 3,32 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| IKSP.14.2 | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Nilai | 3,32 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| **2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN** | | | | | | |
| **SK.2098.1** | **Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum** | | | | | |
| IKSK.2098.1.1 | Indeks Reformasi Hukum | Nilai | 99,46 | 99,47 | 99,48 | 99,49 |
| IKSK.2098.1.2 | Persentase harmonisasi regulasi dan penyelesaian produk hukum | Persen | 95 | 95 | 95 | 95 |
| IKSK.2098.1.3 | Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan | Persen | 95 | 95 | 95 | 95 |
| IKSK.2098.1.4 | Persentase kasus hukum yang terselesaikan | Persen | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 |
| IKSK.2098.1.5 | Persentase rekomendasi izin rohaniwan, pengajar dan pelajar asing | Persen | 98,25 | 98,5 | 98,75 | 99 |
| **RO.2098. AEC.964** | **Hasil Kesepakatan Kerja Sama Internasional** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2098. AEC.964.1 | Jumlah rekomendasi rohaniwan, pengajar dan pelajar yang diterbitkan | Jumlah | 3.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| RO.2098. EBA.957 | Layanan Hukum | Layanan | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IKRO.2098. EBA.957.1 | Jumlah penyusun rancangan perundangan yang ditingkatkan kompetensi | Orang | N/A | 90 | 95 | 100 |
| IKRO.2098. EBA.957.2 | Jumlah harmonisasi regulasi dan penyelesaian produk hukum | Jumlah | 20 | 20 | 22 | 24 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 92,95 | 93 | | | | | | |
| 82,3 | 82,5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3,7 | 3,8 | | | | | | |
| 3,7 | 3,8 | | | | | | |
| | | **10.155** | **13.476** | **13.999** | **14.574** | **15.207** | **[SETJEN] Biro Hukum dan KLN** |
| | | | | | | | |
| 99,5 | 99,51 | | | | | | |
| 95 | 95 | | | | | | |
| 95 | 95 | | | | | | |
| 98 | 98,5 | | | | | | |
| 99,25 | 99,5 | | | | | | |
| **1** | **1** | **1.908** | **5.229** | **5.752** | **6.327** | **6.960** | |
| 2.800 | 3.000 | | | | | | |
| 30 | 30 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | |
| 105 | 110 | | | | | | |
| 25 | 26 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2098. EBA.957.3 | Jumlah naskah urgensi rancangan peraturan perundang-undangan yang | Jumlah | 20 | 20 | 22 | 24 |
| | dihasilkan | | | | | |
| IKRO.2098. EBA.957.4 | Jumlah rancangan peraturan yang diterbitkan sesuai perencanaan | Jumlah | 20 | 20 | 22 | 24 |
| **Jenderal** | **Layanan Bantuan Hukum** | **Layanan** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| IKRO.2098. EBA.969.1 | Jumlah Layanan Bantuan Hukum | Jumlah | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian** | | | | | | |
| **SK.2099.1** | **Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)** | | | | | |
| IKSK.2099.1.1 | Indeks Sistem Merit | Nilai | 261 | 266 | 271 | 276 |
| IKSK.2099.1.2 | Indeks Profesionalisme ASN | Nilai | 75,24 | 77,24 | 78,24 | 79,24 |
| IKSK.2099.1.3 | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Persen | N/A | 55 | 65 | 75 |
| IKSK.2099.1.4 | Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif | Orang | N/A | 0 | 0 | 0,000158 |
| IKSK.2099.1.5 | Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Persen | 4 | 0 | 6 | 7 |
| **RO.2099. EBC.954** | **Layanan Manajemen SDM** | **Orang** | **N/A** | **186.675** | **186.675** | **186.675** |
| IKRO.2099. EBC.954.1 | Jumlah Satuan Kerja dengan indeks sistem merit berkategori baik | Nilai | 261 | 266 | 271 | 276 |
| IKRO.2099. EBC.954.2 | Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori sedang | Nilai | 75,24 | 77,24 | 78,24 | 79,24 |
| IKRO.2099. EBC.954.3 | Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Jumlah | N/A | 2.750 | 3.250 | 3.750 |
| IKRO.2099. EBC.954.4 | Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif | Orang | N/A | 0 | 0 | 2 |
| IKRO.2099. EBC.954.5 | Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Jumlah | 1.523 | 0 | 1.614 | 1.629 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25 | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25 | 26 | | | | | | |
| **2** | **2** | **5.276** | **5.276** | **5.276** | **5.276** | **5.276** | |
| 70 | 70 | | | | | | |
| | | **14.871** | **14.871** | **14.871** | **14.871** | **14.871** | **[SETJEN] Biro Sumber Daya Manusia** |
| | | | | | | | |
| 281 | 286 | | | | | | |
| 80,24 | 81,24 | | | | | | |
| 85 | 95 | | | | | | |
| 0,000164 | 0,00017 | | | | | | |
| 9 | 10 | | | | | | |
| **186.675** | **186.675** | **14.871** | **14.871** | **14.871** | **14.871** | **14.871** | |
| 281 | 286 | | | | | | |
| 80,24 | 81,24 | | | | | | |
| 4.250 | 4.750 | | | | | | |
| 4 | 6 | | | | | | |
| 1.660 | 1.675 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN** | | | | | | |
| **SK.2100.1** | **Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN** | | | | | |
| IKSK.2100.1.1 | Predikat Opini Laporan Keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | WTP |
| IKSK.2100.1.2 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai | 94,88 | 95 | 95,5 | 96 |
| IKSK.2100.1.3 | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan | Persen | 40 | 50 | 55 | 60 |
| IKSK.2100.1.4 | Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Persen | 100 | 90 | 91 | 92 |
| IKSK.2100.1.5 | Persentase pencapaian dan penetapan target PNBP dan BLU | Persen | 100 | 91 | 92 | 93 |
| IKSK.2100.1.6 | Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Persen | 73 | 75 | 78 | 81 |
| IKSK.2100.1.7 | Nilai Indikator Pengelolaan Aset | Nilai | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 |
| IKSK.2100.1.8 | Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) | Persen | 100 | 99,91 | 99,92 | 99,93 |
| **RO.2100. EBA.956** | **Layanan BMN** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2100. EBA.956.1 | Jumlah Aset yang tercatat dalam SIMAK BMN | Aset | 72.630 | 72.730 | 72.830 | 72.930 |
| IKRO.2100. EBA.956.2 | Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Jumlah | 4.434 | 4.543 | 4.633 | 4.211 |
| **RO.2100. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2100. EBA.994.1 | Jumlah ASN yang menerima layanan operasional perkantoran | Jumlah | 1,714 | 1,714 | 1,814 | 1,914 |
| **RO.2100. EBD.955** | **Layanan Manajemen Keuangan** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2100. EBD.955.1 | Jumlah Opini Laporan Keuangan | Opini | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2100. EBD.955.2 | Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Jumlah | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **127.838** | **5.328.819** | **5.346.015** | **233.804** | **254.611** | **[SETJEN] Biro Keuangan dan BMN** |
| | | | | | | | |
| WTP | WTP | | | | | | |
| 96,5 | 97 | | | | | | |
| 65 | 75 | | | | | | |
| 93 | 94 | | | | | | |
| 94 | 95 | | | | | | |
| 90 | 95 | | | | | | |
| 3,5 | 3,7 | | | | | | |
| 99,94 | 99,95 | | | | | | |
| **1** | **1** | **1.694** | **4.375** | **4.610** | **2.846** | **3.130** | |
| 73.030 | 73.130 | | | | | | |
| 4.422 | 4.643 | | | | | | |
| **1** | **1** | **110.034** | **5.285.052** | **5.302.013** | **205.230** | **225.753** | |
| 2,014 | 2,114 | | | | | | |
| **1** | **1** | **16.110** | **39.392** | **39.392** | **25.728** | **25.728** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2100. EBD.955.3 | Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) | Jumlah | 4883 | 5000 | 5076 | 5190 |
| IKRO.2100. EBD.955.4 | Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.2100. EBD.955.5 | Jumlah Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang ditindaklanjuti | Jumlah | 109 | 95 | 94 | 93 |
| IKRO.2100. EBD.955.6 | Jumlah Penerimaan PNBP dan BLU | Jumlah | 5,824,101,297,9 | 5,353,492,146,0 | 5,321,896,328,3 | 5,533,499,826,1 |
| | | | 35 | 0 | 0 | 50 |
| IKRO.2100. EBD.955.7 | Jumlah Realisasi PNBP dan BLU | Jumlah | 5,052,087,868,4 | 5,015,093,976,0 | 4,733,684,440,6 | 4,933,272,133,3 |
| | | | 38 | 64 | 60 | 0 |
| **2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana** | | | | | | |
| **SK.2101.1** | **Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi** | | | | | |
| IKSK.2101.1.1 | Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi | Nilai | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| IKSK.2101.1.2 | Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | 3,25 | 3,51 | 3,77 | 4,03 |
| IKSK.2101.1.3 | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) | Nilai | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
| IKSK.2101.1.4 | Indeks Pelayanan Publik | Nilai | 4,86 | 4,87 | 4,87 | 4,88 |
| IKSK.2101.1.5 | Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) | Nilai | 74,73 | 77 | 79 | 81 |
| IKSK.2101.1.6 | Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General | Nilai | 100 | 98,25 | 98,5 | 98,75 |
| IKSK.2101.1.7 | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas | Nilai | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| IKSK.2101.1.8 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 60,15 | 60,5 | 61 | 61,5 |
| **RO.2101. EBA.960** | **Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal** | **Layanan** | **185** | **185** | **361** | **359** |
| IKRO.2101. EBA.960.1 | Jumlah jabatan struktural yang disederhanakan | Jumlah | 1.527 | 1.530 | 1.533 | 1.538 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5250 | 5365 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 92 | 91 | | | | | | |
| 5,723,394,856,3 | 5,922,435,873,1 | | | | | | |
| 63 | 75 | | | | | | |
| 5,111,074,464,5 | 5,297,796,133,3 | | | | | | |
| 63 | 25 | | | | | | |
| | | **19.148** | **11.457** | **12.215** | **21.317** | **21.821** | **[SETJEN] Biro Organisasi dan Tata** Laksana |
| | | | | | | | |
| 4,4 | 4,5 | | | | | | |
| 4,29 | 4,5 | | | | | | |
| 4,5 | 4,5 | | | | | | |
| 4,89 | 4,9 | | | | | | |
| 83 | 85 | | | | | | |
| 99 | 99,25 | | | | | | |
| 2,25 | 2,5 | | | | | | |
| 62 | 62,5 | | | | | | |
| **183** | **183** | 16.273 | 9.199 | 9.957 | 16.273 | 16.273 | |
| 1.538 | 1.538 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2101. EBA.960.2 | Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dengan kategori 3 | Jumlah | 100 | 120 | 125 | 128 |
| IKRO.2101. EBA.960.3 | Jumlah pengaduan masyarakat (LAPOR) yang di tindak lanjuti | Jumlah | 658 | 670 | 680 | 685 |
| IKRO.2101. EBA.960.4 | Jumlah layanan publik yang diselenggarakan sesuai standar | Jumlah | 65 | 66 | 67 | 68 |
| IKRO.2101. EBA.960.5 | Jumlah satuan kerja yang memperoleh Penilaian Integritas (SPI) dengan kategori sangat baik | Jumlah | 73 | 73 | 73 | 73 |
| **RO.2101. EBD.961** | **Layanan Reformasi Kinerja** | **Layanan** | **1** | **2** | **70** | **70** |
| IKRO.2101. EBD.961.1 | Jumlah satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko | Jumlah | N/A | 140 | 145 | 155 |
| IKRO.2101. EBD.961.2 | Jumlah satker yang berpredikat WBK/WBBM | Jumlah | 23 | 35 | 45 | 55 |
| IKRO.2101. EBD.961.3 | Jumlah Masyarakat yang mengisi survei Indek Kepuasan Masyarakat | Nilai | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| **2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan** | | | | | | |
| **SK.2102.1** | **Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran** | | | | | |
| IKSK.2102.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran | Nilai | 92,72 | 92,84 | 93 | 93,17 |
| IKSK.2102.1.2 | Indeks Perencanaan Pembangunan | Nilai | 96,85 | 97,1 | 97,35 | 97,6 |
| **RO.2102. EBD.952** | **Layanan Perencanaan dan Penganggaran** | | **160,8** | **160,8** | **161** | **161** |
| IKRO.2102. EBD.952.1 | Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan | Dokumen | 549 | 549 | 549 | 549 |
| **RO.2102. EBD.953** | **Layanan Pemantauan dan Evaluasi** | | **99,1** | **99,1** | **241,4** | **241,6** |
| IKRO.2102. EBD.953.1 | Jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi yang ditindaklanjuti | Dokumen | 549 | 549 | 549 | 549 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 132 | 135 | | | | | | |
| 690 | 692 | | | | | | |
| 69 | 70 | | | | | | |
| 73 | 73 | | | | | | |
| **70** | **70** | 2.875 | 2.258 | 2.258 | 5.044 | 5.548 | |
| 165 | 170 | | | | | | |
| 65 | 75 | | | | | | |
| 1200 | 1200 | | | | | | |
| | | **30.536** | **37.839** | **39.318** | **25.839** | **21.968** | **[SETJEN] Biro Perencanaan dan Penganggaran** |
| | | | | | | | |
| 93,34 | 93,51 | | | | | | |
| 97,85 | 98,1 | | | | | | |
| **93,3** | **93,3** | 25.667 | 28.798 | 30.277 | 17.099 | 17.099 | |
| 549 | 549 | | | | | | |
| **241,9** | **98,1** | 4.869 | 9.041 | 9.041 | 8.740 | 4.869 | |
| 549 | 549 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **2103 Pembinaan Administrasi Umum** | | | | | | |
| **SK.2103.1** | **Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang/jasa** | | | | | |
| IKSK.2103.1.1 | Indeks Tata Kelola Pengadaan | Nilai | 73,01 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| IKSK.2103.1.2 | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses | Persen | 71,75 | 72 | 73 | 74 |
| IKSK.2103.1.3 | Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Persen | 60 | 64 | 68 | 72 |
| IKSK.2103.1.4 | Nilai Layanan Kesehatan Pegawai Kementerian Agama | Nilai | 72 | 75 | 78 | 81 |
| **RO.2103. CAN.001** | **Sarana Bidang TIK** | **Unit** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| IKRO.2103. CAN.001.1 | Jumlah Arsip yang terdigitalisasi | Dokumen | 2,065 | 2,98 | 3,67 | 4,13 |
| **RO.2103. EBA.959** | **2103.EBA.959 Layanan Protokoler** | **Layanan** | **12** | **12** | **12** | **12** |
| IKRO.2103. EBA.959.1 | Jumlah Pimpinan Tinggi yang Difasilitasi | Orang | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **RO.2103. EBA.962** | **Layanan Umum** | **Layanan** | **12** | **12** | **12** | **12** |
| IKRO.2103. EBA.962.1 | Jumlah ASN yang memperoleh Layanan Kesehatan | Orang | 340 | 340 | 340 | 340 |
| IKRO.2103. EBA.962.2 | Jumlah sarana dan prasarana layanan umum yang disediakan | Jumlah | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **RO.2103. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **12** | **12** | **12** | **12** |
| IKRO.2103. EBA.994.1 | Jumlah Layanan Pengadaan yang diselenggarakan | Layanan | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **RO.2103. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Unit** | **10** | **20** | **30** | **30** |
| **RO.2103. EBB.951.1** | **Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap** | **Unit** | **1** | **20** | **30** | **30** |
| **RO.2103. EBB.971** | **Layanan Prasarana Internal** | **Unit** | **1** | **30** | **40** | **40** |
| IKRO.2103. EBB.971.1 | Jumlah Layanan Prasarana Internal | Jumlah | 5 | 30 | 40 | 40 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **909.072** | **1.746.895** | **1.746.895** | **944.565** | **944.565** | **[SETJEN] Biro Umum** |
| | | | | | | | |
| 72 | 73 | | | | | | |
| 75 | 76 | | | | | | |
| 76 | 80 | | | | | | |
| 84 | 86 | | | | | | |
| **300** | **300** | **6.750** | **6.750** | **6.750** | **6.750** | **6.750** | |
| 4,36 | 4,59 | | | | | | |
| **12** | **12** | **1.311** | **55.340** | **55.340** | **36.804** | **36.804** | |
| 75 | 75 | | | | | | |
| **12** | **12** | **36.804** | **55.340** | **55.340** | **36.804** | **36.804** | |
| 340 | 340 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| **12** | **12** | **645.957** | **1.287.846** | **1.287.846** | **645.957** | **645.957** | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| **30** | **30** | **40.500** | **66.369** | **66.369** | **40.500** | **40.500** | |
| **30** | **30** | | | | | | |
| **40** | **40** | **177.750** | **275.250** | **275.250** | **177.750** | **177.750** | |
| 40 | 40 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **7887 Pembinaan Administrasi Kehumasan dan Komunikasi Publik** | | | | | | |
| **SK.7887.1** | **Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi** | | | | | |
| IKSK.7887.1.1 | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID | Nilai | 94,52 | 95 | 95,53 | 95,55 |
| IKSK.7887.1.2 | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | Persen | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **RO.7887. EBA.958** | **Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.7887. EBA.958.1 | Jumlah satuan Kerja dengan penyelenggaraan PPID | Satker | 107 | 107 | 107 | 107 |
| IKRO.7887. EBA.958.2 | Jumlah pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter | Pemberitaan | 200 | 200 | 200 | 200 |
| IKRO.7887. EBA.958.3 | Jumlah peningkatan konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | Konten | 260 | 300 | 340 | 380 |
| **7888 Peningkatan Layanan Data dan Teknologi Informasi** | | | | | | |
| **SK.7888.1** | **Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi** | | | | | |
| IKSK.7888.1.1 | Indeks Pemerintahan Digital | Nilai | 4,63 | 3,5 | 3,6 | 3,75 |
| IKSK.7888.1.2 | Indeks Pembangunan Statistik | Nilai | 2,72 | 2,72 | 3 | 3 |
| IKSK.7888.1.3 | Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital | Nilai | N/A | 1 | 1,5 | 2 |
| **RO.788. EBA.963** | **Layanan Data dan Teknologi Informasi** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.7888. EBA.963.1 | Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital | Layanan | 25 | 35 | 45 | 55 |
| IKRO.7888. EBA.963.2 | Jumlah data Statistik yang dipublikasi | Dataset | 3 | 5 | 7 | 9 |
| IKRO.7888. EBA.963.3 | Jumlah satuan kerja yang menerapkan transformasi digital | Satker | N/A | 4.590 | 4.590 | 4.590 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **5.641** | **8.641** | **11.641** | **14.641** | **17.641** | **[SETJEN] Biro Humas dan Komunikasi Publik** |
| | | | | | | | |
| 95,58 | 96 | | | | | | |
| 14 | 15 | | | | | | |
| **1** | **1** | 5.641 | 8.641 | 11.641 | 14.641 | 17.641 | |
| 107 | 107 | | | | | | |
| 200 | 200 | | | | | | |
| 420 | 460 | | | | | | |
| | | **62.139** | **920.375** | **1.090** | **1.293** | **1.537** | **[SETJEN] Pusat Data dan Teknologi Informasi** |
| | | | | | | | |
| 3,8 | 4 | | | | | | |
| 3,5 | 3,5 | | | | | | |
| 2,5 | 3 | | | | | | |
| **1** | **1** | 62.139 | 920.375 | 1.090 | 1.293 | 1.537 | |
| 65 | 85 | | | | | | |
| 12 | 15 | | | | | | |
| 4.590 | 4.590 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **6708 Dukungan Manajemen Pendidikan** | | | | | | |
| **SK 6708.1** | **Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan** | | | | | |
| IKSK 6708.1.1 | Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 |
| IKSK 6708.1.2 | Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama | Persen | 1,36 | 1,67 | 1,97 | 2 |
| IKSK 6708.1.3 | Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media | Persen | 10 | 11 | 12 | 13 |
| IKSK 6708.1.4 | Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/ kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media | Persen | 10 | 11 | 12 | 13 |
| IKSK 6708.1.5 | Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 |
| IKSK 6708.1.6 | Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | dan Renstra | | | | | |
| IKSK 6708.1.7 | Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian | Nilai | N/A | 87,88 | 88,5 | 88,5 |
| | Agama oleh BKN minimal 85 | | | | | |
| IKSK 6708.1.8 | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai | 92,72 | 92,84 | 93 | 93,17 |
| IKSK 6708.1.9 | Persentase rancangan peraturan bidang pendidikan yang diselesaikan sesuai | Persen | 20 | 20 | 22 | 24 |
| | perencanaan | | | | | |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | 840.948 | 938.821 | 994.566 | 1.050.556 | 1.106.817 | Biro Hukum dan KLN, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan dan BMN, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan Dan Penganggaran, Biro Umum, Biro Humas dan Komunikasi Publik Dan Pusat Data dan Teknologi Informasi |
| | | | | | | | |
| 90 | 90 | | | | | | |
| 2,14 | 2,2 | | | | | | |
| 14 | 15 | | | | | | |
| 14 | 15 | | | | | | |
| 90 | 90 | | | | | | |
| 90 | 90 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 90 | 90 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 93,34 | 93,51 | | | | | | |
| 25 | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.6708. EBD.952** | **Layanan Perencanaan dan Penganggaran** | **Dokumen** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| IKRO.6708. EBD.952.1 | Jumlah satuan kerja yang memiliki realisasi anggaran bidang pendidikan | Unit | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | yang sesuai dengan capaian output | | | | | |
| **RO.6708. EBA.960** | **Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.6708. EBA.960.1 | Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai peningkatan kinerja | Layanan | 2238 | 2240 | 2242 | 2243 |
| **RO.6708. EBA.958** | **6708 EBA 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.6708. EBA.958.1 | Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media | Jumlah | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **RO.6708. CAN.001** | **6708 CAN 001 Sarana Bidang TIK** | **Unit** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| IKRO.6708. CAN.001.1 | Jumlah infrastruktur dari layanan dukungan TIK yang terpenuhi | Jumlah | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RO.6708. EBA.963 | 6708 EBA 963 Layanan Data dan Informasi | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.6708. EBA.963.1 | Jumlah satuan kerja yang memperoleh layanan peningkatan akses informasi dan publikasi program | Jumlah | 1527 | 1532 | 1536 | 1539 |
| **RO.6708. EBC.954** | **6708 EBC 954 Layanan Manajemen SDM** | **Orang** | **N/A** | **87,88** | **88,5** | **88,5** |
| IKRO.6708. EBC.954.1 | Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian | Nilai | N/A | 87,88 | 88,5 | 88,5 |
| | Agama oleh BKN minimal 85 | | | | | |
| **RO.6708. EBD.955** | **6708 EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan** | **Persen** | **40** | **50** | **60** | **70** |
| IKRO.6708. EBD.955.1 | Persentase Jabatan Fungsional Keuangan Negara yang memenuhi standar | Jumlah | 40 | 50 | 60 | 70 |
| **RO.6708. EBA.957** | **6708 EBA 957 Layanan Hukum** | **Jumlah** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.6708. EBA.957.1 | Jumlah layanan Hukum yang diselenggarakan sesuai standar | Jumlah | 6 | 6 | 6 | 6 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | |
| 32 | 33 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1.674 | 1.674 | 1.674 | 1.674 | 1.674 | |
| 2246 | 2246 | | | | | | |
| 1 | 1 | 24.321 | 27.821 | 31.321 | 34.821 | 38.321 | |
| 14 | 15 | | | | | | |
| 10 | 10 | 58.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
| 10 | 10 | | | | | | |
| 1 | 1 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | |
| 1543 | 1548 | | | | | | |
| 90 | 90 | 3.310 | 20.523 | 22.576 | 24.833 | 27.317 | |
| 90 | 90 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 80 | 90 | 800 | 960 | 1.152 | 1.385 | 1.662 | |
| 80 | 90 | | | | | | |
| 1 | 1 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | |
| 6 | 6 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.6708. EBA.957.2 | Jumlah rancangan peraturan bidang pendidikan yang diselesaikan sesuai perencanaan | Jumlah | 20 | 20 | 22 | 24 |
| **RO.6708. EBA.956** | **6708.EBA.956 Layanan BMN** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.6708. EBA.956.1 | Jumlah Layanan BMN | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.6708. EBA.994** | **6708.EBA.994 Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| IKRO.6708. EBA.994.1 | Jumlah Layanan Pengadaan yang diselenggarakan | Layanan | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **2113 PENGAWASAN FUNGSIONAL PENDIDIKAN** | | | | | | |
| **SK.2113.1** | **Meningkatnya Peran dan Layanan Pengawasan intern atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja** | | | | | |
| IKSK.2113.1.1 | Persentase Efektivitas dan Efisiensi Program yang mencapai tujuan | Persen | N/A | 75 | 78 | 82 |
| IKSK.2113.1.2 | Nilai SAKIP satuan kerja | Nilai | 71.50 | 72 | 74 | 76 |
| IKSK.2113.1.3 | Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif | Persen | N/A | 75 | 78 | 82 |
| **RO.2113. EBD.965** | **Layanan Audit Internal** | **Rekomendasi** | **N/A** | **14** | **15** | **18** |
| IKRO.2113. EBD.965.1 | Jumlah program yang mencapai efektivitas dan efisiensi sesuai tujuan | Jumlah | N/A | 20 | 21 | 22 |
| IKRO.2113. EBD.965.2 | Jumlah satuan kerja yang dievaluasi AKIP | Jumlah | N/A | 100 | 110 | 120 |
| IKRO.2113. EBD.965.3 | Jumlah satuan kerja yang memperoleh hasil reviu PIPK dengan kesimpulan Efektif | Jumlah | N/A | 10 | 10 | 10 |
| **2115 PENGAWASAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT I - IV** | | | | | | |
| **SK.2115.1** | **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern yang Andal, Independen, dan Berdampak** | | | | | |
| IKSK.2115.1.1 | Nilai telaah sejawat | Nilai | 82 | 83 | 83 | 84 |
| IKSK.2115.1.2 | Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar | Persen | N/A | 80 | 90 | 95 |
| **RO.2115. EBD.965** | **Layanan Audit Internal** | **Rekomen-dasi** | **N/A** | **15** | **15** | **15** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 25 | 26 | | | | | | |
| **1** | **1** | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **4** | **4** | 645.957 | 645.957 | 645.957 | 645.957 | 645.957 | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| | | **56.965** | **58.959** | **61.907** | **65.002** | **68.252** | **Inspektorat I-IV** |
| | | | | | | | |
| 86 | 90 | | | | | | |
| 78 | 80 | | | | | | |
| 86 | 90 | | | | | | |
| **22** | **25** | 56.965 | 58.959 | 61.907 | 65.002 | 68.253 | |
| 23 | 24 | | | | | | |
| 130 | 140 | | | | | | |
| 10 | 10 | | | | | | |
| | | **23.775** | **26.205** | **27.515** | **28.891** | **30.335** | **Inspektorat I-IV** |
| | | | | | | | |
| 85 | 86 | | | | | | |
| 98 | 100 | | | | | | |
| **16** | **17** | 23.775 | 26.205 | 27.515 | 28.891 | 30.335 | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2115. EBD.965.1 | Jumlah laporan telaah sejawat dengan simpulan "Baik" | Nilai | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IKRO.2115. EBD.965.2 | Jumlah kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar | Jumlah | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **2119 PENGAWASAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT V** | | | | | | |
| **SK.2119.1** | **Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan korupsi** | | | | | |
| IKSK.2119.1.1 | Persentase pengendalian risiko kecurangan | Persen | 60 | 65 | 70 | 75 |
| IKSK.2119.1.2 | Persentase penanganan risiko kecurangan | Persen | 60 | 65 | 70 | 75 |
| IKSK.2119.1.3 | Persentase Pengamanan Aset Negara | Persen | N/A | 20 | 40 | 60 |
| IKRO.2119. EBD.U01 | Layanan Audit Investigasi | Dokumen | N/A | 55 | 60 | 68 |
| IKRO.2119. EBD.U01.1 | Jumlah Pengawasan Pengendalian Risiko Kecurangan | Dokumen | N/A | 15 | 15 | 16 |
| IKRO.2119. EBD.U01.2 | Jumlah Pengawasan Penanganan Risiko Kecurangan | Dokumen | N/A | 36 | 41 | 47 |
| IKRO.2119. EBD.U01.3 | Jumlah Pengawasan Pengamanan Aset Negara | Dokumen | N/A | 4 | 4 | 5 |
| **2120 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA** | | | | | | |
| **SK.2120.1** | **Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen pengawasan yang inovatif, transparan dan berintegritas** | | | | | |
| IKSK.2120.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran | Nilai | 88.77 | 88,8 | 88.85 | 88,9 |
| IKSK.2120.1.2 | Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Persen | 100 | 85 | 90 | 95 |
| IKSK.2120.1.3 | Persentase laporan kinerja sesuai standar | Persen | 100 | 95 | 96 | 97 |
| IKSK.2120.1.4 | Persentase rancangan peraturan dan kajian kebijakan yang diselesaikan | Jumlah | N/A | 4 | 4 | 4 |
| IKSK.2120.1.5 | Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat yang diverifikasi | Persen | 100 | 93,5 | 94 | 94,5 |
| IKSK.2120.1.6 | Indeks Profesionalisme ASN | Nilai | 85.70 | 85.75 | 85.80 | 85.85 |
| IKSK.2120.1.7 | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID | Nilai | N/A | 80 | 81 | 82 |
| IKSK.2120.1.8 | Indeks Pembangunan Statistik | Nilai | N/A | 2 | 2 | 2 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 16 | 17 | | | | | | |
| | | **2.699** | **2.834** | **2.976** | **3.125** | **3.281** | **Inspektorat V** |
| | | | | | | | |
| 80 | 85 | | | | | | |
| 80 | 85 | | | | | | |
| 80 | 100 | | | | | | |
| 76 | 84 | 2.699 | 2.834 | 2.976 | 3.125 | 3.281 | |
| 16 | 17 | | | | | | |
| 55 | 61 | | | | | | |
| 5 | 6 | | | | | | |
| | | **95.173** | **114.746** | **121.351** | **127.394** | **133.741** | **Sekretariat Inspektorat Jenderal** |
| | | | | | | | |
| 88.95 | 89 | | | | | | |
| 98 | 99 | | | | | | |
| 98 | 99 | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 95 | 96 | | | | | | |
| 85.90 | 85.95 | | | | | | |
| 83 | 84 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2120.1.9 | Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital | Nilai | N/A | 1 | 45778 | 2 |
| **RO.2120. EBA.956** | **Layanan BMN** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2120. EBA.956.1 | Jumlah Laporan RKBMN yang disusun tepat waktu | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2120. EBA.960** | **Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal** | **Layanan** | **N/A** | **18** | **18** | **18** |
| IKRO.2120. EBA.960.1 | Jumlah laporan kinerja perencanaan anggaran dengan kategori baik | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2120. EBA.960.2 | Jumlah laporan kinerja pelaksanaan anggaran dengan kategori sangat baik | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2120. EBA.960.3 | Jumlah kajian kebijakan yang dimanfaatkan | Jumlah | N/A | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.2120. EBA.960.4 | Jumlah laporan kinerja sesuai standar | Jumlah | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IKRO.2120. EBA.960.5 | Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan | Jumlah | N/A | 4 | 4 | 4 |
| IKRO.2120. EBA.960.6 | Jumlah kajian hukum yang diselesaikan | Jumlah | N/A | 18 | 18 | 18 |
| IKRO.2120. EBA.960.7 | Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan yang diverifikasi | Jumlah | N/A | 200 | 200 | 200 |
| IKRO.2120. EBA.960.8 | Jumlah tindaklanjut pengaduan masyarakat yang diverifikasi | Jumlah | 700 | 700 | 710 | 720 |
| IKRO.2120. EBA.960.9 | Jumlah ASN yang memperoleh nilai profesionalisme tinggi | Jumlah | N/A | 405 | 432 | 459 |
| IKRO.2120. EBA.960.10 | Jumlah laporan PPID menuju informatif | Jumlah | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2120. EBA.960.11 | Jumlah laporan Pembangunan Statistik dengan kategori baik | Jumlah | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2120. EBA.960.12 | Jumlah laporan Pelaksanaan Transformasi Digital dengan kategori baik | Jumlah | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2120. EBA.960.13 | Jumlah Digitalisasi Arsip dan mudah di akses | Jumlah | N/A | 50 | 70 | 75 |
| **RO.2120. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **2** | **2** | **2** | **2** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 45779 | 3 | | | | | | |
| **1** | **1** | **480** | **480** | **480** | **480** | **480** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **18** | **18** | **12.589** | **12.369** | **13.879** | **14.573** | **15.302** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 18 | 18 | | | | | | |
| 200 | 200 | | | | | | |
| 730 | 740 | | | | | | |
| 486 | 513 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 80 | 85 | | | | | | |
| **2** | **2** | **70.731** | **89.955** | **94.452** | **99.175** | **104.135** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2120. EBA.994.1 | Jumlah layanan gaji dan operasional perkantoran tepat waktu | Layanan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **RO.2120. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Unit** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2120. EBB.951.1 | Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RO.2120. EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | Paket | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IKRO.2120. EBB.971.1 | Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Paket | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **2125 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam** | | | | | | |
| SK.2125.1 | Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Dukungan Manajemen Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam | | | | | |
| IKSK.2125.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Islam | Nilai | 93,47 | 88 | 90 | 90,5 |
| IKSK.2125.1.2 | Persentase laporan kinerja satuan kerja Ditjen Bimas Islam yang sesuai standar | Persen | 100 | 95 | 96 | 97 |
| IKSK.2125.1.3 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Islam | Nilai | 93,75 | 94 | 94 | 94,5 |
| IKSK.2125.1.4 | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ditjen Bimas Islam | Persen | 85 | 86 | 87 | 88 |
| IKSK.2125.1.5 | Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II Ditjen Bimas Islam yang sesuai standar dan tepat waktu | Jumlah | 62 | 62 | 62 | 62 |
| IKSK.2125.1.6 | Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBP Ditjen Bimas Islam | Persen | 85 | 85 | 85 | 85 |
| IKSK.2125.1.7 | Persentase Satuan Kerja Ditjen Bimas Islam yang menyusun RKBMN tepat waktu | Persen | 85 | 88 | 90 | 95 |
| IKSK.2125.1.8 | Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Bimas Islam | Nilai | 77 | 78 | 79 | 80 |
| IKSK.2125.1.9 | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan Ditjen Bimas Islam | Persen | 0 | 95 | 96 | 97 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| **1** | **1** | **4.434** | **4.656** | **4.888** | **5.133** | **5.390** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 5 | 6.940 | 7.287 | 7.651 | 8.033 | 8.435 | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| | | **502.460** | **622.853** | **668.600** | **669.100** | **669.600** | **[BIMAS ISLAM] Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam** |
| | | | | | | | |
| 91 | 91,5 | | | | | | |
| 98 | 99 | | | | | | |
| 95 | 95 | | | | | | |
| 89 | 90 | | | | | | |
| 62 | 62 | | | | | | |
| 85 | 85 | | | | | | |
| 97 | 98 | | | | | | |
| 81 | 82 | | | | | | |
| 98 | 99 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2125.1.10 | Persentase ASN Ditjen Bimas Islam yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif | Persen | 0 | 30 | 31 | 32 |
| IKSK.2125.1.11 | Persentase ASN Ditjen Bimas Islam yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Persen | 0 | 10 | 15 | 20 |
| IKSK.2125.1.12 | Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan | Persen | N/A | 95 | 96 | 97 |
| IKSK.2125.1.13 | Persentase kasus hukum Ditjen Bimas Islam yang terselesaikan | Persen | N/A | 80 | 85 | 87 |
| IKSK.2125.1.14 | Persentase rekomendasi tokoh agama asing yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam | Persen | 95 | 95 | 95 | 95 |
| IKSK.2125.1.15 | Persentase Digitalisasi Arsip Ditjen Bimas Islam yang mudah di akses | Persen | 15 | 25 | 50 | 75 |
| IKSK.2125.1.16 | Persentase sarana dan prasaran perkantoran Ditjen Bimas Islam yang dikembangkan berbasis roadmap | Persen | 15 | 25 | 50 | 75 |
| IKSK.2125.1.17 | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID Ditjen Bimas Islam | Nilai | 94,52 | 95 | 95,53 | 95,55 |
| IKSK.2125.1.18 | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan Ditjen Bimas Islam yang dipublikasi | Persen | 50 | 33,33 | 70 | 80 |
| IKSK.2125.1.19 | Indeks Pembangunan Statistik Ditjen Bimas Islam | Nilai | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,2 |
| IKSK.2125.1.20 | Indeks Impelementasi Pelaksanaan Transformasi Digital Ditjen Bimas Islam | Nilai | 60 | 65 | 70 | 80 |
| **RO.2125. EBD.952** | **Layanan Perencanaan dan Penganggaran** | **Dokumen** | **N/A** | **3** | **3** | **3** |
| IKRO.2125. EBD.952.1 | Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **RO.2125. EBD.953** | **Layanan Pemantauan dan Evaluasi** | **Dokumen** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2125. EBD.953.1 | Jumlah laporan evaluasi yang disusun tepat waktu | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2125. EBA.960** | **Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 33 | 34 | | | | | | |
| 25 | 30 | | | | | | |
| 98 | 99 | | | | | | |
| 89 | 90 | | | | | | |
| 95 | 95 | | | | | | |
| 85 | 95 | | | | | | |
| 85 | 95 | | | | | | |
| 95,58 | 96 | | | | | | |
| 90 | 99 | | | | | | |
| 2,4 | 2,6 | | | | | | |
| 90 | 95 | | | | | | |
| **3** | **3** | 7.715 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| **1** | **1** | 9.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **1** | **1** | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2125. EBA.960.1 | Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Layanan | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2125. EBD.961** | **Layanan Reformasi Kinerja** | **Dokumen** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2125. EBD.961.1 | Jumlah kegiatan penyusunan laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Dokumen | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2125. EBD.955** | **Layanan Manajemen Keuangan** | **Dokumen** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2125. EBD.955.1 | Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai indikator pelaksanaan anggaran diatas 90 | Dokumen | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2125. EBD.955.2 | Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan | Dokumen | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2125. EBD.955.3 | Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Dokumen | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2125. EBD.955.4 | Jumlah Penerimaan PNBP | Dokumen | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2125. EBD.955.5 | Jumlah Realisasi PNBP | Dokumen | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2125. EBA.956** | **Layanan BMN** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2125. EBA.956.1 | Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2125. EBC.954** | **Layanan Manajemen SDM** | **Orang** | **N/A** | **300** | **300** | **300** |
| IKRO.2125. EBC.954.1 | Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN | Orang | N/A | 300 | 300 | 300 |
| IKRO.2125. EBC.954.2 | Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Lembaga | N/A | 3 | 3 | 3 |
| IKRO.2125. EBC.954.3 | Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif | Orang | N/A | 5 | 5 | 5 |
| IKRO.2125. EBC.954.4 | Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Orang | N/A | 300 | 300 | 300 |
| **RO.2125. EBA.957** | **Layanan Hukum** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **1** | **1** | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **1** | **1** | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **1** | **1** | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **300** | **300** | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 300 | 300 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 300 | 300 | | | | | | |
| **1** | **1** | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2125. EBA.957.1 | Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan | Dokumen | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2125. EBA.957.2 | Jumlah rekomendasi tokoh agama asing yang diterbitkan | Dokumen | N/A | 5 | 5 | 5 |
| **RO.2125. EBA.969** | **Layanan Bantuan Hukum** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2125. EBA.969.1 | Jumlah kasus hukum yang terselesaikan | Layanan | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2125. EBD.974** | **Layanan Penyelenggaraan Kearsipan** | **Dokumen** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2125. EBD.974.1 | Jumlah Arsip Digitalisasi dan mudah di akses | Dokumen | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2125. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Unit** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2125. EBB.951.1 | Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Unit | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2125. EBB.971** | **Layanan Prasarana Internal** | **Unit** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2125. EBB.971.1 | Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Unit | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2125. EBA.959** | **Layanan Protokoler** | **Layanan** | **N/A** | **2** | **0** | **0** |
| IKRO.2125. EBA.959.1 | Jumlah tamu pimpinan yang difasilitasi | Layanan | N/A | 2 | 0 | 0 |
| **RO.2125. EBA.962** | **Layanan Umum** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2125. EBA.962.1 | Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan | Layanan | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2125. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2125. EBA.994.1 | Jumlah ASN yang menerima layanan Operasional Perkantoran | Layanan | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2125. EBA.958** | **Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2125. EBA.958.1 | Jumlah konten keagamaan yang dipublikasi | Layanan | N/A | 1 | 1 | 1 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 1 | 1 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 4.933 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 447.312 | 565.753 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 1 | 1 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2125. EBA.958.2 | Jumlah satuan kerja yang menyelenggarakan PPID | Layanan | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2125. EBA.963** | **Layanan Data dan Informasi** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2125. EBA.963.1 | Jumlah Data Statistik yang di publikasi | Layanan | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2125. EBA.963.2 | Jumlah Layanan Keagamaan Berbasis Transformasi IT | Layanan | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam** | | | | | | |
| **SK.2135.1** | **Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen Ditjen Pendidikan Islam** | | | | | |
| IKSK.2135.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran di Ditjen Pendidikan Islam | Nilai | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 |
| IKSK.2135.1.2 | Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar di Ditjen Pendidikan Islam | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 |
| IKSK.2135.1.3 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Ditjen Pendidikan Islam | Nilai | N/A | 90,1 | 90,25 | 90,5 |
| IKSK.2135.1.4 | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Ditjen Pendidikan Islam | Persen | 80,97 | 81,02 | 81,07 | 81,12 |
| IKSK.2135.1.5 | Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu di Ditjen Pendidikan Islam | Jumlah | N/A | 90,5 | 91,25 | 92 |
| IKSK.2135.1.6 | Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBP dan BLU di Ditjen Pendidikan Islam | Persen | 37,93 | 39,66 | 41,38 | 43,1 |
| IKSK.2135.1.7 | Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu di Ditjen Pendidikan Islam | Persen | 43 | 43 | 43 | 44 |
| IKSK.2135.1.8 | Indeks Profesionalisme ASN di Ditjen Pendidikan Islam | Nilai | N/A | 70,6 | 73,27 | 75,73 |
| IKSK.2135.1.9 | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan di Ditjen Pendidikan Islam | Persen | 80 | 81 | 82 | 83 |
| IKSK.2135.1.10 | Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif di Ditjen Pendidikan Islam | Persen | N/A | 5 | 6 | 7 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **1** | **1** | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| | | **5.502.778** | **6.407.125** | **6.580.668** | **6.417.715** | **6.612.482** | **[PENDIS] Sekretariat Ditjen Pendis** |
| | | | | | | | |
| 84,5 | 85 | | | | | | |
| 90 | 90 | | | | | | |
| 91 | 91,25 | | | | | | |
| 81,17 | 81,22 | | | | | | |
| 92,75 | 93,25 | | | | | | |
| 44,83 | 46,55 | | | | | | |
| 45 | 46 | | | | | | |
| 77,27 | 78,04 | | | | | | |
| 88 | 89 | | | | | | |
| 8 | 9 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2135.1.11 | Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi di Ditjen Pendidikan Islam | Persen | N/A | 90 | 91 | 92 |
| IKSK.2135.1.12 | Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan di Ditjen Pendidikan Islam | Jumlah | 2 | 1 | 1 | 1 |
| IKSK.2135.1.13 | Persentase kasus hukum yang terselesaikan di Ditjen Pendidikan Islam | Persen | 70 | 75 | 76 | 77 |
| IKSK.2135.1.14 | Persentase rekomendasi izin orang asing di Ditjen Pendidikan Islam | Persen | N/A | 75 | 77 | 79 |
| IKSK.2135.1.15 | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses di Ditjen Pendidikan Islam | Persen | 10 | 10 | 15 | 20 |
| IKSK.2135.1.16 | Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap di Ditjen Pendidikan Islam | Persen | N/A | 5 | 8 | 10 |
| IKSK.2135.1.17 | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID di Ditjen Pendidikan Islam | Nilai | N/A | 60 | 65 | 70 |
| IKSK.2135.1.18 | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi di Ditjen Pendidikan Islam | Persen | 46,72 | 55 | 64 | 74,5 |
| IKSK.2135.1.19 | Indeks Pembangunan Statistik di Ditjen Pendidikan Islam | Nilai | N/A | 1,9 | 2 | 2,1 |
| IKSK.2135.1.20 | Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital di Ditjen Pendidikan Islam | Nilai | 47,4 | 46,32 | 49,3 | 52,29 |
| **RO.2135. EBD.952** | **Layanan Perencanaan dan Penganggaran** | **Dokumen** | **9** | **10** | **10** | **11** |
| IKRO.2135. EBD.952.1 | Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan di Ditjen Pendidikan Islam | Dokumen | 9 | 10 | 10 | 11 |
| **RO.2135. EBD.953** | **Layanan Pemantauan dan Evaluasi** | **Dokumen** | **1** | **16** | **16** | **17** |
| IKRO.2135. EBD.953.1 | Jumlah kegiatan pengukuran capaian Nilai Kinerja Anggaran di Ditjen Pendidikan Islam | Kegiatan | 7 | 7 | 7 | 7 |
| IKSK.2135.2.1 | Nilai Pembangunan Zona Integritas | Nilai | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 |
| **RO.2135. EBA.960** | **Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal** | **Layanan** | **1** | **2** | **2** | **2** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 93 | 94 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 78 | 78,5 | | | | | | |
| 81 | 83 | | | | | | |
| 25 | 30 | | | | | | |
| 12 | 15 | | | | | | |
| 75 | 80 | | | | | | |
| 86 | 98,3 | | | | | | |
| 2,2 | 2,3 | | | | | | |
| 55,27 | 58,25 | | | | | | |
| **11** | **12** | **4.345** | **4.720** | **4.923** | **5.148** | **5.383** | |
| 11 | 12 | | | | | | |
| **18** | **19** | **4.433** | **378.800** | **378.800** | **401.082** | **423.365** | |
| 7 | 7 | | | | | | |
| 0,6 | 0,65 | | | | | | |
| **3** | **3** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.667** | **2.667** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2135. EBA.960.1 | Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar di Ditjen Pendidikan Islam | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **RO.2135. EBD.961** | **Layanan Reformasi Kinerja** | **Dokumen** | **3** | **3** | **5** | **7** |
| IKRO.2135. EBD.961.1 | Jumlah kegiatan penyusunan laporan kinerja satuan kerja sesuai standar di Ditjen Pendidikan Islam | Laporan | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **RO.2135. EBD.955** | **Layanan Manajemen Keuangan** | **Dokumen** | **N/A** | **642** | **668** | **694** |
| IKRO.2135. EBD.955.1 | Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu di Ditjen Pendidikan Islam | Laporan | N/A | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.2135. EBD.955.2 | Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindak lanjut di Ditjen Pendidikan Islam | Jumlah | 288.165 | 290.000 | 291.000 | 292.000 |
| IKRO.2135. EBD.955.3 | Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu di Ditjen Pendidikan Islam | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.2135. EBD.955.4 | Jumlah Penerimaan PNBP di Ditjen Pendidikan Islam | Jumlah | N/A | 668.341.977.000 | 668.341.977.000 | 668.341.977.000 |
| IKRO.2135. EBD.955.5 | Jumlah Realisasi PNBP di Ditjen Pendidikan Islam | Jumlah | N/A | 566.799.351.369 | 566.799.351.369 | 566.799.351.369 |
| **RO.2135. EBA.956** | **Layanan BMN** | **Layanan** | **N/A** | **515** | **525** | **536** |
| IKRO.2135. EBA.956.1 | Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu di Ditjen Pendidikan Islam | Lembaga | 2.453 | 2.453 | 2.453 | 2.497 |
| **RO.2135. EBC.954** | **Layanan Manajemen SDM** | **Layanan** | **N/A** | **100** | **101** | **102** |
| IKRO.2135. EBC.954.1 | Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN di Ditjen Pendidikan Islam | Orang | N/A | 21.576 | 21.680 | 21.790 |
| IKRO.2135. EBC.954.2 | Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan di Ditjen Pendidikan Islam | Lembaga | N/A | 2.932 | 2.932 | 2.932 |
| IKRO.2135. EBC.954.3 | Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif di Ditjen Pendidikan Islam | Orang | N/A | 20 | 24 | 28 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| **8** | **10** | **2.000** | **2.800** | **3.600** | **4.050** | **4.860** | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| **722** | **751** | **13.730** | **16.164** | **16.785** | **17.431** | **18.101** | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 293.000 | 294.000 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 668.341.977.000 | 668.341.977.000 | | | | | | |
| 566.799.351.369 | 566.799.351.369 | | | | | | |
| **547** | **557** | **6.864** | **6.999** | **7.136** | **7.276** | **7.418** | |
| 2.553 | 2.610 | | | | | | |
| **103** | **104** | **1.000** | **1.010** | **1.020** | **1.030** | **1.040** | |
| 21.900 | 22.010 | | | | | | |
| 2.932 | 2.932 | | | | | | |
| 32 | 36 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2135. EBC.996** | **Layanan Pendidikan dan Pelatihan** | **Orang** | **N/A** | **500** | **505** | **510** |
| IKRO.2135. EBC.996.1 | Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi di Ditjen Pendidikan Islam | Orang | N/A | 365 | 369 | 373 |
| IKSK.2135.4.5 | Nilai kepuasan layanan kepegawaian | Nilai | N/A | 70 | 72,5 | 75 |
| **RO.2135. EBA.957** | **Layanan Hukum** | **Layanan** | **N/A** | **46** | **47** | **48** |
| IKRO.2135. EBA.957.1 | Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan di Ditjen Pendidikan Islam | Layanan | 2 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2135. EBA.957.2 | Jumlah rekomendasi izin orang asing di Ditjen Pendidikan Islam | Dokumen | 1.570 | 1.670 | 1.770 | 1.870 |
| **RO.2135. EBA.969** | **Layanan Bantuan Hukum** | **Layanan** | **N/A** | **48** | **49** | **50** |
| IKRO.2135. EBA.969.1 | Jumlah kasus hukum yang terselesaikan di Ditjen Pendidikan Islam | Layanan | N/A | 5 | 5 | 5 |
| **RO.2135. EBA.958** | **Jumlah kasus hukum yang terselesaikan di Ditjen Pendidikan Islam** | **Layanan** | **75** | **76** | **78** | **81** |
| IKRO.2135. EBA.958.1 | Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi di Ditjen Pendidikan Islam | Konten | 2.336 | 2.786 | 3.311 | 3.886 |
| IKRO.2135. EBA.958.2 | Jumlah satuan kerja yang menyelenggarakan PPID di Ditjen Pendidikan Islam | Lembaga | N/A | 110 | 113 | 116 |
| **RO.2135. EBA.963** | **Layanan Data dan Informasi** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| IKRO.2135. EBA.963.1 | Jumlah data Statistik yang dipublikasi di Ditjen Pendidikan Islam | Dokumen | N/A | 3 | 3 | 4 |
| IKRO.2135. EBA.963.2 | jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital | Layanan | N/A | 3 | 3 | 4 |
| **RO.2135. EBD.974** | **Layanan Penyelenggaraan Kearsipan di Ditjen Pendidikan Islam** | **Dokumen** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| IKRO.2135. EBD.974.1 | Jumlah Arsip Digitalisasi dan mudah diakses di Ditjen Pendidikan Islam | Dokumen | 2.487 | 2.487 | 3.730 | 4.974 |
| **RO.2135. EBB.971** | **Layanan Prasarana Internal di Ditjen Pendidikan Islam** | **Layanan** | **N/A** | **414** | **422** | **431** |
| IKRO.2135. EBB.971.1 | Jumlah Layanan Prasarana Internal di Ditjen Pendidikan Islam | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **515** | **520** | **1.000** | **1.010** | **1.020** | **1.030** | **1.040** | |
| 377 | 381 | | | | | | |
| 77,5 | 80 | | | | | | |
| **49** | **50** | **1.000** | **1.020** | **1.040** | **1.060** | **1.081** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1.970 | 2.070 | | | | | | |
| **51** | **52** | **1.000** | **1.020** | **1.040** | **1.060** | **1.081** | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| **84** | **88** | **16.610** | **17.036** | **17.667** | **18.298** | **19.130** | |
| 4.501 | 5.131 | | | | | | |
| 119 | 121 | | | | | | |
| **2** | **2** | **3.494** | **3.494** | **5.241** | **5.241** | **5.241** | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| **2** | **3** | **1.000** | **1.000** | **1.500** | **1.500** | **2.000** | |
| 6.217 | 7.461 | | | | | | |
| **439** | **448** | **54.609** | **55.680** | **56.772** | **57.885** | **59.020** | |
| 1 | 1 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2135. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal di Ditjen Pendidikan Islam** | **Unit** | **N/A** | **31** | **33** | **34** |
| IKRO.2135. EBB.951.1 | Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap di Ditjen Pendidikan Islam | Unit | 8.957 | 8.960 | 8.965 | 8.970 |
| **RO.2135. EBA.959** | **Layanan Protokoler di Ditjen Pendidikan Islam** | **Layanan** | **1** | **6** | **7** | **8** |
| IKRO.2135. EBA.959.1 | Jumlah tamu pimpinan yang difasilitasi di Ditjen Pendidikan Islam | Layanan | 72 | 50 | 50 | 50 |
| **RO.2135. EBA.962** | **Layanan Umum di Ditjen Pendidikan Islam** | **Layanan** | **669** | **667** | **704** | **744** |
| IKRO.2135. EBA.962.1 | Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan di Ditjen Pendidikan Islam | Layanan | 56 | 40 | 40 | 40 |
| **RO.2135. EBA.994** | **Layanan Perkantoran di Ditjen Pendidikan Islam** | **Layanan** | **4.442** | **4.305** | **4.442** | **4.579** |
| IKRO.2135. EBA.994.1 | Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap di Ditjen Pendidikan Islam | Unit | 30.414 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **2138 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen** | | | | | | |
| **SK.2138.1** | **Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Dukungan Manajemen Ditjen Bimas Kristen** | | | | | |
| IKSK.2138.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Kristen | Nilai | 70.00 | 83 | 83,83 | 84,67 |
| IKSK.2138.1.2 | Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Persen | 97 | 97 | 97,5 | 98 |
| IKSK.2138.1.3 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen | Nilai | 94,73 | 95,2 | 95,68 | 96,16 |
| IKSK.2138.1.4 | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ditjen Bimas Kristen | Persen | 64,23 | 65,69 | 68,61 | 71,53 |
| IKSK.2138.1.5 | Persentase Laporan Keuangan Ditjen Bimas Kristen Semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu | Jumlah | 90 | 92 | 93 | 94 |
| IKSK.2138.1.6 | Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBP dan BLU Ditjen Bimas Kristen | Persen | 92,86 | 94 | 94,5 | 95 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **36** | **38** | **14.976** | **15.689** | **16.436** | **17.219** | **18.039** | |
| 8.975 | 8.980 | | | | | | |
| **9** | **10** | **1.000** | **1.143** | **1.286** | **1.429** | **1.571** | |
| 50 | 50 | | | | | | |
| **785** | **829** | **45.044** | **47.433** | **49.948** | **52.597** | **55.386** | |
| 40 | 40 | | | | | | |
| **4.716** | **4.853** | **5.328.673** | **5.850.109** | **6.014.455** | **5.821.713** | **5.986.060** | |
| 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| | | **223.734** | **271.839** | **310.429** | **354.980** | **415.381** | **[BIMAS KRISTEN] Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen** |
| | | | | | | | |
| 85,51 | 86,37 | | | | | | |
| 98,5 | 99 | | | | | | |
| 96,64 | 97,12 | | | | | | |
| 74,45 | 80,29 | | | | | | |
| 95 | 96 | | | | | | |
| 95,5 | 96 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2138.1.7 | Persentase Satuan Kerja pada Ditjen Bimas Kristen yang menyusun RKBMN tepat waktu | Persen | N/A | 36,36 | 45,45 | 68,18 |
| IKSK.2138.1.8 | Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Bimas Kristen | Nilai | 71 | 72 | 73 | 74 |
| IKSK.2138.1.9 | Persentase satuan kerja pada Ditjen Bimas Kristen yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Persen | 36,36 | 36,36 | 45,45 | 54,55 |
| IKSK.2138.1.10 | Persentase ASN Ditjen Bimas Kristen yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif | Persen | N/A | 1 | 2 | 3 |
| IKSK.2138.1.11 | Persentase ASN Ditjen Bimas Kristen yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Persen | N/A | 5 | 7 | 8 |
| IKSK.2138.1.12 | Persentase Rancangan Peraturan Ditjen Bimas Kristen yang diselesaikan sesuai perencanaan | Jumlah | N/A | 87,5 | 90 | 92,5 |
| IKSK.2138.1.13 | Persentase kasus hukum pada Ditjen Bimas Kristen yang terselesaikan | Persen | 80 | 91 | 83 | 83 |
| IKSK.2138.1.14 | Persentase rekomendasi rohaniwan, pengajar dan pelajar asing yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Kristen | Persen | 95 | 73,6 | 73,68 | 73,77 |
| IKSK.2138.1.15 | Persentase Digitalisasi Arsip Ditjen Bimas Kristen dan mudah di akses | Persen | 80 | 82 | 85 | 88 |
| IKSK.2138.1.16 | Persentase sarana dan prasarana perkantoran Ditjen Bimas Kristen yang dikembangkan berbasis roadmap | Persen | 75 | 80 | 85 | 88 |
| IKSK.2138.1.17 | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID Ditjen Bimas Kristen | Nilai | N/A | 80 | 81 | 82 |
| IKSK.2138.1.18 | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi oleh Ditjen Bimas Kristen | Persen | N/A | 10 | 15 | 20 |
| IKSK.2138.1.19 | Indeks Pembangunan Statistik Ditjen Bimas Kristen | Nilai | N/A | 2,72 | 3 | 3 |
| IKSK.2138.1.20 | Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital Ditjen Bimas Kristen | Nilai | N/A | 50 | 60 | 70 |
| **RO.2138. EBD.952** | **Layanan Perencanaan dan Penganggaran** | **Dokumen** | **1** | **1** | **1** | **1** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 90,91 | 99 | | | | | | |
| 75 | 76 | | | | | | |
| 68,18 | 90,91 | | | | | | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 9 | 10 | | | | | | |
| 95 | 97,5 | | | | | | |
| 83 | 83 | | | | | | |
| 73,86 | 73,95 | | | | | | |
| 90 | 92 | | | | | | |
| 90 | 95 | | | | | | |
| 83 | 84 | | | | | | |
| 25 | 30 | | | | | | |
| 3 | 3,5 | | | | | | |
| 75 | 80 | | | | | | |
| 1 | 1 | 898 | 1.500 | 2.200 | 3.191 | 4.514 | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2138. EBD.952.1 | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Bimas Kristen | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2138. EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IKRO.2138. EBD.953.1 | Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan Ditjen Bimas Kristen | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **RO.2138. EBA.960** | **Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2138. EBA.960.1 | Jumlah laporan kinerja satuan kerja pada Ditjen Bimas Kristen yang disusun sesuai standar | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2138. EBD.961** | **Layanan Reformasi Kinerja** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2138. EBD.961 | Jumlah kegiatan penyusunan laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Kegiatan | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RO.2138. EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2138. EBD.955.1 | Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai indikator pelaksanaan anggaran diatas 90 | Nilai | 7 | 7 | 7 | 7 |
| IKRO.2138. EBD.955.2 | Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Ditjen Bimas Kristen | Jumlah | 88 | 90 | 94 | 98 |
| IKRO.2138. EBD.955.3 | Jumlah Laporan Keuangan Ditjen Bimas Kristen semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.2138. EBD.955.4 | Jumlah Penerimaan PNBP dan BLU Ditjen Bimas Kristen | Rupiah | 46.154.191.000 | 52.673.430.000 | 53.517.839.000 | 54.900.000.000 |
| IKRO.2138. EBD.955.5 | Jumlah Realisasi PNBP dan BLU Ditjen Bimas Kristen | Rupiah | 47.606.191.000 | 49.513.024.200 | 50.574.357.855 | 52.155.000.000 |
| **RO.2138. EBA.956** | **Layanan BMN** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2138. EBA.956.1 | Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Satker | N/A | 8 | 10 | 15 |
| IKRO.2138. EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2138. EBC.954.1 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Kristen yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN | Orang | N/A | 60 | 80 | 100 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 4 | 984 | 1.131 | 1.301 | 1.496 | 1.720 | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| **1** | **1** | **1.834** | **2.109** | **2.425** | **2.789** | **3.207** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **1** | **1** | **250** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 1 | 1 | 2.502 | 2.877 | 3.309 | 3.805 | 4.376 | |
| 8 | 8 | | | | | | |
| 102 | 110 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 57.484.047.000 | 60.186.466.000 | | | | | | |
| 54.897.264.885 | 57.779.007.360 | | | | | | |
| **1** | **1** | **300** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | |
| 20 | 22 | | | | | | |
| 1 | 1 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 120 | 140 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2138. EBC.954.2 | Jumlah satuan kerja pada Ditjen Bimas Kristen memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Satker | 8 | 8 | 10 | 12 |
| IKRO.2138. EBC.954.3 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Kristen yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif | Orang | N/A | 3 | 10 | 15 |
| IKRO.2138. EBC.954.4 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Kristen yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Orang | N/A | 53 | 63 | 74 |
| IKRO.2138. EBC.996 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | Layanan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IKRO.2138. EBC.996.1 | Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan | Layanan | N/A | 1 | 0 | 0 |
| **RO.2138. EBA.969** | **Layanan Bantuan Hukum** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2138. EBA.969.1 | Jumlah kasus hukum Ditjen Bimas Kristen yang terselesaikan | Jumlah | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **RO.2138. EBA.957** | **Layanan Hukum** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2138. EBA.957.1 | Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan Ditjen Bimas Kristen | Rancangan | 400 | 350 | 360 | 370 |
| IKRO.2138. EBA.957.2 | Jumlah rekomendasi rohaniwan, pengajar dan pelajar asing yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Kristen | Rekomen-dasi | 1140 | 839 | 840 | 841 |
| **RO.2138. CAN.951** | **Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | **Unit** | **N/A** | **88** | **90** | **100** |
| IKRO.2138. CAN.951.1 | Jumlah Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keagamaan Kristen yang tersedia | Unit | N/A | 88 | 90 | 100 |
| **RO.2138. CAN.971** | **Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | **Unit** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2138. CAN.971.1 | Prasarana Internal Keagamaan Kristen Bidang Teknologi Informasi | Unit | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO 2138. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Unit** | **1** | **1** | **1** | **1** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 15 | 20 | | | | | | |
| 20 | 25 | | | | | | |
| 85 | 95 | | | | | | |
| 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **1** | **1** | **280** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **10.000** | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| **1** | **1** | **250** | **300** | **300** | **300** | **300** | |
| 380 | 390 | | | | | | |
| 842 | 843 | | | | | | |
| **120** | **150** | **1.168** | **1.343** | **1.545** | **1.776** | **2.043** | |
| 120 | 150 | | | | | | |
| **1** | **1** | **100** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **1** | **1** | **500** | **600** | **700** | **800** | **900** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2138. EBB.951.1 | Jumlah Layanan Sarana Internal | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO 2138. EBB.971** | **Layanan Prasarana Internal** | **Unit** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2138. EBB.971.1 | Jumlah Layanan Prasarana Internal | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2138. EBA.962** | **Layanan Umum** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2138. EBA.962.1 | Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan | Pengadaan | N/A | 16 | 18 | 18 |
| **RO.2138. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2138. EBA.994.1 | Jumlah layanan perkantoran | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2138. EBA.994.2 | Jumlah ASN yang menerima layanan operasional perkantoran | Orang | N/A | 168 | 168 | 175 |
| **RO.2138. EBD.974** | **Layanan Penyelenggaraan Kearsipan** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2138. EBD.974.1 | Jumlah Arsip Digitalisasi dan mudah di akses Pada Ditjen Bimas Kristen | Jumlah | 160 | 164 | 170 | 176 |
| **RO.2138. EBA.958** | **Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2138. EBA.958.2 | NIlai kematangan penyelenggaraan PPID Ditjen Bimas Kristen | Nilai | N/A | 80 | 81 | 82 |
| IKRO.2138. EBA.958.3 | Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi oleh Ditjen Bimas Kristen | Konten | 24 | 26 | 30 | 36 |
| **RO.2138. EBA.963** | **Layanan Data dan Informasi** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2138. EBA.963.1 | Jumlah data Statistik Ditjen Bimas Kristen yang di publikasi | Jumlah | N/A | 1 | 2 | 3 |
| IKRO.2138. EBA.963.2 | Jumlah layanan keagamaan Kristen dan pendidikan keagamaan Kristen berbasis digital | Layanan | N/A | 2 | 2 | 2 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 380 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 18 | 18 | | | | | | |
| 1 | 1 | 212.590 | 244.478 | 281.150 | 323.323 | 371.821 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 182 | 200 | | | | | | |
| 1 | 1 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 180 | 184 | | | | | | |
| 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 83 | 84 | | | | | | |
| 46 | 60 | | | | | | |
| 1 | 1 | 300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **2141 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik** | | | | | | |
| **SK.2141.1** | **Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen Ditjen Bimas Katolik** | | | | | |
| IKSK.2141.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Katolik | Nilai | N/A | 80 | 81 | 82 |
| IKSK.2141.1.2 | Persentase laporan kinerja satuan kerja Ditjen Bimas Katolik sesuai standar | Persen | N/A | 80 | 85 | 90 |
| IKSK.2141.1.3 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Katolik | Nilai | 93,3 | 94 | 95 | 96 |
| IKSK.2141.1.4 | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ditjen Bimas Katolik | Persen | N/A | 5,88 | 11,76 | 17,65 |
| IKSK.2141.1.5 | Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II Ditjen Bimas Katolik yang sesuai standar dan tepat waktu | Persen | 213 | 80 | 85 | 90 |
| IKSK.2141.1.6 | Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBP dan BLU Ditjen Bimas Katolik | Persen | 78,92 | 85 | 89 | 93 |
| IKSK.2141.1.7 | Persentase Satuan Kerja Ditjen Bimas Katolik yang menyusun RKBMN tepat waktu | Persen | N/A | 20 | 40 | 60 |
| IKSK.2141.1.8 | Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Bimas Katolik | Nilai | 79,64 | 79,64 | 79,64 | 79,64 |
| IKSK.2141.1.9 | Persentase satuan kerja Ditjen Bimas Katolik yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Persen | N/A | 80 | 85 | 90 |
| IKSK.2141.1.10 | Persentase ASN Ditjen Bimas Katolik yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif | Persen | N/A | 0 | 4,27 | 8,55 |
| IKSK.2141.1.11 | Persentase ASN Ditjen Bimas Katolik yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Persen | N/A | 64,1 | 72,65 | 81,2 |
| IKSK.2141.1.12 | Persentase rancangan peraturan pada Ditjen Bimas Katolik yang diselesaikan sesuai perencanaan | Persen | N/A | 20 | 20 | 20 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | 42.749 | 49.075 | 56.437 | 64.902 | 74.638 | [BIMAS KATOLIK] Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik |
| | | | | | | | |
| 83 | 84 | | | | | | |
| 95 | 96 | | | | | | |
| 97 | 97 | | | | | | |
| 23,53 | 29,41 | | | | | | |
| 95 | 96 | | | | | | |
| 95 | 96 | | | | | | |
| 80 | 85 | | | | | | |
| 79,64 | 79,64 | | | | | | |
| 95 | 96 | | | | | | |
| 12,82 | 17,09 | | | | | | |
| 90,6 | 95 | | | | | | |
| 20 | 20 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2141.1.13 | Persentase rekomendasi tokoh agama/ rohaniwan, pendidik, dan pelajar asing yang diterbitkan Ditjen Bimas Katolik | Persen | N/A | 23,33 | 43,33 | 63,33 |
| IKSK.2141.1.14 | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses pada Ditjen Bimas Katolik | Persen | N/A | 18,62 | 23,73 | 32,22 |
| IKSK.2141.1.15 | Persentase sarana dan prasarana perkantoran Ditjen Bimas Katolik yang dikembangkan berbasis roadmap | Persen | N/A | 20 | 25 | 33,35 |
| IKSK.2141.1.16 | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID Ditjen Bimas Katolik | Nilai | N/A | 94 | 94 | 94 |
| IKSK.2141.1.17 | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan Ditjen Bimas Katolik yang dipublikasi | Persen | N/A | 18,26 | 37,39 | 57,39 |
| IKSK.2141.1.18 | Indeks Pembangunan Statistik Ditjen Bimas Katolik | Nilai | N/A | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| IKSK.2141.1.19 | Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital Ditjen Bimas Katolik | Nilai | N/A | 60 | 65 | 70 |
| **RO.2141. CAN.997** | **Pengadaan Perangkat TIK** | **Unit** | **31** | **29** | **35** | **40** |
| IKRO.2141. CAN.997.1 | Jumlah pengadaan perangkat TIK pada Ditjen Bimas Katolik yang dikembangkan berbasis roadmap | Unit | 31 | 29 | 35 | 40 |
| **RO.2141. EBA.956** | **Layanan BMN** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2141. EBA.956.1 | Jumlah Satuan Kerja Ditjen Bimas Katolik yang menyusun RKBMN tepat waktu | Satker | N/A | 213 | 213 | 213 |
| **RO.2141. EBA.957** | **Layanan Hukum** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2141. EBA.957 .1 | Jumlah rancangan peraturan pada Ditjen Bimas Katolik yang diselesaikan sesuai perencanaan | Dokumen | N/A | 2 | 2 | 1 |
| IKRO.2141. EBA.957 .2 | Jumlah rekomendasi tokoh agama, pendidik dan pelajar asing yang diterbitkan Ditjen Bimas Katolik | Rekomendasi | N/A | 350 | 300 | 300 |
| **RO 2141. EBA.958** | **Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi** | **Layanan** | **N/A** | **3** | **1** | **1** |
| IKRO 2141. EBA.958.1 | Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Katolik yang menyelenggarakan PPID | Satker | N/A | 1 | 1 | 1 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 83,33 | 85 | | | | | | |
| 49,18 | 50 | | | | | | |
| 50,03 | 60 | | | | | | |
| 94 | 94 | | | | | | |
| 78,26 | 80 | | | | | | |
| 2,3 | 2,6 | | | | | | |
| 75 | 80 | | | | | | |
| **46** | **53** | **396** | **525** | **690** | **913** | **1.209** | |
| 46 | 53 | | | | | | |
| **1** | **1** | **70** | **100** | **115** | **132** | **152** | |
| 213 | 213 | | | | | | |
| **1** | **1** | **75** | **86** | **99** | **114** | **131** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 300 | 250 | | | | | | |
| **1** | **1** | **1.374** | **1.400** | **1.610** | **1.852** | **2.129** | |
| 1 | 1 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2141. EBA.959** | **Layanan Protokoler** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2141. EBA.959.1 | Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | Konten | N/A | 420 | 0 | 0 |
| **RO.2141. EBA.960** | **Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2141. EBA.960.1 | Jumlah kegiatan penyusunan laporan kinerja pada Ditjen Bimas Katolik | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2141. EBA.962** | **Layanan Umum** | **Layanan** | **30** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2141. EBA.962.1 | Jumlah pengadaan barang dan jasa pada Ditjen Bimas Katolik yang diselesaikan | Paket | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2141. EBA.963** | **Layanan Data dan Informasi** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2141. EBA.963.1 | Jumlah data Statistik Ditjen Bimas Katolik yang di publikasi | Data | N/A | 21 | 21 | 21 |
| IKRO.2141. EBA.963.2 | Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan Ditjen Bimas Katolik berbasis digital | Layanan | N/A | 5 | 5 | 5 |
| **RO.2141. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **119** | **193** | **209** | **209** |
| IKRO.2141. EBA.994.1 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Katolik yang menerima layanan operasional perkantoran | Orang | N/A | 117 | 117 | 117 |
| **RO.2141. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Unit** | **109** | **187** | **200** | **230** |
| IKRO.2141. EBB.951.1 | Jumlah sarana internal Ditjen Bimas Katolik yang disediakan | Unit | N/A | 187 | 200 | 230 |
| **RO.2141. EBB.971** | **Layanan Prasarana Internal** | **Unit** | **N/A** | **2** | **2** | **1** |
| IKRO.2141. EBB.971.1 | Jumlah prasarana perkantoran Ditjen Bimas Katolik yang dikembangkan berbasis roadmap | Unit | N/A | 2 | 2 | 1 |
| RO.2141. EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | Orang | N/A | 157 | 157 | 157 |
| IKRO.2141. EBC.954.1 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Katolik yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN | Orang | N/A | 65 | 70 | 75 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **1** | **1** | **75** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **1** | **1** | **75** | **86** | **99** | **114** | **131** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **1** | **1** | **33** | **38** | **44** | **50** | **58** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **1** | **1** | **90** | **104** | **119** | **137** | **157** | |
| 21 | 21 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| **209** | **209** | **37.426** | **43.353** | **49.397** | **56.509** | **64.801** | |
| 117 | 117 | | | | | | |
| **265** | **304** | **1.529** | **1.589** | **2.011** | **2.233** | **2.296** | |
| 265 | 304 | | | | | | |
| **1** | **1** | **371** | **400** | **460** | **529** | **608** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 157 | 157 | 75 | 86 | 99 | 114 | 131 | |
| 80 | 85 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2141. EBC.954.2 | Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Katolik yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Satker | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2141. EBC.954.3 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Katolik yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif | Orang | N/A | 0 | 5 | 10 |
| IKRO.2141. EBC.954.4 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Katolik yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Orang | N/A | 75 | 85 | 95 |
| **RO.2141. EBD.952** | **Layanan Perencanaan dan Penganggaran** | **Dokumen** | **N/A** | **15** | **17** | **20** |
| IKRO.2141. EBD.952.1 | Jumlah dokumen perencanaan Ditjen Bimas Katolik yang dihasilkan | Dokumen | N/A | 4 | 4 | 4 |
| RO.2141. EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Dokumen | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2141. EBD.953.1 | Jumlah laporan evaluasi Ditjen Bimas Katolik yang disusun tepat waktu | Dokumen | N/A | 12 | 12 | 12 |
| **RO.2141. EBD.955** | **Layanan Manajemen Keuangan** | **Dokumen** | **N/A** | **13** | **15** | **17** |
| IKRO.2141. EBD.955.1 | Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Katolik yang memiliki Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran diatas 90 | Satker | 93,3 | 178 | 185 | 190 |
| IKRO.2141. EBD.955.2 | Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ditjen Bimas Katolik | Dokumen | N/A | 0 | 1 | 2 |
| IKRO.2141. EBD.955.3 | Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II Ditjen Bimas Katolik yang sesuai standar dan tepat waktu | Dokumen | 213.00 | 213 | 213 | 213 |
| IKRO.2141. EBD.955.4 | Jumlah Penerimaan PNBP dan BLU Ditjen Bimas Katolik | Nilai | 1.815.855,69 | 1.544.750,00 | 1.920.650,00 | 1.927.750,00 |
| IKRO.2141. EBD.955.5 | Jumlah Realisasi PNBP dan BLU Ditjen Bimas Katolik | Nilai | 1.205.489,17 | 1.529.302,50 | 1.901.443,50 | 1.908.472,50 |
| **RO.2141. EBD.961** | **Layanan Reformasi Kinerja** | **Dokumen** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2141. EBD.961.1 | Jumlah laporan kinerja satuan kerja Ditjen Bimas Katolik yang disusun sesuai standar | Dokumen | N/A | 1 | 1 | 1 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 15 | 20 | | | | | | |
| 106 | 117 | | | | | | |
| **23** | **26** | **556** | **595** | **805** | **1.065** | **1.384** | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 1 | 1 | 37 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
| 12 | 12 | | | | | | |
| **20** | **23** | **375** | **450** | **587** | **794** | **1.049** | |
| 207 | 213 | | | | | | |
| 3 | 4 | | | | | | |
| 213 | 213 | | | | | | |
| 1.943.300,00 | 1.956.450,00 | | | | | | |
| 1.923.867,00 | 1.936.885,50 | | | | | | |
| **1** | **1** | **75** | **86** | **99** | **114** | **131** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2141. EBD.974** | **Layanan Penyelenggaraan Kearsipan** | **Dokumen** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2141. EBD.974.1 | Jumlah Arsip Ditjen Bimas Katolik yang Digitalisasi dan mudah di akses | Dokumen | N/A | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| **2144 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu** | | | | | | |
| **SK.2144.1** | **Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen Ditjen Bimas Hindu** | | | | | |
| IKSK.2144.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Hindu | Nilai | 71 | 85 | 86 | 88 |
| **RO.2144. EBD.952** | **Layanan Perencanaan dan Penganggaran** | **Dokumen** | **28** | **86** | **122** | **122** |
| IKRO.2144. EBD.952.1 | Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan Ditjen Bimas Hindu | Dokumen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **RO.2144. EBD.953** | **Layanan Pemantauan dan Evaluasi** | **Dokumen** | **7** | **7** | **7** | **7** |
| IKRO.2144. EBD.953.1 | Jumlah kegiatan pengukuran capaian Nilai Kinerja Anggaran Dirjen Bimas Hindu | Kegiatan | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IKSK.2144.1.2 | persentase satuan kerja yang memperoleh nilai pembanguanan zona integritas minimal 75 | Persen | 0 | 0 | 0 | 20 |
| IKSK.2144.1.3 | Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Persen | 75 | 75 | 77 | 79 |
| **RO.2144. EBD.961** | **Layanan Reformasi Kinerja** | **Dokumen** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| IKRO.2144. EBD.961.1 | Jumlah laporan kinerja satuan kerja Ditjen Bimas Hindu sesuai standar | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IKRO.2144. EBD.961.2 | Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IKSK.2144.1.4 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai | 95 | 95 | 96 | 96 |
| IKSK.2144.1.5 | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan | Persen | 100 | 80 | 81 | 82 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 117 | 134 | 155 | 178 | 205 | |
| 3.000 | 3.100 | | | | | | |
| | | **38.680** | **56.844** | **56.247** | **57.539** | **57.536** | **[BIMAS HINDU] Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu** |
| | | | | | | | |
| 89 | 90 | | | | | | |
| **110** | **108** | **2.529** | **4.103** | **4.203** | **4.203** | **4.203** | |
| 6 | 6 | | | | | | |
| **7** | **7** | **402** | **633** | **633** | **633** | **633** | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 20 | 20 | | | | | | |
| 81 | 82 | | | | | | |
| **4** | **4** | **300** | **500** | **50** | **50** | **50** | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 96 | 96 | | | | | | |
| 83 | 84 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2144.1.6 | Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Persen | 100 | 96 | 97 | 98 |
| IKSK.2144.1.7 | Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBP dan BLU | Persen | N/A | 96 | 97 | 98 |
| IKSK.2144.1.8 | Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Persen | 100 | 96 | 97 | 98 |
| **RO.2144. EBA.956** | **Layanan BMN** | **Layanan** | **20** | **20** | **30** | **40** |
| IKRO.2144. EBA.956.1 | Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Dokumen | 20 | 20 | 30 | 40 |
| **RO.2144. EBD.955** | **Layanan Manajemen Keuangan** | **Dokumen** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| IKRO.2144. EBD.955.1 | Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Ditjen Bimas Hindu | Dokumen | 10 | 10 | 11 | 12 |
| IKRO.2144. EBD.955.2 | Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IKRO.2144. EBD.955.3 | Jumlah Penerimaan PNBP dan BLU Ditjen Bimas Hindu | Lembaga | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IKRO.2144. EBD.955.4 | Jumlah Realisasi PNBP dan BLU Ditjen Bimas Hindu | Lembaga | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IKRO.2144. EBD.955.5 | Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Hindu yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKSK.2144.1.9 | Indeks Profesionalisme ASN | Nilai | 80 | 81 | 82 | 83 |
| IKSK.2144.1.10 | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Persen | N/A | 75 | 80 | 82 |
| IKSK.2144.1.11 | Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif | Persen | N/A | 5 | 6 | 8 |
| IKSK.2144.1.12 | Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Persen | 60 | 0 | 63 | 0 |
| **RO.2144. EBC.954** | **Layanan Manajemen SDM** | **Dokumen** | **20** | **20** | **20** | **20** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 99 | 99 | | | | | | |
| 99 | 99 | | | | | | |
| 99 | 99 | | | | | | |
| **50** | **60** | **200** | **260** | **260** | **260** | **260** | |
| 50 | 60 | | | | | | |
| **5** | **5** | **580** | **700** | **700** | **700** | **700** | |
| 13 | 14 | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 84 | 85 | | | | | | |
| 85 | 90 | | | | | | |
| 9 | 10 | | | | | | |
| 65 | 0 | | | | | | |
| **20** | **20** | **793** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2144. EBC.954.1 | Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori minimal sedang | Orang | 65 | 65 | 65 | 70 |
| IKRO.2144. EBC.954.2 | Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2144. EBC.954.3 | Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif | Orang | 6 | 6 | 7 | 8 |
| IKSK.2144.1.13 | Persentase kasus hukum yang terselesaikan | Persen | 100 | 96 | 97 | 98 |
| IKSK.2144.1.14 | Persentase rekomendasi izin tokoh agama, tenaga pendidik dan pelajar asing Ditjen Bimas Hindu | Persen | 80 | 80 | 80 | 80 |
| IKSK.2144.1.15 | Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan | Persen | 90 | 92 | 93 | 94 |
| **RO.2144. EBA.957** | **Layanan Hukum** | **Layanan** | **N/A** | **20** | **20** | **20** |
| IKRO.2144. EBA.957.1 | Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan | Rancangan Peraturan | 487 | 100 | 110 | 120 |
| IKRO.2144. EBA.957.2 | Jumlah kasus hukum yang terselesaikan | Kasus Hukum | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.2144. EBA.957.3 | Jumlah rekomendasi izin tokoh agama, tenaga pendidik dan pelajar asing Ditjen Bimas Hindu | Rekomendasi | 37 | 20 | 22 | 23 |
| IKSK.2144.1.16 | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID | Nilai | 80 | 80.00 | 81 | 82 |
| IKSK.2144.1.17 | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | Persen | 100 | 10 | 25 | 30 |
| **RO.2144. EBA.958** | **Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi** | **Layanan** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| IKRO.2144. EBA.958.1 | Jumlah satuan kerja yang menyelenggarakan PPID Ditjen Bimas Hindu | Satuan Kerja | 6 | 6 | 6 | 6 |
| IKRO.2144. EBA.958.2 | Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi Ditjen Bimas Hindu | Konten | 80 | 100 | 125 | 165 |
| IKSK.2144.1.18 | Indeks Pembangunan Statistik | Nilai | N/A | 1.80 | 2.00 | 2.20 |
| IKSK.2144.1.19 | Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital | Nilai | 50 | 55 | 60 | 65 |
| **RO.2144. EBA.963** | **Layanan Data dan Informasi** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 70 | 75 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 9 | 10 | | | | | | |
| 99 | 99 | | | | | | |
| 80 | 80 | | | | | | |
| 95 | 95 | | | | | | |
| **20** | **20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 130 | 140 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 24 | 25 | | | | | | |
| 83 | 84 | | | | | | |
| 40 | 50 | | | | | | |
| **3** | **3** | **2.400** | **2.500** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |
| 6 | 6 | | | | | | |
| 230 | 345 | | | | | | |
| 2.40 | 2.60 | | | | | | |
| 70 | 75 | | | | | | |
| **1** | **1** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2144. EBA.963.1 | Jumlah data statistik yang dipublikasi Ditjen Bimas Hindu | Data | 6 | 6 | 6 | 6 |
| IKRO.2144. EBA.963.2 | Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital Ditjen Bimas Hindu | Layanan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IKSK.2144.1.20 | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses | Persen | 86 | 93 | 95 | 95 |
| IKSK.2144.1.21 | Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Persen | N/A | 75 | 80 | 85 |
| **RO.2144. CAN.951** | **Sarana Teknologi Informasi dan Komunukasi yang disediakan** | **Kab/Kota** | **31** | **67** | **48** | **60** |
| IKRO.2144. CAN.951.1 | Jumlah Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi | Unit | 31 | 60 | 70 | 80 |
| **RO.2144. EBA.962** | **Layanan Umum** | **Layanan** | **30** | **48** | **49** | **49** |
| IKRO.2144. EBA.962.1 | Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan Ditjen Bimas Hindu | Unit | N/A | 50 | 60 | 70 |
| **RO.2144. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **120** | **112** | **115** | **122** |
| IKRO.2144. EBA.994.2 | Jumlah pegawai yang difasilitasi | Orang | 104 | 128 | 128 | 128 |
| **RO.2144. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Layanan** | **109** | **131** | **207** | **207** |
| IKRO.2144. EBB.951.1 | Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Unit | 350 | 500 | 550 | 600 |
| **RO.2144. EBB.971** | **Layanan Prasarana Internal** | **Layanan** | **N/A** | **2** | **2** | **2** |
| IKRO.2144. EBB.971.1 | Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Unit | N/A | 10 | 12 | 14 |
| **RO.2144. EBD.974** | **Layanan Penyelenggaraan Kearsipan** | **Layanan** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| IKRO.2144. EBD.974.1 | Jumlah Arsip Digitalisasi dan mudah di akses | Dokumen | 100 | 2000 | 2500 | 3000 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 6 | 6 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 95 | 95 | | | | | | |
| 88 | 90 | | | | | | |
| **48** | **48** | **750** | **1.545** | **1.800** | **1.760** | **1.760** | |
| 90 | 100 | | | | | | |
| **49** | **49** | **1.878** | **3.879** | **2.938** | **2.858** | **2.858** | |
| 80 | 90 | | | | | | |
| **112** | **112** | **26.316** | **36.724** | **36.664** | **38.076** | **38.073** | |
| 128 | 128 | | | | | | |
| **207** | **207** | **1.456** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | |
| 650 | 700 | | | | | | |
| **2** | **2** | **876** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | |
| 16 | 20 | | | | | | |
| **2** | **2** | **100** | **200** | **200** | **200** | **200** | |
| 3500 | 4000 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **2146 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha** | | | | | | |
| **SK.2146.1** | **Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen Ditjen Bimas Buddha** | | | | | |
| IKSK.2146.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Buddha | Nilai | 81,84 | 85 | 87 | 90 |
| **RO 2146 EBD 952** | **Layanan Perencanaan dan Penganggaran** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO 2146 EBD 952.1 | Jumlah dokumen perencanaan Ditjen Bimas Buddha yang dihasilkan | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **RO 2146 EBD 953** | **Layanan Pemantauan dan Evaluasi** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO 2146 EBD 953.1 | Jumlah laporan evaluasi Ditjen Bimas Buddha yang disusun tepat waktu | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IKSK.2146.1.2 | Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Persen | 90 | 92 | 94 | 96 |
| IKRO.2146. EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2146. EBA.960.1 | Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IKSK.2146.1.3 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Buddha | Nilai | 97,74 | 95 | 95,5 | 96 |
| IKSK.2146.1.4 | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ditjen Bimas Buddha | Persen | 79,38 | 79,5 | 80 | 82 |
| IKSK.2146.1.5 | Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II Ditjen Bimas Buddha yang sesuai standar dan tepat waktu | Jumlah | 95 | 95 | 96 | 97 |
| IKSK.2146.1.6 | Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBP dan BLU Ditjen Bimas Buddha | Persen | 111,04 | 91 | 93 | 95 |
| IKSK.2146.1.7 | Persentase Satuan Kerja Ditjen Bimas Buddha yang menyusun RKBMN tepat waktu | Persen | 75 | 75 | 75 | 77 |
| IKRO.2146. EBA.956 | Layanan BMN | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | 24.369 | **32.567** | **34.189** | **35.890** | **37.679** | **[BIMAS BUDDHA] Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha** |
| | | | | | | | |
| 91 | 92 | | | | | | |
| **1** | **1** | **1.116** | **1.250** | **1.313** | **1.378** | **1.447** | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| **1** | **1** | **20** | **150** | **158** | **165** | **174** | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 98 | 99 | | | | | | |
| 1 | 1 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 96,5 | 97 | | | | | | |
| 85 | 87 | | | | | | |
| 98 | 99 | | | | | | |
| 97 | 99 | | | | | | |
| 80 | 85 | | | | | | |
| 1 | 1 | 20 | 50 | 53 | 55 | 58 | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2146. EBA.956.1 | Jumlah Satuan Kerja Ditjen Bimas Buddha yang menyusun RKBMN tepat waktu | Satuan Kerja | 105 | 105 | 105 | 108 |
| **RO.2146. EBD.955** | **Layanan Manajemen Keuangan** | **Layanan** | **1** | **2** | **2** | **2** |
| IKRO.2146. EBD.955.1 | Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Buddha yang memiliki nilai indikator pelaksanaan anggaran diatas 90 | Dokumen | | 105 | 105 | 108 |
| IKRO.2146. EBD.955.2 | Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ditjen Bimas Buddha | | 135 | 197 | 198 | 203 |
| IKRO.2146. EBD.955.3 | Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II Ditjen Bimas Buddha yang sesuai standar dan tepat waktu | Dokumen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| IKRO.2146. EBD.955.4 | Jumlah Penerimaan PNBP dan BLU Ditjen Bimas Buddha | Rupiah | 4.064.000.700 | 4.473.700.000 | 4.499.600.000 | 4.599.350.000 |
| IKRO.2146. EBD.955.5 | Jumlah Realisasi PNBP dan BLU Ditjen Bimas Buddha | Rupiah | | 4.427.428.500 | 4.453.812.000 | 4.553.356.500 |
| IKSK.2146.1.8 | Indeks Profesionalisme ASN (Ditjen Bimas Buddha) | Nilai | 82,5 | 71 | 74 | 77 |
| IKSK.2146.1.9 | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Persen | N/A | 70 | 73 | 76 |
| IKSK.2146.1.10 | Persentase ASN Ditjen Bimas Buddha yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif | Persen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKSK.2146.1.11 | Persentase ASN Ditjen Bimas Buddha yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Persen | 93,14 | 25 | 30 | 35 |
| IKRO.2146. EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | Layanan | 110 | 30 | 50 | 53 |
| IKRO.2146. EBC.954.1 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Buddha yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN minimal kategori sedang | Orang | 66 | 70 | 75 | 80 |
| IKRO.2146. EBC.954.2 | Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Buddha yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Satker | n/a | 59 | 62 | 65 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 112 | 119 | | | | | | |
| **2** | **2** | **40** | **100** | **105** | **110** | **116** | |
| 112 | 119 | | | | | | |
| 211 | 216 | | | | | | |
| 6 | 6 | | | | | | |
| 4.799.800.000 | 4.868.750.000 | | | | | | |
| 4.751.802.000 | 4.820.062.500 | | | | | | |
| 80 | 81 | | | | | | |
| 79 | 80 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 40 | 45 | | | | | | |
| 55 | 58 | 80 | 150 | 158 | 165 | 174 | |
| 85 | 90 | | | | | | |
| 67 | 69 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2146. EBC.954.3 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Buddha yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/ Inspiratif | Orang | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.2146. EBC.954.4 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Buddha yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Orang | 95 | 33 | 40 | 46 |
| IKSK.2146.1.12 | Persentase rancangan peraturan Ditjen Bimas Buddha yang diselesaikan sesuai perencanaan | Persen | 90 | 90 | 92 | 94 |
| IKSK.2146.1.13 | Persentase kasus hukum Ditjen Bimas Buddha yang terselesaikan | Persen | 100 | 90 | 90 | 90 |
| IKSK.2146.1.14 | Persentase rekomendasi tokoh agama, pendidik dan pelajar asing yang diterbitkan Ditjen Bimas Buddha | Persen | 100 | 95 | 95 | 95 |
| **RO.2146. EBA.957** | **Layanan Hukum** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2146. EBA.957.1 | Jumlah rancangan peraturan Ditjen Bimas Buddha yang diselesaikan sesuai perencanaan | Dokumen | 203 | 125 | 127 | 129 |
| IKRO.2146. EBA.957.2 | Jumlah kasus hukum Ditjen Bimas Buddha yang terselesaikan | Kasus | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IKRO.2146. EBA.957.3 | Jumlah rekomendasi tokoh agama, pendidik dan pelajar asing yang diterbitkan Ditjen Bimas Buddha | Dokumen | 150 | 142 | 142 | 142 |
| IKSK.2146.1.15 | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID Ditjen Bimas Buddha | Nilai | N/A | 70 | 72 | 75 |
| IKSK.2146.1.16 | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi Ditjen Bimas Buddha | Persen | 36,74 | 40 | 45 | 50 |
| **RO.2146. EBA.958** | **Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi** | **Layanan** | **1** | **4** | **4** | **4** |
| IKRO.2146. EBA.958.1 | Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Buddha yang menyelenggarakan PPID | Satuan Kerja | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IKRO.2146. EBA.958.2 | Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi Ditjen Bimas | | 1150 | 1576 | 2174 | 3022 |
| IKSK.2146.1.17 | Indeks Pembangunan Statistik Ditjen Bimas Buddha | Nilai | 1,44 | 1,8 | 2 | 2,2 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 53 | 60 | | | | | | |
| 96 | 99 | | | | | | |
| 90 | 90 | | | | | | |
| 95 | 95 | | | | | | |
| **1** | **1** | **71** | **75** | **79** | **83** | **87** | |
| 130 | 130 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 142 | 142 | | | | | | |
| 78 | 80 | | | | | | |
| 50 | 50 | | | | | | |
| **4** | **4** | **993** | **1.043** | **1.095** | **1.150** | **1.207** | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 4231 | 5966 | | | | | | |
| 2,4 | 2,6 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2146.1.18 | Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital Ditjen Bimas Buddha | Nilai | 21,74 | 30 | 35 | 40 |
| **RO.2146. EBA.963** | **Layanan Data dan Informasi** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2146. EBA.963.1 | Jumlah data statistik Ditjen Bimas Buddha yang dipublikasi | Dokumen | 5 | 5 | 6 | 6 |
| IKRO.2146. EBA.963.2 | Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital Ditjen Bimas Buddha | Layanan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IKSK.2146.1.19 | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses Ditjen Bimas Buddha | Persen | 95 | 95 | 96 | 97 |
| IKSK.2146.1.20 | Persentase sarana dan prasarana perkantoran Ditjen Bimas Buddha yang dikembangkan berbasis roadmap | Persen | N/A | 35 | 40 | 45 |
| **RO.2146. EBB.971** | **Layanan Prasarana Internal** | **Unit** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2146. EBB.971.1 | Jumlah prasarana perkantoran Ditjen Bimas Buddha yang dikembangkan berbasis roadmap | Unit | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.2146. CAN.001** | **Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi** | **Unit** | **N/A** | **10** | **10** | **10** |
| IKRO.2146. CAN.001.1 | Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi Ditjen Bimas Buddha | Unit | N/a | 10 | 10 | 10 |
| **RO.2146. EBA.962** | **Layanan Umum** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2146. EBA.962.1 | Jumlah pengadaan barang dan jasa Ditjen Bimas Buddha yang diselesaikan | | N/A | 10 | 15 | 20 |
| **RO.2146. EBD.974** | **Layanan Penyelenggaraan Kearsipan** | **Dokumen** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2146. EBD.974.1 | Jumlah Arsip Digital dan mudah di akses Ditjen Bimas Buddha | Dokumen | N/A | 4432 | 2216 | 2000 |
| **RO.2146. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **25** | **129** | **129** | **129** |
| IKRO.2146. EBA.994.2 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Buddha yang menerima layanan operasional perkantoran | Orang | 99 | 129 | 129 | 129 |
| **RO.2146. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Layanan** | **76** | **57** | **59** | **62** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 45 | 50 | | | | | | |
| **1** | **1** | **373** | **392** | **411** | **430** | **451** | |
| 6 | 6 | | | | | | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 98 | 99 | | | | | | |
| 47 | 50 | | | | | | |
| **1** | **1** | **553** | **581** | **609** | **638** | **668** | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| **10** | **10** | **115** | **121** | **127** | **133** | **139** | |
| 10 | 10 | | | | | | |
| **1** | **1** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | |
| 25 | 25 | | | | | | |
| **1** | **1** | **18** | **50** | **51** | **53** | **56** | |
| 2000 | 2000 | | | | | | |
| **129** | **129** | **19.569** | **27.102** | **28.457** | **29.880** | **31.374** | |
| 129 | 129 | | | | | | |
| **65** | **68** | **1.290** | **1.357** | **1.421** | **1.489** | **1.560** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2146. EBB.951.1 | Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | | 0 | 0 | 30 | 40 |
| IKSK.2146.1.21 | Persentase satuan kerja yang memperoleh nilai pembanguanan zona integritas minimal 75 | Persen | 90 | 90 | 92 | 94 |
| **RO.2146. EBD.961** | **Layanan Reformasi Kinerja** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2146. EBD.961.1 | Jumlah kegiatan penyusunan laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Jumlah | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IKRO.2146. EBD.961.2 | Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 | Dokumen | 0 | 2 | 2 | 2 |
| **2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah** | | | | | | |
| **SK.2150.1** | **Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah** | | | | | |
| IKSK.2150.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah | Nilai | N/A | 90 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.2 | Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja Sesuai Standar | Persen | N/A | 75 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.3 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai | N/A | 94,25 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.4 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Persen | N/A | 90,5 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.5 | Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang Sesuai Standar dan Tepat Waktu | Persen | N/A | 80,95 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.6 | Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBP | Persen | N/A | 90 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.7 | Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Persen | N/A | 80,95 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.8 | Indeks Profesionalisme ASN | Indeks | N/A | 81 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.9 | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Persen | N/A | 70 | 0 | 0 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 50 | 60 | | | | | | |
| 96 | 99 | | | | | | |
| 1 | 1 | 20 | 50 | 53 | 55 | 58 | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| | | **420.018** | **13.659** | **13.659** | **13.659** | **13.659** | **[DITJEN PHU] Sekretariat Ditjen PHU** |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2150.1.10 | Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif | Persen | N/A | 1 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.11 | Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Persen | N/A | 2 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.12 | Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan | Persen | N/A | 10 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.13 | Persentase kasus hukum yang terselesaikan | Persen | N/A | 90 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.14 | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses | Persen | N/A | 15 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.15 | Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Persen | N/A | 35 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.16 | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID | Nilai | N/A | 70 | 0 | 0 |
| IKSK.2150.1.17 | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | Persen | N/A | 5 | 0 | 0 |
| **RO.2150. EBD.952** | **Layanan Perencanaan dan Penganggaran** | **Dokumen** | **N/A** | **621** | **0** | **0** |
| IKRO.2150. EBD.952.1 | Nilai Kinerja Anggaran | Dokumen | N/A | 6 | 0 | 0 |
| RO.2150. EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Dokumen | N/A | 590 | 0 | 0 |
| IKRO.2150. EBD.953.1 | Jumlah laporan evaluasi yang disusun tepat waktu | Laporan | N/A | 4 | 0 | 0 |
| **RO.2150. EBA.960** | **Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal** | **Layanan** | **N/A** | **7** | **0** | **0** |
| IKRO.2150. EBA.960.1 | Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Jumlah | N/A | 4 | 0 | 0 |
| **RO.2150. EBD.955** | **Layanan Manajemen Keuangan** | **Dokumen** | **N/A** | **596** | **0** | **0** |
| IKRO.2150. EBD.955.1 | Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai indikator pelaksanaan anggaran di atas 90 | Satker | N/A | 250 | 0 | 0 |
| IKRO.2150. EBD.955.2 | Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan | Satker | N/A | 17 | 0 | 0 |
| IKRO.2150. EBD.955.3 | Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Satker | N/A | 250 | 0 | 0 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **14.001** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 6.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **1.263** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **19.460** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2150. EBD.955.4 | Jumlah Penerimaan PNBP | Satker | N/A | 28 | 0 | 0 |
| IKRO.2150. EBD.955.5 | Jumlah Realisasi PNBP | Satker | N/A | 28 | 0 | 0 |
| **RO.2150. EBA.956** | **Layanan BMN** | **Layanan** | **N/A** | **9** | **0** | **0** |
| IKRO.2150. EBA.956.1 | Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Satker | N/A | 250 | 0 | 0 |
| **RO.2150. EBC.954** | **Layanan Manajemen SDM** | **Orang** | **N/A** | **745** | **0** | **0** |
| IKRO.2150. EBC.954.1 | Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori sedang | Orang | N/A | 300 | 0 | 0 |
| IKRO.2150. EBC.954.2 | Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatus (ASN) sesuai kebutuhan | Satker | N/A | 11 | 0 | 0 |
| IKRO.2150. EBC.954.3 | Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspiratif | Orang | N/A | 1 | 0 | 0 |
| IKRO.2150. EBC.954.4 | Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Orang | N/A | 300 | 0 | 0 |
| RO.2150. EBA.957 | Layanan Hukum | Layanan | N/A | 2 | 0 | 0 |
| IKRO.2150. EBA.957.1 | Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan | Jumlah | N/A | 10 | 0 | 0 |
| IKRO.2150. EBA.957.2 | Jumlah kasus hukum yang terselesaikan | Jumlah | N/A | 1 | 0 | 0 |
| IKRO.2150. EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | Layanan | N/A | 25 | 0 | 0 |
| IKRO.2150. EBA.958.1 | Jumlah satuan kerja yang menyelenggarakan PPID | Jumlah | N/A | 385 | 0 | 0 |
| IKRO.2150. EBA.958.2 | Jumlah konten keagamaan yang dipublikasi | Satker | N/A | 48 | 0 | 0 |
| **RO.2150. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Unit** | **N/A** | **881** | **0** | **0** |
| IKRO.2150. EBB.951.1 | Jumlah Layanan Sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Jumlah | N/A | 24 | 0 | 0 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **1.033** | **1.033** | **1.033** | **1.033** | **1.033** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **1.627** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | 9.878 | 9.841 | 9.841 | 9.841 | 9.841 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | **11.186** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 0 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.2150. EBB.971** | **Layanan Prasarana Internal** | **Unit** | **N/A** | **1** | **0** | **0** |
| IKRO.2150. EBB.971.1 | Jumlah Layanan Prasarana yang dikembangkan sesuai dengan roadmap | Layanan | N/A | 12 | 0 | 0 |
| **RO.2150. EBA.962** | **Layanan Umum** | **Layanan** | **N/A** | **35** | **0** | **0** |
| IKRO.2150. EBA.962.1 | Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan | Jumlah | N/A | 24 | 0 | 0 |
| **RO.2150. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **N/A** | **36** | **0** | **0** |
| IKRO.2150. EBA.994.1 | Jumlah ASN yang menerima layanan operasional perkantoran | Jumlah | N/A | 287 | 0 | 0 |
| **2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM** | | | | | | |
| **SK.2156.1** | **Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM** | | | | | |
| IKSK.2156.1.1 | Nilai Kinerja Anggaran BMBPSDM | Nilai | 97,65 | 90 | 90,5 | 91 |
| IKSK.2156.1.2 | Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar BMBPSDM | Persen | N/A | 75 | 77 | 79 |
| IKSK.2156.1.3 | Persentase Satuan Kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 BMBPSDM | Persen | N/A | 15 | 20 | 25 |
| IKSK.2156.1.4 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BMBPSDM | Nilai | 94 | 94,25 | 94,5 | 94,75 |
| IKSK.2156.1.5 | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BMBPSDM | Persen | 80 | 81 | 82 | 83 |
| IKSK.2156.1.6 | Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM | Persen | 80 | 80,95 | 81 | 82 |
| IKSK.2156.1.7 | Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBP dan BLU BMBPSDM | Persen | N/A | 70 | 71 | 72 |
| IKSK.2156.1.8 | Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM | Persen | 73 | 80,95 | 85,71 | 90,48 |
| IKSK.2156.1.9 | Indeks Profesionalisme ASN BMBPSDM | Nilai | 77 | 77,1 | 77,15 | 77,2 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| **0** | **0** | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | 32.513 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| **0** | **0** | 320.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | | | | | | |
| | | **301.813** | **404.789** | **425.834** | **448.420** | **480.423** | **[BMBPSDM] Sekretariat BMBPSDM** |
| | | | | | | | |
| 91,5 | 92 | | | | | | |
| 80 | 81 | | | | | | |
| 30 | 35 | | | | | | |
| 95 | 95,25 | | | | | | |
| 84 | 85 | | | | | | |
| 83 | 84 | | | | | | |
| 73 | 74 | | | | | | |
| 95,24 | 96 | | | | | | |
| 77,25 | 77,3 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.2156.1.10 | Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan BMBPSDM | Persen | 50 | 51 | 52 | 53 |
| IKSK.2156.1.11 | Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif BMBPSDM | Persen | N/A | 3 | 4 | 5 |
| IKSK.2156.1.12 | Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi BMBPSDM | Persen | N/A | 3 | 4 | 5 |
| IKSK.2156.1.13 | Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan BMBPSDM | Rancangan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IKSK.2156.1.14 | Persentase kasus hukum yang terselesaikan BMBPSDM | Persen | 100 | 80 | 85 | 87 |
| IKSK.2156.1.15 | Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses BMBPSDM | Persen | 5 | 15 | 25 | 35 |
| IKSK.2156.1.16 | Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap BMBPSDM | Persen | 60 | 65 | 70 | 75 |
| IKSK.2156.1.17 | Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID BMBPSDM | Nilai | N/A | 80 | 81 | 82 |
| IKSK.2156.1.18 | Indeks Pembangunan Statistik BMBPSDM | Nilai | N/A | 2,49 | 2,59 | 2,69 |
| IKSK.2156.1.19 | Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi BMBPSDM | Persen | 5 | 5 | 6 | 7 |
| IKSK.2156.1.20 | Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital BMBPSDM | Nilai | N/A | 1 | 1,5 | 2 |
| IKSK.2156.1.21 | Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online BMBPSDM | Persen | 5 | 15 | 25 | 35 |
| IKSK.2156.1.22 | Nilai Akreditasi Perpustakaan BMBPSDM | Nilai | C | B | B | B |
| **RO.2156. EBA.956** | **Layanan BMN** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2156. EBA.956.1 | Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Satker | N/A | 15 | 16 | 17 |
| **RO.2156. EBA.962** | **Layanan Umum** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.2156. EBA.962.1 | Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan | Dokumen | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 54 | 55 | | | | | | |
| 6 | 7 | | | | | | |
| 6 | 7 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 89 | 90 | | | | | | |
| 45 | 55 | | | | | | |
| 80 | 85 | | | | | | |
| 83 | 84 | | | | | | |
| 2,79 | 2,89 | | | | | | |
| 8 | 9 | | | | | | |
| 2,5 | 2,89 | | | | | | |
| 45 | 50 | | | | | | |
| A | A | | | | | | |
| **1** | **1** | **680** | **680** | **680** | **680** | **680** | |
| 18 | 19 | | | | | | |
| **1** | **1** | **34.508** | **37.680** | **39.571** | **41.579** | **44.552** | |
| 5 | 5 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2156. EBA.962.2 | Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar | Laporan | N/A | 15 | 16 | 16 |
| IKRO.2156. EBA.962.3 | Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu | Laporan | 15 | 16 | 17 | 18 |
| IKRO.2156. EBA.962.4 | Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan | Satker | N/A | 17 | 18 | 19 |
| IKRO.2156. EBA.962.5 | Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Satker | N/A | 17 | 18 | 19 |
| IKRO.2156. EBA.962.6 | Jumlah Penerimaan PNBP | Satker | 1 | 12 | 13 | 13 |
| IKRO.2156. EBA.962.7 | Jumlah Realisasi PNBP | Satker | 1 | 1 | 2 | 2 |
| IKRO.2156. EBA.962.8 | Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori sedang | Orang | 992 | 993 | 994 | 995 |
| IKRO.2156. EBA.962.9 | Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan | Satker | N/A | 11 | 12 | 13 |
| IKRO.2156. EBA.962.10 | Jumlah koleksi digital perpustakaan yang dipublikasikan secara online | Buku | 5 | 15 | 25 | 35 |
| IKRO.2156. EBA.962.11 | Jumlah perpustakaan yang memperoleh akreditasi | Perpustakaan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RO.2156. EBA.994 | Layanan Perkantoran | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2156. EBA.994.1 | Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif | Orang | N/A | 37 | 50 | 62 |
| IKRO.2156. EBA.994.2 | Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Orang | N/A | 37 | 50 | 62 |
| IKRO.2156. EBA.994.3 | Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan | Rancangan | N/A | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.2156. EBA.994.4 | Jumlah kasus hukum yang terselesaikan | Kasus Hukum | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2156. EBA.994.5 | Jumlah Arsip digital dan mudah di akses | Dokumen | N/A | 0 | 18 | 18 |
| IKRO.2156. EBA.994.6 | Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | Konten | N/A | 80 | 81 | 82 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 17 | 17 | | | | | | |
| 19 | 20 | | | | | | |
| 20 | 21 | | | | | | |
| 20 | 21 | | | | | | |
| 13 | 13 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 996 | 997 | | | | | | |
| 14 | 15 | | | | | | |
| 35 | 50 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 262.832 | 300.449 | 315.472 | 331.245 | 355.030 | |
| 75 | 87 | | | | | | |
| 75 | 87 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 18 | 18 | | | | | | |
| 83 | 84 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.2156. EBA.994.7 | Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi | Layanan | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2156. EBA.994.8 | Jumlah data statistik yang dipublikasi | Data | N/A | 14 | 15 | 16 |
| IKRO.2156. EBA.994.9 | Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital | Layanan | N/A | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.2156. EBA.994.10 | Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai pembanguanan zona integritas minimal 75 | Satker | N/A | 3 | 5 | 7 |
| **RO.2156. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Unit** | **249** | **326** | **406** | **506** |
| IKRO.2156. EBB.951.1 | Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap | Unit | 249 | 326 | 406 | 506 |
| **RO.2156. EBB.971** | **Layanan Prasarana Internal** | **Unit** | **0** | **0** | **27** | **27** |
| IKRO.2156. EBB.971.1 | Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap | Unit | 0 | 0 | 27 | 27 |
| **5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen** | | | | | | |
| **SK.5100.1** | **Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan** | | | | | |
| IKSK.5100.1.1 | Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output | Persen | 61.31 | 85.69 | 86.07 | 87.07 |
| IKSK.5100.1.2 | Persentase peningkatan kinerja | Persen | 48.05 | 23.36 | 23.51 | 23.79 |
| IKSK.5100.1.3 | Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/ kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media | Persen | 40.22 | 54.56 | 52.60 | 52.27 |
| IKSK.5100.1.4 | Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK | Persen | 61.02 | 52.92 | 52.46 | 52.88 |
| IKSK.5100.1.5 | Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra | Persen | 24.92 | 72.86 | 75.48 | 77.48 |
| IKSK.5100.1.6 | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai | 80.33 | 84.80 | 84.39 | 84.65 |
| IKSK.5100.1.7 | Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa | Persen | 49.33 | 30.88 | 31.27 | 31.41 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 17 | 18 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 9 | 12 | | | | | | |
| **656** | **706** | **3.005** | **3.381** | **4.383** | **5.901** | **6.315** | |
| 656 | 706 | | | | | | |
| **27** | **27** | **788** | **62.599** | **65.728** | **69.015** | **73.846** | |
| 27 | 27 | | | | | | |
| | | **264.565** | **416.416** | **477.189** | **546.100** | **623.852** | **[BIMAS KRISTEN] Sekretariat Ditjen Bimas Kristen** |
| | | | | | | | |
| 87.44 | 88.82 | | | | | | |
| 23.92 | 24.20 | | | | | | |
| 52.56 | 53.88 | | | | | | |
| 55.08 | 55.64 | | | | | | |
| 80.73 | 82.11 | | | | | | |
| 85.41 | 85.92 | | | | | | |
| 32.29 | 32,55 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.5100. CAN.951** | **Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | **Unit** | **N/A** | **2** | **4** | **6** |
| IKRO.5100. CAN.951.1 | Dukungan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | Unit | N/A | 2 | 4 | 6 |
| **RO.5100. CAN.971** | **Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi** | **Unit** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5100. CAN.971.1 | Dukungan Layanan Prasarana Internal Bidang Teknologi Informasi | Unit | N/A | 1 | 1 | 1 |
| **RO.5100. EBA.956** | **Layanan BMN** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5100. EBA.956.1 | Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu | Satker | N/A | 8 | 10 | 15 |
| **RO.5100. EBA.957** | **Layanan Hukum** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5100. EBA.957.1 | Dukungan Layanan Hukum Ditjen Bimas Kristen | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.5100. EBA.958** | **Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5100. EBA.958.1 | Dukungan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Ditjen Bimas Kristen | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.5100. EBA.960** | **Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5100. EBA.960.1 | Jumlah laporan kinerja satuan kerja Ditjen Bimas Kristen yang disusun sesuai standar | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.5100. EBA.962** | **Layanan Umum** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5100. EBA.962.1 | Dukungan Layanan Umum | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.5100. EBA.963** | **Layanan Data dan Informasi** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5100. EBA.963.1 | Dukungan Layanan Data dan Informasi | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.5100. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5100. EBA.994.1 | Jumlah ASN satuan pendidikan satker daerah Ditjen Bimas Kristen yang menerima layanan operasional perkantoran | Layanan | 976 | 1.382 | 1.457 | 1.537 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 8 | 10 | 1.000 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | |
| 8 | 10 | | | | | | |
| 1 | 1 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.300 | |
| 20 | 22 | | | | | | |
| 1 | 1 | 500 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 500 | 2.000 | 2.300 | 2.645 | 3.000 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 3.450 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 300 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 239.454 | 299.317 | 345.200 | 396.980 | 456.527 | |
| 1.627 | 1.747 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.5100. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Unit** | **7** | **8** | **8** | **8** |
| IKRO.5100. EBB.971.1 | Dukungan Layanan Sarana Internal | Unit | 7 | 8 | 8 | 8 |
| **RO.5100. EBB.971** | **Layanan Prasarana Internal** | **Unit** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5100. EBB.971.1 | Dukungan Layanan Prasarana Internal | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.5100. EBC.954** | **Layanan Manajemen SDM** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5100. EBC.954.1 | Dukungan Layanan Manajemen SDM | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RO.5100. EBC.996** | **Layanan Pendidikan dan Pelatihan** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5100. EBC.996.1 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.5100. EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IKRO.5100. EBD.952.1 | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Bimas Kristen | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IKRO.5100. EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IKRO.5100. EBD.953.1 | Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan Ditjen Bimas Kristen | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **RO.5100. EBD.955** | **Layanan Manajemen Keuangan** | **Dokumen** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| IKRO.5100. EBD.955.1 | Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **RO.5100. EBD.961** | **Layanan Reformasi Kinerja** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5100. EBD.961 .1 | Dukungan Layanan Reformasi Kinerja | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 8 | 8 | 7.740 | 8.901 | 10.236 | 11.772 | 13.537 | |
| 8 | 8 | | | | | | |
| 1 | 1 | 2.276 | 58.028 | 66.733 | 76.743 | 88.254 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 3 | 3 | 5.805 | 7.500 | 7.700 | 8.191 | 8.514 | |
| 3 | 3 | | | | | | |
| 4 | 4 | 1.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 7.000 | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 2 | 2 | 2.029 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 1 | 1 | 711 | 3.200 | 4.500 | 5.800 | 6.300 | |
| 1 | 1 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **5102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik** | | | | | | |
| **SK.5102.1** | **Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan Ditjen Bimas Katolik** | | | | | |
| IKSK 5102.1.1 | Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan Ditjen Bimas Katolik yang sesuai dengan capaian output | Persen | N/A | 99,57 | 99,67 | 99,73 |
| IKSK 5102.1.2 | Persentase peningkatan kinerja Ditjen Bimas Katolik | Persen | N/A | 0 | 0,1 | 0,2 |
| IKSK 5102.1.3 | Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/ kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media Ditjen Bimas Katolik | Persen | N/A | 88 | 92 | 95 |
| IKSK 5102.1.4 | Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK Ditjen Bimas Katolik | Persen | N/A | 88 | 94 | 96 |
| IKSK 5102.1.5 | Persentase ketersediaan data prioritas Ditjen Bimas Katolik yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra | Persen | N/A | 80 | 82 | 85 |
| IKSK 5102.1.6 | Rerata nilai ASN Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial Kepemimpinan minimal 80 | Nilai | N/A | 80 | 81 | 82 |
| IKSK 5102.1.7 | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Katolik | Nilai | N/A | 95 | 95 | 96 |
| IKSK 5102.1.8 | Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa Ditjen Bimas Katolik | Persen | N/A | 95 | 95 | 96 |
| **RO.5102. CAN.997** | **Pengadaan Perangkat TIK** | **Unit** | **N/A** | **15** | **17** | **20** |
| IKRO.5102. CAN.997.1 | Jumlah pemenuhan infrastruktur TIK Ditjen Bimas Katolik | Unit | N/A | 15 | 17 | 20 |
| **RO.5102. EBA.956** | **Layanan BMN** | **Layanan** | **N/A** | **20** | **23** | **26** |
| IKRO.5102. EBA.956.1 | Jumlah peningkatan kinerja layanan BMN Ditjen Bimas Katolik | Layanan | N/A | 20 | 23 | 26 |
| **RO.5102. EBA.957** | **Layanan Hukum** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | **30.023** | **34.527** | **39.706** | **45.662** | **52.511** | **[BIMAS KATOLIK] Sekretariat Ditjen Bimas Katolik** |
| | | | | | | | |
| 99,77 | 99,78 | | | | | | |
| 0,3 | 0,4 | | | | | | |
| 95 | 98 | | | | | | |
| 98 | 99 | | | | | | |
| 90 | 95 | | | | | | |
| 83 | 84 | | | | | | |
| 96 | 97 | | | | | | |
| 96 | 97 | | | | | | |
| **23** | **23** | 280 | 255 | 345 | 456 | 525 | |
| 23 | 23 | | | | | | |
| **30** | **35** | 270 | 357 | 464 | 616 | 826 | |
| 30 | 35 | | | | | | |
| **1** | **1** | 75 | 86 | 99 | 114 | 131 | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5102. EBA.957.1 | Jumlah peningkatan kinerja layanan hukum Ditjen Bimas Katolik | Layanan | N/A | 1 | 2 | 3 |
| **RO.5102. EBA.958** | **Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi** | **Layanan** | **N/A** | **2** | **1** | **1** |
| IKRO.5102. EBA.958.1 | Jumlah layanan peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/ kebijakan prioritas bidang pendidikan Ditjen Bimas Katolik yang disampaikan melalui media | Layanan | N/A | 2 | 3 | 4 |
| **RO.5102. EBA.959** | **Layanan Protokoler** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5102. EBA.959.1 | Jumlah peningkatan kinerja layanan Protokoler Ditjen Bimas Katolik | Layanan | N/A | 1 | 2 | 3 |
| **RO.5102. EBA.960** | **Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5102. EBA.960.1 | Jumlah peningkatan kinerja layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Ditjen Bimas Katolik | Layanan | N/A | 1 | 2 | 3 |
| **RO.5102. EBA.962** | **Layanan Umum** | **Layanan** | **N/A** | **0** | **1** | **1** |
| IKRO.5102. EBA.962.1 | Jumlah peningkatan kinerja Layanan Umum Ditjen Bimas Katolik | Layanan | N/A | 0 | 1 | 2 |
| **RO.5102. EBA.963** | **Layanan Data dan Informasi** | **Layanan** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5102. EBA.963.1 | Jumlah ketersediaan data prioritas bidang pendidikan Ditjen Bimas Katolik yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra | Data | N/A | 4 | 4 | 4 |
| **RO.5102. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **N/A** | **419** | **419** | **419** |
| IKRO.5102. EBA.994.1 | Jumlah ASN satuan pendidikan dan satker daerah Ditjen Bimas Katolik yang | Oarng | N/A | 419 | 419 | 419 |
| **RO.5102. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Unit** | **N/A** | **227** | **232** | **233** |
| IKRO.5102. EBB.951.1 | Jumlah peningkatan layanan sarana internal pada Ditjen Bimas Katolik | Layanan | N/A | 1 | 2 | 3 |
| **RO.5102. EBC.954** | **Layanan Manajemen SDM** | **Orang** | **N/A** | **118** | **118** | **118** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 1 | 1 | 580 | 667 | 767 | 882 | 1.014 | |
| 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | 1 | 169 | 195 | 224 | 258 | 296 | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 1 | 1 | 75 | 86 | 99 | 114 | 131 | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 1 | 1 | - | 50 | 58 | 66 | 76 | |
| 3 | 4 | | | | | | |
| 1 | 100 | 69 | 79 | 91 | 105 | 121 | |
| 4 | 4 | | | | | | |
| 419 | 419 | 23.911 | 27.473 | 31.488 | 36.070 | 41.362 | |
| 419 | 419 | | | | | | |
| 233 | 233 | 1.909 | 2.137 | 2.457 | 2.826 | 3.250 | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 118 | 118 | 75 | 86 | 99 | 114 | 131 | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5102. EBC.954.1 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Katolik yang mengikuti pelatihan manajerial | Orang | N/A | 1 | 2 | 3 |
| **RO.5102. EBD.952** | **Layanan Perencanaan dan Penganggaran** | **Dokumen** | **N/A** | **35** | **38** | **38** |
| IKRO.5102. EBD.952.1 | Jumlah ketersediaan data prioritas Ditjen Bimas Katolik yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra | Dokumen | N/A | 1 | 2 | 3 |
| **RO.5102. EBD.953** | **Layanan Pemantauan dan Evaluasi** | **Dokumen** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5102. EBD.953.1 | Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Katolik yang memiliki Nilai Kinerja Anggaran di atas 85 | Satker | N/A | 120 | 150 | 170 |
| **RO.5102. EBD.955** | **Layanan Manajemen Keuangan** | **Dokumen** | **N/A** | **84** | **84** | **84** |
| IKRO.5102. EBD.955.1 | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Ditjen Bimas Katolik | Nilai | N/A | 94 | 95 | 96 |
| IKRO.5102. EBD.955.2 | Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II Ditjen Bimas Katolik yang sesuai standar dan tepat waktu | Laporan | 213 | 213 | 213 | 213 |
| **RO.5102. EBD.961** | **Layanan Reformasi Kinerja** | **Dokumen** | **N/A** | **0** | **1** | **1** |
| IKRO.5102. EBD.961.1 | Jumlah dokumen bidang pendidikan Ditjen Bimas Katolik yang sesuai capaian output | Dokumen | N/A | 0 | 1 | 2 |
| **RO.5102. EBD.974** | **Layanan Penyelenggaraan Kearsipan** | **Dokumen** | **N/A** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5102. EBD.974.1 | Jumlah dokumen kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Ditjen Bimas Katolik | Dokumen | N/A | 1 | 2 | 3 |
| **5103 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu** | | | | | | |
| **SK.5103.1** | **Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan** | | | | | |
| IKSK.5103.1.1 | Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output | Persen | N/A | 96 | 97 | 98 |
| IKSK.5103.1.2 | Persentase peningkatan kinerja Ditjen Bimas Hindu | Persen | N/A | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 38 | 38 | 1.672 | 1.900 | 2.185 | 2.513 | 2.890 | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| 1 | 1 | 163 | 188 | 216 | 248 | 286 | |
| 200 | 213 | | | | | | |
| 84 | 84 | 634 | 756 | 869 | 1.000 | 1.150 | |
| 97 | 97 | | | | | | |
| 213 | 213 | | | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 50 | 58 | 66 | 76 | |
| 3 | 4 | | | | | | |
| 1 | 1 | 141 | 162 | 186 | 214 | 246 | |
| 4 | 5 | | | | | | |
| | | 151.336 | 198.212 | 205.552 | 211.767 | 211.797 | [BIMAS HINDU] Sekretariat Ditjen Bimas Hindu |
| | | | | | | | |
| 99 | 99 | | | | | | |
| 0,25 | 0,25 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKSK.5103.1.3 | Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/ kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media pada Ditjen Bimas Hindu | Persen | N/A | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| IKSK.5103.1.4 | Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK pada Ditjen Bimas HIndu | Persen | N/A | 65 | 70 | 75 |
| IKSK.5103.1.5 | Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra pada Ditjen Bimas Hindu | Persen | N/A | 98 | 98 | 98 |
| IKSK.5103.1.6 | Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80 | Nilai | N/A | 82 | 83 | 84 |
| IKSK.5103.1.7 | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Ditjen Bimas Hindu | Nilai | N/A | 95,25 | 95,5 | 95,75 |
| IKSK.5103.1.8 | Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa Ditjen Bimas Hindu | Persen | 30 | 31.50 | 32.22 | 33.40 |
| IKSK.5103.1.9 | Persentase PTKHN yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 | Persen | 0 | 0 | 0 | 20 |
| **RO.5103. CAN.951** | **Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan** | **Unit** | **55** | **80** | **112** | **112** |
| IKRO.5103. CAN.951.01 | Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan Ditjen Bimas minimal 75 | Unit | 55 | 80 | 112 | 112 |
| **RO.5103. EBA.956** | **Layanan BMN** | **Layanan** | **15** | **20** | **20** | **20** |
| IKRO.5103. EBA.956.1 | Jumlah Layanan BMN Ditjen Bimas Hindu | Layanan | 15 | 20 | 20 | 20 |
| **RO.5103. EBA.958** | **Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi** | **Layanan** | **10** | **50** | **50** | **50** |
| IKRO.5103. EBA.958.1 | Jumlah Layanan Dokumen Kehumasan Ditjen Bimas Hindu | Layanan | 10 | 50 | 50 | 50 |
| **RO.5103. EBA.962** | **Layanan Umum** | **Layanan** | **36** | **36** | **38** | **38** |
| IKRO.5103. EBA.962.1 | Jumlah layanan Dokumen umum Ditjen Bimas Hindu | Layanan | 36 | 36 | 38 | 38 |
| **RO.5103. EBA.963** | **Layanan Data dan Informasi** | **Layanan** | **-** | **-** | **10** | **10** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0,5 | 0,5 | | | | | | |
| 80 | 85 | | | | | | |
| 98 | 98 | | | | | | |
| 84 | 85 | | | | | | |
| 96 | 96,25 | | | | | | |
| 34.30 | 32.44 | | | | | | |
| 20 | 20 | | | | | | |
| **112** | **112** | **3.129** | **3.129** | **3.129** | **3.129** | **3.129** | |
| 112 | 112 | | | | | | |
| **20** | **20** | **62** | **300** | **300** | **300** | **300** | |
| 20 | 20 | | | | | | |
| **50** | **50** | **104** | **790** | **790** | **790** | **790** | |
| 50 | 50 | | | | | | |
| **38** | **38** | **1.967** | **4.543** | **4.543** | **4.543** | **4.543** | |
| 38 | 38 | | | | | | |
| **10** | **10** | **-** | **600** | **600** | **600** | **600** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5103. EBA.963.1 | Jumlah Layanan Dokumen Data dan Sistem Infomasi Ditjen Bimas Hindu | Layanan | 0 | 0 | 10 | 10 |
| **RO.5103. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **690** | **90** | **101** | **101** |
| IKRO.5103. EBA.994.1 | Jumlah ASN Ditjen Bimas Hindu yang menerima layanan operasional perkantoran | Layanan | 690 | 909 | 1005 | 1025 |
| **RO.5103. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Unit** | **286** | **286** | **360** | **361** |
| IKRO.5103. EBB.951.1 | Jumlah Sarana Perkantoran yang diadakan Ditjen Bimas Hindu | Unit | 286 | 286 | 360 | 361 |
| **RO.5103. EBB.971** | **Layanan Prasarana Internal** | **Unit** | **1** | **-** | **2** | **2** |
| IKRO.5103. EBB.971.1 | Jumlah prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap Ditjen Bimas Hindu | Unit | 1 | 0 | 2 | 2 |
| **RO.5103. EBC.954** | **Layanan Manajemen SDM** | **Orang** | **34** | **41** | **84** | **114** |
| IKRO.5103. EBC.954.1 | Jumlah Layanan Manajemen SDM Ditjen Bimas Hindu | Orang | 34 | 8 | 8 | 8 |
| **RO.5103. EBC.996** | **Layanan Pendidikan dan Pelatihan** | **Orang** | **-** | **-** | **10** | **12** |
| IKRO.5103. EBC.996.1 | Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Ditjen Bimas Hindu | Orang | 0 | 0 | 10 | 12 |
| **RO.5103. EBD.952** | **Layanan Perencanaan dan Penganggaran** | **Dokumen** | **47** | **62** | **64** | **64** |
| IKRO.5103. EBD.952.1 | Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Hindu | Dokumen | 47 | 62 | 64 | 64 |
| **RO.5103. EBD.953** | **Layanan Pemantauan dan Evaluasi** | **Dokumen** | **6** | **11** | **16** | **16** |
| IKRO.5103. EBD.953.1 | Jumlah Layanan Dokumen Pemantauan dan evaluasi Ditjen Bimas Hindu | Dokumen | 6 | 11 | 16 | 16 |
| **RO.5103. EBD.955** | **Layanan Manajemen Keuangan** | **Dokumen** | **3** | **5** | **8** | **8** |
| IKRO.5103. EBD.955.1 | Jumlah Layanan Manajemen Keuangan | Dokumen | 3 | 5 | 8 | 8 |
| **RO.5103. EBD.961** | **Layanan Reformasi Kinerja** | **Dokumen** | **1** | **1** | **4** | **5** |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | 10 | | | | | | |
| **101** | **101** | **139.908** | **170.993** | **178.113** | **184.113** | **184.113** | |
| 1050 | 1080 | | | | | | |
| **361** | **361** | **2.755** | **8.371** | **8.481** | **8.526** | **8.526** | |
| 361 | 361 | | | | | | |
| **2** | **2** | **-** | **2.550** | **2.550** | **2.550** | **2.550** | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| **124** | **134** | **359** | **630** | **630** | **630** | **630** | |
| 8 | 8 | | | | | | |
| **22** | **24** | **-** | **150** | **160** | **230** | **260** | |
| 22 | 24 | | | | | | |
| **64** | **64** | **2.542** | **3.846** | **3.946** | **4.046** | **4.046** | |
| 64 | 64 | | | | | | |
| **16** | **16** | **152** | **688** | **688** | **688** | **688** | |
| 16 | 16 | | | | | | |
| **8** | **8** | **211** | **552** | **552** | **552** | **552** | |
| 8 | 8 | | | | | | |
| **5** | **5** | **52** | **800** | **800** | **800** | **800** | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| IKRO.5103. EBD.961.1 | Jumlah Layanan Reformasi Kinerja | Dokumen | 1 | 1 | 4 | 5 |
| RO.5103. EBD.974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | Dokumen | - | 2 | 2 | 2 |
| IKRO.5103. EBD.974.1 | Jumlah Layanan Kearsipan Ditjen Bimas Hindu | Dokumen | 0 | 2 | 2 | 2 |
| **5105 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha** | | | | | | |
| **SK.5105** | **Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan Ditjen Bimas Buddha** | | | | | |
| IKSK.5105.1 | Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output Ditjen Bimas Buddha | Persen | 99,3 | 62 | 70 | 75 |
| IKSK.5105.2 | Persentase peningkatan kinerja Ditjen Bimas Buddha | Persen | 92,71 | 0,31 | 0,38 | 0,43 |
| IKSK.5105.3 | Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/ kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media pada Ditjen Bimas Buddha | Persen | 33,33 | 25 | 10 | 9,09 |
| IKSK.5105.4 | Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK pada Ditjen Bimas Buddha | Persen | 50 | 92 | 94 | 96 |
| IKSK.5105.5 | Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra pada Ditjen Bimas Buddha | Persen | 25 | 38,03 | 49,3 | 56,34 |
| IKSK.5105.6 | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Ditjen Bimas Buddha | Nilai | 97,73 | 97,85 | 98 | 98,15 |
| IKSK.5105.7 | Rerata nilai ASN Ditjen Bimas Buddha yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80 | Nilai | 80 | 81 | 82 | 83 |
| IKSK.5105.8 | Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa Ditjen Bimas Buddha | Persen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IKSK.5105.9 | Persentase Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 | Persen | 0 | 0 | 50 | 50 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 2 | 2 | 95 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| | | **38.207** | **54.802** | **57.625** | **60.599** | **63.729** | **[BIMAS BUDDHA] Sekretariat Ditjen Bimas Buddha** |
| | | | | | | | |
| 77 | 80 | | | | | | |
| 0,48 | 0,53 | | | | | | |
| 8,33 | 7,69 | | | | | | |
| 97 | 98 | | | | | | |
| 77,46 | 90 | | | | | | |
| 98,3 | 98,5 | | | | | | |
| 84 | 85 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 90 | 90 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.5105. CAN.001** | **Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi** | **Unit** | **0** | **33** | **40** | **40** |
| IKRO.5105. CAN.001.1 | Jumlah layanan infrastruktur dari layanan dukungan TIK pada Ditjen Bimas Buddha | Unit | 0 | 33 | 40 | 40 |
| **RO.5105. EBA.957** | **Layanan Hukum** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5105. EBA.957.1 | Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan | Dokumen | 10 | 20 | 20 | 20 |
| **RO.5105. EBA.962** | **Layanan Umum** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5105. EBA.962.1 | Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan | Paket | 0 | 2 | 3 | 4 |
| **RO.5105. EBA.994** | **Layanan Perkantoran** | **Layanan** | **357** | **357** | **357** | **357** |
| IKRO.5105. EBA.994.1 | Jumlah ASN satuan pendidikan & satker daerah Ditjen Bimas Buddha yang menerima layanan operasional perkantoran | Orang | 357 | 357 | 357 | 357 |
| **RO.5105. EBB.951** | **Layanan Sarana Internal** | **Unit** | **0** | **0** | **30** | **40** |
| IKRO.5105. EBB.951.1 | Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap | Unit | 0 | 0 | 30 | 40 |
| **RO.5105. EBC.954** | **Layanan Manajemen SDM** | **Orang** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| IKRO.5105. EBC.954.1 | Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN minimal kategori sedang | Orang | 66 | 70 | 75 | 80 |
| IKRO.5105. EBC.954.2 | Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IKRO.5105. EBC.954.3 | Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi | Orang | 93 | 25 | 30 | 35 |
| IKRO.5105. EBC.954.4 | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan manajerial (kepemimpinan) | Orang | 2 | 1 | 5 | 5 |
| **RO.5105. EBD.952** | **Layanan Perencanaan dan Penganggaran** | **Dokumen** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5105. EBD.952.1 | Jumlah dokumen Perencanaan Ditjen Bimas Buddha yang dihasilkan | Nilai | 0 | 3 | 3 | 3 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 50 | 50 | 688 | 757 | 832 | 916 | 1.007 | |
| 50 | 50 | | | | | | |
| 1 | 1 | 62 | 68 | 75 | 83 | 91 | |
| 20 | 20 | | | | | | |
| 1 | 1 | 482 | 530 | 583 | 642 | 706 | |
| 5 | 6 | | | | | | |
| 357 | 357 | 34.281 | 50.576 | 53.105 | 55.760 | 58.548 | |
| 357 | 357 | | | | | | |
| 50 | 60 | 1.573 | 1.652 | 1.734 | 1.821 | 1.912 | |
| 50 | 60 | | | | | | |
| 250 | 250 | 835 | 900 | 945 | 992 | 1.042 | |
| 85 | 90 | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 40 | 45 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | |
| 1 | 1 | 200 | 220 | 242 | 266 | 293 | |
| 3 | 3 | | | | | | |

| SASARAN STRATEGIS (IMPACT )/SASARAN PROGRAM (OUTCOME )/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT )/ INDIKATOR | | SATUAN | BASE-LINE 2024 | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **RO.5105. EBD.953** | **Layanan Pemantauan dan Evaluasi** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5105. EBD.953.1 | Jumlah kegiatan pengukuran capaian Nilai Kinerja Anggaran | Kegiatan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **RO.5105. EBD.974** | **Layanan Penyelenggaraan Kearsipan** | **Layanan** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| IKRO.5105. EBD.974.1 | Jumlah Digitalisasi Arsip dan mudah di akses | Dokumen | 0 | 4.432 | 2.216 | 2.000 |
| **RO.5105. EBD.961** | **Layanan Reformasi Kinerja** | **Layanan** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| IKRO.5105. EBD.961.1 | Jumlah PTK Buddha Negeri yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 | Lembaga | 0 | 0 | 1 | 1 |

| | | KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 1 | 50 | 55 | 61 | 67 | 73 | |
| 2 | 2 | | | | | | |
| 1 | 1 | 35 | 40 | 44 | 48 | 53 | |
| 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 2 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | | | | | | |

# LAMPIRAN II

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**NOMOR 17 TAHUN 2025**
**TENTANG**
**RENCANA STRATEGIS**
**KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029**

**KERANGKA PENDANAAN**
**KEMENTERIAN AGAMA 2025-2029**

| | Kegiatan Prioritas | Penugasan Indikator | Target | | | | | Alokasi APBN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KP | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif | 46.08 | 50.08 | 54.06 | 58.06 | 62.04 | 15,092,329,007 | 15,669,125,000 | 16,245,920,000 | 16,822,716,000 |
| Pro-p | Penyaluran Bantuan Pendidikan | Peserta didik penerima bantuan operasional pendidikan dasar | 10,894,470 | 10,916,000 | 10,937,530 | 10,959,060 | 10,980,590 | 11,794,352,186 | 12,031,750,459 | 12,269,148,732 | 12,506,547,005 |

| | Alokasi Non APBN | | | | | Total (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17,399,511,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,092,329,007 | 15,669,125,000 | 16,245,920,000 | 16,822,716,000 | 17,399,511,000 |
| 12,743,945,278 | 930,360,000 | 958,270,000 | 987,000,000 | 1,016,000,000 | 1,047,000,000 | 12,724,712,186 | 12,990,020,459 | 13,256,148,732 | 13,522,547,005 | 13,790,945,278 |

| | Kegiatan Prioritas | Penugasan Indikator | Target | | | | | Alokasi APBN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Jumlah madrasah, satuan pendidikan keagamaan, pesantren yang mendapat bantuan operasional (BOP) | 15,174 | 19,705 | 24,236 | 28,767 | 33,298 | 100,000,000 | 129,860,000 | 159,720,000 | 189,580,000 |
| KP | Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/ Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widyalaya/ Uttama Dhammasekha | Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/ Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widyalaya/ Uttama Dhammasekha | | | | | | | | | |
| RO | | 4012.QEN.003 BOS Uttama Dhammasekha | 60 | 70 | 74 | 77 | 81 | 50,970 | 105,000 | 110,250 | 115,763 |
| RO | | 4012.QEN.002 BOS Mula Dhammasekha | 85 | 90 | 95 | 99 | 104 | 76,500 | 81,000 | 85,050 | 89,303 |
| RO | | 4012.QEN.001 BOP Nava Dhammasekha | 1,158 | 1,190 | 1,250 | 1,312 | 1,378 | 694,800 | 714,000 | 749,700 | 787,185 |
| RO | | 2142.QEN.007 Siswa penerima BOP Tk Pratama | 2,025 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 1,215,000 | 1,320,000 | 1,440,000 | 1,560,000 |
| RO | | 2142.QEN.003 Siswa penerima BOS Tk Utama | 605 | 710 | 760 | 810 | 810 | 907,500 | 1,065,000 | 1,140,000 | 1,080,000 |
| RO | | 2142.QEN.002 Siswa penerima BOS Tk Madya | 282 | 352 | 412 | 492 | 492 | 314,400 | 392,800 | 460,200 | 549,600 |
| RO | | 2142.QEN.001 Siswa penerima BOS Tk Adi | 907 | 1,081 | 1,186 | 1,326 | 1,326 | 7,424,679 | 980,500 | 1,076,000 | 1,203,000 |
| RO | | 2139.QEN.006 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMAK Katolik | 6,396 | 7,441 | 8,222 | 9,085 | 10,042 | 11,479,560 | 14,712,000 | 19,455,700 | 25,727,915 |

| | Alokasi Non APBN | | | | | Total (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 219,441,000 | 5,000,000,000 | 5,250,000,000 | 5,500,000,000 | 5,750,000,000 | 6,000,000,000 | 5,100,000,000 | 5,379,860,000 | 5,659,720,000 | 5,939,580,000 | 6,219,441,000 |
| | | | | | | | | | | |
| 121,552 | 0 | 40,990,000 | 47,360,000 | 65,160,000 | 77,010,000 | 50,970 | 41,095,000 | 47,470,250 | 65,275,763 | 77,131,552 |
| 93,769 | | | | | | 76,500 | 81,000 | 85,050 | 89,303 | 93,769 |
| 826,545 | | | | | | 694,800 | 714,000 | 749,700 | 787,185 | 826,545 |
| 1,560,000 | | | | | | 1,215,000 | 1,320,000 | 1,440,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
| 1,080,000 | | | | | | 907,500 | 1,065,000 | 1,140,000 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 549,600 | | | | | | 314,400 | 392,800 | 460,200 | 549,600 | 549,600 |
| 1,203,000 | | | | | | 7,424,679 | 980,500 | 1,076,000 | 1,203,000 | 1,203,000 |
| 34,027,812 | | | | | | 11,479,560 | 14,712,000 | 19,455,700 | 25,727,915 | 34,027,812 |

| | Kegiatan Prioritas | Penugasan Indikator | Target | | | | | Alokasi APBN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RO | | 2139.QEN.001 Siswa SMAK Katolik Penerima BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RO | | 2136.QEN.006 Bantuan Operasional Siswa (BOS) SDTK | 5,490 | 6,154 | 6,547 | 6,584 | 7,056 | 5,640,930 | 6,276,519 | 6,808,156 | 7,233,111 |
| RO | | 2136.QEN.005 Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMPTK | 6,627 | 7,251 | 7,754 | 8,302 | 8,883 | 8,948,180 | 9,257,360 | 10,220,660 | 10,942,308 |
| RO | | 2136.QEN.004 Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMTK/SMAK | 13,333 | 14,096 | 14,483 | 14,839 | 15,268 | 23,790,841 | 26,649,960 | 27,256,212 | 28,256,212 |
| RO | | 2129.QEN.007 Siswa MA Penerima BOS | 1,627,097 | 1,689,678 | 1,754,665 | 1,822,152 | 1,892,235 | 3,155,334 | 3,276,693 | 3,402,720 | 3,533,594 |
| RO | | 2129.QEN.006 Siswa MTs Penerima BOS | 3,270,479 | 3,540,519 | 3,832,855 | 4,149,329 | 4,491,934 | 4,233,819 | 4,583,400 | 4,961,846 | 5,371,540 |
| RO | | 2129.QEN.005 Siswa MI Penerima BOS | 8,084,187 | 8,471,930 | 8,894,923 | 9,356,370 | 9,859,767 | 4,507,578 | 4,917,358 | 5,364,390 | 5,852,062 |
| RO | | 2128.QEN.007 Santri Tk. Ulya/ Diniyah Formal/ Muadalah/PPS Penerima BOS | 127,545 | 166,083 | 204,621 | 243,159 | 281,697 | 152,230 | 198,226 | 244,223 | 290,220 |
| RO | | 2128.QEN.006 Santri Tk. Wustha/ Diniyah Formal/ Muadalah/PPS Penerima BOS | 205,024 | 247,348 | 289,672 | 331,996 | 374,320 | 206,164 | 248,723 | 291,283 | 333,842 |
| RO | | 2128.QEN.005 Santri Tk. Ula/ Diniyah Formal/ Muadalah/PPS Penerima BOS | 36,621 | 42,112 | 47,603 | 53,094 | 58,585 | 35,187 | 40,463 | 45,739 | 51,015 |

| | Alokasi Non APBN | | | | | Total (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,938,138 | | | | | | 5,640,930 | 6,276,519 | 6,808,156 | 7,233,111 | 8,938,138 |
| 11,140,500 | | | | | | 8,948,180 | 9,257,360 | 10,220,660 | 10,942,308 | 11,140,500 |
| 29,256,212 | | | | | | 23,790,841 | 26,649,960 | 27,256,212 | 28,256,212 | 29,256,212 |
| 3,669,501 | | | | | | 3,155,334 | 3,276,693 | 3,402,720 | 3,533,594 | 3,669,501 |
| 5,815,061 | | | | | | 4,233,819 | 4,583,400 | 4,961,846 | 5,371,540 | 5,815,061 |
| 6,384,068 | | | | | | 4,507,578 | 4,917,358 | 5,364,390 | 5,852,062 | 6,384,068 |
| 336,216 | | | | | | 152,230 | 198,226 | 244,223 | 290,220 | 336,216 |
| 376,401 | | | | | | 206,164 | 248,723 | 291,283 | 333,842 | 376,401 |
| 56,292 | | | | | | 35,187 | 40,463 | 45,739 | 51,015 | 56,292 |

| | Kegiatan Prioritas | Penugasan Indikator | Target | | | | | Alokasi APBN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RO | | 2128.QEI.001 Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) | 15,174 | 15,580 | 15,986 | 16,392 | 16,798 | 119,978 | 119,978 | 119,978 | 119,978 |
| KP | Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): Layanan haji dalam negeri; Layanan haji luar negeri | Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): Layanan haji dalam negeri; Layanan haji luar negeri | | | | | | | | | |
| | | Bantuan transportasi calon jamaah haji | | | | | | | | | |
| RO | | 2148.QDC.002 Jemaah Haji Reguler yang Terbina | 117,670 | 117,670 | 117,670 | 117,670 | | 1,521,037.70 | 1,597,089.58 | 1,676,944.06 | 1,760,791.26 |
| | | 2148.QDC.001 Petugas Haji yang Profesional | 18,015 | 18,015 | 18,015 | 18,015 | | 423,396.35 | 423,396.35 | 423,396.35 | 423,396.35 |
| Pro-p | Penanganan Anak Tidak Sekolah | Satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan dalam pencegahan anak tidak sekolah | | | | | | | | | |
| | | Penanganan anak tidak sekolah | | | | | | | | | |
| KP | Penyelenggaraan event keagamaan | Penyelenggaraan event keagamaan | | | | | | | | | |
| | | Bantuan Penyelenggaraan event keagaaman (MTQ, STQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha) | | | | | | | | | |

| | Alokasi Non APBN | | | | | Total (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 119,978 | | | | | | 119,978 | 119,978 | 119,978 | 119,978 | 119,978 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,848,830.83 | 18,341,243.53 | 19,258,305.70 | 20,221,220.99 | 21,232,282.04 | 22,293,896.14 | 19,862,281.22 | 20,855,395.29 | 21,898,165.05 | 22,993,073.30 | 24,142,726.97 |
| 0 | | | | | | 423,396.35 | 423,396.35 | 423,396.35 | 423,396.35 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Kegiatan Prioritas | Penugasan Indikator | Target | | | | | Alokasi APBN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RO | | 2123.PEG.001 - Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ) | 582 | 601 | 601 | 601 | 601 | 31,064 | 98,510 | 108,361 | 119,197 |
| RO | | 2137.PEG.001 - Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (PESPARAWI) | 77 | 77 | 1 | 1 | 77 | 55,719.14 | 60,000 | 15,000 | 20,000 |
| RO | | 2137.AEG.001 - Event Perayaan Hari Besar Agama Kristen | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,500 | 3,000 |
| RO | | 2140.AEG.001 - Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Keagamaan Katolik | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 1,150 | 1,322.50 |
| RO | | 2140.QDB.001 - Lembaga Pengelola Dana Amal Kasih Katolik diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 500 | 1,900 | 2,185 | 2,512.75 |
| RO | | 2140.PEG.001 - Penyelenggaraan Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesparani) | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 1,900 | 10,000 | 2,185.70 | 2,512.75 |
| RO | | 2143.AEG.001 - Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Keagaamaan Hindu | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |

| | Alokasi Non APBN | | | | | Total (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 131,117 | 65,000 | 66,000 | 67,000 | 68,000 | 69,000 | 96,064 | 164,510 | 175,361 | 187,197 | 200,117 |
| 75,500 | 0 | 69,000 | 0 | 0 | 74,000 | 55,719.14 | 129,000 | 15,000 | 20,000 | 149,500 |
| 4,500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1,700 | 3,200 | 4,700 |
| 1,520.88 | 0 | 1,000 | 1,150 | 1,322.50 | 1,520.88 | 0 | 2,000 | 2,300 | 2,645 | 3,041.75 |
| 2,889.67 | 2,000 | 2,300 | 2,645 | 3,041.70 | 3,500 | 2,500 | 4,200 | 4,830 | 5,554.45 | 6,389.67 |
| 11,500 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 | 11,900 | 2,185.70 | 2,512.75 | 13,400 |
| 8,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 |

| | Kegiatan Prioritas | Penugasan Indikator | Target | | | | | Alokasi APBN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| RO | | 2143 PEG 001 - Event seni budaya Keagaamaan Hindu (Utsawa Dharma Gita) | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | 2,322 | 2,775 | 20,000 | 5,500 |
| RO | | 2143.QDB.002 - Lembaga Dana Punia dibina dan diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| RO | | 2145 PEG 001 Event Seni Budaya Keagamaan Buddha (Swayamvara Tripitaka Gatha) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 701,000 | 27,000 | 27,500 | 28,075 |
| RO | | 2137.QDB.002 - Pembinaan/ Penguatan Lembaga Amal Sosial Kristiani dalam Program Literasi Pengentasan Kemiskinan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 600 | 1,500 | 1,875 | 2,250 |
| | | 2122.QEA.001 - Mustahiq yang diselaraskan dengan Data Kemiskinan (Regsosek/DT-SEN) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 16,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
| RO | | 2122.QEI.001 - Bantuan Operasional BWI | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
| RO | | 2122.QEI.002 - Bantuan Operasional BAZNAS | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 3,500 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| RO | | 2122.QEA.002 - Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |

| | Alokasi Non APBN | | | | | Total (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 5,500 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 500,000 | 502,322 | 502,775 | 2,020,000 | 505,500 | 505,500 |
| 600 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 3,600 |
| 28,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701,000 | 27,000 | 27,500 | 28,075 | 28,729 |
| 2,587.50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 1,600 | 1,975 | 2,350 | 2,687.50 |
| 21,400 | 0 | 40,990,000 | 47,360,000 | 65,160,000 | 77,010,000 | 16,400 | 41,011,400 | 47,381,400 | 65,181,400 | 77,031,400 |
| 21,400 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 21,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 4,700 | 0 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 3,500 | 5,700 | 5,900 | 6,100 | 6,300 |
| 30,000 | 0 | 12,300,000 | 14,210,000 | 16,630,000 | 23,110,000 | 30,000 | 12,330,000 | 14,240,000 | 16,660,000 | 23,140,000 |

# LAMPIRAN III

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**NOMOR 17 TAHUN 2025**
**TENTANG**
**RENCANA STRATEGIS**
**KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029**

**KERANGKA REGULASI**
**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA RI**
**2025-2029**

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan RPP Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama | 1. Penajaman Fungsi Kementerian Agama;<br>2. Penataan Fungsi Direktorat Jendral Pendidikan Islam;<br>3. Pembentukan Direktorat Jendral Pesantren, dan<br>4. Penghapusan materi mengenai Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah | - Sekretaris Jenderal (Biro Hukum, Biro Ortala dan Biro Perencanaan)<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; | - Kementerian Haji dan Umrah | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan | Perubahan ini perlu dilakukan dalam hal RUU Sisdiknas dilakukan perubahan, maka Peraturan Pelaksananya dimungkinkan untuk berubah. | - Sekretaris Jenderal (Biro Hukum)<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;<br>- Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan<br>- Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu. | - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah<br>- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains | 2025 |
| 3 | *RPP perubahan atas PP No 39/2021 ttng Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal* | Amanat Perpres BPJPH | - Sekretaris Jenderal (Biro Hukum) | - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (KUB) | Penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, melalui regulasi yang mampu mendorong keterlibatan semua pihak—baik negara, tokoh agama, maupun masyarakat—dalam menyelesaikan potensi konflik keagamaan dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman. | - Pusat Kerukunan Umat Beragama;<br>- Sekretaris Jenderal (Biro Hukum) | - Kementerian Dalam Negeri<br>- Komnas HAM | 2025 |
| 5 | Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama | Penyelerasan terhadap revisi Pearturan Presiden Nomor 152 terkait Direktoat Haji dan Umrah dengan penajaman revisi pada :<br>• Penajaman Fungsi Kementerian Agama;<br>• Penataan Fungsi Direktorat Jendral Pendidikan Islam;<br>• Pembentukan Direktorat Jendral Pesantren, dan<br>• Penghapusan materi mengenai Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah | - Sekretaris Jenderal (Biro Hukum, Biro Ortala dan Biro Perencanaan)<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; | - Sekretariat Jendral<br>- Direktorat Jendral Pendidikan Islam<br>- Biro Hukum<br>- Biro Organisasi dan Tata Laksana<br>- Biro Perencanaan dan Penganggaran | 2025 |
| 6 | RPMA tentang Perubahan atas PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama | Perlunya upaya perlindungan anak secara holistik dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, tidak terbatas pada kekerasan seksual saja. | - Sekjen | - Sekjen | 2025 |
| 7 | RPMA tentang Perubahan atas PMA 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah | Penguatan pengelolaan pembelajaran dan standarisasi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum | - Sekjen dan Pendis | - Sekjen; dan Pendis | 2027 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | RPMA tentang Perubahan PMA 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam | Penyesuaian ketentuan mengenai pengaturan pendidikan Keagamaan Islam berdasarkan PP 55 Tahun 2007 dan UU Pesantren. Penguatan penyelenggaraan Pendidikan Quran dan Pendidikan Diniyah Takmiliyah | - Sekjen dan Pendis | - Sekjen dan Pendis | 2028 |
| 9 | RPMA tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau | Pengakuan kompetensi dan peningkatan efektifitas pembelajaran | - Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha | - Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha | 2025 |
| 10 | Revisi PMA 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah | Harmonisasi kebijakan mengenai standar kompetensi kepala madrasah dan penambahan ketentuan seleksi kepala Madrasah Unggulan | - Sekjen dan Pendis | - Sekjen dan Pendis | 2025 |
| 11 | RPMA tentang Perubahan atas PMA 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah | Penguatan pengelolaan dan peningkatan layanan madrasah | - Sekjen dan Pendis | - Sekjen dan Pendis | 2026 |
| 12 | RPMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah | Penguatan organisasi dan kelembagaan madrasah | - Sekjen dan Pendis | - Sekjen dan Pendis | 2026 |
| 13 | RPMA tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri | Standarisasi pembentukan organ Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam rangka Peningkatan Layanan dan Penguatan organisasi dan kelembagaan PTKN | - Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha | - Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha | 2027 |
| 14 | RPMA tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan | Standarisasi penyusunan statuta bagi PTK dalam rangka penguatan pengelolaan PTK | - Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha | - Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha | 2026 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | RPMA tentang Kemasjidan | *Masjid/Musala di Indonesia sangat banyak, beragam tipologinya, dan umumnya dikelola oleh masyarakat. Karena berkaitan dgn pelayanannya untuk umat/ masyarakat, maka pengaturan tata kelolanya diperlukan. Pemerintah hadir membersamai transformasi masjid menjadi lebih profesional, moderat, berdaya, dan berdampak. Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih memadai dan dapat memayungi pembinaan tsb. Secara teknis, regulasi ini menjadi omnibus terhadap intisari regulasi Dirjen Bimas yg ada, dan berupaya menjawab kondisi dan kebutuhan aktual dan faktual di masyarakat.* | | | | |
| 16 | Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama | Adanya pengurangan jumlah pusat pada Badan, yang semula 5 pusat menjadi hanya 4 pusat, sedangkan dalam naskah akademik yang diusulkan oleh BMBPSDM adalah sebanyak 5 Pusat Resetrukturisasi Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan dari Sekretariat Jenderal ke BMBPSDM | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pusbangkom | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keagamaan | Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fiungsi unit pelaksana teknis dibawahnya Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja UPT pengembangan kompetensi SDM Keagamaan | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pusbangkom | 2025 |
| 18 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Strategi Kebijakan Bidang Agama | Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fiungsi unit pelaksana teknis dibawahnya Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja Balai Litbang Agama pasca fungsi penelitian dan pengembangan sudah tidak boleh ada selain di BRIN | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pustrajak | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an | Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fiungsi unit pelaksana teknis dibawahnya<br>Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ | 2025 |
| 20 | Perubahan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama | Adanya perubahan Nomenklatur Kementerian yang menjadi anggota Sekretariat Bersama Pembaharuan nomenklatur Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang berlaku dalam Kabinet Merah Putih | - BMBPSDM | - Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Kemenko PMK | 2025 |
| 21 | Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Moderasi Beragama | Adanya ketentuan dalam KMA 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA, dan MAk bahwa Madrasah wajib memberikan kegiatan kokurikuler yang mengandung unsur moderasi beragama bagi peserta didik.<br>Serta perlu penambahan bentuk pengembangan dalam kegiatan penguatan moderasi beragama yang berupa Film, Musik dan Kegiatan Kebudayaan<br>Terciptanya regulasi yang harmonis dalam norma penguatan moderasi beragama | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang panduan pemantauan dan evaluasi penguatan moderasi beragama pada Kementerian/ Lembaga | Sebagai tindak lanjut dari PMA Nomor 3 Tahun 2024 dan juga belum adanya pengaturan secara teknis tata cara pemantauan, dan evaluasi terhadap penguatan moderasi beragama pada K/L<br>Terwujudnya keseragaman dalam proses pemantauan dan evaluasi implementasi moderasi beragama pada K/L | - BMBPSDM | - Sekretariat Jenderal Kemenag, Kemenko PMK | 2025 |
| 23 | Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan KMA 455 Tahun 2024 tentang Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Pelaksana Harian Sekretariat Bersama | Adanya perubahan Nomenklatur Kementerian yang menjadi anggota Sekretariat Bersama<br>Pembaharuan nomenklatur sesuai dengan yang berlaku dalam Kabinet Merah Putih | - BMBPSDM | - Sekretariat Jenderal Kemenag, Kemenko PMK | 2025 |
| 24 | Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama | 1. Adanya beberapa perubahan substansi maupun nomenklatur pelatihan dari Instansi Pembina Pelatihan (LAN)<br>Terbitnya PMA 15 Tahun 2021 yang mensyahkan adanya loka diklat keagamaan sebagai lembaga pelatihan pada Kementerian Agama<br>Penyempurnaan dan substansi pelatihan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Instansi Pembina Pelatihan, yaitu Lembaga Administrasi Negara, serta penambahan loka diklat keagamaan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pusbangkom | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an | 1. Perlu ada penambahan secara rinci terkait pencetakan mushaf Al-Quran<br>2. Belum adanya ketentuan pengelolaan limbah bahan cetak mushaf Al-Quran<br>3. Sanksi administratif belum memberikan efek jera, sehingga perlu adanya sanksi pidana.<br>Memberikan kepastian terhadap ketentuan pencetakan mushaf Al-Quran, tata Kelola pemusnahan limbah bahan cetak, akreditasi penerbit dan pencetak, dan ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ | 2025 |
| 26 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Formasi JF Pentashih Mushaf Al-Qur'an | Amanat dari PerMenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an<br>Memberikan kepastian penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an | - BMBPSDM | - KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ | 2025 |
| 27 | Perubahan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Akun Angka Standar Buku Internasional dan Layanan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>Memberikan kejelasan terhadap kedudukan dan tata kerja perpustakaan dibawah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | - BMBPSDM | - Perpusnas, Sekretariat Jenderal Kemenag, Sekretariat BMBPSDM | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung-jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Rancangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan tentang Relasi Agama dan Budaya | - | BMBPSDM | - Kemenkum, Kemenbud, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak | 2025 |
| 29 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Penguatan Konsep Ekoteologi bagi Pengelola Rumah Ibadah | - | BMBPSDM | - Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak, Ditjen Bimas semua Agama | 2025 |
| 30 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pembinaan Lembaga Moderasi Beragama di Masyarakat | - | BMBPSDM | - Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak | 2025 |
| 31 | Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang tentang Standar Keluaran Kebijakan Pendidikan dan Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama | - | BMBPSDM | - Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak, LAN | 2025 |
| 32 | Rancangan Surat Edaran Menteri Agama tentang Koordinasi Penyusunan Dokumen Kebijakan pada Kementerian Agama | - | BMBPSDM | - Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak | 2025 |

METADATA / KAMUS PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

# RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN AGAMA

2025-2029

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

# LAMPIRAN IV

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**NOMOR 17 TAHUN 2025**
**TENTANG**
**RENCANA STRATEGIS**
**KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029**

**METADATA/KAMUS PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA**
**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA RI**
**2025-2029**

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| 3 | Konsep/Definisi | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indeks yang menyatakan kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama, maka semakin baik kondisi kehidupan intra dan antar umat beragama yang saling berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, serta menghormati perbedaan dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | IKUB = (Nilai Dim.Toleransi + Nilai Dim.Kesetaraan + Nilai Dim.Kerjasama) / 3 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Nilai Dimensi Toleransi<br>2. Nilai Dimensi Kesetaraan<br>3. Nilai Dimensi Kerjasama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. 0,00 – 20,00 = rukun sangat rendah;<br>2. 20,01 – 40,00 = rukun rendah;<br>3. 40,01 – 60,00 = rukun sedang;<br>4. 60,01 – 80,00 = rukun tinggi;<br>5. 80,01 – 100,00 = rukun sangat tinggi. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional dan Provinsi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | https://ppid.kemenag.go.id/v5/indeks_kub.php |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Kesalehan Umat Beragama |
| 3 | Konsep/Definisi | Suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesalehan sosial individu atau kelompok dalam suatu komunitas agama. Indeks ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial yang mencerminkan implementasi ajaran agama dalam hubungan antarmanusia dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKS), dan indkes ritus individual semakin baik impelementasi ajaran agama pada aspek sosial dan peribadatan, dilakukan oleh umat beragama di Indonesia. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Indeks Kesalehan UB =(I.Peduli/Solidaritas Sosial + I. Relasi antar Manusia (Kebhinekaan) + I. Menjaga Etika dan Budi Pekerti + I. Menjaga Kelestarian Alam + I. Stabilitas Sosial )/5 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Indeks Peduli/Solidaritas Sosial<br>2. Indeks Relasi antar Manusia (Kebhinekaan)<br>3. Indeks Menjaga Etika dan Budi Pekerti<br>4. Indeks Menjaga Kelestarian Alam<br>5. Indeks Stabilitas Sosial |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Indeks Kesalehan Umat Beragama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. 0-20 = Sangat rendah;<br>2. 20-30 = Rendah;<br>3. 30-50 = Sedang;<br>4. 50-75 = Tinggi;<br>5. 75-100 = Sangat tinggi. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional dan Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Layanan Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Indeks layanan kementerian agama adalah indeks komposit dari 4 (empat) indeks layanan yang telah dilaksanakan di Kementerian Agama yaitu: indeks Layanan KUA, Indeks Layanan Haji, Indeks Layanan Sertifikasi Halal, dan Layanan Penyuluhan Agama |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi ILK menggambarkan layanan publik keagamaan yang diberikan juga semakin baik |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | ILK = sigma (xi*wi)<br><br>di mana<br>xi = indeks ke-i<br>wi = Bobot indeks ke-I<br>i = 1,2,3,4 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Indeks Kepuasan Layanan KUA<br>2. Indeks Kepuasan Jemaah Haji<br>3. Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal<br>4. Indeks Kepuasan Layanan Penyuluh Agama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Indeks Layanan Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Nilai Indeks 25-43,75 = D (Tidak baik);<br>2. Nilai Indeks 43,76-62,50 = C (Kurang baik);<br>3. Nilai Indeks 62,51-81,25 = B (Baik);<br>4. Nilai Indeks 81,26-100,0 = A (Sangat baik). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | Sistem metadata BMBPSDM |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase rekomendasi Early Warning System (keagamaan) yang ditindaklanjuti (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu) |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator yang mengukur tingkat responsivitas pemangku kepentingan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dalam isu keagamaan. Indikator ini merepresentasikan proporsi rekomendasi yang telah ditindaklanjuti melalui langkah konkret seperti verifikasi lapangan, fasilitasi penyelesaian, mediasi sosial-keagamaan, maupun intervensi kebijakan. Penilaian dilakukan berdasarkan data hasil pemantauan, laporan pelaksanaan tindak lanjut, serta dokumentasi koordinasi antar lembaga, yang mencerminkan efektivitas sistem deteksi dini dalam mendukung stabilitas dan kerukunan kehidupan beragama di tingkat nasional maupun daerah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase rekomendasi Early Warning System (Keagamaan) yang ditindaklanjuti, semakin baik efektivitas respons dan koordinasi dalam mencegah potensi gangguan kehidupan beragama. Peningkatan indikator ini mencerminkan berfungsinya sistem deteksi dini, kesiapsiagaan kelembagaan, dan komitmen bersama dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br><br>a = Jumlah rekomendasi EWS yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah rekomendasi EWS yang dikeluarkan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Rekomendasi EWS Keagamaan yang Ditindaklanjuti<br>2. Jumlah Total Rekomendasi EWS Keagamaan yang Dikeluarkan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Rekomendasi Early Warning System (Keagamaan) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan status tindak lanjut: Ditindaklanjuti, Belum Ditindaklanjuti |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Indeks kesalehan Umat Beragama (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu) |
| 3 | Konsep/Definisi | Indeks Kesalehan Sosial mengukur sejauh mana masyarakat memiliki kesalehan sosial yang dapat diukur melalui beberapa dimensi seperti kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, serta pemeliharaan lingkungan. Penilaian ini dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai kelompok agama di Indonesia |
| 4 | Interpretasi | Indeks Kesalehan Sosial mengukur sejauh mana masyarakat memiliki kesalehan sosial yang dapat diukur melalui beberapa dimensi seperti kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, serta pemeliharaan lingkungan. Penilaian ini dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai kelompok agama di Indonesia |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | IKS = [(a + b + c + d + e) / 5] x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Nilai dimensi kepedulian sosial<br>b = Nilai dimensi relasi antar manusia<br>c = Nilai dimensi etika dan budi pekerti<br>d = Nilai dimensi pelestarian lingkungan<br>e = Nilai dimensi relasi dengan negara |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Kesalehan Sosial Masyarakat<br>2. Dimensi Kepedulian Sosial<br>3. Relasi Antar Manusia<br>4. Menjaga Etika dan Budi Pekerti<br>5. Melestarikan Lingkungan<br>6. Relasi dengan Negara dan Pemerintah. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Survei tingkat kepatuhan umat dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah<br>2. Pembinaan keagamaan melalui majelis taklim, pesantren, dan lembaga dakwah<br>3. Kegiatan sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)<br>4. Penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat melalui pendidikan dan dakwah<br>5. Evaluasi dan penelitian mengenai praktik keberagamaan umat Islam |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Sangat Rendah =0-20<br>2. Rendah = 20-30<br>3. Sedang = 30-50<br>2. Tinggi = 70-75<br>3 Sangat Tinggi = 75=100. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lembaga agama dan Lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu) |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lembaga agama dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan mengukur proporsi lembaga dan ormas keagamaan yang telah mencapai atau melampaui standar pengelolaan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama atau otoritas terkait. Standar pengelolaan ini mencakup aspek administratif, operasional, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan program keagamaan. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta terdaftar di Kementerian Agama. Tokoh agama adalah setiap pemuka agama di indonesia yang mengajarkan nilai-nilai agama dan berceramah serta ditetapkan Kementerian agama |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas lembaga dan ormas keagamaan telah memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan, mencerminkan kualitas manajemen yang baik dan profesionalisme dalam operasionalnya. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan pembinaan lebih lanjut untuk memastikan standar pengelolaan terpenuhi |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan = (a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan<br>b = Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang terdaftar |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lembaga agama yang memenuhi standar pengelolaan<br>2. Jumlah lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan<br>3. Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. administratif (tanda daftar)<br>2. operasional (jenis layanan keagamaan dan pendidikan)<br>3. transparansi (laporan penggunaan anggaran)<br>4. akuntabilitas (opini kelembagaan-akreditasi)<br>5. efektivitas |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Triwulan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Lembaga agama<br>2. Lembaga sosial keagamaan |
| 11 | Level Estimasi | 1. Nasional<br>2. Provinsi<br>3. Kab/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dimanfaatkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase naskah kebijakan pembangunan di bidang agama yang memenuhi kriteria moderasi beragama, maslahat bagi masyarakat, dan berdampak positif sesuai hasil penilaian resmi |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin banyak naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang disusun dan dinyatakan moderat, maslahat, serta berdaya guna bagi masyarakat. Indikator ini mencerminkan kualitas perumusan kebijakan bidang agama untuk membangun kehidupan beragama yang rukun, damai, dan berkeadilan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dinilai moderat/maslahat dan berdampak<br>b : Jumlah total naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dimanfaatkan<br>2. Jumlah seluruh naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penilaian Moderasi, Maslahat, dan Dampak Naskah Kebijakan Bidang Agama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan status pemanfaatan: Dimanfaatkan, Belum Dimanfaatkan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Moderasi Beragama |
| 3 | Konsep/Definisi | Indeks Moderasi Beragama adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat penerimaan, toleransi, keseimbangan, dan sikap saling menghargai antarumat beragama di Indonesia. Indeks ini disusun berdasarkan pengukuran persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi beragama. |
| 4 | Interpretasi | Nilai indeks menunjukkan sejauh mana masyarakat atau kelompok sasaran mempraktikkan prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi nilai indeks (mendekati 100), semakin tinggi pula tingkat moderasi beragama, yang berarti masyarakat lebih inklusif, toleran, dan mampu menjaga kerukunan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Indeks = (Σ skor indikator / skor maksimum) × 100<br><br>Keterangan:<br><br>1. Skor indikator dihasilkan dari hasil survei atau asesmen terkait aspek moderasi beragama.<br>2. Skor maksimum adalah skor tertinggi yang mungkin dicapai berdasarkan instrumen pengukuran. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor toleransi antarumat beragama<br>2. Skor penerimaan terhadap perbedaan<br>3. Skor penolakan terhadap kekerasan atas nama agama<br>4. Skor komitmen kebangsaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Indeks Moderasi Beragama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan aspek penilaian: toleransi, penerimaan, penolakan, komitmen kebangsaan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan. |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan tingkat peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang agama dan keagamaan, yang diperoleh melalui pelatihan, pendidikan, pendampingan, atau kegiatan pengembangan kapasitas lainnya. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan efektivitas program peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh lembaga terkait. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi SDM agama dan keagamaan yang mengalami peningkatan kompetensi dibandingkan periode sebelumnya. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a – b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah SDM agama dan keagamaan yang kompetensinya meningkat pada tahun berjalan<br>b = Jumlah SDM agama dan keagamaan yang kompetensinya meningkat pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi<br>2. Jumlah SDM agama dan keagamaan yang memperoleh skor kompetensi lebih tinggi dibanding asesmen sebelumnya |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Program Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan bentuk kegiatan: Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sertifikasi, Pendidikan dan Pelatihan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur tingkat kepuasan kelompok sasaran terhadap kinerja layanan penyuluh agama dan pemetaan pelibatan stakeholder dalam bimbingan dan penyuluhan agama |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi indeks layanan menunjukkan kinerja penyuluh agama telah memenuhi ekspektasi kelompok sasaran |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Survey (Gap antara ekspektasi dan persepsi pelayanan yang diterima) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Persyaratan<br>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur<br>3. Waktu Penyelesaian<br>4. Biaya/Tarif *)<br>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan<br>6. Kompetensi Pelaksana **)<br>7. Perilaku Pelaksana **)<br>8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan<br>9. Sarana dan prasarana |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Rekrutmen dan penempatan penyuluh agama Islam<br>2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas penyuluh agama Islam<br>3. Monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh agama Islam<br>4. Penyediaan materi dakwah dan bimbingan keagamaan<br>5. Pendampingan dan konsultasi keagamaan bagi masyarakat |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | 1. Persyaratan =10%<br>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur =10%<br>3. Waktu Penyelesaian =10%<br>4. Biaya/Tarif *) =10%<br>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan =10%<br>6. Kompetensi Pelaksana **) =10%<br>7. Perilaku Pelaksana **) =10%<br>8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan =10%<br>9. Sarana dan prasarana =20% |
| 11 | Level Estimasi | 1. Nasional<br>2. Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan merujuk pada persentase dari calon pengantin (catin) yang telah menerima panduan atau bimbingan khusus mengenai perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan perkawinan dapat mencakup aspek-aspek seperti kesiapan mental, tanggung jawab dalam pernikahan, keseimbangan peran suami-istri, serta informasi hukum dan agama terkait pernikahan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi partisipasi Catin dalam BImwin, menandakan semakin besar peran pemerimtah dalam memfasilitasi bimwin bagi para Catin |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan = (a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah calon pengantin yang mendapatkan Bimwin<br>b = Jumlah calon pengantin yang terdaftar |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan<br>2. Jumlah calon pengantin yang terdaftar |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pengembangan kurikulum dan modul bimbingan perkawinan<br>2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga pembimbing perkawinan<br>3. Evaluasi efektivitas program bimbingan perkawinan<br>4. Survei kepuasan peserta bimbingan perkawinan<br>5. Penyediaan sarana dan media pendukung bimbingan perkawinan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Bimbingan<br>2. Pembinaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah, Kristiani, Bahagia, Sukinah, Hitta Sukhaya, Anhe Jiating |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga merujuk pada proporsi atau persentase dari total rumah tangga dalam suatu komunitas atau wilayah yang telah menerima bimbingan atau panduan keagamaan secara khusus untuk keluarga. Bimbingan keagamaan keluarga mencakup aspek-aspek spiritual, etika, dan nilai-nilai keagamaan yang dapat memperkukuh hubungan keluarga, meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keagamaan, dan memberikan pedoman bagi kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi partisipasi rumah tangga dalam mendapatkan bimbingan keluarga keluarga, menandakan semakin besar peran pemerintah dalam memfasilitasi BK bagi rumah tangga Islam di Indonesia |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan = (a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan<br>b = Jumlah rumah tangga yang terdaftar |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan<br>2. Jumlah rumah tangga yang terdaftar |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pengembangan materi dan metode bimbingan keagamaan keluarga<br>2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pembimbing keagamaan keluarga<br>3. Evaluasi dan monitoring efektivitas layanan bimbingan keagamaan<br>4. Survei kepuasan keluarga terhadap layanan bimbingan keagamaan<br>5. Penyediaan sarana dan media edukasi keagamaan bagi keluarga |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Bimbingan<br>2. Pembinaan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu) yang memenuhi standar |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan proporsi sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan peribadatan (seperti masjid, musholla, gereja, pura, vihara, klenteng, dan fasilitas penunjang) yang telah memenuhi standar teknis, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan sejauh mana fasilitas peribadatan di wilayah tertentu sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan ibadah umat beragama. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang memenuhi standar<br>b = Total sarana dan prasarana peribadatan yang diidentifikasi/dinilai |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Data hasil penilaian kelayakan sarana dan prasarana peribadatan<br>2. Data jumlah total sarana dan prasarana peribadatan yang menjadi objek evaluasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Layanan Peribadatan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis rumah ibadah: Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - DIrektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Literasi Kitab Suci Agama (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu) |
| 3 | Konsep/Definisi | Indeks Literasi Kitab Suci Agama adalah ukuran komposit yang menilai tingkat kemampuan individu (pemeluk agama) dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan ajaran fundamental yang terkandung dalam kitab suci agama masing-masing, sebagai landasan untuk mewujudkan kehidupan beragama yang toleran, inklusif, dan moderat. |
| 4 | Interpretasi | Nilai ini mencerminkan sejauh mana upaya Kementerian Agama (melalui program pendidikan, bimbingan, dan penyediaan lektur) berhasil meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan masyarakat dari sumber primer (Kitab Suci). Indeks yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman kontekstual dan mendalam terhadap ajaran agama, yang menjadi modal penting bagi penguatan Moderasi Beragama dan kerukunan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | ILKSA = ((Wa.a)+(Wb.b) / (Wa + Wb))<br><br>Keterangan:<br>a. IPKKS<br>b. IANKKS dihitung berdasarkan rata-rata skor item pertanyaan survei (yang telah dibakukan) untuk dimensi kognitif dan aplikatif. Skala yang digunakan umumnya adalah skala interval yang dinormalisasi.<br><br>- Wa dan Wb : Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, aspek aplikasi nilai sosial (Wb) sering diberi bobot yang sama atau sedikit lebih besar daripada pemahaman konten (Wa)).<br>- Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100), di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat literasi yang lebih baik. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Indeks Pemahaman Konten Kitab Suci (IPKKS)<br>b. Indeks Aplikasi Nilai Kitab Suci dalam Kehidupan Sosial (IANKKS) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Survei Nasional Literasi Keagamaan<br>- Pengembangan Instrumen Pengukuran Literasi Kitab Suci oleh para ahli di bidang lektur dan riset keagamaan.<br>- Pelaksanaan Program Bimbingan Keagamaan dan Pendidikan yang menekankan pada pemahaman kontekstual Kitab Suci |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Berkala |
| 10 | Klasifikasi | 1. Kualitas Kehidupan Beragama<br>2. Literasi Keagamaan dan Moderasi Beragama |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>- Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial/ dana punia/ Paramita/ Kebajikan keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu) untuk peningkatan kesejahteraan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan adalah indikator yang mengukur proporsi penduduk miskin yang mendapatkan bantuan dari dana sosial keagamaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dibandingkan dengan total penduduk miskin dalam suatu wilayah atau periode tertentu. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin luas jangkauan dan efektivitas distribusi dana sosial keagamaan dalam membantu penduduk miskin meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan: (a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a: Penerima manfaat bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan<br>b: Jumlah penduduk miskin pada Regsosek |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Penerima manfaat bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan<br>2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)<br>2. Program bantuan sosial keagamaan bagi penduduk miskin<br>3. Pemberdayaan ekonomi berbasis dana sosial keagamaan<br>4. Monitoring dan evaluasi efektivitas penyaluran dana sosial keagamaan<br>5. Pendataan dan verifikasi penerima manfaat dana sosial keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Penerima manfaat bidang ekonomi<br>2. Penerima manfaat bidang pendidikan<br>3. Penerima manfaat bidang kesehatan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lembaga dana sosial/ dana punia/ Paramita/ Kebajikan keagamaan (Islam/Kristen/ Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu) yang akuntabel dan profesional |
| 3 | Konsep/Definisi | Lembaga dana sosial keagamaan yang akuntable dan profesional adalah institusi yang bertugas mengelola dana sosial keagamaan (zakat, infak, sedekah (ZIS), wakaf) secara transparan, amanah, serta sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Profesionalisme dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan lembaga ini dalam mencapai tujuan sosial dan keagamaan, yaitu mendistribusikan dana secara tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan umat. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasi lembaga sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional, makin membaik tata kelola dan pelayanan (pengumpulan dan distribusi dana sosial keagamaan) terhadap masyarakat |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan = (a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Lembaga dana sosial keagamaan dengan penilaian baik, akuntabel, profesional<br>b = Jumlah populasi lembaga dana sosial keagamaan yang terdaftar |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang profesional dan akuntabel,<br>2. Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Standarisasi dan sertifikasi lembaga pengelola dana sosial keagamaan<br>2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas tata kelola keuangan lembaga<br>3. Audit dan evaluasi transparansi serta akuntabilitas lembaga<br>4. Digitalisasi dan pelaporan keuangan berbasis teknologi<br>5. Pengawasan dan pendampingan kelembagaan oleh otoritas terkait |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Tanda daftar<br>2. Data hasil verifikasi dan validasi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Kepuasan Layanan KUA |
| 3 | Konsep/Definisi | Pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan umat Islam terhadap rangkaian kegiatan yang terkait dengan layanan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan. Berdasarkan Permen PAN dan RB No 14/2017, unsur kepuasan masyarakat meliputi: Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana dan prasarana |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai kepuasaan layanan KUA, semakin tinggi kualitas layanan KUA di tingkat kecamatan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | IKM KUA = (A+B+C+D+E+F+G+H+I) / 9<br><br>Keterangan:<br>A = Skor persyaratan<br>B = Skor sistem, mekanisme, dan prosedur<br>C = Skor waktu<br>D = Skor biaya<br>E = Skor spesifikasi produk<br>F = Skor kompetensi pelaksana<br>G = Skor perilaku pelaksana<br>H = Skor penanganan aduan<br>I = Skor sarana prasarana |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Dimensi persyaratan<br>2. Dimensi sistem, mekanisme, dan prosedur<br>3. Dimensi waktu<br>4. Dimensi biaya<br>5. Dimensi spesifikasi produk<br>6. Dimensi kompetensi pelaksana<br>7. Dimensi perilaku pelaksana<br>8. Dimensi penanganan aduan<br>9. Dimensi sarana prasarana |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA<br>2. Evaluasi dan monitoring kualitas layanan KUA<br>3. Peningkatan kapasitas SDM dan standar pelayanan di KUA<br>4. Digitalisasi dan inovasi layanan administrasi KUA<br>5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan KUA |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis layanan: Pernikahan, Rujuk, Bimbingan Perkawinan, Konsultasi Keluarga, Layanan Wakaf/Zakat, Layanan Administrasi Keagamaan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Tidak |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan al-Qur'an dan Edukasi al-Qur'an |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an (penilaian kelayakan, ketepatan, dan keaslian teks) serta kegiatan edukasi Al-Qur'an (penyuluhan, pelatihan, dan literasi). Penilaian kepuasan dilakukan melalui survei kepada pemohon, penerbit, lembaga pendidikan, dan masyarakat penerima layanan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai kepuasan, semakin baik persepsi pengguna terhadap kualitas, ketepatan, aksesibilitas, dan profesionalitas layanan pentashihan serta program edukasi Al-Qur'an. Nilai ini dapat digunakan untuk memantau efektivitas pelayanan dan merumuskan strategi peningkatan mutu layanan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Kepuasan = (Σ skor jawaban responden / skor maksimum) × 100<br><br>Keterangan:<br>1. Skor jawaban responden diperoleh dari kuesioner kepuasan layanan<br>2. Skor maksimum adalah nilai tertinggi yang dapat dicapai berdasarkan jumlah pertanyaan dan bobot penilaian |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Data hasil survei kepuasan layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an<br>2. Data hasil survei kepuasan edukasi Al-Qur'an |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Berdasarkan jenis layanan: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edukasi dan Sosialisasi Al-Qur'an |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Kepuasan Layanan :<br>Jamaah haji Indonesia (IKJHI) dalam negeri<br>Jamaah haji Indonesia (IKJHI) luar negeri |
| 3 | Konsep/Definisi | Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) adalah indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan jamaah haji Indonesia terhadap pelayanan yang diberikan selama proses penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Arab Saudi) |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik persepsi jamaah terhadap kualitas layanan yang diterima. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan bahwa pelayanan telah memenuhi atau melampaui harapan jamaah |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan 1 :<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah jamaah haji yang menyatakan puas terhadap layanan haji (dalam negeri/luar negeri)<br>b : Jumlah total jamaah haji yang menjadi responden survei IKJHI<br><br>Rumusan 2 :<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah jamaah haji yang menyatakan puas terhadap layanan haji luar negeri<br>b : Jumlah total jamaah haji yang menjadi responden survei IKJHI luar negeri |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | IKJHI_DN : Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Dalam Negeri<br><br>IKJHI_LN : Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Luar Negeri |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Dalam Negeri<br>2. Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Luar Negeri |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan tahapan layanan: Pra-keberangkatan, Pelayanan di Arab Saudi, Pasca-keberangkatan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Pada Situs BPS |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Agama |
| 3 | Konsep/Definisi | Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Agama adalah ukuran komposit yang menilai tingkat kepuasan penerbit, penulis, atau pemangku kepentingan lainnya (sebagai pengguna layanan) terhadap seluruh aspek pelayanan yang diberikan oleh unit kerja Kementerian Agama dalam proses penilaian atau telaah buku keagamaan untuk penerbitan Tanda Layak Terbit atau rekomendasi. |
| 4 | Interpretasi | Nilai ini mencerminkan persepsi pengguna layanan terhadap kualitas, kecepatan, transparansi, dan objektivitas proses penilaian buku agama. Indeks yang tinggi menunjukkan bahwa unit kerja telah menyelenggarakan layanan telaah buku yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan publik, yang pada akhirnya akan mendukung peredaran literatur keagamaan yang berkualitas. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | IKLPBA = ((Wa.a)+(Wb.b) / (Wa + Wb))<br><br>Keterangan:<br>a. IKPKL<br>b. IKPHP dihitung berdasarkan rata-rata skor item survei kepuasan yang diukur menggunakan skala interval (misalnya, skala Likert 1-4 atau 1-5).<br><br>- Wa dan Wb: Bobot yang ditetapkan untuk setiap dimensi indeks variabel (misalnya, kualitas hasil penilaian (Wb) sering diberi bobot yang lebih besar).<br>- Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100) untuk memudahkan perbandingan. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Indeks Kepuasan terhadap Prosedur dan Kecepatan Layanan (IKPKL)<br>b. Indeks Kepuasan terhadap Kualitas Hasil Penilaian dan Kompetensi Penilai (IKPHP) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Penilaian dan Telaah Buku Keagamaan.<br>- Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penilaian Buku Agama<br>- Pengelolaan Data dan Administrasi Penilaian Naskah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Indeks (0-100) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Kualitas Pelayanan Publik<br>- Kinerja Pelayanan Publik Bidang Lektur Keagamaan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase pasangan calon pengantin (Catin) Muslim yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah mengikuti atau mendapatkan layanan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Kementerian Agama. Layanan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin dalam membangun dan mengelola rumah tangga yang harmonis (sakinah), sekaligus menjadi salah satu upaya pencegahan stunting dan pengurangan angka perceraian. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan keberhasilan program pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam memastikan setiap pasangan yang akan menikah mendapatkan edukasi pranikah yang memadai. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap pembinaan keluarga yang berkualitas. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan Bimwin, baik dari sisi kapasitas penyelenggara (KUA) maupun tingkat partisipasi dan kesadaran calon pengantin. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Pasangan Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan<br>(b) = Total Jumlah Pasangan Calon Pengantin yang Mendaftar dan Wajib Bimwin |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Pasangan Calon Pengantin Muslim yang Telah Mengikuti/Mendapatkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin).<br>b. Total Jumlah Pasangan Calon Pengantin Muslim yang Mendaftarkan Pernikahan dan Wajib Mengikuti Bimwin dalam Periode yang Sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan di KUA.<br>- Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi Calon Pengantin (Catin) (Bimwin Tatap Muka atau Mandiri).<br>- Pendataan dan Pelaporan Calon Pengantin yang Mengikuti Bimwin di setiap KUA.<br>- Evaluasi Program Keluarga Sakinah dan Penurunan Angka Perceraian/Stunting. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | - Bulanan<br>- Triwulanan<br>- Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Pelaksanaan Bimwin: Tatap Muka, Mandiri (E-Learning), Kombinasi.<br>- Berdasarkan Usia Calon Pengantin: Usia Remaja (di bawah 21 tahun), Usia Dewasa.<br>- Berdasarkan Wilayah: Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan (KUA). |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>- Provinsi<br>- Kabupaten atau Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Lembaga Wakaf yang Diawasi adalah rasio yang mengukur jumlah lembaga pengelola wakaf (Nazhir) yang telah menjalani proses pengawasan dan pembinaan secara berkala oleh Kementerian Agama atau Badan Wakaf Indonesia (BWI), di mana pengawasan tersebut mencakup aspek kepatuhan syariat, akuntabilitas pengelolaan dana/aset, dan profesionalisme tata kelola kelembagaan, dibandingkan dengan total lembaga wakaf terdaftar yang wajib diawasi. |
| 4 | Interpretasi | Nilai ini mencerminkan keberhasilan Kementerian Agama dalam memastikan tata kelola wakaf yang baik (Good Waqf Governance). Peningkatan persentase menunjukkan peningkatan kualitas dan frekuensi pengawasan, yang berdampak pada menurunnya risiko penyalahgunaan aset wakaf serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap instrumen wakaf, sehingga mendukung penguatan ekonomi umat. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ( a / b ) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Lembaga Wakaf yang Diawasi dan Dinilai Kepatuhannya.<br>b = Jumlah Lembaga Wakaf Terdaftar yang Wajib Diawasi. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Lembaga Wakaf (Nazhir) yang Diawasi dan Dinilai Kepatuhannya<br>b. Jumlah Lembaga Wakaf (Nazhir) Terdaftar yang Wajib Diawasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Nazhir Wakaf secara periodik.<br>- Audit Kepatuhan Syariat dan Keuangan Nazhir yang melibatkan auditor syariah dan akuntan publik.<br>- Pendataan dan Registrasi Lembaga Wakaf (Nazhir).<br>- Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Nazhir. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan<br>- Kinerja Pengelolaan Wakaf |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>- Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio yang mengukur sejauh mana program pembinaan dan bimbingan keagamaan mengenai Keluarga Sakinah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama telah menjangkau dan diikuti oleh rumah tangga (pasangan suami istri yang sudah menikah), bukan hanya calon pengantin. Bimbingan ini meliputi materi seputar relasi suami-istri, pendidikan anak, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan, dan penanggulangan konflik, dengan tujuan utama untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian (post-marital education). |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan efektifnya program post-marital Kemenag (Sekolah Relasi Suami Istri/SERASI atau program Pusaka Sakinah) dalam membina dan memperkuat keluarga yang sudah berjalan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Kemenag dalam meningkatkan kualitas hidup dan keharmonisan keluarga di masyarakat. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa program bimbingan masih berfokus pada calon pengantin dan kurang menjangkau pasangan yang sudah menikah yang juga rentan terhadap masalah keluarga. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah<br>(b) = Total Jumlah Rumah Tangga Target Bimbingan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Rumah Tangga (Pasangan Suami Istri) yang Telah Mengikuti/Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah.<br>b. Total Jumlah Rumah Tangga (Pasangan Suami Istri) yang Menjadi Target/Sasaran Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah (Seringkali disasar pada usia perkawinan tertentu, misalnya 1-5 tahun). |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah (Post-marital) dan program pendukung (misalnya, Sekolah Relasi Suami Istri/SERASI, Pusaka Sakinah).<br>- Pendataan Peserta Bimbingan Keluarga Sakinah.<br>- Pemetaan Rumah Tangga Rentan dan Keluarga Muda sebagai Sasaran Bimbingan.<br>- Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Keluarga. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Usia Pernikahan: Keluarga Muda (1-5 tahun), Keluarga Menengah (6-15 tahun).<br>- Berdasarkan Jenis Bimbingan: Tatap Muka, Online, atau Konsultasi (Counselling).<br>- Berdasarkan Wilayah: Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan (KUA). |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>- Provinsi<br>- Kabupaten atau Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio antara luas atau nilai harta benda wakaf (baik tanah, bangunan, maupun wakaf uang/ bergerak) yang telah dikelola oleh Nazhir (pengelola wakaf) dan dikembangkan menjadi aset produktif (misalnya, menjadi klinik kesehatan, sekolah dengan unit usaha, pertanian, atau investasi syariah) dibandingkan dengan total seluruh harta benda wakaf yang ada di wilayah tertentu. Wakaf Produktif berarti harta wakaf yang menghasilkan nilai tambah atau keuntungan (return) yang hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat (mauquf 'alaih), bukan sekadar aset sosial (konsumtif). |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengubah aset wakaf yang awalnya bersifat pasif (misalnya, tanah kosong atau hanya digunakan untuk masjid/kuburan) menjadi aset yang aktif menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial berkelanjutan. Ini adalah indikator penting dalam modernisasi dan optimalisasi ekonomi syariah. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar aset wakaf masih bersifat pasif atau belum disentuh oleh manajemen profesional Nazhir |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Luas/Nilai Wakaf yang Dikelola Produktif<br>(b) = Total Luas/Nilai Seluruh Harta Benda Wakaf Terdaftar |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Luas/Nilai Harta Benda Wakaf yang Dikelola dan Dikembangkan Secara Produktif.<br>b. Total Luas/Nilai Seluruh Harta Benda Wakaf yang Terdaftar. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Program Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Nazhir Wakaf.<br>- Program Inkubasi Wakaf Produktif dan Pelaksanaan Pilot Project Wakaf.<br>- Pendataan dan Pemutakhiran Data Harta Benda Wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kemenag.<br>- Pengawasan dan Pelaporan Pengelolaan Harta Benda Wakaf. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%), Luas (hektar/m2), atau Nilai Rupiah (untuk Wakaf Uang/Bergerak) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Harta: Wakaf Tanah/Tidak Bergerak, Wakaf Uang/Bergerak.<br>- Berdasarkan Sektor Produktif: Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, Jasa/Perdagangan.<br>- Berdasarkan Wilayah: Provinsi, Kabupaten/Kota. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional dan Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio yang mengukur proporsi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki izin resmi dari Kemenag dan Nazhir Wakaf Badan Hukum yang terdaftar dan/atau memiliki sertifikasi profesional, yang telah menerima program pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan, atau pengawasan secara langsung dari Kementerian Agama (Kemenag) dan/atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam periode waktu tertentu. Pembinaan ini mencakup aspek regulasi, tata kelola (governance), pelaporan, dan optimalisasi penghimpunan maupun pendayagunaan dana/aset. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan efektifnya peran Kemenag sebagai regulator dan fasilitator dalam meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kepatuhan syariah dari Lembaga Zakat (BAZNAS/LAZ) dan Lembaga Wakaf (Nazhir Badan Hukum). Hal ini vital untuk meningkatkan kepercayaan publik dan optimalisasi potensi dana sosial keagamaan. Persentase yang rendah mengindikasikan masih banyak lembaga yang beroperasi tanpa pembinaan memadai, berpotensi kurang profesional atau tidak patuh pada regulasi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Lembaga Zakat dan Wakaf yang Dibina<br>(b) = Total Jumlah Lembaga Zakat dan Wakaf Terdaftar |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Lembaga Zakat (LAZ) dan Lembaga Wakaf (Nazhir Badan Hukum/LKS PWU) yang telah Menerima Pembinaan/Bimbingan Teknis.<br>b. Total Jumlah Lembaga Zakat (LAZ) dan Lembaga Wakaf (Nazhir Badan Hukum/LKS PWU) yang Terdaftar dan Wajib Dibina. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tata Kelola Zakat dan Wakaf (bagi amil dan nazhir).<br>- Program Sertifikasi Profesional Amil dan Nazhir Wakaf.<br>- Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Rutin Lembaga Zakat dan Wakaf.<br>- Penguatan Sistem Informasi Zakat (Sizakat) dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) untuk pendataan dan pelaporan. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Lembaga: Lembaga Amil Zakat (LAZ), Nazhir Wakaf Badan Hukum, LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).<br>- Berdasarkan Skala Pembinaan: Pembinaan Nasional, Pembinaan Wilayah/Provinsi. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional dan Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal" |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai Layanan Penyuluh Keagamaan adalah ukuran komposit yang menilai efektivitas, kualitas, dan dampak pelaksanaan tugas-tugas penyuluhan keagamaan oleh Penyuluh Agama (PNS maupun Non-PNS) dalam membimbing dan memberikan pencerahan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Nilai ini umumnya diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). |
| 4 | Interpretasi | Nilai yang tinggi (mendekati 100 atau kategori Sangat Baik) menunjukkan bahwa Penyuluh Agama telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, responsif, dan memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan pada aspek-aspek pelayanan, kompetensi, dan/atau ketersediaan PA di lapangan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | $IKM = \sum_{i=1}^{n} (NRRi \times Bobot)$<br>Nilai Layanan PAI = IKM x Nilai Dasar (25)<br><br>Keterangan:<br>- NRRi: Nilai Rata-Rata Tertimbang per unsur pelayanan (a).<br>- Bobot: Nilai penimbang setiap unsur pelayanan (1/(Jumlah Seluruh Unsur Layanan (b)). |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Nilai Terbobot dari Setiap Unsur Pelayanan PA (berdasarkan rata-rata skor persepsi responden).<br>b. Jumlah Seluruh Unsur Pelayanan PA yang Dinilai (misalnya: persyaratan, waktu layanan, kompetensi petugas, kesopanan, penanganan pengaduan, dll.) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau Survei Indeks Layanan secara periodik (Triwulan/Semester/Tahunan) terhadap layanan Penyuluh Agama.<br>- Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan yang dilaksanakan oleh PAI kepada kelompok sasaran.<br>'- Pengolahan Data Hasil Kuesioner IKM/SKM. |
| 8 | Ukuran/Satuan | - Angka Indeks/Poin (skala 25 - 100)<br>- Kategori Mutu Pelayanan (Misal: A/Sangat Baik, B/Baik, C/Kurang Baik) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Periodik (Triwulan/Semester/Tahunan) |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Kategori Nilai Mutu (Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, dst.).<br>- Berdasarkan Jenis Penyuluh (PNS/Non-PNS).<br>- Berdasarkan Jenis Layanan/Program (Misal: Konsultasi Keagamaan, Pendampingan Keluarga Sakinah, Pencegahan Radikalisme, dll.). |
| 11 | Level Estimasi | Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase sarana prasarana peribadatan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/ Khonghucu yang memenuhi standar |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar adalah rasio yang mengukur jumlah rumah ibadah (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, dan sejenisnya) dari setiap agama yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi kriteria standar fisik dan administratif yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, dibandingkan dengan total rumah ibadah yang terdata. Standar ini mencakup aspek kelayakan bangunan, keamanan, kelengkapan fasilitas dasar, dan legalitas pendirian. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Nilai ini mencerminkan sejauh mana Kementerian Agama berhasil dalam upaya penjaminan mutu dan kelayakan fisik rumah ibadah. Peningkatan persentase menunjukkan efektivitas program bantuan, rehabilitasi, dan fasilitasi legalitas rumah ibadah, yang berdampak pada peningkatan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan ibadah umat beragama |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) x 100<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar<br>(b) = Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Terdata |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar<br>b. Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Terdata |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan dan Registrasi Rumah Ibadah (berkelanjutan).<br>- Verifikasi dan Audit Fisik Rumah Ibadah (oleh tim teknis dan Bimbingan Masyarakat).<br>- Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah (yang diikuti dengan verifikasi pemenuhan standar).<br>- Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadah (untuk aspek legalitas administrasi). |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Rumah Ibadah (Masjid Raya, Masjid Jami', atau Gereja Paroki dan lainnya).<br>- Berdasarkan Kategori Standar (Misal: Standar Ramah Difabel, Standar Kebersihan/Sanitasi, Standar Administrasi). |
| 11 | Level Estimasi | Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai Pemanfaatan ini mengukur tingkat keberhasilan materi pelatihan atau kurikulum dan efektivitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dalam meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Keagamaan pasca-pelatihan. Intinya adalah melihat sejauh mana hasil diklat (pendidikan dan pelatihan) benar-benar diterapkan di tempat kerja. |
| 4 | Interpretasi | Nilai ini adalah nilai komposit yang mengukur seberapa jauh kurikulum yang telah dirancang dan proses pelatihan yang telah dijamin mutunya (mulai dari perencanaan hingga evaluasi) berdampak pada peningkatan kompetensi dan performa kerja pegawai di unit kerja masing-masing alumni pelatihan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | NA = ((Wa.a)+(Wb.b)))/ (Wa+Wb))<br><br>Keterangan<br>a. PPHHP (Persentase Peserta Pelatihan yang Menerapkan Hasil Pelatihan): Dihitung dari hasil survei atau evaluasi pasca-pelatihan sebagai berikut:<br>PPHHP = Jumlah alumni yang terbukti mengimplementasikan hasil pelatihan / Total Alumni yang dievaluasi<br>b. PMP (Indeks Peningkatan Mutu Pelayanan): Dihitung berdasarkan rata-rata skor peningkatan kinerja/mutu layanan alumni pada aspek terkait kurikulum pelatihan. Penilaian biasanya menggunakan instrumen terstruktur (skala Likert) dari atasan atau tim penilai unit kerja<br>c. Wa dan Wb: Bobot yang ditetapkan oleh unit kerja (misalnya, Pemanfaatan Kurikulum memiliki bobot lebih tinggi, Wa=0.6, dan Penjaminan Mutu/IPMP memiliki bobot Wb = 0.4). |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Persentase Peserta Pelatihan yang Menerapkan Hasil Pelatihan (PPHHP)<br>b. Indeks Peningkatan Mutu Pelayanan (IPMP) di Unit Kerja Alumni |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Kepemimpinan untuk SDM Keagamaan.<br>- Evaluasi Pasca-Pelatihan dan Survei Kinerja Alumni (Tracer Study) yang dilakukan secara berkala.<br>- Evaluasi Kinerja Alumni Pelatihan oleh Atasan Langsung/Unit Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Indeks (1-100) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Kurikulum dan Penjaminan Mutu Diklat<br>- Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM. |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>- Provinsi<br>- UPT DIklat |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai Kepuasan Layanan ini merupakan ukuran tingkat kepuasan peserta (SDM Keagamaan) terhadap seluruh aspek pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara diklat (pendidikan dan pelatihan), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca-pelatihan, dalam rangka pengembangan kompetensi. |
| 4 | Interpretasi | Nilai komposit yang mencerminkan persepsi dan penilaian peserta pelatihan terhadap kualitas layanan administrasi, ketersediaan dan kesiapan sarana/prasarana, kualitas pengajar/fasilitator, serta efektivitas materi/kurikulum pelatihan yang diselenggarakan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | NKL = ((Wa.a)+(Wb.b) / (Wa + Wb))<br><br>Keterangan:<br>a. IKPLP<br>b. IKPKP dihitung berdasarkan rata-rata skor item survei kepuasan dengan menggunakan skala interval (misalnya, skala Likert 1-4 atau 1-5).<br><br>- Wa dan Wb: Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, bobot yang sama Wa = 0.5 dan Wb = 0.5).<br>- Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi indeks dengan skala 0 hingga 100, atau 0 hingga 4 (skala baku IKM). |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Indeks Kepuasan Peserta terhadap Layanan Penyelenggara (IKPLP): Mengukur kepuasan terhadap aspek administratif, sarana, prasarana, dan dukungan teknis.<br>b. Indeks Kepuasan Peserta terhadap Kualitas Pelaksanaan (IKPKP): Mengukur kepuasan terhadap kualitas kurikulum, metodologi pengajaran, kompetensi pengajar/widyaiswara, dan relevansi materi. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Survei Kepuasan Peserta Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan/Evaluasi Widyaiswara): Survei yang dilakukan segera setelah atau pada akhir pelaksanaan pelatihan.<br>- Penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Kepemimpinan bagi SDM Keagamaan.<br>- Pengolahan Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal yang diadaptasi untuk layanan diklat. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai Indeks (0-100) atau Angka Rata-Rata Tertimbang (skala 1-4) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Triwulanan atau Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Kualitas Pelayanan Publik<br>- Evaluasi Kinerja Lembaga Diklat |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional (agregat seluruh unit).<br>- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat (per Pusdiklat atau BDK) |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi SDM keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai Kepuasan Pengguna adalah ukuran tingkat kesesuaian dan kepuasan atasan langsung atau unit kerja (sebagai pengguna) terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan kontribusi lulusan pelatihan (SDM Keagamaan) setelah mereka kembali dan mengimplementasikan hasil pengembangan kompetensi di lingkungan kerja. |
| 4 | Interpretasi | Nilai komposit ini mencerminkan sejauh mana unit kerja merasakan adanya dampak positif dan relevansi dari program pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama terhadap kualitas kinerja lulusan. Nilai ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas eksternal dan relevansi kurikulum pelatihan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | NKP = ((Wa.a)+(Wb.b) / (Wa + Wb))<br><br>Keterangan:<br>a. IKPK dan<br>b. IKPKin dihitung berdasarkan rata-rata skor item survei kepuasan yang dinilai oleh pengguna (atasan) dengan menggunakan skala interval (misalnya, skala Likert 1-5).<br><br>- Wa dan Wb: Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, peningkatan kinerja seringkali memiliki bobot yang lebih besar, Wa = 0.4 dan Wb = 0.6).<br>- Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi indeks dengan skala 0 hingga 100 untuk memudahkan interpretasi. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Indeks Kepuasan Pengguna terhadap Peningkatan Kompetensi (IKPK)<br>b. Indeks Kepuasan Pengguna terhadap Peningkatan Kinerja (IKPKin) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Survei Kepuasan Pengguna Lulusan (User Satisfaction Survey / Evaluasi Level 3)<br>- Pelaksanaan Tracer Study Lulusan yang terintegrasi dengan unit kerja asal.<br>- Evaluasi Dampak Pelatihan pada unit organisasi. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Indeks (0-100) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Dampak Pelatihan<br>- Efektivitas Program Pengembangan Kompetensi. |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional (agregat seluruh unit).<br>- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama |
| 3 | Konsep/Definisi | Tingkat Moderasi Beragama adalah skor yang mengukur sejauh mana sikap dan perilaku Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang telah mengikuti program penguatan (fasilitasi/pelatihan/ sosialisasi) menunjukkan indikator-indikator kunci moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal yang relevan dengan agama. |
| 4 | Interpretasi | Nilai komposit ini mencerminkan keberhasilan program penguatan Moderasi Beragama dalam menanamkan dan meningkatkan pemahaman, sikap, dan implementasi praktik moderat oleh para tokoh kunci yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat. Nilai ini menjadi indikator penting dalam mengukur dampak perubahan sosial yang diakibatkan oleh intervensi Kementerian Agama. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | TMB = ((Wa.a)+(Wb.b) / (Wa + Wb))<br><br>a. IPPSMB<br>b. IPIMB dihitung berdasarkan rata-rata skor item survei yang diukur menggunakan skala interval (misalnya, skala Likert 1-5). Skala pengukuran ini biasanya telah dibakukan oleh Balitbang Diklat Kementerian Agama.<br><br>- Wa dan Wb : Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, implementasi perilaku di masyarakat mungkin diberi bobot lebih besar, Wa = 0.4 dan Wb = 0.6).<br>- Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100) untuk mencerminkan tingkat moderasi. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Indeks Peningkatan Pemahaman dan Sikap Moderasi Beragama (IPPSMB)<br>b. Indeks Perilaku dan Implementasi Moderasi Beragama di Masyarakat (IPIMB) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Program Penguatan/Fasilitasi Moderasi Beragama bagi Tokoh Agama/ Masyarakat/Budaya (misalnya, melalui Balai Diklat Keagamaan atau Pusdiklat).<br>- Evaluasi Dampak Program (Evaluasi Level 3 & 4): Survei pre-test dan post-test, serta evaluasi pasca-program/observasi lapangan yang melibatkan pihak luar/komunitas.<br>- Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif terkait implementasi pesan moderasi beragama di wilayah dampingan tokoh. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Indeks (0-100) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Moderasi Beragama<br>- Dampak Program Keagamaan |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional (agregat seluruh tokoh yang terfasilitasi).<br>- Provinsi/Kanwil Kemenag (berdasarkan wilayah kerja).<br>- Per Jenis Tokoh (misalnya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, atau Tokoh Budaya). |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai pemanfaatan naskah kebijakan ekoteologi yang dihasilkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai Pemanfaatan Naskah Kebijakan Ekoteologi adalah ukuran tingkat penggunaan dan adopsi rekomendasi yang terdapat dalam naskah kebijakan (dokumen hasil kajian/penelitian) tentang perspektif ekoteologi (hubungan teologi/ajaran agama dan lingkungan) oleh unit kerja/ pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Agama maupun pihak eksternal. |
| 4 | Interpretasi | Nilai komposit ini mencerminkan keberhasilan Unit Penghasil dalam memproduksi naskah kebijakan yang relevan, berkualitas, dan aplikatif sehingga dapat diadopsi menjadi program, kegiatan, atau regulasi yang mendukung isu-isu lingkungan berbasis nilai-nilai agama. Nilai ini mengukur dampak riil dari hasil penelitian atau kajian. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | NP = ((Wa.a)+(Wb.b) / (Wa + Wb))<br><br>Keterangan:<br>a. IANK (Indeks Adopsi Naskah Kebijakan):<br>Dihitung berdasarkan rasio:<br>(Jumlah rekomendasi yang diadopsi secara formal / Total rekomendasi dalam naskah) atau<br>(Jumlah unit kerja yang mengadopsi / Total unit kerja diseminasi)<br>b. IIPE (Indeks Implementasi Program Ekoteologi)<br>Dihitung berdasarkan persentase program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit pengguna (dibandingkan dengan yang direncanakan berdasarkan naskah) atau skor penilaian kualitatif atas implementasi.<br><br>- Wa dn Wb : Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, implementasi program (Wb) sering diberi bobot lebih besar daripada sekadar adopsi formal (Wa)).<br>- Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100). |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Indeks Adopsi Naskah Kebijakan (IANK)<br>b. Indeks Implementasi Program Ekoteologi (IIPE) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Kegiatan Penelitian dan Kajian Ekoteologi yang menghasilkan naskah/rekomendasi kebijakan.<br>- Diseminasi dan Sosialisasi Naskah Kebijakan kepada unit eselon I/II dan instansi terkait.<br>- Survei Pemanfaatan Hasil Litbang/Kajian (Tracer Study) yang ditujukan kepada unit kerja pengguna potensial.<br>- Evaluasi Dampak Kebijakan yang dihasilkan dari naskah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Indeks (0-100) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Kinerja Litbang<br>- Dampak Kebijakan Berbasis Kajian |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>- Per Naskah Kebijakan<br>- Per Unit Pengguna |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Kualitas Kebijakan |
| 3 | Konsep/Definisi | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah ukuran komposit yang menilai mutu keseluruhan proses dan hasil perumusan suatu kebijakan (regulasi, pedoman, standar, atau program) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kualitas diukur berdasarkan kriteria seperti kelengkapan naskah, kesesuaian prosedur, basis bukti (kajian/riset), dan responsivitas terhadap kebutuhan publik/pemangku kepentingan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Nilai ini mencerminkan sejauh mana kebijakan yang diterbitkan telah memenuhi standar tata kelola yang baik (Good Governance), didukung oleh data dan analisis yang kuat (Evidence-Based Policy), dan memiliki potensi tinggi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan serta meminimalisir dampak negatif. Indeks ini adalah alat ukur internal untuk mengevaluasi kinerja perumusan regulasi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | IKK = ((Wa.a)+(Wb.b) / (Wa + Wb))<br><br>Keterangan:<br>a. IKPPK<br>b. IKSK dihitung berdasarkan rata-rata skor penilaian (menggunakan instrumen checklist dan bobot) yang dilakukan oleh tim penilai kualitas kebijakan. Instrumen penilaian berisi kriteria yang disepakati (misalnya, 10-20 indikator untuk proses dan substansi).<br><br>- Wa dan Wb : Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, kualitas substansi (Wb) sering diberi bobot lebih besar, Wa =0.4 dan Wb =0.6).<br>- Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Indeks Kualitas Proses Perumusan Kebijakan (IKPPK)<br>b. Indeks Kualitas Substansi Kebijakan (IKSK) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Perumusan dan Pengesahan Peraturan/Regulasi (Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri, Surat Edaran, atau Standar Teknis).<br>- Telaah/Asistensi Hukum dan Kebijakan (oleh Biro Hukum atau tim policy analyst).<br>- Evaluasi/Audit Kualitas Perumusan Kebijakan internal.<br>- Kajian atau Penelitian yang mendasari perumusan kebijakan. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Indeks (0-100) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik<br>- Kualitas Regulasi/Kebijakan |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>- Unit Eselon I/II |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretaria Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Peningkatan Buku Agama yang mendapat tanda layak terbit |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Peningkatan Buku Agama yang Mendapat Tanda Layak Terbit adalah rasio yang mengukur pertumbuhan jumlah naskah atau buku-buku keagamaan yang telah melalui proses penilaian/telaah dan dinyatakan layak untuk diterbitkan (diberikan Tanda Layak Terbit/ Rekomendasi) oleh unit kerja Kementerian Agama dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Nilai ini mencerminkan keberhasilan dan efisiensi unit kerja dalam melakukan penjaminan mutu substansi buku-buku keagamaan yang beredar di masyarakat. Peningkatan persentase menunjukkan peningkatan kualitas naskah yang diajukan oleh penerbit, peningkatan kapasitas layanan telaah di Kementerian Agama, dan konsistensi penyediaan referensi keagamaan yang moderat dan akurat bagi publik. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah buku layak terbit pada periode t.<br>b = Jumlah buku layak terbit pada periode t−1. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Buku Agama yang Mendapat Tanda Layak Terbit pada Periode t<br>b. Jumlah Buku Agama yang Mendapat Tanda Layak Terbit pada Periode t−1 |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Penilaian dan Telaah Buku Keagamaan<br>- Penerbitan Tanda Layak Terbit/Rekomendasi Publikasi untuk buku-buku keagamaan.<br>- Pengelolaan Data Naskah Masuk dan Naskah Lulus. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Kualitas Literatur Keagamaan<br>- Kinerja Pelayanan Publik Bidang Lektur Keagamaan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Peningkatan inovasi program literasi keagamaan dalam mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Peningkatan Inovasi Program Literasi Keagamaan adalah rasio yang mengukur pertumbuhan jumlah program, metode, atau platform baru (inovatif) yang secara spesifik dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan, inklusivitas, dan keterampilan dialog, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung dan memperkuat kerukunan umat beragama dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. |
| 4 | Interpretasi | Nilai ini mencerminkan sejauh mana unit kerja Kementerian Agama berhasil menciptakan strategi dan pendekatan baru (tidak hanya mengulang program lama) dalam upaya mengedukasi publik mengenai isu-isu keagamaan dan kerukunan. Peningkatan persentase menunjukkan fleksibilitas, kreativitas, dan adaptabilitas Kemenag dalam merespons tantangan kerukunan umat beragama yang terus berkembang. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah inovasi program literasi keagamaan pada periode t.<br>b = Jumlah inovasi program literasi keagamaan pada periode t−1. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Inovasi Program Literasi Keagamaan pada Periode t<br>b. Jumlah Inovasi Program Literasi Keagamaan pada Periode t−1 |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pengembangan Model/Metode Baru Literasi Keagamaan dan Uji Coba Lapangan.<br>- Pelaksanaan Kompetisi/Lomba Inovasi Program Kerukunan Umat Beragama.<br>- Diseminasi dan Implementasi Program Literasi Keagamaan yang berfokus pada dialog dan inklusivitas.<br>- Pencatatan dan Verifikasi Inovasi oleh Tim Penilai Kinerja |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Inovasi Pelayanan Publik<br>- Kinerja Program Kerukunan Umat Beragama |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase KUA penyelenggara Early Warning System (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS)<br>b : Jumlah total KUA secara nasional |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Persentase KUA penyelenggara Early Warning System |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA<br>2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan<br>3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan<br>4 Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan<br>5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. KUA dengan Petugas Khusus EWS<br>2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu<br>3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra |
| 11 | Level Estimasi | 1. Nasional<br>2. Provinsi<br>3. Kota/ Kab |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah |
| 3 | Konsep/Definisi | BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan penyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini" |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan: (a/b) x 100%<br>Keterangan:<br>A: Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan<br>B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah<br>2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator<br>2. Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah<br>3. Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/pondok pesantren dan lembaga |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Eselon I |
| 11 | Level Estimasi | 1. Nasional<br>2. Provinsi<br>3. Kota/ Kab |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase KUA Berdaya |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini mengukur proporsi Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi kategori "Berdaya" berdasarkan penilaian kinerja, pelayanan, dan inovasi. Kategori "Excellent" ditetapkan melalui evaluasi terhadap standar layanan administrasi, pembinaan umat, pemanfaatan teknologi, serta pemenuhan sarana dan prasarana. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase KUA yang berada pada kategori "Excellent", semakin baik kinerja KUA dalam memberikan layanan publik keagamaan yang profesional, responsif, dan inovatif. Angka ini juga menjadi indikator keberhasilan pembinaan dan penguatan kelembagaan KUA di berbagai daerah. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah KUA yang memperoleh kategori "Berdaya (Excellent)" berdasarkan hasil evaluasi<br>b = Jumlah total KUA yang dievaluasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Data hasil evaluasi kinerja KUA berdasarkan instrumen penilaian berdaya (Excellent)<br>2. Jumlah total KUA yang dievaluasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi dan Penetapan KUA Berdaya |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan kategori hasil evaluasi: Excellent (Berdaya), Baik, Cukup, Kurang |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana |
| 3 | Konsep/Definisi | Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan: (a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = KUA yang sesuai dengan standar sarana dan prasranan<br>b = KUA seluruh indonesia |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana<br>2. Jumlah KUA |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pembangunan KUA melalui SBSN<br>2. Revitalisasi KUA |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Perhitungan Prioritas :<br>1. Lahan Kosong milik Kemenag/Hibah sudah sertifikat Kemenag<br>2. Rusak Berat (Milik Kemenag) dan Tidak dapat ditanggulangi dengan anggaran Rehab<br>3. Rusak Ringan namun jumlah rata-rata peristiwa nikah tinggi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah adalah indikator yang mengukur perubahan jumlah pernikahan yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah pernikahan dibandingkan dengan periode sebelumnya. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | x = [(a - b) / b] × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan<br>b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan<br>2. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Sosialisasi Pernikahan Resmi<br>2. Kemudahan Akses Layanan Nikah<br>3. Revitalisasi Layanan KUA<br>4. Bimbingan Perkawinan<br>5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan" |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini mengukur proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan memastikan penghulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan dan pembinaan masyarakat. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase penghulu bersertifikat kompetensi, semakin terjamin kualitas layanan pernikahan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Angka ini juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penghulu. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi<br>b = Total jumlah penghulu yang terdata |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat<br>2. Jumlah total penghulu yang terdata |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Program Sertifikasi Kompetensi Penghulu |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | - |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat pendudukk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan = (a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek<br>b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek<br>2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pendataan dan Verifikasi Mustahik<br>2. Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional<br>3. Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional<br>4. Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik<br>5. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Mustahik zakat<br>2. Calon penerima dana sosial keagamaan |
| 11 | Level Estimasi | 1. Nasional<br>2. Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah program maupun lokus program kolaborasi pada bidang zakat dan wakaf, seperti kampung zakat, kota wakaf, inkubasi wakaf produktif, kua peu atau program di daerah |
| 4 | Interpretasi | Program kolaborasi zakat baznas, laz dan kemenag dan program kolaborasi wakaf bwi dan nazhir |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan total program kolaborasi zakat dan wakaf lintas kemenag, baznas, laz, bwi dan nazhir |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Persentase = (Jumlah program zakat dan/atau wakaf yang dilaksanakan secara kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ÷ Jumlah total program zakat dan/atau wakaf) × 100% |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Sinkronisasi Program Zakat dan Wakaf<br>2. Kemitraan dengan Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf<br>3. Integrasi Data Mustahik dan Penerima Manfaat<br>4. Pengembangan Skema Investasi Wakaf Produktif<br>5. Monitoring dan Evaluasi Dampak Program |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis program: Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan |
| 11 | Level Estimasi | Tahunan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti |
| 3 | Konsep/Definisi | Advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf adalah tindakan pendampingan, fasilitasi, atau mediasi yang dilakukan oleh otoritas terkait (misalnya Kementerian Agama) dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum atau administratif terhadap aset wakaf, baik berupa sengketa, mutasi, maupun permasalahan lainnya. |
| 4 | Interpretasi | Persentase ini menggambarkan tingkat respons dan efektivitas lembaga dalam menindaklanjuti persoalan-persoalan terkait aset wakaf. Semakin tinggi angkanya, semakin baik upaya penyelamatan aset wakaf dari segi legalitas dan fungsionalitasnya. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah advokasi pengamanan harta benda wakaf yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kasus advokasi pengamanan harta benda wakaf |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah kasus wakaf yang ditindaklanjuti<br>2. Total kasus wakaf yang membutuhkan advokasi (mutasi/sengketa) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pendataan dan Verifikasi Aset Wakaf<br>2. Pengembangan Model Investasi Wakaf Produktif<br>3. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah<br>4. Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Nazhir<br>5. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Wakaf |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis permasalahan:<br>1. Mutasi Nazir<br>2. Sengketa hukum (perdata atau pidana)<br>3. Konflik kepemilikan tanah wakaf<br>4. Permasalahan administrasi wakaf |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, provinsi, kabupaten/kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Lembaga Amil Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang transparan, akuntabel dan profesional dalam penyaluran dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi lembaga dana sosial keagamaan yang sesuai dengan juknis menunjukkan semakin baik dan benar pengelolaan dana sosial keagamaan. sehingga tata kelola dana sosial keagamaan yang transparan, akuntabel dan profesional serta bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan = (a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = lembaga dana sosial keagamaan, zakat, dan wakaf dengan penilaian baik, akuntabel, profesional<br>b = jumlah lembaga dana sosial keagamaan, zakat, dan wakaf |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lembaga wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional<br>2. Jumlah lembaga wakaf |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Wakaf<br>2. Penerapan Standar Syariah dan Tata Kelola Wakaf<br>3. Audit dan Evaluasi Kepatuhan Syariah<br>4. Peningkatan Kapasitas SDM Nazhir<br>5. Digitalisasi dan Transparansi Pengelolaan Wakaf |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis lembaga: Lembaga Amil Zakat, Badan Wakaf, Lembaga Dana Sosial Keagamaan Lainnya |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini mengukur proporsi permohonan izin pembentukan Lembaga Amil Zakat yang berhasil diproses dan diterbitkan izinnya oleh otoritas terkait dibandingkan dengan jumlah total permohonan yang diajukan pada periode tertentu. Indikator ini merefleksikan efektivitas layanan perizinan dalam mendukung tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan sesuai regulasi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase layanan izin yang diterbitkan, semakin baik kualitas layanan perizinan dalam memfasilitasi pembentukan Lembaga Amil Zakat. Hal ini juga menunjukkan tingkat kesiapan dan kepatuhan pemohon terhadap persyaratan yang berlaku. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah izin pembentukan LAZ yang diterbitkan<br>b = Total jumlah permohonan izin pembentukan LAZ yang diterima |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Data jumlah izin pembentukan LAZ yang diterbitkan<br>2. Data jumlah permohonan izin pembentukan LAZ yang diterima |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Layanan Perizinan Lembaga Amil Zakat |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini mengukur proporsi akta ikrar wakaf yang berhasil diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibandingkan dengan total permohonan atau proses ikrar wakaf yang diajukan pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan efektivitas layanan administrasi wakaf dan dukungan terhadap legalisasi aset wakaf sesuai ketentuan perundang-undangan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase AIW yang diterbitkan, semakin baik kinerja layanan pencatatan dan legalisasi wakaf. Hal ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melegalkan perbuatan wakaf secara resmi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan<br>b = Jumlah total proses ikrar wakaf yang diajukan/diproses |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Data jumlah AIW yang diterbitkan<br>2. Data jumlah permohonan/proses ikrar wakaf |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis peruntukan wakaf: Tanah, Bangunan, Uang, Aset Produktif Lainnya |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton kegiatan MTQ/Pesparani/Pesparawi/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming) |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi kegiatan maupun melalui media digital |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | ((a – b) / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan<br>b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan<br>2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penyelenggaraan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Audiens Langsung (Luring)<br>2. Audiens Daring (Streaming)<br>3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio) |
| 11 | Level Estimasi | 1. Nasional<br>2. Provinsi<br>3. Kota/ Kab |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/ Buddha) |
| 3 | Konsep/Definisi | Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ peraayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya |
| 4 | Interpretasi | Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | 1. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan<br>2. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Rumusan = [(a-b) / b] x 100%<br><br>a = Jumlah peserta tahun ini<br>b = Jumlah peserta tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Jumlah peserta tahun ini<br>2. Jumlah peserta tahun sebelumnya |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Berkurang = < 0%<br>2. Meningkat = 0%-5%<br>3. Meningkat Pesat = >5% |
| 11 | Level Estimasi | 1. Nasional<br>2. Provinsi<br>3. Kota/ Kab |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/ Khonghucu yang diselenggarakan Negara |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Peningkatan Partisipan adalah rasio yang mengukur pertumbuhan jumlah individu yang berpartisipasi secara langsung (fisik atau daring) dalam acara atau kegiatan perayaan Hari Besar Keagamaan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Negara (melalui Kementerian Agama atau instansi terkait) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. |
| 4 | Interpretasi | Nilai ini mencerminkan keberhasilan Kementerian Agama dalam memfasilitasi ekspresi keagamaan yang bersifat publik dan formal. Peningkatan persentase menunjukkan tingginya relevansi dan daya tarik acara yang diselenggarakan Negara, serta peningkatan inklusivitas dan aksesibilitas program perayaan Hari Besar Keagamaan, yang pada akhirnya memperkuat semangat kebersamaan umat beragama. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | ((a – b) / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah partisipan perayaan HBK pada tahun berjalan<br>b = Jumlah partisipan perayaan HBK pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Partisipan Perayaan Hari Besar Keagamaan Periode t<br>b. Jumlah Partisipan Perayaan Hari Besar Keagamaan Periode t−1 |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Nasional/Daerah untuk setiap agama (misalnya, Musabaqah Tilawatil Quran, Peringatan Natal Nasional, Hari Raya Waisak, Nyepi, atau Hari Besar lainnya).<br>- Pendataan dan Dokumentasi Partisipan acara perayaan (baik secara manual maupun digital/ daring).<br>- Promosi dan Publikasi acara perayaan Hari Besar Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. ASN Kementerian Agama<br>2. Peserta dari Masyarakat Umum<br>3. Peserta dari Lembaga Mitra |
| 11 | Level Estimasi | 1. Nasiomal<br>2. Provinsi<br>3. Kab/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/ Khonghucu yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | (a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan<br>b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan<br>2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan<br>2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan<br>3. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan<br>2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan<br>3. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan<br>4. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan |
| 11 | Level Estimasi | 1. Nasional<br>2. Provinsi<br>3. Kab/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase penyuluh agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama:<br>1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik.<br>2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital.<br>3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik<br>b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat)<br>2. Jumlah total penyuluh agama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan agamanya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Rasio penyuluh agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama |
| 3 | Konsep/Definisi | pengukuran data kelompok sasaran yang dimilkii PenyuluhAgama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan |
| 4 | Interpretasi | bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | x = b / a<br><br>sehingga rasionya menjadi 1:x<br>Keterangan:<br>a = Jumlah penyuluh agama yang aktif<br>b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah penyuluh agama yang aktif<br>2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Layanan bimbingan penyuluhan<br>2. Layanan advokasi<br>3. Layanan keagamaan lainnya |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Kab/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/ Khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS |
| 3 | Konsep/Definisi | Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredam potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial. |
| 4 | Interpretasi | Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase peningkatan = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan<br>b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan<br>2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Perumusan Rekomendasi Early Warning System |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan:<br>1. Tingkat lokal (kabupaten/kota)<br>2. Tingkat provinsi<br>3. Tingkat nasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan kitab suci agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang disediakan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat.<br>Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumusan = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan<br>b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan<br>2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pengadaan dan Distribusi Kitab Suci<br>2. Digitalisasi dan Akses Kitab Suci Online<br>3. Fasilitasi Cetak dan Penerjemahan Kitab Suci<br>4. Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan<br>5. Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan Kitab Suci |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan kitab suci masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang layak edar/sesuai kaidah |
| 3 | Konsep/Definisi | Naskah dan buku keagamaan yang dinyatakan layak edar adalah naskah/buku yang telah melalui proses penilaian oleh lembaga atau otoritas berwenang (misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Direktorat Urusan Agama, atau lembaga keagamaan masing-masing) dan dinyatakan sesuai dengan kaidah ajaran agama, nilai-nilai moderasi, serta peraturan perundangan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan jumlah naskah/buku keagamaan yang memenuhi standar kelayakan edar. Makin tinggi persentasenya, makin banyak literatur keagamaan yang berkualitas, sesuai kaidah, dan moderatif yang tersedia di masyarakat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase peningkatan = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan<br>b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan<br>2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penilaian Kelayakan Naskah dan Buku Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai standar |
| 3 | Konsep/Definisi | Standar perpustakaan masjid mengacu pada kriteria tertentu yang mencakup koleksi buku keagamaan, fasilitas pendukung, tata kelola, dan akses layanan bagi jamaah. Peningkatan merujuk pada pertumbuhan jumlah perpustakaan yang memenuhi standar tersebut dibandingkan periode sebelumnya. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini mencerminkan tren peningkatan kualitas sarana literasi keagamaan di masjid. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar upaya perbaikan mutu perpustakaan masjid dalam mendukung pembinaan keagamaan masyarakat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>a = Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun berjalanb = Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun berjalan<br>2. Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Perpustakaan Masjid |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat |
| 3 | Konsep/Definisi | Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat<br>b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat<br>2. Jumlah total masjid/musholla |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Persentase |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat |
| 3 | Konsep/Definisi | Layanan syariah dan hisab rukyat mencakup pelayanan konsultasi, edukasi, dan verifikasi terkait pelaksanaan ibadah sesuai syariat serta penetapan kalender hijriyah dan arah kiblat. Indikator ini mengukur peningkatan proporsi lembaga agama yang mendapatkan manfaat dari layanan tersebut dibandingkan periode sebelumnya. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan sejauh mana perluasan akses dan pemanfaatan layanan syariah dan hisab rukyat oleh lembaga agama. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik penyebaran layanan ini dalam mendukung praktik keagamaan yang sesuai standar syariah. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>a = Jumlah lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat pada tahun berjalan<br>b = Jumlah lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lembaga agama penerima layanan syariah dan hisab rukyat tahun berjalan<br>2. Jumlah lembaga agama penerima layanan syariah dan hisab rukyat tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Layanan Syariah serta Hisab Rukyat |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis layanan: layanan syariah, hisab rukyat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);<br>a) Lembaga penyelenggara haji khusus;<br>b) Lembaga penyelenggara umrah |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur proporsi lembaga penyelenggara haji khusus dan umrah yang memperoleh akreditasi predikat A sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui mekanisme penilaian akreditasi berbasis kinerja, kepatuhan regulasi, serta kualitas layanan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, semakin besar proporsi lembaga yang memberikan layanan dengan standar prima, akuntabel, dan sesuai regulasi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus: (a/b)×100<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan<br>b : Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Persentase PIHK terakreditasi A<br>2. Persentase PPIU terakreditasi A |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Proses penilaian dan akreditasi PIHK dan PPIU<br>2. Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah<br>3. Penerbitan sertifikat akreditasi<br>4. Pembinaan dan pengawasan reguler lembaga penyelenggara<br>5. Digitalisasi dan pelaporan akreditasi pada sistem informasi haji dan umrah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Terakreditasi A<br>2. Lembaga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Terakreditasi A |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| 2 | Nama Indikator | Tingkat Kepuasan layanan Asrama Haji |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase tingkat kepuasan jemaah haji atas layanan asrama haji sesuai standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan ibadah haji |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase tingkat kepuasan menunjukkan kualitas layanan asrama haji yang semakin memenuhi harapan dan kebutuhan jemaah haji |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah jemaah haji yang menyatakan puas<br>b : Jumlah total responden survei |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah jemaah haji yang menyatakan puas terhadap layanan asrama haji<br>2. Jumlah total jemaah haji yang menjadi responden survei |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Survei Kepuasan Layanan Asrama Haji<br>2. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Asrama Haji |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Kualitas Akomodasi<br>2. Kualitas Konsumsi<br>3. Ketersediaan Fasilitas Umum<br>4. Pelayanan Petugas Asrama |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| 2 | Nama Indikator | Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase calon jemaah haji kategori lanjut usia (lansia), yaitu berusia 65 tahun ke atas, yang berhasil diberangkatkan ke tanah suci sesuai alokasi kuota khusus lansia yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. |
| 4 | Interpretasi | Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan sistem seleksi, alokasi kuota, dan kesiapan administratif dalam mewujudkan layanan haji yang inklusif dan berkeadilan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus: (a/b)×100<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan<br>b : Total kuota jemaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Persentase jemaah haji lansia yang diberangkatkan sesuai kuota tahunan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penetapan dan alokasi kuota jemaah lansia<br>2. Verifikasi administrasi dan kesehatan calon jemaah lansia<br>3. Pemantauan daftar antrean haji berdasarkan usia<br>4. Penyiapan dan pemberangkatan calon jemaah lansia<br>5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan afirmasi lansia dalam penyelenggaraan haji |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Lansia Prioritas Berangkat (Usia 65 Tahun ke Atas)<br>2. Lansia dengan Pendamping<br>3. Lansia Mandiri<br>4. Lansia Gagal Berangkat (Pengganti Kuota) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan |
| 3 | Konsep/Definisi | Presentasi PLHUT yang telah memenuhi kriteria standar minimum sarana-prasarana dan standar pelayanan publik sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agama. Standar ini mencakup fasilitas fisik, sistem layanan terintegrasi, serta kualitas SDM dan prosedur layanan kepada jemaah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin optimal penyelenggaraan layanan haji dan umrah terpadu, yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi masyarakat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus: (a/b)×100<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana<br>b : Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Persentase PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Verifikasi dan evaluasi standar pelayanan PLHUT<br>2. Monitoring pemenuhan standar sarana dan prasarana<br>3. Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas SDM PLHUT<br>4. Audit dan supervisi kualitas layanan publik keagamaan<br>5. Pengembangan sistem layanan digital PLHUT |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. PLHUT dengan Sarana dan Prasarana Lengkap<br>2. PLHUT dengan Pelayanan Terstandar<br>3. PLHUT yang Terintegrasi secara Digital<br>4. PLHUT dalam Proses Pemenuhan Standar |
| 11 | Level Estimasi | 1. Nasional<br>2. Provinsi<br>3. Kab/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| 2 | Nama Indikator | Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase pengguna Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang menyatakan puas terhadap kualitas layanan administrasi haji dan umrah yang diterima, meliputi aspek kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan kemudahan layanan |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi tingkat kepuasan menunjukkan bahwa kualitas layanan PLHUT memenuhi ekspektasi jamaah atau masyarakat dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas<br>b : Jumlah total responden survei |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas<br>2. Jumlah total pengguna PLHUT yang menjadi responden survei |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Survei Kepuasan Layanan PLHUT<br>2. Monitoring dan Evaluasi Layanan PLHUT |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Kecepatan Layanan<br>2. Ketepatan Layanan<br>3. Kenyamanan Layanan<br>4. Kemudahan Akses Layanan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| 2 | Nama Indikator | Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75 |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase petugas haji yang mencapai skor kinerja di atas batas minimal 75 berdasarkan hasil penilaian atas pelaksanaan tugas pelayanan, pembimbingan, dan pelindungan jemaah haji selama operasional haji |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak petugas haji yang melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75<br>b = Jumlah total petugas haji yang dievaluasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75<br>2. Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Evaluasi Kinerja Petugas Haji<br>2. Penilaian dan Pemantauan Pelaksanaan Tugas Petugas Haji |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Petugas Kloter (TKHI, TPHI, TPIHI)<br>2. Petugas Non-Kloter (PPIH Arab Saudi)<br>3. Petugas PPIH Embarkasi/Debarkasi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| 2 | Nama Indikator | Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase calon jemaah haji yang telah mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji dan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan pelatihan manasik haji |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak calon jemaah haji yang telah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai rukun dan ketentuan ibadah haji |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik<br>b = Jumlah total calon jemaah haji |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji<br>2. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji<br>2. Penerbitan Sertifikat Manasik Haji |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Jemaah Haji Reguler<br>2. Jemaah Haji Khusus |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Pemeriksa Keuangan |
| 2 | Nama Indikator | Opini laporan pengelolaan dana operasional teraudit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) |
| 3 | Konsep/Definisi | Pernyataan profesional auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK) atas kewajaran laporan keuangan dana operasional berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. |
| 4 | Interpretasi | Pencapaian opini WTP menunjukkan bahwa dana operasional dikelola secara tertib, taat azas, serta sesuai prinsip tata kelola yang baik. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Penilaian dilakukan berdasarkan opini tertinggi yang diberikan oleh auditor BPK atas laporan keuangan dana operasional dalam tahun anggaran tertentu. Jika opini yang diberikan adalah WTP, maka indikator dinyatakan tercapai. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Status Opini Laporan Keuangan Dana Operasional<br>2. Kategori Opini BPK (WTP, WDP, TW, TMP) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penyusunan Laporan Keuangan Dana Operasional<br>2. Pelaksanaan Audit Eksternal oleh BPK<br>3. Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit<br>4. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern<br>5. Penguatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Predikat |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | 1. Unit Kerja dengan Opini WTP (Tercapai)<br>2. Unit Kerja dengan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian)<br>3. Unit Kerja dengan Opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat)<br>4. Unit Kerja dengan Opini Tidak Wajar |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| 2 | Nama Indikator | Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji |
| 3 | Konsep/Definisi | Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji adalah persentase pengguna website haji yang menyatakan puas terhadap kualitas informasi, kemudahan akses, dan kecepatan layanan yang disediakan dalam platform digital tersebut |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase kepuasan, menunjukkan bahwa layanan website haji dianggap efektif, informatif, dan memenuhi kebutuhan pengguna jemaah haji maupun masyarakat umum |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah pengakses website haji yang menyatakan puas<br>b = Total responden survei kepuasan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah pengakses website haji yang menyatakan puas<br>2. Jumlah total responden survei kepuasan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Kepuasan Pengguna Layanan Website Haji |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Layanan Informasi Jadwal Keberangkatan Haji<br>2. Layanan Informasi Biaya dan Pembayaran Haji<br>3. Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Haji<br>4. Layanan Konsultasi dan Tanya Jawab Online Haji<br>5. Layanan Informasi Perjalanan dan Akomodasi Haji |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase unit layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah haji yang telah memenuhi standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontrak layanan haji |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin baik kepatuhan penyedia layanan dalam memenuhi standar mutu layanan haji, yang berdampak pada kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan jemaah haji |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang memenuhi standar<br>b : Jumlah total unit layanan yang tersedia |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang sesuai standar<br>2. Jumlah total unit layanan yang disediakan untuk jemaah haji |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Verifikasi Kelayakan Akomodasi Jemaah Haji<br>2. Pemeriksaan Kualitas Konsumsi Jemaah Haji<br>3. Pemeriksaan Kelaikan Transportasi Jemaah Haji |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Pelayanan Akomodasi<br>2. Pelayanan Konsumsi<br>3. Pelayanan Transportasi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| 2 | Nama Indikator | Persentase jumlah daging/dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase jumlah daging Dam hasil pelaksanaan ibadah haji yang berhasil disalurkan ke penduduk Indonesia dibandingkan dengan total daging Dam yang tersedia |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin optimalnya penyaluran daging Dam untuk kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya kepada kelompok masyarakat penerima manfaat di dalam negeri |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah daging Dam yang disalurkan ke Indonesia<br>b = Total daging Dam yang tersedia |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah daging Dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia<br>2. Total daging Dam yang tersedia untuk penyaluran |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Distribusi Daging Dam ke Indonesia<br>2. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Daging Dam |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Masyarakat Umum (Fakir/Miskin)<br>2. Lembaga Sosial/Keagamaan<br>3. Pondok Pesantren / Panti Asuhan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi |
| 3 | Konsep/Definisi | Kanwil dan Kemenag Kabupaten/Kota mendapat nilai 80 dalam IKUB |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase Kanwil dan Kemenag Kab/Kota yang mendapat nilai IKUB diatas 80, maka semakin baik tingkat Kerukunan Umat beragama |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi ÷ Jumlah total provinsi) × 100% |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi<br>2. Jumlah total provinsi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan kategori nilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Nilai aspek penerimaan terhadap perbedaan sosial (agama dan Etnis) |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai aspek penerimaan terhadap perbedaan sosial (agama dan etnis) adalah skor yang mencerminkan tingkat kesediaan individu atau kelompok dalam menerima, menghormati, dan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki latar belakang agama dan etnis yang berbeda. Indikator ini diukur berdasarkan survei atau asesmen dengan skala tertentu untuk menggambarkan tingkat toleransi dan keterbukaan masyarakat terhadap keberagaman. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai penerimaan, semakin besar tingkat toleransi dan keterbukaan masyarakat dalam menerima perbedaan agama dan etnis. Nilai yang tinggi menunjukkan adanya sikap inklusif dan harmoni sosial yang kuat, sementara nilai yang rendah dapat mengindikasikan adanya eksklusivitas sosial atau potensi ketegangan akibat perbedaan identitas. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | $X = (\sum Si) / N$<br><br>Keterangan:<br><br>X = Nilai penerimaan terhadap perbedaan sosial<br>Si = Skor penerimaan individu terhadap perbedaan agama dan etnis (berdasarkan skala tertentu, misalnya 1–5 atau 1–10)<br>N = Jumlah individu yang disurvei |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Skor penerimaan individu terhadap perbedaan agama dan etnis<br>b. Jumlah total individu yang disurvei |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Indeks Moderasi Beragama / Survei Sosial Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan dimensi sosial: Agama, Etnis |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama dan BPJPH - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Halal yang Diterbitkan adalah rasio yang mengukur jumlah dokumen rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang dikeluarkan oleh unit pengawasan halal Kementerian Agama/BPJPH sebagai respons atas kegiatan pengawasan lapangan di wilayah Kabupaten/Kota, dibandingkan dengan total temuan atau laporan pengawasan yang secara teknis memerlukan penerbitan rekomendasi. |
| 4 | Interpretasi | Nilai ini mencerminkan efisiensi administratif dan responsivitas sistem Jaminan Produk Halal (JPH) dalam menindaklanjuti temuan lapangan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa unit pengawasan (baik di pusat maupun daerah) secara cepat dan formal memproses hasil monitoring menjadi langkah perbaikan yang konkret bagi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pelaku usaha, atau internal auditor halal di tingkat daerah. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>a = Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Halal yang Diterbitkan.<br>b = Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Halal yang Memerlukan Rekomendasi. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Halal yang Diterbitkan<br>b. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Halal yang Memerlukan Rekomendasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Jaminan Produk Halal (JPH) (terhadap pelaku usaha, LPH, atau auditor halal) di tingkat Kabupaten/Kota.<br>- Analisis Laporan Hasil Pengawasan dan Penyusunan Rekomendasi Resmi sebagai tindak lanjut temuan.<br>- Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Halal untuk mencatat temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Per Kategori Obyek Pengawasan (misalnya, Pengawasan Pelaku Usaha, Pengawasan LPH, atau Pengawasan Auditor Halal) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama dan BPJPH - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 2 | Nama Indikator | Nilai literasi halal |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai literasi halal mencerminkan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat atau pelaku usaha terhadap prinsip, regulasi, dan praktik produk halal. Nilai ini diukur melalui instrumen penilaian yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait halal. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat literasi masyarakat atau pelaku usaha terhadap isu halal. Semakin tinggi nilainya, semakin baik pemahaman dan penerapan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai dari BPJPH |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor jawaban responden pada aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku halal<br>2. Skor maksimum ideal yang dapat dicapai responden |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Literasi Halal |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan aspek literasi: Pengetahuan, Pemahaman, Sikap, Praktik |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai layanan Pentashihan Al-Qur'an |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai layanan Pentashihan Al-Qur'an mencerminkan kualitas dan efektivitas layanan dalam proses penelaahan, koreksi, dan persetujuan terhadap naskah Al-Qur'an yang akan dicetak dan diedarkan. Penilaian dilakukan terhadap aspek ketepatan teks, kesesuaian tajwid, dan ketepatan rasm. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan seberapa baik mutu layanan pentashihan dalam memastikan keotentikan dan kesesuaian naskah Al-Qur'an dengan standar yang ditetapkan. Nilai yang tinggi mengindikasikan keandalan proses pentashihan dalam menjaga kemurnian Al-Qur'an yang beredar di masyarakat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Layanan = (Skor total evaluasi layanan / Skor maksimum ideal) × 100 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor hasil evaluasi terhadap layanan pentashihan (aspek ketepatan teks, tajwid, rasm)<br>2. Skor maksimum ideal |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Kepuasan Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis layanan: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Revisi/Pengesahan Mushaf |
| 11 | Level Estimasi | Tahunan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an |
| 3 | Konsep/Definisi | Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an menunjukkan sejauh mana penerbit mengikuti ketentuan yang berlaku dalam menerbitkan naskah Al-Qur'an, termasuk keharusan pentashihan, pencantuman nomor tashih, dan kepatuhan terhadap standar teks, rasm, dan tajwid. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini merepresentasikan tingkat kesesuaian penerbit dengan ketentuan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Nilai yang tinggi mengindikasikan kesadaran dan tanggung jawab penerbit dalam menjaga akurasi dan legalitas penerbitan Al-Qur'an. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>a = Jumlah penerbit yang patuh terhadap regulasi penerbitan Al-Qur'an<br>b = Jumlah total penerbit Al-Qur'an yang terdata |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah penerbit yang mengikuti seluruh regulasi penerbitan Al-Qur'an<br>2. Jumlah total penerbit Al-Qur'an |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Penerbit Al-Qur'an terhadap Regulasi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Predikat |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan status kepatuhan: Patuh, Cukup Patuh, Tidak Patuh |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Presentase Peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an mengukur tingkat pertumbuhan jumlah surat resmi yang dikeluarkan sebagai bukti legalitas mushaf Al-Qur'an yang telah melalui proses pentashihan dan dinyatakan layak edar. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan efektivitas dan peningkatan layanan pentashihan dalam memberikan legalitas terhadap mushaf Al-Qur'an yang akan beredar. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik tingkat layanan dan kepatuhan penerbit terhadap proses perizinan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar tahun berjalan<br>b = Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar tahun berjalan<br>2. Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar tahun sebelumnya |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Penerbitan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan status penerbitan: Diterbitkan, Belum Diterbitkan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Peningkatan Masyarakat yang mamanfaatkan literasi Al-Qur'an digital |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan peningkatan jumlah individu yang mengakses dan menggunakan platform digital untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan sejauh mana adopsi teknologi digital dalam literasi Al-Qur'an meningkat di masyarakat. Kenaikan persentase mencerminkan efektivitas layanan literasi digital dan tingginya minat masyarakat terhadap pembelajaran Al-Qur'an secara daring. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital pada tahun berjalan<br>b = Jumlah masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah pengguna platform literasi Al-Qur'an digital tahun berjalan<br>2. Jumlah pengguna tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Pemanfaatan Literasi Al-Qur'an Digital |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan bentuk literasi digital: Aplikasi Al-Qur'an, E-Mushaf, Portal Pembelajaran Al-Qur'an Digital |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Kualitas Pengembangan dan Pengkajian al-Qur'an |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai ini mencerminkan mutu program yang dilakukan dalam rangka pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an, mencakup kualitas kegiatan ilmiah, penerbitan, riset, dan inovasi dalam bidang studi Al-Qur'an. |
| 4 | Interpretasi | Angka yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan pengkajian dan pengembangan Al-Qur'an dilaksanakan dengan baik, berbasis ilmu, relevan dengan kebutuhan umat, dan berdampak nyata terhadap peningkatan pemahaman dan pengalaman keislaman. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Kualitas = (Skor total hasil evaluasi / Skor maksimum ideal) × 100 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor hasil evaluasi terhadap kegiatan pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an<br>2. Skor maksimum ideal |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi dan Penilaian Program Pengembangan serta Pengkajian Al-Qur'an |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan aspek: Pengembangan Mushaf, Kajian Tafsir, Riset Al-Qur'an, Inovasi Pembelajaran Al-Qur'an |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai layanan Museum Bayt Al-Qur'an |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai ini menggambarkan tingkat kualitas layanan Museum Bayt Al-Qur'an yang dinilai berdasarkan kepuasan pengunjung terhadap berbagai aspek pelayanan, edukasi, dan fasilitas yang disediakan oleh museum. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini mencerminkan seberapa baik museum dalam memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengunjung. Semakin tinggi nilai, semakin baik kualitas pelayanan dan pengalaman pengunjung di Museum Bayt Al-Qur'an. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai = (Jumlah skor total dari seluruh responden) / (Jumlah responden)<br><br>Keterangan:<br>1. Skor total diperoleh dari kuesioner evaluasi layanan (misalnya: keramahan petugas, kebersihan, informasi koleksi, fasilitas, dan pengalaman edukatif)<br>2. Skala penilaian biasanya 1–5 atau 1–10 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor penilaian dari survei kepuasan pengunjung<br>2. Jumlah responden survei |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Kepuasan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis layanan: Pameran Tetap, Pameran Temporer, Edukasi, Layanan Pengunjung |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Peningkatan Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini mengukur tingkat pertumbuhan jumlah pengunjung yang datang ke Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal dalam satu periode waktu dibandingkan dengan periode sebelumnya. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini mencerminkan tren minat masyarakat terhadap kunjungan ke lembaga kultural dan edukatif berbasis keislaman. Semakin tinggi peningkatan, semakin baik daya tarik dan relevansi museum sebagai pusat informasi dan edukasi keislaman. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal pada tahun berjalan<br>b = Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal tahun berjalan<br>2. Jumlah pengunjung tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Kunjungan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis museum: Bayt Al-Qur'an, Museum Istiqlal |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | ilai ini mencerminkan tingkat pemanfaatan sistem NSPK dalam mendukung peningkatan kompetensi manajemen, kepemimpinan, dan penguatan moderasi beragama bagi aparatur dan pemangku kepentingan terkait. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, semakin optimal pemanfaatan NSPK sebagai acuan dalam pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penyusunan kebijakan berbasis standar. Hal ini menunjukkan keselarasan antara perencanaan kebijakan dengan kebutuhan penguatan moderasi dan tata kelola. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai = (a / b) × 100<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah kegiatan atau institusi yang mengadopsi dan menerapkan NSPK dalam program pengembangan kompetensi<br>b = Total kegiatan atau institusi yang menjadi target pemanfaatan NSPK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah kegiatan pelatihan/kebijakan yang menggunakan NSPK<br>2. Total sasaran pengembangan kompetensi berbasis NSPK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis kompetensi: Manajemen, Kepemimpinan, Moderasi Beragama |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan peserta terhadap layanan pelatihan atau program peningkatan kompetensi yang diselenggarakan, baik secara teknis, administratif, maupun substansi materi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai ini, semakin baik kualitas pelayanan yang dirasakan oleh peserta dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Nilai ini menjadi ukuran penting dalam evaluasi kualitas penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Kepuasan = (Σ Skor Kepuasan / Jumlah Responden) × Skala Penilaian Maksimal<br><br>Keterangan:<br>1. Skor Kepuasan diperoleh dari hasil survei peserta terhadap berbagai aspek layanan (fasilitas, materi, narasumber, teknis pelaksanaan, dll.)<br>2. Skala penilaian biasanya berbasis Likert (misalnya 1–5) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor penilaian dari responden per aspek layanan<br>2. Jumlah responden survei |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis pelatihan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan Pengembangan Kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan instansi/lembaga pengguna terhadap kualitas lulusan program pengembangan kompetensi, baik dari sisi keterampilan, etika kerja, maupun kontribusi kinerja di tempat kerja. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai ini, semakin positif penilaian pengguna terhadap dampak dan efektivitas pelatihan yang telah diikuti oleh peserta. Ini menjadi indikator keberhasilan program pengembangan kompetensi dalam menyiapkan SDM yang andal. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Kepuasan = (Σ Skor Penilaian / Jumlah Responden) × Skala Penilaian Maksimal<br><br>Keterangan:<br>1. Skor penilaian diperoleh dari survei pengguna (atasan/pihak institusi) terhadap lulusan program pengembangan kompetensi<br>2. Skala penilaian biasanya menggunakan skala Likert (misal 1–5) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor kepuasan pengguna terhadap lulusan<br>2. Jumlah responden pengguna |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan Program Pengembangan Kompetensi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis kompetensi: Teknis, Manajerial, Fungsional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan Pengembangan Kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan instansi/lembaga pengguna terhadap kualitas lulusan program pengembangan kompetensi, baik dari sisi keterampilan, etika kerja, maupun kontribusi kinerja di tempat kerja. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai ini, semakin positif penilaian pengguna terhadap dampak dan efektivitas pelatihan yang telah diikuti oleh peserta. Ini menjadi indikator keberhasilan program pengembangan kompetensi dalam menyiapkan SDM yang andal. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Kepuasan = (Σ Skor Penilaian / Jumlah Responden) × Skala Penilaian Maksimal<br><br>Keterangan:<br>1. Skor penilaian diperoleh dari survei pengguna (atasan/pihak institusi) terhadap lulusan program pengembangan kompetensi<br>2. Skala penilaian biasanya menggunakan skala Likert (misal 1–5) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor kepuasan pengguna terhadap lulusan<br>2. Jumlah responden pengguna |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan Program Pengembangan Kompetensi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis kompetensi: Teknis, Manajerial, Fungsional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Peningkatan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan pada SDM Agama dan Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini mengukur peningkatan jumlah SDM agama dan keagamaan yang menunjukkan peningkatan kompetensi dalam bidang manajemen dan kepemimpinan setelah mengikuti program pelatihan atau pengembangan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif program pelatihan dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan kepemimpinan SDM agama dan keagamaan. Hal ini menunjukkan penguatan kualitas aparatur dalam mendukung layanan keagamaan yang profesional. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah SDM yang menunjukkan peningkatan kompetensi manajemen dan kepemimpinan pada tahun berjalan<br>b = Jumlah SDM yang menunjukkan kompetensi pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Hasil asesmen pasca pelatihan (tahun berjalan dan tahun sebelumnya)<br>2. Data keikutsertaan pelatihan<br>3. Hasil evaluasi peningkatan kompetensi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Program Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan SDM Agama dan Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis kompetensi: Manajemen, Kepemimpinan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Pengembangan Kompetensi yang Memanfaatkan Platform Digital |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan proporsi kegiatan pengembangan kompetensi (pelatihan, diklat, workshop, dll.) yang diselenggarakan secara daring atau berbasis platform digital dibandingkan total seluruh kegiatan pengembangan kompetensi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin besar pemanfaatan teknologi dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM secara fleksibel dan efisien. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui platform digital<br>b = Total jumlah kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Data kegiatan pengembangan kompetensi berbasis digital<br>2. Data seluruh kegiatan pengembangan kompetensi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Platform Digital dalam Pengembangan Kompetensi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan bentuk platform: Learning Management System (LMS), Aplikasi Mobile, Webinar, E-Learning Interaktif |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Peningkatan Kompetensi moderasi beragama pada SDM Agama dan Keagamaan. |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan peningkatan jumlah SDM agama dan keagamaan yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi terkait moderasi beragama dibandingkan tahun sebelumnya. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase peningkatan, menunjukkan semakin luasnya cakupan penguatan pemahaman dan praktik moderasi beragama di kalangan SDM yang terlibat dalam pelayanan keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengikuti pengembangan kompetensi moderasi beragama pada tahun berjalan<br>b = Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengikuti pengembangan kompetensi moderasi beragama pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah peserta kegiatan peningkatan kompetensi moderasi beragama tahun berjalan<br>2. Jumlah peserta tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Program Pengembangan Kompetensi Moderasi Beragama bagi SDM Agama dan Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan aspek moderasi: Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekerasan, Akomodatif terhadap Budaya Lokal |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Lembaga Pengembangan Kompetensi yang Memperoleh Akreditasi B untuk Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menunjukkan proporsi lembaga pengembangan kompetensi yang telah mendapatkan akreditasi minimal kategori B dalam menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (Latsar) bagi ASN. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak lembaga yang memenuhi standar mutu penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan Latsar, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM aparatur. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lembaga pengembangan kompetensi yang memperoleh akreditasi B atau lebih<br>b = Total jumlah lembaga pengembangan kompetensi yang diverifikasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Data akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan kepemimpinan dan Latsar<br>2. Daftar total lembaga pengembangan kompetensi yang terverifikasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Akreditasi Lembaga Pengembangan Kompetensi untuk Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis pelatihan: Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar (Latsar) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memperoleh akreditasi A |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan proporsi lembaga pengembangan kompetensi SDM di bidang keagamaan yang memperoleh akreditasi tertinggi (kategori A), berdasarkan penilaian dari lembaga yang berwenang. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini mencerminkan tingkat kualitas penyelenggara pengembangan kompetensi keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak lembaga yang memenuhi standar mutu tertinggi dalam pendidikan dan pelatihan SDM keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memperoleh akreditasi A<br>b = Total lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang diakreditasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Data akreditasi lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan<br>2. Jumlah total lembaga yang diakreditasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Akreditasi Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan kategori akreditasi: A, B, C |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Keagamaan adalah proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang agama dan keagamaan (seperti penyuluh, guru, penghulu, pengelola rumah ibadah, dan tokoh agama) yang mengalami peningkatan kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan melalui pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya dalam periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak SDM agama dan keagamaan yang berhasil meningkatkan kompetensi untuk mendukung pelayanan dan pembinaan umat secara profesional, moderat, dan berdampak positif |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a : Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengalami peningkatan kompetensi<br>b : Jumlah total SDM agama dan keagamaan yang menjadi target pembinaan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengalami peningkatan kompetensi<br>2. Jumlah total SDM agama dan keagamaan yang menjadi target pembinaan atau pengembangan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan SDM Keagamaan<br>2. Bimbingan Teknis (Bimtek) SDM Keagamaan<br>3. Sertifikasi SDM Keagamaan<br>4. Workshop/Pelatihan Moderasi Beragama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. SDM Agama dan Keagamaan Bidang Pendidikan<br>2. SDM Agama dan Keagamaan Bidang Pelayanan Keagamaan<br>3. SDM Agama dan Keagamaan Bidang Sosial Kemasyarakatan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memanfaatkan platform digital |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini mengukur sejauh mana program pengembangan kompetensi bagi SDM keagamaan dilaksanakan melalui atau dengan dukungan platform digital. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan tingkat adaptasi teknologi dalam proses pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin kuat pemanfaatan teknologi dalam transformasi pelatihan keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memanfaatkan platform digital<br>b = Total kegiatan pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang dilaksanakan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Data kegiatan pelatihan yang dilakukan melalui platform digital<br>2. Data seluruh kegiatan pelatihan SDM keagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Platform Digital dalam Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis platform digitalnya: Instagram, Youtube, Tiktok. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan capaian jumlah naskah kebijakan yang berhasil disusun dalam rangka mendukung pembangunan di bidang agama, dibandingkan dengan target atau rencana kerja yang ditetapkan. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan tingkat produktivitas dalam penyusunan dokumen kebijakan yang relevan untuk mendukung tata kelola dan pembangunan sektor keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan<br>b = Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang direncanakan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah naskah kebijakan aktual yang telah selesai dan terdokumentasi<br>2. Jumlah target naskah kebijakan dalam rencana tahunan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penyusunan dan Evaluasi Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan bidang kebijakan: Pendidikan Agama, Layanan Keagamaan, Moderasi Beragama, Pemberdayaan Umat, Urusan Haji dan Umrah, Zakat dan Wakaf |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) terhadap jumlah penduduk usia 19–24 tahun. APK dapat melebihi 100% karena menghitung semua yang sedang bersekolah di jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan apakah usianya sesuai. |
| 4 | Interpretasi | APK Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang daya serap sistem pendidikan tinggi terhadap penduduk, termasuk mereka yang lebih tua atau lebih muda dari usia ideal pendidikan tinggi. Angka ini mencerminkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly<br>b = Jumlah penduduk usia 19–24 tahun |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly<br>b. Jumlah penduduk usia 19–24 tahun |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis perguruan tinggi: PTKN, PTKS |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lulusan satuan pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Ma'had Aly, yang memperoleh pekerjaan (formal/informal) dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah kelulusan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan daya serap lulusan pendidikan tinggi keagamaan terhadap dunia kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterkaitan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada periode sebelumnya<br>b = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly pada periode sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu < 1 tahun setelah lulus<br>b. Jumlah total lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly pada periode yang sama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Tracer Studi oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahun |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan status kerja: Bekerja < 1 tahun, Bekerja ≥ 1 tahun, Belum Bekerja |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam daftar Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada peringkat kurang dari 1000 besar dunia, berdasarkan penilaian kontribusi PT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam mendukung SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola institusi, dan kemitraan. Semakin banyak PT yang masuk <1000 besar, semakin tinggi pengakuan terhadap kinerja keberlanjutan perguruan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah PTK/Ma'had Aly dalam peringkat THE Impact Rankings <1000 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan SDGs Goal |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif pada institusi pendidikan tinggi keagamaan dari periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PTK meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan perguruan tinggi keagamaan swasta yang terakreditasi. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang keagamaan Islam. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan tinggi keagamaan. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin baik kinerja dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan. Indikator ini mencerminkan daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan serta efektivitas kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase peningkatan = ((a - b) / b) × 100 %<br>Keterangan:<br>a = jumlah mahasiswa tahun berjalan;<br>b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan<br>b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan EMIS PTK dan Ma'had Aly<br>- Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa oleh Setjen Kemenag dan Ditjen Pendis<br>- Monitoring dan Evaluasi Data Mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri (UIN, IAIN, STAIN)<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly<br><br>Berdasarkan Jenjang:<br>- S1/Sarjana<br>- S2/Magister<br>- S3/Doktor |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Ma'had Aly yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak PTK di Ma'had Aly yang telah melalui proses penjaminan mutu melalui sistem akreditasi formal, sehingga menjamin kompetensi, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah dipenuhi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase=(a/b)×100%<br>Dengan:<br>a = Jumlah Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly yang telah terakreditasi<br>b = Jumlah total Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang telah terakreditasi<br>b. Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan akreditasi Ma'had Aly oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku)<br>- Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis<br>- Monitoring dan evaluasi mutu Ma'had Aly oleh Ditjen Pendis |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, dan/atau per lembaga Ma'had Aly |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/ internasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi kompetensi<br>b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Dosen PTK Bersertifikasi Kompetensi<br>2. Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Bersertifikasi Kompetensi<br>3. Jumlah Dosen PTK<br>4. Jumlah Tenaga Kependidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait.<br>2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri).<br>3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Bidang Keahlian: Sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang<br>- Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi (sarjana/diploma) sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal) |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rata-rata masa tunggu = (∑ waktu tunggu semua lulusan yang bekerja) / jumlah lulusan yang bekerja |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Rata-rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan) |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)<br>- Survei Penelusuran Alumni (Tracer Study) oleh perguruan tinggi<br>- Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Waktu (Bulan) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | - Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun).<br>- Periodik (tracer study perguruan tinggi biasanya 1–2 tahun setelah kelulusan) |
| 10 | Klasifikasi | Diploma, Sarjana, Magister, Doktor |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Sakernas |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya. |
| 4 | Interpretasi | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase=(a/b)×100%<br>Dengan:<br>a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK<br>b = Jumlah total kerja sama aktif |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK<br>b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis<br>- Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu PTK<br>- Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.) |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) |
| 3 | Konsep/Definisi | Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola keberagamaan antaragama, antarwilayah, maupun antarperguruan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Indeks = (∑ skor aspek keagamaan individu / skor maksimum) × 100 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa<br>2. Skor praktik ibadah mahasiswa<br>3. Skor pengetahuan ajaran agama<br>4. Skor perilaku sosial keagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Indeks Keberagamaan Mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE Impact Rankings SDGs |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | THE 17 GOALS |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Times Higher Education |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memenuhi standar sarana prasarana |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi adalah proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki fasilitas akademik dan non-akademik sesuai ketentuan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai standar nasional pendidikan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dalam periode tertentu;<br>b = Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada dalam periode yang sama; |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi;<br>2. Jumlah total PTK/Ma'had Aly. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Verifikasi dan validasi data sarana prasarana melalui EMIS dan monitoring lapangan;<br>- Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarpras PTK;<br>- Evaluasi pemenuhan standar sarpras oleh Tim Penjaminan Mutu PTK. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase PTK yang menyediakan fasilitas pendidikan berbasis gender dan inklusif adalah ukuran proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak PTK yang menyediakan dukungan terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) penerima beasiswa |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa PTK penerima beasiswa adalah ukuran proporsi mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, lembaga keagamaan, atau sumber lain yang sah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase mahasiswa penerima beasiswa, menunjukkan semakin luasnya akses bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, baik dari pemerintah, institusi, maupun pihak swasta |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa penerima beasiswa<br>b = Jumlah mahasiswa |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa<br>2. Jumlah Mahasiswa |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pencatatan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis Beasiswa: Akademik, Non-Akademik (olahraga/seni), Kebutuhan Ekonomi, Prestasi, dll. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I adalah proporsi mahasiswa baru atau mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang ditetapkan dalam kelompok UKT paling rendah (Kelompok I). Kelompok UKT I ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan dan/atau memiliki keterbatasan finansial, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan pendidikan tinggi di PTK. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang masuk dalam kategori UKT Kelompok I, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dan PTK dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I<br>b = Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I pada PTKN<br>2. Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada PTKN |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penerapan sistem UKT berbasis data ekonomi mahasiswa<br>- Verifikasi dan validasi ekonomi calon mahasiswa baru (UKT online/offline)<br>- Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan afirmatif UKT |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Tahun Masuk:<br>- Angkatan 202X;<br>- Angkatan 202X-1, dst. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan animo mahasiswa baru |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan animo mahasiswa baru adalah perubahan persentase jumlah pendaftar baru pada suatu institusi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya |
| 4 | Interpretasi | Variabel ini menunjukkan seberapa besar minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada institusi tersebut. Peningkatan nilai menunjukkan daya tarik institusi yang meningkat, sedangkan penurunan mengindikasikan menurunnya minat calon mahasiswa |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah pendaftar tahun berjalan<br>b = Jumlah pendaftar tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah pendaftar tahun berjalan<br>2. Jumlah pendaftar tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Rekrutmen Calon Mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkualitas |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas adalah rasio antara jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah terakreditasi Unggul/A atau memiliki peringkat terbaik, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa baru yang diterima di PTK pada periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur ketersediaan akses dan pilihan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa baru. Semakin tinggi proporsi mahasiswa baru yang memilih dan diterima di PTK berkualitas, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penyediaan pilihan institusi yang terpercaya. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik.<br>b = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik.<br>2. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penghitungan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa baru PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa baru PTK yang berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang terdaftar di program studi bidang Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) dengan status akreditasi "Unggul" dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak mahasiswa baru di PTK yang memilih program studi STEM dengan mutu akademik tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan terhadap kebutuhan iptek. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Proporsi = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul<br>b = Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa baru di prodi STEM terakreditasi unggul<br>2. Jumlah total mahasiswa baru di prodi STEM |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh perguruan tinggi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Ditjen Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terpetakan berdasarkan keunggulannya |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya adalah banyaknya PTK (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah diklasifikasikan menurut bidang atau capaian unggulan, seperti riset, inovasi, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan mutu akademik. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi jumlah PTK yang terpetakan menunjukkan semakin baiknya pemetaan mutu dan diferensiasi perguruan tinggi keagamaan berdasarkan keunggulan spesifiknya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pembinaan mutu. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah = Banyaknya PTK yang telah dikategorikan sesuai hasil pemetaan keunggulan berdasarkan kriteria mutu dan capaian unggulan. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Kegiatan pemetaan dan klasifikasi PTK oleh Kementerian Agama<br>- Survei dan asesmen potensi unggulan PTK<br>- Penyusunan profil kelembagaan PTK |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Prodi PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan akreditasi unggul |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Prodi PTK yang mendapatkan akreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi "Unggul" dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi di perguruan tinggi keagamaan yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik di lingkungan PTK. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang berakreditasi unggul<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang berakreditasi unggul<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Di PDDikti |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/ Buddha) yang terakreditasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase LPTK PTK yang terakreditasi adalah ukuran proporsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memperoleh status akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak LPTK di PTK yang memenuhi standar mutu kelembagaan dan tata kelola pendidikan, mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan calon tenaga pendidik keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase=(a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah LPTK yang telah terakreditasi.<br>b = Jumlah LPTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi.<br>2. Jumlah LPTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendampingan dan fasilitasi akreditasi LPTK;<br>- Penguatan sistem penjaminan mutu internal;<br>- Verifikasi data akreditasi melalui EMIS dan BAN-PT/LAM. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Peringkat Akreditasi:<br>- Unggul/A<br>- Baik Sekali/B<br>- Baik/C |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/ Buddha) yang terakreditasi unggul |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase program studi PPG PTK yang terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi Program Profesi Guru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi PPG di PTK yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru keagamaan dan kesiapan lembaga dalam menghasilkan pendidik profesional. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Peningkatan dan Fasilitasi Akreditasi Unggul Program Studi PPG (melalui pembinaan, pendampingan, workshop, penyusunan dokumen akreditasi, dan evaluasi diri).<br>- Pendataan dan Rekapitulasi Program Studi PPG yang telah terakreditasi (termasuk status akreditasi aktif) di bawah Kementerian Agama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen berkualifikasi akademik S3<br>a. Total<br>b. STEM<br>c. Non STEM |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 adalah rasio jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total dosen aktif di perguruan tinggi, baik secara keseluruhan (total), di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), maupun di bidang non-STEM. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas sumber daya dosen yang berperan dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Total = ((a + b) / c) × 100%<br>STEM = (a / c) × 100%<br>Non-STEM = (b / c) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen S3 STEM<br>b = Jumlah dosen S3 non-STEM<br>c = Jumlah dosen |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen S3 STEM<br>2. Jumlah dosen S3 non-STEM<br>3. Jumlah dosen |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus adalah rasio jumlah dosen tetap yang terlibat dalam aktivitas profesional di luar perguruan tinggi seperti industri, lembaga riset, pemerintahan, organisasi internasional, atau kegiatan pengabdian masyarakat, terhadap jumlah total dosen tetap. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin banyak dosen yang memiliki pengalaman praktis dan relevan di dunia luar kampus, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus<br>b = Jumlah dosen tetap |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus<br>2. Jumlah dosen tetap |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Aktivitas Dosen atau Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar adalah rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik tersebut terhadap jumlah total dosen tetap di perguruan tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik tingkat profesionalisme, kepakaran, dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar<br>b = jumlah total dosen tetap |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar<br>2. Jumlah total dosen tetap |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis Jabatan: Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/ internasional. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur sejauh mana dosen PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh program peningkatan kompetensi<br>b = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program peningkatan kompetensi<br>2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait.<br>2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri).<br>3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen PTK yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional adalah ukuran proporsi dosen pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang berpartisipasi sebagai pembicara, pemakalah, atau panelis pada forum ilmiah tingkat nasional dan internasional. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin aktif dan diakui dosen PTK dalam jejaring ilmiah nasional dan global, mencerminkan peningkatan kapasitas akademik, reputasi, dan kontribusi ilmiah perguruan tinggi keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional<br>b = Jumlah dosen aktif yang ada di PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional<br>2. Jumlah dosen aktif yang ada di PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah<br>- Fasilitasi dan insentif publikasi ilmiah dan partisipasi konferensi<br>- Evaluasi kegiatan tridarma dosen |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Konferensi:<br>- Nasional<br>- Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Rasio dosen asing PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) dengan dosen dalam negeri |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK adalah perbandingan antara jumlah dosen berkewarganegaraan asing dengan jumlah dosen warga negara Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha). |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar keterlibatan dosen asing dalam kegiatan akademik PTK, yang mencerminkan peningkatan kolaborasi internasional dan pengakuan global terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio = 1 : (b / a)<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen asing aktif di PTK<br>b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a = Jumlah dosen asing aktif di PTK<br>b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Program visiting professor atau exchange lecturer<br>- Skema rekrutmen dosen asing<br>- Kerja sama internasional PTK (MoU/MoA) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada jenjang jabatan fungsional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK pada jenjang jabatan fungsional adalah ukuran tingkat kesesuaian antara jumlah tenaga kependidikan yang telah menduduki jabatan fungsional (misalnya arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium, analis kepegawaian, dan sejenisnya) dengan jumlah formasi atau kebutuhan ideal di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha). |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan sesuai jabatan fungsional yang dibutuhkan, mencerminkan efektivitas manajemen SDM dan profesionalitas tenaga kependidikan di lingkungan PTK. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional<br>b = Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional<br>2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | a. Pendataan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan / Kementerian<br>b. Analisis Kebutuhan Formasi oleh BKN / Kemdikbudristek / Pemerintah Daerah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Data diperbarui secara berkala (tahunan) dengan cut-off per tanggal 30 Juni setiap tahun. |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi lulusan program sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah mengikuti program pembelajaran di luar kampus selama minimal satu semester penuh, relatif terhadap total lulusan program sarjana (S1) pada periode yang sama |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur keberhasilan Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi lulusan S1 untuk memiliki pengalaman praktis dan relevan di luar lingkungan akademik. Semakin tinggi persentase lulusan dengan pengalaman di luar kampus, menunjukkan semakin kuatnya adaptasi kurikulum dan program pendidikan PTK terhadap kebutuhan dunia kerja dan dinamika masyarakat |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus.<br>b = Jumlah lulusan PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus.<br>2. Jumlah lulusan PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan dan Fasilitasi Program Pembelajaran di Luar Kampus (Magang, KKN, Pertukaran Mahasiswa, dll.) dan Pendataan Partisipan serta Lulusan dari Program Tersebut.<br>- Proses Yudisium dan Pendataan Seluruh Lulusan Program Sarjana (S1) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki Pusat Pengembangan Karir |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) di bawah Kementerian Agama yang memiliki unit atau fasilitas yang secara khusus memberikan layanan pengembangan karir kepada mahasiswa dan alumni, relatif terhadap total PTK yang ada |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir di PTK. Semakin tinggi persentase PTK yang memiliki pusat pengembangan karir, menunjukkan semakin besar perhatian dan upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan lulusan PTK untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karir<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Identifikasi dan verifikasi keberadaan pusat pengembangan karir di setiap PTK (melalui survei, pendataan, atau laporan dari PTK).<br>- Pendataan dan rekapitulasi total PTK di bawah Kementerian Agama. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan PTK yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan:<br>a. Total;<br>b. Karyawan atau Wirausaha |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan adalah proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau merintis usaha (wirausaha) dalam periode waktu tertentu setelah kelulusan, dibandingkan dengan total lulusan yang lulus pada periode yang sama. Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja atau siap berwirausaha. Semakin tinggi persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun wirausaha, menunjukkan semakin baik kualitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pembinaan karir yang dilakukan oleh PTK. Ini mengindikasikan bahwa lulusan PTK memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Peningkatan indikator ini berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan angka serapan lulusan, pengurangan pengangguran terdidik, serta peningkatan kontribusi PTK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = { (a + b) / c } × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>b = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>c = Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>2. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>3. Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Tracer Study PTK<br>- Program Career Center dan Alumni<br>- Pelatihan kewirausahaan dan magang<br>- Inkubator bisnis mahasiswa/alumni |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Pekerjaan: Karyawan, Wirausaha |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase tenaga kerja lulusan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) bidang STEM |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi angkatan kerja yang memiliki gelar pendidikan tinggi (D3, D4/Sarjana Terapan, S1, S2, S3) dari program studi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), relatif terhadap total angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur ketersediaan SDM berkualitas di sektor-sektor kritis yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangsa. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan tinggi nasional mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor strategis di bidang STEM. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan ketersediaan SDM STEM yang memadai untuk mendukung inovasi, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong minat dan kapasitas generasi muda pada disiplin ilmu yang penting untuk masa depan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK bidang STEM.<br>b = Jumlah lulusan PTK. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK bidang STEM.<br>2. Jumlah lulusan PTK. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau survei ketenagakerjaan lainnya yang spesifik |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Bidang STEM:<br>- Sains (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistika, dll.)<br>- Teknologi (Informatika, Sistem Informasi, dll.)<br>- Teknik/Rekayasa (Sipil, Elektro, Mesin, dll.)<br>- Matematika Murni & Aktuaria |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Sakernas |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik, relatif terhadap total lulusan pada periode yang sama. Indikator ini mencerminkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan pengakuan kompetensi yang diakui secara profesional. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa program pendidikan di PTK semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan lulusannya memiliki daya saing yang kuat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi.<br>b = Jumlah lulusan PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi.<br>2. Jumlah lulusan PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Fasilitasi program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/lulusan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan pendataan lulusan yang bersertifikat kompetensi.<br>- Pendataan dan rekapitulasi total lulusan PTK di bawah Kementerian Agama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Lembaga Sertifikasi:<br>- LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) terlisensi BNSP<br>- Asosiasi Profesi<br>- Lembaga Sertifikasi Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio outbound per inbound mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri (outbound) dengan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke dalam PTK tersebut (inbound) dalam periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat internasionalisasi dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan dengan dinamika global. Semakin seimbang rasio antara mahasiswa outbound dan inbound (mendekati 1:1), menunjukkan semakin kuatnya daya tarik dan kemampuan PTK dalam menciptakan ekosistem akademik yang inklusif secara internasional, serta semakin aktifnya mahasiswa PTK dalam mencari pengalaman global. Peningkatan rasio ini mencerminkan pengakuan PTK di kancah internasional, pengayaan perspektif multikultural di kampus, serta peningkatan kompetensi global mahasiswa. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global, pengembangan jejaring internasional, dan peningkatan reputasi PTK sebagai pusat keunggulan pendidikan keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio Outbound per Inbound = 1 : (b / a)<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa outbound PTK<br>b = Jumlah mahasiswa inbound PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa outbound PTK<br>2. Jumlah mahasiswa inbound PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll)<br>- Student exchange antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri<br>- Program KKN internasional / transfer kredit luar negeri |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi adalah proporsi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti kegiatan atau program di luar kurikulum inti program studi mereka, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa yang aktif di PTK dalam periode tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, soft skills, dan pengalaman di luar bidang keilmuan utama. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat fleksibilitas kurikulum dan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan diri di luar bidang utama, yang krusial untuk meningkatkan relevansi lulusan. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, menunjukkan semakin kuatnya upaya PTK dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan kesempatan untuk mengembangkan soft skills, kemandirian, serta jejaring. Ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kompetensi lintas disiplin. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b ) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu.<br>b = Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a: Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu.<br>b: Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa)<br>- Magang (MBKM, kerja praktik, dll)<br>- KKN, pengabdian masyarakat<br>- Program pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan kompetisi mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Kegiatan:<br>- Program MBKM (spesifik: Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, dll.)<br>- Organisasi Kemahasiswaan (Internal/Eksternal)<br>- Kompetisi/Lomba<br>- Pengabdian Masyarakat<br>- Karya Ilmiah/Kreativitas (di luar tugas akhir prodi) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, seni, atau olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam periode waktu tertentu. Kompetisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, olimpiade sains, lomba inovasi, debat, kompetisi pemrograman, turnamen olahraga, dan festival seni. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan daya saing mahasiswa PTK di kancah nasional dan internasional. Persentase yang tinggi menunjukkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa di luar kurikulum formal, serta reputasi PTK dalam menghasilkan talenta-talenta berdaya saing global. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase peningkatan = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan<br>b = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan<br>2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan Partisipasi Mahasiswa dalam Kompetisi (PPMK) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi jumlah PTK yang terlibat aktif dalam kolaborasi atau kemitraan dengan entitas eksternal (dunia usaha dan industri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional) dibandingkan dengan total keseluruhan PTK. Kerja sama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti magang industri, proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan, program pengabdian masyarakat, atau pertukaran keahlian. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan tingkat keterbukaan dan relevansi institusi pendidikan dengan kebutuhan eksternal. Semakin tinggi persentase ini, semakin kuat integrasi institusi pendidikan dengan lingkungan kerja, industri, dan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase PTK yang bekerjasama = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional<br>b = Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>Pendataan Potensi dan Kemitraan Institusi Pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang:<br>a. Pendidikan dan pengajaran<br>b. Penelitian dan publikasi<br>c. Pengabdian kepada masyarakat |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja sama dimaksud mencakup perjanjian, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen resmi antara perguruan tinggi/lembaga dengan mitra, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan sesuai bidang. |
| 4 | Interpretasi | Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak kerja sama yang benar-benar ditindaklanjuti dan berdampak, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya banyak kesepakatan yang belum terlaksana secara nyata. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati<br><br>Persentase kerjasama bidang penelitian dan publikasi: (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati<br><br>Persentase kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat: (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti<br>2. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati<br>3. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti<br>4. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati<br>5. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti<br>6. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pencatatan dan Pemantauan Kerjasama (Monitoring and Evaluation of Partnerships)<br>2. Manajemen Kerjasama (Partnership Management)<br>3. Pelaporan Kinerja Kerjasama (Partnership Performance Reporting) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan atau umum yang berpartisipasi dalam program peningkatan literasi Kitab Suci, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan dan instansi keagamaan. |
| 4 | Interpretasi | Peningkatan nilai menunjukkan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan akses dan kesempatan dalam penguatan spiritualitas dan nilai-nilai kebajikan lintas agama. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus: (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu<br>b = Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu<br>2. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pengembangan dan pelaksanaan program literasi Kitab Suci di PTKI/PTU<br>2. Pelatihan dan workshop peningkatan pemahaman kitab suci<br>3. Kegiatan pembinaan keagamaan berbasis kitab suci<br>4. Kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan dalam literasi kitab<br>5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran kitab suci |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan adalah rasio jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi keagamaan yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan dibandingkan dengan total prodi yang diukur pada periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak prodi yang berhasil menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum atau interdisipliner, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan<br>b = Jumlah prodi yang diukur |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan<br>b = Jumlah prodi yang diukur |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Evaluasi kurikulum dan implementasi integrasi keilmuan<br>2. Workshop/pelatihan pengembangan kurikulum integratif<br>3. Pendampingan dan monitoring prodi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase PTK yang membentuk dan mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu-isu lokal seperti moderasi beragama, toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai keagamaan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan PTK dalam merespons dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis riset dan advokasi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus: (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal<br>b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal<br>2. Jumlah PTK yang menjadi sasaran program |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pembentukan pusat studi keagamaan berbasis lokal<br>2. Penelitian berbasis kebutuhan sosial-keagamaan lokal<br>3. Pengabdian masyarakat berbasis hasil kajian keagamaan<br>4. Penerbitan hasil kajian tematik keagamaan<br>5. Kemitraan PTK dengan pemda/lembaga masyarakat dalam bidang keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional di Kementerian Agama adalah perbandingan jumlah karya tulis ilmiah ilmiah yang terakreditasi nasional (minimal SINTA 1 atau SINTA 2) yang dikelola oleh unit kerja atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, terhadap total jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Agama |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan kualitas dan pengakuan nasional atas karya tulis ilmiah-karya tulis ilmiah ilmiah di bawah pengelolaan Kementerian Agama |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah karya tulis ilmiah terakreditasi nasional (SINTA 1 atau 2)<br>b = Total karya tulis ilmiahyang dikelola |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah karya tulis ilmiah yang terakreditasi nasional (SINTA 1 atau SINTA 2)<br>2. Total jumlah karya tulis ilmiah yang dikelola |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pengelolaan dan Akreditasi karya tulis ilmiah Ilmiah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. SINTA 1 (Tertinggi)<br>2. SINTA 2<br>3. SINTA 3<br>4. SINTA 4 ke bawah |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Di Scopus |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi adalah proporsi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen/peneliti PTK pada jurnal bereputasi internasional yang telah mendapat sitasi (citation) dari artikel lain dalam periode tertentu.<br><br>Jurnal bereputasi internasional adalah jurnal yang terindeks dalam database internasional yang diakui seperti Scopus, Web of Science (WoS), atau database internasional lainnya yang memiliki sistem peer-review yang ketat.<br>Sitasi adalah rujukan atau referensi yang dibuat oleh artikel lain terhadap artikel yang dimaksud, yang menunjukkan dampak dan kontribusi artikel tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel yang disitasi menunjukkan kualitas, relevansi, dan pengaruh penelitian terhadap komunitas ilmiah internasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur dampak dan kualitas publikasi ilmiah PTK di tingkat internasional. Semakin tinggi persentase artikel yang disitasi, menunjukkan semakin baik kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan oleh PTK. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 % |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi;<br>b. Jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh PTK. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Insentif Publikasi Ilmiah Internasional;<br>- Bantuan Penulisan Artikel Bereputasi;<br>- Pelatihan Sitasi dan Manajemen Referensi Ilmiah. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Quartile Jurnal (SJR/JCR):<br>- Q1 (Quartile 1);<br>- Q2 (Quartile 2);<br>- Q3 (Quartile 3);<br>- Q4 (Quartile 4). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase jumlah karya tulis ilmiah yang mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan berhasil terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, dibandingkan dengan total karya tulis ilmiah yang dihasilkan dalam periode tertentu. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin kuat kontribusi akademik civitas akademika dalam mendukung target SDGs melalui publikasi yang diakui secara internasional. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus = Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penelitian dosen dan mahasiswa berfokus SDGs<br>2. Workshop penulisan artikel ilmiah bereputasi<br>3. Pendampingan publikasi internasional |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan THE 17 GOALS |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen adalah perbandingan antara jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional dengan jumlah dosen tetap di perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin produktif dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, yang mencerminkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Agama |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio: 1 : (b / a)<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan<br>b = Jumlah dosen tetap |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan<br>2. Jumlah dosen tetap |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen PTKIN/PTKIS<br>2. Program Insentif Publikasi Ilmiah<br>3. Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Quartil Artikel: (Q1, Q2, Q3, dan Q4) |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Di Scopus |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi adalah total hak paten yang telah resmi diberikan (granted) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin banyak jumlah paten yang granted, semakin menunjukkan meningkatnya kapasitas inovasi, riset terapan, dan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemanfaatannya untuk masyarakat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>Jumlah Paten Granted (disetujui DJKI) dalam satu tahun |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah paten granted yang diperoleh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di PTKIN/PTKIS<br>2. Program Pendaftaran dan Fasilitasi Paten Perguruan Tinggi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Unit (paten) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Kategori Jumlah Paten Granted<br>1. Rendah (0 – 2 paten granted)<br>2. Sedang (3 – 5 paten granted)<br>3. Tinggi (> 5 paten granted) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase hasil riset dan inovasi adalah rasio antara jumlah hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masyarakat terhadap total hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi keagamaan dalam periode tertentu |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak hasil riset dan inovasi yang aplikatif, relevan, dan bermanfaat bagi DUDI/masyarakat, menandakan peningkatan kualitas riset terapan di perguruan tinggi |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat<br>b = Jumlah hasil riset |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat<br>2. Jumlah hasil riset |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Kegiatan Penelitian dan Inovasi Terapan<br>2. Program Hilirisasi Hasil Riset<br>3. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan DUDI/Komunitas Masyarakat |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Pihak Pemanfaat:<br>- Dunia Usaha (Perusahaan, Startup)<br>- Dunia Industri<br>- Masyarakat (Komunitas, Kelompok Tani, UMKM)<br>- Pemerintah/Lembaga Publik |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase LPPM yang mendapatkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan makin banyak LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya, sebagai cerminan perbaikan kualitas manajemen riset dan pengabdian di perguruan tinggi |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya<br>b = Jumlah LPPM PTK |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya<br>2. Jumlah LPPM PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan/Workshop Manajemen Riset dan Pengabdian Masyarakat<br>2. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM<br>3. Program Penguatan Tata Kelola LPPM<br>4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan LPPM |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis peningkatan kapasitasnya:<br>1. Pelatihan Pengelolaan LPPM<br>2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola LPPM<br>3. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM<br>4. Pendampingan Penyusunan Roadmap Riset & Pengabdian |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur persentase siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang Madrasah Aliyah (MA), Ulya, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Utama Widyalaya, dan Uttama Dhammasekha dalam kurun waktu yang ditetapkan. Penyelesaian pendidikan tepat waktu mencerminkan efektivitas proses pembelajaran dan manajemen pendidikan di lembaga-lembaga tersebut. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas siswa mampu menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengindikasikan kualitas pendidikan dan manajemen yang baik di satuan pendidikan tersebut. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br>Keterangan<br>a = Jumlah Siswa yang Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu<br>b = Jumlah Total Siswa pada awal tahun MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Siswa yang Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu<br>2. Jumlah Total Siswa pada awal tahun MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Sosial Ekonomi Nasional |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis pendidikan: MA/sederajat, Ulya, SMTK, SMAK, Utama Widyalaya, Uttama Dhammasekha |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional<br>a. Literasi membaca<br>b. Numerasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peserta didik pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya yang mencapai atau melampaui batas minimum kompetensi dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pada domain literasi membaca dan numerasi. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur seberapa banyak peserta didik di lingkungan pendidikan keagamaan yang telah mencapai kompetensi dasar yang dianggap penting untuk pembelajaran sepanjang hayat, yakni kemampuan memahami bacaan dan kemampuan berhitung dasar. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | 1. Literasi Membaca<br>Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Literasi Membaca<br>b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi<br><br>2. Numerasi<br>Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Numerasi<br>b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Literasi Membaca<br><br>b. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Numerasi<br><br>c. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang mengikuti AKM |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Asesmen Nasional (AN) – Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan bidang: Literasi Membaca dan Numerasi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Dalam Situs Rapor Pendidikan Kemendikdasmen |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap total guru dan tenaga kependidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan.<br>Adapun syarat guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang memenuhi kualifikasi profesional, yaitu:<br>a. Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi terakreditasi dengan IPK minimal 3.00<br>b. Memiliki sertifikat pendidik |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pendidik di lingkungan pendidikan keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik tingkat profesionalitas GTK dalam mendukung pembelajaran yang bermutu dan sesuai dengan standar pendidikan nasional. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang profesional<br>b = Jumlah guru dan tenaga kependidikan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang profesional<br>b. Jumlah total guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sasaran |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan profesi: Guru dan Tenaga Kependidikan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional dan Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Termasuk di dalamnya pemenuhan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, serta satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas dan ramah inklusi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendukung pendidikan inklusif<br>b = Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendidikan inklusif<br>2. Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penilaian atau audit pemenuhan SNP sarana dan prasarana oleh kementerian terkait<br>2. Verifikasi lapangan atau laporan pemenuhan fasilitas pendukung satuan pendidikan inklusif |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/sederajat, MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Termasuk di dalamnya pemenuhan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, serta satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas dan ramah inklusi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendukung pendidikan inklusif<br>b = Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendidikan inklusif<br>2. Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penilaian atau audit pemenuhan SNP sarana dan prasarana oleh kementerian terkait<br>2. Verifikasi lapangan atau laporan pemenuhan fasilitas pendukung satuan pendidikan inklusif |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/sederajat, MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Termasuk di dalamnya pemenuhan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, serta satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas dan ramah inklusi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendukung pendidikan inklusif<br>b = Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendidikan inklusif<br>2. Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penilaian atau audit pemenuhan SNP sarana dan prasarana oleh kementerian terkait<br>2. Verifikasi lapangan atau laporan pemenuhan fasilitas pendukung satuan pendidikan inklusif |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/sederajat, MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 2 | Nama Indikator | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memperoleh nilai pada aspek pengelolaan partisipatif dalam kategori baik berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi penyelenggaraan pendidikan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan melaksanakan pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak (pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, komite, dan masyarakat) secara partisipatif. Persentase yang tinggi menunjukkan tata kelola satuan pendidikan yang terbuka dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memperoleh kategori baik pada nilai pengelolaan partisipatif<br>b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang dinilai |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh nilai pengelolaan partisipatif kategori baik<br>2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Evaluasi diri madrasah/satuan pendidikan (EDM) atau instrumen penilaian pengelolaan partisipatif lain oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Hasil visitasi monitoring dan evaluasi pengelolaan satuan pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memiliki indeks karakter pada kategori baik |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase satuan pendidikan yang memperoleh nilai indeks karakter dalam kategori baik berdasarkan hasil penilaian terhadap dimensi-dimensi karakter peserta didik, seperti religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan berhasil membentuk dan menginternalisasi nilai-nilai karakter pada peserta didik. Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas program pendidikan karakter yang diterapkan di satuan pendidikan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter pada kategori baik<br>b = Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan dengan indeks karakter kategori baik<br>2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pengukuran indeks karakter melalui instrumen survei karakter atau evaluasi penanaman nilai karakter oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Hasil monitoring dan evaluasi program penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memiliki:<br>a.iklim keamanan sekolah;<br>b.iklim inklusivitas;<br>c.iklim kebhinekaan pada kategori baik. |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan kategori baik dalam penilaian terhadap iklim sekolah pada tiga dimensi utama, yaitu:<br>a) iklim keamanan sekolah (merasa aman secara fisik, sosial, dan emosional di sekolah),<br>b) iklim inklusivitas (kesetaraan layanan dan penghargaan pada keberagaman peserta didik),<br>c) iklim kebhinekaan (praktik saling menghormati dan memperkuat persatuan dalam keberagaman). |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan belajar di satuan pendidikan dalam menciptakan suasana aman, inklusif, dan menghargai kebhinekaan. Persentase yang tinggi menunjukkan satuan pendidikan telah berhasil membangun iklim belajar yang sehat dan mendukung perkembangan karakter peserta didik. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan yang memiliki kategori baik pada masing-masing dimensi (keamanan, inklusivitas, kebhinekaan)<br>b = Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai pada masing-masing dimensi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim keamanan sekolah<br>2. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim inklusivitas<br>3. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim kebhinekaan<br>4. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Survei lingkungan belajar, asesmen iklim sekolah, atau instrumen pemetaan kondisi lingkungan belajar oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter yang mencakup dimensi keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memiliki:<br>a.iklim keamanan sekolah;<br>b.iklim inklusivitas;<br>c.iklim kebhinekaan pada kategori baik. |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan kategori baik dalam penilaian terhadap iklim sekolah pada tiga dimensi utama, yaitu:<br>a) iklim keamanan sekolah (merasa aman secara fisik, sosial, dan emosional di sekolah),<br>b) iklim inklusivitas (kesetaraan layanan dan penghargaan pada keberagaman peserta didik),<br>c) iklim kebhinekaan (praktik saling menghormati dan memperkuat persatuan dalam keberagaman). |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan belajar di satuan pendidikan dalam menciptakan suasana aman, inklusif, dan menghargai kebhinekaan. Persentase yang tinggi menunjukkan satuan pendidikan telah berhasil membangun iklim belajar yang sehat dan mendukung perkembangan karakter peserta didik. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan yang memiliki kategori baik pada masing-masing dimensi (keamanan, inklusivitas, kebhinekaan)<br>b = Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai pada masing-masing dimensi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim keamanan sekolah<br>2. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim inklusivitas<br>3. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim kebhinekaan<br>4. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Survei lingkungan belajar, asesmen iklim sekolah, atau instrumen pemetaan kondisi lingkungan belajar oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter yang mencakup dimensi keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan berbasis keagamaan yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak sesuai pedoman nasional dan prinsip perlindungan anak. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak lembaga pendidikan berbasis agama yang mengadopsi prinsip ramah anak, mendukung lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai hak anak. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi kriteria ramah anak<br>b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi target |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan ramah anak<br>2. Jumlah total satuan pendidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak pada Madrasah, Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama, dan Satuan Pendidikan Keagamaan Formal |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, dan MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Tidak |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | - |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah mengimplementasikan kurikulum yang dirancang sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik dan lingkungan, mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta memprioritaskan penguatan karakter dan pencapaian kompetensi esensial. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah menerapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan zaman, yang tidak hanya menekankan aspek akademik tetapi juga membangun karakter dan kompetensi penting. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang mempraktikkan pendekatan pembelajaran transformatif. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial<br>b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang dinilai |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial<br>2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai penerapan kurikulumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah<br>2. Laporan pelaksanaan kurikulum dari satuan pendidikan melalui sistem pelaporan akademik atau evaluasi kurikulum |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang menggunakan perangkat komputer dan koneksi internet secara rutin dalam kegiatan pembelajaran, baik untuk akses materi, penugasan, evaluasi, maupun interaksi belajar. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah diterapkan di lingkungan satuan pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran. Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan satuan pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pengajaran. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran<br>b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang didata |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan komputer dan internet untuk pembelajaran<br>2. Total jumlah satuan pendidikan yang didata |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pendataan penggunaan TIK dalam pembelajaran melalui EMIS atau instrumen monitoring lain<br>2. Laporan hasil evaluasi pemanfaatan sarana TIK di satuan pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persantase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah melalui proses akreditasi dan memperoleh status terakreditasi berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan mutu pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak satuan pendidikan yang kualitasnya telah diverifikasi dan diakui secara resmi melalui proses akreditasi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah diakreditasi sesuai SNP<br>b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menjadi objek akreditasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan yang telah diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan<br>2. Total jumlah satuan pendidikan yang menjadi objek akreditasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelaksanaan visitasi dan evaluasi akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah atau lembaga akreditasi terkait<br>2. Pendataan hasil akreditasi yang dituangkan dalam sertifikat atau status akreditasi satuan pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lulusan dari satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan formal atau rekognisi, baik melalui kesetaraan ijazah, sertifikasi kompetensi, pengakuan kualifikasi tertentu, atau bentuk rekognisi lain yang diakui oleh negara atau lembaga berwenang. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan memiliki hasil belajar yang diakui secara formal, sehingga dapat memperluas kesempatan mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dalam memfasilitasi pengakuan kompetensi lulusan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi<br>b = Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh rekognisi<br>2. Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Program kesetaraan atau sertifikasi lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Pendataan hasil kelulusan dan penerbitan ijazah kesetaraan atau sertifikat pengakuan kompetensi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan pada pendidikan kesetaraan atau rekognisi yang dicapai: setara Paket A/sederajat, Paket B/sederajat, Paket C/sederajat, atau jenjang kompetensi keagamaan lainnya yang diakui |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lulusan dari satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan formal atau rekognisi, baik melalui kesetaraan ijazah, sertifikasi kompetensi, pengakuan kualifikasi tertentu, atau bentuk rekognisi lain yang diakui oleh negara atau lembaga berwenang. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan memiliki hasil belajar yang diakui secara formal, sehingga dapat memperluas kesempatan mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dalam memfasilitasi pengakuan kompetensi lulusan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi<br>b = Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh rekognisi<br>2. Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Program kesetaraan atau sertifikasi lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Pendataan hasil kelulusan dan penerbitan ijazah kesetaraan atau sertifikat pengakuan kompetensi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan pada pendidikan kesetaraan atau rekognisi yang dicapai: setara Paket A/sederajat, Paket B/sederajat, Paket C/sederajat, atau jenjang kompetensi keagamaan lainnya yang diakui |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai ini menggambarkan tingkat kualitas layanan yang diberikan dalam proses penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan agar sesuai dengan kaidah ajaran agama, kurikulum, dan standar penulisan yang ditetapkan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik kualitas layanan penilaian buku, termasuk dalam hal transparansi, ketepatan waktu, profesionalitas, dan kepuasan pengguna layanan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai = (Jumlah skor aspek layanan / Skor maksimum) × 100<br><br>Keterangan:<br>1. Aspek layanan mencakup ketepatan, kejelasan prosedur, profesionalitas penilai, dan kepuasan pengguna. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor per aspek layanan penilaian<br>2. Skor maksimum keseluruhan aspek |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis buku: Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, serta Pendidikan Keagamaan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai ini menggambarkan tingkat kualitas layanan yang diberikan dalam proses penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan agar sesuai dengan kaidah ajaran agama, kurikulum, dan standar penulisan yang ditetapkan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik kualitas layanan penilaian buku, termasuk dalam hal transparansi, ketepatan waktu, profesionalitas, dan kepuasan pengguna layanan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai = (Jumlah skor aspek layanan / Skor maksimum) × 100<br><br>Keterangan:<br>1. Aspek layanan mencakup ketepatan, kejelasan prosedur, profesionalitas penilai, dan kepuasan pengguna. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor per aspek layanan penilaian<br>2. Skor maksimum keseluruhan aspek |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis buku: Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, serta Pendidikan Keagamaan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase naskah kebijakan bidang pendidikan yang dimanfaatkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase naskah kebijakan (policy brief, kajian, atau rekomendasi kebijakan) dalam bidang pendidikan yang telah dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan atau pemangku kepentingan untuk penyusunan program, perumusan kebijakan, atau pengambilan keputusan lainnya. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil penyusunan naskah kebijakan benar-benar digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menunjukkan efektivitas dan relevansi penyusunan kajian kebijakan tersebut. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah naskah kebijakan bidang pendidikan yang dimanfaatkan<br>b = Total jumlah naskah kebijakan bidang pendidikan yang dihasilkan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah naskah kebijakan bidang pendidikan yang dimanfaatkan<br>2. Total jumlah naskah kebijakan bidang pendidikan yang dihasilkan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penyusunan naskah kebijakan oleh unit kerja terkait (misalnya policy brief, kertas kerja, atau kajian strategis)<br>2. Monitoring pemanfaatan naskah kebijakan oleh pengambil keputusan melalui laporan tindak lanjut atau bukti penggunaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis kebijakan: kebijakan pendidikan umum, kebijakan pendidikan keagamaan, kebijakan pendidikan inklusif, atau kebijakan bidang pendidikan lainnya sesuai fokus kajian |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Moderasi Beragama pada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai rata-rata tingkat moderasi beragama yang dimiliki oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen atau survei yang mengukur dimensi sikap keberagamaan yang moderat, seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Nilai yang tinggi menunjukkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memiliki sikap keagamaan yang moderat, toleran, serta mendukung kerukunan dan persatuan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Moderasi Beragama = Total skor asesmen moderasi beragama / Jumlah responden<br><br>Keterangan:<br>Skor diperoleh dari hasil pengisian instrumen survei moderasi beragama dengan skala tertentu (misalnya skala 1–5) yang kemudian dirata-ratakan. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Total skor hasil asesmen moderasi beragama pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan<br>2. Jumlah responden (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan) yang mengikuti asesmen |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelaksanaan asesmen atau survei moderasi beragama oleh kementerian/lembaga terkait di satuan pendidikan<br>2. Pengolahan hasil survei untuk menghasilkan skor rata-rata moderasi beragama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan kelompok responden: peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi, baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sertifikasi, atau bentuk pengembangan profesional lainnya dalam periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen satuan pendidikan dan pemerintah dalam mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan guna mendukung mutu pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi<br>b = Total jumlah pendidik dan tenaga kependidikan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi<br>2. Total jumlah pendidik dan tenaga kependidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelaksanaan program pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau mitra terkait<br>2. Pendataan hasil kegiatan pengembangan kompetensi dari laporan satuan pendidikan atau sistem pendataan pendidik dan tenaga kependidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan tempat pendidik dan tenaga kependidikan bertugas: MI/ sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru agama dengan kategori baik |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase provinsi yang indeks pemerataan distribusi guru agamanya berada pada kategori baik. Indeks ini mengukur sejauh mana distribusi guru antar sekolah keagamaan di dalam satu provinsi sudah merata, sehingga setiap sekolah keagamaan memperoleh alokasi guru sesuai kebutuhan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat keadilan dan keseimbangan distribusi guru agama pada tingkat provinsi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak provinsi yang telah mencapai pemerataan distribusi guru agama yang optimal, sehingga mendukung kualitas layanan pendidikan yang setara. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah provinsi dengan indeks pemerataan guru agama kategori baik<br>b = Total jumlah provinsi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah provinsi dengan indeks pemerataan guru agama kategori baik<br>2. Total jumlah provinsi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penghitungan indeks pemerataan guru agama melalui data kebutuhan dan ketersediaan guru di setiap sekolah keagamaan<br>2. Pendataan dan analisis distribusi guru agama yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan wilayah administratif: provinsi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase guru mata pelajaran agama pada satuan pendidikan umum, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti profesionalitas guru. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas guru agama melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah memenuhi standar kualifikasi profesional dan berhak memperoleh tunjangan profesi guru. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik<br>b = Total jumlah guru agama |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik<br>2. Total jumlah guru agama |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Proses sertifikasi pendidik bagi guru agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Pendataan guru agama yang telah tersertifikasi dalam sistem informasi guru dan tenaga kependidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang tempat guru mengajar: SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase guru mata pelajaran agama pada satuan pendidikan umum, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti profesionalitas guru. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas guru agama melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah memenuhi standar kualifikasi profesional dan berhak memperoleh tunjangan profesi guru. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik<br>b = Total jumlah guru agama |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik<br>2. Total jumlah guru agama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Proses sertifikasi pendidik bagi guru agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Pendataan guru agama yang telah tersertifikasi dalam sistem informasi guru dan tenaga kependidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang tempat guru mengajar: SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase pemenuhan jumlah guru pendidikan agama pada satuan pendidikan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ideal berdasarkan rasio guru terhadap peserta didik atau beban mengajar yang ditetapkan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan telah terpenuhi. Persentase yang tinggi menunjukkan distribusi dan ketersediaan guru pendidikan agama semakin memadai untuk memberikan layanan pembelajaran agama yang optimal kepada peserta didik. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah guru pendidikan agama yang tersedia pada satuan pendidikan<br>b = Jumlah kebutuhan guru pendidikan agama berdasarkan standar rasio atau analisis kebutuhan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah guru pendidikan agama yang tersedia pada satuan pendidikan<br>2. Jumlah kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pendataan jumlah guru pendidikan agama yang bertugas di satuan pendidikan oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah<br>2. Analisis kebutuhan guru pendidikan agama berdasarkan jumlah peserta didik dan beban mengajar |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang tempat guru mengajar: SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase satuan pendidikan keagamaan (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sarana dan Prasarana (Sarpras), yang juga mencakup kriteria minimal penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana minimal sesuai standar nasional, termasuk fasilitas yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus (pendidikan inklusif). |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang Memenuhi SNP Sarpras dan Fasilitas Inklusif<br>b = Total jumlah satuan pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang Memenuhi SNP Sarpras dan Fasilitas Inklusif<br>b. Jumlah Seluruh Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan/Verifikasi dan Validasi Pemenuhan SNP Sarpras Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan (misalnya: Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Pasraman, Sekolah Minggu Buddha, dll.) dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>- Provinsi<br>- Kabupaten/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase siswa madrasah dan pesantren dalam satu kohort yang lulus tepat waktu |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase siswa (peserta didik) pada madrasah (MI/MTs/MA) dan pesantren (pada jenjang pendidikan formal yang dikelola/dibina) dalam satu kohort (kelompok angkatan masuk pada tahun ajaran yang sama) yang berhasil menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan lulus tepat waktu sesuai dengan masa studi normatif. |
| 4 | Interpretasi | Indikator efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin baik manajemen pendidikan madrasah/pesantren dalam memastikan peserta didik menyelesaikan studinya sesuai target waktu. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a/b) x 100<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Siswa Madrasah/Pesantren (Kohort) yang Lulus Tepat Waktu<br>b = Jumlah Siswa Madrasah/Pesantren pada Kohort Awal (Angkatan Masuk) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Siswa Madrasah/Pesantren (Kohort) yang Lulus Tepat Waktu<br>b. Jumlah Siswa Madrasah/Pesantren pada Kohort Awal (Angkatan Masuk) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pengolahan Data Kelulusan Berbasis Kohort/EMIS pada Madrasah dan Pesantren |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenjang Pendidikan (MI, MTs, MA, Satuan Pendidikan Formal di Pesantren), Jenis Kelamin, dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha dalam satu kohort yang lulus tepat waktu |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase siswa (peserta didik) pada satuan pendidikan keagamaan (misalnya SMTK, SMAK, Pasraman, Sekolah Minggu Buddha) dalam satu kohort (kelompok angkatan masuk pada tahun ajaran yang sama) yang berhasil menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan lulus tepat waktu sesuai dengan masa studi normatif. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator yang mencerminkan efisiensi internal sistem pendidikan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan satuan pendidikan dalam memastikan peserta didiknya menyelesaikan program studi sesuai durasi yang ditetapkan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a/b) x 100<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) Kohort yang Lulus Tepat Waktu<br>b = Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada Kohort Awal (Angkatan Masuk) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) Kohort yang Lulus Tepat Waktu<br>b. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada Kohort Awal (Angkatan Masuk) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pengolahan Data Kelulusan Berbasis Kohort/EMIS pada Satuan Pendidikan Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Agama (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha), Jenis Satuan Pendidikan (misalnya SMTK, SMAK, Pasraman), dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase siswa satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama dan pendidikan keagamaan penerima PIP dalam satu kohort yang lulus tepat waktu |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase siswa (peserta didik) penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama (misalnya Madrasah) dan Pendidikan Keagamaan (misalnya SMTK, Pasraman) dalam satu kohort (angkatan masuk yang sama) yang berhasil menyelesaikan program studi dan lulus tepat waktu sesuai masa studi normatif. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator keberhasilan intervensi program afirmasi (PIP) dalam mendukung efisiensi internal pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa bantuan PIP efektif mencegah drop-out dan memastikan siswa dari keluarga kurang mampu dapat lulus tepat waktu. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a/b) x 100<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan Penerima PIP (Kohort) yang Lulus Tepat Waktu<br>b = Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan Penerima PIP pada Kohort Awal (Angkatan Masuk) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan Penerima PIP (Kohort) yang Lulus Tepat Waktu<br>b. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan Penerima PIP pada Kohort Awal (Angkatan Masuk) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Analisis dan Evaluasi Kinerja Program Indonesia Pintar (PIP) pada Satuan Pendidikan Kemenag Berbasis Kohort/EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan (Madrasah/Pendidikan Keagamaan), Jenjang (MI/MTs/MA/ sejenis), dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Jenis Satuan Pendidikan (Agama/Jenjang) |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarana prasarana |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Pemenuhan ini menunjukkan kesiapan infrastruktur dan fasilitas dasar untuk mendukung proses belajar mengajar sesuai standar yang ditetapkan secara nasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan lainnya. Persentase yang tinggi mencerminkan kualitas layanan pendidikan yang lebih baik dan terpenuhinya kebutuhan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras<br>b = Total jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras<br>2. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penilaian standar sarpras melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar Menengah<br>2. Verifikasi data lapangan atau laporan pemenuhan standar sarpras pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/sederajat, MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan proporsi pesantren yang aktif melaksanakan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal atau kewirausahaan guna menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak pesantren yang terlibat dalam penguatan ekonomi berbasis pesantren, mendukung ketahanan ekonomi dan kesejahteraan komunitas pesantren. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren Berdaya<br>b = Jumlah total pesantren pada tahun berjalan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah pesantren dengan program Pesantren Berdaya<br>2. Jumlah total pesantren |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Program Pesantren Berdaya Berbasis Ekonomi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis usaha ekonomi pesantren: Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Industri Kreatif, Lainnya |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan dengan peserta didik lainnya. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan telah menyediakan akses dan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif<br>b = Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif<br>2. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pendataan atau survei penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Laporan satuan pendidikan tentang penyelenggaraan layanan inklusif |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/sederajat, MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah, santri pada satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase kenaikan jumlah peserta didik (siswa) yang terdaftar pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada periode sebelumnya. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan partisipasi siswa pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang positif menunjukkan adanya peningkatan minat, akses, atau keberlanjutan layanan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tersebut. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan<br>b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan<br>2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pendataan siswa melalui EMIS, SIMPATIKA, atau sistem data pendidikan lainnya yang dikelola kementerian/lembaga terkait<br>2. Rekap laporan jumlah siswa dari satuan pendidikan keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/sederajat, MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah, santri pada satuan pendidikan daerah 3 T |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase kenaikan jumlah peserta didik (siswa atau santri) yang terdaftar pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang berlokasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada periode sebelumnya. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan partisipasi siswa pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan khususnya di daerah 3T. Persentase yang positif menunjukkan adanya peningkatan akses dan keberlanjutan layanan pendidikan keagamaan di daerah dengan tantangan geografis, sosial, atau ekonomi yang lebih tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T pada tahun berjalan<br>b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T pada tahun berjalan<br>2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T pada tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pendataan siswa melalui EMIS, SIMPATIKA, atau sistem data pendidikan lainnya yang memuat klasifikasi wilayah 3T<br>2. Rekap laporan jumlah siswa dari satuan pendidikan keagamaan yang terletak di wilayah 3T |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/sederajat, MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Anak Kelas 1 ula/MI/SDTK/Adhi Widyalaya/ Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD/TK/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha (TK/RA/BA) |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peserta didik kelas 1 pada MI, SDTK, Adhi Widyalaya, atau Mula Dhammasekha yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD), baik formal maupun nonformal. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian layanan PAUD sebagai fondasi kesiapan belajar anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak anak yang memperoleh stimulasi dan pembelajaran awal melalui PAUD. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD<br>b = Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalaya, atau Mula Dhammasekha |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD<br>2. Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalaya, atau Mula Dhammasekha |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pendataan riwayat pendidikan anak melalui sistem EMIS, PPDB, atau instrumen pendataan siswa baru<br>2. Laporan satuan pendidikan mengenai latar belakang pendidikan anak sebelum masuk kelas 1 |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan satuan pendidikan: MI, SDTK, Adhi Widyalaya, Mula Dhammasekha |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada Madrasah/Satuan Keagamaan lainnya |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase satuan pendidikan yang menyediakan layanan kesehatan sekolah, meliputi kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), pelayanan gizi, kesehatan reproduksi, dan layanan promotif atau preventif lainnya yang terintegrasi dalam program sekolah. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah mengimplementasikan layanan kesehatan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Persentase yang tinggi menunjukkan perhatian sekolah terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan peserta didik. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah<br>b = Total jumlah satuan pendidikan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah<br>2. Total jumlah satuan pendidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pendataan melalui sistem EMIS, Dapodik, atau survei layanan kesehatan sekolah oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Laporan satuan pendidikan tentang kegiatan UKS dan layanan kesehatan lainnya |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: RA/sederajat, MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat dan lainnya |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada Madrasah/Satuan Keagamaan lainnya |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase satuan pendidikan yang menyediakan layanan kesehatan sekolah, meliputi kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), pelayanan gizi, kesehatan reproduksi, dan layanan promotif atau preventif lainnya yang terintegrasi dalam program sekolah. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah mengimplementasikan layanan kesehatan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Persentase yang tinggi menunjukkan perhatian sekolah terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan peserta didik. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah<br>b = Total jumlah satuan pendidikan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah<br>2. Total jumlah satuan pendidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pendataan melalui sistem EMIS, Dapodik, atau survei layanan kesehatan sekolah oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Laporan satuan pendidikan tentang kegiatan UKS dan layanan kesehatan lainnya |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: RA/sederajat, MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat dan lainnya |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan nonformal keagamaan Islam/Hindu/Buddha yang direvitalisasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase satuan pendidikan nonformal yang telah direvitalisasi melalui program pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sarana prasarana, tata kelola, atau kapasitas pendidik. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya peningkatan mutu dilakukan pada satuan pendidikan nonformal. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak lembaga nonformal yang mendapat intervensi perbaikan sehingga diharapkan layanan pendidikannya lebih berkualitas. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi<br>b = Total jumlah satuan pendidikan nonformal |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi<br>2. Total jumlah satuan pendidikan nonformal |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Program revitalisasi satuan pendidikan nonformal oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Pendataan hasil program revitalisasi dari laporan daerah atau satuan pendidikan nonformal |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikannya : ... |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dari total santri/siswa pesantren (pada jenjang pendidikan formal yang dinilai) dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus pada periode tertentu yang memperoleh predikat kelulusan "Jayyid Jiddan" (Sangat Baik/Bagus Sekali). Predikat ini mengacu pada sistem penilaian berbasis Islam/Arab yang biasanya setara dengan nilai B atau nilai di atas rata-rata yang sangat baik. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator kualitas hasil lulusan dari lembaga pendidikan keagamaan. Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin besar proporsi santri/siswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau kompetensi keagamaan yang Sangat Baik saat kelulusan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a/b) x 100<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Santri/Siswa Lulus dengan Predikat Jayyid Jiddan<br>b = Jumlah Total Santri/Siswa yang Lulus pada Periode yang Sama |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Santri/Siswa Lulus dengan Predikat Jayyid Jiddan<br>b. Jumlah Total Santri/Siswa yang Lulus pada Periode yang Sama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pengolahan Data Kelulusan dan Predikat Hasil Belajar Santri/Siswa Berbasis Data Rapor / Laporan Kelulusan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Lembaga (Pesantren, Pendidikan Keagamaan Non-Islam), Jenjang Pendidikan, dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga/Jenjang. |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah anak usia sekolah yang sebelumnya tidak bersekolah (drop out atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal) yang kemudian mengikuti program Pendidikan Kesetaraan (setara Paket A, B, atau C) yang diselenggarakan oleh pesantren. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pesantren dalam memperluas akses pendidikan bagi anak yang tidak sekolah melalui jalur Pendidikan Kesetaraan. Angka yang tinggi menunjukkan kontribusi pesantren dalam menekan angka anak tidak sekolah. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pendataan peserta Pendidikan Kesetaraan di pesantren melalui EMIS atau sistem pendataan lembaga nonformal lainnya<br>2. Laporan program Pendidikan Kesetaraan dari pesantren penyelenggara |
| 8 | Ukuran/Satuan | Orang |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang kesetaraan yang diikuti: setara Paket A/sederajat, Paket B/sederajat, Paket C/sederajat |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Nilai keberagamaan siswa keagamaan pada satuan pendidikan umum |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai rata-rata hasil pengukuran tingkat keberagamaan siswa pada satuan pendidikan umum yang mencakup dimensi pemahaman, sikap, dan praktik keberagamaan sesuai dengan agama yang dianut masing-masing peserta didik. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana peserta didik pada satuan pendidikan umum memiliki pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang tinggi menunjukkan internalisasi nilai-nilai keagamaan yang baik dan praktik keberagamaan yang sesuai dengan norma agama serta kehidupan bermasyarakat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai keberagamaan = Total skor hasil asesmen keberagamaan siswa / Jumlah siswa yang diukur<br><br>Keterangan:<br>Skor diperoleh dari instrumen penilaian keberagamaan yang dikembangkan kementerian/ lembaga terkait, menggunakan skala tertentu (misalnya skala 1–5) yang kemudian dirata-ratakan. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Total skor hasil asesmen keberagamaan siswa pada satuan pendidikan umum<br>2. Jumlah siswa yang mengikuti asesmen keberagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelaksanaan asesmen keberagamaan siswa pada satuan pendidikan umum oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah<br>2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil asesmen untuk menghasilkan nilai rata-rata tingkat keberagamaan siswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang satuan pendidikan umum: SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Nilai keberagamaan mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi umum |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai rata-rata hasil pengukuran tingkat keberagamaan mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi umum yang mencakup dimensi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan praktik keberagamaan sesuai agama yang dianut masing-masing mahasiswa. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana mahasiswa pada perguruan tinggi umum memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan akademik maupun sosial kemasyarakatan. Nilai yang tinggi menunjukkan internalisasi nilai-nilai keberagamaan yang baik, toleran, dan sesuai norma kehidupan beragama dalam masyarakat majemuk. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai keberagamaan = Total skor hasil asesmen keberagamaan mahasiswa / Jumlah mahasiswa yang diukur<br><br>Keterangan:<br>Skor diperoleh dari instrumen penilaian keberagamaan yang dikembangkan kementerian/ lembaga terkait, menggunakan skala tertentu (misalnya skala 1–5) yang kemudian dirata-ratakan. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Total skor hasil asesmen keberagamaan mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi umum<br>2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti asesmen keberagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelaksanaan asesmen keberagamaan mahasiswa oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, atau unit kegiatan di perguruan tinggi<br>2. Rekapitulasi hasil asesmen untuk menghasilkan nilai rata-rata tingkat keberagamaan mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor rata-rata (misalnya skala 1–5 atau sesuai instrumen yang digunakan) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang perguruan tinggi umum: diploma, sarjana, magister, doktoral |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai rata-rata hasil pengukuran tingkat moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan yang mencakup dimensi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Nilai ini diperoleh dari instrumen asesmen khusus yang dirancang untuk menilai sejauh mana siswa memiliki sikap keberagamaan yang moderat. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada siswa. Nilai yang tinggi menunjukkan siswa memiliki sikap keberagamaan yang toleran, menghindari kekerasan, menghargai keragaman, serta memiliki komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rata-rata nilai = Total skor hasil asesmen penguatan moderasi beragama siswa / Jumlah siswa yang mengikuti asesmen<br><br>Keterangan:<br>Skor diperoleh dari instrumen survei atau asesmen moderasi beragama yang menggunakan skala tertentu (misalnya skala 1–5), kemudian dihitung rata-rata. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Total skor hasil asesmen penguatan moderasi beragama siswa<br>2. Jumlah siswa yang mengikuti asesmen moderasi beragama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelaksanaan asesmen atau survei penguatan moderasi beragama oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan<br>2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil asesmen untuk menghasilkan rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor Rata-rata |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase satuan pendidikan umum yang telah mengimplementasikan kurikulum pendidikan agama yang memuat penguatan nilai-nilai moderasi beragama (seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, penerimaan terhadap tradisi) sekaligus memuat muatan pelestarian lingkungan hidup dalam proses pembelajaran. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan umum telah menerapkan kurikulum agama yang tidak hanya mengajarkan ajaran pokok agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai moderasi beragama dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak sekolah umum yang menanamkan sikap keberagamaan yang moderat sekaligus mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan<br>b = Total jumlah satuan pendidikan umum yang menjadi objek penilaian |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan<br>2. Total jumlah satuan pendidikan umum yang dinilai penerapan kurikulumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum agama pada satuan pendidikan umum oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah<br>2. Pendataan hasil pengembangan kurikulum pada laporan akademik satuan pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang satuan pendidikan umum: SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan umum yang mengalami peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan karena adanya penguatan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan umum yang difasilitasi dan didukung dalam penguatan infrastruktur keagamaan guna meningkatkan mutu pembelajaran agama. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana<br>b = Jumlah total satuan pendidikan umum |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh dukungan sarana<br>2. Jumlah total satuan pendidikan umum |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Dukungan Sarana Ibadah dan Fasilitas Pendidikan Keagamaan pada Satuan Pendidikan Umum |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahun |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat, SMK/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase peningkatan = [(a - b) / b] × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan<br>b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun berjalan<br>2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru agama oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG<br>2. Pendataan kelulusan PPG agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase jumlah rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/ lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama. Persentase yang tinggi menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan<br>b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan<br>2. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru<br>2. Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/ lembaga terkait atau pemerintah daerah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan dosen agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan proporsi rekomendasi pengadaan dan pemerataan tenaga kependidikan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang disusun dan diterbitkan berdasarkan analisis kebutuhan riil satuan pendidikan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini mencerminkan semakin baik perencanaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan PAI secara tepat sasaran dan merata sesuai dengan kondisi lapangan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan<br>b = Jumlah total rekomendasi pengadaan dan pemerataan tenaga kependidikan PAI |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah rekomendasi berbasis rencana kebutuhan<br>2. Jumlah total rekomendasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Rekomendasi Pengadaan serta Pemerataan Tenaga Kependidikan PAI berbasis Rencana Kebutuhan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan wilayah administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase guru agama, dosen agama, dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase guru mata pelajaran agama dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan sejauh mana guru agama dan tenaga kependidikan memiliki sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada guru agama dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen kompetensi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi<br>b = Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik<br>2. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama<br>2. Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP |
| 3 | Konsep/Definisi | Perbandingan jumlah guru pada madrasah dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di madrasah dalam melayani siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru)<br>(Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah guru madrasah<br>2. Jumlah siswa madrasah |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah<br>2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi<br>b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi<br>2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan<br>2. Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait<br>3. Pemberian bantuan pendidikan<br>4. Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil pada pendidikan keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG). AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br><br>a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil<br><br>b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil<br>2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederaja |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br><br>a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil<br>b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil<br>2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) oleh kementerian/ lembaga terkait<br>2. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang madrasah: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase guru dan tenaga kependidikan Madrasah yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan tingkat penguasaan sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana guru dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman dan sikap keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru dan tenaga kependidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai keberagamaan yang moderat, serta dapat menjadi teladan dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br><br>a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi<br>b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik<br>2. Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat dimensi penilaian moderasi beragama<br>2. Pengolahan dan publikasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru dan tenaga kependidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pengawas agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil pada pendidikan keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br><br>a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil<br><br>b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil<br>2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait<br>2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terdorong untuk terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br><br>a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu<br><br>b = Total guru pada periode yang sama |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir<br>2. Total jumlah guru |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru<br>2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pengawas agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br><br>a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu<br><br>b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir<br>2. Total pengawas satuan pendidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan<br>2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/lembaga terkait |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan<br>2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:<br>a literasi membaca<br>b numerasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. |
| 4 | Interpretasi | Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa. Indikator ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai rata-rata = (Σ skor peserta didik) / (jumlah peserta didik) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor literasi membaca peserta didik<br>2. Skor numerasi peserta didik<br>3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Asesmen Nasional (AN) – Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Rapor Pendidikan Kemendikdasmen |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan agama |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai keberagamaan siswa mencerminkan tingkat internalisasi nilai-nilai ajaran agama dalam sikap dan perilaku siswa madrasah. Ini meliputi dimensi keimanan, ketaatan beribadah, akhlak, toleransi, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai keberagamaan menunjukkan semakin baik pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan siswa sehari-hari, baik di lingkungan madrasah, rumah, maupun masyarakat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rata-rata nilai hasil asesmen keberagamaan siswa:<br>Nilai rata-rata = (Σ nilai keberagamaan siswa) / (jumlah siswa asesmen)<br>Nilai diukur melalui instrumen asesmen psikometrik, observasi, atau penilaian guru. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor individual keberagamaan siswa<br>2. Jumlah siswa responden |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi dan Asesmen Keberagamaan Siswa Madrasah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor (skala 0–100 atau kategori: rendah, sedang, tinggi) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan agama |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada siswa yang mencakup sikap toleran, anti-kekerasan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai penguatan moderasi beragama, maka semakin baik pemahaman dan pengamalan siswa terhadap prinsip-prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rata-rata skor hasil asesmen moderasi beragama:<br>Nilai rata-rata = (Σ skor penguatan moderasi beragama siswa) / (jumlah siswa yang diukur) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Nilai/skor penguatan moderasi beragama individu siswa<br>2. Jumlah siswa responden |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Asesmen dan Evaluasi Penguatan Moderasi Beragama Siswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor (rentang 0–100) atau skala kategori (rendah, sedang, tinggi) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll). |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas<br>b = Total jumlah satuan pendidikan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas<br>2. Jumlah total satuan pendidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Satuan Pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran<br>b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter<br>2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Implementasi Kurikulum pada Satuan Pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, dan MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan<br>b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan<br>2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pendidikan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila<br>2. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan<br>3. Fasilitasi peningkatan dan pendampingan kegiatan kepramukaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat. MTs/sederajat, dan MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan<br>b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan<br>2. Jumlah total perangkat kurikulum |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menunjukkan proporsi materi ajar digital yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran<br>b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia<br>2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Inventarisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Materi Ajar Digital pada Satuan Pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha<br>- Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur proporsi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Raudhatul Athfal (RA) yang telah memperoleh status akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi yang berwenang. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya PAUD/RA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan minimal sesuai peringkat akreditasi B. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B<br>b = Total jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha terakreditasi minimal B<br>2. Total jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/RA |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis pendidikan: PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur proporsi satuan pendidikan dasar berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang dasar tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B<br>b = Total jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B<br>2. Total MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis pendidikan: MI/SDTK/Adhi Widyalaya/Muda Dhammasekha |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur proporsi satuan pendidikan menengah pertama berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang menengah pertama tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B<br>b = Total jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B<br>2. Total MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Akreditasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis pendidikan: MTs/SMPTK/Madyama Widyalaya/Muda Dhammasekha |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak MA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai dengan kriteria minimal peringkat akreditasi B. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B<br>b = Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B<br>2. Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Akreditasi Satuan Pendidikan Menengah Atas |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu (akademik, karakter, inovasi, dll). |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul<br>b = Total jumlah satuan pendidikan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan unggul<br>2. Total jumlah satuan pendidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi dan Penetapan Satuan Pendidikan Unggul |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/sederajat, MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur proporsi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing (umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab), dalam proses pembelajarannya. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak madrasah yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual<br>b = Total jumlah madrasah |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah madrasah dengan program pendidikan bilingual<br>2. Total jumlah madrasah |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Bilingual pada Madrasah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur proporsi siswa pada satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kualitas pembinaan dan dukungan sekolah/madrasah. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional<br>b = Total jumlah siswa |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional<br>2. Total jumlah siswa |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Partisipasi Siswa dalam Ajang Kompetisi Nasional dan Internasional |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik<br>b = Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolaannya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Nilai pengelolaan madrasah<br>2. Kategori penilaian pengelolaan<br>3. Jumlah madrasah dinilai |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Pengelolaan Madrasah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/sederajat, MTs/sederajat, MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/ industri |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) yang memiliki program kejuruan atau keterampilan dan menjalin kemitraan aktif dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, magang, praktik kerja lapangan, atau penyaluran lulusan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang memiliki keterhubungan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga meningkatkan relevansi dan daya saing lulusan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang memiliki kerja sama aktif dengan dunia kerja/industri<br>b = Total MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang ada |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah MA Kejuruan/MA Program Keterampilan<br>2. Status kerja sama dengan dunia kerja/industri |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Kerjasama MA Kejuruan/MA Program Keterampilan dengan Dunia Kerja/Industri |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang menyelenggarakan program magang (praktik kerja lapangan) bagi peserta didik sebagai bagian dari pembelajaran untuk peningkatan keterampilan hidup (life skill), baik hard skill maupun soft skill. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini mencerminkan semakin banyak satuan pendidikan yang memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi praktis dan kesiapan kerja melalui pengalaman langsung di dunia kerja. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang menyelenggarakan program magang untuk peningkatan life skill<br>b = Total jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan<br>2. Status pelaksanaan program magang yang bertujuan meningkatkan life skill |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Program Magang dan Pengembangan Life Skill pada MA Kejuruan/MA Program Keterampilan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mendapatkan pekerjaan / bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur proporsi lulusan dari MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang berhasil memperoleh pekerjaan atau bekerja (baik formal maupun informal) dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setelah lulus. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin efektifnya pendidikan kejuruan/ keterampilan dalam menyiapkan peserta didik untuk masuk ke dunia kerja secara cepat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerja dalam waktu < 1 tahun setelah lulus<br>b = Total jumlah lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Status pekerjaan lulusan (< 1 tahun setelah lulus)<br>2. Total lulusan pada tahun berjalan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Tracer Study Lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/sederajat |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Publikasi dakwah merujuk pada berbagai bentuk media (cetak, digital, audiovisual) yang berisi pesan-pesan keagamaan Islam untuk tujuan pendidikan, pencerahan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini menunjukkan tren peningkatan jumlah karya dakwah yang diterbitkan dari tahun ke tahun. Kenaikan persentase mencerminkan aktivitas dakwah yang semakin aktif, produktif, dan luas jangkauannya. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan pada tahun berjalan<br>b = Jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah publikasi dakwah tahun berjalan<br>2. Jumlah publikasi dakwah tahun sebelumnya |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Evaluasi Publikasi Dakwah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Tidak diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan, tetapi bisa dikategorikan berdasarkan jenis media (misalnya: buku, jurnal, video, media sosial, dll) jika diperlukan. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menunjukkan proporsi satuan pendidikan formal di pesantren (seperti Mu'adalah, Ma'had Aly, dan pendidikan diniyah formal) yang telah menjalani asesmen mutu dan mendapat hasil minimal kategori jayyid (baik). |
| 4 | Interpretasi | Angka ini mencerminkan kualitas pendidikan formal di pesantren, menunjukkan efektivitas manajemen, kurikulum, dan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar mutu pendidikan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid<br>b = Jumlah total satuan pendidikan formal pesantren yang diasesmen |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang diasesmen<br>2. Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil minimal jayyid |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Asesmen Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Pesantren oleh Majelis Masyayikh |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan tingkat pendidikan: Ula, Wustha, Ulya |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - DIrektorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan proporsi peserta didik yang terdaftar dalam program pendidikan kesetaraan (setara SD, SMP, SMA) di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program kesetaraan dalam mendukung hak pendidikan formal bagi santri atau peserta didik di lembaga keagamaan nonformal. Semakin tinggi angkanya, semakin efektif sistem pendidikan kesetaraan tersebut. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menyelesaikan pendidikan setara formal<br>b = Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada tahun berjalan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah peserta didik kesetaraan yang lulus<br>2. Jumlah peserta didik kesetaraan yang terdaftar |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Revitalisasi pendidikan formal dan non formal<br>2. Penjaringan peserta didik pada jalur pendidikan non formal<br>3. Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenjang kesetaraan: SD, SMP, dan SMA |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menunjukkan proporsi satuan pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang telah menjalani proses penilaian dan evaluasi mutu pendidikan dalam periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini mencerminkan tingkat pelaksanaan penjaminan mutu terhadap pendidikan keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak lembaga yang dipantau kualitasnya untuk peningkatan mutu pendidikan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang telah dinilai dan dievaluasi mutunya<br>b = Jumlah total satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang menjadi target evaluasi pada tahun berjalan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lembaga dinilai mutunya<br>2. Jumlah total lembaga sasaran evaluasi mutu |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Mutu Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan tingkat pendidikan: Ula, Wustha, Ulya |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan proporsi lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menerima program pendampingan dalam aspek kelembagaan, kurikulum, manajemen, atau mutu pendidikan selama periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin luas jangkauan intervensi pemerintah atau lembaga terkait dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas satuan pendidikan keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang mendapat pendampingan<br>b = Jumlah total satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang menjadi target pendampingan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lembaga yang mendapat pendampingan<br>2. Jumlah total lembaga sasaran pendampingan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Program Pendampingan Satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan tingkat pendidikan: Ula, Wustha, Ulya |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan jumlah lulusan pesantren Internasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan tingkat pertumbuhan jumlah lulusan dari pesantren yang berstandar atau berorientasi internasional dalam periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Kenaikan persentase menunjukkan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan di pesantren internasional, sekaligus mencerminkan keberhasilan dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat global. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan pesantren internasional pada tahun berjalan<br>b = Jumlah lulusan pesantren internasional pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan pesantren internasional tahun berjalan<br>2. Jumlah lulusan tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Tracer Study Lulusan Pendidikan Pesantren Internasional<br>2. Pemberian Bantuan Pendidikan pada Siswa Pesantren Internasional<br>3. Penguatan Kualitas Pembelajaran<br>4. Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional<br>5. Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum/Bahan Ajar sesuai standar, esensial, relevan, dan selaras dengan kebijakan Nasional |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. Jenjang Ula<br>2. Jenjang Wustho<br>3. Jenjang Ulya |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase ini menggambarkan proporsi lulusan lembaga pendidikan keagamaan (termasuk pesantren) yang memperoleh pengakuan formal terhadap kompetensi atau kualifikasi mereka dari lembaga otoritatif seperti instansi pemerintah, lembaga pendidikan umum, atau organisasi profesi. |
| 4 | Interpretasi | Angka ini mencerminkan sejauh mana kualitas lulusan diakui dan dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan atau dunia kerja yang lebih luas. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar penerimaan dan kesetaraan lulusan di ranah formal. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan yang memperoleh pengakuan formal atas kualifikasinya<br>b = Jumlah total lulusan pada periode yang sama |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan yang diakui secara formal<br>2. Jumlah total lulusan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Sertifikasi<br>2. Uji Kompetensi<br>3. Akreditasi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis lembaganya: lembaga pemerintah, lembaga pendidikan umum, dan lembaga profesi |
| 11 | Level Estimasi | Tahunan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase naskah kebijakan (rekomendasi kebijakan) di bidang pendidikan agama dan keagamaan yang berhasil diselesaikan dan disampaikan oleh BMBPSDM (sebagai think tank Kemenag) dari total target naskah kebijakan yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan. Naskah ini berupa dokumen kajian, pemetaan, atau rekomendasi yang bertujuan mendukung penetapan regulasi atau program strategis di Ditjen terkait. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator yang mengukur efektivitas BMBPSDM dalam menjalankan fungsi perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan berbasis kajian/data, khususnya di sektor pendidikan agama dan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik dalam menyediakan landasan ilmiah/kajian untuk kebijakan Kemenag. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Dihasilkan dan Disampaikan<br>b = Jumlah Target Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Direncanakan (Target Tahunan) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Dihasilkan dan Disampaikan<br>b. Jumlah Target Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Direncanakan (Target Tahunan) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Pendidikan (Pendidikan Islam/Madrasah, Pendidikan Keagamaan Non-Islam, Pendidikan Tinggi Keagamaan), dan/atau Jenis Dokumen Kebijakan (Kajian, Pemetaan, Indeksasi). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama |
| 3 | Konsep/Definisi | Tingkat Moderasi Beragama (MB) adalah hasil pengukuran (biasanya dalam bentuk skor atau indeks) yang mencerminkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang adil, seimbang, dan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan serta komitmen kebangsaan. Pengukuran ini dilakukan terhadap pendidik, tenaga kependidikan (GTK), dan peserta didik yang telah mengikuti program Penguatan Moderasi Beragama (PMB) yang difasilitasi oleh Kemenag/ BMBPSDM. |
| 4 | Interpretasi | Nilai/skor/indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kelompok sasaran yang telah mengikuti program PMB memiliki pemahaman, sikap, dan praktik beragama yang lebih moderat, inklusif, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b)<br><br>Keterangan:<br>a = Total Skor Indeks Moderasi Beragama (IMB) Seluruh Individu Kelompok Sasaran<br>b = Jumlah Individu yang diukur |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Rata-Rata Skor Indeks Moderasi Beragama (IMB) Kelompok Sasaran Pasca-PMB |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pengukuran Indeks Moderasi Beragama (IMB) Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik Pasca-Penguatan Moderasi Beragama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Indeks |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Periodik |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Kelompok Sasaran (Pendidik/Guru, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik), Tingkat Pendidikan (Dasar/Menengah/Tinggi), dan/atau Wilayah (Provinsi/Balai). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai Kepuasan Layanan Pengembangan Kompetensi adalah skor rata-rata yang diperoleh dari hasil survei terhadap peserta (ASN, pendidik, atau pihak terkait lainnya) mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap kualitas layanan dalam kegiatan pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan/diklat) yang diselenggarakan oleh BMBPSDM (melalui Balai Diklat Keagamaan/BDK atau Pusat). Kepuasan diukur dari aspek pelayanan, materi, fasilitas, dan narasumber/pengajar. |
| 4 | Interpretasi | Indikator yang mengukur mutu layanan publik yang diberikan oleh BMBPSDM. Skor yang lebih tinggi (mendekati 4.00 atau 100%) menunjukkan bahwa layanan pengembangan kompetensi yang disediakan memenuhi atau melampaui harapan peserta dan standar kualitas yang ditetapkan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b)<br><br>Keterangan:<br>a = Total Skor Kumulatif Kepuasan dari Seluruh Responden<br>b = Total Jumlah Responden yang Mengisi Survei Kepuasan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Total Skor Kumulatif Kepuasan dari Seluruh Responden<br>b. Total Jumlah Responden yang Mengisi Survei Kepuasan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan/Peserta (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM) Layanan Pengembangan Kompetensi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Indeks |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Periodik |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Pengembangan Kompetensi (Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kepemimpinan), Kelompok Sasaran (Guru, Penyuluh, Staf Teknis), dan/atau UPT Pelaksana (Balai Diklat Keagamaan/BDK). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai Kepuasan Pengguna adalah skor rata-rata hasil survei yang mengukur tingkat kepuasan atasan langsung (sebagai pengguna/penerima manfaat) terhadap kompetensi dan kinerja lulusan (ASN, pendidik, atau pegawai lain) yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan/diklat) yang diselenggarakan oleh BMBPSDM. Kepuasan diukur dari aspek penerapan ilmu, perubahan perilaku, dan peningkatan kompetensi di tempat kerja. |
| 4 | Interpretasi | Indikator yang mengukur dampak dan efektivitas program pengembangan kompetensi BMBPSDM (Level 3 Kirkpatrick). Skor yang tinggi menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan berhasil meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN Kemenag sesuai dengan kebutuhan organisasi/satuan kerja. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b)<br><br>Keterangan:<br>a = Total Skor Kumulatif Kepuasan dari Seluruh Atasan Pengguna (Responden)<br>b = Total Jumlah Atasan Pengguna (Responden) yang Mengisi Survei Kepuasan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Total Skor Kumulatif Kepuasan dari Seluruh Atasan Pengguna (Responden)<br>b. Total Jumlah Atasan Pengguna (Responden) yang Mengisi Survei Kepuasan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pelaksanaan Survei Kepuasan dan Evaluasi Pasca-Pelatihan (Evaluasi Level 3) terhadap Lulusan Pengembangan Kompetensi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Indeks |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Periodik |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Pengembangan Kompetensi (Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kepemimpinan), Kelompok Lulusan (Guru, Penyuluh, Staf Teknis), dan/atau UPT Penyelenggara (BDK). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Peningkatan Kompetensi moderasi beragama pada SDM di lembaga pendidikan. |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan kompetensi Moderasi Beragama (MB) adalah perbandingan antara tingkat pemahaman/sikap Moderasi Beragama yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) setelah mengikuti program penguatan MB yang difasilitasi oleh BMBPSDM, dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum program. Peningkatan diukur melalui perbandingan skor post-test dan pre-test. |
| 4 | Interpretasi | Indikator yang mengukur efektivitas pelatihan/program yang diselenggarakan oleh BMBPSDM dalam mentransformasi pemahaman, sikap, dan praktik Moderasi Beragama di kalangan SDM Kemenag, khususnya yang bertugas di lembaga pendidikan. Persentase peningkatan yang tinggi menunjukkan bahwa program berhasil mencapai tujuan pembinaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100<br><br>Keterangan:<br>a = Skor Rata-Rata Post-test − Skor Rata-Rata Pre-test<br>b = Skor Maksimal Instrumen − Skor Rata-Rata Pre-test |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Rata-Rata Skor Peningkatan (Gain Score) Kompetensi Moderasi Beragama<br>b. Rata-Rata Skor Maksimal yang Mungkin Dicapai |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Efektivitas Pelatihan/Penguatan Moderasi Beragama (Evaluasi Level 2: Pembelajaran) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Periodik |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Program (Pelatihan Teknis, TOT, Workshop), Kelompok Sasaran (Pendidik Madrasah, Tenaga Kependidikan, ASN Pendidikan), dan/atau UPT Pelaksana (BDK). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Peningkatan Kompetensi manajemen dan kepemimpinan pada SDM di lembaga pendidikan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan kompetensi manajemen dan kepemimpinan adalah perbandingan antara tingkat pengetahuan/keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang dimiliki oleh SDM di lembaga pendidikan (seperti Kepala Madrasah, Kepala TU, atau pimpinan unit) setelah mengikuti program pengembangan kompetensi (diklat) yang diselenggarakan oleh BMBPSDM, dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum program. Peningkatan diukur melalui perbandingan skor post-test dan pre-test (konsep normalized gain). |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator yang mengukur efektivitas pelatihan/diklat yang diselenggarakan oleh BMBPSDM dalam mentransformasi kemampuan manajerial dan kepemimpinan SDM Kemenag yang berada di lembaga pendidikan. Persentase peningkatan yang tinggi menunjukkan bahwa program berhasil mencapai tujuan peningkatan kualitas tata kelola lembaga pendidikan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100<br><br>Keterangan:<br>a = Skor Rata-Rata Post-test − Skor Rata-Rata Pre-test<br>b = Skor Maksimal Instrumen − Skor Rata-Rata Pre-test |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Rata-Rata Skor Peningkatan (Gain Score) Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan (Post-test dikurangi Pre-test)<br>b. Rata-Rata Skor Maksimal yang Mungkin Dicapai (Berdasarkan Skala Instrumen) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan (Evaluasi Level 2: Pembelajaran) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Periodik |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Diklat (PIM, Diklat Fungsional, Diklat Teknis), Kelompok Sasaran (Kepala Madrasah, Pengawas, Kepala TU), dan/atau UPT Pelaksana (BDK). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan SPM adalah skor terukur yang mencerminkan tingkat penerapan dan penggunaan kurikulum pelatihan serta Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang telah ditetapkan oleh BMBPSDM dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan (misalnya pendidik, kepala madrasah, pengawas). Nilai ini diukur berdasarkan hasil audit internal, evaluasi implementasi, dan/atau survei tracer study. |
| 4 | Interpretasi | Indikator yang mengukur efisiensi dan kepatuhan BMBPSDM (Pusat dan Balai Diklat Keagamaan/BDK) terhadap standar operasional dan mutu yang telah ditetapkan, khususnya terkait kurikulum yang relevan dan sistem penjaminan mutu yang kredibel. Nilai yang tinggi menunjukkan konsistensi mutu penyelenggaraan diklat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100<br><br>Keterangan:<br>a = Total Skor Kepatuhan/Pemanfaatan Kurikulum dan SPM yang Terverifikasi.<br>b = Total Skor Maksimal yang Mungkin Dicapai (Berdasarkan Kriteria Audit/Evaluasi). |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Total Skor Kepatuhan/Pemanfaatan Kurikulum dan SPM yang Terverifikasi<br>b. Total Skor Maksimal yang Mungkin Dicapai (Berdasarkan Kriteria Audit/Evaluasi) |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit/Evaluasi Mutu Internal dan Eksternal Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi dan Kepatuhan SPM |
| 8 | Ukuran/Satuan | Indeks |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Program Pengembangan Kompetensi (Diklat Fungsional/Teknis Pendidikan), Jenis Komponen yang Dinilai (Kurikulum, Implementasi SPM), dan/atau UPT Pelaksana (Balai Diklat Keagamaan/BDK) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lembaga pengembangan kompetensi SDM pendidikan yang memperoleh akreditasi A |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lembaga pengembangan kompetensi di bawah BMBPSDM (yaitu Pusat Pengembangan Kompetensi dan Balai Diklat Keagamaan/BDK) yang menyelenggarakan pelatihan SDM di bidang pendidikan, yang telah memperoleh Akreditasi A (Sangat Baik) dari lembaga akreditasi resmi yang berwenang (misalnya Lembaga Administrasi Negara/LAN atau lembaga akreditasi Diklat terkait). Akreditasi menilai mutu kelembagaan, kurikulum, SDM, sarana, dan pelaksanaan diklat. |
| 4 | Interpretasi | Indikator yang mencerminkan kualitas kelembagaan dan penjaminan mutu BMBPSDM dan unit pelaksananya. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga diklat telah diakui secara nasional memiliki standar mutu penyelenggaraan pelatihan kategori terbaik |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang Memperoleh Akreditasi A<br>b = Jumlah Total Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang Wajib Akreditasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang Memperoleh Akreditasi A<br>b. Jumlah Total Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang Wajib Akreditasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pelaksanaan dan Pelaporan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Lembaga (Pusat Pengembangan Kompetensi, Balai Diklat Keagamaan), dan/atau Wilayah (Balai Diklat Keagamaan per Provinsi/Wilayah Kerja). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Peningkatan Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan yang mendapat tanda layak terbit |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Peningkatan jumlah buku teks atau non-teks Pendidikan Agama dan Keagamaan (PA & K) yang berhasil memperoleh Tanda Layak Terbit (setelah melalui proses penilaian dan verifikasi) pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah buku yang sama pada tahun sebelumnya. Tanda Layak Terbit menunjukkan buku tersebut memenuhi standar substansi, metodologi, dan nilai moderasi beragama Kemenag. |
| 4 | Interpretasi | Indikator yang mengukur efisiensi dan produktivitas kinerja unit terkait (dahulu Puslitbang/ sekarang di BMBPSDM) dalam melakukan penilaian dan penerbitan rekomendasi buku PA & K, atau mencerminkan peningkatan kualitas naskah buku yang diajukan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan yang memperoleh pengakuan formal atas kualifikasinya<br>b = Jumlah total lulusan pada periode yang sama |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Buku PA & K Layak Terbit pada Tahun T<br>b. Jumlah Buku PA & K Layak Terbit pada Tahun T−1 |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pengolahan Data Penilaian dan Penetapan Kelayakan Terbit Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu), Jenis Buku (Teks, Non-Teks), dan Jenjang Pendidikan (Dasar, Menengah). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang tepat Sasaran |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dari total individu atau lembaga yang menerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kekhasan Agama (misalnya Bantuan KIP/PIP Madrasah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah, atau Bantuan Afirmasi lainnya) yang telah terverifikasi sebagai tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan/ atau regulasi program bantuan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator efektivitas dan akuntabilitas penyaluran bantuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa bantuan alokasi dana pemerintah disalurkan kepada sasaran yang benar-benar berhak dan membutuhkan (misalnya, siswa miskin/rentan atau lembaga yang memenuhi kriteria minimal). |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a/b) x 100<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kekhasan Agama/Keagamaan) yang Dinyatakan Tepat Sasaran<br>b = Jumlah Total Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kekhasan Agama/ Keagamaan) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kekhasan Agama/Keagamaan) yang Dinyatakan Tepat Sasaran<br>b. Jumlah Total Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kekhasan Agama/ Keagamaan) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Data Penyaluran Bantuan Pendidikan Berbasis Sasaran |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Bantuan (misalnya BOS, PIP, Afirmasi Khusus), Jenis Satuan Pendidikan (Madrasah, Pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha), dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Jenis Bantuan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Persentase siswa madrasah, satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang lulus dengan predikat sangat baik |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase siswa/peserta didik pada seluruh satuan pendidikan formal di bawah binaan Kemenag (meliputi madrasah, serta satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/ Buddha) yang lulus pada periode tertentu dengan memperoleh predikat kelulusan "Sangat Baik". Predikat ini dapat mengacu pada istilah lokal (misalnya Mumtaz atau Jayyid Jiddan di madrasah/pesantren) atau kriteria nilai tertinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Ditjen Bimas/satuan pendidikan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator komprehensif yang mengukur kualitas luaran (output) pendidikan Kemenag dari berbagai jalur. Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan dalam menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik dan/atau kompetensi keagamaan yang unggul. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Siswa/Peserta Didik Lulus dengan Predikat "Sangat Baik"<br>b. Jumlah Total Siswa/Peserta Didik yang Lulus pada Tahun Ajaran yang Sama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Konsolidasi dan Analisis Data Kelulusan Siswa/Peserta Didik Seluruh Satuan Pendidikan Kemenag |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Agama/Satuan Pendidikan (Madrasah / Kristen / Katolik / Hindu / Buddha), Jenjang Pendidikan (MI/MTs/MA/sejenis), dan/atau Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Jenjang Madrasah |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama<br>- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu<br>- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuan keagamaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah total penghargaan atau pengakuan (berupa medali, piala, sertifikat, atau sejenisnya) yang diperoleh oleh siswa/peserta didik dari satuan pendidikan keagamaan formal (Madrasah, SMTK/SMAK, Pasraman, Sekolah Minggu Buddha, dll.) dalam kompetisi atau ajang di luar kegiatan intrakurikuler (disebut kegiatan ekstrakurikuler). Prestasi dihitung pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator yang mengukur mutu hasil kegiatan non-akademik/bakat minat dan kontribusi satuan pendidikan keagamaan terhadap pengembangan potensi siswa di bidang non-keagamaan maupun keagamaan (misalnya seni, olahraga, sains, atau lomba pidato keagamaan). Jumlah yang tinggi menunjukkan peran aktif lembaga dalam pembinaan siswa. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah Prestasi = Total Prestasi yang Dicapai |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah Prestasi yang Diraih Satuan Pendidikan Keagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan dan Verifikasi Prestasi Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Ekstrakurikuler) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Jumlah (Satuan: Prestasi/Penghargaan) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Agama/Satuan Pendidikan (Madrasah / Kristen / Katolik / Hindu / Buddha), Tingkat Prestasi (Kab/Kota, Prov, Nas, Int), dan/atau Bidang Prestasi (Sains, Olahraga, Seni, Keagamaan). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Jenis Satuan Pendidikan/Agama, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW) |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase santri yang terdaftar pada program pendidikan kesetaraan (Ula, Wustha, Ulya) di pondok pesantren yang berhak dan telah mengikuti Imtihan Wathani (IW) (Ujian Nasional/ Ujian Akhir Berbasis Standar Nasional untuk pendidikan kesetaraan pesantren) pada periode pelaporan yang ditentukan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator yang mencerminkan tingkat partisipasi santri dalam proses pengakuan negara terhadap pendidikan kesetaraan yang mereka tempuh di pesantren. Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas program dan kesiapan santri untuk mendapatkan ijazah/sertifikat kesetaraan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a - b) × 100<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Santri yang Mengikuti Imtihan Wathani (IW)<br>b = Jumlah Santri yang Terdaftar pada Tingkat Akhir Pendidikan Kesetaraan Pesantren (Kohort Peserta IW) |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Santri yang Mengikuti Imtihan Wathani (IW)<br>b. Jumlah Santri yang Terdaftar pada Tingkat Akhir Pendidikan Kesetaraan Pesantren (Kohort Peserta IW) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pelaksanaan, Monitoring, dan Pengolahan Data Hasil Imtihan Wathani (IW) Pesantren |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kesetaraan (Ula/setara SD, Wustha/setara SMP, Ulya/setara SMA) dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Jenjang Pendidikan, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) terhadap jumlah penduduk usia 19–24 tahun. APK dapat melebihi 100% karena menghitung semua yang sedang bersekolah di jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan apakah usianya sesuai. |
| 4 | Interpretasi | APK Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang daya serap sistem pendidikan tinggi terhadap penduduk, termasuk mereka yang lebih tua atau lebih muda dari usia ideal pendidikan tinggi. Angka ini mencerminkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly<br>b = Jumlah penduduk usia 19–24 tahun |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly<br>b. Jumlah penduduk usia 19–24 tahun |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis perguruan tinggi: PTKN, PTKS |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lulusan satuan pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Ma'had Aly, yang memperoleh pekerjaan (formal/informal) dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah kelulusan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan daya serap lulusan pendidikan tinggi keagamaan terhadap dunia kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterkaitan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada periode sebelumnya<br>b = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly pada periode sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu < 1 tahun setelah lulus<br>b. Jumlah total lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly pada periode yang sama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Tracer Studi oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahun |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan status kerja: Bekerja < 1 tahun, Bekerja ≥ 1 tahun, Belum Bekerja |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam daftar Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada peringkat kurang dari 1000 besar dunia, berdasarkan penilaian kontribusi PT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam mendukung SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola institusi, dan kemitraan. Semakin banyak PT yang masuk <1000 besar, semakin tinggi pengakuan terhadap kinerja keberlanjutan perguruan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah PTK/Ma'had Aly dalam peringkat THE Impact Rankings <1000 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan SDGs Goal |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif pada institusi pendidikan tinggi keagamaan dari periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PTK meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan perguruan tinggi keagamaan swasta yang terakreditasi. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang keagamaan Islam. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan tinggi keagamaan. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin baik kinerja dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan. Indikator ini mencerminkan daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan serta efektivitas kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase peningkatan = ((a - b) / b) × 100 %<br>Keterangan:<br>a = jumlah mahasiswa tahun berjalan;<br>b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan<br>b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan EMIS PTK dan Ma'had Aly<br>- Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa oleh Setjen Kemenag dan Ditjen Pendis<br>- Monitoring dan Evaluasi Data Mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri (UIN, IAIN, STAIN)<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly<br><br>Berdasarkan Jenjang:<br>- S1/Sarjana<br>- S2/Magister<br>- S3/Doktor |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Ma'had Aly yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak PTK di Ma'had Aly yang telah melalui proses penjaminan mutu melalui sistem akreditasi formal, sehingga menjamin kompetensi, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah dipenuhi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase=(a/b)×100%<br>Dengan:<br>a = Jumlah Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly yang telah terakreditasi<br>b = Jumlah total Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang telah terakreditasi<br>b. Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan akreditasi Ma'had Aly oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku)<br>- Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis<br>- Monitoring dan evaluasi mutu Ma'had Aly oleh Ditjen Pendis |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, dan/atau per lembaga Ma'had Aly |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/ internasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi kompetensi<br>b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Dosen PTK Bersertifikasi Kompetensi<br>2. Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Bersertifikasi Kompetensi<br>3. Jumlah Dosen PTK<br>4. Jumlah Tenaga Kependidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait.<br>2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri).<br>3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | - Bidang Keahlian: Sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang<br>- Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi (sarjana/diploma) sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal) |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rata-rata masa tunggu = (∑ waktu tunggu semua lulusan yang bekerja) / jumlah lulusan yang bekerja |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Rata-rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)<br>- Survei Penelusuran Alumni (Tracer Study) oleh perguruan tinggi<br>- Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Waktu (Bulan) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | - Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun).<br>- Periodik (tracer study perguruan tinggi biasanya 1–2 tahun setelah kelulusan) |
| 10 | Klasifikasi | Diploma, Sarjana, Magister, Doktor |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Sakernas |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase=(a/b)×100%<br>Dengan:<br>a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK<br>b = Jumlah total kerja sama aktif |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK<br>b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis<br>- Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu PTK<br>- Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.) |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) |
| 3 | Konsep/Definisi | Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola keberagamaan antaragama, antarwilayah, maupun antarperguruan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Indeks = (∑ skor aspek keagamaan individu / skor maksimum) × 100 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa<br>2. Skor praktik ibadah mahasiswa<br>3. Skor pengetahuan ajaran agama<br>4. Skor perilaku sosial keagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Indeks Keberagamaan Mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE Impact Rankings SDGs |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | THE 17 GOALS |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Times Higher Education |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memenuhi standar sarana prasarana |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi adalah proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki fasilitas akademik dan non-akademik sesuai ketentuan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai standar nasional pendidikan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dalam periode tertentu;<br>b = Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada dalam periode yang sama; |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi;<br>2. Jumlah total PTK/Ma'had Aly. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Verifikasi dan validasi data sarana prasarana melalui EMIS dan monitoring lapangan;<br>- Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarpras PTK;<br>- Evaluasi pemenuhan standar sarpras oleh Tim Penjaminan Mutu PTK. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase PTK yang menyediakan fasilitas pendidikan berbasis gender dan inklusif adalah ukuran proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak PTK yang menyediakan dukungan terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif<br>b = Jumlah PTK |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) penerima beasiswa |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa PTK penerima beasiswa adalah ukuran proporsi mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, lembaga keagamaan, atau sumber lain yang sah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase mahasiswa penerima beasiswa, menunjukkan semakin luasnya akses bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, baik dari pemerintah, institusi, maupun pihak swasta |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa penerima beasiswa<br>b = Jumlah mahasiswa |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa<br>2. Jumlah Mahasiswa |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pencatatan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis Beasiswa: Akademik, Non-Akademik (olahraga/seni), Kebutuhan Ekonomi, Prestasi, dll. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I adalah proporsi mahasiswa baru atau mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang ditetapkan dalam kelompok UKT paling rendah (Kelompok I). Kelompok UKT I ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan dan/atau memiliki keterbatasan finansial, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan pendidikan tinggi di PTK. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang masuk dalam kategori UKT Kelompok I, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dan PTK dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I<br>b = Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I pada PTKN<br>2. Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada PTKN |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penerapan sistem UKT berbasis data ekonomi mahasiswa<br>- Verifikasi dan validasi ekonomi calon mahasiswa baru (UKT online/offline)<br>- Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan afirmatif UKT |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Tahun Masuk:<br>- Angkatan 202X;<br>- Angkatan 202X-1, dst. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan animo mahasiswa baru |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan animo mahasiswa baru adalah perubahan persentase jumlah pendaftar baru pada suatu institusi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya |
| 4 | Interpretasi | Variabel ini menunjukkan seberapa besar minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada institusi tersebut. Peningkatan nilai menunjukkan daya tarik institusi yang meningkat, sedangkan penurunan mengindikasikan menurunnya minat calon mahasiswa |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah pendaftar tahun berjalan<br>b = Jumlah pendaftar tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah pendaftar tahun berjalan<br>2. Jumlah pendaftar tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Rekrutmen Calon Mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/ Katolik/Hindu/Buddha) berkualitas |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas adalah rasio antara jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah terakreditasi Unggul/A atau memiliki peringkat terbaik, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa baru yang diterima di PTK pada periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur ketersediaan akses dan pilihan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa baru. Semakin tinggi proporsi mahasiswa baru yang memilih dan diterima di PTK berkualitas, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penyediaan pilihan institusi yang terpercaya. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik.<br>b = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik.<br>2. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penghitungan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa baru PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa baru PTK yang berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang terdaftar di program studi bidang Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) dengan status akreditasi "Unggul" dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak mahasiswa baru di PTK yang memilih program studi STEM dengan mutu akademik tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan terhadap kebutuhan iptek. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Proporsi = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul<br>b = Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa baru di prodi STEM terakreditasi unggul<br>2. Jumlah total mahasiswa baru di prodi STEM |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh perguruan tinggi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Ditjen Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terpetakan berdasarkan keunggulannya |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya adalah banyaknya PTK (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah diklasifikasikan menurut bidang atau capaian unggulan, seperti riset, inovasi, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan mutu akademik. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi jumlah PTK yang terpetakan menunjukkan semakin baiknya pemetaan mutu dan diferensiasi perguruan tinggi keagamaan berdasarkan keunggulan spesifiknya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pembinaan mutu. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah = Banyaknya PTK yang telah dikategorikan sesuai hasil pemetaan keunggulan berdasarkan kriteria mutu dan capaian unggulan. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Kegiatan pemetaan dan klasifikasi PTK oleh Kementerian Agama<br>- Survei dan asesmen potensi unggulan PTK<br>- Penyusunan profil kelembagaan PTK |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Prodi PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan akreditasi unggul |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Prodi PTK yang mendapatkan akreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi "Unggul" dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi di perguruan tinggi keagamaan yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik di lingkungan PTK. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang berakreditasi unggul<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang berakreditasi unggul<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Di PDDikti |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase LPTK PTK yang terakreditasi adalah ukuran proporsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memperoleh status akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak LPTK di PTK yang memenuhi standar mutu kelembagaan dan tata kelola pendidikan, mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan calon tenaga pendidik keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase=(a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah LPTK yang telah terakreditasi.<br>b = Jumlah LPTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi.<br>2. Jumlah LPTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendampingan dan fasilitasi akreditasi LPTK;<br>- Penguatan sistem penjaminan mutu internal;<br>- Verifikasi data akreditasi melalui EMIS dan BAN-PT/LAM. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Peringkat Akreditasi:<br>- Unggul/A<br>- Baik Sekali/B<br>- Baik/C |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/ Buddha) yang terakreditasi unggul |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase program studi PPG PTK yang terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi Program Profesi Guru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi "Unggul" dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi PPG di PTK yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru keagamaan dan kesiapan lembaga dalam menghasilkan pendidik profesional. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.<br>b = Jumlah PTK |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Peningkatan dan Fasilitasi Akreditasi Unggul Program Studi PPG (melalui pembinaan, pendampingan, workshop, penyusunan dokumen akreditasi, dan evaluasi diri).<br>- Pendataan dan Rekapitulasi Program Studi PPG yang telah terakreditasi (termasuk status akreditasi aktif) di bawah Kementerian Agama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen berkualifikasi akademik S3<br>a. Total<br>b. STEM<br>c. Non STEM |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 adalah rasio jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total dosen aktif di perguruan tinggi, baik secara keseluruhan (total), di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), maupun di bidang non-STEM. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas sumber daya dosen yang berperan dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Total = ((a + b) / c) × 100%<br>STEM = (a / c) × 100%<br>Non-STEM = (b / c) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen S3 STEM<br>b = Jumlah dosen S3 non-STEM<br>c = Jumlah dosen |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen S3 STEM<br>2. Jumlah dosen S3 non-STEM<br>3. Jumlah dosen |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus adalah rasio jumlah dosen tetap yang terlibat dalam aktivitas profesional di luar perguruan tinggi seperti industri, lembaga riset, pemerintahan, organisasi internasional, atau kegiatan pengabdian masyarakat, terhadap jumlah total dosen tetap. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin banyak dosen yang memiliki pengalaman praktis dan relevan di dunia luar kampus, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus<br>b = Jumlah dosen tetap |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus<br>2. Jumlah dosen tetap |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Aktivitas Dosen atau Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar adalah rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik tersebut terhadap jumlah total dosen tetap di perguruan tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik tingkat profesionalisme, kepakaran, dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar<br>b = jumlah total dosen tetap |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar<br>2. Jumlah total dosen tetap |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis Jabatan: Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/ internasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur sejauh mana dosen PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh program peningkatan kompetensi<br>b = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program peningkatan kompetensi<br>2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait.<br>2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri).<br>3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen PTK yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional adalah ukuran proporsi dosen pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang berpartisipasi sebagai pembicara, pemakalah, atau panelis pada forum ilmiah tingkat nasional dan internasional. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin aktif dan diakui dosen PTK dalam jejaring ilmiah nasional dan global, mencerminkan peningkatan kapasitas akademik, reputasi, dan kontribusi ilmiah perguruan tinggi keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional<br>b = Jumlah dosen aktif yang ada di PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional<br>2. Jumlah dosen aktif yang ada di PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah<br>- Fasilitasi dan insentif publikasi ilmiah dan partisipasi konferensi<br>- Evaluasi kegiatan tridarma dosen |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Konferensi:<br>- Nasional<br>- Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Rasio dosen asing PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) dengan dosen dalam negeri |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK adalah perbandingan antara jumlah dosen berkewarganegaraan asing dengan jumlah dosen warga negara Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha). |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar keterlibatan dosen asing dalam kegiatan akademik PTK, yang mencerminkan peningkatan kolaborasi internasional dan pengakuan global terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio = 1 : (b / a)<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen asing aktif di PTK<br>b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a = Jumlah dosen asing aktif di PTK<br>b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Program visiting professor atau exchange lecturer<br>- Skema rekrutmen dosen asing<br>- Kerja sama internasional PTK (MoU/MoA) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada jenjang jabatan fungsional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK pada jenjang jabatan fungsional adalah ukuran tingkat kesesuaian antara jumlah tenaga kependidikan yang telah menduduki jabatan fungsional (misalnya arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium, analis kepegawaian, dan sejenisnya) dengan jumlah formasi atau kebutuhan ideal di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha). |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan sesuai jabatan fungsional yang dibutuhkan, mencerminkan efektivitas manajemen SDM dan profesionalitas tenaga kependidikan di lingkungan PTK. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional<br>b = Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional<br>2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | a. Pendataan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan / Kementerian<br>b. Analisis Kebutuhan Formasi oleh BKN / Kemdikbudristek / Pemerintah Daerah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Data diperbarui secara berkala (tahunan) dengan cut-off per tanggal 30 Juni setiap tahun. |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi lulusan program sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah mengikuti program pembelajaran di luar kampus selama minimal satu semester penuh, relatif terhadap total lulusan program sarjana (S1) pada periode yang sama |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur keberhasilan Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi lulusan S1 untuk memiliki pengalaman praktis dan relevan di luar lingkungan akademik. Semakin tinggi persentase lulusan dengan pengalaman di luar kampus, menunjukkan semakin kuatnya adaptasi kurikulum dan program pendidikan PTK terhadap kebutuhan dunia kerja dan dinamika masyarakat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus.<br>b = Jumlah lulusan PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus.<br>2. Jumlah lulusan PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan dan Fasilitasi Program Pembelajaran di Luar Kampus (Magang, KKN, Pertukaran Mahasiswa, dll.) dan Pendataan Partisipan serta Lulusan dari Program Tersebut.<br>- Proses Yudisium dan Pendataan Seluruh Lulusan Program Sarjana (S1) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki Pusat Pengembangan Karir |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) di bawah Kementerian Agama yang memiliki unit atau fasilitas yang secara khusus memberikan layanan pengembangan karir kepada mahasiswa dan alumni, relatif terhadap total PTK yang ada |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir di PTK. Semakin tinggi persentase PTK yang memiliki pusat pengembangan karir, menunjukkan semakin besar perhatian dan upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan lulusan PTK untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karir<br>b = Jumlah PTK |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Identifikasi dan verifikasi keberadaan pusat pengembangan karir di setiap PTK (melalui survei, pendataan, atau laporan dari PTK).<br>- Pendataan dan rekapitulasi total PTK di bawah Kementerian Agama. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan PTK yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan:<br>a. Total;<br>b. Karyawan atau Wirausaha |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan adalah proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau merintis usaha (wirausaha) dalam periode waktu tertentu setelah kelulusan, dibandingkan dengan total lulusan yang lulus pada periode yang sama. Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja atau siap berwirausaha. Semakin tinggi persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun wirausaha, menunjukkan semakin baik kualitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pembinaan karir yang dilakukan oleh PTK. Ini mengindikasikan bahwa lulusan PTK memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Peningkatan indikator ini berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan angka serapan lulusan, pengurangan pengangguran terdidik, serta peningkatan kontribusi PTK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = { (a + b) / c } × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>b = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>c = Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>2. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>3. Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Tracer Study PTK<br>- Program Career Center dan Alumni<br>- Pelatihan kewirausahaan dan magang<br>- Inkubator bisnis mahasiswa/alumni |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Pekerjaan: Karyawan, Wirausaha |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase tenaga kerja lulusan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) bidang STEM |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi angkatan kerja yang memiliki gelar pendidikan tinggi (D3, D4/Sarjana Terapan, S1, S2, S3) dari program studi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), relatif terhadap total angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur ketersediaan SDM berkualitas di sektor-sektor kritis yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangs |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan tinggi nasional mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor strategis di bidang STEM. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan ketersediaan SDM STEM yang memadai untuk mendukung inovasi, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong minat dan kapasitas generasi muda pada disiplin ilmu yang penting untuk masa depan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK bidang STEM.<br>b = Jumlah lulusan PTK. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK bidang STEM.<br>2. Jumlah lulusan PTK. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau survei ketenagakerjaan lainnya yang spesifik |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Bidang STEM:<br>- Sains (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistika, dll.)<br>- Teknologi (Informatika, Sistem Informasi, dll.)<br>- Teknik/Rekayasa (Sipil, Elektro, Mesin, dll.)<br>- Matematika Murni & Aktuaria |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Sakernas |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik, relatif terhadap total lulusan pada periode yang sama. Indikator ini mencerminkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan pengakuan kompetensi yang diakui secara profesional. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa program pendidikan di PTK semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan lulusannya memiliki daya saing yang kuat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi.<br>b = Jumlah lulusan PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi.<br>2. Jumlah lulusan PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Fasilitasi program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/lulusan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan pendataan lulusan yang bersertifikat kompetensi.<br>- Pendataan dan rekapitulasi total lulusan PTK di bawah Kementerian Agama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Lembaga Sertifikasi:<br>- LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) terlisensi BNSP<br>- Asosiasi Profesi<br>- Lembaga Sertifikasi Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio outbound per inbound mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri (outbound) dengan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke dalam PTK tersebut (inbound) dalam periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat internasionalisasi dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan dengan dinamika global. Semakin seimbang rasio antara mahasiswa outbound dan inbound (mendekati 1:1), menunjukkan semakin kuatnya daya tarik dan kemampuan PTK dalam menciptakan ekosistem akademik yang inklusif secara internasional, serta semakin aktifnya mahasiswa PTK dalam mencari pengalaman global. Peningkatan rasio ini mencerminkan pengakuan PTK di kancah internasional, pengayaan perspektif multikultural di kampus, serta peningkatan kompetensi global mahasiswa. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global, pengembangan jejaring internasional, dan peningkatan reputasi PTK sebagai pusat keunggulan pendidikan keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio Outbound per Inbound = 1 : (b / a)<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa outbound PTK<br>b = Jumlah mahasiswa inbound PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa outbound PTK<br>2. Jumlah mahasiswa inbound PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll)<br>- Student exchange antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri<br>- Program KKN internasional / transfer kredit luar negeri |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi adalah proporsi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti kegiatan atau program di luar kurikulum inti program studi mereka, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa yang aktif di PTK dalam periode tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, soft skills, dan pengalaman di luar bidang keilmuan utama. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat fleksibilitas kurikulum dan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan diri di luar bidang utama, yang krusial untuk meningkatkan relevansi lulusan. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, menunjukkan semakin kuatnya upaya PTK dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan kesempatan untuk mengembangkan soft skills, kemandirian, serta jejaring. Ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kompetensi lintas disiplin. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b ) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu.<br>b = Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a: Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu.<br>b: Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa)<br>- Magang (MBKM, kerja praktik, dll)<br>- KKN, pengabdian masyarakat<br>- Program pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan kompetisi mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Kegiatan:<br>- Program MBKM (spesifik: Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, dll.)<br>- Organisasi Kemahasiswaan (Internal/Eksternal)<br>- Kompetisi/Lomba<br>- Pengabdian Masyarakat<br>- Karya Ilmiah/Kreativitas (di luar tugas akhir prodi) |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, seni, atau olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam periode waktu tertentu. Kompetisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, olimpiade sains, lomba inovasi, debat, kompetisi pemrograman, turnamen olahraga, dan festival seni. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan daya saing mahasiswa PTK di kancah nasional dan internasional. Persentase yang tinggi menunjukkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa di luar kurikulum formal, serta reputasi PTK dalam menghasilkan talenta-talenta berdaya saing global. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase peningkatan = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan<br>b = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan<br>2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan Partisipasi Mahasiswa dalam Kompetisi (PPMK) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi jumlah PTK yang terlibat aktif dalam kolaborasi atau kemitraan dengan entitas eksternal (dunia usaha dan industri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional) dibandingkan dengan total keseluruhan PTK. Kerja sama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti magang industri, proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan, program pengabdian masyarakat, atau pertukaran keahlian. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan tingkat keterbukaan dan relevansi institusi pendidikan dengan kebutuhan eksternal. Semakin tinggi persentase ini, semakin kuat integrasi institusi pendidikan dengan lingkungan kerja, industri, dan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase PTK yang bekerjasama = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional<br>b = Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>Pendataan Potensi dan Kemitraan Institusi Pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang:<br>a. Pendidikan dan pengajaran<br>b. Penelitian dan publikasi<br>c. Pengabdian kepada masyarakat |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja sama dimaksud mencakup perjanjian, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen resmi antara perguruan tinggi/lembaga dengan mitra, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan sesuai bidang. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak kerja sama yang benar-benar ditindaklanjuti dan berdampak, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya banyak kesepakatan yang belum terlaksana secara nyata. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati<br><br>Persentase kerjasama bidang penelitian dan publikasi: (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati<br><br>Persentase kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat: (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti<br>2. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati<br>3. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti<br>4. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati<br>5. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti<br>6. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pencatatan dan Pemantauan Kerjasama (Monitoring and Evaluation of Partnerships)<br>2. Manajemen Kerjasama (Partnership Management)<br>3. Pelaporan Kinerja Kerjasama (Partnership Performance Reporting) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan atau umum yang berpartisipasi dalam program peningkatan literasi Kitab Suci, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan dan instansi keagamaan. |
| 4 | Interpretasi | Peningkatan nilai menunjukkan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan akses dan kesempatan dalam penguatan spiritualitas dan nilai-nilai kebajikan lintas agama. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus: (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu<br>b = Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu<br>2. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pengembangan dan pelaksanaan program literasi Kitab Suci di PTKI/PTU<br>2. Pelatihan dan workshop peningkatan pemahaman kitab suci<br>3. Kegiatan pembinaan keagamaan berbasis kitab suci<br>4. Kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan dalam literasi kitab<br>5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran kitab suci |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan adalah rasio jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi keagamaan yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan dibandingkan dengan total prodi yang diukur pada periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak prodi yang berhasil menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum atau interdisipliner, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan<br>b = Jumlah prodi yang diukur |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan<br>b = Jumlah prodi yang diukur |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Evaluasi kurikulum dan implementasi integrasi keilmuan<br>2. Workshop/pelatihan pengembangan kurikulum integratif<br>3. Pendampingan dan monitoring prodi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase PTK yang membentuk dan mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu-isu lokal seperti moderasi beragama, toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai keagamaan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan PTK dalam merespons dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis riset dan advokasi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus: (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal<br>b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal<br>2. Jumlah PTK yang menjadi sasaran program |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pembentukan pusat studi keagamaan berbasis lokal<br>2. Penelitian berbasis kebutuhan sosial-keagamaan lokal<br>3. Pengabdian masyarakat berbasis hasil kajian keagamaan<br>4. Penerbitan hasil kajian tematik keagamaan<br>5. Kemitraan PTK dengan pemda/lembaga masyarakat dalam bidang keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional di Kementerian Agama adalah perbandingan jumlah karya tulis ilmiah ilmiah yang terakreditasi nasional (minimal SINTA 1 atau SINTA 2) yang dikelola oleh unit kerja atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, terhadap total jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Agama |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan kualitas dan pengakuan nasional atas karya tulis ilmiah-karya tulis ilmiah ilmiah di bawah pengelolaan Kementerian Agama |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah karya tulis ilmiah terakreditasi nasional (SINTA 1 atau 2)<br>b = Total karya tulis ilmiahyang dikelola |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah karya tulis ilmiah yang terakreditasi nasional (SINTA 1 atau SINTA 2)<br>2. Total jumlah karya tulis ilmiah yang dikelola |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pengelolaan dan Akreditasi karya tulis ilmiah Ilmiah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. SINTA 1 (Tertinggi)<br>2. SINTA 2<br>3. SINTA 3<br>4. SINTA 4 ke bawah |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Di Scopus |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi adalah proporsi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen/peneliti PTK pada jurnal bereputasi internasional yang telah mendapat sitasi (citation) dari artikel lain dalam periode tertentu.<br><br>Jurnal bereputasi internasional adalah jurnal yang terindeks dalam database internasional yang diakui seperti Scopus, Web of Science (WoS), atau database internasional lainnya yang memiliki sistem peer-review yang ketat.<br>Sitasi adalah rujukan atau referensi yang dibuat oleh artikel lain terhadap artikel yang dimaksud, yang menunjukkan dampak dan kontribusi artikel tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel yang disitasi menunjukkan kualitas, relevansi, dan pengaruh penelitian terhadap komunitas ilmiah internasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur dampak dan kualitas publikasi ilmiah PTK di tingkat internasional. Semakin tinggi persentase artikel yang disitasi, menunjukkan semakin baik kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan oleh PTK. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 % |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi;<br>b. Jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh PTK. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Insentif Publikasi Ilmiah Internasional;<br>- Bantuan Penulisan Artikel Bereputasi;<br>- Pelatihan Sitasi dan Manajemen Referensi Ilmiah. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Quartile Jurnal (SJR/JCR):<br>- Q1 (Quartile 1);<br>- Q2 (Quartile 2);<br>- Q3 (Quartile 3);<br>- Q4 (Quartile 4). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase jumlah karya tulis ilmiah yang mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan berhasil terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, dibandingkan dengan total karya tulis ilmiah yang dihasilkan dalam periode tertentu. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin kuat kontribusi akademik civitas akademika dalam mendukung target SDGs melalui publikasi yang diakui secara internasional. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus = Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penelitian dosen dan mahasiswa berfokus SDGs<br>2. Workshop penulisan artikel ilmiah bereputasi<br>3. Pendampingan publikasi internasional |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan THE 17 GOALS |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen adalah perbandingan antara jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional dengan jumlah dosen tetap di perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin produktif dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, yang mencerminkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Agama |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio: 1 : (b / a)<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan<br>b = Jumlah dosen tetap |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan<br>2. Jumlah dosen tetap |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen PTKIN/PTKIS<br>2. Program Insentif Publikasi Ilmiah<br>3. Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Quartil Artikel: (Q1, Q2, Q3, dan Q4) |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Di Scopus |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi adalah total hak paten yang telah resmi diberikan (granted) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin banyak jumlah paten yang granted, semakin menunjukkan meningkatnya kapasitas inovasi, riset terapan, dan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemanfaatannya untuk masyarakat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>Jumlah Paten Granted (disetujui DJKI) dalam satu tahun |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah paten granted yang diperoleh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di PTKIN/PTKIS<br>2. Program Pendaftaran dan Fasilitasi Paten Perguruan Tinggi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Unit (paten) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Kategori Jumlah Paten Granted<br>1. Rendah (0 – 2 paten granted)<br>2. Sedang (3 – 5 paten granted)<br>3. Tinggi (> 5 paten granted) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase hasil riset dan inovasi adalah rasio antara jumlah hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masyarakat terhadap total hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi keagamaan dalam periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak hasil riset dan inovasi yang aplikatif, relevan, dan bermanfaat bagi DUDI/masyarakat, menandakan peningkatan kualitas riset terapan di perguruan tinggi |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat<br>b = Jumlah hasil riset |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat<br>2. Jumlah hasil riset |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Kegiatan Penelitian dan Inovasi Terapan<br>2. Program Hilirisasi Hasil Riset<br>3. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan DUDI/Komunitas Masyarakat |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Pihak Pemanfaat:<br>- Dunia Usaha (Perusahaan, Startup)<br>- Dunia Industri<br>- Masyarakat (Komunitas, Kelompok Tani, UMKM)<br>- Pemerintah/Lembaga Publik |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase LPPM yang mendapatkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan makin banyak LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya, sebagai cerminan perbaikan kualitas manajemen riset dan pengabdian di perguruan tinggi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya<br>b = Jumlah LPPM PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya<br>2. Jumlah LPPM PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan/Workshop Manajemen Riset dan Pengabdian Masyarakat<br>2. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM<br>3. Program Penguatan Tata Kelola LPPM<br>4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan LPPM |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis peningkatan kapasitasnya:<br>1. Pelatihan Pengelolaan LPPM<br>2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola LPPM<br>3. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM<br>4. Pendampingan Penyusunan Roadmap Riset & Pengabdian |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi<br>b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia<br>2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi<br>3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia<br>4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur TIK |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra<br>b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data<br>2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai<br>3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data Prioritas Pembangunan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Kepegawaian Negara |
| 2 | Nama Indikator | Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85 |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur kualitas Unit Penilaian Kompetensi (UPK) di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai akreditasi mencerminkan standar mutu dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ASN. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi rerata nilai akreditasi, semakin menunjukkan bahwa UPK Kementerian Agama telah memenuhi standar mutu nasional. Nilai minimal 85 menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rerata = (Σa) / b<br><br>Keterangan:<br>a. Nilai akreditasi masing-masing Unit Penilaian Kompetensi<br>b. Jumlah Unit Penilaian Kompetensi yang dinilai oleh BKN |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Nilai akreditasi masing-masing UPK oleh BKN<br>2. Jumlah UPK Kementerian Agama yang telah mengikuti proses akreditasi<br>3. Standar akreditasi dari BKN (misalnya aspek kelembagaan, SDM, sarana, dan metode asesmen) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi dan Akreditasi Unit Penilaian Kompetensi ASN |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan fungsi pemerintahan: Manajemen ASN / Pengembangan Kompetensi / Reformasi Birokrasi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Keuangan |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai dari Kementerian Keuangan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Nilai dari Kemenkeu |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan aspek penilaian: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Efektivitas, Efisiensi, dan Kepatuhan terhadap Regulasi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Efektivitas dan Efisiensi Program yang mencapai tujuan |
| 3 | Konsep/Definisi | Penilaian terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian target output/outcome dari program/kegiatan yang di awasi melalui Program Pengawasan Intern |
| 4 | Interpretasi | Mengukur seberapa efektif dan efisien suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah program yang dinilai efektif dan efisien serta mencapai tujuan<br>b. Jumlah total program yang dilaksanakan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Program yang Efektif, Anggaran |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Program yang efektif dan efisien mencapai target yang ditentukan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian PAN-RB |
| 2 | Nama Indikator | Nilai SAKIP satuan kerja |
| 3 | Konsep/Definisi | Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja dan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi |
| 4 | Interpretasi | Mengukur seberapa baik satuan kerja dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja sesuai dengan SAKIP |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Peningkatan rata-rata nilai SAKIP satuan kerja = rata-rata nilai SAKIP satuan kerja yang dievaluasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1.Perencanaan Kinerja<br>2.Pengukuran Kinerja<br>3.Evaluasi Kinerja<br>4.Pelaporan Kinerja |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penyusunan Dokumen Perencanaan kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Audit Kinerja |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Peningkatan rata-rata nilai SAKIP sesuai target yang ditetapkan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif |
| 3 | Konsep/Definisi | Penilaian efektivitas sistem pengendalian internal dalam memastikan integritas, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik fungsi pengendalian internal dalam mengelola risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah satuan kerja dengan pengendalian intern pelaporan keuangan yang dinilai efektif<br>b. Jumlah total satuan kerja yang dievaluasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Reviu PIPK |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan status efektivitas: Efektif, Cukup Efektif, Tidak Efektif |
| 11 | Level Estimasi | Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Nilai telaah sejawat |
| 3 | Konsep/Definisi | Pengukuran tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar melalui evaluasi sejawat internal |
| 4 | Interpretasi | Mengukur sejauh mana telaah sejawat efektif dalam memperbaiki kualitas audit dan pengawasan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Telaah Sejawat =Jumlah (Bobot dari setiap komponen x Skor capaian komponen telaah sejawat) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Proses Telaah Sejawat |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Sejawat |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan aspek penilaian: Kepatuhan terhadap standar akuntansi, Kualitas penyajian laporan, Sistem pengendalian intern, Kepatuhan regulasi, Kualitas dokumentasi |
| 11 | Level Estimasi | Tahunan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar |
| 3 | Konsep/Definisi | Pengawasan yang berfokus pada identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau kegiatan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif dan tepat sasaran kegiatan pengawasan dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan pada standar yang berlaku |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus = (a/b) * 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah kegiatan pengawasan yang berbasis resiko dan sesuai standar<br>b. Jumlah total kegiatan pengawasan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Pengawasan Berbasis Risiko |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penyusunan Audit Berbasis Risiko dan Pedoman Kerja Pengawasan Tahunan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan pendekatan: Berbasis Risiko, Non-Risiko |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pengendalian risiko kecurangan |
| 3 | Konsep/Definisi | Menilai keberhasilan pengendalian terhadap potensi risiko kecurangan dalam pengelolaan sumber daya publik |
| 4 | Interpretasi | Mengukur sejauh mana program/kegiatan telah dilengkapi dengan sistem dan prosedur pengendalian yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian risiko kecurangan<br>b. Jumlah total satuan kerja |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Pengendalian Risiko Kecurangan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase penanganan risiko kecurangan |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur jumlah kasus yg memiliki risiko fraud yang ditindaklanjuti dan dibuktikan |
| 4 | Interpretasi | Mengukur sejauh mana upaya penanganan terhadap risiko kecurangan yang teridentifikasi telah dilakukan dengan baik |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah risiko kecurangan yang telah ditangani<br>b. Jumlah total risiko kecurangan yang teridentifikasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Penanganan Risiko Kecurangan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Pengamanan Aset Negara |
| 3 | Konsep/Definisi | Tingkat Pengamanan aset negara melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset yang bermasalah |
| 4 | Interpretasi | Mengukur efektivitas pengamanan terhadap aset negara yang bermasalah (sebanyak 27 kasus) untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah aset negara yang telah diamankan<br>b. Jumlah total aset negara yang dikuasai |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Pengamanan Aset Negara |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis aset: Tanah, Bangunan, Peralatan/Mesin, Aset Tak Berwujud |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kajian kebijakan yang dimanfaatkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi kajian yang digunakan dalam pengambilan keputusan |
| 4 | Interpretasi | Menggambarkan sejauh mana hasil kajian kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan oleh instansi |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah kajian kebijakan yang dimanfaatkan<br>b. Jumlah total kajian kebijakan yang disusun |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dokumen kajian yang digunakan sebagai dasar kebijakan/program<br>2. Jumlah seluruh dokumen kajian yang disusun dalam periode tertentu |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penyusunan, Diseminasi, dan Monitoring Pemanfaatan Kajian Kebijakan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Triwulan dan Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan substansi: Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pemerintah |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diverifikasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio yang menunjukkan seberapa efektif suatu entitas atau lembaga dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi atau temuan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, atau evaluasi) oleh Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau lembaga pengawas eksternal, yang kemudian hasilnya telah diverifikasi dan dinyatakan selesai (sesuai/ tuntas) oleh pihak pengawas |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang baik dari entitas yang diawasi. Ini mencerminkan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan kinerja, dan menuntaskan temuan pengawasan. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, resistensi terhadap perbaikan, atau kurangnya komitmen manajemen dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah yang ditemukan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi: Angka ini merujuk pada temuan audit/pengawasan yang telah diperbaiki oleh unit yang diawasi, dan perbaikan tersebut sudah diperiksa ulang dan dinyatakan tuntas oleh lembaga pengawas (seperti Inspektorat atau BPK).<br>(b) = Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah jumlah seluruh rekomendasi atau temuan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas yang harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi oleh Pihak Pengawas.<br>b. Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode Pengawasan. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Audit, Inspeksi, atau Evaluasi (Pengawasan).<br>- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Rekomendasi.<br>- Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Entitas yang Diawasi.<br>- Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Tindak Lanjut oleh Lembaga Pengawas (APIP/BPK/dll.). |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Triwulanan, dan Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Pengawasan: Audit Kinerja, Audit Keuangan, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Reviu, Evaluasi.<br>- Berdasarkan Status Tindak Lanjut: Selesai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti.<br>- Berdasarkan Entitas yang Diawasi: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota), Unit Kerja Teknis. |
| 11 | Level Estimasi | - Kementerian/Lembaga<br>- Unit Eselon I/II |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat yang diverifikasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase yang mengukur efektivitas dan responsivitas suatu instansi pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Persentase ini secara spesifik dihitung dari jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti, dan penyelesaiannya telah diverifikasi serta dinyatakan tuntas oleh sistem atau pihak yang berwenang. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa instansi memiliki sistem penanganan pengaduan yang efektif, responsif, dan akuntabel. Hal ini mencerminkan komitmen instansi untuk melayani masyarakat dan memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan/kritik. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam proses penanganan, seperti lamanya waktu respons, kurangnya koordinasi, atau kegagalan dalam menyelesaikan masalah hingga tuntas dan terverifikasi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas: Ini adalah jumlah pengaduan yang tidak hanya direspons, tetapi juga masalahnya sudah diselesaikan, dan penyelesaian tersebut telah diverifikasi serta dikonfirmasi tuntas oleh sistem atau unit pengelola pengaduan resmi.<br>(b) = Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah seluruh pengaduan sah yang masuk ke instansi atau sistem selama periode pelaporan dan memerlukan tindakan penyelesaian. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/ Tuntas dalam Periode Pelaporan.<br>b. Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode yang Sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Masyarakat.<br>- Proses Analisis, Disposisi, dan Tindak Lanjut Pengaduan oleh Unit Terkait.<br>- Kegiatan Verifikasi, Monitoring, dan Penutupan Pengaduan oleh Petugas Pengelola Pengaduan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan, Triwulanan dan tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Status Pengaduan: Selesai (Diverifikasi/Tuntas), Sedang Diproses, Belum Ditindaklanjuti.<br>- Berdasarkan Sektor/Isu Pengaduan: Pelayanan Publik, Infrastruktur, Hukum, Kepegawaian, dll.<br>- Berdasarkan Kanal Penerimaan: LAPOR!, Surat Resmi, Langsung, Media Sosial. |
| 11 | Level Estimasi | - Kementerian/Lembaga<br>- Unit Eselon I/II terkait pengaduan masyarakat |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTKN yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio yang menunjukkan proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), baik di bawah Kementerian Agama maupun kementerian/lembaga lain, yang telah mencapai skor atau nilai evaluasi minimal 75 dalam proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai 75 merupakan ambang batas kinerja minimal yang ditetapkan untuk menunjukkan komitmen dan keberhasilan signifikan dalam reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi mengindikasikan bahwa mayoritas PTKN telah berhasil mengimplementasikan program reformasi birokrasi yang efektif, dengan fokus kuat pada tata kelola yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang prima. Ini mencerminkan komitmen lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun integritas. Persentase yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam perbaikan manajemen risiko, pengendalian internal, dan penyediaan layanan yang bebas dari praktik korupsi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan ZI ≥75: Ini adalah angka PTKN yang telah diukur dan skor penilaian Pembangunan Zona Integritas-nya mencapai minimal 75 (atau lebih tinggi), yang menunjukkan komitmen signifikan terhadap Reformasi Birokrasi, WBK, dan WBBM.<br>(b) = Total Jumlah PTKN yang Wajib Melaksanakan Pembangunan ZI: Ini adalah keseluruhan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UIN, IAIN, STAIN, dll.) yang masuk dalam cakupan target pembangunan Zona Integritas. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas ≥ 75.<br>b. Total Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Wajib Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTKN.<br>- Survei dan Penilaian Mandiri (Internal) Pembangunan ZI oleh PTKN.<br>- Evaluasi dan Penilaian Eksternal Pembangunan ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atau Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Agama/ Kementerian terkait.<br>- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kualitas Pelayanan Publik. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis PTKN: UIN (Universitas Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), atau PTKN lainnya.<br>- Berdasarkan Status Penetapan ZI: Belum Diusulkan, Diusulkan WBK, Ditetapkan WBK, Ditetapkan WBBM.<br>- Berdasarkan Wilayah: Provinsi/Regional. |
| 11 | Level Estimasi | - Tingkat Kementerian Agama (agregasi nasional seluruh PTKN).<br>- Dapat diturunkan hingga tingkat individu PTKN sesuai hasil penilaian Zona Integritas. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa |
| 3 | Konsep/Definisi | Ukuran kinerja yang mencerminkan peningkatan kualitas dan kematangan layanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam memproses pengadaan barang/jasa. Peningkatan layanan ini diukur melalui perbandingan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ dari tahun berjalan terhadap skor tahun sebelumnya. Semakin tinggi skor, semakin matang dan prima layanan pengadaan yang diselenggarakan. |
| 4 | Interpretasi | Nilai persentase yang positif menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan pengadaan, yang meliputi kecepatan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Peningkatan ini selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi. Jika persentase negatif atau stagnan, ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap manajemen risiko, SDM, dan tata kelola pengadaan di lingkungan UKPBJ. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase Peningkatan = (((Tn) - (Tn−1)) / (Tn−1)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>- Nilai Indeks UKPBJ Tahun Berjalan (Tn): Nilai evaluasi kualitas layanan pengadaan barang/jasa (seringkali menggunakan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan/ITKP atau Tingkat Kematangan UKPBJ) pada periode yang sedang dilaporkan.<br>- Nilai Indeks UKPBJ Tahun Sebelumnya (Tn−1): Nilai evaluasi yang sama pada periode tahun sebelumnya, digunakan sebagai basis perbandingan.<br>* 100%: Digunakan untuk mengubah hasil perubahan menjadi bentuk persentase, yang menunjukkan seberapa besar kenaikan (atau penurunan) kualitas layanan pengadaan dibandingkan tahun lalu. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Berjalan (Tn).<br>b. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Sebelumnya (Tn−1). |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Survei dan Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ.<br>- Evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Penilaian Kematangan UKPBJ oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).<br>- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan.<br>- Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Digitalisasi Layanan Pengadaan (LPSE). |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Kriteria Penilaian ITKP/Kematangan (misalnya, Aspek Kebijakan, Aspek Proses Bisnis, Aspek SDM, Aspek Kelembagaan).<br>- Berdasarkan Jenis UKPBJ (Pusat/Daerah/Perguruan Tinggi). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80 |
| 3 | Konsep/Definisi | Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut. |
| 4 | Interpretasi | Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rerata Nilai = (a) / (b)<br><br>Keterangan<br>(a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/ kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih.<br>(b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.<br>b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/ Teknis Kepemimpinan).<br>- Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus).<br>- Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor Numerik (0-100) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu.<br>- Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis.<br>- Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu. |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>'- Unit Eselon I atau Satuan Kerja |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80 |
| 3 | Konsep/Definisi | Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut. |
| 4 | Interpretasi | Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rerata Nilai = (a) / (b)<br><br>Keterangan<br>(a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/ kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih.<br>(b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.<br>b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/ Teknis Kepemimpinan).<br>- Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus).<br>- Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor Numerik (0-100) |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu.<br>- Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis.<br>- Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu. |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>'- Unit Eselon I atau Satuan Kerja |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio yang mengukur proporsi total koleksi perpustakaan (berbentuk e-book, e-journal, hasil penelitian, atau dokumen digital lainnya) yang dimiliki oleh unit perpustakaan Kementerian Agama dan telah tersedia, terindeks, dan dapat diakses secara penuh (full-text) atau sebagian oleh pengguna/masyarakat melalui platform daring (online), seperti repositori, e-library, atau aplikasi khusus. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah bertransformasi secara digital, mampu memberikan akses yang luas, mudah, dan merata terhadap kekayaan intelektual dan literasi keagamaan kepada publik. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa banyak koleksi digital masih tersimpan secara lokal (offline) atau belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akses publik online. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara Online: Ini adalah hitungan (count) dari e-book, e-journal, atau dokumen digital lain yang dimiliki perpustakaan Kemenag dan sudah tersedia serta dapat diakses penuh melalui platform atau repositori online (seperti ELIPSKI).<br>(b) = Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki: Ini adalah seluruh hitungan (count) koleksi digital yang sudah dimiliki oleh perpustakaan Kemenag, termasuk yang mungkin masih tersimpan secara offline atau belum terindeks. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara Online (Terindeks dan Tersedia di Platform Daring).<br>b. Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki (Termasuk yang belum diakses online). |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Akuisisi, Digitalisasi, dan Pengemasan Ulang (Repackaging) Koleksi Perpustakaan.<br>- Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Perpustakaan Digital (E-Library/Repository).<br>- Kegiatan Metadata Entry dan Indeksasi Koleksi.<br>- Pelaporan Kinerja Layanan Perpustakaan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Koleksi: E-book, E-Journal, Laporan Penelitian, Karya Ilmiah Dosen/ Mahasiswa.<br>- Berdasarkan Sektor Keagamaan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.<br>- Berdasarkan Unit Pengelola: Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Balai Litbang Diklat. |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>'- Satuan Kerja |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Akreditasi Perpustakaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai numerik hasil penilaian resmi yang diberikan oleh lembaga akreditasi perpustakaan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/Perpusnas) terhadap perpustakaan di lingkungan Kementerian Agama. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti koleksi, sarana/ prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM), dan pengorganisasian, untuk menentukan kualitas dan standar operasional perpustakaan. Nilai akreditasi mencerminkan status mutu perpustakaan (misalnya: A/Unggul, B/Baik, C/Cukup, atau Tidak Terakreditasi). |
| 4 | Interpretasi | Nilai akreditasi yang tinggi (misalnya nilai A atau B) menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah memenuhi standar nasional atau bahkan melampauinya, memiliki tata kelola yang baik, koleksi yang memadai, dan pelayanan yang prima. Nilai ini menjadi indikator penting kualitas infrastruktur pendukung pendidikan dan literasi di lingkungan Kemenag. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan signifikan pada aspek-aspek pengelolaan perpustakaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Akreditasi = Skor Akhir Penilaian (diambil langsung dari Sertifikat Akreditasi) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Nilai Akhir Akreditasi Perpustakaan yang Diberikan oleh Lembaga Akreditasi. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pengajuan dan Persiapan Permohonan Akreditasi Perpustakaan oleh UPT/Satuan Kerja Kemenag.<br>- Asesmen Lapangan dan Penilaian oleh Asesor dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas).<br>- Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Penetapan Nilai oleh Lembaga Akreditasi. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor Numerik (Skala 0-100) atau Peringkat Mutu (A, B, C) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Berkala (3 - 5 Tahunan) sesuai masa berlaku akreditasi |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Perpustakaan: Perpustakaan Perguruan Tinggi (UIN/IAIN), Perpustakaan Sekolah (Madrasah), Perpustakaan Khusus (Litbang/Arsip).<br>- Berdasarkan Peringkat Mutu: A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), Belum Terakreditasi. |
| 11 | Level Estimasi | Satuan Kerja Perpustakaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam menyelesaikan penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan (termasuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan daerah, atau jenis peraturan lainnya) dalam periode waktu yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau rencana kerja sejenis |
| 4 | Interpretasi | Nilai persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa lembaga tersebut sangat efektif dan efisien dalam manajemen proses legislasi/regulasi, dengan sedikit kendala atau penundaan. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan, koordinasi antar instansi, dan kepatuhan terhadap jadwal kerja. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya masalah signifikan dalam proses legislasi, seperti penundaan, perubahan prioritas, atau kesulitan dalam mencapai konsensus. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan Sesuai Perencanaan: Ini adalah jumlah peraturan (seperti RUU, RPP, atau Perda) yang telah berhasil disahkan/ditetapkan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Program Legislasi (Prolegnas/Prolegda) atau rencana kerja awal.<br>(b) = Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan: Ini adalah total keseluruhan jumlah rancangan peraturan yang ditargetkan atau dimasukkan dalam daftar prioritas untuk diselesaikan dalam periode waktu tertentu. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan (disahkan/ditetapkan) dalam Periode Perencanaan.<br>b. Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan (ditargetkan) untuk Diselesaikan dalam Periode yang Sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penyusunan program legislasi/peraturan.<br>- Penyusunan, pembahasan, dan finalisasi rancangan peraturan.<br>- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Tingkat Peraturan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga<br>'- Berdasarkan Sektor/Bidang: Ekonomi, Sosial, Hukum & Keamanan, Pemerintahan Daerah, dan lain-lain<br>- Berdasarkan Jenis Program: Prolegnas Prioritas, Prolegnas Kumulatif Terbuka, Prolegda. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) terhadap jumlah penduduk usia 19–24 tahun. APK dapat melebihi 100% karena menghitung semua yang sedang bersekolah di jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan apakah usianya sesuai. |
| 4 | Interpretasi | APK Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang daya serap sistem pendidikan tinggi terhadap penduduk, termasuk mereka yang lebih tua atau lebih muda dari usia ideal pendidikan tinggi. Angka ini mencerminkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly<br>b = Jumlah penduduk usia 19–24 tahun |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly<br>b. Jumlah penduduk usia 19–24 tahun |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis perguruan tinggi: PTKN, PTKS |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lulusan satuan pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Ma'had Aly, yang memperoleh pekerjaan (formal/informal) dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah kelulusan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan daya serap lulusan pendidikan tinggi keagamaan terhadap dunia kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterkaitan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada periode sebelumnya<br>b = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly pada periode sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu < 1 tahun setelah lulus<br>b. Jumlah total lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly pada periode yang sama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Tracer Studi oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahun |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan status kerja: Bekerja < 1 tahun, Bekerja ≥ 1 tahun, Belum Bekerja |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam daftar Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada peringkat kurang dari 1000 besar dunia, berdasarkan penilaian kontribusi PT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam mendukung SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola institusi, dan kemitraan. Semakin banyak PT yang masuk <1000 besar, semakin tinggi pengakuan terhadap kinerja keberlanjutan perguruan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah PTK/Ma'had Aly dalam peringkat THE Impact Rankings <1000 |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan SDGs Goal |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif pada institusi pendidikan tinggi keagamaan dari periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PTK meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan perguruan tinggi keagamaan swasta yang terakreditasi. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang keagamaan Islam. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan tinggi keagamaan. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin baik kinerja dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan. Indikator ini mencerminkan daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan serta efektivitas kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase peningkatan = ((a - b) / b) × 100 %<br>Keterangan:<br>a = jumlah mahasiswa tahun berjalan;<br>b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan<br>b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan EMIS PTK dan Ma'had Aly<br>- Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa oleh Setjen Kemenag dan Ditjen Pendis<br>- Monitoring dan Evaluasi Data Mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri (UIN, IAIN, STAIN)<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly<br><br>Berdasarkan Jenjang:<br>- S1/Sarjana<br>- S2/Magister<br>- S3/Doktor |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Ma'had Aly yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak PTK di Ma'had Aly yang telah melalui proses penjaminan mutu melalui sistem akreditasi formal, sehingga menjamin kompetensi, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah dipenuhi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase=(a/b)×100%<br>Dengan:<br>a = Jumlah Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly yang telah terakreditasi<br>b = Jumlah total Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang telah terakreditasi<br>b. Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan akreditasi Ma'had Aly oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku)<br>- Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis<br>- Monitoring dan evaluasi mutu Ma'had Aly oleh Ditjen Pendis |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, dan/atau per lembaga Ma'had Aly |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/ internasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi kompetensi<br>b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Dosen PTK Bersertifikasi Kompetensi<br>2. Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Bersertifikasi Kompetensi<br>3. Jumlah Dosen PTK<br>4. Jumlah Tenaga Kependidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait.<br>2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri).<br>3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Bidang Keahlian: Sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang<br>- Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi (sarjana/diploma) sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal) |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rata-rata masa tunggu = (∑ waktu tunggu semua lulusan yang bekerja) / jumlah lulusan yang bekerja |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Rata-rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)<br>- Survei Penelusuran Alumni (Tracer Study) oleh perguruan tinggi<br>- Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Waktu (Bulan) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | - Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun).<br>- Periodik (tracer study perguruan tinggi biasanya 1–2 tahun setelah kelulusan) |
| 10 | Klasifikasi | Diploma, Sarjana, Magister, Doktor |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Sakernas |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya. |
| 4 | Interpretasi | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase=(a/b)×100%<br>Dengan:<br>a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK<br>b = Jumlah total kerja sama aktif |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK<br>b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis<br>- Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu PTK<br>- Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.) |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) |
| 3 | Konsep/Definisi | Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola keberagamaan antaragama, antarwilayah, maupun antarperguruan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Indeks = (∑ skor aspek keagamaan individu / skor maksimum) × 100 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa<br>2. Skor praktik ibadah mahasiswa<br>3. Skor pengetahuan ajaran agama<br>4. Skor perilaku sosial keagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Indeks Keberagamaan Mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE Impact Rankings SDGs |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | THE 17 GOALS |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Times Higher Education |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memenuhi standar sarana prasarana |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi adalah proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki fasilitas akademik dan non-akademik sesuai ketentuan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai standar nasional pendidikan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dalam periode tertentu;<br>b = Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada dalam periode yang sama; |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi;<br>2. Jumlah total PTK/Ma'had Aly. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Verifikasi dan validasi data sarana prasarana melalui EMIS dan monitoring lapangan;<br>- Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarpras PTK;<br>- Evaluasi pemenuhan standar sarpras oleh Tim Penjaminan Mutu PTK. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase PTK yang menyediakan fasilitas pendidikan berbasis gender dan inklusif adalah ukuran proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak PTK yang menyediakan dukungan terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) penerima beasiswa |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa PTK penerima beasiswa adalah ukuran proporsi mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, lembaga keagamaan, atau sumber lain yang sah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase mahasiswa penerima beasiswa, menunjukkan semakin luasnya akses bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, baik dari pemerintah, institusi, maupun pihak swasta |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa penerima beasiswa<br>b = Jumlah mahasiswa |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa<br>2. Jumlah Mahasiswa |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pencatatan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis Beasiswa: Akademik, Non-Akademik (olahraga/seni), Kebutuhan Ekonomi, Prestasi, dll. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I adalah proporsi mahasiswa baru atau mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang ditetapkan dalam kelompok UKT paling rendah (Kelompok I). Kelompok UKT I ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan dan/atau memiliki keterbatasan finansial, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan pendidikan tinggi di PTK. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang masuk dalam kategori UKT Kelompok I, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dan PTK dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I<br>b = Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I pada PTKN<br>2. Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada PTKN |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penerapan sistem UKT berbasis data ekonomi mahasiswa<br>- Verifikasi dan validasi ekonomi calon mahasiswa baru (UKT online/offline)<br>- Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan afirmatif UKT |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Tahun Masuk:<br>- Angkatan 202X;<br>- Angkatan 202X-1, dst. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan animo mahasiswa baru |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan animo mahasiswa baru adalah perubahan persentase jumlah pendaftar baru pada suatu institusi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Variabel ini menunjukkan seberapa besar minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada institusi tersebut. Peningkatan nilai menunjukkan daya tarik institusi yang meningkat, sedangkan penurunan mengindikasikan menurunnya minat calon mahasiswa |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah pendaftar tahun berjalan<br>b = Jumlah pendaftar tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah pendaftar tahun berjalan<br>2. Jumlah pendaftar tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Rekrutmen Calon Mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkualitas |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas adalah rasio antara jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah terakreditasi Unggul/A atau memiliki peringkat terbaik, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa baru yang diterima di PTK pada periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur ketersediaan akses dan pilihan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa baru. Semakin tinggi proporsi mahasiswa baru yang memilih dan diterima di PTK berkualitas, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penyediaan pilihan institusi yang terpercaya. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik.<br>b = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik.<br>2. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penghitungan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa baru PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa baru PTK yang berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang terdaftar di program studi bidang Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) dengan status akreditasi "Unggul" dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak mahasiswa baru di PTK yang memilih program studi STEM dengan mutu akademik tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan terhadap kebutuhan iptek. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Proporsi = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul<br>b = Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa baru di prodi STEM terakreditasi unggul<br>2. Jumlah total mahasiswa baru di prodi STEM |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh perguruan tinggi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Ditjen Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terpetakan berdasarkan keunggulannya |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya adalah banyaknya PTK (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah diklasifikasikan menurut bidang atau capaian unggulan, seperti riset, inovasi, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan mutu akademik. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi jumlah PTK yang terpetakan menunjukkan semakin baiknya pemetaan mutu dan diferensiasi perguruan tinggi keagamaan berdasarkan keunggulan spesifiknya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pembinaan mutu. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah = Banyaknya PTK yang telah dikategorikan sesuai hasil pemetaan keunggulan berdasarkan kriteria mutu dan capaian unggulan. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Kegiatan pemetaan dan klasifikasi PTK oleh Kementerian Agama<br>- Survei dan asesmen potensi unggulan PTK<br>- Penyusunan profil kelembagaan PTK |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Prodi PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan akreditasi unggul |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Prodi PTK yang mendapatkan akreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi "Unggul" dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi di perguruan tinggi keagamaan yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik di lingkungan PTK. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang berakreditasi unggul<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang berakreditasi unggul<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Di PDDikti |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase LPTK PTK yang terakreditasi adalah ukuran proporsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memperoleh status akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak LPTK di PTK yang memenuhi standar mutu kelembagaan dan tata kelola pendidikan, mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan calon tenaga pendidik keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase=(a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah LPTK yang telah terakreditasi.<br>b = Jumlah LPTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi.<br>2. Jumlah LPTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendampingan dan fasilitasi akreditasi LPTK;<br>- Penguatan sistem penjaminan mutu internal;<br>- Verifikasi data akreditasi melalui EMIS dan BAN-PT/LAM. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Peringkat Akreditasi:<br>- Unggul/A<br>- Baik Sekali/B<br>- Baik/C |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/ Buddha) yang terakreditasi unggul |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase program studi PPG PTK yang terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi Program Profesi Guru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi "Unggul" dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi PPG di PTK yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru keagamaan dan kesiapan lembaga dalam menghasilkan pendidik profesional. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.<br>b = Jumlah PTK |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Peningkatan dan Fasilitasi Akreditasi Unggul Program Studi PPG (melalui pembinaan, pendampingan, workshop, penyusunan dokumen akreditasi, dan evaluasi diri).<br>- Pendataan dan Rekapitulasi Program Studi PPG yang telah terakreditasi (termasuk status akreditasi aktif) di bawah Kementerian Agama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen berkualifikasi akademik S3<br>a. Total<br>b. STEM<br>c. Non STEM |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 adalah rasio jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total dosen aktif di perguruan tinggi, baik secara keseluruhan (total), di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), maupun di bidang non-STEM. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas sumber daya dosen yang berperan dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Total = ((a + b) / c) × 100%<br>STEM = (a / c) × 100%<br>Non-STEM = (b / c) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen S3 STEM<br>b = Jumlah dosen S3 non-STEM<br>c = Jumlah dosen |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen S3 STEM<br>2. Jumlah dosen S3 non-STEM<br>3. Jumlah dosen |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus adalah rasio jumlah dosen tetap yang terlibat dalam aktivitas profesional di luar perguruan tinggi seperti industri, lembaga riset, pemerintahan, organisasi internasional, atau kegiatan pengabdian masyarakat, terhadap jumlah total dosen tetap. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin banyak dosen yang memiliki pengalaman praktis dan relevan di dunia luar kampus, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus<br>b = Jumlah dosen tetap |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus<br>2. Jumlah dosen tetap |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Aktivitas Dosen atau Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar adalah rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik tersebut terhadap jumlah total dosen tetap di perguruan tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik tingkat profesionalisme, kepakaran, dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar<br>b = jumlah total dosen tetap |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar<br>2. Jumlah total dosen tetap |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis Jabatan: Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/ internasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur sejauh mana dosen PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh program peningkatan kompetensi<br>b = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program peningkatan kompetensi<br>2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait.<br>2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri).<br>3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen PTK yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional adalah ukuran proporsi dosen pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang berpartisipasi sebagai pembicara, pemakalah, atau panelis pada forum ilmiah tingkat nasional dan internasional. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin aktif dan diakui dosen PTK dalam jejaring ilmiah nasional dan global, mencerminkan peningkatan kapasitas akademik, reputasi, dan kontribusi ilmiah perguruan tinggi keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional<br>b = Jumlah dosen aktif yang ada di PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional<br>2. Jumlah dosen aktif yang ada di PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah<br>- Fasilitasi dan insentif publikasi ilmiah dan partisipasi konferensi<br>- Evaluasi kegiatan tridarma dosen |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Konferensi:<br>- Nasional<br>- Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Rasio dosen asing PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) dengan dosen dalam negeri |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK adalah perbandingan antara jumlah dosen berkewarganegaraan asing dengan jumlah dosen warga negara Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha). |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar keterlibatan dosen asing dalam kegiatan akademik PTK, yang mencerminkan peningkatan kolaborasi internasional dan pengakuan global terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio = 1 : (b / a)<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen asing aktif di PTK<br>b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a = Jumlah dosen asing aktif di PTK<br>b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Program visiting professor atau exchange lecturer<br>- Skema rekrutmen dosen asing<br>- Kerja sama internasional PTK (MoU/MoA) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada jenjang jabatan fungsional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK pada jenjang jabatan fungsional adalah ukuran tingkat kesesuaian antara jumlah tenaga kependidikan yang telah menduduki jabatan fungsional (misalnya arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium, analis kepegawaian, dan sejenisnya) dengan jumlah formasi atau kebutuhan ideal di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha). |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan sesuai jabatan fungsional yang dibutuhkan, mencerminkan efektivitas manajemen SDM dan profesionalitas tenaga kependidikan di lingkungan PTK. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional<br>b = Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional<br>2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | a. Pendataan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan / Kementerian<br>b. Analisis Kebutuhan Formasi oleh BKN / Kemdikbudristek / Pemerintah Daerah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Data diperbarui secara berkala (tahunan) dengan cut-off per tanggal 30 Juni setiap tahun. |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi lulusan program sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah mengikuti program pembelajaran di luar kampus selama minimal satu semester penuh, relatif terhadap total lulusan program sarjana (S1) pada periode yang sama |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur keberhasilan Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi lulusan S1 untuk memiliki pengalaman praktis dan relevan di luar lingkungan akademik. Semakin tinggi persentase lulusan dengan pengalaman di luar kampus, menunjukkan semakin kuatnya adaptasi kurikulum dan program pendidikan PTK terhadap kebutuhan dunia kerja dan dinamika masyarakat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus.<br>b = Jumlah lulusan PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus.<br>2. Jumlah lulusan PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan dan Fasilitasi Program Pembelajaran di Luar Kampus (Magang, KKN, Pertukaran Mahasiswa, dll.) dan Pendataan Partisipan serta Lulusan dari Program Tersebut.<br>- Proses Yudisium dan Pendataan Seluruh Lulusan Program Sarjana (S1) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki Pusat Pengembangan Karir |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) di bawah Kementerian Agama yang memiliki unit atau fasilitas yang secara khusus memberikan layanan pengembangan karir kepada mahasiswa dan alumni, relatif terhadap total PTK yang ada |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir di PTK. Semakin tinggi persentase PTK yang memiliki pusat pengembangan karir, menunjukkan semakin besar perhatian dan upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan lulusan PTK untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karir<br>b = Jumlah PTK |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Identifikasi dan verifikasi keberadaan pusat pengembangan karir di setiap PTK (melalui survei, pendataan, atau laporan dari PTK).<br>- Pendataan dan rekapitulasi total PTK di bawah Kementerian Agama. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan PTK yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan:<br>a. Total;<br>b. Karyawan atau Wirausaha |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan adalah proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau merintis usaha (wirausaha) dalam periode waktu tertentu setelah kelulusan, dibandingkan dengan total lulusan yang lulus pada periode yang sama. Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja atau siap berwirausaha. Semakin tinggi persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun wirausaha, menunjukkan semakin baik kualitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pembinaan karir yang dilakukan oleh PTK. Ini mengindikasikan bahwa lulusan PTK memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Peningkatan indikator ini berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan angka serapan lulusan, pengurangan pengangguran terdidik, serta peningkatan kontribusi PTK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = { (a + b) / c } × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>b = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>c = Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>2. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>3. Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Tracer Study PTK<br>- Program Career Center dan Alumni<br>- Pelatihan kewirausahaan dan magang<br>- Inkubator bisnis mahasiswa/alumni |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Pekerjaan: Karyawan, Wirausaha |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase tenaga kerja lulusan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) bidang STEM |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi angkatan kerja yang memiliki gelar pendidikan tinggi (D3, D4/Sarjana Terapan, S1, S2, S3) dari program studi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), relatif terhadap total angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur ketersediaan SDM berkualitas di sektor-sektor kritis yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangs |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan tinggi nasional mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor strategis di bidang STEM. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan ketersediaan SDM STEM yang memadai untuk mendukung inovasi, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong minat dan kapasitas generasi muda pada disiplin ilmu yang penting untuk masa depan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK bidang STEM.<br>b = Jumlah lulusan PTK. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK bidang STEM.<br>2. Jumlah lulusan PTK. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau survei ketenagakerjaan lainnya yang spesifik |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Bidang STEM:<br>- Sains (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistika, dll.)<br>- Teknologi (Informatika, Sistem Informasi, dll.)<br>- Teknik/Rekayasa (Sipil, Elektro, Mesin, dll.)<br>- Matematika Murni & Aktuaria |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Sakernas |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik, relatif terhadap total lulusan pada periode yang sama. Indikator ini mencerminkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan pengakuan kompetensi yang diakui secara profesional. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa program pendidikan di PTK semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan lulusannya memiliki daya saing yang kuat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi.<br>b = Jumlah lulusan PTK |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi.<br>2. Jumlah lulusan PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Fasilitasi program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/lulusan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan pendataan lulusan yang bersertifikat kompetensi.<br>- Pendataan dan rekapitulasi total lulusan PTK di bawah Kementerian Agama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Lembaga Sertifikasi:<br>- LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) terlisensi BNSP<br>- Asosiasi Profesi<br>- Lembaga Sertifikasi Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio outbound per inbound mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri (outbound) dengan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke dalam PTK tersebut (inbound) dalam periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat internasionalisasi dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan dengan dinamika global. Semakin seimbang rasio antara mahasiswa outbound dan inbound (mendekati 1:1), menunjukkan semakin kuatnya daya tarik dan kemampuan PTK dalam menciptakan ekosistem akademik yang inklusif secara internasional, serta semakin aktifnya mahasiswa PTK dalam mencari pengalaman global. Peningkatan rasio ini mencerminkan pengakuan PTK di kancah internasional, pengayaan perspektif multikultural di kampus, serta peningkatan kompetensi global mahasiswa. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global, pengembangan jejaring internasional, dan peningkatan reputasi PTK sebagai pusat keunggulan pendidikan keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio Outbound per Inbound = 1 : (b / a)<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa outbound PTK<br>b = Jumlah mahasiswa inbound PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa outbound PTK<br>2. Jumlah mahasiswa inbound PTK |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll)<br>- Student exchange antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri<br>- Program KKN internasional / transfer kredit luar negeri |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi adalah proporsi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti kegiatan atau program di luar kurikulum inti program studi mereka, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa yang aktif di PTK dalam periode tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, soft skills, dan pengalaman di luar bidang keilmuan utama. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat fleksibilitas kurikulum dan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan diri di luar bidang utama, yang krusial untuk meningkatkan relevansi lulusan. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, menunjukkan semakin kuatnya upaya PTK dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan kesempatan untuk mengembangkan soft skills, kemandirian, serta jejaring. Ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kompetensi lintas disiplin. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b ) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu.<br>b = Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a: Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu.<br>b: Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa)<br>- Magang (MBKM, kerja praktik, dll)<br>- KKN, pengabdian masyarakat<br>- Program pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan kompetisi mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Kegiatan:<br>- Program MBKM (spesifik: Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, dll.)<br>- Organisasi Kemahasiswaan (Internal/Eksternal)<br>- Kompetisi/Lomba<br>- Pengabdian Masyarakat<br>- Karya Ilmiah/Kreativitas (di luar tugas akhir prodi) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, seni, atau olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam periode waktu tertentu. Kompetisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, olimpiade sains, lomba inovasi, debat, kompetisi pemrograman, turnamen olahraga, dan festival seni. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan daya saing mahasiswa PTK di kancah nasional dan internasional. Persentase yang tinggi menunjukkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa di luar kurikulum formal, serta reputasi PTK dalam menghasilkan talenta-talenta berdaya saing global. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase peningkatan = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan<br>b = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan<br>2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan Partisipasi Mahasiswa dalam Kompetisi (PPMK) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi jumlah PTK yang terlibat aktif dalam kolaborasi atau kemitraan dengan entitas eksternal (dunia usaha dan industri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional) dibandingkan dengan total keseluruhan PTK. Kerja sama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti magang industri, proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan, program pengabdian masyarakat, atau pertukaran keahlian. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan tingkat keterbukaan dan relevansi institusi pendidikan dengan kebutuhan eksternal. Semakin tinggi persentase ini, semakin kuat integrasi institusi pendidikan dengan lingkungan kerja, industri, dan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase PTK yang bekerjasama = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional<br>b = Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>Pendataan Potensi dan Kemitraan Institusi Pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang:<br>a. Pendidikan dan pengajaran<br>b. Penelitian dan publikasi<br>c. Pengabdian kepada masyarakat |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja sama dimaksud mencakup perjanjian, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen resmi antara perguruan tinggi/lembaga dengan mitra, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan sesuai bidang. |
| 4 | Interpretasi | Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak kerja sama yang benar-benar ditindaklanjuti dan berdampak, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya banyak kesepakatan yang belum terlaksana secara nyata. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati<br><br>Persentase kerjasama bidang penelitian dan publikasi: (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati<br><br>Persentase kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat: (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti<br>2. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati<br>3. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti<br>4. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati<br>5. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti<br>6. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pencatatan dan Pemantauan Kerjasama (Monitoring and Evaluation of Partnerships)<br>2. Manajemen Kerjasama (Partnership Management)<br>3. Pelaporan Kinerja Kerjasama (Partnership Performance Reporting) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan atau umum yang berpartisipasi dalam program peningkatan literasi Kitab Suci, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan dan instansi keagamaan. |
| 4 | Interpretasi | Peningkatan nilai menunjukkan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan akses dan kesempatan dalam penguatan spiritualitas dan nilai-nilai kebajikan lintas agama. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus: (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu<br>b = Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu<br>2. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pengembangan dan pelaksanaan program literasi Kitab Suci di PTKI/PTU<br>2. Pelatihan dan workshop peningkatan pemahaman kitab suci<br>3. Kegiatan pembinaan keagamaan berbasis kitab suci<br>4. Kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan dalam literasi kitab<br>5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran kitab suci |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan adalah rasio jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi keagamaan yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan dibandingkan dengan total prodi yang diukur pada periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak prodi yang berhasil menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum atau interdisipliner, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan<br>b = Jumlah prodi yang diukur |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan<br>b = Jumlah prodi yang diukur |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Evaluasi kurikulum dan implementasi integrasi keilmuan<br>2. Workshop/pelatihan pengembangan kurikulum integratif<br>3. Pendampingan dan monitoring prodi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase PTK yang membentuk dan mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu-isu lokal seperti moderasi beragama, toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai keagamaan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan PTK dalam merespons dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis riset dan advokasi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus: (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal<br>b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal<br>2. Jumlah PTK yang menjadi sasaran program |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pembentukan pusat studi keagamaan berbasis lokal<br>2. Penelitian berbasis kebutuhan sosial-keagamaan lokal<br>3. Pengabdian masyarakat berbasis hasil kajian keagamaan<br>4. Penerbitan hasil kajian tematik keagamaan<br>5. Kemitraan PTK dengan pemda/lembaga masyarakat dalam bidang keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional di Kementerian Agama adalah perbandingan jumlah karya tulis ilmiah ilmiah yang terakreditasi nasional (minimal SINTA 1 atau SINTA 2) yang dikelola oleh unit kerja atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, terhadap total jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Agama |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan kualitas dan pengakuan nasional atas karya tulis ilmiah-karya tulis ilmiah ilmiah di bawah pengelolaan Kementerian Agama |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah karya tulis ilmiah terakreditasi nasional (SINTA 1 atau 2)<br>b = Total karya tulis ilmiahyang dikelola |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah karya tulis ilmiah yang terakreditasi nasional (SINTA 1 atau SINTA 2)<br>2. Total jumlah karya tulis ilmiah yang dikelola |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pengelolaan dan Akreditasi karya tulis ilmiah Ilmiah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. SINTA 1 (Tertinggi)<br>2. SINTA 2<br>3. SINTA 3<br>4. SINTA 4 ke bawah |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Di Scopus |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi adalah proporsi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen/peneliti PTK pada jurnal bereputasi internasional yang telah mendapat sitasi (citation) dari artikel lain dalam periode tertentu.<br><br>Jurnal bereputasi internasional adalah jurnal yang terindeks dalam database internasional yang diakui seperti Scopus, Web of Science (WoS), atau database internasional lainnya yang memiliki sistem peer-review yang ketat.<br>Sitasi adalah rujukan atau referensi yang dibuat oleh artikel lain terhadap artikel yang dimaksud, yang menunjukkan dampak dan kontribusi artikel tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel yang disitasi menunjukkan kualitas, relevansi, dan pengaruh penelitian terhadap komunitas ilmiah internasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur dampak dan kualitas publikasi ilmiah PTK di tingkat internasional. Semakin tinggi persentase artikel yang disitasi, menunjukkan semakin baik kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan oleh PTK. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 % |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi;<br>b. Jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh PTK. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Insentif Publikasi Ilmiah Internasional;<br>- Bantuan Penulisan Artikel Bereputasi;<br>- Pelatihan Sitasi dan Manajemen Referensi Ilmiah. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Quartile Jurnal (SJR/JCR):<br>- Q1 (Quartile 1);<br>- Q2 (Quartile 2);<br>- Q3 (Quartile 3);<br>- Q4 (Quartile 4). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase jumlah karya tulis ilmiah yang mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan berhasil terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, dibandingkan dengan total karya tulis ilmiah yang dihasilkan dalam periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin kuat kontribusi akademik civitas akademika dalam mendukung target SDGs melalui publikasi yang diakui secara internasional. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus = Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penelitian dosen dan mahasiswa berfokus SDGs<br>2. Workshop penulisan artikel ilmiah bereputasi<br>3. Pendampingan publikasi internasional |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan THE 17 GOALS |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen adalah perbandingan antara jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional dengan jumlah dosen tetap di perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin produktif dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, yang mencerminkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Agama |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio: 1 : (b / a)<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan<br>b = Jumlah dosen tetap |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan<br>2. Jumlah dosen tetap |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen PTKIN/PTKIS<br>2. Program Insentif Publikasi Ilmiah<br>3. Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Quartil Artikel: (Q1, Q2, Q3, dan Q4) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Di Scopus |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi adalah total hak paten yang telah resmi diberikan (granted) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin banyak jumlah paten yang granted, semakin menunjukkan meningkatnya kapasitas inovasi, riset terapan, dan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemanfaatannya untuk masyarakat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>Jumlah Paten Granted (disetujui DJKI) dalam satu tahun |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah paten granted yang diperoleh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di PTKIN/PTKIS<br>2. Program Pendaftaran dan Fasilitasi Paten Perguruan Tinggi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Unit (paten) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Kategori Jumlah Paten Granted<br>1. Rendah (0 – 2 paten granted)<br>2. Sedang (3 – 5 paten granted)<br>3. Tinggi (> 5 paten granted) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase hasil riset dan inovasi adalah rasio antara jumlah hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masyarakat terhadap total hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi keagamaan dalam periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak hasil riset dan inovasi yang aplikatif, relevan, dan bermanfaat bagi DUDI/masyarakat, menandakan peningkatan kualitas riset terapan di perguruan tinggi |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat<br>b = Jumlah hasil riset |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat<br>2. Jumlah hasil riset |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Kegiatan Penelitian dan Inovasi Terapan<br>2. Program Hilirisasi Hasil Riset<br>3. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan DUDI/Komunitas Masyarakat |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Pihak Pemanfaat:<br>- Dunia Usaha (Perusahaan, Startup)<br>- Dunia Industri<br>- Masyarakat (Komunitas, Kelompok Tani, UMKM)<br>- Pemerintah/Lembaga Publik |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase LPPM yang mendapatkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan makin banyak LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya, sebagai cerminan perbaikan kualitas manajemen riset dan pengabdian di perguruan tinggi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya<br>b = Jumlah LPPM PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya<br>2. Jumlah LPPM PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan/Workshop Manajemen Riset dan Pengabdian Masyarakat<br>2. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM<br>3. Program Penguatan Tata Kelola LPPM<br>4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan LPPM |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis peningkatan kapasitasnya:<br>1. Pelatihan Pengelolaan LPPM<br>2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola LPPM<br>3. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM<br>4. Pendampingan Penyusunan Roadmap Riset & Pengabdian |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi<br>b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia<br>2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi<br>3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia<br>4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur TIK |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra<br>b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data<br>2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai<br>3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data Prioritas Pembangunan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Kepegawaian Negara |
| 2 | Nama Indikator | Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85 |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur kualitas Unit Penilaian Kompetensi (UPK) di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai akreditasi mencerminkan standar mutu dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ASN. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi rerata nilai akreditasi, semakin menunjukkan bahwa UPK Kementerian Agama telah memenuhi standar mutu nasional. Nilai minimal 85 menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rerata = (Σa) / b<br><br>Keterangan:<br>a. Nilai akreditasi masing-masing Unit Penilaian Kompetensi<br>b. Jumlah Unit Penilaian Kompetensi yang dinilai oleh BKN |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Nilai akreditasi masing-masing UPK oleh BKN<br>2. Jumlah UPK Kementerian Agama yang telah mengikuti proses akreditasi<br>3. Standar akreditasi dari BKN (misalnya aspek kelembagaan, SDM, sarana, dan metode asesmen) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi dan Akreditasi Unit Penilaian Kompetensi ASN |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan fungsi pemerintahan: Manajemen ASN / Pengembangan Kompetensi / Reformasi Birokrasi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Keuangan |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai dari Kementerian Keuangan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Nilai dari Kemenkeu |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan aspek penilaian: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Efektivitas, Efisiensi, dan Kepatuhan terhadap Regulasi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Efektivitas dan Efisiensi Program yang mencapai tujuan |
| 3 | Konsep/Definisi | Penilaian terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian target output/outcome dari program/kegiatan yang di awasi melalui Program Pengawasan Intern |
| 4 | Interpretasi | Mengukur seberapa efektif dan efisien suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah program yang dinilai efektif dan efisien serta mencapai tujuan<br>b. Jumlah total program yang dilaksanakan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Program yang Efektif, Anggaran |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Program yang efektif dan efisien mencapai target yang ditentukan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian PAN-RB |
| 2 | Nama Indikator | Nilai SAKIP satuan kerja |
| 3 | Konsep/Definisi | Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja dan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi |
| 4 | Interpretasi | Mengukur seberapa baik satuan kerja dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja sesuai dengan SAKIP |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Peningkatan rata-rata nilai SAKIP satuan kerja = rata-rata nilai SAKIP satuan kerja yang dievaluasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1.Perencanaan Kinerja<br>2.Pengukuran Kinerja<br>3.Evaluasi Kinerja<br>4.Pelaporan Kinerja |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penyusunan Dokumen Perencanaan kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Audit Kinerja |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Peningkatan rata-rata nilai SAKIP sesuai target yang ditetapkan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif |
| 3 | Konsep/Definisi | Penilaian efektivitas sistem pengendalian internal dalam memastikan integritas, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik fungsi pengendalian internal dalam mengelola risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah satuan kerja dengan pengendalian intern pelaporan keuangan yang dinilai efektif<br>b. Jumlah total satuan kerja yang dievaluasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Reviu PIPK |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan status efektivitas: Efektif, Cukup Efektif, Tidak Efektif |
| 11 | Level Estimasi | Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Nilai telaah sejawat |
| 3 | Konsep/Definisi | Pengukuran tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar melalui evaluasi sejawat internal |
| 4 | Interpretasi | Mengukur sejauh mana telaah sejawat efektif dalam memperbaiki kualitas audit dan pengawasan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Telaah Sejawat =Jumlah (Bobot dari setiap komponen x Skor capaian komponen telaah sejawat) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Proses Telaah Sejawat |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Sejawat |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan aspek penilaian: Kepatuhan terhadap standar akuntansi, Kualitas penyajian laporan, Sistem pengendalian intern, Kepatuhan regulasi, Kualitas dokumentasi |
| 11 | Level Estimasi | Tahunan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar |
| 3 | Konsep/Definisi | Pengawasan yang berfokus pada identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau kegiatan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif dan tepat sasaran kegiatan pengawasan dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan pada standar yang berlaku |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus = (a/b) * 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah kegiatan pengawasan yang berbasis resiko dan sesuai standar<br>b. Jumlah total kegiatan pengawasan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Pengawasan Berbasis Risiko |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penyusunan Audit Berbasis Risiko dan Pedoman Kerja Pengawasan Tahunan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan pendekatan: Berbasis Risiko, Non-Risiko |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pengendalian risiko kecurangan |
| 3 | Konsep/Definisi | Menilai keberhasilan pengendalian terhadap potensi risiko kecurangan dalam pengelolaan sumber daya publik |
| 4 | Interpretasi | Mengukur sejauh mana program/kegiatan telah dilengkapi dengan sistem dan prosedur pengendalian yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian risiko kecurangan<br>b. Jumlah total satuan kerja |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Pengendalian Risiko Kecurangan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase penanganan risiko kecurangan |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur jumlah kasus yg memiliki risiko fraud yang ditindaklanjuti dan dibuktikan |
| 4 | Interpretasi | Mengukur sejauh mana upaya penanganan terhadap risiko kecurangan yang teridentifikasi telah dilakukan dengan baik |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah risiko kecurangan yang telah ditangani<br>b. Jumlah total risiko kecurangan yang teridentifikasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Penanganan Risiko Kecurangan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Pengamanan Aset Negara |
| 3 | Konsep/Definisi | Tingkat Pengamanan aset negara melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset yang bermasalah |
| 4 | Interpretasi | Mengukur efektivitas pengamanan terhadap aset negara yang bermasalah (sebanyak 27 kasus) untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah aset negara yang telah diamankan<br>b. Jumlah total aset negara yang dikuasai |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Pengamanan Aset Negara |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis aset: Tanah, Bangunan, Peralatan/Mesin, Aset Tak Berwujud |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kajian kebijakan yang dimanfaatkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi kajian yang digunakan dalam pengambilan keputusan |
| 4 | Interpretasi | Menggambarkan sejauh mana hasil kajian kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan oleh instansi |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah kajian kebijakan yang dimanfaatkan<br>b. Jumlah total kajian kebijakan yang disusun |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dokumen kajian yang digunakan sebagai dasar kebijakan/program<br>2. Jumlah seluruh dokumen kajian yang disusun dalam periode tertentu |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penyusunan, Diseminasi, dan Monitoring Pemanfaatan Kajian Kebijakan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Triwulan dan Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan substansi: Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pemerintah |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diverifikasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio yang menunjukkan seberapa efektif suatu entitas atau lembaga dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi atau temuan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, atau evaluasi) oleh Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau lembaga pengawas eksternal, yang kemudian hasilnya telah diverifikasi dan dinyatakan selesai (sesuai/ tuntas) oleh pihak pengawas |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang baik dari entitas yang diawasi. Ini mencerminkan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan kinerja, dan menuntaskan temuan pengawasan. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, resistensi terhadap perbaikan, atau kurangnya komitmen manajemen dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah yang ditemukan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi: Angka ini merujuk pada temuan audit/pengawasan yang telah diperbaiki oleh unit yang diawasi, dan perbaikan tersebut sudah diperiksa ulang dan dinyatakan tuntas oleh lembaga pengawas (seperti Inspektorat atau BPK).<br>(b) = Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah jumlah seluruh rekomendasi atau temuan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas yang harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi oleh Pihak Pengawas.<br>b. Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode Pengawasan. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Audit, Inspeksi, atau Evaluasi (Pengawasan).<br>- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Rekomendasi.<br>- Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Entitas yang Diawasi.<br>- Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Tindak Lanjut oleh Lembaga Pengawas (APIP/BPK/dll.). |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Triwulanan, dan Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Pengawasan: Audit Kinerja, Audit Keuangan, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Reviu, Evaluasi.<br>- Berdasarkan Status Tindak Lanjut: Selesai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti.<br>- Berdasarkan Entitas yang Diawasi: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota), Unit Kerja Teknis. |
| 11 | Level Estimasi | - Kementerian/Lembaga<br>- Unit Eselon I/II |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat yang diverifikasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase yang mengukur efektivitas dan responsivitas suatu instansi pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Persentase ini secara spesifik dihitung dari jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti, dan penyelesaiannya telah diverifikasi serta dinyatakan tuntas oleh sistem atau pihak yang berwenang. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa instansi memiliki sistem penanganan pengaduan yang efektif, responsif, dan akuntabel. Hal ini mencerminkan komitmen instansi untuk melayani masyarakat dan memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan/kritik. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam proses penanganan, seperti lamanya waktu respons, kurangnya koordinasi, atau kegagalan dalam menyelesaikan masalah hingga tuntas dan terverifikasi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas: Ini adalah jumlah pengaduan yang tidak hanya direspons, tetapi juga masalahnya sudah diselesaikan, dan penyelesaian tersebut telah diverifikasi serta dikonfirmasi tuntas oleh sistem atau unit pengelola pengaduan resmi.<br>(b) = Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah seluruh pengaduan sah yang masuk ke instansi atau sistem selama periode pelaporan dan memerlukan tindakan penyelesaian. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/ Tuntas dalam Periode Pelaporan.<br>b. Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode yang Sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Masyarakat.<br>- Proses Analisis, Disposisi, dan Tindak Lanjut Pengaduan oleh Unit Terkait.<br>- Kegiatan Verifikasi, Monitoring, dan Penutupan Pengaduan oleh Petugas Pengelola Pengaduan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan, Triwulanan dan tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Status Pengaduan: Selesai (Diverifikasi/Tuntas), Sedang Diproses, Belum Ditindaklanjuti.<br>- Berdasarkan Sektor/Isu Pengaduan: Pelayanan Publik, Infrastruktur, Hukum, Kepegawaian, dll.<br>- Berdasarkan Kanal Penerimaan: LAPOR!, Surat Resmi, Langsung, Media Sosial. |
| 11 | Level Estimasi | - Kementerian/Lembaga<br>- Unit Eselon I/II terkait pengaduan masyarakat |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTKN yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio yang menunjukkan proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), baik di bawah Kementerian Agama maupun kementerian/lembaga lain, yang telah mencapai skor atau nilai evaluasi minimal 75 dalam proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai 75 merupakan ambang batas kinerja minimal yang ditetapkan untuk menunjukkan komitmen dan keberhasilan signifikan dalam reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi mengindikasikan bahwa mayoritas PTKN telah berhasil mengimplementasikan program reformasi birokrasi yang efektif, dengan fokus kuat pada tata kelola yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang prima. Ini mencerminkan komitmen lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun integritas. Persentase yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam perbaikan manajemen risiko, pengendalian internal, dan penyediaan layanan yang bebas dari praktik korupsi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan ZI ≥75: Ini adalah angka PTKN yang telah diukur dan skor penilaian Pembangunan Zona Integritas-nya mencapai minimal 75 (atau lebih tinggi), yang menunjukkan komitmen signifikan terhadap Reformasi Birokrasi, WBK, dan WBBM.<br>(b) = Total Jumlah PTKN yang Wajib Melaksanakan Pembangunan ZI: Ini adalah keseluruhan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UIN, IAIN, STAIN, dll.) yang masuk dalam cakupan target pembangunan Zona Integritas. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas ≥ 75.<br>b. Total Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Wajib Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTKN.<br>- Survei dan Penilaian Mandiri (Internal) Pembangunan ZI oleh PTKN.<br>- Evaluasi dan Penilaian Eksternal Pembangunan ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atau Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Agama/ Kementerian terkait.<br>- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kualitas Pelayanan Publik. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis PTKN: UIN (Universitas Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), atau PTKN lainnya.<br>- Berdasarkan Status Penetapan ZI: Belum Diusulkan, Diusulkan WBK, Ditetapkan WBK, Ditetapkan WBBM.<br>- Berdasarkan Wilayah: Provinsi/Regional. |
| 11 | Level Estimasi | - Tingkat Kementerian Agama (agregasi nasional seluruh PTKN).<br>- Dapat diturunkan hingga tingkat individu PTKN sesuai hasil penilaian Zona Integritas. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa |
| 3 | Konsep/Definisi | Ukuran kinerja yang mencerminkan peningkatan kualitas dan kematangan layanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam memproses pengadaan barang/jasa. Peningkatan layanan ini diukur melalui perbandingan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ dari tahun berjalan terhadap skor tahun sebelumnya. Semakin tinggi skor, semakin matang dan prima layanan pengadaan yang diselenggarakan. |
| 4 | Interpretasi | Nilai persentase yang positif menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan pengadaan, yang meliputi kecepatan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Peningkatan ini selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi. Jika persentase negatif atau stagnan, ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap manajemen risiko, SDM, dan tata kelola pengadaan di lingkungan UKPBJ. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase Peningkatan = (((Tn) - (Tn−1)) / (Tn−1)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>- Nilai Indeks UKPBJ Tahun Berjalan (Tn): Nilai evaluasi kualitas layanan pengadaan barang/jasa (seringkali menggunakan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan/ITKP atau Tingkat Kematangan UKPBJ) pada periode yang sedang dilaporkan.<br>- Nilai Indeks UKPBJ Tahun Sebelumnya (Tn−1): Nilai evaluasi yang sama pada periode tahun sebelumnya, digunakan sebagai basis perbandingan.<br>* 100%: Digunakan untuk mengubah hasil perubahan menjadi bentuk persentase, yang menunjukkan seberapa besar kenaikan (atau penurunan) kualitas layanan pengadaan dibandingkan tahun lalu. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Berjalan (Tn).<br>b. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Sebelumnya (Tn−1). |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Survei dan Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ.<br>- Evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Penilaian Kematangan UKPBJ oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).<br>- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan.<br>- Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Digitalisasi Layanan Pengadaan (LPSE). |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Kriteria Penilaian ITKP/Kematangan (misalnya, Aspek Kebijakan, Aspek Proses Bisnis, Aspek SDM, Aspek Kelembagaan).<br>- Berdasarkan Jenis UKPBJ (Pusat/Daerah/Perguruan Tinggi). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80 |
| 3 | Konsep/Definisi | Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut. |
| 4 | Interpretasi | Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rerata Nilai = (a) / (b)<br><br>Keterangan<br>(a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/ kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih.<br>(b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.<br>b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/ Teknis Kepemimpinan).<br>- Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus).<br>- Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor Numerik (0-100) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu.<br>- Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis.<br>- Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu. |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>'- Unit Eselon I atau Satuan Kerja |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80 |
| 3 | Konsep/Definisi | Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut. |
| 4 | Interpretasi | Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rerata Nilai = (a) / (b)<br><br>Keterangan<br>(a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/ kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih.<br>(b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.<br>b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/ Teknis Kepemimpinan).<br>- Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus).<br>- Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor Numerik (0-100) |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu.<br>- Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis.<br>- Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu. |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>'- Unit Eselon I atau Satuan Kerja |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio yang mengukur proporsi total koleksi perpustakaan (berbentuk e-book, e-journal, hasil penelitian, atau dokumen digital lainnya) yang dimiliki oleh unit perpustakaan Kementerian Agama dan telah tersedia, terindeks, dan dapat diakses secara penuh (full-text) atau sebagian oleh pengguna/masyarakat melalui platform daring (online), seperti repositori, e-library, atau aplikasi khusus. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah bertransformasi secara digital, mampu memberikan akses yang luas, mudah, dan merata terhadap kekayaan intelektual dan literasi keagamaan kepada publik. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa banyak koleksi digital masih tersimpan secara lokal (offline) atau belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akses publik online. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara Online: Ini adalah hitungan (count) dari e-book, e-journal, atau dokumen digital lain yang dimiliki perpustakaan Kemenag dan sudah tersedia serta dapat diakses penuh melalui platform atau repositori online (seperti ELIPSKI).<br>(b) = Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki: Ini adalah seluruh hitungan (count) koleksi digital yang sudah dimiliki oleh perpustakaan Kemenag, termasuk yang mungkin masih tersimpan secara offline atau belum terindeks. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara Online (Terindeks dan Tersedia di Platform Daring).<br>b. Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki (Termasuk yang belum diakses online). |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Akuisisi, Digitalisasi, dan Pengemasan Ulang (Repackaging) Koleksi Perpustakaan.<br>- Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Perpustakaan Digital (E-Library/Repository).<br>- Kegiatan Metadata Entry dan Indeksasi Koleksi.<br>- Pelaporan Kinerja Layanan Perpustakaan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Koleksi: E-book, E-Journal, Laporan Penelitian, Karya Ilmiah Dosen/ Mahasiswa.<br>- Berdasarkan Sektor Keagamaan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.<br>- Berdasarkan Unit Pengelola: Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Balai Litbang Diklat. |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>'- Satuan Kerja |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Akreditasi Perpustakaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai numerik hasil penilaian resmi yang diberikan oleh lembaga akreditasi perpustakaan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/Perpusnas) terhadap perpustakaan di lingkungan Kementerian Agama. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti koleksi, sarana/ prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM), dan pengorganisasian, untuk menentukan kualitas dan standar operasional perpustakaan. Nilai akreditasi mencerminkan status mutu perpustakaan (misalnya: A/Unggul, B/Baik, C/Cukup, atau Tidak Terakreditasi). |
| 4 | Interpretasi | Nilai akreditasi yang tinggi (misalnya nilai A atau B) menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah memenuhi standar nasional atau bahkan melampauinya, memiliki tata kelola yang baik, koleksi yang memadai, dan pelayanan yang prima. Nilai ini menjadi indikator penting kualitas infrastruktur pendukung pendidikan dan literasi di lingkungan Kemenag. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan signifikan pada aspek-aspek pengelolaan perpustakaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Akreditasi = Skor Akhir Penilaian (diambil langsung dari Sertifikat Akreditasi) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Nilai Akhir Akreditasi Perpustakaan yang Diberikan oleh Lembaga Akreditasi. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pengajuan dan Persiapan Permohonan Akreditasi Perpustakaan oleh UPT/Satuan Kerja Kemenag.<br>- Asesmen Lapangan dan Penilaian oleh Asesor dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas).<br>- Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Penetapan Nilai oleh Lembaga Akreditasi. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor Numerik (Skala 0-100) atau Peringkat Mutu (A, B, C) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Berkala (3 - 5 Tahunan) sesuai masa berlaku akreditasi |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Perpustakaan: Perpustakaan Perguruan Tinggi (UIN/IAIN), Perpustakaan Sekolah (Madrasah), Perpustakaan Khusus (Litbang/Arsip).<br>- Berdasarkan Peringkat Mutu: A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), Belum Terakreditasi. |
| 11 | Level Estimasi | Satuan Kerja Perpustakaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam menyelesaikan penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan (termasuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan daerah, atau jenis peraturan lainnya) dalam periode waktu yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau rencana kerja sejenis |
| 4 | Interpretasi | Nilai persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa lembaga tersebut sangat efektif dan efisien dalam manajemen proses legislasi/regulasi, dengan sedikit kendala atau penundaan. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan, koordinasi antar instansi, dan kepatuhan terhadap jadwal kerja. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya masalah signifikan dalam proses legislasi, seperti penundaan, perubahan prioritas, atau kesulitan dalam mencapai konsensus. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan Sesuai Perencanaan: Ini adalah jumlah peraturan (seperti RUU, RPP, atau Perda) yang telah berhasil disahkan/ditetapkan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Program Legislasi (Prolegnas/Prolegda) atau rencana kerja awal.<br>(b) = Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan: Ini adalah total keseluruhan jumlah rancangan peraturan yang ditargetkan atau dimasukkan dalam daftar prioritas untuk diselesaikan dalam periode waktu tertentu. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan (disahkan/ditetapkan) dalam Periode Perencanaan.<br>b. Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan (ditargetkan) untuk Diselesaikan dalam Periode yang Sama. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penyusunan program legislasi/peraturan.<br>- Penyusunan, pembahasan, dan finalisasi rancangan peraturan.<br>- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Tingkat Peraturan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga<br>'- Berdasarkan Sektor/Bidang: Ekonomi, Sosial, Hukum & Keamanan, Pemerintahan Daerah, dan lain-lain<br>- Berdasarkan Jenis Program: Prolegnas Prioritas, Prolegnas Kumulatif Terbuka, Prolegda. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) terhadap jumlah penduduk usia 19–24 tahun. APK dapat melebihi 100% karena menghitung semua yang sedang bersekolah di jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan apakah usianya sesuai. |
| 4 | Interpretasi | APK Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang daya serap sistem pendidikan tinggi terhadap penduduk, termasuk mereka yang lebih tua atau lebih muda dari usia ideal pendidikan tinggi. Angka ini mencerminkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly<br>b = Jumlah penduduk usia 19–24 tahun |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly<br>b. Jumlah penduduk usia 19–24 tahun |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis perguruan tinggi: PTKN, PTKS |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lulusan satuan pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Ma'had Aly, yang memperoleh pekerjaan (formal/informal) dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah kelulusan. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan daya serap lulusan pendidikan tinggi keagamaan terhadap dunia kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterkaitan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada periode sebelumnya<br>b = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly pada periode sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu < 1 tahun setelah lulus<br>b. Jumlah total lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly pada periode yang sama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Tracer Studi oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahun |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan status kerja: Bekerja < 1 tahun, Bekerja ≥ 1 tahun, Belum Bekerja |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam daftar Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada peringkat kurang dari 1000 besar dunia, berdasarkan penilaian kontribusi PT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam mendukung SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola institusi, dan kemitraan. Semakin banyak PT yang masuk <1000 besar, semakin tinggi pengakuan terhadap kinerja keberlanjutan perguruan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah PTK/Ma'had Aly dalam peringkat THE Impact Rankings <1000 |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan SDGs Goal |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif pada institusi pendidikan tinggi keagamaan dari periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PTK meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan perguruan tinggi keagamaan swasta yang terakreditasi. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang keagamaan Islam. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan tinggi keagamaan. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin baik kinerja dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan. Indikator ini mencerminkan daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan serta efektivitas kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase peningkatan = ((a - b) / b) × 100 %<br>Keterangan:<br>a = jumlah mahasiswa tahun berjalan;<br>b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan<br>b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan EMIS PTK dan Ma'had Aly<br>- Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa oleh Setjen Kemenag dan Ditjen Pendis<br>- Monitoring dan Evaluasi Data Mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri (UIN, IAIN, STAIN)<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly<br><br>Berdasarkan Jenjang:<br>- S1/Sarjana<br>- S2/Magister<br>- S3/Doktor |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Ma'had Aly yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak PTK di Ma'had Aly yang telah melalui proses penjaminan mutu melalui sistem akreditasi formal, sehingga menjamin kompetensi, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah dipenuhi. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase=(a/b)×100%<br>Dengan:<br>a = Jumlah Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly yang telah terakreditasi<br>b = Jumlah total Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang telah terakreditasi<br>b. Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan akreditasi Ma'had Aly oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku)<br>- Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis<br>- Monitoring dan evaluasi mutu Ma'had Aly oleh Ditjen Pendis |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, dan/atau per lembaga Ma'had Aly |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/ internasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi kompetensi<br>b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Dosen PTK Bersertifikasi Kompetensi<br>2. Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Bersertifikasi Kompetensi<br>3. Jumlah Dosen PTK<br>4. Jumlah Tenaga Kependidikan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait.<br>2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri).<br>3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Bidang Keahlian: Sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang<br>- Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi (sarjana/diploma) sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal) |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rata-rata masa tunggu = (∑ waktu tunggu semua lulusan yang bekerja) / jumlah lulusan yang bekerja |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Rata-rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)<br>- Survei Penelusuran Alumni (Tracer Study) oleh perguruan tinggi<br>- Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Waktu (Bulan) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | - Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun).<br>- Periodik (tracer study perguruan tinggi biasanya 1–2 tahun setelah kelulusan) |
| 10 | Klasifikasi | Diploma, Sarjana, Magister, Doktor |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Sakernas |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya. |
| 4 | Interpretasi | Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase=(a/b)×100%<br>Dengan:<br>a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK<br>b = Jumlah total kerja sama aktif |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK<br>b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis<br>- Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu PTK<br>- Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.) |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) |
| 3 | Konsep/Definisi | Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola keberagamaan antaragama, antarwilayah, maupun antarperguruan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Indeks = (∑ skor aspek keagamaan individu / skor maksimum) × 100 |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa<br>2. Skor praktik ibadah mahasiswa<br>3. Skor pengetahuan ajaran agama<br>4. Skor perilaku sosial keagamaan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Indeks Keberagamaan Mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE Impact Rankings SDGs |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | THE 17 GOALS |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Times Higher Education |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memenuhi standar sarana prasarana |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi adalah proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki fasilitas akademik dan non-akademik sesuai ketentuan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai standar nasional pendidikan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dalam periode tertentu;<br>b = Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada dalam periode yang sama; |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi;<br>2. Jumlah total PTK/Ma'had Aly. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Verifikasi dan validasi data sarana prasarana melalui EMIS dan monitoring lapangan;<br>- Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarpras PTK;<br>- Evaluasi pemenuhan standar sarpras oleh Tim Penjaminan Mutu PTK. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase PTK yang menyediakan fasilitas pendidikan berbasis gender dan inklusif adalah ukuran proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak PTK yang menyediakan dukungan terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) penerima beasiswa |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa PTK penerima beasiswa adalah ukuran proporsi mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, lembaga keagamaan, atau sumber lain yang sah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase mahasiswa penerima beasiswa, menunjukkan semakin luasnya akses bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, baik dari pemerintah, institusi, maupun pihak swasta |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa penerima beasiswa<br>b = Jumlah mahasiswa |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa<br>2. Jumlah Mahasiswa |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pencatatan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Jenis Beasiswa: Akademik, Non-Akademik (olahraga/seni), Kebutuhan Ekonomi, Prestasi, dll. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I adalah proporsi mahasiswa baru atau mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang ditetapkan dalam kelompok UKT paling rendah (Kelompok I). Kelompok UKT I ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan dan/atau memiliki keterbatasan finansial, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan pendidikan tinggi di PTK. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang masuk dalam kategori UKT Kelompok I, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dan PTK dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I<br>b = Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I pada PTKN<br>2. Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada PTKN |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penerapan sistem UKT berbasis data ekonomi mahasiswa<br>- Verifikasi dan validasi ekonomi calon mahasiswa baru (UKT online/offline)<br>- Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan afirmatif UKT |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Tahun Masuk:<br>- Angkatan 202X;<br>- Angkatan 202X-1, dst. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan animo mahasiswa baru |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase peningkatan animo mahasiswa baru adalah perubahan persentase jumlah pendaftar baru pada suatu institusi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya |
| 4 | Interpretasi | Variabel ini menunjukkan seberapa besar minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada institusi tersebut. Peningkatan nilai menunjukkan daya tarik institusi yang meningkat, sedangkan penurunan mengindikasikan menurunnya minat calon mahasiswa |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah pendaftar tahun berjalan<br>b = Jumlah pendaftar tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah pendaftar tahun berjalan<br>2. Jumlah pendaftar tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Rekrutmen Calon Mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/ Katolik/Hindu/Buddha) berkualitas |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas adalah rasio antara jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah terakreditasi Unggul/A atau memiliki peringkat terbaik, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa baru yang diterima di PTK pada periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur ketersediaan akses dan pilihan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa baru. Semakin tinggi proporsi mahasiswa baru yang memilih dan diterima di PTK berkualitas, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penyediaan pilihan institusi yang terpercaya. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik.<br>b = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik.<br>2. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penghitungan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa baru PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa baru PTK yang berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang terdaftar di program studi bidang Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) dengan status akreditasi "Unggul" dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak mahasiswa baru di PTK yang memilih program studi STEM dengan mutu akademik tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan terhadap kebutuhan iptek. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Proporsi = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul<br>b = Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa baru di prodi STEM terakreditasi unggul<br>2. Jumlah total mahasiswa baru di prodi STEM |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh perguruan tinggi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Ditjen Pendidikan Islam |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terpetakan berdasarkan keunggulannya |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya adalah banyaknya PTK (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah diklasifikasikan menurut bidang atau capaian unggulan, seperti riset, inovasi, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan mutu akademik. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi jumlah PTK yang terpetakan menunjukkan semakin baiknya pemetaan mutu dan diferensiasi perguruan tinggi keagamaan berdasarkan keunggulan spesifiknya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pembinaan mutu. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Jumlah = Banyaknya PTK yang telah dikategorikan sesuai hasil pemetaan keunggulan berdasarkan kriteria mutu dan capaian unggulan. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Kegiatan pemetaan dan klasifikasi PTK oleh Kementerian Agama<br>- Survei dan asesmen potensi unggulan PTK<br>- Penyusunan profil kelembagaan PTK |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Prodi PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan akreditasi unggul |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase Prodi PTK yang mendapatkan akreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi "Unggul" dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi di perguruan tinggi keagamaan yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik di lingkungan PTK. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang berakreditasi unggul<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang berakreditasi unggul<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan oleh EMIS |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Di PDDikti |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/ Buddha) yang terakreditasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase LPTK PTK yang terakreditasi adalah ukuran proporsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memperoleh status akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak LPTK di PTK yang memenuhi standar mutu kelembagaan dan tata kelola pendidikan, mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan calon tenaga pendidik keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase=(a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah LPTK yang telah terakreditasi.<br>b = Jumlah LPTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi.<br>2. Jumlah LPTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendampingan dan fasilitasi akreditasi LPTK;<br>- Penguatan sistem penjaminan mutu internal;<br>- Verifikasi data akreditasi melalui EMIS dan BAN-PT/LAM. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Peringkat Akreditasi:<br>- Unggul/A<br>- Baik Sekali/B<br>- Baik/C |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/ Buddha) yang terakreditasi unggul |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase program studi PPG PTK yang terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi Program Profesi Guru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi PPG di PTK yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru keagamaan dan kesiapan lembaga dalam menghasilkan pendidik profesional. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Peningkatan dan Fasilitasi Akreditasi Unggul Program Studi PPG (melalui pembinaan, pendampingan, workshop, penyusunan dokumen akreditasi, dan evaluasi diri).<br>- Pendataan dan Rekapitulasi Program Studi PPG yang telah terakreditasi (termasuk status akreditasi aktif) di bawah Kementerian Agama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen berkualifikasi akademik S3<br>a. Total<br>b. STEM<br>c. Non STEM |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 adalah rasio jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total dosen aktif di perguruan tinggi, baik secara keseluruhan (total), di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), maupun di bidang non-STEM. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas sumber daya dosen yang berperan dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Total = ((a + b) / c) × 100%<br>STEM = (a / c) × 100%<br>Non-STEM = (b / c) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen S3 STEM<br>b = Jumlah dosen S3 non-STEM<br>c = Jumlah dosen |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen S3 STEM<br>2. Jumlah dosen S3 non-STEM<br>3. Jumlah dosen |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus adalah rasio jumlah dosen tetap yang terlibat dalam aktivitas profesional di luar perguruan tinggi seperti industri, lembaga riset, pemerintahan, organisasi internasional, atau kegiatan pengabdian masyarakat, terhadap jumlah total dosen tetap. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin banyak dosen yang memiliki pengalaman praktis dan relevan di dunia luar kampus, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus<br>b = Jumlah dosen tetap |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus<br>2. Jumlah dosen tetap |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Aktivitas Dosen atau Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar adalah rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik tersebut terhadap jumlah total dosen tetap di perguruan tinggi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik tingkat profesionalisme, kepakaran, dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar<br>b = jumlah total dosen tetap |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar<br>2. Jumlah total dosen tetap |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis Jabatan: Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/ internasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur sejauh mana dosen PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh program peningkatan kompetensi<br>b = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program peningkatan kompetensi<br>2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait.<br>2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri).<br>3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase dosen PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase dosen PTK yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional adalah ukuran proporsi dosen pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang berpartisipasi sebagai pembicara, pemakalah, atau panelis pada forum ilmiah tingkat nasional dan internasional. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin aktif dan diakui dosen PTK dalam jejaring ilmiah nasional dan global, mencerminkan peningkatan kapasitas akademik, reputasi, dan kontribusi ilmiah perguruan tinggi keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional<br>b = Jumlah dosen aktif yang ada di PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional<br>2. Jumlah dosen aktif yang ada di PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pendataan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah<br>- Fasilitasi dan insentif publikasi ilmiah dan partisipasi konferensi<br>- Evaluasi kegiatan tridarma dosen |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Konferensi:<br>- Nasional<br>- Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Rasio dosen asing PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) dengan dosen dalam negeri |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK adalah perbandingan antara jumlah dosen berkewarganegaraan asing dengan jumlah dosen warga negara Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha). |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar keterlibatan dosen asing dalam kegiatan akademik PTK, yang mencerminkan peningkatan kolaborasi internasional dan pengakuan global terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio = 1 : (b / a)<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah dosen asing aktif di PTK<br>b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a = Jumlah dosen asing aktif di PTK<br>b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Program visiting professor atau exchange lecturer<br>- Skema rekrutmen dosen asing<br>- Kerja sama internasional PTK (MoU/MoA) |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada jenjang jabatan fungsional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK pada jenjang jabatan fungsional adalah ukuran tingkat kesesuaian antara jumlah tenaga kependidikan yang telah menduduki jabatan fungsional (misalnya arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium, analis kepegawaian, dan sejenisnya) dengan jumlah formasi atau kebutuhan ideal di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha). |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan sesuai jabatan fungsional yang dibutuhkan, mencerminkan efektivitas manajemen SDM dan profesionalitas tenaga kependidikan di lingkungan PTK. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional<br>b = Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional<br>2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | a. Pendataan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan / Kementerian<br>b. Analisis Kebutuhan Formasi oleh BKN / Kemdikbudristek / Pemerintah Daerah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Data diperbarui secara berkala (tahunan) dengan cut-off per tanggal 30 Juni setiap tahun. |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi lulusan program sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah mengikuti program pembelajaran di luar kampus selama minimal satu semester penuh, relatif terhadap total lulusan program sarjana (S1) pada periode yang sama |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur keberhasilan Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi lulusan S1 untuk memiliki pengalaman praktis dan relevan di luar lingkungan akademik. Semakin tinggi persentase lulusan dengan pengalaman di luar kampus, menunjukkan semakin kuatnya adaptasi kurikulum dan program pendidikan PTK terhadap kebutuhan dunia kerja dan dinamika masyarakat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus.<br>b = Jumlah lulusan PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus.<br>2. Jumlah lulusan PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan dan Fasilitasi Program Pembelajaran di Luar Kampus (Magang, KKN, Pertukaran Mahasiswa, dll.) dan Pendataan Partisipan serta Lulusan dari Program Tersebut.<br>- Proses Yudisium dan Pendataan Seluruh Lulusan Program Sarjana (S1) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki Pusat Pengembangan Karir |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) di bawah Kementerian Agama yang memiliki unit atau fasilitas yang secara khusus memberikan layanan pengembangan karir kepada mahasiswa dan alumni, relatif terhadap total PTK yang ada |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir di PTK. Semakin tinggi persentase PTK yang memiliki pusat pengembangan karir, menunjukkan semakin besar perhatian dan upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan lulusan PTK untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karir<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya<br>2. Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Identifikasi dan verifikasi keberadaan pusat pengembangan karir di setiap PTK (melalui survei, pendataan, atau laporan dari PTK).<br>- Pendataan dan rekapitulasi total PTK di bawah Kementerian Agama. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase lulusan PTK yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan:<br>a. Total;<br>b. Karyawan atau Wirausaha |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan adalah proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau merintis usaha (wirausaha) dalam periode waktu tertentu setelah kelulusan, dibandingkan dengan total lulusan yang lulus pada periode yang sama. Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja atau siap berwirausaha. Semakin tinggi persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun wirausaha, menunjukkan semakin baik kualitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pembinaan karir yang dilakukan oleh PTK. Ini mengindikasikan bahwa lulusan PTK memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Peningkatan indikator ini berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan angka serapan lulusan, pengurangan pengangguran terdidik, serta peningkatan kontribusi PTK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = { (a + b) / c } × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>b = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>c = Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>2. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan.<br>3. Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Tracer Study PTK<br>- Program Career Center dan Alumni<br>- Pelatihan kewirausahaan dan magang<br>- Inkubator bisnis mahasiswa/alumni |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Pekerjaan: Karyawan, Wirausaha |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase tenaga kerja lulusan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) bidang STEM |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi angkatan kerja yang memiliki gelar pendidikan tinggi (D3, D4/Sarjana Terapan, S1, S2, S3) dari program studi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), relatif terhadap total angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur ketersediaan SDM berkualitas di sektor-sektor kritis yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangs |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan tinggi nasional mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor strategis di bidang STEM. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan ketersediaan SDM STEM yang memadai untuk mendukung inovasi, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong minat dan kapasitas generasi muda pada disiplin ilmu yang penting untuk masa depan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK bidang STEM.<br>b = Jumlah lulusan PTK. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK bidang STEM.<br>2. Jumlah lulusan PTK. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau survei ketenagakerjaan lainnya yang spesifik |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Bidang STEM:<br>- Sains (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistika, dll.)<br>- Teknologi (Informatika, Sistem Informasi, dll.)<br>- Teknik/Rekayasa (Sipil, Elektro, Mesin, dll.)<br>- Matematika Murni & Aktuaria |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Sakernas |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik, relatif terhadap total lulusan pada periode yang sama. Indikator ini mencerminkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan pengakuan kompetensi yang diakui secara profesional. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa program pendidikan di PTK semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan lulusannya memiliki daya saing yang kuat. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi.<br>b = Jumlah lulusan PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi.<br>2. Jumlah lulusan PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Fasilitasi program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/lulusan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan pendataan lulusan yang bersertifikat kompetensi.<br>- Pendataan dan rekapitulasi total lulusan PTK di bawah Kementerian Agama |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Lembaga Sertifikasi:<br>- LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) terlisensi BNSP<br>- Asosiasi Profesi<br>- Lembaga Sertifikasi Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio outbound per inbound mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri (outbound) dengan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke dalam PTK tersebut (inbound) dalam periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat internasionalisasi dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan dengan dinamika global. Semakin seimbang rasio antara mahasiswa outbound dan inbound (mendekati 1:1), menunjukkan semakin kuatnya daya tarik dan kemampuan PTK dalam menciptakan ekosistem akademik yang inklusif secara internasional, serta semakin aktifnya mahasiswa PTK dalam mencari pengalaman global. Peningkatan rasio ini mencerminkan pengakuan PTK di kancah internasional, pengayaan perspektif multikultural di kampus, serta peningkatan kompetensi global mahasiswa. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global, pengembangan jejaring internasional, dan peningkatan reputasi PTK sebagai pusat keunggulan pendidikan keagamaan. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio Outbound per Inbound = 1 : (b / a)<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa outbound PTK<br>b = Jumlah mahasiswa inbound PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa outbound PTK<br>2. Jumlah mahasiswa inbound PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll)<br>- Student exchange antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri<br>- Program KKN internasional / transfer kredit luar negeri |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi adalah proporsi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti kegiatan atau program di luar kurikulum inti program studi mereka, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa yang aktif di PTK dalam periode tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, soft skills, dan pengalaman di luar bidang keilmuan utama. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur tingkat fleksibilitas kurikulum dan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan diri di luar bidang utama, yang krusial untuk meningkatkan relevansi lulusan. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, menunjukkan semakin kuatnya upaya PTK dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan kesempatan untuk mengembangkan soft skills, kemandirian, serta jejaring. Ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kompetensi lintas disiplin. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b ) × 100 %<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu.<br>b = Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a: Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu.<br>b: Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa)<br>- Magang (MBKM, kerja praktik, dll)<br>- KKN, pengabdian masyarakat<br>- Program pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan kompetisi mahasiswa |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Kegiatan:<br>- Program MBKM (spesifik: Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, dll.)<br>- Organisasi Kemahasiswaan (Internal/Eksternal)<br>- Kompetisi/Lomba<br>- Pengabdian Masyarakat<br>- Karya Ilmiah/Kreativitas (di luar tugas akhir prodi) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, seni, atau olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam periode waktu tertentu. Kompetisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, olimpiade sains, lomba inovasi, debat, kompetisi pemrograman, turnamen olahraga, dan festival seni. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan daya saing mahasiswa PTK di kancah nasional dan internasional. Persentase yang tinggi menunjukkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa di luar kurikulum formal, serta reputasi PTK dalam menghasilkan talenta-talenta berdaya saing global. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase peningkatan = ((a - b) / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan<br>b = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan<br>2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pendataan Partisipasi Mahasiswa dalam Kompetisi (PPMK) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi jumlah PTK yang terlibat aktif dalam kolaborasi atau kemitraan dengan entitas eksternal (dunia usaha dan industri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional) dibandingkan dengan total keseluruhan PTK. Kerja sama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti magang industri, proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan, program pengabdian masyarakat, atau pertukaran keahlian. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mencerminkan tingkat keterbukaan dan relevansi institusi pendidikan dengan kebutuhan eksternal. Semakin tinggi persentase ini, semakin kuat integrasi institusi pendidikan dengan lingkungan kerja, industri, dan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase PTK yang bekerjasama = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional<br>b = Jumlah PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional<br>b = Jumlah PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Survei Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>Pendataan Potensi dan Kemitraan Institusi Pendidikan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang:<br>a. Pendidikan dan pengajaran<br>b. Penelitian dan publikasi<br>c. Pengabdian kepada masyarakat |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja sama dimaksud mencakup perjanjian, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen resmi antara perguruan tinggi/lembaga dengan mitra, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan sesuai bidang. |
| 4 | Interpretasi | Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak kerja sama yang benar-benar ditindaklanjuti dan berdampak, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya banyak kesepakatan yang belum terlaksana secara nyata. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati<br><br>Persentase kerjasama bidang penelitian dan publikasi: (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati<br><br>Persentase kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat: (a / b) × 100%<br>Keterangan:<br>a = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti<br>b = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti<br>2. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati<br>3. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti<br>4. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati<br>5. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti<br>6. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pencatatan dan Pemantauan Kerjasama (Monitoring and Evaluation of Partnerships)<br>2. Manajemen Kerjasama (Partnership Management)<br>3. Pelaporan Kinerja Kerjasama (Partnership Performance Reporting) |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan atau umum yang berpartisipasi dalam program peningkatan literasi Kitab Suci, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan dan instansi keagamaan. |
| 4 | Interpretasi | Peningkatan nilai menunjukkan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan akses dan kesempatan dalam penguatan spiritualitas dan nilai-nilai kebajikan lintas agama. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus: (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu<br>b = Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu<br>2. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pengembangan dan pelaksanaan program literasi Kitab Suci di PTKI/PTU<br>2. Pelatihan dan workshop peningkatan pemahaman kitab suci<br>3. Kegiatan pembinaan keagamaan berbasis kitab suci<br>4. Kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan dalam literasi kitab<br>5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran kitab suci |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan adalah rasio jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi keagamaan yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan dibandingkan dengan total prodi yang diukur pada periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak prodi yang berhasil menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum atau interdisipliner, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan<br>b = Jumlah prodi yang diukur |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan<br>b = Jumlah prodi yang diukur |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Evaluasi kurikulum dan implementasi integrasi keilmuan<br>2. Workshop/pelatihan pengembangan kurikulum integratif<br>3. Pendampingan dan monitoring prodi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase PTK yang membentuk dan mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu-isu lokal seperti moderasi beragama, toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai keagamaan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan PTK dalam merespons dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis riset dan advokasi. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus: (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal<br>b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal<br>2. Jumlah PTK yang menjadi sasaran program |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pembentukan pusat studi keagamaan berbasis lokal<br>2. Penelitian berbasis kebutuhan sosial-keagamaan lokal<br>3. Pengabdian masyarakat berbasis hasil kajian keagamaan<br>4. Penerbitan hasil kajian tematik keagamaan<br>5. Kemitraan PTK dengan pemda/lembaga masyarakat dalam bidang keagamaan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Jenis Institusi:<br>- PTK Negeri<br>- PTK Swasta<br>- Ma'had Aly |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional di Kementerian Agama adalah perbandingan jumlah karya tulis ilmiah ilmiah yang terakreditasi nasional (minimal SINTA 1 atau SINTA 2) yang dikelola oleh unit kerja atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, terhadap total jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Agama |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan kualitas dan pengakuan nasional atas karya tulis ilmiah-karya tulis ilmiah ilmiah di bawah pengelolaan Kementerian Agama |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>(a / b) x 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah karya tulis ilmiah terakreditasi nasional (SINTA 1 atau 2)<br>b = Total karya tulis ilmiahyang dikelola |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah karya tulis ilmiah yang terakreditasi nasional (SINTA 1 atau SINTA 2)<br>2. Total jumlah karya tulis ilmiah yang dikelola |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Pengelolaan dan Akreditasi karya tulis ilmiah Ilmiah |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | 1. SINTA 1 (Tertinggi)<br>2. SINTA 2<br>3. SINTA 3<br>4. SINTA 4 ke bawah |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Di Scopus |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi adalah proporsi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen/peneliti PTK pada jurnal bereputasi internasional yang telah mendapat sitasi (citation) dari artikel lain dalam periode tertentu.<br><br>Jurnal bereputasi internasional adalah jurnal yang terindeks dalam database internasional yang diakui seperti Scopus, Web of Science (WoS), atau database internasional lainnya yang memiliki sistem peer-review yang ketat.<br>Sitasi adalah rujukan atau referensi yang dibuat oleh artikel lain terhadap artikel yang dimaksud, yang menunjukkan dampak dan kontribusi artikel tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel yang disitasi menunjukkan kualitas, relevansi, dan pengaruh penelitian terhadap komunitas ilmiah internasional. |
| 4 | Interpretasi | Indikator ini mengukur dampak dan kualitas publikasi ilmiah PTK di tingkat internasional. Semakin tinggi persentase artikel yang disitasi, menunjukkan semakin baik kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan oleh PTK. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100 % |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi;<br>b. Jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh PTK. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Insentif Publikasi Ilmiah Internasional;<br>- Bantuan Penulisan Artikel Bereputasi;<br>- Pelatihan Sitasi dan Manajemen Referensi Ilmiah. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Quartile Jurnal (SJR/JCR):<br>- Q1 (Quartile 1);<br>- Q2 (Quartile 2);<br>- Q3 (Quartile 3);<br>- Q4 (Quartile 4). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Perguruan Tinggi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase jumlah karya tulis ilmiah yang mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan berhasil terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, dibandingkan dengan total karya tulis ilmiah yang dihasilkan dalam periode tertentu. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin kuat kontribusi akademik civitas akademika dalam mendukung target SDGs melalui publikasi yang diakui secara internasional. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus = Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Penelitian dosen dan mahasiswa berfokus SDGs<br>2. Workshop penulisan artikel ilmiah bereputasi<br>3. Pendampingan publikasi internasional |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan THE 17 GOALS |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen adalah perbandingan antara jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional dengan jumlah dosen tetap di perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin produktif dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, yang mencerminkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Agama |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rasio: 1 : (b / a)<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan<br>b = Jumlah dosen tetap |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan<br>2. Jumlah dosen tetap |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen PTKIN/PTKIS<br>2. Program Insentif Publikasi Ilmiah<br>3. Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen |
| 8 | Ukuran/Satuan | Rasio |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Quartil Artikel: (Q1, Q2, Q3, dan Q4) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Ya |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | Di Scopus |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi adalah total hak paten yang telah resmi diberikan (granted) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin banyak jumlah paten yang granted, semakin menunjukkan meningkatnya kapasitas inovasi, riset terapan, dan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemanfaatannya untuk masyarakat |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus:<br>Jumlah Paten Granted (disetujui DJKI) dalam satu tahun |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Jumlah paten granted yang diperoleh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di PTKIN/PTKIS<br>2. Program Pendaftaran dan Fasilitasi Paten Perguruan Tinggi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 8 | Ukuran/Satuan | Unit (paten) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Kategori Jumlah Paten Granted<br>1. Rendah (0 – 2 paten granted)<br>2. Sedang (3 – 5 paten granted)<br>3. Tinggi (> 5 paten granted) |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase hasil riset dan inovasi adalah rasio antara jumlah hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masyarakat terhadap total hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi keagamaan dalam periode tertentu |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak hasil riset dan inovasi yang aplikatif, relevan, dan bermanfaat bagi DUDI/masyarakat, menandakan peningkatan kualitas riset terapan di perguruan tinggi |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat<br>b = Jumlah hasil riset |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat<br>2. Jumlah hasil riset |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Kegiatan Penelitian dan Inovasi Terapan<br>2. Program Hilirisasi Hasil Riset<br>3. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan DUDI/Komunitas Masyarakat |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan Pihak Pemanfaat:<br>- Dunia Usaha (Perusahaan, Startup)<br>- Dunia Industri<br>- Masyarakat (Komunitas, Kelompok Tani, UMKM)<br>- Pemerintah/Lembaga Publik |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase LPPM yang mendapatkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini menunjukkan makin banyak LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya, sebagai cerminan perbaikan kualitas manajemen riset dan pengabdian di perguruan tinggi |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a = Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya<br>b = Jumlah LPPM PTK |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya<br>2. Jumlah LPPM PTK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | 1. Pelatihan/Workshop Manajemen Riset dan Pengabdian Masyarakat<br>2. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM<br>3. Program Penguatan Tata Kelola LPPM<br>4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan LPPM |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persen |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data S | Tahunan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi<br>b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia<br>2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi<br>3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia<br>4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur TIK |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra<br>b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data<br>2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai<br>3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data Prioritas Pembangunan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Badan Kepegawaian Negara |
| 2 | Nama Indikator | Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85 |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur kualitas Unit Penilaian Kompetensi (UPK) di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai akreditasi mencerminkan standar mutu dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ASN. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi rerata nilai akreditasi, semakin menunjukkan bahwa UPK Kementerian Agama telah memenuhi standar mutu nasional. Nilai minimal 85 menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rerata = (Σa) / b<br><br>Keterangan:<br>a. Nilai akreditasi masing-masing Unit Penilaian Kompetensi<br>b. Jumlah Unit Penilaian Kompetensi yang dinilai oleh BKN |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Nilai akreditasi masing-masing UPK oleh BKN<br>2. Jumlah UPK Kementerian Agama yang telah mengikuti proses akreditasi<br>3. Standar akreditasi dari BKN (misalnya aspek kelembagaan, SDM, sarana, dan metode asesmen) |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi dan Akreditasi Unit Penilaian Kompetensi ASN |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan fungsi pemerintahan: Manajemen ASN / Pengembangan Kompetensi / Reformasi Birokrasi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Keuangan |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| 3 | Konsep/Definisi | Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai dari Kementerian Keuangan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Nilai dari Kemenkeu |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan aspek penilaian: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Efektivitas, Efisiensi, dan Kepatuhan terhadap Regulasi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Efektivitas dan Efisiensi Program yang mencapai tujuan |
| 3 | Konsep/Definisi | Penilaian terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian target output/outcome dari program/kegiatan yang di awasi melalui Program Pengawasan Intern |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Mengukur seberapa efektif dan efisien suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah program yang dinilai efektif dan efisien serta mencapai tujuan<br>b. Jumlah total program yang dilaksanakan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Program yang Efektif, Anggaran |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Program yang efektif dan efisien mencapai target yang ditentukan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian PAN-RB |
| 2 | Nama Indikator | Nilai SAKIP satuan kerja |
| 3 | Konsep/Definisi | Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja dan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi |
| 4 | Interpretasi | Mengukur seberapa baik satuan kerja dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja sesuai dengan SAKIP |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Peningkatan rata-rata nilai SAKIP satuan kerja = rata-rata nilai SAKIP satuan kerja yang dievaluasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1.Perencanaan Kinerja<br>2.Pengukuran Kinerja<br>3.Evaluasi Kinerja<br>4.Pelaporan Kinerja |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penyusunan Dokumen Perencanaan kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Audit Kinerja |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Peningkatan rata-rata nilai SAKIP sesuai target yang ditetapkan |
| 11 | Level Estimasi | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif |
| 3 | Konsep/Definisi | Penilaian efektivitas sistem pengendalian internal dalam memastikan integritas, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik fungsi pengendalian internal dalam mengelola risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah satuan kerja dengan pengendalian intern pelaporan keuangan yang dinilai efektif<br>b. Jumlah total satuan kerja yang dievaluasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Reviu PIPK |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan status efektivitas: Efektif, Cukup Efektif, Tidak Efektif |
| 11 | Level Estimasi | Provinsi |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Nilai telaah sejawat |
| 3 | Konsep/Definisi | Pengukuran tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar melalui evaluasi sejawat internal |
| 4 | Interpretasi | Mengukur sejauh mana telaah sejawat efektif dalam memperbaiki kualitas audit dan pengawasan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Telaah Sejawat =Jumlah (Bobot dari setiap komponen x Skor capaian komponen telaah sejawat) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Proses Telaah Sejawat |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Evaluasi Sejawat |
| 8 | Ukuran/Satuan | Nilai |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan aspek penilaian: Kepatuhan terhadap standar akuntansi, Kualitas penyajian laporan, Sistem pengendalian intern, Kepatuhan regulasi, Kualitas dokumentasi |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 11 | Level Estimasi | Tahunan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar |
| 3 | Konsep/Definisi | Pengawasan yang berfokus pada identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau kegiatan. |
| 4 | Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif dan tepat sasaran kegiatan pengawasan dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan pada standar yang berlaku |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rumus = (a/b) * 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah kegiatan pengawasan yang berbasis resiko dan sesuai standar<br>b. Jumlah total kegiatan pengawasan |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Pengawasan Berbasis Risiko |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penyusunan Audit Berbasis Risiko dan Pedoman Kerja Pengawasan Tahunan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan pendekatan: Berbasis Risiko, Non-Risiko |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase pengendalian risiko kecurangan |
| 3 | Konsep/Definisi | Menilai keberhasilan pengendalian terhadap potensi risiko kecurangan dalam pengelolaan sumber daya publik |
| 4 | Interpretasi | Mengukur sejauh mana program/kegiatan telah dilengkapi dengan sistem dan prosedur pengendalian yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian risiko kecurangan<br>b. Jumlah total satuan kerja |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Pengendalian Risiko Kecurangan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase penanganan risiko kecurangan |
| 3 | Konsep/Definisi | Mengukur jumlah kasus yg memiliki risiko fraud yang ditindaklanjuti dan dibuktikan |
| 4 | Interpretasi | Mengukur sejauh mana upaya penanganan terhadap risiko kecurangan yang teridentifikasi telah dilakukan dengan baik |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah risiko kecurangan yang telah ditangani<br>b. Jumlah total risiko kecurangan yang teridentifikasi |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Penanganan Risiko Kecurangan |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase Pengamanan Aset Negara |
| 3 | Konsep/Definisi | Tingkat Pengamanan aset negara melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset yang bermasalah |
| 4 | Interpretasi | Mengukur efektivitas pengamanan terhadap aset negara yang bermasalah (sebanyak 27 kasus) untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah aset negara yang telah diamankan<br>b. Jumlah total aset negara yang dikuasai |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Pengamanan Aset Negara |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan jenis aset: Tanah, Bangunan, Peralatan/Mesin, Aset Tak Berwujud |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase kajian kebijakan yang dimanfaatkan |
| 3 | Konsep/Definisi | Proporsi kajian yang digunakan dalam pengambilan keputusan |
| 4 | Interpretasi | Menggambarkan sejauh mana hasil kajian kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan oleh instansi |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = (a / b) × 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah kajian kebijakan yang dimanfaatkan<br>b. Jumlah total kajian kebijakan yang disusun |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah dokumen kajian yang digunakan sebagai dasar kebijakan/program<br>2. Jumlah seluruh dokumen kajian yang disusun dalam periode tertentu |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Penyusunan, Diseminasi, dan Monitoring Pemanfaatan Kajian Kebijakan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Triwulan dan Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | Berdasarkan substansi: Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pemerintah |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diverifikasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio yang menunjukkan seberapa efektif suatu entitas atau lembaga dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi atau temuan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, atau evaluasi) oleh Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau lembaga pengawas eksternal, yang kemudian hasilnya telah diverifikasi dan dinyatakan selesai (sesuai/ tuntas) oleh pihak pengawas |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang baik dari entitas yang diawasi. Ini mencerminkan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan kinerja, dan menuntaskan temuan pengawasan. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, resistensi terhadap perbaikan, atau kurangnya komitmen manajemen dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah yang ditemukan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi: Angka ini merujuk pada temuan audit/pengawasan yang telah diperbaiki oleh unit yang diawasi, dan perbaikan tersebut sudah diperiksa ulang dan dinyatakan tuntas oleh lembaga pengawas (seperti Inspektorat atau BPK).<br>(b) = Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah jumlah seluruh rekomendasi atau temuan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas yang harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi oleh Pihak Pengawas.<br>b. Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode Pengawasan. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Audit, Inspeksi, atau Evaluasi (Pengawasan).<br>- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Rekomendasi.<br>- Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Entitas yang Diawasi.<br>- Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Tindak Lanjut oleh Lembaga Pengawas (APIP/BPK/dll.). |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Triwulanan, dan Tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Pengawasan: Audit Kinerja, Audit Keuangan, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Reviu, Evaluasi.<br>- Berdasarkan Status Tindak Lanjut: Selesai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti.<br>- Berdasarkan Entitas yang Diawasi: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota), Unit Kerja Teknis. |
| 11 | Level Estimasi | - Kementerian/Lembaga<br>- Unit Eselon I/II |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat yang diverifikasi |
| 3 | Konsep/Definisi | Persentase yang mengukur efektivitas dan responsivitas suatu instansi pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Persentase ini secara spesifik dihitung dari jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti, dan penyelesaiannya telah diverifikasi serta dinyatakan tuntas oleh sistem atau pihak yang berwenang. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa instansi memiliki sistem penanganan pengaduan yang efektif, responsif, dan akuntabel. Hal ini mencerminkan komitmen instansi untuk melayani masyarakat dan memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan/kritik. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam proses penanganan, seperti lamanya waktu respons, kurangnya koordinasi, atau kegagalan dalam menyelesaikan masalah hingga tuntas dan terverifikasi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas: Ini adalah jumlah pengaduan yang tidak hanya direspons, tetapi juga masalahnya sudah diselesaikan, dan penyelesaian tersebut telah diverifikasi serta dikonfirmasi tuntas oleh sistem atau unit pengelola pengaduan resmi.<br>(b) = Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah seluruh pengaduan sah yang masuk ke instansi atau sistem selama periode pelaporan dan memerlukan tindakan penyelesaian. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/ Tuntas dalam Periode Pelaporan.<br>b. Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode yang Sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Masyarakat.<br>- Proses Analisis, Disposisi, dan Tindak Lanjut Pengaduan oleh Unit Terkait.<br>- Kegiatan Verifikasi, Monitoring, dan Penutupan Pengaduan oleh Petugas Pengelola Pengaduan |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Bulanan, Triwulanan dan tahunan |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Status Pengaduan: Selesai (Diverifikasi/Tuntas), Sedang Diproses, Belum Ditindaklanjuti.<br>- Berdasarkan Sektor/Isu Pengaduan: Pelayanan Publik, Infrastruktur, Hukum, Kepegawaian, dll.<br>- Berdasarkan Kanal Penerimaan: LAPOR!, Surat Resmi, Langsung, Media Sosial. |
| 11 | Level Estimasi | - Kementerian/Lembaga<br>- Unit Eselon I/II terkait pengaduan masyarakat |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase PTKN yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio yang menunjukkan proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), baik di bawah Kementerian Agama maupun kementerian/lembaga lain, yang telah mencapai skor atau nilai evaluasi minimal 75 dalam proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai 75 merupakan ambang batas kinerja minimal yang ditetapkan untuk menunjukkan komitmen dan keberhasilan signifikan dalam reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. |
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi mengindikasikan bahwa mayoritas PTKN telah berhasil mengimplementasikan program reformasi birokrasi yang efektif, dengan fokus kuat pada tata kelola yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang prima. Ini mencerminkan komitmen lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun integritas. Persentase yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam perbaikan manajemen risiko, pengendalian internal, dan penyediaan layanan yang bebas dari praktik korupsi. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan ZI ≥75: Ini adalah angka PTKN yang telah diukur dan skor penilaian Pembangunan Zona Integritas-nya mencapai minimal 75 (atau lebih tinggi), yang menunjukkan komitmen signifikan terhadap Reformasi Birokrasi, WBK, dan WBBM.<br>(b) = Total Jumlah PTKN yang Wajib Melaksanakan Pembangunan ZI: Ini adalah keseluruhan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UIN, IAIN, STAIN, dll.) yang masuk dalam cakupan target pembangunan Zona Integritas. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas ≥ 75.<br>b. Total Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Wajib Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTKN.<br>- Survei dan Penilaian Mandiri (Internal) Pembangunan ZI oleh PTKN.<br>- Evaluasi dan Penilaian Eksternal Pembangunan ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atau Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Agama/ Kementerian terkait.<br>- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kualitas Pelayanan Publik. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis PTKN: UIN (Universitas Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), atau PTKN lainnya.<br>- Berdasarkan Status Penetapan ZI: Belum Diusulkan, Diusulkan WBK, Ditetapkan WBK, Ditetapkan WBBM.<br>- Berdasarkan Wilayah: Provinsi/Regional. |
| 11 | Level Estimasi | - Tingkat Kementerian Agama (agregasi nasional seluruh PTKN).<br>- Dapat diturunkan hingga tingkat individu PTKN sesuai hasil penilaian Zona Integritas. |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa |
| 3 | Konsep/Definisi | Ukuran kinerja yang mencerminkan peningkatan kualitas dan kematangan layanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam memproses pengadaan barang/jasa. Peningkatan layanan ini diukur melalui perbandingan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ dari tahun berjalan terhadap skor tahun sebelumnya. Semakin tinggi skor, semakin matang dan prima layanan pengadaan yang diselenggarakan. |
| 4 | Interpretasi | Nilai persentase yang positif menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan pengadaan, yang meliputi kecepatan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Peningkatan ini selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi. Jika persentase negatif atau stagnan, ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap manajemen risiko, SDM, dan tata kelola pengadaan di lingkungan UKPBJ. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase Peningkatan = (((Tn) - (Tn−1)) / (Tn−1)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>- Nilai Indeks UKPBJ Tahun Berjalan (Tn): Nilai evaluasi kualitas layanan pengadaan barang/jasa (seringkali menggunakan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan/ITKP atau Tingkat Kematangan UKPBJ) pada periode yang sedang dilaporkan.<br>- Nilai Indeks UKPBJ Tahun Sebelumnya (Tn−1): Nilai evaluasi yang sama pada periode tahun sebelumnya, digunakan sebagai basis perbandingan.<br>* 100%: Digunakan untuk mengubah hasil perubahan menjadi bentuk persentase, yang menunjukkan seberapa besar kenaikan (atau penurunan) kualitas layanan pengadaan dibandingkan tahun lalu. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Berjalan (Tn).<br>b. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Sebelumnya (Tn−1). |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pelaksanaan Survei dan Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ.<br>- Evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Penilaian Kematangan UKPBJ oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).<br>- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan.<br>- Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Digitalisasi Layanan Pengadaan (LPSE). |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Kriteria Penilaian ITKP/Kematangan (misalnya, Aspek Kebijakan, Aspek Proses Bisnis, Aspek SDM, Aspek Kelembagaan).<br>- Berdasarkan Jenis UKPBJ (Pusat/Daerah/Perguruan Tinggi). |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80 |
| 3 | Konsep/Definisi | Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rerata Nilai = (a) / (b)<br><br>Keterangan<br>(a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/ kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih.<br>(b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.<br>b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/ Teknis Kepemimpinan).<br>- Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus).<br>- Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor Numerik (0-100) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu.<br>- Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis.<br>- Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu. |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>'- Unit Eselon I atau Satuan Kerja |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80 |
| 3 | Konsep/Definisi | Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Rerata Nilai = (a) / (b)<br><br>Keterangan<br>(a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/ kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih.<br>(b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.<br>b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/ Teknis Kepemimpinan).<br>- Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus).<br>- Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor Numerik (0-100) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu.<br>- Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis.<br>- Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu. |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>'- Unit Eselon I atau Satuan Kerja |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online |
| 3 | Konsep/Definisi | Rasio yang mengukur proporsi total koleksi perpustakaan (berbentuk e-book, e-journal, hasil penelitian, atau dokumen digital lainnya) yang dimiliki oleh unit perpustakaan Kementerian Agama dan telah tersedia, terindeks, dan dapat diakses secara penuh (full-text) atau sebagian oleh pengguna/masyarakat melalui platform daring (online), seperti repositori, e-library, atau aplikasi khusus. |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah bertransformasi secara digital, mampu memberikan akses yang luas, mudah, dan merata terhadap kekayaan intelektual dan literasi keagamaan kepada publik. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa banyak koleksi digital masih tersimpan secara lokal (offline) atau belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akses publik online. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara Online: Ini adalah hitungan (count) dari e-book, e-journal, atau dokumen digital lain yang dimiliki perpustakaan Kemenag dan sudah tersedia serta dapat diakses penuh melalui platform atau repositori online (seperti ELIPSKI).<br>(b) = Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki: Ini adalah seluruh hitungan (count) koleksi digital yang sudah dimiliki oleh perpustakaan Kemenag, termasuk yang mungkin masih tersimpan secara offline atau belum terindeks. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara Online (Terindeks dan Tersedia di Platform Daring).<br>b. Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki (Termasuk yang belum diakses online). |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Akuisisi, Digitalisasi, dan Pengemasan Ulang (Repackaging) Koleksi Perpustakaan.<br>- Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Perpustakaan Digital (E-Library/Repository).<br>- Kegiatan Metadata Entry dan Indeksasi Koleksi.<br>- Pelaporan Kinerja Layanan Perpustakaan. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Koleksi: E-book, E-Journal, Laporan Penelitian, Karya Ilmiah Dosen/ Mahasiswa.<br>- Berdasarkan Sektor Keagamaan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.<br>- Berdasarkan Unit Pengelola: Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Balai Litbang Diklat. |
| 11 | Level Estimasi | - Nasional<br>'- Satuan Kerja |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Nilai Akreditasi Perpustakaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Nilai numerik hasil penilaian resmi yang diberikan oleh lembaga akreditasi perpustakaan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/Perpusnas) terhadap perpustakaan di lingkungan Kementerian Agama. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti koleksi, sarana/ prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM), dan pengorganisasian, untuk menentukan kualitas dan standar operasional perpustakaan. Nilai akreditasi mencerminkan status mutu perpustakaan (misalnya: A/Unggul, B/Baik, C/Cukup, atau Tidak Terakreditasi). |
| 4 | Interpretasi | Nilai akreditasi yang tinggi (misalnya nilai A atau B) menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah memenuhi standar nasional atau bahkan melampauinya, memiliki tata kelola yang baik, koleksi yang memadai, dan pelayanan yang prima. Nilai ini menjadi indikator penting kualitas infrastruktur pendukung pendidikan dan literasi di lingkungan Kemenag. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan signifikan pada aspek-aspek pengelolaan perpustakaan. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Nilai Akreditasi = Skor Akhir Penilaian (diambil langsung dari Sertifikat Akreditasi) |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | Nilai Akhir Akreditasi Perpustakaan yang Diberikan oleh Lembaga Akreditasi. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Pengajuan dan Persiapan Permohonan Akreditasi Perpustakaan oleh UPT/Satuan Kerja Kemenag.<br>- Asesmen Lapangan dan Penilaian oleh Asesor dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas).<br>- Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Penetapan Nilai oleh Lembaga Akreditasi. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Skor Numerik (Skala 0-100) atau Peringkat Mutu (A, B, C) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Berkala (3 - 5 Tahunan) sesuai masa berlaku akreditasi |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Jenis Perpustakaan: Perpustakaan Perguruan Tinggi (UIN/IAIN), Perpustakaan Sekolah (Madrasah), Perpustakaan Khusus (Litbang/Arsip).<br>- Berdasarkan Peringkat Mutu: A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), Belum Terakreditasi. |
| 11 | Level Estimasi | Satuan Kerja Perpustakaan |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Instansi – Unit Kerja Penghasil | Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal |
| 2 | Nama Indikator | Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan |
| 3 | Konsep/Definisi | Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam menyelesaikan penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan (termasuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan daerah, atau jenis peraturan lainnya) dalam periode waktu yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau rencana kerja sejenis |

| No | Atribut | Keterangan |
|---|---|---|
| 4 | Interpretasi | Nilai persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa lembaga tersebut sangat efektif dan efisien dalam manajemen proses legislasi/regulasi, dengan sedikit kendala atau penundaan. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan, koordinasi antar instansi, dan kepatuhan terhadap jadwal kerja. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya masalah signifikan dalam proses legislasi, seperti penundaan, perubahan prioritas, atau kesulitan dalam mencapai konsensus. |
| 5 | Metode / Rumus Perhitungan | Persentase = ((a) / (b)) * 100%<br><br>Keterangan:<br>(a) = Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan Sesuai Perencanaan: Ini adalah jumlah peraturan (seperti RUU, RPP, atau Perda) yang telah berhasil disahkan/ditetapkan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Program Legislasi (Prolegnas/Prolegda) atau rencana kerja awal.<br>(b) = Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan: Ini adalah total keseluruhan jumlah rancangan peraturan yang ditargetkan atau dimasukkan dalam daftar prioritas untuk diselesaikan dalam periode waktu tertentu. |
| 6 | Nama Variabel Pembangun | a. Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan (disahkan/ditetapkan) dalam Periode Perencanaan.<br>b. Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan (ditargetkan) untuk Diselesaikan dalam Periode yang Sama. |
| 7 | Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | - Penyusunan program legislasi/peraturan.<br>- Penyusunan, pembahasan, dan finalisasi rancangan peraturan.<br>- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan. |
| 8 | Ukuran/Satuan | Persentase (%) |
| 9 | Waktu / Cut off Ketersediaan Data | Tahunan |
| 10 | Klasifikasi | - Berdasarkan Tingkat Peraturan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga<br>'- Berdasarkan Sektor/Bidang: Ekonomi, Sosial, Hukum & Keamanan, Pemerintahan Daerah, dan lain-lain<br>- Berdasarkan Jenis Program: Prolegnas Prioritas, Prolegnas Kumulatif Terbuka, Prolegda. |
| 11 | Level Estimasi | Nasional |
| 12 | Apakah indikator dapat diakses umum? | Tidak |
| 13 | Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya) | - |

- Halaman ini sengaja dikosongkan -